

2020

Laporan Tahunan
Annual Report



SPEARHEADING SUSTAINABILITY INITIATIVES IN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT



Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil kegiatan operasional, proyeksi usaha yang ditampilkan dalam bab analisis dan pembahasan manajemen, rencana, strategi, kebijakan serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan peraturan perundangundangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis.

Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perseroan serta lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin adanya hasil tertentu yang pasti tercapai berdasarkan informasi yang disajikan.

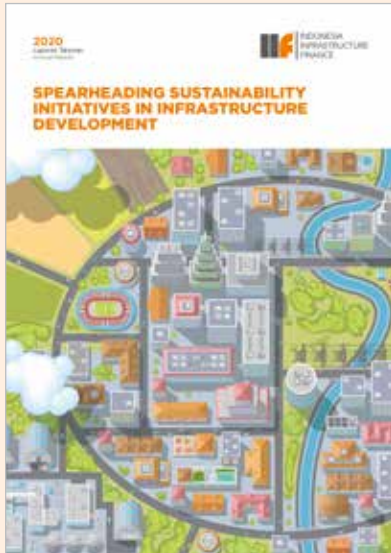
Laporan tahunan ini memuat kata “Perseroan” yang didefinisikan sebagai PT Indonesia Infrastructure Finance yang menjalankan bisnis di bidang pengembangan dan pembiayaan proyek infrastruktur yang layak secara komersial. Ada kalanya kata “IIF” dan “Perusahaan” juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Indonesia Infrastructure Finance secara umum.

Disclaimer

This Annual Report contains statements on financial conditions, operational results, projections on business presented in the management discussion and analysis chapter, plans, strategies, policies, as well as objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws and regulations, excluding historical matters.

Such statements are subject to prospective risks, uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results. Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events related to the Company and the business environment where the Company conducts its business. The Company offers no guarantee that all information presented herein will bring about specific results as expected.

This Annual Report also contains the word “Company”, hereinafter referred to as PT Indonesia Infrastructure Finance, as the company that operates business in the development and financing of commercially viable infrastructure projects. The word “IIF” and “the Company” are occasionally used to simplify and refer to PT Indonesia Infrastructure Finance in general.



SPEARHEADING SUSTAINABILITY INITIATIVES IN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Pandemi Covid-19 yang telah mengubah dunia merupakan suatu peringatan bagi masyarakat global untuk mengubah pendekatan “business as usual” menjadi suatu upaya yang lebih terarah dan terpadu untuk memastikan ketahanan dan kehidupan di masa mendatang. Pandemi ini juga telah menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan dan bentuk modal tak berwujud (*intangible*) dalam rangka menciptakan masyarakat yang makmur. IIF memimpin dalam hal pembangunan berkelanjutan, dan di tengah pandemi sepanjang tahun 2020 konsisten melanjutkan prinsip ini dalam penyaluran pembiayaannya sekaligus dalam layanan konsultansinya untuk mengembangkan sektor infrastruktur Indonesia. Dengan mandat yang diemban dari para pemegang sahamnya, IIF telah menjalankan strategi bisnisnya selaras dengan Tujuan Pembangunan Global PBB untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan, dan dengan demikian membuka jalan bagi generasi masa depan untuk bertumbuh dan berkembang.

The game-changing Covid-19 pandemic has been a wake up call for nations to change “business as usual” approach to a more determined and concerted effort towards ensuring resilience and future liveability. It has underscored the importance of sustainable development and intangible forms of capital in creating a prosperous society. IIF is leading in sustainable development, and amidst the pandemic of 2020 it consistently continued to champion this principles in providing financing and advisory services for building the nation’s infrastructure sector. As it shoulders the mandate from its shareholders, IIF has executed its business strategy in alignment with the UN SDGs to deliver lasting value to all stakeholders, paving the way for future generations to thrive.

Daftar Isi

Table of Contents

13

Laporan kepada Pemangku Kepentingan

Reports to Stakeholders

27

Profil Perusahaan

Company Profile

70

Tinjauan Unit Pendukung Bisnis

Overview on Business Support

Ikhtisar Kinerja 2020 2020 Performance Highlights

Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights	6
Informasi Saham Share Information	8
Peristiwa Penting Event Highlights	9

Laporan kepada Pemangku Kepentingan Reports to Stakeholders

Laporan Direksi Report of the Board of Directors	14
Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners	21

Profil Perusahaan Company Profile

Informasi Perseroan Company Information	28
Sekilas Perusahaan The Company at a Glance	29
Jejak Langkah Milestones	30
Visi dan Misi Vision and Mission	32
Kegiatan Usaha Business Activities	33
Portofolio IIF 2020 IIF's Portfolio in 2020	36
Lokasi Proyek Project Locations	38
Struktur Organisasi Organisation Structure	40

Profil Direksi Board of Directors Profile	41
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	51
Perubahan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris di 2020 Changes to the Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners	60
Profil Tenaga Kerja Workforce Profile	61
Komposisi Pemegang Saham Shareholding Structure	63
Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Subsidiaries and Associated Entities	66
Kronologi Pencatatan Saham Share Listing Chronology	67
Kronologi Pencatatan Obligasi Bond Listing Chronology	67
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions and Professionals	70
Penghargaan dan Sertifikasi Accolades and Certifications	70
Informasi pada Situs Web Perusahaan Information on the Company's Website	71

Tinjauan Unit Pendukung Bisnis Overview on Business Support

Sumber Daya Manusia Human Resources	74
Teknologi Informasi Information Technology	77

Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa System and Procedures for the Procurement of Goods and Services	80

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

Tinjauan Ekonomi Makro Overview of the Macroeconomy	84
Tinjauan Industri Pembiayaan Infrastruktur Infrastructure Financing Industry Overview	85
Tinjauan Bisnis Business Review	87
Tinjauan Operasional Berdasarkan Segmen Usaha Review of Operations by Business Segment	91
Tinjauan Keuangan Financial Review	96
Prospek Usaha 2021 2021 Business Prospect	105
Perbandingan Target dan Realisasi 2020 Comparison of Targets and Actual Achievements in 2020	107
Proyeksi 2021 2021 Projections	107
Pemasaran Marketing	108
Kebijakan Dividen Dividend Policy	109
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Use of Public Offering Proceeds	109

87

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

117

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

195

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi dan Restrukturisasi Utang/Modal 110
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, and Capital/Debt Restructuring

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan 110
Material Transaction Containing Conflict of Interest

Transaksi dengan Pihak Berelasi/Afiliasi 110
Transaction with Affiliated Parties

Perubahan Ketentuan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan 111
Changes in Laws and Regulations with Significant Impact

Perubahan Kebijakan Akuntansi 112
Changes in Accounting Policies

Informasi Kelangsungan Usaha 112
Information on Business Continuity

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan 118
Legal Basis of Corporate Governance Implementation

Prinsip Penerapan Tata Kelola Perusahaan 120
Corporate Governance Implementation Principles

Struktur Tata Kelola Perusahaan 121
Corporate Governance Structure

Direksi 122
Board of Directors

Dewan Komisaris 134
Board of Commissioners

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris 140
BoD–BoC Joint Meetings

Hubungan Afiliasi Direksi dan Dewan Komisaris 141
Affiliations of the BoC and BoD

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris 142
Committees Under the Board of Commissioners

Komite-Komite di Bawah Direksi 154
Committees Under the Board of Directors

Sekretaris Perusahaan 166
Corporate Secretary

Audit Internal 168
Internal Audit

Sistem Pengendalian Internal 172
Internal Control System

Audit Eksternal 173
External Audit

Manajemen Risiko 174
Risk Management

Perkara Penting 184
Material Litigations

Sanksi Administratif 184
Administrative Sanctions

Kode Etik dan Budaya Perusahaan 185
Code of Ethics and Corporate Culture

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen 188
Employee/Management Share Ownership Programme

Sistem Pelaporan Pelanggaran 188
Whistleblowing System

Akses Informasi dan Data Perusahaan 190
Access to Company Information and Data

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 190
Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Corporate Social and Environmental Responsibility

Praktik Standar Keberlanjutan bagi Proyek Infrastruktur 196
Sustainability Standards for Infrastructure Projects

Lingkungan 197
Environment

Praktik Ketenagakerjaan 199
Employment Practices

Pemberdayaan Masyarakat 201
Community Empowerment

Layanan kepada Konsumen 203
Services to Customers

Laporan Keuangan Financial Report





Ikhtisar Kinerja 2020

2020 Performance Highlights

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Highlights

Ringkasan Laporan Keuangan dan Rasio

Summary of Financial Statements and Ratios

dalam jutaan Rp/in Rp millions

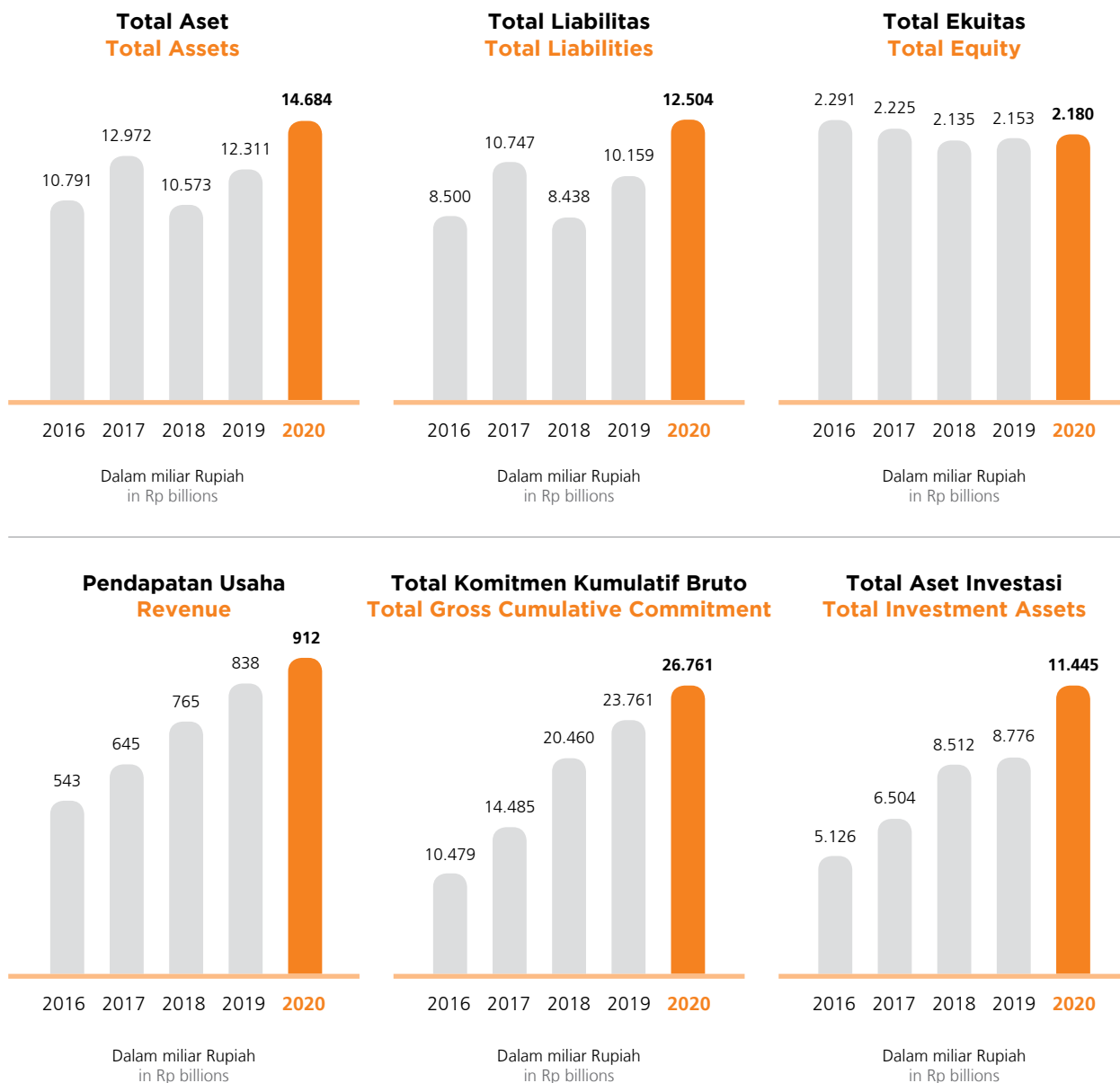
Uraian	2018	2019	2020	Description
Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position				
Kas dan Setara Kas	582.361	2.429.067	2.057.059	Cash and Cash Equivalents
Efek-efek	3.302.399	2.732.936	2.470.048	Securities
Investasi Saham	364.841	389.636	396.720	Equity Investments
Pinjaman Diberikan	5.888.949	6.406.211	9.441.375	Loans
Cadangan Kerugian Penilaian Nilai atas Pinjaman Diberikan	(167.560)	(173.549)	(243.889)	Allowance for Impairment Losses on Loans
Aset Pajak Tangguhan	79.159	86.735	83.270	Deferred Tax Assets
Lain-lain	523.086	440.024	479.789	Others
Total Aset	10.573.235	12.311.060	14.684.372	Total Assets
Utang Lain-lain dan Beban Masih Harus Dibayar	38.725	46.713	72.409	Other Payables and Accrued Expenses
Pinjaman Diterima	3.591.557	4.713.745	5.378.793	Fund Borrowings
Pinjaman Subordinasi	3.037.409	3.142.918	4.157.322	Subordinated Loans
Surat Utang yang Diterbitkan	1.725.765	2.183.064	2.735.233	Debt Securities Issued
Lain-lain	44.539	72.061	160.355	Others
Total Liabilitas	8.437.995	10.158.501	12.504.112	Total Liabilities
Modal Saham	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Capital Stock
Tambahan Modal Disetor	29.800	29.800	29.800	Additional Paid-in Capital
Pendapatan Komprehensif Lain – neto	(27.860)	5.336	45.389	Other Comprehensive Income – net
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas – neto	-	-	(93.760)	Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges – net
Keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai wajar – neto	-	-	25.647	Cumulative gain on derivative instrument for fair value hedges – net
Saldo Laba	133.300	147.175	173.184	Retained Earnings
Total Ekuitas	2.135.240	2.152.559	2.180.260	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	10.573.235	12.311.060	14.684.372	Total Liabilities and Equity

dalam jutaan Rp/in Rp millions

Uraian	2018	2019	2020	Description
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income				
Pendapatan	764.931	837.802	911.520	Revenues
Beban	(811.628)	(805.398)	(840.279)	Expenses
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak	(46.697)	32.404	71.241	Profit/(Loss) Before Tax Expenses
(Beban)/Manfaat Pajak	3.749	(16.428)	(28.731)	Tax (Expenses)/Benefit
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	(42.948)	15.976	42.510	Profit/(Loss) for the Year
Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain	(46.903)	1.343	(16.893)	Other Comprehensive Income/(Loss)
Total Laba/(Rugi) Komprehensif	(89.851)	17.319	25.617	Total Comprehensive Income/(Loss)
Laba/ (Rugi) per Saham Dasar (dalam ribuan Rupiah)	(21)	8	21	Earnings/(Loss) per Share Basic (in thousands of Rupiah)
Laporan Arus Kas Statement of Cash Flows				
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(390.744)	(454.075)	(2.825.683)	Net Cash Used in Operating Activities
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari/ (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(273.264)	436.475	322.320	Net Cash Provided by/(Used in) Investing Activities
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari/ (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(2.781.949)	1.851.753	2.152.771	Net Cash Provided by/(Used in) Financing Activities
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	3.965.964	582.361	2.429.067	Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	582.361	2.429.067	2.057.102	Cash and Cash Equivalents at End of the Year
Rasio Keuangan Financial Ratios				
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset	(0,41)%	0,14%	0,19%	Return On Assets
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas	(2,01)%	0,75%	2,01%	Return On Equity
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan	(5,61)%	1,82%	2,40%	Net Income Margin
Rasio Lancar	1,28×	1,41×	1,42×	Current Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	3,95×	4,72×	5,74×	Liabilities to Equity Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Aset	0,80×	0,83×	0,85×	Liabilities to Assets Ratio

Grafik Ikhtisar Data Keuangan Penting

Financial Highlight Charts



Informasi Saham

Share Information

Hingga akhir tahun 2020, IIF tidak mencatatkan sahamnya pada bursa efek manapun.

Sejak berdiri, IIF telah menerbitkan obligasi beberapa kali di BEI. Rincian mengenai obligasi tersebut disajikan pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan 2020 ini.

Up to the end of 2020, IIF had not listed its shares on any stock exchange.

Since its establishment, IIF has issued bonds in several times on the IDX. The details of these bonds are provided in the Company Profile chapter in this 2020 Annual Report.

Peristiwa Penting

Event Highlights

Pencapaian 2020

Achievements in 2020

- 
JANUARI
January

15

IIF berpartisipasi dalam fasilitas pinjaman sindikasi untuk membiayai proyek pembangkit listrik tenaga bayu 70 MW senilai USD50 juta.

IIF participated in a syndication term loan facility to provide financing for 70 MW wind farm power plant project amounting to USD50 million.
- 
FEBRUARI
February

24

IIF menandatangani mandat sebagai penasihat studi terkait prioritas, kapasitas pendanaan, dan pendanaan ekuitas alternatif untuk Jalan Tol Trans Sumatera.

IIF signed a mandate to act as advisor for study of prioritisation, funding capacity, and alternative equity funding for Trans Sumatera Toll Road.
- 
MEI
May

11

IIF menandatangani mandat untuk menyelenggarakan studi kelayakan finansial untuk LRT Jabodebek Jalur-5.

IIF signed a mandate to conduct financial feasibility study for Jabodebek LRT Line-5.
- 
JUNI
June

1

Tanggal efektif penandatanganan perjanjian pinjaman komersial dari ADB melalui SMI senilai USD 100 juta.

Effective date of commercial loan agreement from ADB through SMI of USD 100 million.

24

IIF memberikan *partial credit guarantee* senilai Rp277 miliar kepada PT Bali Towerindo Sentra dalam rangka penerbitan obligasi perdana senilai Rp554 miliar.

IIF provided partial credit guarantee of Rp277 billion to PT Bali Towerindo Sentra in regards to its first corporate bond issuance amounting to Rp554 billion.
- 
JULI
July

10

IIF menandatangani *Senior Term Loan Facility* untuk Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) Gresik senilai Rp420 miliar.

IIF signed the Senior Term Loan Facility for Gresik Water Supply System (SPAM) amounting to IDR420 billion.
- 
AGUSTUS
August

18

IIF menandatangani mandat untuk bertindak sebagai penasihat keuangan untuk penawar pada Proyek KPBU Pasokan Air Minum Regional Jatiluhur berkapasitas 4.750 liter per detik.

IIF signed a mandate to act as financial advisor for bidder side on 4,750-liter-per-second Jatiluhur Regional Drinking Water Supply PPP Project.



SEPTEMBER
September

8

IIF memperoleh fasilitas term loan sebesar Rp750 miliar untuk keperluan modal kerja dari bank swasta nasional.

IIF secured term loan facilities of Rp750 billion for working capital purposes from a national private bank.



OKTOBER
October

14

IIF mendapatkan izin dari OJK untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 di BEI dengan nilai pokok Rp1,5 triliun.

IIF was granted permit from OJK to list Shelf Registration Bond I Indonesia Infrastructure Finance Phase II Year 2020 with the amount of Rp1.5 trillion.

26

IIF menandatangani perjanjian penyediaan *senior term loan facility* dengan nilai hingga Rp500 miliar kepada satu perusahaan telekomunikasi.

IIF signed an agreement to provide a senior term loan facility totalling Rp500 billion to a telecommunication company.



NOVEMBER
November

13

IIF mengadakan kunjungan media ke kantor redaksi *Bisnis Indonesia* dan menyelenggarakan webinar bertajuk "Penerapan Aspek Sosial dan Lingkungan dalam Pembangunan Jalan Tol: Studi Kasus".

IIF conducted a media visit to Bisnis Indonesia's editorial team and broadcast a webinar entitled "Implementation of Social and Environmental Aspects in Toll Road Development: Case Study".

25

IIF menandatangani perjanjian *term loan facility* dengan satu bank swasta nasional di Indonesia dengan nilai pinjaman Rp1 triliun.

IIF signed a term loan facility agreement with a national private bank in Indonesia with a loan value of Rp1 trillion.

27

IIF menandatangani mandat untuk bertindak sebagai penasihat sisi pembeli dalam akuisisi proyek pembangkit listrik tenaga biogas 2 MW di Kalimantan.

IIF signed a mandate to act as buy-side advisor in an acquisition of 2-MW biogas power plant project in Kalimantan.



DESEMBER
December

11

IIF menandatangani perjanjian pinjaman sebesar Rp500 miliar untuk membiayai Integrated Industrial & Ports Estate sebagai kawasan industri dan pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia.

IIF signed a loan agreement of Rp500 billion to finance Integrated Industrial & Ports Estate as the first integrated industrial and port estate in Indonesia.

14

IIF mendapatkan pendanaan senilai Rp1 triliun dari satu bank nasional swasta Indonesia.

IIF secured funding with loan value of Rp1 trillion from a private national bank in Indonesia.



DESEMBER
December

15

IIF mengadakan webinar kedua bertema “Pembiayaan Sektor Energi Terbarukan - Partisipasi IIF Dalam Transisi Energi 2050”.

IIF held its second webinar themed “Financing Renewable Energy Sector – IIF’s Participation Towards Energy Transition 2050”.

17

IIF meluncurkan program *Euro Medium-Term Note* (EMTN) pertamanya senilai USD 500 juta di Bursa Efek Singapura yang mendapatkan peringkat “BBB” dari Fitch Rating.

IIF launched its first Euro Medium-Term Note (EMTN) Programme of USD 500 million on the Singapore Stock Exchange (SGX) which was rated “BBB” by Fitch Rating.

18

IIF menyediakan fasilitas pinjaman korporasi dengan batas maksimal Rp623 miliar kepada peminjam bersama untuk pengembangan di sektor telekomunikasi.

IIF menandatangani perjanjian untuk *senior term loan* dengan batas maksimal USD 16,5 juta untuk membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Aek Sibundong 2x4 MW di Sumatera Utara.

IIF provided a corporate loan facility with total limit up to Rp623 billion to joint borrowers for expansion in telecommunication sector.

IIF signed an agreement for a senior term loan facility with total limit up to USD 16.5 million to finance the construction of 2x4-MW Aek Sibundong Mini Hydro Power Plant in North Sumatra.

22

IIF menandatangani mandat untuk bertindak sebagai penasihat transaksi bagi pihak swasta untuk proyek KPBU pasokan air di Jakarta dan sekitarnya.

IIF signed a mandate to act as a transaction advisor for the private sector side for a water supply PPP project in Greater Jakarta Area.

23

IIF menandatangani perjanjian untuk fasilitas modal kerja bergulir dengan batas maksimal USD 5 juta dan Rp285 miliar untuk membiayai modal kerja proyek-proyek di Kalimantan.

IIF signed an agreement for a revolving working capital facility with total limit of up to USD 5 million and Rp285 billion to finance the working capital for projects in Kalimantan.

29

IIF menandatangani perjanjian *senior term loan facility* untuk membiayai aset operasi sistem penyediaan air minum yang eksisting.

IIF signed an agreement for a Senior Term Loan Facility to finance the existing operating asset of drinking water supply system.





Laporan Kepada Pemangku Kepentingan

Reports to Stakeholders

Laporan Direksi

Report of the Board of Directors

Reynaldi Hermansjah

Presiden Direktur & CEO
President Director & CEO

Pemangku kepentingan yang terhormat,

Dengan penuh rasa syukur, saya mewakili Direksi IIF dengan ini melaporkan perjalanan kami selama ini, seiring kami memandang tahun 2020 yang baru saja kita lewati—tahun yang begitu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di kehidupan kita. Tahun lalu, dunia sangat tersentak seiring kita semua sebagai masyarakat global menghadapi tantangan dahsyat yang memaksa pelaku usaha dan individu untuk beradaptasi dengan era “kebiasaan baru” akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Meskipun lebih baik dibandingkan sebagian besar negara G20 di 2020, pertumbuhan PDB Indonesia mengalami kemunduran untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan Asia tahun 1997-98. Banyak sektor ekonomi terpukul parah oleh pandemi.

Distinguished stakeholders,

It is with gratitude that I, on behalf of the Board of Directors (BoD) of IIF, hereby present to you the journey that we undertook, as we look back and reflect on 2020. It was a year quite unlike any other in living memory. A year when the world was brought heavily jolted, when our fragilities as a global society were exposed, when businesses and individuals alike were forced to adapt to a “new normal” by the prolonged Covid-19 pandemic.

Despite excelling in comparison to most of the G20 countries in 2020, Indonesia's GDP growth took a U-turn for the first time since the 1997–98 Asian financial crisis. Numerous economic sectors were hit hard by the pandemic and its repercussions.

Pertumbuhan Aset Investasi Investment Assets Growth

▲
30%

Rp11.4
triliun/trillion



Beberapa sektor yang mengandalkan pergerakan orang—transportasi, energi, ritel, pariwisata, dan perhotelan—terdampak paling parah. Sektor infrastruktur tidak terkecuali: langkah-langkah pembatasan sosial berskala besar di tahun 2020 menyebabkan tertundanya proyek-proyek yang sudah berjalan dan yang masih dalam proses. Pemerintah, sambil tetap berfokus pada infrastruktur sebagai landasan pembangunan nasional jangka panjang, telah meluncurkan berbagai upaya serius untuk mengatasi Covid-19, melalui strategi Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilaksanakan secara cepat dan komprehensif.

Sectors that relied on the movement of people—transportation, energy, retail, tourism and hospitality, to name a few—were the ones most severely affected. The infrastructure sector was no exception: large-scale social distancing measures and movement restrictions enforced in 2020 caused operational delays both in projects already underway and those still in the pipeline. While the Government remained strongly focused on infrastructure as the cornerstone of long-term national development, mounting a prompt and all-out response to Covid-19 the Government had initiated pandemic-mitigation initiatives through National Economic Recovery.

Strategi, Tantangan, dan Kinerja

Menghadapi tantangan yang telah menyebabkan kemunduran ini, IIF terus bergerak maju dengan konsisten dan bijak dalam menjalankan strategi untuk melanjutkan *turnaround* yang IIF jalani di 2019. Strategi ini terus membawa kemajuan berarti bagi kami di 2020, sebagaimana di 2019. Strategi kami telah menegaskan bahwa pertumbuhan berkelanjutan dapat diraih melalui diversifikasi holistik. Karena itulah kami memperluas bauran pendanaan sekaligus memperlebar spektrum pembiayaan infrastruktur kami.

Strategi kami berlandaskan pada prinsip sosial dan lingkungan (SEP) IIF sebagai intinya, sebagai cerminan komitmen teguh IIF terhadap pembangunan berkelanjutan. Apa yang kami bangun saat ini tak hanya akan bermanfaat bagi generasi sekarang, tetapi juga akan menjadi warisan yang layak dan langgeng bagi generasi masa depan, dan tidak menghilangkan kesempatan mereka untuk tumbuh. Sejak awal, IIF telah memelopori implementasi nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Kami bangga mempertahankan keunggulan ini di industri dengan memastikan keberlanjutan proyek dalam portofolio kami senantiasa menjunjung tinggi SEP. Terlebih lagi, SEP membuat kami unggul di mata klien dan pemangku kepentingan, seiring kami juga melibatkan mereka dan membantu mereka mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam proses bisnis dan proyek pembangunan mereka.

SEP kami terbukti bermanfaat dalam mendukung keberagaman sumber pendanaan kami. IIF dipercaya oleh investor pasar modal: kami berhasil membukukan Rp1,5 triliun dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II di bulan Oktober 2020. Total dana yang kami peroleh melalui aksi korporasi penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019-2020 ini mencapai Rp3 triliun. Dengan sumber pendanaan yang lebih stabil ini, kami dapat menurunkan biaya dana kami, dari 5,82% pada 2019 menjadi 4,89% pada 2020, melampaui target kami yakni sebesar 5,41%. IIF juga memperluas sumber pendanaannya dengan memasuki pasar global melalui peluncuran Program Euro Medium Term Note (EMTN) senilai USD 500 juta di Bursa Efek Singapura (SGX).

Dari sisi pembiayaan, kami melanjutkan strategi diversifikasi dengan memasuki sektor-sektor pembangunan infrastruktur yang baru. Di 2020, sejalan dengan amanat dari pemangku kepentingan, menjelang akhir tahun IIF menandatangani satu perjanjian pembiayaan infrastruktur kawasan industri. Perjanjian ini menjadi tonggak sejarah, karena IIF berhasil memperluas cakupan sektor infrastruktur yang dibiayainya. Secara total, di tahun 2020 kami menandatangani 7 perjanjian baru dengan komitmen

Strategy, Challenges, and Performance

Against this immensely challenging setback, IIF strived ahead by consistently and tactfully executing the strategy formulated to amplify our turnaround in 2019. This strategy continued to deliver meaningful results to our progress in 2020, just as it had in 2019. Our strategy underscores our conviction that sustainable growth in the business is assured through holistic diversification: continuously expand our funding mix and at the same time extend projects variety of our infrastructure financing.

At the heart of this strategy is our social and environmental principles (SEP), which reflect our tenacious commitment to sustainable development. We believe that what we build today not only providing utility to the present generation, but also creating a lasting legacy for posterity, instead of depriving them of their own opportunity to grow. IIF has been a pioneer in championing environmental, social, and governance (ESG) values in infrastructure financing in Indonesia since its establishment. We proudly maintain our industry-wide prominence in advocating these values to ensure the sustainability of the projects in our portfolio. Our SEP continue to provide us with a leading edge in the eyes of our clients and stakeholders, as we simultaneously engage them and assist them in integrating these principles into their business processes and development projects.

Evidently, Our SEP are advantageous in supporting our diversified funding sources. IIF continued to gain the trust of investors in the capital market: we managed to book Rp1.5 trillion from the issuance of the second phase of Shelf-Registration Bond I Phase II in October 2020. This corporate action brought the total value obtained through Shelf-Registration Bond I Phase I in 2019–20 to Rp3 trillion. Consequently, with this more stable source of funding, we could reduce our cost of fund further from 5.82% in 2019 to 4.89% in 2020, exceeding our target of 5.41% for this year. Furthermore, IIF has expanded its funding sources by entering into global market through the launch of Euro Medium-Term Note (EMTN) Program of USD 500 million in Singapore Stock Exchange (SGX).

Meanwhile, on the financing front, we proceed with our diversification strategy by penetrating to new sectors of infrastructure development. In 2020, aligned with the mandate we received from our stakeholders, IIF started to penetrate new infrastructure market, nearing the end of 2020, IIF signed one industrial estate infrastructure financing deal. This deal marked a milestone for us, as IIF successfully expanded our scope beyond the existing infrastructure sectors. In total, in 2020 we acquired 7 new

yang dibukukan mencapai Rp2,88 triliun. Pada akhir tahun 2020, kami memiliki 46 klien, dengan sebagian besar portofolio pembiayaan kami saat ini berada di sektor kelistrikan, jalan, dan telekomunikasi.

Pentingnya diversifikasi untuk memastikan keberlanjutan bisnis IIF semakin disoroti dengan munculnya pandemi Covid-19, yang membuat banyak perusahaan dengan bisnis yang solid harus gulung tikar atau menghadapi kesulitan dalam membayar utang. Ini mendorong OJK menggelar program restrukturisasi utang berskala besar agar dunia usaha dapat bertahan. Prospek memburuknya utang tentu saja menjadi tantangan terberat yang harus IIF hadapi di 2020. Namun klien kami berasal dari berbagai sektor, sehingga kondisi kami tetap kuat. Mencermati postur keuangan klien dan kesulitan yang mereka hadapi saat ini, IIF hanya perlu melakukan restrukturisasi utang dengan beberapa klien, terutama yang bisnisnya terkait transportasi. Ini berhasil kami lakukan tanpa mengalami peningkatan substansial dalam profil risiko sepanjang 2020.

Selama masa-masa sulit ini, IIF terus menopang bisnis klien dengan menghadirkan produk pembiayaan baru yang dirancang untuk secara optimal mengatasi tantangan dari pandemi. Di 2020, sebagai bagian dari inisiatif bantuan pandemi, IIF menawarkan pendanaan penghubung (*bridging financing*) untuk mendukung arus kas klien. Dan melalui *Credit Guarantee Facility* (CGF) yang kami luncurkan di 2020, kami menciptakan *leverage* bagi klien untuk mencari pembiayaan dari pasar modal.

Semua ini dapat dicapai, terlepas dari pandemi dan protokol jarak sosial yang terjadi, berkat beberapa tatanan baru yang signifikan yang kami terapkan pada operasi kami. Fokus IIF selama pandemi adalah memastikan kesejahteraan karyawan. Dengan menerapkan skema bekerja dari rumah, kami perlu memastikan bahwa karyawan terus bekerja secara efisien dan produktif. Kami bangga melihat setiap karyawan dapat cepat beradaptasi dengan skema baru ini, sehingga periode transisi berjalan lancar tanpa gangguan berarti pada alur kerja kami. Hal ini menunjukkan kelincahan, fleksibilitas, dan kesiapan kami untuk menghadapi masa depan.

Upaya kami juga dimungkinkan oleh sistem dan infrastruktur TI kami, yang telah kami bangun dan perkuat selama bertahun-tahun sebagai bagian dari inisiatif transformasi digital kami. Sistem TI kami bertindak sebagai tulang punggung untuk seluruh operasi kami, menyediakan semua layanan yang diperlukan kepada karyawan kami dengan cepat, aman, dan andal. Kami juga telah memanfaatkan infrastruktur TI kami secara efektif untuk memberdayakan karyawan kami untuk terus belajar dan berkembang secara profesional. Di tahun 2020

bookings with total commitments booked amounting to Rp2.88 trillion. By the end of 2020, we managed to rake in total of 46 clients, with a majority of our current financing portfolio in the electricity, road and telecommunication sectors.

The importance of diversification for ensuring IIF's business sustainability is highlighted by the spread of Covid-19. The pandemic forced many businesses to close and face difficulties in repaying their debts, prompting OJK to deploy a massive debt restructuring program to keep them afloat. The prospect of deteriorating debt, naturally, was the heaviest challenge IIF had to deal with in 2020. But as our clients come from a variety of sectors, IIF has limited exposure to a single sector. Upon a meticulous assessment of our clients' financial posture and their current predicament, we were obliged for OJK's debt restructuring program on a handful of clients, mainly in transportation-related businesses, without booking a substantial increase in our risk profile throughout 2020.

During these turbulent times we have continued to shore up our clients' ongoing businesses by coming up with new financing products that were designed to optimally address the challenges caused by the pandemic. In 2020, as part of our pandemic relief initiative, IIF offered bridging financing to provide support to clients' cashflow. Meanwhile, through the Credit Guarantee Facility (CGF) which we launched in 2020, we are creating a leverage for our clients in securing financing from the capital market.

All this was achievable, regardless of the pandemic and the social distancing protocols that ensued, partly due to some significant rearrangements we made to the way we operate. Our focus during the pandemic has been to ensure the wellbeing of our employees. With the work from home scheme in place, we had to make sure that our employees continue to work at an optimal level of efficiency and productivity. It was heartening to see how everyone adapted quickly to this new scheme, and the transition period went smoothly without any notable disruption to our workflow. This certainly showed the agility, flexibility, and future-readiness of our workforce.

Our endeavors were made possible by our IT systems and infrastructure, which we have been building and strengthening over the years as part of our digital transformation initiative. This initiative has ensured that our IT systems act as the backbone for our end-to-end operations, providing our employees with all the necessary services in a fast, secure, and reliable manner. We have also effectively utilized our IT infrastructure to enable and empower our employees to obtain lifelong learning and professional development. Furthermore, in 2020 IIF

IIF juga mulai menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan keterbukaan informasi penting sekaligus meningkatkan kesadaran tentang prinsip sosial dan lingkungan IIF kepada khalayak luas.

Inisiatif IIF di tahun 2020 membawa hasil yang menggembirakan. Meskipun perekonomian terkontraksi, IIF berhasil mencatat komitmen baru senilai Rp2,88 triliun, dan meningkatkan total aset sebesar 19% menjadi Rp14,68 triliun, sedikit di bawah target untuk tahun 2020 yang sebesar Rp15,00 triliun. Pendapatan mencapai Rp911,52 miliar, naik 9% dari tahun 2019 sebesar Rp837,80 miliar, meskipun masih di bawah target 2020 sebesar Rp1,11 triliun. Bauran pendanaan yang terdiversifikasi dengan baik dan biaya dana yang lebih rendah membuat kami dapat membukukan laba bersih senilai Rp42,51 miliar, meningkat 166% dari Rp15,98 miliar pada tahun 2019, meskipun masih di bawah target 2020 sebesar Rp52,31 miliar.

Upaya setiap pihak di IIF sepanjang 2020 telah berhasil mempercepat pertumbuhan. Prestasi kami di 2020 adalah menjaga pergerakan di sepanjang lintasan pertumbuhan yang telah menjadi target kami sejak awal *turnaround* di 2019, sekaligus memberikan momentum untuk mempertahankan pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang, yang dimulai dengan *rebound* di tahun 2019.

Prospek Bisnis

Covid-19 telah menjadi peristiwa langka yang mengubah tatanan perekonomian global dan membawa perubahan besar dalam berbagai industri, baik positif maupun negatif. Namun demikian, di sektor infrastruktur, perubahan membutuhkan waktu yang panjang. Perspektif yang tepat untuk menilai masa depan infrastruktur adalah perspektif jangka panjang. Efek pandemi mungkin sangat terasa selama beberapa waktu, tetapi setelah bertahun-tahun bahkan dekade dilalui, dampaknya sebagian besar akan berkurang.

Infrastruktur telah dan akan terus menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Sejalan dengan upaya Indonesia memberantas kemiskinan, mengangkat indeks pembangunan manusia, dan menjadi ekonomi lima besar di 2050, infrastruktur akan berperan penting dalam menghadirkan efek berganda.

Infrastruktur dewasa ini selalu menjadi sektor prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan dengan adanya 201 Proyek Strategis Nasional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi saat ini, perkembangan sektor infrastruktur Indonesia sangat pesat. Banyak pemain sektor publik dan swasta telah masuk dalam beberapa

started to engage social media platforms as an approach to disseminate information while raising awareness about our social and environmental principles to wider audience.

IIF's initiatives across the board in 2020 have brought encouraging results. Despite a contraction in the economy, we managed to record Rp2.88 trillion in new commitments, and increase our total assets by 19% to Rp14.68 trillion, slightly below our target for the year of Rp15.00 trillion. Our revenue stood at Rp911.52 billion, up 9% from 2019's figure of Rp837.80 billion while below our target of Rp1.11 trillion for 2020. A well-diversified funding mix and a lower cost of fund allowed us to book net profit of Rp42.51 billion, a 166% increase from Rp15.98 billion in 2019, although lower than our 2020 target of Rp52.31 billion.

All the efforts that everyone at IIF mustered in 2020 have successfully bolstered our pace of progress. Our 2020 results have kept us moving along the growth trajectory which we had envisioned at the start of our turnaround. These results have given us the momentum to maintain a robust, sustainable growth in the years ahead, beginning with our 2019 rebound.

Business Prospects

Covid-19 has proven to be a once-in-a-century event that upended the global economy and marked an irreversible change across various industries—some for the better, others for the worse. Nevertheless, in the infrastructure sector, progress is measured along an extended timeline. The fitting perspective to take as we peer into the future of infrastructure is a long-term one. The pandemic's effects may be acutely felt for some time, but over the span of years and decades, its impact would be largely attenuated.

Infrastructure has been, and will continue to be, the linchpin of national development in Indonesia. As Indonesia aims to eradicate poverty, raise its human development index, and emerge as a top-five economy in 2050, infrastructure will play a vital role in delivering a multiplier effect.

Consistently named a top-priority sector in the National Budget, and with 201 National Strategic Projects currently listed to accelerate economic growth, Indonesia's infrastructure sector is blossoming. Many public and private sector players have entered the field in recent years through various project financing schemes. As a catalyst

tahun terakhir melalui berbagai skema pembiayaan proyek. Sebagai katalisator pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada keberlanjutan di Indonesia, IIF akan mengikuti rencana jangka panjangnya dan bertindak dengan penuh optimisme memandang masa depan. Peluang yang menanti di cakrawala sangatlah besar. Kami akan berupaya memanfaatkan peluang tersebut untuk menciptakan nilai yang berarti, bagi kami dan para pemangku kepentingan.

Penerapan Good Corporate Governance

Sepanjang 2020, IIF terus memastikan kepatuhannya terhadap semua peraturan yang berlaku serta arahan dari pihak otoritas. Kami memupuk prinsip dan nilai tata kelola perusahaan pada seluruh karyawan, serta mewajibkan mereka menjunjung tinggi prinsip tersebut dalam setiap tindakan. Kami juga memiliki mekanisme ketat untuk memastikan bahwa setiap masalah tata kelola perusahaan dapat ditangani secara menyeluruh dan respons yang tepat dapat diberikan saat terjadi peningkatan risiko atau gangguan dalam proses bisnis. Pada tahun 2020, di tengah pemburuan piutang, IIF berhasil menjaga NPL pada tingkat yang dapat dikelola yakni 0,4%, berkat tindakan dini dan berkelanjutan yang kami ambil untuk meninjau kualitas pinjaman para klien kami secara berkala, dengan menerapkan praktik manajemen risiko terbaik internasional.

Komunikasi antaranggota Direksi tetap terjaga dengan baik, dan kami menjalin hubungan produktif dengan Dewan Komisaris dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris melalui rapat gabungan yang dilakukan secara berkala selama 2020. Dalam menangani masalah tertentu, Direksi berdiskusi intensif dengan komite-komite di bawah Direksi yang telah melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan masing-masing. Meskipun pembatasan jarak sosial mengharuskan sebagian besar rapat dilakukan secara virtual, komunikasi kami terus berjalan dengan lancar tanpa gangguan.

Perubahan Komposisi Direksi

Pada tahun 2020 terjadi perubahan pada komposisi Direksi. Harold Jonathan Tjiptadadja dan Hilda Savitri yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelaksana & CIO, mengakhiri masa bakti masing-masing pada 31 Januari 2020 dan 15 Mei 2020. Posisi mereka digantikan pada 30 Juni 2020, dengan diangkatnya Mohammad Ramadhan Harahap dan Y. Bayu Wirawan, keduanya sebagai Direktur Pelaksana & CIO. Mewakili Perseroan, kami menyambut dengan hangat dan berharap dapat menjalin kerja sama yang solid di tahun-tahun mendatang.

for sustainability-oriented infrastructure development in Indonesia, IIF will follow its long-term plan and fine-tune its action as it looks ahead with optimism. Ours is a horizon of immense possibilities. We will ensure that we do whatever it takes to turn those possibilities into opportunities to create meaningful value, for us and our stakeholders.

Good Corporate Governance Implementation

Throughout 2020 IIF persistently maintained compliance with all prevailing regulations and abides the directives of the competent authorities. We continued to foster the principles and values of corporate governance in all employees and obliged them to uphold these principles in every undertaking. Moreover, we have a rigorous mechanism to ensure that any corporate governance issue can be addressed thoroughly and a proper response can be mounted in any case of escalating risk or business process disruption. In 2020, amidst a climate of deteriorating debt, IIF managed to keep NPL at a manageable level of 0.4%, owing to the early and ongoing measures we took to regularly review our clients' debt quality. In this regard, we are implementing international best practices in risk management.

Communications were well maintained within members of the BoD, and had a productive rapport with the Board of Commissioners (BoC) and the committees under the BoC through joint meetings carried out on a regular basis over the course of 2020. In managing specific issues, the BoD held intensive discussions with the committees under the BoD, which had duly performed their duties according to their respective remits. Although social distancing measures required most meetings to be done virtually, the efficacy of communication via such meetings was not compromised.

Changes to BoD Composition

In 2020 we have seen changes in the BoD composition. Harold Jonathan Tjiptadadja and Hilda Savitri who previously served as Managing Director & CIO, ended their terms of service on 31 January 2020 and 15 May 2020, respectively. Their position are replaced on 30 June 2020, with the appointment of Mohammad Ramadhan Harahap and Y. Bayu Wirawan, both as Managing Directors & CIO. On behalf of the Company, we would like to extend a warm welcome and look forward to a solid teamwork in the upcoming years.

Susunan Direksi per 31 Desember 2020 dengan demikian menjadi sebagai berikut:

Presiden Direktur & CEO : Reynaldi Hermansjah
Direktur Pelaksana & CFO : Devi Pradnya Paramita
Direktur Pelaksana & CRO : I Made Wiracita Tantra
Direktur Pelaksana & CIO : Mohammad Ramadhan Harahap
Direktur Pelaksana & CIO : Y. Bayu Wirawan

The BoD composition as at 31 December 2020 is as follows:

President Director & CEO : Reynaldi Hermansjah
Managing Director & CFO : Devi Pradnya Paramita
Managing Director & CRO : I Made Wiracita Tantra
Managing Director & CIO : Mohammad Ramadhan Harahap
Managing Director & CIO : Y. Bayu Wirawan

Ucapan Terima Kasih

Direksi menyampaikan apresiasi kepada pemegang saham dan Dewan Komisaris atas dukungan, masukan, dan nasihat mereka yang sangat berharga bagi kami untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan IIF. Kami menghargai kerja keras, inisiatif, dan kegigihan yang ditunjukkan oleh seluruh karyawan kami di masa sulit ini. Dan kami berterima kasih kepada klien, mitra bisnis, regulator, dan semua pemangku kepentingan atas kepercayaan mereka yang telah memungkinkan kami menjalin kerja sama dan menghadirkan nilai tambah bagi bangsa.

Acknowledgments

The BoD extend their appreciation to the shareholders and the BoC for their unwavering support, input, and advice that have been valuable for us in to achieve an accelerated growth trajectory. We highly appreciate the hard work, initiative, and resoluteness shown by our workforce in these tough times. Finally, we thank our clients, our business partners, the regulators and all our stakeholders for their trust that has enabled us to work together and deliver value to the nation through our collective triumphs.

Atas nama Direksi PT Indonesia Infrastructure Finance,
On behalf of the Board of Directors of PT Indonesia Infrastructure Finance,



Reynaldi Hermansjah
Presiden Direktur & CEO
President Director & CEO

Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners



Darmin Nasution

Presiden Komisaris & Komisaris Independen
President Commissioner & Independent Commissioner

Para Pemegang Saham yang Terhormat,

Setelah melalui tahun 2020 yang sarat dengan peristiwa tak terduga, kami anggota Dewan Komisaris pada kesempatan ini berbesar hati untuk menyampaikan bagaimana IIF telah melalui berbagai tantangan dan mewujudkan kinerja yang memuaskan. Dalam laporan ini, kami juga membahas hasil-hasil pengawasan serta pemberian saran dan arahan dari kami terkait strategi yang telah dirumuskan oleh Direksi beserta langkah-langkah eksekusinya.

Di tahun 2020 dunia mengalami transformasi berskala besar, dengan perubahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan. Masyarakat global terpukul dengan berbagai bentuk pembatasan sosial yang diterapkan

Distinguished Shareholders,

After going through 2020, which brimmed with a series of events beyond our expectations, we, the members of the BoC, are glad to have the opportunity to convey how IIF has passed through a multitude of challenges and recorded a satisfactory performance. In this report, we will also discuss the results of our supervisory and advisory functions related to the strategy formulated by the BoD, as well as the measures involved in executing such strategy.

In 2020 the world experienced a transformation of vast proportions, with changes taking place in almost all aspects of life. Societies globally have been hit hard by the manifold forms of social distancing and

Pertumbuhan Laba Net Profit Growth

▲
1,66x

Rp42.5
miliar/ billion

oleh pemerintah masing-masing negara untuk menghadapi penyebaran pandemi Covid-19 yang sampai dengan saat ini masih sangat sulit dikendalikan. Perekonomian terutama industri dan jasa modern di hampir semua negara di dunia mengalami kontraksi. Indonesia pun mencatatkan resesi ekonomi untuk yang pertama kalinya sejak krisis finansial Asia tahun 1998. Akan tetapi, alih-alih mencatat hiperinflasi sebagaimana dua dekade silam, di tahun 2020 Indonesia justru mencatat laju inflasi yang terendah sepanjang sejarah.

Di tengah berbagai pembatasan sosial di Indonesia menyebabkan lemahnya kemampuan ekonomi masyarakat, akan tetapi hal ini juga semakin mempercepat terjadinya transformasi digital baik pada ranah korporasi maupun individual, seiring diberlakukannya skema bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Sementara aktivitas komersial secara fisik terganggu, transaksi di ranah digital justru meningkat berkali-kali lipat di era pandemi ini.

Sejalan dengan serangkaian upaya strategis untuk menyambut Revolusi Industri 4.0, pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menggaungkan pentingnya peran sektor infrastruktur untuk mendukung kemajuan di berbagai sektor ekonomi dan industri lainnya di Indonesia. Di tengah pandemi sekalipun, infrastruktur terus mendapatkan perhatian besar dari pemerintah, mengingat kebutuhan infrastruktur di seluruh negeri masih sangat besar. Oleh karena itu, IIF sebagai katalis pembangunan infrastruktur di Indonesia perlu terus memperkuat perannya dalam memastikan terciptanya masyarakat Indonesia yang berdaya saing dan berkeadilan.

Pandangan atas Pengelolaan Usaha dan Penerapan Strategi oleh Direksi

Di tahun yang sarat tantangan bagi sektor infrastruktur, kepemimpinan Direksi dalam membawa IIF mengarungi situasi bisnis yang penuh ketidakpastian dan risiko sepanjang 2020 ini patut diapresiasi. Dengan begitu cepatnya perubahan yang terjadi, Direksi mampu mengarahkan seluruh karyawan IIF untuk dapat bekerja secara produktif, dengan memanfaatkan berbagai perangkat yang dimungkinkan oleh teknologi, sementara melindungi karyawan semaksimal mungkin dari potensi penularan Covid-19.

Fleksibilitas dan kegigihan dari seluruh karyawan IIF dalam menyikapi cara kerja baru di tengah situasi pandemi ini membawa hasil yang sangat memuaskan. Industri infrastruktur di Indonesia mengalami perlambatan akibat dampak pandemi, menyebabkan turunnya kebutuhan pembiayaan investasi infrastruktur dan penurunan kualitas utang, seiring sejumlah debitur mengalami kesulitan dalam menjaga posisi kas yang positif. Namun demikian, IIF tetap dapat menunjukkan kinerja yang baik dengan

restrictions imposed by the government of each country, as they struggled to cope with the spread of the Covid-19 pandemic, which until now has been nigh impossible to fully contain. The economy, especially modern industries and services in almost all countries in the world, experienced a contraction. Indonesia also recorded its first economic recession since the Asian financial crisis in 1998. However, instead of experiencing hyperinflation as it did two decades ago, in 2020 Indonesia's inflation rate was the lowest in history.

In the midst of numerous movement restrictions in Indonesia, the people's economic capacity became weakened. Yet this has also accelerated the birth of digital transformation both among corporations and individuals alike, as the work from home and study from home schemes were adopted en masse. While commercial and physical activities have been severely disrupted, digital transactions have proliferated in this era of the pandemic.

In line with a series of strategic efforts to anticipate the Industrial Revolution 4.0, President Joko Widodo's administration continues to proclaim the essential role of the infrastructure sector to underpin progress in many other economic and industrial sectors in Indonesia. Even during the pandemic, infrastructure has continued to receive a substantial attention from the government, considering that infrastructure is a much-needed good throughout the country. Therefore, IIF as a catalyst for infrastructure development in Indonesia shall continue to reinforce its role in fostering a competitive and equitable Indonesian society.

View on Business Management and Strategy Implementation by the Board of Directors

In a year rife with challenges for the infrastructure sector, the BoD's leadership in delivering IIF through a business situation fraught with uncertainties and risks in 2020 has been commendable. With all the changes that have occurred rapidly, the BoD has managed to direct all IIF employees, enabling them to work productively, by utilising several technology-enabled tools, while protecting them as much as possible from the danger for Covid-19 transmission.

The flexibility and persistence of IIF employees in responding to the new ways of working in the midst of this dire situation of the pandemic has brought exceedingly satisfying results. The infrastructure industry in Indonesia has been experiencing a slowdown as impacted by the pandemic, leading to a decline in the demand for infrastructure investment financing and a deterioration of debt quality, as many borrowers have had difficulty maintaining a positive cash flow. However, IIF continued

tetap menyalurkan pembiayaan secara bijak, berhati-hati, dan terdiversifikasi, sambil berpartisipasi dalam program restrukturisasi kredit yang diluncurkan OJK untuk menanggulangi krisis sedini mungkin.

Kendati selama tahun 2020 dunia disibukkan oleh upaya untuk memerangi Covid-19, perubahan iklim terus berlangsung. Semakin banyaknya bencana alam akibat perubahan iklim dari tahun ke tahun menunjukkan betapa pentingnya dunia untuk beralih dari cara bisnis yang seperti biasa menuju ke cara-cara baru yang lebih berkelanjutan, guna menghindari terjadinya krisis iklim yang lebih dahsyat. Karena itulah, kepada seluruh pemangku kepentingannya IIF terus menyerukan pentingnya berfokus pada pembangunan infrastruktur yang berwawasan keberlanjutan. Ini sejak awal telah menjadi karakteristik utama dari strategi IIF, dengan penerapan nilai-nilai Sosial & Lingkungan (*Social & Environmental—S&E*) di semua proyek infrastruktur yang IIF biayai, baik di tahun 2020 maupun di tahun-tahun sebelumnya.

Atas eksekusi strategi bisnis yang tepat dan disiplin di sepanjang tahun 2020, serta kesiapan Direksi untuk menerapkan langkah-langkah secara terpadu dan terarah untuk menyesuaikan bisnis IIF dengan kondisi bisnis yang dijumpai di lapangan, IIF tetap mampu menyalurkan pembiayaan secara solid yang mencapai Rp11,44 triliun, serta membukukan laba bersih sebesar Rp42,51 miliar di tahun 2020, dan bahkan dengan biaya dana yang lebih rendah dibandingkan di 2019. IIF terus memberikan dampak positif yang optimal terhadap kemajuan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Atas prestasi tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik di tahun 2020.

Pandangan atas Prospek Usaha dan Strategi ke Depan

Berbagai prestasi yang telah IIF raih di 2020 telah memberikan dasar yang kuat untuk dapat memanfaatkan berbagai kesempatan yang akan hadir untuk mewujudkan hasil-hasil yang lebih baik lagi di masa mendatang. Meskipun tantangan dan risiko yang dihadirkan oleh pandemi Covid-19 ini masih terus berlangsung, bahkan dengan adanya kemajuan dalam produksi dan distribusi vaksin Covid-19 sekalipun, sektor infrastruktur di Indonesia masih menyimpan potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi nasional.

Menyikapi kondisi dan peluang tersebut, Direksi telah menyusun prospek usaha dan strategi yang telah dan akan IIF tempuh di tahun 2021 dan selanjutnya. Strategi bisnis IIF akan ditopang terutama oleh upaya diversifikasi

to demonstrate an excellent performance by distributing its financing products judiciously and prudently across a diversified range, while also participating in the credit restructuring program launched by OJK to tackle the crisis as early as possible.

Even though during 2020 all around the world we had our hands full with the efforts to combat Covid-19, climate change continued largely unabated. The escalating frequency of natural disasters due to climate change from one year to the next has shown how crucial it is for the world to move away from business as usual to new, more sustainable ways of doing business, for the sake of avoiding a more devastating climate catastrophe. For this reason, IIF keeps reminding all of its stakeholders of the importance of focusing on sustainable infrastructure development. This has been a key feature of IIF's strategy from our very start, with the application of Social & Environmental (S&E) values in every infrastructure project that IIF has financed, both in 2020 and in previous years.

We applaud the BoD for their tactful and disciplined execution of the 2020 business strategy, as well as their readiness to implement integrated and well-directed measures to adapt IIF's business to the prevailing conditions in the market. Thus IIF remained solidly capable of channelling financing, which reached Rp11.44 trillion, and posted a net income of Rp42.51 billion in 2020, and even at a lower cost of funds than that in 2019. IIF continues to deliver an optimum positive impact on the progress and equitable distribution of infrastructure development in Indonesia. For these achievements, the BoC views that the BoD has carried out its duties and functions impeccably in 2020.

View on Business Prospects and Future Strategies

The multiple achievements IIF have achieved in 2020 have provided a strong foundation to take advantage of the numerous opportunities that will present themselves, so that even greater results can be achieved in the future. Although the challenges and risks presented by the Covid-19 pandemic still remain, notwithstanding the progress in the production and distribution of the Covid-19 vaccines, the infrastructure sector in Indonesia still has enormous potential to grow and contribute to the betterment of the national economy.

In light of these conditions and opportunities, the BoD has formulated the business prospects and strategies that IIF has and will pursue in 2021 and beyond. IIF's business strategy will be bolstered primarily by efforts to diversify

ke sektor-sektor lain yang telah menjadi mandat IIF, sambil terus mempertahankan dan mendorong penerapan nilai-nilai S&E di setiap projek yang dibiayai.

Dewan Komisaris telah meninjau rencana bisnis yang telah dirancang oleh Direksi untuk tahun 2021 dan memandang bahwa sasaran-sasaran yang telah ditetapkan telah mempertimbangkan berbagai peluang dan faktor risiko yang ada, dan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan. Kami sepenuhnya mendukung setiap program yang telah dan akan dicanangkan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam rencana tersebut.

Pengawasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dewan Komisaris telah menjalin kerja sama yang baik dengan setiap komite di bawah Dewan Komisaris—yakni Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi (NRC), Komite Pemantau Risiko (ROC), dan Komite Investasi Dewan Komisaris (BOC-IC)—untuk memantau dan meninjau setiap aktivitas di IIF. Kami telah memastikan bahwa setiap aktivitas tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip dan praktik tata kelola yang baik yang bertaraf internasional. Mulai dari mitigasi risiko hingga praktik remunerasi, berbagai isu penting telah dibahas secara mendalam dan dilaporkan oleh komite-komite kepada Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020. Secara khusus, Dewan Komisaris juga telah menerima laporan rutin dari ROC mengenai penerapan sistem pelaporan pelanggaran di IIF.

Hubungan dan komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi terpelihara dengan baik sepanjang 2020, kendati diberlakukannya berbagai pembatasan fisik untuk membatasi penyebaran Covid-19. Dengan diselenggarakannya 11 kali rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2020, kami telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, terkait kebijakan strategis yang ditempuh. Dengan demikian, kami menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Direksi, IIF telah berhasil menjalankan bisnisnya dengan senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Di tahun 2020, komposisi Dewan Komisaris mengalami perubahan dengan masa jabatan Muhamad Al-Arif dan Rajeev Veeravalli Kannan berakhir masing-masing pada 19 Maret 2020 dan 12 Juni 2020. Selanjutnya, Ken Tomisaki dan Yon Aarsal diangkat sebagai Komisaris masing-masing pada tanggal 12 dan 22 Juni 2020, dan kemudian saya

into other sectors that have now become part of IIF's mandate, while continuing to maintain and encourage the application of S&E values in every project it finances.

The BoC has reviewed the business plan formulated by the BoD for 2021, and we believe that the targets that have been set for 2021 have taken into account the manifold opportunities and risk factors that exist, and thus they have been determined accountably. We wholeheartedly lend our support to every program that has been and will be launched to achieve such goals as planned.

Supervision of Good Corporate Governance Implementation

The BoC has established a strong rapport with every committee under the BoC—namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee (NRC), the Risk Oversight Committee (ROC), and the BoC Investment Committee (BOC-IC)—to monitor and review every activity taking place in IIF. We have ensured that each activity be in accordance with the applicable regulations and uphold the principles and international best practices of good governance. From risk mitigation to remuneration practices, various important issues have been discussed in depth and reported by the committees to the BoC throughout 2020. In particular, the BoC also received regular reports from the ROC regarding the implementation of the whistleblowing system at IIF.

The relationship and communication between the BoC and the BoD were well maintained throughout 2020, despite the various physical restrictions in place to limit the spread of Covid-19. By holding 11 joint meetings between the BoC and the BoD in 2020, we have carried out our duties and responsibilities of supervising and providing advice to the BoD regarding the strategic policies being pursued. Thus, we believe that under the leadership of the BoD, IIF has succeeded in running its business within the corridor of compliance and good corporate governance at all times.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

In 2020, the composition of the BoC underwent changes as the terms of office of Muhamad Al-Arif and Rajeev Veeravalli Kannan ended on 19 March 2020 and 12 June 2020, respectively. Subsequently, Ken Tomisaki and Yon Aarsal were appointed as Commissioners respectively on 12 and 22 June 2020, and then myself, Darmin Nasution,

sendiri, Darmin Nasution, sebagai Presiden Komisaris & Komisaris Independen pada 14 Juli 2020. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menerima mandat dari pemegang saham untuk memimpin Dewan Komisaris. Bersama seluruh anggota Dewan Komisaris, saya berharap dapat menghasilkan kinerja yang baik di tahun-tahun selanjutnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terkait berbagai hal di IIF.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris & Komisaris Independen	: Darmin Nasution
Komisaris Independen	: Sonny Loho
	Rinaldi Firmansyah
Komisaris	: Yon Aرسال
	Bhimantara Widyajala
	Lodewijk Govaerts
	Andreas Zeisler
	Richard Lyon Ranken
	Ken Tomisaki

was appointed as President Commissioner & Independent Commissioner on 14 July 2020. It has been a great honour for me to accept the mandate from shareholders to lead the BoC. Together with all members of the BoC, I hope to deliver an excellent performance in the following years in supervising and providing advice on various matters at IIF.

With these changes in place, the composition of the BoC as at 31 December 2020 was as follows:

President Commissioner & Independent Commissioner	: Darmin Nasution
Independent Commissioners:	: Sonny Loho
	Rinaldi Firmansyah
Commissioners	: Yon Aرسال
	Bhimantara Widyajala
	Lodewijk Govaerts
	Andreas Zeisler
	Richard Lyon Ranken
	Ken Tomisaki

Penutup dan Ucapan Terima Kasih

Kami Dewan Komisaris berterima kasih atas dukungan semua pemegang saham dan atas kinerja yang solid dari Direksi, manajemen, dan seluruh karyawan IIF. Kami juga berterima kasih kepada regulator dan semua pemangku kepentingan atas interaksi yang positif yang telah terbina selama ini. Bersama kami berharap dapat terus membangun bangsa Indonesia meraih kesejahteraan dan kemakmuran.

Acknowledgments

We, the BoC, are grateful for the support of all shareholders and for the solid performance of the BoD, management, and all employees. We also thank the regulators and all stakeholders for the positive interactions that we have been building with them so far. Together we hope to continue building this great Indonesian nation to achieve prosperity.

Atas nama Dewan Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance,
On behalf of the Board of Commissioners of PT Indonesia Infrastructure Finance,



Darmin Nasution

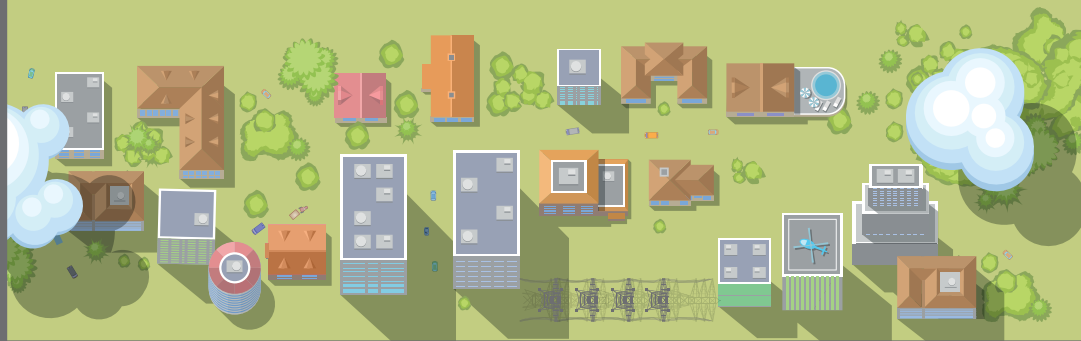
Presiden Komisaris & Komisaris Independen
President Commissioner & Independent Commissioner



INDONESIA
INFRASTRUCTURE
FINANCE



TURE



Profil Perusahaan

Company Profile

Informasi Perseroan

Company Information



Nama Perusahaan

Company Profile

PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)



Bidang Usaha

Line of Business

Pembiayaan Infrastruktur
Infrastructure Financing



Produk

Products

Produk Investasi (*fund-based* dan *non fund-based*) dan Advisory
Investment Products (*fund-based* and *non-fund-based*) and Advisory



Tanggal Berdiri

Date of Establishment

15 Januari 2010
January 15, 2010



Alamat Kantor Pusat

Head Office Address

Prosperity Tower 53rd-55th Floor
District 8, Sudirman Central Business District, Lot 28
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
T. +62 21 5082 6600
F. +62 21 5082 6601
E. info@iif.co.id
www.iif.co.id



Status Perusahaan

Company Status

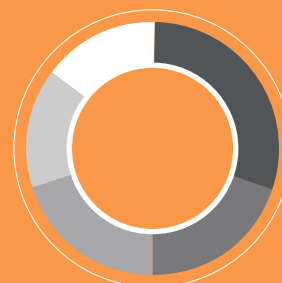
Perusahaan Swasta
Private Company



Komposisi Kepemilikan Saham

Share Ownership Composition

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) : 30,00%
- International Finance Corporation (IFC) : 19,99%
- Asian Development Bank (ADB) : 19,99%
- DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH : 15,12%
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) : 14,90%



Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Establishment

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No.100/2009 Tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Kepada PT Indonesia Infrastructure Finance.
- Akta Pendirian No. 34 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., selaku pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21503.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123.
- Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia (PMK) No. 100/2009 on Infrastructure Financing Companies.
- Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 dated 6 August 2010 on the Granting of Infrastructure Financing Company Business Permit to PT Indonesia Infrastructure Finance.
- Deed of Establishment No. 34 dated 15 January 2010, made before Aulia Taufani, S.H., substituting for Sutjipto S.H., Notary in Jakarta, and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree No. AHU21503.AH.01.01.Tahun 2010 dated 28 April 2010, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated 11 March 2011, Supplement No. 5123.

Sekilas Perusahaan

The Company at a Glance

Didirikan atas prakarsa dan inisiatif Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (ADB) dan lembaga multilateral lainnya, berdasarkan PMK No. 100 Tahun 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Berdiri tanggal 15 Januari 2010, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menjadi institusi keuangan non-bank nasional yang bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur, yang dikelola secara profesional dengan fokus investasi pada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

Selain bertujuan untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, IIF juga berupaya untuk menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. IIF menyediakan produk *fund-based* seperti pinjaman jangka panjang, produk *non-fund-based* seperti penjaminan serta layanan lainnya yang berkaitan dengan proyek infrastruktur.

Dalam operasinya, IIF menerapkan praktik terbaik berdasarkan standar internasional dalam pengelolaan kredit, manajemen risiko, dan semua aspek tata kelola perusahaan, serta menerapkan standar internasional untuk perlindungan sosial dan lingkungan dalam menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Didukung struktur permodalan yang kuat dari para pemegang saham serta pinjaman subordinasi jangka panjang dari Bank Dunia dan ADB, IIF memiliki dasar yang kuat untuk memberikan solusi pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur nasional.

IIF merekrut bakat-bakat terbaik di semua tingkatan untuk memberikan solusi terbaik untuk klien, sekaligus meningkatkan pengetahuan mengenai *project financing* yang belum sepenuhnya berkembang di pasar.

Sejak pendirian hingga akhir tahun 2020, IIF tidak pernah mengganti nama perusahaan.

The Company was founded on the initiatives of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the World Bank, Asian Development Bank (ADB), and other multilateral institutions, pursuant to the Regulation of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 100/2009 regarding Infrastructure Financing Companies. Established on 15 January 2010, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) has been serving as a national non-bank financial institution which is engaged in the field of infrastructure financing, and managed professionally with its investment focus on commercially-feasible infrastructure projects.

In addition to increasing private sector's participation in financing infrastructure development in Indonesia, IIF strives to become a catalyst in accelerating national infrastructure development. IIF provides an array of fund-based products, such as long-term loans, non-fund-based products, including guarantee, and other infrastructure-related services.

In its operations, IIF implements the best practice based on international standards in loan management, risk management, and all corporate governance aspects, in order to deliver excellent social and environmental protection as added values and to ensure the sustainability of infrastructure development in Indonesia.

Supported with robust capital structure from the shareholders as well as long-term subordinated loans from the World Bank and ADB, IIF has a strong foundation to provide financing solutions for national infrastructure development.

IIF strongly prioritises the recruitment of the best talents at all levels to deliver the best solution for all clients, while enhancing knowledge and skills regarding project financing, which may not be fully developed in the market.

Since its initial establishment up to the end of 2020, IIF has not changed its name.

Jejak Langkah Milestones

2010

SMI, IFC, ADB, dan DEG sebagai pemegang saham pendiri mendirikan IIF pada 15 Januari 2010.

IIF was established on 15 January 2010, with SMI, IFC, ADB, and DEG as its founding shareholders.

2011

Memperoleh pendanaan (*Subordinated Loan*) USD 100 juta dari Bank Dunia.

Received subordinated loan of USD 100 million from the World Bank.

2012-2013

- Membangun kapabilitas organisasi.
- Membangun kesadaran pasar/potensi pasar dan pengenalan terhadap produk.
- SMBC menjadi salah satu pemegang saham IIF.
- Menandatangani pinjaman komersial pertama senilai Rp500 miliar untuk proyek Jalan Tol Cipali.
- Developed organisational capabilities.
- Built market awareness & brand recognition.
- SMBC became one of IIF's Shareholders.
- Signed the 1st commercial loan with commitment of Rp500 billion for Cipali Toll Road project.

2014

- Menyelesaikan pengembangan organisasi dan kelembagaan.
- Meningkatkan kerangka dan platform manajemen risiko.
- Memperoleh Pendanaan IFC A/B sebesar USD 250 juta.
- Mencapai total aset sebesar Rp4,7 triliun dan komitmen investasi sebesar Rp2,5 triliun.
- Completed institutional and organisational development.
- Improved risk management platform and framework.
- Received IFC A/B Funding of USD 250 million.
- Reached total assets of Rp4.7 trillion and investment commitment of Rp2.5 trillion.

2017

- Menjadi *financial advisor* untuk proyek *Merger & Acquisition* (M&A) terbesar senilai USD 92,87 juta.
- Berpartisipasi dalam obligasi global pertama berdenominasi USD yang diterbitkan di Indonesia, *Komodo Bonds*, senilai Rp2 triliun, yang diterbitkan BUMN operator jalan tol.
- Menandatangani perjanjian kredit dengan Japan International Corporation Agency (JICA) sebesar JPY 8 miliar.
- Mendapat penghargaan dari IJGlobal untuk akuisisi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Chevron berkapasitas 227 MW di Jawa Barat.

2016

- Meraih peringkat idAAA dari Pefindo.
- Menjadi *Mandated Lead Arranger* untuk pertama kalinya dalam proyek KPBU IIF yang pertama.
- Menerbitkan obligasi perusahaan pertama senilai Rp1,5 triliun.
- Memperoleh pendanaan dari sindikasi bank asing senilai USD150 juta.
- Assigned idAAA rating from Pefindo.
- Acted as Mandated Lead Arranger for the first time for IIF's first PPP project.
- Issued the first corporate bond amounting to Rp1.5 trillion.
- Received funding from a syndication of foreign banks amounting to USD 150 million.

2015

- Meraih peringkat AAAidn dari Fitch Indonesia.
- Meningkatkan jumlah modal disetor menjadi Rp2 triliun dalam rangka memenuhi peraturan.
- Membentuk tim sindikasi.
- Melakukan penguatan *brand equity* IIF melalui partisipasi dalam konferensi Euromoney.
- Melaksanakan *stress test* portofolio.
- Meningkatkan kepatuhan SEMS dengan IFC PS 2012.
- Menetapkan risiko kredit berdasarkan parameter IIF, dan menyesuaikan modal pemeringkatan risiko IIF.
- Assigned AAAidn rating from Fitch Indonesia.
- Increased paid-up capital to Rp2 trillion in compliance with prevailing regulations.
- Established syndication team.
- Strengthened IIF's brand equity through participation in the Euromoney conference.
- Conducted portfolio stress test.
- Augmented SEMS compliance with IFC PS-2012.
- Established credit risk based on IIF's parameters and adjusted IIF's risk rating model.

2017

- Became a financial advisor for a Merger & Acquisition ("M&A") project worth USD 92.87 million.
- Participated in the first Global Bond issued in USD in Indonesia, the Komodo Bonds, worth Rp2 trillion and issued by a toll road operator SOE.
- Signed a loan agreement with the Japan International Corporation Agency (JICA) in the amount of JPY 8 billion.
- Received an award from IUGlobal for the acquisition of the 227 MW Chevron Geothermal Power Plant ("PLTP") project in West Java.

2018

- Berpartisipasi sebagai *anchor investor* pada *Corporate Green Bond* pertama di Indonesia yang sesuai prinsip Green Bond dan standar *Green Bond* ASEAN untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan nilai emisi USD 660 juta.
- Memberikan fasilitas jaminan untuk pembangunan PLTB pertama di Indonesia dengan kapasitas produksi 70MW yang terletak di Sulawesi Selatan.
- Berpartisipasi dalam RDPT untuk mendukung pembangunan jalan tol sesuai dengan Proyek Strategis Nasional.
- Participated as an anchor investor in the first Corporate Green Bond to be issued in accordance with the Green Bond principles and the ASEAN Green Bond Standards in Indonesia for the construction of a Geothermal Power Plant (PLTP) with an emission value of USD 660 million.
- Provided a guarantee facility for the construction of the first Wind Power Plant in Indonesia with a capacity of 70MW in South Sulawesi.
- Participated in a Limited Participation Mutual Fund to support the construction of toll roads in line with the National Strategic Project.

2019

- Berpartisipasi dalam *World Bank Mission for Sustainable Financing*.
- Menandatangani perjanjian fasilitas *cash deficiency support* kepada Badan Usaha Jalan Tol.
- Menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk sektor Jalan Tol.
- Menandatangani fasilitas *credit guarantee* untuk sektor telekomunikasi.
- Berpartisipasi sebagai *co-sponsor* dalam *Indonesia Financing and Investment Forum*.
- Mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 di Bursa Efek Indonesia, dengan peringkat idAAA dari Pefindo.
- Menandatangani *Joint Financial Advisory Engagement Letter* untuk Proyek KPBU Bandara Hang Nadim Batam.
- Participated in the World Bank Mission for Sustainable Financing.
- IIF signed a cash deficiency support facility agreement with Toll Road Operators.
- Signed a memorandum of understanding (MoU) with a Indonesian Toll Authority for Toll Road sector.
- Signed a credit guarantee facility agreement for telecommunication sector.
- Co-sponsored the Indonesia Financing and Investment Forum.
- Listed the Shelf Registration Bond I Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019 on the IDX which was rated idAAA by Pefindo.
- Signed a Joint Financial Advisory Engagement Letter for KPBU Project of Hang Nadim Airport, Batam.

2020

- IIF berpartisipasi dalam fasilitas pinjaman sindikasi untuk membiayai proyek pembangkit listrik tenaga bayu 70 MW senilai USD50 juta.
- Menandatangani *Senior Term Loan Facility* untuk Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) Gresik.
- Mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 bernilai pokok Rp1,5 triliun.
- Mengadakan kunjungan media ke kantor redaksi *Bisnis Indonesia* dan menyelenggarakan berbagai seri webinar dengan tema utama "Penerapan Prinsip Sosial dan Lingkungan IIF".
- Meluncurkan program *Euro Medium-Term Note (EMTN)* pertamanya senilai USD 500 juta di Bursa Efek Singapura yang mendapatkan peringkat "BBB" dari Fitch Ratings.
- IIF participated in a syndication term loan facility to provide financing for 70 MW wind farm power plant project amounting to USD50 million.
- Signed the Senior Term Loan Facility for Gresik Water Supply System (SPAM).
- Listed Shelf Registration Bond I Indonesia Infrastructure Finance Phase II Year 2020 with the amount of Rp1.5 trillion
- Conducted a media visit to *Bisnis Indonesia's* editorial team and conducted a series of webinar entitled "Implementation of IIF's Social and Environmental Principles".
- IIF launched its first Euro Medium-Term Note (EMTN) Programme of USD 500 million on the Singapore Stock Exchange (SGX) which was rated "BBB" by Fitch Ratings.

Visi dan Misi

Vision and Mission



Visi Vision

Menjadi pelopor katalisator untuk pembiayaan pengembangan infrastruktur di Indonesia

To become the leading catalyst for financing infrastructure development in Indonesia

Misi Mission

- Menjamin tercerminnya kepentingan pelaku investasi di dalam struktur kontrak dan konsesi;
- Memelopori ketersediaan beragam instrument pembiayaan yang tepat bagi proyek infrastruktur; dan
- Menjadi mitra bagi lembaga keuangan dan lembaga investasi nasional lainnya dalam menyalurkan dana masyarakat ke dalam pembangunan infrastruktur jangka panjang di Indonesia.
- To ensure investors' needs are reflected in contractual structures and concessions;
- To lead in offering a mix of financing instruments appropriate for infrastructure; and
- To work with Indonesia's financial institutions and other institutional investors to channel the nation's savings into long-term development of Indonesia's infrastructure.



Pernyataan Persetujuan Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Visi dan Misi IIF telah ditinjau ulang dan disetujui tanpa adanya perubahan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Statement of Approval for the Vision and Mission by BOC and BOD

IIF's Vision and Mission had been reviewed and approved with no changes made by the BOC and BOD.

Kegiatan Usaha

Business Activities

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

IIF menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar yang terakhir kali diperbarui melalui Akta No. 43 tanggal 24 Juli 2018.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan di 2020

Pada tahun 2020, sesuai dengan Anggaran Dasar, IIF menyediakan produk pembiayaan berupa:

Produk Investasi

Fund-based

- Bentuk pinjaman antara lain: pinjaman senior, pinjaman subordinasi/*mezzanine finance*, *convertible* dan *hybrid securities* dan/atau pembiayaan ulang;
- Pembiayaan kegiatan lain yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur selama diperkenankan oleh peraturan; dan
- Investasi ekuitas.

Non-fund-based

Jaminan dalam bentuk antara lain: pemenuhan kewajiban keuangan, peningkatan kualitas kredit, dan/atau *take-out financing*.

Advisory

A. LAYANAN UNTUK KLIEN SEKTOR PUBLIK

1. Layanan Konsultasi Transaksi

Layanan konsultasi transaksi untuk klien sektor publik, seperti kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN/ BUMD dalam proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan kontrak antara lembaga pemerintah yang berwenang dan pihak swasta, di mana pihak swasta menyediakan layanan publik dengan menanggung risiko finansial, operasional, dan teknis dalam proyek tersebut.

Jenis proyek infrastruktur yang dapat diberikan layanan konsultan transaksi mencakup:

- a. Proyek-proyek KPBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 38/2015; dan
- b. Proyek-proyek non-KPBU, antara lain proyek IPP di sektor pembangkit listrik atau proyek B2B PDAM di sektor air minum.

Business Activities Based on Articles of Association

IIF engages in financing infrastructure projects in Indonesia as stipulated in Article 3 of the Company's Articles of Association, which was last amended through Deed No. 43 dated 24 July 2018.

Business Activities Conducted in 2020

In 2020, in line with its Articles of Association, IIF provided the following financing products:

Investment Products

Fund-based

- Loans in the form of, among others, senior loans, subordinated loans/*mezzanine financing*, *convertible* and *hybrid securities*, and/or refinancing;
- Financing of other activities related to infrastructure projects under the prevailing laws and regulations; and
- Equity investment.

Non-fund-based

Guarantees in the form of stand-by financing guarantee, credit enhancement, and/or take-out financing.

Advisory

A. SERVICES FOR PUBLIC SECTOR CLIENTS

1. Transaction Advisory Services

Specialised transaction advisory services for public sector clients, such as ministries, regional governments, and state-owned/regional-owned enterprises, with regard to infrastructure projects involving contracts between government institutions and private parties, in which the private party provides a public service and assumes the financial, technical, and operational risks of the project.

The types of infrastructure project eligible to receive transaction advisory services include:

- a. Public Private Partnership (PPP) projects as regulated under Presidential Regulation No. 38/2015; and
- b. Non-PPP projects, such as IPP projects in the power sector or PDAM B2B projects in the drinking water sector.

Lingkup dari layanan konsultan transaksi antara lain pelaksanaan uji tuntas dan perencanaan proyek, pelaksanaan konsultasi pasar, studi kelayakan, analisis dukungan pemerintah, penyiapan struktur komersial, negosiasi, pelaksanaan proses tender/pengadaan, dan proses institusionalisasi dengan tujuan alokasi risiko yang optimal dan proyek yang bankable, di samping meningkatkan kualitas layanan yang dihasilkan proyek tersebut.

2. Layanan Konsultasi Kebijakan

Menyediakan layanan konsultasi kepada klien di sektor publik, seperti kementerian dan pemerintah daerah dalam memformulasikan kebijakan terkait proyek infrastruktur dan/atau peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan pengadaan infrastruktur.

The scope of transaction advisory services may include pre-transaction due diligence and planning, market consultation, feasibility analysis, government support analysis, commercial structuring, negotiation, tender/procurement implementation process, and institutionalisation process aimed to ensure optimal risk allocation and bankability of the project as well as improving the quality of project outcome.

2. Policy Advisory Services

Advisory services to public sector clients, such as ministries and regional governments, in formulating infrastructure-related policies and/or increasing capacities for the purpose of accelerating and improving infrastructure procurement.

B. LAYANAN UNTUK KLIEN SEKTOR SWASTA

1. Kajian finansial dan ekonomi

Menyediakan layanan kepada klien untuk mengevaluasi dampak finansial dan ekonomi dari inisiatif pengembangan infrastruktur.

2. Penasihat keuangan

Menyediakan layanan *project finance* dan *corporate finance* untuk klien di sektor swasta untuk memaksimalkan *value* kepada pemegang saham. Terkait dengan keuangan proyek, IIF menyediakan jasa penasihat dalam proyek KPBU, studi kelayakan, serta penyiapan proyek. Terkait dengan keuangan perusahaan, IIF dapat memberikan jasa penggalangan dana ekuitas dan/atau pinjaman, valuasi, transaksi *joint venture*, dan *merger & acquisition*.

B. SERVICES FOR PRIVATE SECTOR CLIENTS

1. Financial and economic assessment

IIF provides services to private sector clients in order to evaluate the potential economic and financial impacts of infrastructure initiatives.

2. Financial Advisory

Providing project finance and corporate finance services to private sector clients to maximize shareholder value. With regard to project finance, IIF provides PPP tender support, feasibility studies, project preparation and structuring. With regard to corporate finance, IIF's advisory products are available for debt or equity fundraisings, valuations, joint ventures, as well as mergers and acquisitions.

Sektor Pembiayaan Infrastruktur

Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan infrastruktur, IIF memiliki sektor-sektor prioritas proyek infrastruktur sebagai target pembiayaannya. Sesuai dengan Pasal 5 PMK No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan, Surat OJK No. S-2/D.05/2018 dan POJK No. 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, objek pembiayaan infrastruktur meliputi infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah terpusat, sistem pengelolaan air limbah setempat, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, konservasi energi, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, kawasan, pariwisata, kesehatan, lembaga permasyarakatan, perumahan rakyat, bangunan negara, kawasan industri, distribusi pangan dan infrastruktur lain.

Infrastructure Financing Sector

In conducting infrastructure financing activities, IIF has determined the priority sectors of infrastructure project as its financing target. Pursuant to the Article 5 of the Regulation of the Minister of Finance No. 100/PMK.010/2009 regarding Financing Companies OJK Letter No. S-2/D.05/2018 and POJK No. 46/POJK.05/2020 on Infrastructure Financing Companies, objects for infrastructure financing include transportation, roads, water and irrigation, drinking water, centralized wastewater management systems, localized wastewater management systems, waste and toxic waste, telecommunications and informatics, electricity, oil and gas and renewable energy, conservation energy, urban infrastructure facilities, education, research and development infrastructure, sports, arts and cultural infrastructure facility, district, tourism, healthcare, correctional, public housing, state owned building, industrial estate, food distribution and other infrastructure.



Portofolio IIF 2020

IIF's Portofolio in 2020

Jalan/Road

- Pembangunan beberapa ruas jalan tol, antara lain Jakarta Outer Ring Road; Jakarta Cikampek II (Japek II); Cikopo – Palimanan; Pemalang – Batang; Jakarta Inner City Toll seksi Semanan – Sunter – Pulo Gebang
- Pemesanan Obligasi Global Mata Uang Rupiah untuk Operator Jalan Tol
- Reksa Dana Penyertaan Terbatas Mandiri Infrastruktur Ekuitas Trans Jawa (RDPT MIET)
- *Infrastructure Investment Fund Product* - Toll Road di Jawa Timur
- *Syndication Subordinated Term Loan* untuk ruas jalan tol Cibitung – Cilincing
- Construction of a number of toll road sections, among others, Jakarta Outer Ring Road; Jakarta Cikampek II (Japek II); Cikopo – Palimanan; Pemalang – Batang; Jakarta Inner City Toll of Semanan – Sunter – Pulo Gebang section
- Global Bonds purchase in Rupiah Denomination for Toll Road Operator
- Limited Funds of Mandiri Infrastruktur Ekuitas Trans Jawa (RDPT MIET)
- *Infrastructure Investment Fund Product* - Toll Road in East Java
- *Syndication Subordinated Term Loan* for Cibitung – Cilincing toll road section

Pelabuhan /Port

- Proyek ekspansi salah satu terminal di Tanjung Priok, Jakarta
- Pengembangan Belawan *International Container Terminal*
- A terminal expansion project of Tanjung Priok, Jakarta
- Development of Belawan International Container Terminal Expansion

Minyak dan Gas/Oil and Gas

- Pembiayaan pabrik LPG dengan kapasitas 40 MMSCFD di Jawa Timur
- Pengembangan Sistem Automasi Terminal BBM di Jawa Tengah
- Proyek Ekspansi LNG Tangguh di Papua Barat
- Financing for LPG plant with total capacity of 40 MMSCFD in East Java
- Development of Automation System at Fuel Terminal in Central Java
- Expansion project of LNG Tangguh in West Papua

Air Minum/Drinking Water

- Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur
- Proyek SPAM Kota Bandar Lampung
- Proyek *Water Treatment Plant* di Tangerang dan di Serang Timur
- Proyek Infrastruktur Air Minum di Jakarta, Tangerang, dan Gresik
- Drinking Water System Project (SPAM) in Umbulan, East Java
- SPAM project in Bandar Lampung
- Water Treatment Plant project in Tangerang and East Serang
- Drinking Water Infrastructure project in Jakarta, Tangerang, and Gresik

Telekomunikasi dan Informatika/Telecommunications and Informatics

- Palapa Ring Paket Tengah, *Central Package of Indonesia*
- *Senior Term Loan* untuk penyedia infrastruktur telekomunikasi, penyedia layanan internet dan televisi berbayar, dan penyedia layanan telekomunikasi
- Penyediaan *Partial Credit Guarantee for Credit Enhancement* untuk pembiayaan proyek telekomunikasi
- Palapa Ring II, *Central Package of Indonesia* projects
- *Senior Term Loan* for telecommunication infrastructure provider, internet service and pay TV provider, and telecommunication provider
- Provision of *Partial Credit Guarantee for Credit Enhancement* for telecommunication project financing

Bandara /Airport

- Pembangunan infrastruktur transportasi udara di Jawa Barat
- Proyek ekspansi bandara di Indonesia
- Construction of air transportation infrastructure in West Java
- Airports expansion projects in Indonesia

Ketenagalistrikan /Electricity

- Pembangunan beberapa pembangkit listrik, antara lain:
 - PLTA di Asahan, Sumatera Utara: 180 MW;
 - PLTS di Gorontalo Utara
 - PLTMH Sangir Solok, Sumatera Barat: 2X5 MW
 - PLTA Tomata, Sulawesi Tengah: 3x3,7 MW
 - PLTP Wayang Windu, Jawa Barat: 227 MW
 - PLTMH Sion di Sulawesi Utara: 2x6 MW
 - PLTMH Tomasa, Sulawesi Tengah: 2x5 MW
 - PLTMH Cikopo-2, Jawa Barat: 2x3,7 MW
 - PLTMH Aek Sibundong, Sumatera Utara: 2x4 MW
 - PLTB di Sidrap, Sulawesi Selatan: 70 MW
 - Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Aceh dengan kapasitas 1x12 MW, termasuk fasilitas interkoneksi sepanjang 2,2 km
- Pembangunan *Temporary Power Provider*
- Pemesanan Obligasi Global Mata Uang Rupiah untuk pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik di Riau dan Jawa Timur
- Construction of a number of power plants, including:
 - Hydro Power Plant (PLTA) in Asahan, North Sumatera: 180 MW;
 - Solar Power Plant (PLTS) in North Gorontalo
 - PLTA Mini in Solok, West Sumatera: 2x5 MW
 - PLTA in Tomata, Central Sulawesi: 3x3,7 MW
 - Geothermal Power Plant (PLTP) in Wayang Windu, West Java: 227 MW
 - PLTA Mini in Sion, North Sulawesi: 2x6 MW
 - PLTA Mini in Tomasa, Central Sulawesi: 2x5 MW
 - PLTA Mini in Cikopo-2, West Java: 2x3,7 MW
 - PLTA Mini in Aek Sibundong, North Sumatera: 2x4 MW
 - Wind Farm Project in Sidrap, South Sulawesi: 70 MW
 - Biomass Power Plant in Aceh with capacity of 1x12 MW, including the interconnecting facilities of 2.2 km
- Development of *Temporary Power Provider*
- Global Bond Order in Rupiah Denomination for the power plant construction projects in Riau and East Java

Lainnya /Others

- Proyek *Archipelago* di Sulawesi Selatan
- Fasilitas *Revolving Working Capital* di Sumatera Utara
- *Working Capital* untuk kontraktor EPC proyek migas
- Archipelago project in South Sulawesi
- Revolving Working Capital project in North Sumatera
- Working Capital for EPC contractor for oil and gas projects

Kawasan Industri/Industrial Estate

- Kawasan industri pertama yang terintegrasi dengan pelabuhan di Indonesia
- The first integrated industrial and port estate in Indonesia

Lokasi Proyek

Project Locations



Bandar Udara Airport

Jawa Java

- Jawa Barat
West Java
- Banten
- Jawa Tengah
Central Java
- Jawa Timur
East Java
- Yogyakarta

Kalimantan

- Kalimantan Selatan
South Kalimantan

Sulawesi

- Sulawesi Selatan
South Sulawesi



Ketenagalistrikan Electricity

Sumatera

- Aceh
- Riau
- Sumatera Utara
North Sumatera
- Sumatera Barat
West Sumatera

Jawa & Bali Java & Bali

- Jakarta
- Jawa Barat
West Java
- Jawa Timur
East Java
- Bali

Sulawesi

- Gorontalo
- Sulawesi Utara
North Sulawesi
- Sulawesi Tengah
Central Sulawesi
- Sulawesi Selatan
South Sulawesi



Minyak dan Gas Oil and Gas

- Jawa Timur
East Java
- Jawa Tengah
Central Java
- Papua Barat
West Papua
- Kalimantan Timur
East Kalimantan



Lainnya Others

- Sumatera Utara
North Sumatera
- Sumatera Selatan
South Sumatera
- Kalimantan Timur
East Kalimantan



Kawasan Industri Industrial Estate

- Jawa Timur
East Java



Air Minum Drinking Water

- Jawa Timur
East Java
- Lampung
- Banten
- Jakarta



Jalan Road

- Jakarta
- Jawa Barat
West Java
- Jawa Timur
East Java



Telekomunikasi dan Informatika Telecommunications and Informatics

- Jakarta
- Jawa Barat
West Java
- Bali
- Kalimantan
- Sulawesi
- Maluku

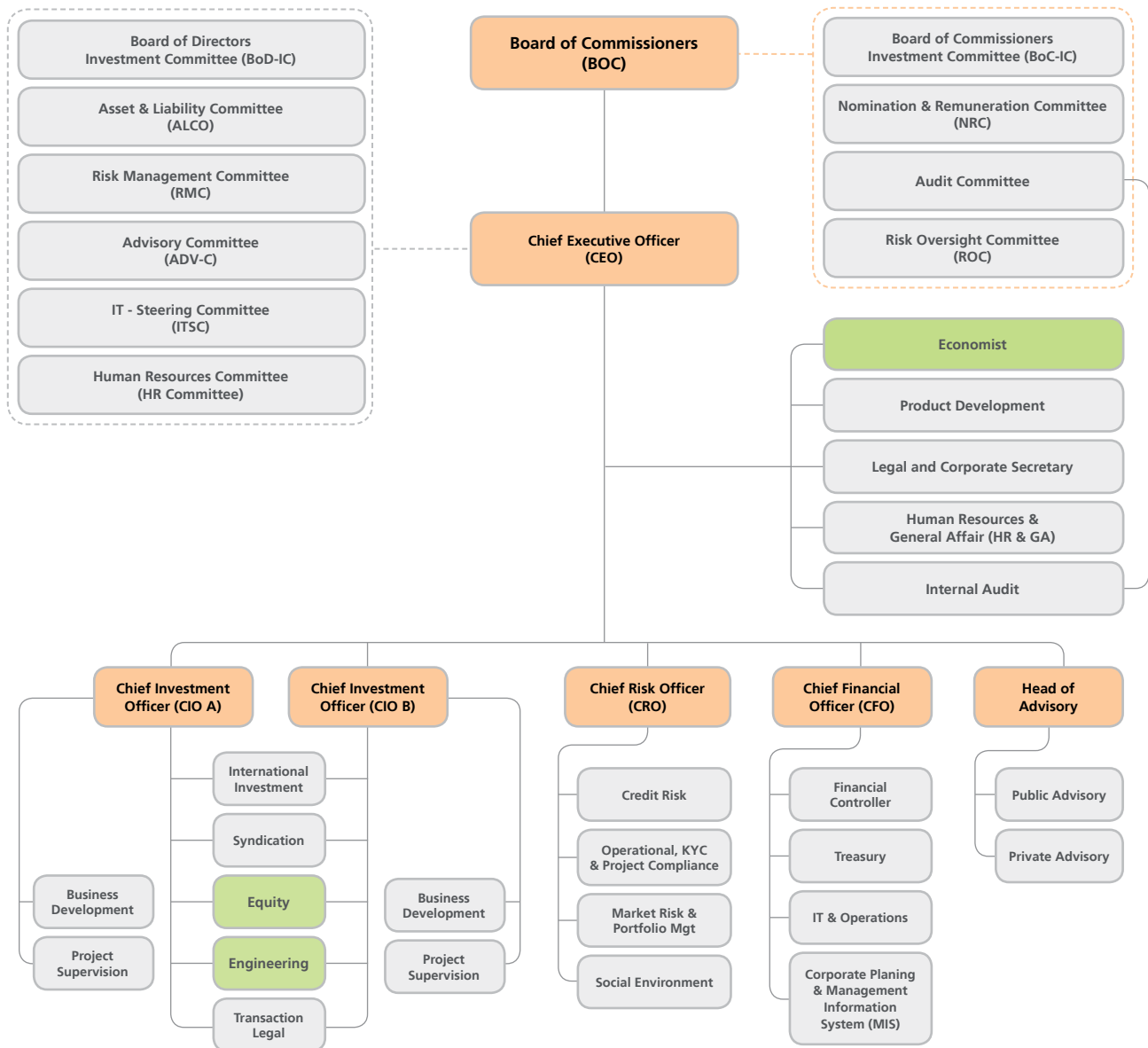


Pelabuhan Port

- Jakarta
- Sumatera Utara
North Sumatera

Struktur Organisasi

Organisation Structure



Head of Legal & Corporate Secretary	: Nstantio W. Hadi
Head of HR & GA	: Suli Indah Lestari
Head of Internal Audit	: Yudi Adrial
Business Development 1 CIO-A	: Kevin Tantra
Business Development 2 CIO-A	: Luthfi Amara
Business Development 1 CIO-B	: M. Izmir Fadilah Ildial
Business Development 2 CIO-B	: Anton Benyamin Simatupang
Project Supervision CIO-A	: Febrina Kalangie
Project Supervision CIO-B	: Eduard Rixson Batubara
Head of Transaction Legal	: Sri Patriawati T.

Head of Product Development	: Vacant
Equity	: Vacant

Head of Credit Risk	: Luciana Budiman & Jonathan Timura
Operational, KYC & Project Compliance	: Yulia Trinita
Head of Market Risk & Portfolio Management	: Pongky Afriandita
Head of Social & Environmental	: R. Budi Wiandjono
Head of Financial Controller	: Sukarti
Head of Treasury	: Faridh Hilmy Muhsinin
Head of IT & Operations	: Myria Yasmina Ariandri
Head of Corporate Planning & MIS	: Erwin Partogi Manurung
Head of Advisory	: Irman Boyle

Economist	: Vacant
Engineering	: Vacant

Profil Direksi

Board of Directors Profile



Reynaldi Hermansjah

Presiden Direktur &
Chief Executive Officer
President Director &
Chief Executive Officer

Warga negara Indonesia, usia 53 tahun, berdomisili di Jakarta. Memegang gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Trisakti dan Magister dari Universitas Pelita Harapan.

Diangkat menjadi Presiden Direktur Perseroan pada 20 April 2019 berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Maret 2019, untuk masa kerja hingga 20 April 2022.

Mengawali kariernya di Nomura Securities (1991) dan selanjutnya menjabat berbagai posisi senior antara lain di Mees Pierson Finas, BII LendLease Investments, dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Pernah menjabat Presiden Direktur di PT PNM Investment Management, *Chief Financial Officer* di PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2006–2016), dan *Chief Financial Officer* di PT Pembangunan Jaya Infrastruktur (2016–2019). Merupakan anggota kehormatan ASEAN Federation of Engineering Organisations.

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain, dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Indonesian citizen, 53 years of age, domiciled in Jakarta. Holds a Bachelor in Electrical Engineering degree from Trisakti University and a postgraduate degree from Pelita Harapan University.

Appointed as President Director of the Company on 20 April 2019 pursuant to Notary Deed No. 1 dated 1 March 2019, with the term of office until 20 April 2022.

Began his career working at Nomura Securities (1991) and subsequently serving in various senior positions among others in Mees Pierson Finas, BII LendLease Investments, and the Indonesian Bank Restructuring Agency. He also served as President Director of PT PNM Investment Management, Chief Financial Officer at PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2006–2016), and Chief Financial Officer at PT Pembangunan Jaya Infrastruktur (2016–2019). He is an honorary member of the ASEAN Federation of Engineering Organisations.

He has no concurrent positions in other companies and is not affiliated with any shareholders nor members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company.



Devi Pradnya Paramita

Direktur Pelaksana
& *Chief Financial Officer*

Managing Director
& Chief Financial Officer

Warga negara Indonesia, usia 43 tahun, berdomisili di Jakarta. Lulus dari Universitas Katolik Parahyangan dan memegang gelar Magister Keuangan jurusan khusus Manajemen Risiko dari ICMA Business School, Inggris. Mengambil kursus Ekonomi di Foreign Service Institute, AS.

Diangkat menjadi Direktur Pelaksana & *Chief Financial Officer* Perseroan pada 1 Desember 2019 berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 6 Desember 2019, untuk masa kerja hingga 1 Desember 2022.

Mengawali kariernya di Financial Advisory Services, PricewaterhouseCoopers, selanjutnya sebagai ekonom untuk Kantor Pemerintah AS, Kepala Departemen Keuangan di Bakrie & Brothers, Kepala Corporate Finance di MedcoEnergi, *Chief Financial Officer* untuk PGN Saka, dan Kepala Hubungan Investor dan Direktur VICO Indonesia.

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain, dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Indonesian citizen, 43 years of age, domiciled in Jakarta. Graduated from Parahyangan Catholic University and obtained her Master of Finance degree majoring in Risk Management from ICMA Business School, UK. She has taken an Economics course at the Foreign Service Institute, USA.

Appointed as Managing Director & Chief Financial Officer of the Company on 1 December 2019 pursuant to Notary Deed No. 1 dated 6 December 2019, with the term of office until 1 December 2022.

Began her career working at the Financial Advisory Services of PricewaterhouseCoopers, and subsequently as an economist at the US Government Office, Head of Finance Department at Bakrie & Brothers, Head of Corporate Finance at MedcoEnergi, Chief Financial Officer of PGN Saka, and Group Head of Investor Relations and Director at VICO Indonesia.

She has no concurrent positions in other companies and is not affiliated with any shareholders nor members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company.



I Made Wiracita Tantra

Direktur Pelaksana
& *Chief Risk Officer*
Managing Director
& Chief Risk Officer

Warga negara Indonesia, usia 54 tahun, berdomisili di Jakarta. Memegang gelar *Bachelor of Arts* bidang Ekonomi dari State University of New York, AS, dan *Master of Science* bidang Manajemen Keuangan dari Johns Hopkins University, AS.

Diangkat menjadi Direktur Pelaksana & *Chief Risk Officer* Perseroan pada 5 Maret 2018 berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 24 Januari 2018, untuk masa kerja hingga 5 Maret 2021.

Mengawali kariernya sebagai analis kredit di American Express Bank, Jakarta (1991), dan melanjutkan ke bidang pengembangan bisnis di Bank of America dan Standard Chartered Bank di Jakarta, kemudian sebagai *Credit Review Executive* di Standard Chartered Bank di New York dan BNP Paribas di Singapura. Pernah menjabat sebagai *Senior Credit Officer & Head of Credit* di Standard Chartered Bank, kemudian sebagai *Chief Risk Officer* di PT Bank ANZ Indonesia (2015–2018).

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain, dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Indonesian citizen, 54 years of age, domiciled in Jakarta. Graduated with a Bachelor of Arts in Economics from State University of New York, USA, and Master of Science in Financial Management from Johns Hopkins University, USA.

Appointed as Managing Director & Chief Risk Officer of the Company on 5 March 2018 pursuant to Notary Deed No. 15 dated 24 January 2018, with the term of office until 5 March 2021.

He started working as a credit analyst at American Express Bank, Jakarta (1991), and continued in the business development arm of Bank of America and Standard Chartered Bank in Jakarta, then as Credit Review Executive at Standard Chartered Bank in New York and at BNP Paribas in Singapore. He had served as Senior Credit Officer & Head of Credit at Standard Chartered Bank, then as Chief Risk Officer at PT Bank ANZ Indonesia (2015–2018).

He has no concurrent positions in other companies and is not affiliated with any shareholders nor members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company.



Mohammad Ramadhan Harahap

Direktur Pelaksana
& Chief Investment Officer
Managing Director
& Chief Investment Officer

Warga negara Indonesia, usia 53 tahun, berdomisili di Jakarta. Lulus dengan gelar Sarjana Sains bidang Teknik Mesin dari Universitas Indonesia dan *Master of Science* bidang *Engineering Management* dari Northeastern University, AS.

Diangkat menjadi Direktur Pelaksana & Chief Investment Officer Perseroan pada 30 Juni 2020 berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 16 Juni 2020, untuk masa kerja hingga 30 Juni 2020.

Mengawali kariernya sebagai *Senior Manager Corporate Banking* di PDFCI Bank (1996–2000), *Assistant Vice President Corporate Banking* di PT Bank Danamon Tbk (2000–2007), *Director of Local Corporate* di Standard Chartered Bank (2007–2013), dan *Head of Large Local Corporates Global Banking* di HSBC Indonesia (2013–2020).

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain, dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Indonesian citizen, 53 years of age, domiciled in Jakarta. Holds a Bachelor of Science in Mechanical Engineering degree from University of Indonesia and Master of Science in Engineering Management from Northeastern University, USA.

Appointed as Managing Director & Chief Investment Officer of the Company on 30 June 2020 pursuant to Notary Deed No. 13 dated 16 June 2020, with the term of office until 30 June 2023.

He had worked as Senior Manager Corporate Banking at PDFCI Bank (1996–2000), as Assistant Vice President Corporate Banking at PT Bank Danamon Tbk (2000–2007), as Director of Local Corporate at Standard Chartered Bank (2007–2013), and as Head of Large Local Corporates Global Banking di HSBC Indonesia (2013–2020).

He has no concurrent positions in other companies and is not affiliated with any shareholders nor members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company.



Y. Bayu Wirawan

Direktur Pelaksana
& *Chief Investment Officer*
Managing Director
& Chief Investment Officer

Warga negara Indonesia, usia 47 tahun, berdomisili di Jakarta. Memegang gelar Sarjana Teknik Gas dan Petrokimia dan gelar Magister Perbankan dan Manajemen Keuangan, keduanya dari Universitas Indonesia.

Diangkat menjadi Direktur Pelaksana & *Chief Investment Officer* Perseroan pada 30 Juni 2020 berdasarkan Akta Notaris No.13 tanggal 16 Juni 2020, untuk masa kerja hingga 30 Juni 2023.

Mengawali kariernya sebagai *Credit Analyst* di Bank Central Asia (1999–2005), *Assistant Vice President* di DBS Indonesia (2005–2008), dan *Vice President* di HSBC Indonesia (2008–2012). Bergabung dengan Perseroan sebagai *Senior Vice President* di Direktorat Investasi di 2012, kemudian menjabat *Head of Product Development Division*.

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain, dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Indonesian citizen, 47 years of age, domiciled in Jakarta. Holds a bachelor's degree in Gas and Petrochemical Engineering and a master's degree in Banking and Finance Management, both from the University of Indonesia.

Appointed as Managing Director & Chief Investment Officer of the Company on 30 June 2020 pursuant to Notary Deed No. 13 dated 16 June 2020, with the term of office until 30 June 2023.

He had worked as Credit Analyst at Bank Central Asia (1999–2005), as Assistant Vice President at DBS Indonesia (2005–2008), and as Vice President at HSBC Indonesia (2008–2012). He joined the Company as Senior Vice President of the Investment Directorate in 2012, and subsequently served as Head of Product Development Division.

He has no concurrent positions in other companies and is not affiliated with any shareholders nor members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company.



Irman Boyle

*Executive Vice President –
Head of Advisory Group*

Executive Vice President –
Head of Advisory Group

Warga negara Indonesia, usia 52 tahun, berdomisili di Jakarta. Lulus dengan gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, dan *Master of Business Administration* dari Cass Business School, City University London, Inggris.

Bergabung dengan Perseroan sebagai *Executive Vice President* di 2012.

Sebelumnya menjabat *Infrastructure Specialist* di PPPs Transaction Advisory Department di IFC Jakarta, kemudian sebagai *Indonesia Country Representative* untuk Private Finance Advisory Network (2010–2011).

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain, dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Indonesian citizen, 52 years of age, domiciled in Jakarta. Holds a bachelor's degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology, and Master of Business Administration from Cass Business School, City University London, UK.

Joined the Company as Executive Vice President in 2012.

He previously worked as Infrastructure Specialist at PPPs Transaction Advisory Department of IFC Jakarta, and as Indonesia Country Representative for the Private Finance Advisory Network (2010–2011).

He has no concurrent positions in other companies and is not affiliated with any shareholders nor members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Anggota Komite Eksekutif di 2020

Training and Competence Development Programmes Attended by Executive Committee Members in 2020

Nama dan Jabatan Name and Position	Judul Program Programme Title	Pelaksana Organiser	Tanggal Date
Reynaldi Hermansjah Presiden Direktur & CEO President Director & CEO	Sharing Session re: Joint Crediting Mechanism oleh Aura Green Energy Japan (PT PEL)	Aura Green Energy Japan & PT PEL	16 Januari/16 January
	PWC Invitation: Smart Infrastructure Development in Indonesia	PWC	19 Februari 19 February
	Credit Enhancement for Bond Issuance with Securities Company		4 Maret/4 March
	AHP Business Law Forum	AHP	5 Maret/5 March
	PII Invitation: Outlook KPBU 2020	PII	9 Maret/9 March
	Sharing Session on the C&I Solar PV		10 Maret/March
	Webinar Trimegah Event: Investment Strategy During Covid-19 Crisis: A Conglomerate's Perspective	Trimegah	15 Mei/May
	World Bank - Project Implementation Support Mission	World Bank	18 Mei/May
	Webinar ICT For Post Covid-19: From Pandemic Resilience to Economic Recovery	ICT	25 Juni/June
	Sharing Session Jakpro "Project Financing dari Perspektif Investor, Kreditur dan Project Owner	Jakpro	29 Juni/June
	Infrastructure Finance Leadership Series webinar		30 Juni/June
	Visual Outlook World Bank Indonesia Economic Prospect	World Bank	16 Juli/July
	Sharing Session Infrastructure Project Investment with BPKH	BPKH	16 Juli/July
	Mandiri Sekuritas Infrastructure Week	Mandiri Sekuritas	3 Agustus/August
	Sharing Session with PT SMI "SDG Indonesia One"	SMI	3 Agustus/August
	Sharing Session "Indonesia Economic Outlook" with M. Chatib Basri	IIF	19 Agustus/August
	Sharing Session with G&R Lawfirm	Ginting & Reksodiputro Law Firm	28 Agustus/August
	IIF Graphic Standard Manual & Application Socialization	IIF Corsec Team	14 September/September
	6th Indonesian Finance Association International Conference	Indonesian Finance Association	17–18 September/ September
	Webinar Infrastructure Asia: Improving Bankability of Water Infrastructure through Digitalisation	Infrastructure Asia	18 September/September
	PT IIF Webinar: Leading & Motivating Virtual Teams	SMBC	29 September/September
	Standard Chartered US Election Series - 'What to look out for'		29 September/September
	Virtual World Bank Annual Meeting 12-18 October 2020	World Bank	12 Oktober/October
	Standard Chartered US Election Series - the view from Asia #session 1	Standard Chartered	13 Oktober/October

Nama dan Jabatan Name and Position	Judul Program Programme Title	Pelaksana Organiser	Tanggal Date
	Yale SOM Executive Education Global Business and Politics online program	Getsmart	14 Oktober/October
	Standard Chartered US Election Series - Considerations for Africa and the Middle East #session 1	Standard Chartered	20 Oktober/October
	Executive Education Leadership for Global Business and Politics	Yale School of Management	Oktober/October
	Penerapan Aspek Sosial Dan Lingkungan Dalam Pembangunan Jalan Tol : Studi Kasus	Bisnis Indonesia	13 Oktober/October
	Omnibus Law Sharing Session	AHP	18 November/November
	Sustainable Finance Corporate Access Days 2020 Online Series	BNP Paribas	24 November/November
	New Sector Mapping	Internal IIF	25 November/November
	Mobilizing Financial Resources to Support Renewable Energy to Achieve the 2050 Energy Transition Target	METI	27 November/November
	Finalist Photo Competition Presentation	IIF	4 Desember/December
	Financing Renewable Energy Sector: Peran Serta IIF Menuju Pencapaian Transisi Energi 2050	Bisnis Indonesia	15 Desember/December
I Made Wiracita Tantra <i>Managing Director & Chief Risk Officer</i> Managing Director & Chief Risk Officer	Sharing Session - Joint Crediting Mechanism (JCM)	Aura Green Energy Japan & PT PEL	16 Januari/January
	World Bank - Project Implementation Support Mission	World Bank	18 Mei/May
	Sharing Session on Macro-Economic Session with Bapak M. Chatib Basri	IIF	19 Agustus/August
	Sharing Session: Limited Concession Scheme with Ginting & Reksodiputro	Ginting & Reksodiputro Law Firm	28 Agustus/August
	IIF Graphic Standard Manual & Application Socialization	IIF Corsec Team	14 September/September
	Omnibus Law Sharing Session	AHP	18 November/November
	Finalist Photo Competition Presentation	IIF	4 Desember/December
	Financing Renewable Energy Sector: Peran Serta IIF Menuju Pencapaian Transisi Energi 2050	Bisnis Indonesia	15 Desember/December
Devi Pradnya Paramita <i>Managing Director & Chief Financial Officer</i> Managing Director & Chief Financial Officer	Mandiri Investment Forum 2020	Mandiri Sekuriti	5 Februari/February
	ADB Invitation: Roundtable Discussion on ADB Local Currency Funding Operations	ADB	19 Februari/February
	ASEAN Green Finance State of the Market 2019 – Report Launch Webinar		16 April /April
	Visual Outlook World Bank Indonesia Economic Prospect	World Bank	16 Juli/July
	Sharing Session with PT SMI "SDG Indonesia One"	SMI	3 Agustus/August
	Sharing Session "Indonesia Economic Outlook" with M. Chatib Basri	IIF	19 Agustus/August
	Virtual World Bank Annual Meeting 12-18 October 2020	World Bank	12 Oktober/October

Nama dan Jabatan Name and Position	Judul Program Programme Title	Pelaksana Organiser	Tanggal Date
Y. Bayu Wirawan Managing Director & Chief Investment Officer Managing Director & Chief Investment Officer	User Training 365 Office	IT Team	27 Januari/January
	Flexible Career Path Socialisation	FCP Team	29 Januari/January
	Mastel: ICT for Post Covid-19: From Pandemic Resilience to Economic Recovery		25 Juni/June
	Sharing Session with PT SMI, re: SDG Indonesia One	SMI	3 Agustus/August
	Sharing Session - M. Chatib Basri - 19 August 2020	M. Chatib Basri	19 Agustus/August
	IIF Graphic Standard Manual & Application Socialisation	IIF Corsec Team	14 September/September
	METI Online: Decentralised/ Distributed Energy Generation	METI	18 September/September
	Webinar on the Joint Crediting Mechanism (JCM) Implementation in Indonesia 2020	GEC	30 September/September
	The Mindfulness Program	SMBC	06 Oktober/October
	Sharing Session - M. Chatib Basri - 19 August 2020	M. Chatib Basri	19 Agustus/August
	VIRTUAL INDO EBTKE CONEX 2020	Indo EBTKE	9 Oktober/October
	Green Bonds: A Market Solution for the Problem of the Century	World Bank	14 Oktober/October
	25th FEPA e-conference: Indonesia Panel	PFI	15 Oktober/October
	Uzbekistan Infrastructure Finance Intermediary Vehicle: Virtual Roundtable	ADB	15 Oktober/October
	Omnibus Law Sharing Session	AHP	18 November
	Financing Renewable Energy Sector: Peran Serta IIF Menuju Pencapaian Transisi Energi 2050	Bisnis Indonesia	15 Desember/December
M. Ramadhan Harahap Managing Director & Chief Investment Officer Managing Director & Chief Investment Officer	Sharing Session with PT SMI, re: SDG Indonesia One	SMI	3 Agustus/August
	Sharing Session - M. Chatib Basri - 19 August 2020	M. Chatib Basri	19 Agustus/August
	30 mins to - ASEAN Country Webinar: Indonesia – Archipelago of Opportunities	Standard Chartered	10 September/September
	IIF Graphic Standard Manual & Application Socialisation	IIF Corsec Team	14 September/September
	Future of Asia - Climate Risk and Response in Asia in a Post Pandemic World	McKinsey Global Institute	6 Oktober/October
	Climate Resilient Infrastructure	McKinsey Global Institute	13 Oktober/October
	Efficiency Virtual Training	SMBC	21 Oktober/October
	Omnibus Law Sharing Session	AHP	18 November/November
	New Sector Socialisation	Product Specialist IIF	25 November/November
	S&E Socialisation with JAI team	JAI Team	25 November/November
	Finalist Photo Competition Presentation	IIF	4 Desember/December
	Operational Risk and PIP Socialisation	IIF	10 Dec
	Financing Renewable Energy Sector: Peran Serta IIF Menuju Pencapaian Transisi Energi 2050	Bisnis Indonesia	15 Desember/December

Nama dan Jabatan Name and Position	Judul Program Programme Title	Pelaksana Organiser	Tanggal Date
Irman Boyle <i>Executive Vice President</i> – Head of Advisory Group <i>Executive Vice President</i> – Head of Advisory Group	Mandiri Investment Forum 2020	Mandiri Sekuritas	5 Februari/February
	Join Seminar Indonesia-Singapore "Workshop on Selecting, Preparing, Marketing and Financing Infrastructure project"	MoF	17 Februari/February
	Fraunhofer Workshop "Falling costs of renewable energies and their implications for energy planning and climate policy of Indonesia"	Fraunhofer	2 Maret/March
	FPCI Workshop: Getting real with renewable energy, Can Indonesia become a serious greensuper power in the next 5years	FPCI	4 Maret/March
	Sharing Session with SMI Pengembangan Proyek PLTSa dengan Skema KPBU di Indonesia	SMI	22 Juni/June
	Sharing Session Jakpro "Project Financing dari Perspektif Investor, Kreditur dan Project Owner"	Jakpro	29 Juni/June
	Sharing Session Infrastructure Project Investment with BPKH	BPKH	16 Juli/July
	Sharing Session with PT SMI "SDG Indonesia One"	SMI	3 Agustus/August
	Indonesian Biogas Association Workshop of Biogas Project Financing		5 Agustus/August
	Webinar Peran Sektor Energi untuk Pemulihan Hijau & Berkelanjutan		14 Agustus/August
	Sharing Session "Indonesia Economic Outlook" with M. Chatib Basri	IIF	19 Agustus/August
	UK Ambassador virtual Conference with UK COP26 Special Envoy Dr John Murton re: Low Carbon development pathway		23 September/September
	PT IIF Inhouse Webinar: Leading & Motivating Virtual Teams	SMBC	29 September/September
	Webinar: Teknologi Persampahan Sesi 9 "Prospek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik di Indonesia"		1 Oktober/October
	PT IIF Inhouse Webinar: The Mindfulness Program - Virtual Training	SMBC	6 Oktober/October
	Sharing Session Praktik Terbaik Sektor Pengelolaan Persampahan/Waste Management (WM) Sector Best Practice Sharing Session		7 Oktober/October
	Webinar: Episode 7: Supporting Indonesia's Energy Sector Growth Through Domestic & International Investment		7 Oktober/October
	Omnibus Law Sharing Session	AHP	18 November/November
	New Sector Socialisation	Product Specialist IIF	25 November/November
	Operational Risk and PIP Socialisation	IIF	10 Desember/December

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Darmin Nasution

Presiden Komisaris &
Komisaris Independen
President Commissioner &
Independent Commissioner

Warga negara Indonesia, usia 72 tahun, berdomisili di Jakarta. Memegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, serta gelar magister dan doktoral di bidang Ekonomi dari University of Paris, Prancis.

Diangkat menjadi Presiden Komisaris & Komisaris Independen Perseroan pada 14 Juli 2020 berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 20 Juli 2020, untuk masa kerja hingga 14 Juli 2023.

Pernah menduduki sejumlah jabatan penting di pemerintahan, antara lain sebagai Kepala Bapepam-LK (2005–2006), Direktur Jenderal Pajak (2006–2009), Deputy Senior Gubernur (2009–2010) dan Gubernur Bank Indonesia (2010–2013), serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2015–2019).

Saat ini merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama di PT Smartfren Telecom Tbk dan di PT Pupuk Indonesia (Persero).

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Indonesian citizen, 72 years of age, domiciled in Jakarta. Holds a Bachelor of Economics degree from University of Indonesia, and a master's and doctorate degree in Economics from University of Paris, France.

Appointed as President Commissioner & Independent Commissioner of the Company on 14 July 2020 pursuant to Notary Deed No. 14 dated 20 July 2020, with the term of office until 14 July 2023.

He had served in various key positions in the Indonesian government, among others as Chairman of Bapepam-LK (2005–2006), Director General of Taxes (2006–2009), Senior Deputy Governor (2009–2010) and Governor of Bank Indonesia (2010–2013), as well as the Coordinating Minister for Economic Affairs (2015–2019).

He is serving concurrently as President Commissioner of PT Smartfren Telecom Tbk and PT Pupuk Indonesia (Persero).

He is not affiliated with any shareholders nor members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company.



Sonny Loho

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga negara Indonesia, usia 63 tahun, berdomisili di Jakarta. Memegang gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, serta gelar *Master of Public and Management Finance* dari Carnegie Mellon University, AS.

Diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan pada 19 Maret 2020 berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 19 Maret 2020, untuk masa kerja periode kedua hingga 19 Maret 2023. Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Independen pada 4 Juni 2018, berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 26 Juni 2018.

Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, serta menduduki posisi senior di Kementerian Keuangan, antara lain sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Inspektur Jenderal, dan Direktur Pelaporan Akuntansi dan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Juga pernah menjabat Ketua Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (2013–2015). Merupakan akuntan yang juga menjadi anggota Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintah dan Komite Pengarah Sektor Publik dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Saat ini merangkap jabatan sebagai Komisaris di PT Danareksa (Persero).

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Indonesian citizen, 63 years of age, domiciled in Jakarta. Holds a Bachelor of Economics degree majoring in Accounting from the Indonesian State College of Accountancy, and a Master of Public and Management Finance from Carnegie Mellon University, USA.

Appointed as Independent Commissioner of the Company on 19 March 2020 pursuant to Notary Deed No. 21 dated 19 March 2020, with the second term of office until 19 March 2023. Appointed as Independent Commissioner for the first time on 4 June 2018, based on Notary Deed No. 16 dated 26 June 2018.

Previously he served as Commissioner of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Jasa Marga (Persero) Tbk, and assumed senior positions at the Ministry of Finance, among others as the Director General of State Assets, Inspector General, and Director of Accounting and Finance Reporting at the Directorate General of Treasury. He was also the Chairman of Indonesian Internal Auditor Association (2013–2015). He is a Chartered Accountant and a member of the Consultative and Steering Committee of the Public Sector Accounting Standard Committee of the Institute of Indonesia Chartered Accountants.

He is serving concurrently as Commissioner of PT Danareksa (Persero).

He is not affiliated with any shareholders nor members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company.



Rinaldi Firmansyah

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga negara Indonesia, usia 60 tahun, berdomisili di Jakarta. Memegang gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, *Master of Business Administration* dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, dan Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Padjajaran. Juga bersertifikat *Chartered Financial Analyst* dari CFA Institute, AS.

Diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan pada 19 Maret 2020 berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 19 Maret 2020, untuk masa kerja periode kedua hingga 19 Maret 2023. Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Independen pada 25 Januari 2018, berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 9 Februari 2018.

Pernah bekerja di sejumlah perusahaan multinasional, termasuk di Citibank (1988–1991), sebelum menjabat *Vice President of Finance* di PT Tirtamas Comexindo (1991–1995) dan di PT Kwalita Exporindo International (1991–1992), *Director, President Director*, dan *Vice President Commissioner* di PT Bahana Securities (1997–2004), Komisaris dan Ketua Komite Audit di PT Semen Padang (2003–2004), Direktur Keuangan (2004–2007) dan Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, serta Komisaris di PT Elnusa Tbk (2014–2018).

Saat ini merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen di PT Blue Bird Tbk.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Indonesian citizen, 60 years of age, domiciled in Jakarta. Holds a Bachelor in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology, Master of Business Administration from Indonesian Institute for Management Development, and a doctorate degree in Management Science from Padjajaran University. He has a Chartered Financial Analyst certificate from CFA Institute, USA.

Appointed as Independent Commissioner of the Company on 19 March 2020 pursuant to Notary Deed No. 21 dated 19 March 2020, with the second term of office until 19 March 2023. Appointed as Independent Commissioner for the first time on 25 January 2018, based on Notary Deed No. 7 dated 9 February 2018.

Previously worked at a number of multinational companies including at Citibank (1988–1991), prior to serving as Vice President of Finance at PT Tirtamas Comexindo (1991–1995) and at PT Kwalita Exporindo International (1991–1992), as Director, President Director, and Vice President Commissioner of PT Bahana Securities (1997–2004), Commissioner and Audit Committee Chairman of PT Semen Padang (2003–2004), Finance Director (2004–2007) and President Director of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, and Commissioner of PT Elnusa Tbk (2014–2018).

He is serving concurrently as Independent Commissioner of PT Blue Bird Tbk.

He is not affiliated with any shareholders nor members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company.



Yon Aرسال

Komisaris
Commissioner

Warga negara Indonesia, usia 48 tahun, berdomisili di Jakarta. Memegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran, Magister Sains bidang Administrasi Fiskal dari Universitas Indonesia, serta Master of Arts dan doktoral di bidang Ekonomi dari Kobe University, Jepang.

Diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada 22 Juni 2020 berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 15 Juli 2020, untuk masa kerja hingga 22 Juni 2023.

Sebelumnya, bekerja di pemerintahan sebagai Kepala Sub-Direktorat Dampak Kebijakan (2011), Kepala Sub-Direktorat Potensi Perpajakan (2013), dan Personalia Riset Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak (2016), sebelum menjabat sebagai Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Perpajakan (2016–2020) di Direktorat Jenderal Pajak. Pernah menjabat anggota Badan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia *ex officio* Direktorat Jenderal Pajak (2018–2020).

Saat ini merangkap jabatan sebagai Staf Ahli bidang Kepatuhan Perpajakan di Kementerian Keuangan.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan. Merupakan perwakilan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Indonesian citizen, 48 years of age, domiciled in Jakarta. Holds a bachelor's degree in Economics from Padjajaran University, a Master of Science in Fiscal Administration from University of Indonesia, and a Master of Arts and a doctorate degree, both in Economics from Kobe University, Japan.

Appointed as Commissioner of the Company on 22 June 2020 pursuant to Notary Deed No. 10, dated 15 July 2020 with the term of office until 22 June 2023.

Previously worked for the Indonesian Government as the Head of Policy Impact Sub-Directorate (2011), Taxation Potential Sub-Directorate (2013), and Tax Extensification and Intensification Research Personnel (2016), prior to his appointment as Director of Potential, Compliance and Revenue (2016–2020) at the Directorate General of Taxes. He was also a Member of the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accountant Association *ex officio* Directorate General of Taxes (2018–2020).

He is serving concurrently as Special Advisor for Tax Compliance at the Ministry of Finance.

He is not affiliated with any members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company. He is a representative of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).



Bhimantara Widyajala

Komisaris
Commissioner

Warga negara Indonesia, usia 53 tahun, berdomisili di Jakarta. Memegang gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan di bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan *Master of Science in Finance* dari George Washington University, AS. Merupakan *Certified Internal Auditor*, *Certified Fraud Examiner*, *Chartered Accountant* (CA) dan CPA (Australia), dan bersertifikat di bidang *assurance* manajemen risiko.

Diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada 21 Maret 2019 berdasarkan Akta Notaris No. 31 tanggal 21 Maret 2019, untuk masa kerja periode kedua hingga 21 Maret 2022. Pertama kali diangkat sebagai Komisaris pada 2 Juni 2017, berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 9 Agustus 2017.

Sebelumnya, bekerja di pemerintahan sebagai Direktur Surat Utang Negara dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang di Kementerian Keuangan, sebagai Komisaris di PT Indonesia Power, Komisaris di PT Perusahaan Pengelola Aset, Direktur Eksekutif di Asian Development Bank (ADB) di Filipina, dan *Dean* untuk Direksi ADB (2017).

Saat ini merangkap jabatan sebagai Staf Ahli bidang Perencanaan Strategis di Sekretariat Jenderal dan Pelaksana Tugas Direktur Pusat Pembinaan Profesi Keuangan di Kementerian Keuangan.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan. Merupakan perwakilan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Indonesian citizen, 53 years of age, domiciled in Jakarta. Holds a bachelor's degree in Law from University of Indonesia and in Accounting from Indonesian State College of Accountancy, and a Master of Science in Finance from George Washington University, USA. He is a Certified Internal Auditor, Certified Fraud Examiner, certified Chartered Accountant (CA) and CPA (Australia), and certified in risk management assurance.

Appointed as Commissioner of the Company on 21 March 2019 pursuant to Notary Deed No. 31 dated 21 March 2019, with the second term of office until 21 March 2022. Appointed as Commissioner for the first time on 2 June 2017, based on Notary Deed No. 7 dated 9 August 2017.

Previously worked for the Indonesian Government as Director of State Securities Management and Secretary in the Directorate General of Debt Management at the Ministry of Finance, as Commissioner of PT Indonesia Power and PT Perusahaan Pengelola Aset, as Executive Director at ADB, and the Dean of the Board of Directors of ADB (2017).

He is serving concurrently as Strategic Planning Advisor at the Secretariat General of the Ministry of Finance and the Acting Director of the Center for Financial Profession Supervisory at the Ministry of Finance.

He is not affiliated with any members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company. He is a representative of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).



Lodewijk Govaerts

Komisaris
Commissioner

Warga negara Belanda, usia 55 tahun, berdomisili di Amsterdam, Belanda. Memegang gelar Sarjana dan Pascasarjana dari University of Groningen. Menamatkan program pascasarjana Wagner untuk Tata Kelola Perusahaan untuk Direktur Non-Eksekutif, dan program FinTech dari Harvard University. Beliau juga merupakan *Chartered Banker* yang terdaftar di Asian Institute of Chartered Bankers.

Diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada 26 Juli 2019 berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 14 Agustus 2019, untuk masa kerja hingga 21 Maret 2022.

Lodewijk berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang jasa keuangan, dengan peran kepemimpinan eksekutif senior di sejumlah bank global, seperti ABN AMRO Bank dan Scotiabank, di 8 negara di Asia, Australia, Eropa dan Karibia. Pengalamannya tersebar di semua bidang perbankan, termasuk Perbankan Korporat & Investasi, Manajemen Kekayaan, dan Perbankan Ritel & Komersial. Peran senior sebelumnya termasuk *Country CEO* Scotiabank Malaysia, *Country CEO* ABN AMRO Indonesia, *Asia Pacific & Middle East Head of Credit Portfolio Management* ABN AMRO, dan *Assistant Managing Director* MCB - Scotiabank Dutch Caribbean. Sebelumnya, Lodewijk pernah menjabat sebagai dewan pengawas tiga bank ritel & komersial dan bursa efek *start-up*.

Saat ini merangkap jabatan sebagai *Managing Director* di perusahaan *boutique Financial Advisory* miliknya sendiri, yang memberikan layanan konsultasi untuk perusahaan dan investor terkait isu ESG di bidang energi, agrikultur, kesehatan, dan *fintech*.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan. Merupakan perwakilan dari Asian Development Bank.

Dutch citizen, 55 years of age, domiciled in Amsterdam, the Netherlands. Holds a BBA and MBA degree from University of Groningen. Completed Wagner's post-graduate course Corporate Governance for Non-Executive Directors and Harvard University's FinTech course. In addition, he is a Chartered Banker of the Asian Institute of Chartered Bankers.

Appointed as Commissioner of the Company on 26 July 2019 pursuant to Notary Deed No. 10 dated 14 August 2019, with the term of office until 21 March 2022.

Lodewijk has more than 25 years of experience in financial services, with senior executive leadership roles in global banks such as ABN AMRO Bank and Scotiabank, in 8 countries across Asia, Australia, Europe and the Caribbean. His experience ranges across all areas in banking, including Corporate & Investment Banking, Wealth Management and Retail & Commercial Banking. His past senior roles included Country CEO Scotiabank Malaysia, Country CEO ABN AMRO Indonesia, Asia Pacific & Middle East Head of ABN AMRO's Credit Portfolio Management, and Assistant Managing Director of MCB - Scotiabank Dutch Caribbean. Previously, Lodewijk also served on the supervisory boards of three retail & commercial banks and a start-up securities exchange.

He is concurrently Managing Director of his own Financial Advisory boutique advising companies and investors in the ESG energy, agriculture, health and FinTech sectors.

He is not affiliated with any members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company. He is a representative of the Asian Development Bank.



Dr. Andreas Zeisler

Komisaris
Commissioner

Warga negara Jerman, usia 61 tahun, berdomisili di Köln, Jerman. Memegang gelar Diploma bidang Keuangan Internasional dari Finance Institute, Rusia, dan gelar doktoral di bidang Ekonomi dari University of Economy, Jerman.

Diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada 21 Maret 2019 berdasarkan Akta Notaris No. 31 tanggal 21 Maret 2019, untuk masa kerja hingga 21 Maret 2022.

Pernah bekerja antara lain sebagai *Director for Credit Policy of Emerging Market* di Kementerian Keuangan, Berlin Timur (1983–1990), *Business Consultant* di DAV Wirtschaftsberatungsgesellschaft (1990–1993), *Senior Investment Manager for CEE (Central and Eastern Europe) and CIS (Commonwealth of Independent States)*, *Regional Manager for Baltic States*, dan *CEO DEG Private Equity Fund* di Rusia di Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG) (1993–2002).

Saat ini merangkap jabatan sebagai *Head of Financial Institutions (Equity) Department* di DEG.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan. Merupakan perwakilan dari DEG.

German citizen, 61 years of age, domiciled in Köln, Germany. Holds a Diploma in International Finance from Finance Institute, Russia, and a doctorate degree in Economics from University of Economy, Germany.

Appointed as Commissioner of the Company on 21 March 2019 pursuant to Notary Deed No. 31 dated 21 March 2019, with the term of office until 21 March 2022.

Prior experiences include as Director for Credit Policy of Emerging Market at the Ministry of Finance, East Berlin (1983–1990), Business Consultant at DAV Wirtschaftsberatungsgesellschaft (1990–1993), Senior Investment Manager for CEE (Central and Eastern Europe) and CIS (Commonwealth of Independent States), Regional Manager for Baltic States, and the CEO of DEG Private Equity Fund in Russia at Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG) (1993–2002).

He is serving concurrently as Head of Financial Institutions (Equity) Department at DEG.

He is not affiliated with any members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company. He is a representative of DEG.



Richard Lyon Ranken

Komisaris
Commissioner

Warga negara Australia, usia 72 tahun, berdomisili di Australia.

Sebelum diangkat sebagai Komisaris Perseroan, pernah menjabat sebagai anggota direksi berbagai perusahaan di Asia dan Australia yang bergerak di sektor infrastruktur, keuangan, agribisnis, dan manufaktur. Pernah mengetuai sejumlah Komite Audit, Risiko dan Tata Kelola. Dalam kariernya di International Finance Corporation, beliau terakhir menjabat Direktur untuk Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia.

Beliau memegang gelar Sarjana bidang Ekonomi Pertanian dan Magister bidang Administrasi Publik. Bapak Ranken telah menyelesaikan program manajemen senior di Harvard University/World Bank, dan merupakan *Graduate Member* dari Australian Institute of Company Directors.

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan selain bertugas sebagai Komisaris Perseroan.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan. Merupakan perwakilan dari IFC.

Australian citizen, 72 years of age, domiciled in Australia.

Prior to his appointment as one of the Company's Commissioners, he served on corporate boards in Asia and Australia covering infrastructure, the financial sector, agribusiness and manufacturing. He has chaired Audit, Risk and Governance Committees. In his career at the International Finance Corporation, he was most recently the Director for East Asia and Pacific, including Indonesia.

He holds Bachelor's and Master's degrees in Agricultural Economics and Public Administration respectively. He has completed the Harvard University/World Bank senior management program, and is a Graduate Member of the Australian Institute of Company Directors.

He currently holds no other positions apart from serving as the Company's Commissioner.

He is not affiliated with any members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company. He is a representative of IFC.



Ken Tomisaki

Komisaris
Commissioner

Warga negara Jepang, usia 49 tahun, berdomisili di Jepang. Memegang gelar Sarjana Hukum dari Waseda University, Jepang, dan *Master of Business Administration* dari Stanford University, AS.

Diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada 12 Juni 2020 berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 16 Juni 2020, untuk masa kerja hingga 12 Juni 2023.

Pernah bekerja antara lain sebagai Deputy Direktur di Japan Bank for International Cooperation, *Director for Coverage and Structured Finance* di Natixis Tokyo Branch (2009–2012), *Associate Director in Structured Export Finance* di DEPFA Bank (2008–2009), dan *Vice President at the Emerging Markets Department* di Deutsche Bank (2006–2008).

Saat ini merangkap jabatan sebagai *General Manager for Structured Finance Department* in Asia Pacific di Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Singapura.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan. Merupakan perwakilan dari SMBC.

Japanese citizen, 49 years of age, domiciled in Japan. Has a bachelor's degree in Law from Waseda University, Japan, and a Master of Business Administration from Stanford University, USA.

Appointed as Commissioner of the Company on 12 June 2020 pursuant to Notary Deed No. 12 dated 16 June 2020, with the term of office until 12 June 2023.

Prior experiences include as Deputy Director at Japan Bank for International Cooperation, Director for Coverage and Structured Finance at Natixis Tokyo Branch (2009–2012), Associate Director in Structured Export Finance at DEPFA Bank (2008–2009), and Vice President at the Emerging Markets Department of Deutsche Bank (2006–2008).

He is serving concurrently as General Manager for Structured Finance Department in Asia Pacific at Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) in Singapore.

He is not affiliated with any members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company. He is a representative of SMBC.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris di 2020
Training and Competence Development Programmes Attended by BOC Members in 2020

Nama dan Jabatan Name and Position	Judul Program Programme Title	Pelaksana Organiser	Tanggal Date
Bhimantara Widyajala Komisaris Commissioner	Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah dan Fatwa	MUI	30 Januari/January
	The Role of Internal Audit in the Pandemic	IIAI	21 Mei/May
	3-in-1 Certification (CPHRM, HRBP, HRMP)	CORPHR	25 Juni/June
	Kontribusi Pelatihan Dasar Pengawas Syariah	MUI	27 Agustus/August
Yon Aرسال Komisaris Commissioner	IIA National Conference	IFC	18 November/November
	Finance for Non-Finance Director Master Programme	IIAI	2 Desember/December
Lodewijk Govaerts Komisaris Commissioner	FinTech Course	Harvard University	April-Juni/June

Perubahan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris

Changes to the Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Di tahun 2020, terjadi beberapa perubahan terhadap komposisi Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

In 2020, there were a number of changes to the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as follows:

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat di tahun 2020
Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners appointed in 2020

Nama Name	Posisi Sebelumnya Prior Position	Penjelasan Perubahan Description of the Change
Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja	Direktur Pelaksana & <i>Chief Investment Officer</i> Managing Director & Chief Investment Officer	Masa jabatan efektif berakhir pada 31 Januari 2020. Term of office effectively ended on 31 January 2020.
Muhamad Al-Arif	Komisaris Commissioner	Masa jabatan efektif berakhir pada 19 Maret 2020. Term of office effectively ended on 19 March 2020.
Hilda Savitri	Direktur Pelaksana & <i>Chief Investment Officer</i> Managing Director & Chief Investment Officer	Masa jabatan efektif berakhir pada 15 Mei 2020. Term of office effectively ended on 15 May 2020.
Rajeev Veeravalli Kannan	Komisaris Commissioner	Masa jabatan efektif berakhir pada 12 Juni 2020. Term of office effectively ended on 12 June 2020.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat di tahun 2020
Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners appointed in 2020

Nama Name	Posisi Position	Tanggal Pengangkatan Appointment Date
Ken Tomisaki	Komisaris Commissioner	12 Juni 2020 12 June 2020
Yon Aرسال	Komisaris Commissioner	22 Juni 2020 22 June 2020

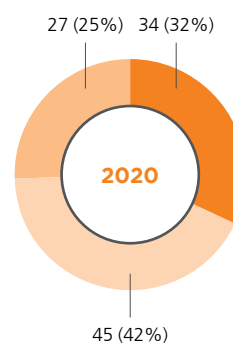
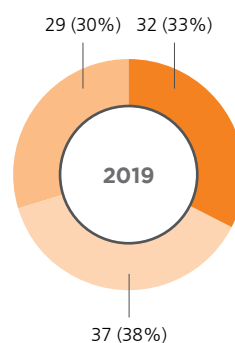
Nama Name	Posisi Position	Tanggal Pengangkatan Appointment Date
M. Ramadhan Harahap	Direktur Pelaksana & <i>Chief Investment Officer</i> Managing Director & Chief Investment Officer	30 Juni 2020 30 June 2020
Y. Bayu Wirawan	Direktur Pelaksana & <i>Chief Investment Officer</i> Managing Director & Chief Investment Officer	30 Juni 2020 30 June 2020
Darmin Nasution	Presiden Komisaris & Komisaris Independen President Commissioner & Independent Commissioner	14 Juli 2020 14 July 2020

Profil Tenaga Kerja

Workforce Profile

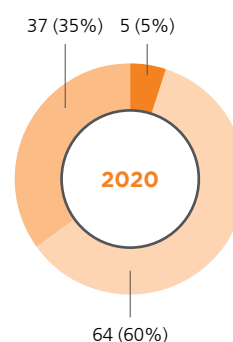
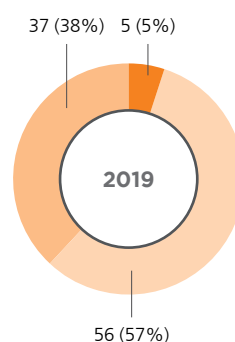
Profil Karyawan berdasarkan Jenjang Kepangkatan Workforce Profile by Position Level

Keterangan Description	2019	2020
 Pelaksana Staff	32 (33%)	34 (32%)
 Manajer Madya Middle Manager	37 (38%)	45 (42%)
 Eksekutif Executive	29 (30%)	27 (25%)
Total	98 (100%)	106 (100%)



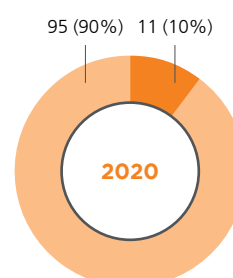
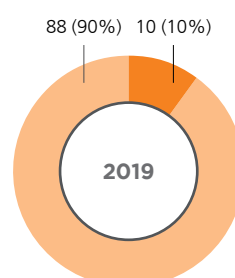
Profil Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan Workforce Profile by Level of Education

Keterangan Description	2019	2020
 Diploma Diploma	5 (5%)	5 (5%)
 Strata 1 Bachelor's Degree	56 (57%)	64 (60%)
 Strata 2 atau lebih tinggi Master's Degree or higher	37 (38%)	37 (35%)
Total	98 (100%)	106 (100%)



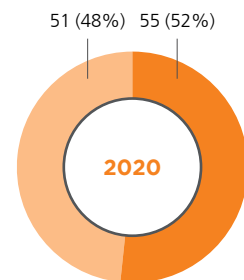
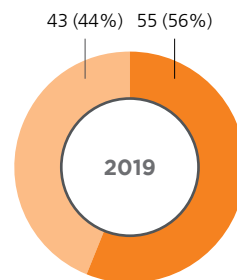
Profil Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian Workforce Profile by Employment Status

Keterangan Description	2019	2020
 Kontrak Contract	10 (10%)	11 (10%)
 Tetap Permanent	88 (90%)	95 (90%)
Total	98 (100%)	106 (100%)



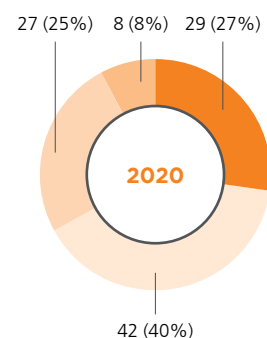
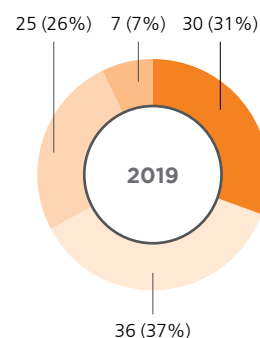
Profil Karyawan berdasarkan Gender Workforce Profile by Gender

Keterangan Description	2019	2020
■ Laki-laki Male	55 (56%)	55 (52%)
■ Perempuan Female	43 (44%)	51 (48%)
Total	98 (100%)	106 (100%)



Profil Karyawan berdasarkan Usia Workforce Profile by Age

Keterangan Description	2019	2020
■ 22–30	30 (31%)	29 (27%)
■ 31–40	36 (37%)	42 (40%)
■ 41–50	25 (26%)	27 (25%)
■ 51–55	7 (7%)	8 (8%)
Total	98 (100%)	106 (100%)



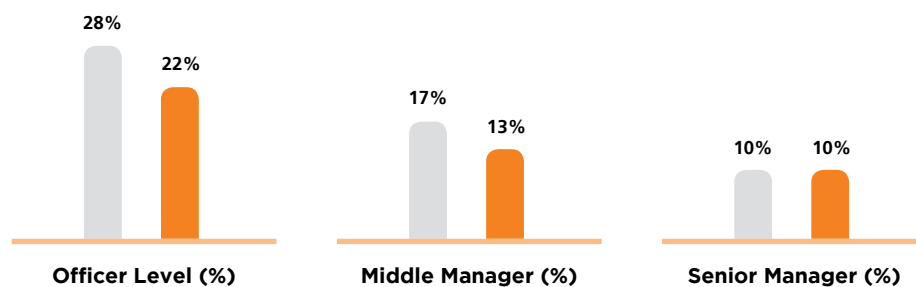
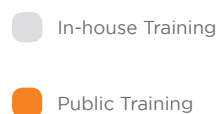
Pengembangan Kompetensi di 2020 Competence Development in 2020

Keterangan Description	Jam Pelatihan berdasarkan Tingkat Jabatan Training Hours by Level						Total
	Officer	%	Middle Manager	%	Senior Manager (ex. ExComm)	%	
Total Jam Pelatihan Total Training Hours	3.419	50	2.053	30	1.382	20	6.854

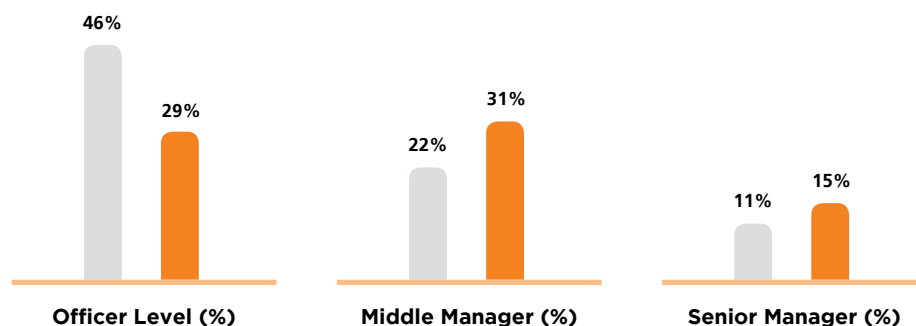
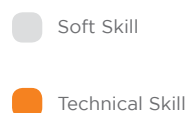
Jenis Pelatihan / Training Type							
Internal In-house Training	1.906	28	1.195	17	664	10	3.765
Umum Public Training	1.513	22	85	13	718	10	3.089

Tujuan Pelatihan / Training Objective							
Soft Skill	1.416	46	679	22	356	11	2.441
Technical Skill	2.003	29	1.356	31	1.036	15	4.395

Jenis Pelatihan Training Type



Tujuan Pelatihan Training Objective



Total Biaya Pelatihan Karyawan di 2020
Total Employee Competence Development in 2020

Rp615,823,002

Komposisi Pemegang Saham Shareholding Structure

Pemegang Saham Shareholder		Jumlah Saham (Lembar) Total Shares (Share)	Nilai Nominal Nominal Amount (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
	■ PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)	600.000	600.000.000.000	30,00%
	■ Asian Development Bank (ADB)	399.800	399.800.000.000	19,99%
	■ International Finance Corporation (IFC)	399.800	399.800.000.000	19,99%
	■ DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft	302.400	302.400.000.000	15,12%
	■ Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	298.000	298.000.000.000	14,90%
	Total	2.000.000	2.000.000.000.000	100,00%

Setiap Pemegang Saham IIF memiliki lebih dari 5% modal disetor. Pemegang Saham Utama IIF adalah SMI. Di IIF tidak terdapat Pemegang Saham Pengendali.

Every Shareholder of IIF has more than 5% paid-in capital. SMI is the Major Shareholder of IIF. There is no Controlling Shareholder at IIF.

Profil Pemegang Saham

1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)

SMI adalah BUMN yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 26 Februari 2009 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09067.AH.01.01 tanggal 24 Maret 2009, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011180.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 19 Mei 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 13273/2009. Anggaran Dasar SMI telah mengalami perubahan beberapa kali, dengan yang terakhir dicatat dalam Akta No. 19 tanggal 16 Oktober 2020, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut (i) telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0071181.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020; dan (ii) telah diakui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0399024 Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020.

SMI didirikan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2020. SMI merupakan BUMN yang 100% sahamnya sepenuhnya dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, SMI mengacu pada Peraturan OJK No. 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Shareholders' Profile

1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)

SMI is an SOE established based on the Deed of Establishment No. 17 dated 26 February 2009, made before Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-09067.AH.01.01 dated 24 March 2009, and registered in the Company Register No. AHU-0011180.AH.01.09 Tahun 2009 dated 24 March 2009, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 40 dated 19 May 2009, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 13273/2009. SMI's Article of Association had been amended several times, and the latest amendment was stipulated in Deed No. 19 dated 16 October 2020, made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, which amendment (i) has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter No. AHU-0071181.AH.01.02 Tahun 2020 dated 16 October 2020; and (ii) has been acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter No. AHU-AH.01.03-0399024 Tahun 2020 dated 16 October 2020.

SMI was founded with the purpose of implementing the Government Regulation No. 66/2007 on Capital Investment of the Republic of Indonesia for the Establishment of Perusahaan Perseroan (Persero) in Infrastructure Financing, as amended by the Government Regulation No. 75/2008 and Government Regulation No. 53/2020. SMI is a SOE whose shares are 100% fully owned by the Government of the Republic of Indonesia through the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. Further, in carrying out its business activities, SMI refers to OJK Regulation No. 46/POJK.05/2020 on Infrastructure Financing Companies.

2. Asian Development Bank (ADB)

ADB berkomitmen untuk mewujudkan kawasan Asia Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta mempertahankan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan tahun 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggotanya, yang 49 di antaranya berasal dari kawasan Asia Pasifik. Instrumen utamanya untuk membantu negara-negara anggotanya adalah dialog kebijakan, pinjaman, investasi ekuitas, garansi, hibah, dan bantuan teknis.

3. International Finance Corporation (IFC)

IFC—organisasi yang terafiliasi dengan World Bank dan anggota World Bank Group—merupakan institusi pembangunan global terbesar yang berfokus pada sektor swasta di negara berkembang. IFC beroperasi di lebih dari 100 negara, memanfaatkan permodalan, keahlian, dan pengaruhnya untuk menciptakan pasar dan kesempatan di negara-negara berkembang. Di tahun buku 2020, IFC menyalurkan USD 22 miliar kepada badan usaha swasta dan institusi keuangan di negara-negara berkembang, memberdayakan sektor swasta untuk memberantas kemiskinan ekstrem dan mewujudkan pemerataan kemakmuran.

4. DEG – Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft

DEG didirikan berdasarkan Memorandum of Association of DEG yang telah diperbaharui terakhir kali pada 20 Februari 2017. DEG bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta di negara-negara berkembang, Eropa Tengah dan Timur, serta New Independent States, dan juga negara-negara yang disetujui oleh keputusan pemegang saham.

5. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

SMBC adalah salah satu bank dengan aset terbesar di Jepang. SMBC berkantor pusat di Tokyo, Jepang, dan didirikan pada tahun 2001 melalui Akta Pendirian yang terakhir diubah pada Juni 2019 sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Jepang. SMBC merupakan lembaga keuangan global terkemuka dan anggota inti dari Sumitomo Mitsui Financial Group ("SMBC Group"). Di bawah manajemen perusahaan SMBC Group, SMBC menawarkan layanan perbankan personal, korporat, dan investasi ke jaringan yang menjangkau 40 negara dan wilayah, 16 di antaranya di Asia. SMBC hadir di Indonesia sejak 1989. Pada tahun 2019, PT Bank BTPN Tbk (BTPN) didirikan sebagai hasil merger antara PT SMBC Indonesia dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. BTPN adalah bank universal yang menyediakan rangkaian produk dan layanan lengkap kepada nasabah korporasi dan individu.

2. Asian Development Bank (ADB)

ADB is committed to achieving a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and the Pacific, while sustaining its efforts to eradicate extreme poverty. Established in 1966, it is owned by 68 members—49 from the region. Its main instruments for helping its developing member countries are policy dialogue, loans, equity investments, guarantees, grants, and technical assistance.

3. International Finance Corporation (IFC)

IFC—a sister organisation of the World Bank and member of the World Bank Group—is the largest global development institution focused on the private sector in emerging markets. It works in more than 100 countries, using its capital, expertise, and influence to create markets and opportunities in developing countries. In fiscal year 2020, IFC invested USD 22 billion in private companies and financial institutions in developing countries, leveraging the power of the private sector to end extreme poverty and boost shared prosperity.

4. DEG – Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft

DEG was established based on the Memorandum of Association of DEG, which was last amended on 20 February 2017. DEG aims to promote the growth of private sector in emerging markets, Central and Eastern Europe, and New Independent States, as well as those approved in the shareholders' resolutions.

5. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

SMBC is one of the largest Japanese banks by asset headquartered in Tokyo, Japan, and was established in 2001 through the Deed of Establishment which was last amended in June 2019 pursuant to the prevailing laws and regulations of Japan. SMBC is also a leading global financial institution and a core member of the Sumitomo Mitsui Financial Group ("SMBC Group"). Under the management of SMBC Group companies, SMBC offers personal, corporate and investment banking services to their network that extends across 40 countries and regions, 16 of which are in Asia. SMBC's presence in Indonesia had been established since 1989. In 2019, PT Bank BTPN Tbk (BTPN) was established as a result of merger between PT SMBC Indonesia and PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. BTPN is a universal bank that provides a full suite of products and services to corporate and individual customers.

Komposisi Kepemilikan Saham Lokal dan Asing

Per 31 Desember 2020, pemegang saham IIF terdiri dari satu institusi lokal dan empat institusi asing, dengan rincian sebagai berikut.

Composition of Local and Foreign Ownership of Shares

As at 31 December 2020, the shareholders of IIF consisted of one local institution and four foreign institutions, as detailed below.

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares (Share)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
Kepemilikan Institusi Lokal Ownership by Local Institutions		
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)	600.000	30,00%
Kepemilikan Institusi Asing Ownership by Foreign Institutions		
Asian Development Bank (ADB)	399.800	19,99%
International Finance Corporation (IFC)	399.800	19,99%
DEG – Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft	302.400	15,12%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	298.000	14,90%

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Per 31 Desember 2020, tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham IIF.

BOC and BOD's Share Ownership

No members of the BOC and BOD owned IIF shares as at 31 December 2020.

Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Subsidiaries and Associated Entities

IIF merupakan anggota dari Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL).

IIF is a member of the Indonesian Telematics Society (MASTEL).

Kronologi Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Hingga akhir tahun 2020, IIF tidak pernah mencatatkan sahamnya di bursa efek manapun. Dengan demikian, informasi mengenai kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku tidak tersedia dalam laporan ini.

Up to the end of 2020, IIF had not listed its shares on any stock exchange. Hence, no information on share-listing chronology, total outstanding shares, nominal value, and offering price from initial listing to the end of the fiscal year is provided in this report.

Kronologi Pencatatan Obligasi

Bond Listing Chronology

Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016

Pada tanggal 29 Juni 2016, IIF memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-336/D.04/2016 untuk penawaran umum Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 dan telah dicatatkan pada BEI pada 19 Juli 2016.

IIF telah melunasi Pinjaman Seri A sesuai jatuh temponya, yaitu pada 19 Juli 2019.

Bond I Indonesia Infrastructure Finance Year 2016

On 29 June 2016, IIF received an Effective Statement from OJK No. S-336/D.04/2016 to conduct public offering of Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Year 2016, which were listed on IDX on 19 July 2016.

IIF has settled the Series A Loan according to its maturity date, on 19 July 2019.

Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019

Pada 13 Desember 2019, IIF memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-198/D.04/2019 untuk penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I dan II Tahun 2019 yang telah dicatatkan pada BEI masing-masing pada 19 Desember 2019 dan 22 Oktober 2020.

IIF telah melunasi Pinjaman Seri A sesuai jatuh temponya, yaitu pada 28 Desember 2020.

Shelf Registration Bond I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019

On 13 December 2019, IIF received an Effective Statement from OJK No. S-198/D.04/2019 to conduct continuous public offering of Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I and II Year 2019, which were listed on IDX on 19 December 2019 and 22 October 2020, respectively.

IIF has settled the Series A Loan according to its maturity date, on 28 December 2020.

Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020

Pada tanggal 13 Desember 2019, IIF memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-198/D.04/2019 untuk penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 yang telah dicatatkan pada BEI pada 22 Oktober 2020.

Shelf Registration Bond I of Indonesia Infrastructure Finance Phase II Year 2020

On 13 December 2019, IIF received an Effective Statement from OJK No. S-198/D.04/2019 to conduct continuous public offering of Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase II Year 2019, which were listed on IDX on 22 October 2020.

Surat Utang Jangka Menengah

Pada tanggal 24 Oktober 2018, IIF menerbitkan Medium Term Notes (MTN) Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2018. Perseroan telah melakukan pelunasan MTN sesuai dengan tanggal jatuh temponya, yaitu 10 November 2019.

Medium Term Notes

On October 24, 2018, IIF issued Medium Term Notes (MTN) of Indonesia Infrastructure Finance Year 2018. The Company has settled the MTN in accordance with its maturity date, namely on November 10, 2019.

Kronologi Pencatatan Obligasi

Bond Listing Chronology

Nama Obligasi Bond Name	Nilai Pokok Obligasi Bond Principal Value	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tenor	
Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 - Seri A Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Year 2016 - Series A	Rp825.000.000.000	19 Juli/ July 2016	3 tahun/ years	
Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 - Seri B Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Year 2016 - Series B	Rp250.000.000.000	19 Juli/ July 2016	5 tahun/ years	
Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 - Seri C Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Year 2016 - Series C	Rp425.000.000.000	19 Juli/ July 2016	7 tahun/ years	
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 Seri A Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019 - Series A	Rp965.000.000.000	19 Desember/ December 2019	370 hari/ days	
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 - Seri B Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019 - Series B	Rp372.000.000.000	19 Desember/ December 2019	3 tahun/ years	
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 - Seri C Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019 - Series C	Rp163.000.000.000	19 Desember/ December 2019	5 tahun/ years	
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 Seri A Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase II Year 2020 - Series A	Rp570.000.000.000	22 Oktober/ October 2020	367 hari/ days	
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 - Seri B Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase II Year 2020 - Series B	Rp810.000.000.000	22 Oktober/ October 2020	3 tahun/ years	
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 - Seri C Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase II Year 2020 - Series C	Rp120.000.000.000	22 Oktober/ October 2020	5 tahun/ years	

Tabel Kronologis Surat Utang jangka Menengah

Table of Medium Term Notes Chronology

Nama Obligasi Bond Name	Nilai Pokok Obligasi Bond Principal Value	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tenor	
MTN Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2018 / MTN of Indonesia Infrastructure Finance Year 2018	Rp200.000.000.000	24 Oktober/ October 2018	370 hari/ days	

	Kupon Coupon	Jatuh Tempo Maturity Date	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Rating (Pefindo)		Tempat Pencatatan Listed on
				2019	2020	
	8,25%	19 Juli/ July 2019	Lunas Settled	AAA	AAA	IDX
	8,70%	19 Juli/ July 2021	Belum Lunas (karena belum jatuh tempo) Not Settled (Not yet maturity date)	AAA	AAA	IDX
	9,00%	19 Juli/ July 2023	Belum Lunas (karena belum jatuh tempo) Not Settled (Not yet maturity date)	AAA	AAA	IDX
	6,75%	28 Desember/ December 2020	Lunas Settled	AAA	AAA	IDX
	7,75%	18 Desember/ December 2022	Belum Lunas (karena belum jatuh tempo) Not Settled (Not yet maturity date)	AAA	AAA	IDX
	7,90%	18 Desember /December 2024	Belum Lunas (karena belum jatuh tempo) Not Settled (Not yet maturity date)	AAA	AAA	IDX
	5,00%	28 Oktober/ October 2021	Belum Lunas (karena belum jatuh tempo) Not Settled (Not yet maturity date)	-	AAA	IDX
	6,65%	22 Oktober/ October 2023	Belum Lunas (karena belum jatuh tempo) Not Settled (Not yet maturity date)	-	AAA	IDX
	6,90%	22 Oktober/ October 2025	Belum Lunas (karena belum jatuh tempo) Not Settled (Not yet maturity date)	-	AAA	IDX

	Kupon Coupon	Jatuh Tempo Maturity Date	Status Pembayaran Payment Status
	8,35%	10 November/ November 2019	Lunas Settled

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Institutions and Professionals

Lembaga/ Profesi Institution/ Professional	Nama Name	Alamat Address	Jasa yang Diberikan Services Rendered	Biaya Jasa di 2020 Service Fee in 2020 (Rp)	Periode Penugasan Assignment Period
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Purwantono Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190	1. Melakukan audit untuk Laporan Keuangan tahun 2020. Audit of 2020 Financial Statements. 2. Melakukan <i>review</i> atas laporan kinerja Perusahaan. Review of the Company's performance reports.	Rp1,594,860,000	1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 1 January 2020 to 31 December 2020
Pemeringkat Kredit Rating Agency	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) PT Fitch Ratings Indonesia	Panin Tower Senayan City, 17 th Floor Jl. Asia Afrika Lot.19, Jakarta 12220 DBS Bank Tower 24 th Floor, Suite 2403, Jl. Prof.Dr. Satrio Kav 3-5, Jakarta 12940	Pemeringkat kredit untuk penerbitan Obligasi IIF tahun 2020. Rating Agency for the Company's bonds issuance 2020. Pemeringkat kredit untuk penerbitan EMTN (Euro Medium Term Notes) IIF tahun 2020 Credit rating for IIF EMTN (Euro Medium Term Notes) 2020	Rp562,500,000 USD 75.000	1 Januari 2020 sampai 21 Oktober 2020 1 January 2020 to 21 October 2020 23 Desember 2020 sampai 23 Desember 2021 23 December 2020 to 23 December 2021
Wali Amanat Trustee	PT Bank Mega Tbk	Menara Bank Mega Lt. 16 Jl. Kapten Tendean No. 12-14 A, Jakarta 12790	Wali amanat untuk penerbitan Obligasi IIF Tahun 2020. Trustee for the Company's bonds issuance 2020.	Rp85,000,000	1 Januari 2020 sampai 21 Oktober 2020 1 January 2020 to 21 October 2020
Konsultan Hukum Legal Consultant	Assegaf Hamzah & Partners	Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jend. Gatot Subroto No. Kav 18 Jakarta 12710	Konsultan hukum untuk penerbitan Obligasi IIF Tahun 2020. Law counsel for the Company's bonds issuance 2020.	Rp300,000,000	1 Januari 2020 sampai 21 Oktober 2020 1 January 2020 to 21 October 2020

Penghargaan dan Sertifikasi

Accolades and Certifications

Nama Penghargaan/Award Name:
CFO Tangguh 2020

Untuk/Award to:
Ibu Devi Pradnya Paramita

Dari/Award by:
Woman Obsession Media

Informasi pada Situs Web Perusahaan

Information on the Company's Website

IIF memiliki situs web resmi, www.iif.co.id, yang memuat informasi mengenai:

- **Pemegang Saham**
Pilih Menu "Tentang IIF" → "Pemegang Saham".
- **Kode Etik**
Pilih Menu "Hubungan Investor" → "Tata Kelola Perusahaan" → "Dokumen-dokumen Lain". Pada laman ini tersedia akses untuk mengunduh Kode Etik IIF.
- **RUPS**
Pilih Menu "Hubungan Investor" → "Tata Kelola Perusahaan" → "Dokumen-dokumen Lain". Pada laman ini tersedia akses untuk mengunduh informasi mengenai RUPS dalam dua tahun terakhir.
- **Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan**
Pilih Menu "Hubungan Investor" → "Informasi Keuangan" → "Laporan Tahunan" atau "Laporan Keuangan". Laporan-laporan tersebut tersedia selama lima tahun ke belakang.
- **Profil Dewan Komisaris**
Pilih Menu "Tentang IIF" → "Organisasi" → "Dewan Komisaris".
- **Profil Direksi**
Pilih Menu "Tentang IIF" → "Organisasi" → "Komite Eksekutif".
- **Piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal**
Pilih Menu "Hubungan Investor" → "Tata Kelola Perusahaan" → "Dokumen-dokumen Lain". Pada laman ini tersedia akses untuk mengunduh Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi.

Untuk Piagam Komite-komite, baik Komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, pilih Menu "Hubungan Investor" → "Tata Kelola Perusahaan" → "Komite". Pada laman ini tersedia akses untuk mengunduh piagam dari masing-masing komite.

Untuk Piagam Unit Audit Internal, Untuk Piagam Komite-komite, baik Komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, pilih Menu "Hubungan Investor" → "Tata Kelola Perusahaan" → "Sekretaris Perusahaan & Audit Internal". Pada laman ini tersedia akses untuk mengunduh Piagam Unit Audit Internal.

Pada situs web IIF juga memuat informasi penting lainnya, seperti visi dan misi, strategi bisnis, sumber daya manusia, produk dan layanan, portofolio dan proyek, Policy Brief, struktur organisasi, hubungan investor, serta Sosial dan Lingkungan.

IIF maintains its official website at www.iif.co.id, which contains information on:

- **Shareholders**
From the menu, select "About IIF" → "Shareholders".
- **Code of Conduct**
From the menu, select "Investor Relations" → "Corporate Governance" → "Other Documents". In this section, there is a clickable link to download IIF's Code of Conduct.
- **GMS**
From the menu, select "Investor Relations" → "Corporate Governance" → "Other Documents". In this section, there is a clickable link to download the information on the GMS in the last two years.
- **Financial Statements and Annual Reports**
From the menu, select "Investor Relations" → "Financial Information" → "Annual Report" or "Financial Statements". Reports for the last five years are downloadable from here.
- **BOC Profile**
From the menu, select "About IIF" → "Organisation" → "Board of Commissioners".
- **BOD Profile**
From the menu, select "About IIF" → "Organisation" → "Executive Committee".
- **Charters of the BOC, BOD, Committees, and Internal Audit Unit**
From the menu, select "Investor Relations" → "Corporate Governance" → "Other Documents". In this section, there is a clickable link to download the BOC and BOD Charters.

For the Charters of Committees, either those under the BOC or BOD, select "Investor Relations" → "Corporate Governance" → "Committees". In this section, there is a clickable link to download the charter of each committee.

For the Internal Audit Charter, select "Investor Relations" → "Corporate Governance" → "Corporate Secretary & Internal Audit". In this section, there is a clickable link to download the Internal Audit Charter.

IIF's website also contains other key information regarding, among others: vision and mission, business strategies, human resources, products and services, portfolio and projects, Policy Brief, organisation structure, investor relations, and Social and Environment.





Sumber Daya Manusia

Human Resources

Bagi IIF, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting yang berperan sebagai penggerak roda operasional bisnis di tengah tantangan dan dinamika bisnis. Dengan SDM yang kompeten, IIF memiliki kapabilitas untuk mencapai target bisnis serta mewujudkan visi dan misi Perseroan. IIF bertanggung jawab untuk menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas sehingga mampu mempersiapkan diri menghadapi persaingan industri yang semakin dinamis dan kompetitif.

Perumusan kebijakan SDM IIF senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai inti IIF, yaitu:

- **Kolaborasi**
IIF memiliki komitmen terhadap kepercayaan, rasa hormat, komunikasi terbuka, pengakuan atas prestasi, pemahaman atas tujuan organisasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.
- **Keunggulan**
IIF memiliki komitmen terhadap keunggulan seperti ketelitian, tidak memberikan toleransi terhadap kesalahan, akurat, mampu memenuhi harapan, mengedepankan sikap profesionalisme dalam bekerja dan mampu memecahkan masalah.
- **Komitmen terhadap Bisnis Infrastruktur**
IIF memiliki komitmen untuk menjadi pakar bisnis infrastruktur di Indonesia.

Ketiga nilai di atas diharapkan dapat diimplementasikan secara benar oleh setiap insan IIF, baik secara internal ketika bekerja dalam tim maupun secara eksternal ketika berinteraksi dengan para mitra bisnis. Selain itu, IIF juga berkomitmen untuk selalu menunjang tinggi prinsip kesetaraan seluruh karyawan hal tersebut tercermin di dalam komposisi karyawan IIF. Dengan memperkuat implementasi ketiga nilai inti IIF yang sejalan dengan prinsip kesetaraan, IIF berharap dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan para mitra bisnis maupun pemangku kepentingan.

Badan Pengelola SDM

Divisi SDM bertugas mengelola SDM Perseroan secara terintegrasi dan selaras dengan tujuan dan rencana Perseroan. Divisi SDM bertanggung jawab menangani hal-hal yang terkait dengan kebutuhan rekrutmen, pengembangan dan penilaian kinerja SDM di IIF.

IIF considers Human Resources (HR) as an important asset that drives business operations amidst business challenges and dynamics. Competent HR enables IIF to achieve the determined business targets and realize its vision and mission. Therefore, IIF is responsible for building excellent and qualified HR that can support the Company in facing a dynamic and competitive industry.

The establishment of IIF HR policy is grounded in the core values of IIF, namely:

- **Collaboration**
IIF is committed to trust, respect, open communication, recognition of achievements, understanding of organizational objectives and collaboration to achieve them.
- **Excellence**
IIF is committed to excellence such as thoroughness, zero tolerance for errors, accuracy, meeting expectations, prioritizing professionalism at work and being able to solve problems.
- **Commitment to Infrastructure Business**
IIF is committed to be an expert in infrastructure business in Indonesia.

Those three values above are expected to be implemented properly by every IIF personnel, both internally when working with teams or externally when interacting with business partners. IIF is also committed to uphold the principle of equality in embracing all employees, which is reflected in IIF's employee composition. By strengthening the implementation of three core values of IIF that are in line with the principle of equality, IIF strives to build a harmonious relationship with business partners and the stakeholders.

HR Management Body

The HR Division is responsible for managing human assets in the Company in an integrated manner and in accordance with the Company's objectives and plans. The responsibilities of the HR Division include matters relating to recruitment, development, and performance assessment of HR within IIF.

Rekrutmen Karyawan

Pembangunan infrastruktur di Indonesia yang semakin pesat telah membuka peluang bisnis bagi perusahaan yang bergerak di sektor pembiayaan infrastruktur, termasuk IIF. Melalui keunggulan pada setiap produk pembiayaan dan *advisory*, IIF memiliki nilai lebih dibandingkan dengan institusi keuangan umum seperti perbankan.

Agar potensi bisnis dapat dimanfaatkan secara maksimal, IIF harus mengimbangi keunggulan produk dan layanan pembiayaan IIF dengan keandalan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh sebab itu, Perseroan berupaya untuk merekrut profesional muda yang berkompeten dan memiliki kapabilitas dalam menjawab tantangan bisnis melalui pendekatan dan karakteristik usaha IIF.

Pesatnya pembangunan infrastruktur pada tahun 2020 mendorong Perseroan untuk terus mempersiapkan SDM yang unggul, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan potensi SDM, IIF terus mengembangkan strategi manajemen SDM yang didasarkan pada program pengembangan profesional *Flexible Career Path*, yang mencakup *Grade to Grade Promotion* dan *Open Career Path*. Melalui program tersebut, Perseroan dapat segera mengisi posisi-posisi kosong memenuhi kebutuhan Perseroan, meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Perseroan dalam hal SDM, serta memenuhi aspirasi karyawan untuk berkembang dan berkarier di Perseroan.

Dengan ketersediaan dan bantuan dari para praktisi dan profesional senior, IIF berharap bahwa proses regenerasi dapat dilakukan dengan baik untuk mengakomodasi semua kebutuhan mengenai pemasaran produk-produk pembiayaan infrastruktur.

Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

IIF menyadari pentingnya membekali SDM Perseroan dengan kemampuan dan kompetensi, baik secara teknis maupun non-teknis. Dengan mengikutsertakan para karyawan ke berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka, Perseroan optimis akan menghasilkan SDM yang profesional, berkepribadian unggul, dan berjiwa pemimpin.

Sejak Maret 2020, IIF mengalihkan segala bentuk pelatihan menjadi pelatihan berbasis online seperti webinar atau pelatihan virtual. IIF menerapkan kebijakan untuk memasukkan waktu pelatihan *online* tersebut ke dalam jumlah jam pelatihan. Rata-rata jam pelatihan per karyawan per tahun pada tahun 2020 adalah 76 jam.

Pendidikan dan pelatihan karyawan dapat dilihat di halaman 65 dalam Laporan Tahunan ini.

Employee Recruitment

Rapid infrastructure development in Indonesia provided business opportunities for companies engaging in infrastructure financing, including IIF. With its excellence in each financing and advisory product, IIF possesses added value compared to general financial institutions such as banks.

To optimize business potentials, IIF shall balance its financing products and services excellence with HR reliability, both in terms of quantity and quality. Thus, the Company recruits competent young professionals who are capable to address business challenges through IIF's business approach and characteristics.

Intensive infrastructure development in 2020 encouraged the Company to prepare excellent HR in terms of quality and quantity. To optimize HR potential, IIF continues to develop HR management strategy based on professional development program or Flexible Career Path, which includes Grade to Grade Promotion and Open Career Path. Such program enables the Company to immediately fill vacant positions to support the Company's need in improving competitiveness and continuity in terms of HR and also facilitating the employees' aspiration to develop and build their career at the Company.

With the availability of and assistance from senior practitioners and professionals, IIF seeks to implement regeneration process properly to accommodate every need for the marketing of infrastructure financing products.

Employee Education and Training

IIF realizes the importance of providing its HR with technical and non-technical capabilities and competency. By involving its employees in various education and training activities according to their needs, the Company is optimistic in building professional HR with superior personalities and leadership skills.

Since March 2020, IIF has switched all forms of training to online-based training such as webinars or virtual training. IIF implemented a policy to include online training in the calculation of employee training hours. The average training hours per employee per year in 2020 was 76 hours.

Employee education and training can be seen in page 65 of this Annual Report.

Manajemen Kinerja

IIF senantiasa melakukan pemantauan kinerja karyawan untuk memastikan tercapainya visi dan misi Perseroan. Divisi SDM yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SDM telah melakukan program manajemen kinerja yang dikembangkan menggunakan modul penilaian berbasis *Key Performance Indicators* (KPI).

Program Retensi

Untuk mendukung kesejahteraan karyawan sekaligus mempertahankan loyalitas karyawan terhadap Perseroan, IIF menyediakan paket kompensasi dan manfaat yang kompetitif dan proporsional bagi setiap Insan IIF, dengan mempertimbangkan besaran yang berlaku secara umum.

IIF berupaya menekan angka pengunduran diri melalui penyusunan program-program yang dengan kebutuhan-kebutuhan karyawan. Sejumlah inisiatif tersebut terus dijalankan dan dikembangkan secara berkala sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan.

Komunikasi Karyawan

Secara berkala, IIF mengadakan berbagai forum yang dapat dihadiri oleh seluruh karyawan dari berbagai jenjang dan departemen sebagai ruang untuk saling bersilahturahi dan membangun kerja sama yang baik antar departemen. Forum ini juga dapat digunakan sebagai wadah bagi para karyawan yang ingin menyampaikan aspirasi terkait isu-isu Perseroan.

Pada tahun 2020, IIF mengadakan pertemuan virtual sebanyak 7 kali dengan seluruh karyawan, dengan beragam agenda pembahasan.

Remunerasi Karyawan

Dalam rangka meningkatkan kinerja, produktivitas, dan loyalitas karyawan yang menjadi elemen penting bagi IIF dalam mencapai target bisnis yang lebih baik di masa depan, IIF telah menyediakan program kesejahteraan karyawan, yang terdiri dari:

- a. Gaji dan Bonus Kinerja
Struktur gaji dan bonus kinerja yang diterima karyawan didasarkan pada tingkat atau pangkat masing-masing karyawan, ditambah dengan prestasi yang telah dicapai serta kontribusi kepada Perseroan.
- b. Fasilitas dan Tunjangan
Selain gaji pokok, tunjangan komunikasi dan transportasi, IIF juga memberikan fasilitas dan tunjangan lainnya, berupa:
 - Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;

Performance Management

IIF continuously monitors employee performance to ensure the achievement of the Company's vision and mission. The HR Division that is responsible for HR management has developed and implemented performance management program based on *Key Performance Indicators* (KPI).

Retention Program

To support employee welfare and maintain their loyalty to the Company, IIF provides competitive and proportional compensation and benefits package for each IIF personnel by taking into account the generally applicable amount.

IIF strives to reduce the employee turnover rate by formulating programs that are aligned with employees' needs. These initiatives are maintained and will be developed further in the coming years in line with the Company's needs and condition.

Employee Communication

IIF periodically organizes forum that can be attended by all employees from various levels and departments to socialize and foster cooperation between departments. Such forum also serves to facilitate employees who wish to voice their aspiration related to Company issues.

In 2020, IIF has organized 7 virtual meetings involving all employees to discuss various agendas.

Employee Remuneration

To improve performance, productivity, and loyalty of employees as an important element for IIF in achieving higher business targets in the future, IIF provides employee welfare program which consists of:

- a. Salary and Performance Bonus
Structure of salary and performance bonus for employees is based on the grading or position of each employee in addition to their achievements and contributions to the Company.
- b. Facilities and Allowances
In addition to basic salary, communication allowance, and transportation allowance, the Company also provides other facilities and allowances, namely:
 - Social Security Program;

- Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
 - Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan setahun sekali sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Penggantian biaya pengobatan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit untuk karyawan dan anggota keluarganya; dan
 - Tunjangan keanggotaan olahraga.
- Health Security Program;
 - Religious Holiday Allowance Raya ("THR") given annually in accordance with the applicable regulations;
 - Reimbursement for outpatient and inpatient treatments for employees and their family; and
 - Sports membership allowance.

Teknologi Informasi

Information Technology

Daya saing IIF bersandar pada pemanfaatan secara bijak dari teknologi informasi (TI) yang mutakhir dan tepat dalam mendukung proses-proses bisnis yang berlangsung

di sepanjang rantai nilai kegiatan operasionalnya.

IIF memiliki Rencana Strategi Teknologi Informasi (ITSP) dan rencana kerja untuk tahun 2018–2021 yang menjadi acuan dalam pengembangan dan implementasi solusi teknologi. Fokus ITSP adalah memiliki platform TI yang *robust*, organisasi TI yang efektif, meningkatkan integrasi sistem dan keamanan TI, serta meningkatkan keberadaan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membantu pengambilan keputusan, melalui investasi TI dengan biaya yang efisien.

IIF's competitive edge relies partly on judicious use of state-of-the-art information technology (IT) that is effective for supporting the business processes taking place along its

entire operational activities' value chain.

IIF possesses an Information Technology Strategy Plan (ITSP) and its work plan for 2018–2021 which serve as a reference for the development and implementation of technology solutions. The ITSP's focus is to have a robust IT platform, effective IT organization, improved integration of the existing IT systems and security, and increase accuracy and accountability of information to facilitate decision-making, through the implementation of cost-efficient IT investments.

Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi

Pengelolaan sumber daya teknologi dan sistem informasi di IIF dilaksanakan oleh Unit Teknologi Informasi (TI) dalam Divisi Operasional, yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan. Unit TI mendukung pertumbuhan bisnis dengan mengembangkan solusi teknologi dan sistem informasi inovatif untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan masa mendatang, serta memberikan layanan prima kepada semua unit untuk melakukan proses bisnis secara lebih efisien dan efektif.

Untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di bidang TI, IIF memiliki IT Steering Committee yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Direktur Risiko, untuk mengawasi kinerja organisasi Unit TI dan seluruh aset TI IIF.

Information Technology Management and Governance

IIF's technology and information systems resources are managed by the Information Technology Unit (IT Unit) in the Operations Division, which reports to the Finance Director. The IT Unit supports business growth by developing innovative technology solutions and information systems to cater to the existing and future business needs, as well as by delivering excellent service to all units to enable more efficient and effective implementation of business processes.

To ensure the robust implementation IT governance, IIF possesses the IT Steering Committee, consisting of the President Director, the Finance Director, and the Risk Management Director, who oversee the organizational performance of the IT Unit and all its IT assets.

Infrastruktur Teknologi Informasi di IIF

Hingga akhir 2020, IIF mengoperasikan sejumlah sistem TI berikut:

1. *Loan System*, yang dikembangkan untuk meliputi pencatatan *Financing Servicing/Maintenance* yang terintegrasi dengan aplikasi *Financial Accounting and Reporting*. Sistem ini juga melakukan penjadwalan pembayaran, mengawasi keterlambatan pembayaran, dan melakukan perhitungan denda atas keterlambatan tersebut.
2. *Treasury & ALM System*, yang dikembangkan untuk meliputi penempatan dana di pihak ketiga, *funding/borrowing* dan produk *treasury* yang lain. Sistem ini melakukan pencatatan pokok dan perhitungan bunga setiap harinya, untuk direkonsiliasi dengan arus kas di dalam akun bank IIF setiap akhir bulan. Sistem ini juga dapat menampilkan analisis *future value* dari portofolio yang tercatat sesuai dengan *market value* yang berlaku. Sistem ini juga dilengkapi dengan fungsi pemantauan terhadap risiko pasar serta manajemen Aset dan Liabilitas (ALM); diantaranya seperti pemantauan terhadap *limit & control structure* atas investasi treasuri serta rasio-rasio keuangan IIF, pengembangan *Value at Risk* (VaR), serta fungsi analisis *gap* antara aset dan liabilitas.
3. *BR System*, yang merupakan *workflow system*, di mana persetujuan untuk transaksi *procurement, purchasing, reimbursement, expenses* dan *advances* dapat dilakukan secara *on-line* di dalam sistem, termasuk juga persetujuan dan pencatatannya.
4. *Document Management System*, yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan tata kelola dokumen secara digital dengan baik.
5. *Disaster Recovery Centre (DRC)* dan *IT Disaster Recovery Policy and Standard Operating Procedure (DRP)*, yang menjadi acuan bagi Tim Pemulihan Bencana dalam melakukan proses pemulihan sistem dengan cepat sesuai dengan kebutuhan bisnis IIF dan manajemen risiko yang tepat. Fasilitas DRC IIF mencakup seluruh aplikasi utama, yaitu *Financial Accounting and Reporting System, Loan System, dan Treasury System*. IIF secara rutin melaksanakan pengujian (*drill test*) fasilitas ini minimal sekali setahun dengan melibatkan seluruh divisi terkait.
6. *HR-Related systems (HR Database, Leave and Attendance System)*, yang membantu Divisi SDM menjalankan berbagai fungsi operasionalnya sekaligus menjadi sumber basis data karyawan yang utama.
7. *Dropbox*, yang menjadi tempat penerimaan proposal dari vendor yang mengikuti proses tender di IIF. Di tahun 2020, *Dropbox* dikembangkan untuk mencakup lebih banyak data vendor, dan dipakai untuk mendukung pelaporan Manajemen atas pemantauan proses pengadaan.

Information Technology Infrastructure in IIF

By end of 2020, IIF had been operating the following IT systems:

1. *Loan System*, developed to include *Financing Servicing/Maintenance* recording that is integrated with the *Financial Accounting and Reporting* application. This system helps calculate payment schedules, monitors late payments, and calculates fines for these delays.
2. *Treasury & ALM System*, developed to include placement of funds in third parties, *funding/borrowing* and other treasury products. This system records the principal and the calculation of interest on every day basis, which will be reconciled with cash flow in IIF's bank accounts at the end of each month. The system also displays future value analysis of the portfolio recorded in accordance with the applicable market values. This system also is equipped with a function of monitoring market risks and Assets and Liabilities Management (ALM); among others are monitoring of the *limit & control structure* of treasury investments and financial ratios of IIF, development of *Value at Risk* (VaR), and the *gap* analysis function between assets and liabilities.
3. *BR System*, a workflow system whereby the approval process for *procurement, purchasing, reimbursement, expenses, and advances* transactions can be carried out online in the system, including the approval and recording.
4. *Document Management System*, developed to support document management and governance through digital platform.
5. *Disaster Recovery Centre (DRC)* and *IT Disaster Recovery Policy and Standard Operating Procedure (DRP)*, used as a reference for the Disaster Recovery Team in performing the system recovery process quickly in accordance with the business needs of IIF and appropriate risk management. IIF's DRC covers all major applications, namely the *Financial Accounting and Reporting System, the Loan System, and the Treasury System*. IIF regularly drill-tests this facility at least once in a year involving all relevant divisions.
6. *HR-Related systems (HR Database, Leave and Attendance System)*, developed to assist the HR Division in carrying out its various operational functions, as well as to become the main source of employee database.
7. *Dropbox*, a platform to receive proposals from vendors who took part in IIF's tender process. In 2020, *Dropbox* was developed further to be able to cover much more vendor data, and ultimately be used to support the Management's reporting of their monitoring of procurement processes.

8. *S&E Questionnaire*, survei berbasis web yang mendukung Tim S&E dalam mengumpulkan data survei dari nasabah *Financing* terkait dengan aspek S&E. Sistem ini dapat melakukan pelaporan tahunan secara otomatis.
9. *K2 Investment* adalah *Financing Origination* sistem untuk mendukung *work flow* mulai dari proses pencatatan pertemuan awal dengan calon nasabah, serta permohonan calon nasabah dengan menerapkan konsep *Know Your Customer (KYC)*.
10. *K2 Covenant and Conditions*, sistem untuk mengotomasi pemantauan dan pelaporan dari *Conditions* dan *Covenant* dari nasabah *Financing*. *K2 Covenant* telah diterapkan di 2020 dan akan terus disempurnakan di 2021, sementara *K2 Conditions* akan ditingkatkan di triwulan ketiga 2021.
11. *K2 Disbursement*, sistem untuk mendigitalkan proses pencairan oleh Tim Operasi. Dengan sistem ini, semua proses pencairan pinjaman dari nasabah *Financing*, verifikasi document dan persetujuannya tercatat secara otomatis.

IIF mengelola sistem pengamanan TI berstandar tinggi untuk melindungi jaringan dan asetnya. Sistem pengamanan TI yang telah diterapkan hingga akhir 2020 adalah:

- *Inventory and Control of Hardware and Software Assets*
- *Controlled Use of Administrative Privileges*
- *Antivirus and Malware Defenses*
- *Limitation and Control of Network Ports, Protocols and Services*
- *Data Protection/Encryption (laptop)*
- *Secure Configuration for Network Devices*
- *Network and Wireless Access Control*
- *Advance Threat Protection*

Program Kerja Teknologi Informasi Tahun 2020

Sesuai arahan dari ITSP dan IT Steering Committee, fokus pengembangan TI di tahun 2020 adalah pada:

- Diskusi dengan tim Risiko di 2020, pembaruan Kebijakannya akan dilakukan di 2021;
- Relokasi DC dan DRC ditunda hingga triwulan kedua 2021, sesuai persetujuan ITSC;
- DWH berhasil dilaksanakan, dan pengembangan *Dashboard* akan diawali pada akhir triwulan pertama 2021; dan
- Integrasi sistem inti untuk mendukung DWH diselesaikan di 2020, dan akan ditinjau kembali untuk pengembangan *Dashboard* selanjutnya di 2021.

Beberapa aplikasi internal yang berhasil diselesaikan pengembangannya di 2020 adalah *K2 Covenant*, CAP, aplikasi terkait SDM, *K2 Investment*, *K2 Disbursement*, dan *S&E Questionnaire*.

8. *S&E Questionnaire*, a web-based survey to assist the collection of survey data from Financing customers related to S&E aspects. This system also allows annual reporting to be generated automatically.
9. *K2 Investment* is a *Financing Origination* system to support work flow; starting from recording of initial meetings with prospective customers; as well as proposal from prospective customers by applying the *Know Your Customer (KYC)* concept.
10. *K2 Covenant and Conditions* is a system for automating the monitoring and reporting of *Conditions* and *Covenants* of Financing customers. *K2 Covenant* was implemented in 2020 and will be enhanced further in 2021, while *K2 Conditions* enhancement is planned for Q3 2021.
11. *K2 Disbursement*, a system for digitizing the disbursement process carried out by the Operations Team. With this system, all loan disbursement processes from Financing customers, document verification, and approval will be recorded automatically.

IIF maintains a suite of high-standards IT security systems to protect its networks and assets. The systems that had been deployed up to the end of 2020 are:

- *Inventory and Control of Hardware and Software Assets*
- *Controlled Use of Administrative Privileges*
- *Antivirus and Malware Defenses*
- *Limitation and Control of Network Ports, Protocols and Services*
- *Data Protection/Encryption (laptop)*
- *Secure Configuration for Network Devices*
- *Network and Wireless Access Control*
- *Advance Threat Protection*

Information Technology Work Plan for 2020

As directed by the ITSP and the IT Steering Committee, the focus of IT development in 2020 was on:

- Discussion with Risk team was done in 2020, update on the Policy is to be done in 2021;
- Relocation DC and DRC is postponed until Q2 2021 as agreed by ITSC;
- DWH has been implemented, and development on *Dashboard* will be started at the end of Q1 2021; and
- Core systems integration which was required to support DWH has been completed in 2020, and will be further reviewed for the *Dashboard* development in 2021.

Internal application which have been completed in 2020: *K2 Covenant*, CAP, HR-related apps, *K2 Investment*, *K2 Disbursement*, and *S&E Questionnaire*.

Rencana Pengembangan TI di Masa Depan

Sesuai arahan ITSP untuk tiga tahun mendatang, IIF akan menjalankan inisiatif TI berikut:

- Pengembangan aplikasi untuk memastikan transformasi menuju *digitized business process*. Pengembangan ini harus disertai dengan tata kelola yang tepat supaya dapat mencapai *cost-efficient development*;
- Meningkatkan *IT Service Excellence* dengan lebih meningkatkan pemantauan kinerja TI secara tepat dan meningkatkan kemampuan dari organisasi TI;
- Memastikan sistem/aplikasi dari aspek inti (*core*) maupun pendukung (*support*) dapat terintegrasi secara sempurna, dan memastikan keamanan TI yang lebih baik;
- Membangun Sistem Informasi Manajemen yang akurat dan terpercaya untuk dapat membantu pengambilan keputusan yang tepat dan cepat;
- Meningkatkan Sistem Pengamanan (pembaruan perifer *Firewall* dan *Proxy* dengan rencana implementasinya akan dilaksanakan per akhir triwulan pertama 2021) dan penerapan *Network Monitoring Tool*;
- Mengembangkan SOP dan Kebijakan TI;
- Memperbarui Rencana Strategis IT Tiga Tahunan; dan
- Menerapkan inisiatif yang tertunda di 2020.

IT Development Plans for the Future

In line with ITSP's guidance for the next three years, IIF will undertake IT initiatives in:

- Develop applications to ensure the transformation towards digitized business process. This task must be accompanied with appropriate governance to achieve cost-efficient development;
- Increase IT Service Excellence through the improvement of appropriate supervision of IT performance and improve the capability of IT organization;
- Ensure the core and supporting system/application can integrate completely and ensure a better IT security;
- Establish an accurate and accountable Management Information System, to assist appropriate and swift decision making;
- Improve the Security System (refreshed Firewall and Proxy peripherals with the implementation plan to be completed by end of Q1 2021) and implementing the Network Monitoring Tool;
- Develop IT SOP and Policy;
- Renew the 3-Year IT Strategic Plan; and
- Implement initiatives postponed in 2020.

Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa System and Procedures for the Procurement of Goods and Services

Terdapat empat aspek utama yang menjadi pedoman Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, yakni:

- Prinsip pengadaan barang dan jasa
- High Level Process*
- Metodologi
- Sistem

Sebagai acuan dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik staf perusahaan secara umum maupun pada bagian pengadaan, senantiasa mengikuti prinsip-prinsip yang meliputi:

• Transparansi

Transparansi menjadi prinsip utama dalam proses pengadaan. Prinsip ini meliputi penerapan proses pengadaan yang terperinci dan tersedianya sistem yang memastikan bahwa Perusahaan mampu menyediakan beberapa pilihan operator/pemasok yang kompeten dengan harga bersaing dalam menawarkan jasa.

In procuring goods and services, the Company refers to the following guidelines revolving around four main aspects:

- Principles of procurement of goods and services
- High Level Process
- Methodology
- System

As a reference in procuring goods and services, the Company's employees in general as well as procurement staff, will adhere to the following principles:

• Transparency

Transparency is the main principle in any procurement process. This process consists of the implementation of a detailed procurement process and a system to ensure that the Company is able to provide lists of competent operators/suppliers with competitive prices in offering services.

- **Efektivitas**

Proses pengadaan yang efektif harus dapat memberikan jaminan atas kualitas barang/jasa yang dibutuhkan serta persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan.

- **Efisiensi**

Efisiensi waktu dan biaya mencakup biaya produk dan jasa, pemasangan, pengiriman, biaya perawatan purna jual, dan lain sebagainya.

- **Memiliki Nilai Manfaat**

Barang atau jasa yang dibutuhkan Perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan operasional. Sepanjang barang atau jasa tersebut sepadan dengan harga dan kualitas, baik dilihat dari aspek kualitas maupun taksiran proyek, maka barang atau jasa tersebut layak disediakan.

IIF memastikan setiap pengajuan disetujui dan diketahui oleh pihak yang berwenang serta anggarannya telah disetujui oleh pihak pengguna anggaran. Secara keseluruhan, proses-proses ini dilakukan dalam *BR System*, yang juga melakukan pemeriksaan ketersediaan anggaran dan penetapan DoA.

Proses pengadaan barang dan jasa meliputi:

1. Kepala Operasional dan TI melakukan penelaahan pengajuan pembelian dari pihak *user* yang meliputi tipe pengadaan, metode pemilihan dan penyeleksian oleh *user*, kemudian memastikan pengajuan telah disetujui Kepala Departemen dari *user* atau pihak yang berada pada *level-C* dari departemen yang bersangkutan.
2. Staf pengadaan akan memulai proses pengadaan berdasarkan metode yang disepakati.
3. Setelah merampungkan proses pemilihan vendor, staf pengadaan akan memilih tingkat kualitas yang paling tinggi dengan harga yang disetujui (delegasi kewenangan).
4. Petugas pengadaan akan mengumpulkan surat persetujuan dari DoA dan pemilik anggaran.
5. Setelah mendapatkan persetujuan, petugas pengadaan akan melakukan finalisasi untuk mengeluarkan surat penunjukan atau penolakan kepada vendor.
6. Kepala Operasional dan TI akan menandatangani dan mengirimkan surat penunjukan maupun penolakan dan permintaan kerja.
7. Petugas pengadaan akan melakukan finalisasi surat yang dibutuhkan untuk diberikan kepada vendor.

Proses pengadaan yang dilakukan oleh di Perusahaan menggunakan metodologi:

1. Pembelian langsung
2. Penawaran harga
3. Tender terbatas
4. Penunjukan/kontrak langsung

- **Effectiveness**

An effective procurement process must be able to guarantee the quality of goods/services, as well as necessary requirements.

- **Efficiency**

Time and cost efficiency include fees for products and services, installation, delivery, after-sales maintenance, and others.

- **Beneficial**

Goods or services required by the Company must be suitable with its operational needs. As long as the goods or services requested come at a worthwhile price and quality level, both in terms of quality or project estimate, then procurement of said goods or services is acceptable.

IIF ensures that every proposal is approved and known by authorized parties and that the related budget items are approved by the budget user. The overall processes take place in the *BR System*, which also performs budget availability checking and DoA setting.

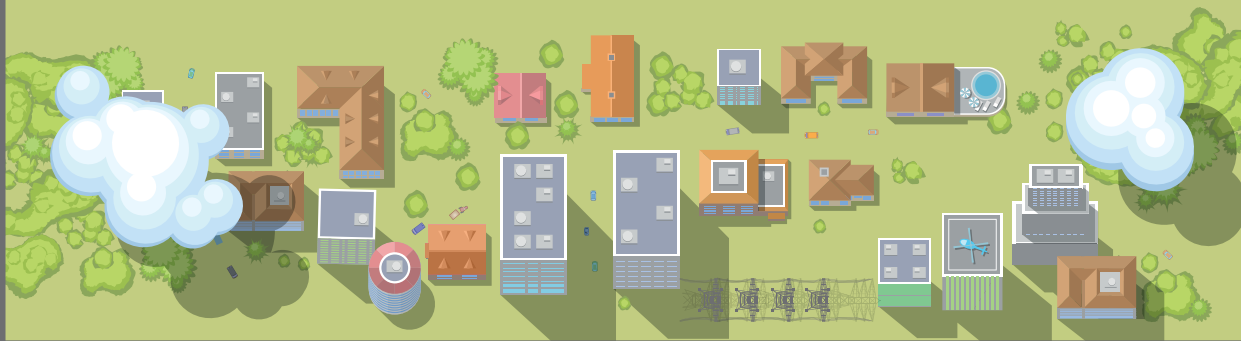
The goods and service procurement process include:

1. The Head of Operations and IT reviews the procurement proposal from users, which includes procurement type and selection methods employed by users. The Head of Operations and IT then ensures that the proposal has been approved by the department head of the user or C-level parties of the concerned department.
2. Procurement staff will commence the procurement process based on the agreed-on method.
3. After completing the vendor selection process, the procurement staff will select a vendor within the approved price range that is deemed to have the highest quality (authority delegation).
4. The procurement staff will collect approval letter from DoA and budget owner.
5. Upon approval, the procurement staff will finalize the process to issue appointment or rejection letters to the vendor(s).
6. The Head of Operations and IT will sign and send appointment or rejection letter and purchase order.
7. The procurement staff will finalise the process to issue the required letter to be delivered to the vendor(s).

Procurement processes in IIF apply the following methodologies:

1. Direct purchase
2. Price quotation
3. Limited tender
4. Direct appointment/contracting





Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Tinjauan Ekonomi Makro

Overview of the Macroeconomy

Dunia pada tahun 2020 mengalami krisis yang dipicu oleh pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 beserta dampak dari tindakan yang diambil oleh pemerintahan di seluruh dunia untuk mencegah penyebaran virus, sangatlah masif dan komprehensif. Dengan terhambatnya mobilitas masyarakat, terbatasnya pasokan tempat tidur rumah sakit, dan ratusan juta orang harus berdiam di rumah semasa pandemi, permintaan global untuk sebagian besar komoditas melemah dan volume perdagangan semakin menurun, melampaui kontraksi di tahun 2019 yang dipicu oleh perang dagang AS-Tiongkok. Pelaku usaha dari banyak sektor terpaksa gulung tikar, rantai pasokan terganggu, pengeluaran rumah tangga anjlok, sementara tingkat kemiskinan kembali meningkat. Pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia meluncurkan paket stimulus, menurunkan suku bunga acuan, dan melakukan pelonggaran kuantitatif pada skala yang belum pernah disaksikan sebelumnya, dalam rangka mendongkrak kinerja ekonomi. Hal tersebut membawa hasil: aktivitas ekonomi kembali meningkat menjelang akhir tahun, bahkan saat jumlah kasus Covid-19 meroket di banyak kawasan. Namun, terlepas dari tindakan drastis tersebut, PDB dunia tetap berkontraksi, pertama kalinya sejak krisis keuangan global 2008–09, dengan tingkat penurunan yang terakhir terjadi pada era *Great Depression*, hampir seabad silam.

Indonesia, perekonomian terbesar di Asia Tenggara, mencatat resesi pertamanya sejak krisis keuangan Asia 1998. PDB 2020 menyusut 2,19%, setelah mencatat pertumbuhan 4,96% pada 2019. Berbagai sektor sangat terdampak Covid-19, namun beberapa sektor tertentu tumbuh. Kenaikan kontribusi yang utama terhadap PDB di 2020 berasal dari sektor pertanian (termasuk perikanan dan kehutanan), yang menyerap hampir sepertiga dari angkatan kerja Indonesia.

Sepanjang tahun, pemerintah beberapa kali merevisi target PDB dalam APBN-nya dan menaikkan batas defisit anggaran dari 3% menjadi 6,34% dari PDB, agar memiliki ruang yang cukup untuk melakukan program stimulus. Sekitar 4% dari PDB, atau USD 49,3 miliar, telah dialokasikan untuk memitigasi dampak Covid-19.

Kontraksi pengeluaran rumah tangga sebesar 3,61% dan lemahnya investasi akibat pembatasan aktivitas ekonomi selama pandemi mendorong inflasi ke titik terendah dalam sejarah, yakni 1,68%, menurut laporan Badan Pusat Statistik. Bank Indonesia ikut andil dalam inisiatif pemerintah untuk membangkitkan perekonomian, dengan menurunkan suku bunga acuannya lima kali di tahun 2020, dari 5,0% di awal tahun menjadi 3,75%. Sementara

The world in 2020 was gripped by a series of crises precipitated by the Covid-19 pandemic. Covid-19's devastating effects, as well as those arising from the very measures taken by governments worldwide to stem its spread, have been massive and comprehensive in scale. With people's mobility stifled, hospital beds in short supply, and hundreds of millions sheltering themselves at home in the pandemic's wake, global demand for most commodities fizzled and trade volume plunged further, eclipsing 2019's contraction that was induced by the US–China trade war. Businesses across many sectors were forced to fold, supply chains disrupted, household spending diminished, and poverty rates were soaring again. Governments and central banks rolled out stimulus packages, interest rate cuts, and quantitative easing measures of unprecedented size to revive the ailing economy. It seemed to have worked: economic activities picked up again towards the end of the year, even as Covid-19 cases skyrocketed in many regions. Yet despite such drastic measures, the world's GDP still contracted for the first time since the global financial crisis of 2008–09, with a rate not seen since the Great Depression nearly a century prior.

Indonesia, the largest economy in South East Asia, recorded its first recession since the 1998 Asian financial crisis. Its 2020 GDP contracted by 2.19%, compared with a 4.96% growth posted in 2019. While various sectors suffered due to Covid-19's repercussions, certain sectors posted growths, with the top booster to GDP in 2020 coming from agriculture (including fishery and forestry), where nearly a third of the country's workforce is engaged in.

Over the course of the year, the government had to revise the GDP target in its State Budget multiple times, as it increased the budget deficit cap from 3% to 6.34% of GDP in order to have ample room for delivering stimulus measures. About 4% of GDP, or USD 49.3 billion, was earmarked to mitigate Covid-19's impacts.

A 3.61% contraction in household spending and an anemic investment climate resulting from limited economic activities during the pandemic pushed inflation to its historic low of 1.68%, as Statistics Indonesia noted. Bank Indonesia joined in the government's economic revival initiatives by slashing its interest rates five times in 2020, from 5.0% beginning of the year down to 3.75%. Meanwhile, the rupiah's exchange rate against the US dollar went on a full

itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sangat fluktuatif, sejalan dengan gejolak ekonomi global. Di bulan April, rupiah sempat melemah hingga sekitar 20% dari nilainya di awal tahun, namun kemudian menguat kembali secara signifikan menjelang akhir tahun.

swing in line with the global economic turmoil, weakening by a fifth from its year-opening in April, then strengthened again significantly as the year came to an end.

Tinjauan Industri Pembiayaan Infrastruktur

Infrastructure Financing Industry Overview

Infrastruktur, yang menjadi fokus Pemerintah dalam anggaran belanjanya saat ini, selain pendidikan, dianggarkan sebesar Rp423,3 triliun untuk tahun 2020, dengan Rp31,8 triliun dari nilai tersebut direncanakan akan diperoleh melalui pembiayaan. Namun, seiring Pemerintah mengambil tindakan drastis untuk menanggulangi pandemi, seperti yang telah dijelaskan di atas, sebagian anggaran tersebut dialihkan, sehingga realisasinya adalah Rp281 triliun. Nilai ini 28,7% di bawah angka tahun 2019 dan juga 33,6% di bawah target 2020.

Pemerintah telah memperkuat infrastruktur untuk membuka jalan bagi kemajuan ekonomi, karena *multiplier effect* dari sektor tersebut yang sangat besar. Pemerintahan Joko Widodo saat ini telah menetapkan 201 proyek prioritas sebagai Proyek Strategis Nasional, yang 98 diantaranya telah selesai pada akhir 2020. Melalui anggaran infrastruktur dalam APBN 2020, pemerintah juga telah menargetkan tingkat kondisi jalan nasional yang baik sebesar 94%, dan 50% jumlah rumah tangga memiliki hunian yang layak.

Selain belanja pemerintah, faktor yang tak kalah penting untuk mencapai sasaran tersebut adalah pembiayaan/ investasi asing langsung (FDI). Meskipun terjadi aliran keluar modal pada pertengahan tahun, pada akhir tahun FDI mencapai USD 7,71 miliar, dengan lebih dari 16 ribu proyek tengah berlangsung di Indonesia. Pada tahun 2020, proyek-proyek yang didanai FDI didominasi oleh sektor logam, listrik, dan transportasi. Kinerja Indonesia yang kurang memuaskan dalam memperoleh FDI selama masa Covid-19 di 2020 telah mengakibatkan tertundanya penyelesaian proyek. Sektor konstruksi jalan tol, misalnya, hanya mencatat pencapaian jalan tol baru sepanjang 258 km pada tahun 2020, jauh di bawah target pemerintah yakni 314 km.

Infrastructure—a focus of the current administration's spending next to education—was budgeted Rp423.3 trillion by the government in 2020, with Rp31.8 trillion to be obtained through financing. However, due to drastic measures taken to combat the pandemic as explained above, some of that amount had to be shifted, resulting in about Rp281 trillion of realized investment. This was a drop of 28.7% from 2019's figure and also 33.6% off 2020's target.

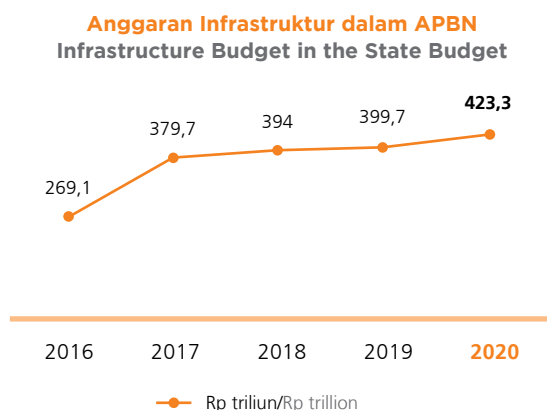
The government has been bolstering infrastructure to pave the way for propelling the economy forward, due to the sector's huge multiplier effect. The current Joko Widodo administration has determined 201 strategic projects to be built as National Strategic Projects, of which 98 had been completed by the end of 2020. Furthermore, through its infrastructure budget in the State Budget for 2020, the government aimed at good national road condition rate of 94% and 50% of the country's households having decent housing.

Key to this initiative, apart from government spending, is foreign direct financing/investment (FDI). Despite some capital outflow seen mid-year, by year-end FDI reached USD 7.71 billion, financing more than 16 thousand projects all over the country. In 2020, FDI-funded projects were dominated by metals, electricity, and transportation sectors. Indonesia's underperforming performance in attracting FDI in the Covid-19-stricken year of 2020, however, resulted in delays in project completions, as exemplified by the toll road construction sector: its 2020 achievement of 258 km of new toll roads was far below the government's target of 314 km.

Bappenas memperkirakan sektor infrastruktur Indonesia membutuhkan sekitar USD 430 miliar untuk tahun 2020-24, jauh di atas nilai yang pemerintah alokasikan saat ini. Karena itu, pemerintah aktif megupayakan pendanaan untuk menutupi kekurangan dalam pembiayaan infrastruktur ini, terutama dengan melibatkan tiga skema pembiayaan alternatif: kemitraan publik-swasta, pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah, dan pendanaan campuran atau *blended finance* (dana filantropi).

Bappenas estimates the nation's infrastructure to require about USD 430 billion for 2020–24, way above what the government currently has allocated. As such, it has been actively attracting funding to address the gap in infrastructure financing, mainly by engaging three alternative financing schemes: public-private partnerships (PPP), non-government budget equity financing, and blended finance (philanthropic funds).

Grafik Pertumbuhan Anggaran Infrastruktur dalam Lima Tahun Terakhir Chart of Infrastructure Budget Growth in the Last Five Years



Catatan : Anggaran untuk tahun 2020 berdasarkan APBN 2020 pra-revisi.

Note : Budget for 2020 was based the 2020 State Budget prior to revision.

Capaian dan Target Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Indonesia Indonesian Government's Infrastructure Development Achievements and Targets

Aspek Infrastruktur Infrastructure Aspect	Pencapaian Achievement	Target Target	
	2018	2019	2020
Pembangunan konektivitas Connectivity development			
Jalan (km) Roads (km)	766	406	486
Jembatan (m) Bridges (m)	16.638	17.283	19.014
Pembangunan tahap awal dan penyelesaian jalur kereta api (km'sp) Early stage and completion of railroads construction (km'sp)	351,3	133,6	238,8
Penyelesaian bandara baru (lokasi) Completion of new airports (locations)	4	3	3
Bendungan (unit) Dams (units)	55	51	49
Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah Housing for low-income populations			
Rumah susun (unit) Low-cost apartments (units)	11.670	6.873	5.348
Rumah khusus (unit) Landed houses (units)	4.525	2.130	2.000

Sumber/Source: Nota Keuangan APBN TA 2020/2020 State Budget.

Tinjauan Bisnis

Business Review

Strategi 2020

Pada tahun 2020, kendati Covid-19 menyebabkan perlambatan ekonomi global akibat pembatasan mobilitas masyarakat, IIF tetap berkomitmen kuat untuk menjadi katalisator pembangunan infrastruktur nasional.

Pelaksanaan strategi IIF pada tahun 2020 didasarkan pada keunggulan kompetitifnya, termasuk:

- Mandat IIF untuk mengembangkan sektor infrastruktur di Indonesia, yang didukung oleh hubungan yang kuat dengan Pemerintah Indonesia;
- Kemampuan untuk berfungsi sebagai *policy sounding board* dengan Pemerintah Indonesia;
- Dukungan kuat dari pemegang saham berperingkat AAA;
- Pengetahuan yang mendalam tentang aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG);
- Sumber modal yang terdiversifikasi dengan baik, termasuk dari pemegang saham, pinjaman, dan pasar modal;
- Portofolio proyek yang terdiversifikasi dengan baik dengan manajemen risiko dan nilai-nilai ESG yang kuat;
- Kebijakan keuangan yang cermat, *leverage* yang moderat, dan bisnis yang sangat *scalable*; dan
- Tim manajemen yang berpengalaman di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang beranggotakan figur terkemuka.

Didukung oleh kekuatan ini, strategi utama IIF untuk mempercepat dan meningkatkan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah mewujudkan bisnis yang berkelanjutan dan terus meningkatkan margin. Strategi ini dapat terlaksana melalui tiga faktor pendorong utama—Produk, Dukungan Bisnis, serta Fokus Sektoral & Strategi Membangun Aset.

Produk

IIF berfokus pada kesepakatan bernilai tambah yang tinggi, sekaligus mendorong pertumbuhan produk *non-funded*. Melalui bisnis *advisory*, IIF menyeimbangkan basis kliennya antara sektor publik dan sektor swasta.

Dukungan Bisnis

IIF berinvestasi secara bijak dalam semua elemen pendukung bisnisnya, mulai dari peningkatan sumber daya manusia dan pendalaman pengetahuan produk, hingga peningkatan sinergi lintas direktorat dan optimalisasi sistem TI. Semua ini dilakukan untuk mendorong efisiensi operasional dan optimalisasi biaya, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang kuat.

2020 Strategy

In 2020, despite the unrelenting challenges posed by Covid-19 that caused lockdown-induced global economic slowdown, IIF remained strongly committed to being a catalyst in the Indonesian infrastructure development.

IIF's execution of its strategy in 2020 was grounded upon the competitive strengths it perceives, including:

- IIF's mandate for developing the infrastructure sector in Indonesia supported by its robust relationship with the Government of Indonesia;
- Ability to serve as a policy sounding board with the Government of Indonesia;
- Unyielding support from AAA-rated shareholders;
- Deep knowledge in the environmental, social, and governance (ESG) aspects;
- Well-diversified sources of capital, including from shareholders, loans, and capital markets;
- Well-diversified portfolio of projects with strong risk management and ESG values;
- Prudent financial policies, moderate leverage, and highly scalable business; and
- An experienced management team with oversight by a high-profile Board of Commissioners (BOC).

Supported by these strengths, IIF's main, overarching strategy for accelerating and improving private participation in infrastructure development in Indonesia was achieving sustainable business and continuously improving margin. This strategy was brought to fruition through the execution along three key engines—Product, Business Support, and Sector Focus & Asset Building Strategy.

Product

IIF focuses on high-value added deals while also promoting growth of non-funded products. In its advisory arm, IIF seeks to balance its client base between the public sector and private clients.

Business Support

IIF is investing judiciously in all of its business-supporting elements, from improving human capital and deepening product knowledge, to enhancing synergy across directorates and optimizing IT systems. All this is carried out to boost operational efficiency and optimize cost, with due regard to the principle of prudence and strong risk management.

Fokus Sektoral & Strategi Membangun Aset

Karena IIF baru mendapatkan mandat baru untuk mengembangkan sektor-sektor tertentu, fokusnya kini adalah pada distribusi pangan dan infrastruktur sosial. IIF juga terlibat dalam *asset recycling* sebagai inisiatif meningkatkan profitabilitas.

Ketiga faktor pendorong utama ini diwujudkan pada tahun 2020 dalam langkah-langkah berikut, untuk mendorong pertumbuhan:

- Menerapkan fleksibilitas dan inovasi dalam pembiayaan, sebagai bagian dari rangkaian produk yang komprehensif untuk klien;
- Memberikan konsultasi kepada, dan mendorong investasi dari, sektor swasta di bidang infrastruktur;
- Menyeimbangkan bauran pendapatan berdasarkan basis pelanggan yang terdiversifikasi; dan
- Memanfaatkan pendanaan dari sesama investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek bernilai tinggi dan berkualitas tinggi.

Social & Environmental (S&E)

Sebagai institusi yang mengedepankan aspek keberlanjutan dalam pembiayaan infrastruktur, IIF memastikan bahwa proyek yang dibiayainya dapat berdampak positif dan berkelanjutan terhadap ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan diwujudkan dalam mekanisme pembiayaan IIF yang terintegrasi dengan Prinsip S&E (SEP), yang memandu setiap proses pengambilan keputusan investasi di IIF.

IIF telah membentuk Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan (SEMS) sebagai pedoman bagi klien untuk mematuhi dan melaksanakan 8 Prinsip S&E, sebagai berikut:

1. Sistem Penilaian dan Manajemen Sosial dan Lingkungan (SEMS)
2. Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja
3. Pencegahan dan Pengurangan Polusi, dan Perubahan Iklim
4. Kesehatan Masyarakat, Keselamatan, dan Keamanan
5. Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali secara Tidak Sukarela
6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
7. Masyarakat Adat
8. Benda dan Warisan Budaya

Sector Focus & Asset Building Strategy

As IIF has recently obtained a new mandate to develop certain sectors, its efforts have been focused especially on food distribution and social infrastructure. IIF is also engaged in assets recycling as initiatives to improve profitability.

These three key engines were translated into the following measures taken in 2020 to promote growth:

- Exercising flexibility and innovation in financing, as part of a comprehensive product suite for clients;
- Advising and encouraging private investment in infrastructure;
- Balancing revenue mix based on a well-diversified customer base; and
- Leveraging on funding from fellow investors to participate in high-gain, high-quality projects.

Social & Environmental (S&E)

As a champion of sustainability in infrastructure financing, IIF is ensuring that the projects it finances deliver positive and sustainable impacts on the economy, society, and environment. The implementation of sustainable development concept is made manifest in IIF's financing mechanisms that are integrated with the S&E Principles (SEP), which guide each investment decision-making process in IIF.

IIF has established the Social and Environmental Management System (SEMS) to serve as a guideline for clients to adhere to and perform along the 8 S&E Principles, as follows:

1. Social and Environmental Assessment and Management System (SEMS)
2. Labour and Working Conditions
3. Pollution and Climate Change Prevention and Abatement
4. Community Health, Safety, and Security
5. Land Acquisition and Involuntary Resettlement
6. Biodiversity Conservation and Natural Resources Management
7. Indigenous People
8. Cultural Property and Heritage

Delapan Prinsip S&E IIF

IIF's Eight S&E Principles

No.	Prinsip-prinsip S&E S&E Principles	Sasaran Objectives
1.	Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan (SEMS) Social & Environmental Management System (SEMS)	• Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dan dampak S&E proyek. • Mengadopsi hirarki mitigasi dalam mengantisipasi dan menghindari, atau jika tidak mungkin menghindari, maka meminimalkan, dan jika dampak residual tetap ada, maka ada kompensasi untuk risiko dan dampak terhadap pekerja, Masyarakat terdampak Proyek (PAP), dan lingkungan. • Mengedepankan peningkatan kinerja S&E klien melalui penerapan sistem pengelolaan yang efektif. • Memastikan bahwa keluhan dari PAP dan komunikasi eksternal dari pemangku kepentingan yang lain ditanggapi dan dikelola dengan tepat. • Mengedepankan penyediaan sarana untuk keterlibatan yang memadai dengan PAP di sepanjang siklus proyek tentang masalah-masalah yang berpotensi mempengaruhi mereka. • Memastikan bahwa informasi S&E yang relevan diungkapkan dan disebarluaskan. • Identify and evaluate S&E risks and impacts of the project. • Adopt a mitigation hierarchy to anticipate and avoid, or where avoidance is not possible, minimize, and, where residual impacts remain, compensate/offset for risks and impacts to workers, PAP, and the environment. • Promote improved S&E performance of clients through the effective use of management systems. • Ensure that grievances from PAP and external communications from other stakeholders are responded to and managed appropriately. • Promote and provide means for adequate engagement with PAP throughout the project cycle on issues that could potentially affect them and to ensure. • Ensure that relevant S&E information is disclosed and disseminated.
2.	Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja Labour and Working Conditions	• Mengedepankan perlakuan yang adil, tanpa diskriminasi, dan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja. • Membangun, menjaga, dan meningkatkan hubungan antara pekerja dengan manajemen. • Mematuhi hukum ketenagakerjaan dan perburuhan nasional. • Melindungi pekerja, termasuk kategori pekerja rentan seperti anak-anak, pekerja migran, pekerja yang dipekerjakan pihak ketiga, dan pekerja dalam rantai pasokan klien. • Mengedepankan kondisi kerja yang aman dan sehat, dan memperhatikan kesehatan pekerja. • Menghindari kerja paksa. • Promote the fair treatment, non-discrimination, and equal opportunity of workers. • Establish, maintain, and improve the worker-management relationship. • Promote compliance with national employment and labor laws. • Protect workers, including vulnerable categories of workers such as children, migrant workers, workers engaged by third parties, and workers in the client's supply chain. • Promote safe and healthy working conditions, and the health of workers. • Avoid the use of forced labour.
3.	Pencegahan dan Pengurangan Polusi, dan Perubahan Iklim Pollution Prevention and Abatement and Climate Change	• Menghindari atau meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan akibat polusi dari kegiatan proyek. • Mengedepankan penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, termasuk penggunaan energi dan air. • Mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terkait proyek. • Avoid or minimize adverse impacts on human health and the environment by avoiding or minimizing pollution from project activities. • Promote more sustainable use of resources, including energy and water. • Reduce project-related GHG emissions.
4.	Kesehatan Masyarakat, Keselamatan dan Keamanan Community Health, Safety, and Security	• Berupaya untuk menghindari atau meminimalisasi risiko dan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan PAP selama siklus proyek baik, dari kondisi rutin maupun non rutin. • Memastikan bahwa perlindungan personil dan properti dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi yang sesuai dan dengan cara menghindari atau meminimalkan risiko terhadap PAP. • Anticipate and avoid adverse impacts on the health and safety of the PAP during the project life from both routine and non-routine circumstances. • Ensure that the safeguarding of personnel and property is carried out in accordance with relevant human rights principles and in a manner that avoids or minimizes risks to the PAP.

No.	Prinsip-prinsip S&E S&E Principles	Sasaran Objectives
5.	Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali secara Tidak Sukarela Land Acquisition and Involuntary Resettlement	• Menghindari, dan ketika tidak mungkin menghindari, maka meminimalkan perpindahan dengan mengusulkan desain proyek alternatif. • Menghindari pengusiran secara paksa. • Mengantisipasi dan menghindari, dan apabila tidak mungkin menghindari, maka meminimalkan dampak-dampak sosial dan ekonomi yang merugikan dari proses pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan tersebut, dengan (i) memberikan kompensasi atas kehilangan aset dengan biaya penggantian dan (ii) memastikan bahwa kegiatan permukiman kembali dilaksanakan, dengan pengungkapan informasi, konsultasi, dan partisipasi yang tepat kepada masyarakat yang terdampak. • Meningkatkan atau memulihkan mata pencaharian dan standar hidup masyarakat terdampak. • Meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat terdampak secara fisik, melalui penyediaan perumahan yang memadai dengan jaminan kepemilikan di lokasi-lokasi pemukiman kembali. • Avoid, and when avoidance is not possible, minimize displacement by exploring alternative project designs. • Avoid forced eviction. • Anticipate and avoid, or where avoidance is not possible, minimize adverse social and economic impacts from land acquisition or restrictions on land use by (i) providing compensation for loss of assets at replacement cost and (ii) ensuring that resettlement activities are implemented with appropriate disclosure of information, consultation, and the informed participation of those affected. • Improve, or restore, the livelihoods and standards of living of displaced persons. • Improve living conditions among physically displaced persons through the provision of adequate housing with security of tenure at resettlement sites.
6.	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam Biodiversity Conservation and Natural Resource Management	• Menjaga dan menglestarian keanekaragaman hayati. • Menjaga pemanfaatan dari keberadaan ekosistem. • Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan melalui adopsi praktik yang memadukan kebutuhan kelestarian dan prioritas pembangunan. • Protect and conserve biodiversity. • Maintain the benefits from ecosystem services • Promote the sustainable management of living natural resources through the adoption of practices that integrate conservation needs and development priorities.
7.	Masyarakat Adat Indigenous Peoples	• Memastikan bahwa proses pengembangan dapat menumbuhkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia, martabat, aspirasi, budaya, dan mata pencaharian berbasis sumber daya alam dari Masyarakat Adat. • Mengantisipasi dan menghindari dampak negatif proyek terhadap Masyarakat Adat, atau jika tidak mungkin menghindari, maka meminimalkan dan/atau mengompensasi atas dampak-dampak buruk tersebut. • Meningkatkan manfaat dan peluang dari pembangunan yang berkelanjutan bagi Masyarakat Adat dengan cara yang sesuai dengan budaya setempat. • Memastikan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) pada Masyarakat Adat yang terdampak Proyek seperti yang dijelaskan dalam Prinsip ini dilakukan. • Menghormati dan melestarikan budaya, pengetahuan, dan praktik-praktik yang dimiliki Masyarakat Adat. • Ensure that the development process fosters full respect for the human rights, dignity, aspirations, culture, and natural resource-based livelihoods of Indigenous Peoples. • Anticipate and avoid adverse impacts of projects on communities of Indigenous Peoples, or when avoidance is not possible, to minimize and/or compensate for such impacts. • Promote sustainable development benefits and opportunities for Indigenous Peoples in a culturally appropriate manner. • Ensure the implementation of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) of the PAP of Indigenous Peoples affected by the Projects, as described in this Principles. • Respect and preserve the culture, knowledge, and practices of Indigenous Peoples.
8.	Benda dan Warisan Budaya Cultural Property and Heritage	• Melindungi dan melestarikan warisan budaya dari dampak negatif kegiatan proyek • Meningkatkan pembagian manfaat yang adil dari penggunaan warisan budaya. • Protect cultural heritage from the adverse impacts of project activities and support its preservation. • Promote the equitable sharing of benefits from the use of cultural heritage.

Kedelapan SEP ini menghadirkan keunggulan kompetitif bagi IIF dalam memajukan pembangunan infrastruktur yang berorientasi keberlanjutan, yang semakin relevan dalam perekonomian saat ini yang semakin sadar dan menekankan topik-topik ESG.

Dalam praktiknya, fungsi ini secara khusus dijalankan oleh Divisi Social & Environmental (SED) di bawah Direktorat Manajemen Risiko. SED memberikan bantuan kepada peminjam proyek yang terkait dengan SEP, melalui berbagi pengetahuan dan sosialisasi. Pada akhir tahun 2020, SED diawaki oleh 9 karyawan, semuanya memiliki gelar Magister dalam ilmu lingkungan dan/atau sosial. SED juga didukung oleh konsultan S&E eksternal dan independen untuk memahami dampak S&E, risiko, peluang, dan masalah khusus. Selain itu, SED didukung oleh Bank Internasional untuk International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Finance Corporation (IFC).

SED membantu proyek-proyek yang didanai IIF melalui implementasi dan peningkatan kinerja SEMS, termasuk kinerja kesehatan dan keselamatan kerja, serta persiapan dan tindak lanjut Rencana Tindakan Perbaikan (CAP) pada setiap proyek.

Tinjauan Operasional Berdasarkan Segmen Usaha

IIF membagi operasinya menjadi dua segmen bisnis:

1. Produk Investasi, termasuk Investasi *Fund-Based* dan *Non-Fund-Based*; dan
2. Produk *Advisory*.

Ulasan yang terinci dari kinerja setiap segmen pada tahun 2020 disajikan di bawah ini.

Produk Investasi

Produk investasi yang ditawarkan oleh IIF ditangani oleh Direktorat Investasi, yang bertanggung jawab untuk meraih kesepakatan atau komitmen keuangan dengan klien baru, meningkatkan volume komitmen pembiayaan dengan klien yang ada, dan memantau kinerja kualitas kredit para klien.

Untuk mendukung operasional pada segmen ini, Direktorat Investasi memiliki empat divisi:

1. Divisi Business Development:
Bertugas untuk meraih kesepakatan pembiayaan dan investasi, mengakuisisi klien, dan memantau kemajuan proyek hingga Tanggal Operasi Komersial (COD) mereka.
2. Divisi Project Supervision:
Bertugas untuk memastikan proyek yang dibiayai IIF memenuhi persyaratan yang telah disepakati, dan memantau tahap pelaksanaan proyek pasca-COD.

The 8 SEP give IIF a competitive edge in furthering infrastructure development causes that are more sustainability-oriented, especially relevant in today's economy that are increasingly aware and emphasizing ESG.

In practice, this function is specifically carried out by the Social & Environmental Division (SED) under the Risk Management Directorate. SED provides assistance to project borrowers related to SEP, through knowledge sharing and disseminations. As at end of 2020, SED was manned by 9 employees, all possessing Master's degrees in environmental and/or social sciences. SED is also regularly supported by external and independent S&E consultants for understanding S&E impacts, risks, opportunities, and specific issues. In addition, SED is supported by the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and the International Finance Corporation (IFC).

SED assisted projects funded by IIF in terms of SEMS implementation and enhancements, including in occupational health and safety performance, and preparation and follow up of Corrective Action Plans (CAP) in each project.

Review of Operations by Business Segment

IIF divides its operations into two business segments:

1. Investment Products, including Fund-Based and Non-Fund-Based Investments; and
2. Advisory Products.

The detailed review of each segment's performance in 2020 is provided below.

Investment Products

Investment products offered by IIF are handled by the Investment Directorate. Its responsibility ranges from securing financial deals or commitments with new clients, increasing the volume of financing commitments with existing clients, and monitoring these clients' credit quality performance.

To support the operations in this segment, the Investment Directorate has four divisions:

1. Business Development Division:
Tasked to obtain financing deals and investments, acquire clients, and monitor progress of projects up to their Commercial Operation Date (COD).
2. Project Monitoring Supervision:
Tasked to ensure IIF-financed projects meet the agreed-upon requirements, and monitor the implementation stage of projects post-COD.

3. Divisi Transaction Legal:
Bertugas untuk memberikan dukungan hukum kepada proyek-proyek yang dibiayai IIF di bawah pengawasan kedua departemen di atas.
4. Divisi Sindikasi:
Bertugas untuk mendapat kesepakatan pembiayaan dan investasi bersama dengan bank atau institusi keuangan lain.
5. Divisi Internasional:
Bertugas untuk mendapatkan kesepakatan pembiayaan dan investasi proyek dari klien internasional.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, hingga akhir tahun 2020 Direktorat Investasi didukung oleh 41 staf dengan latar belakang dan kualifikasi yang relevan di bidang perbankan, korporasi, penyertaan modal, hukum, dan konsultasi.

Pada tahun 2020, IIF memperoleh 7 kesepakatan pembiayaan baru dengan total komitmen sebesar Rp2,88 triliun. Komitmen kumulatif bruto hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp26,76 triliun.

Proyek *greenfield* pada tahun 2020 berkontribusi 27,96% terbesar dari total portofolio IIF, yang sisanya terbagi antara proyek *balance-sheet projects non-project* (sebanyak 27%), *operating asset* (26%) dan *balance-sheet projects* (19%).

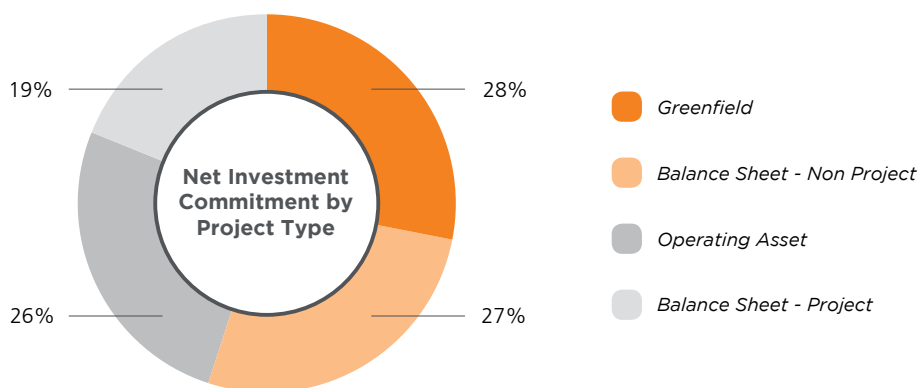
3. Legal Transaction Legal:
Tasked to provide legal support to IIF-financed projects under supervision from the above two divisions.
4. Syndications Division:
Tasked to obtain joint financing and investment deals with banks or other financial institutions.
5. International Division:
Tasked to obtain project financing and investments from international clients.

In performing its responsibilities, as of the end of 2020 the Directorate of Investment is supported by 41 staffs with relevant background and qualifications in banking, corporate, equity investment, legal, and consulting sectors.

In 2020, IIF acquired 7 new financing deals with total commitments amounting to Rp2.88 trillion. The cumulative gross commitments by end of 2020 had reached Rp26.76 trillion.

Greenfield projects in 2020 made up 27.96% or the largest of IIF's portfolio, with the remaining share divided among balance-sheet projects non-project (at 27%), operating asset (26%) and balance-sheet projects (19%).

Portfolio Commitment by Project Type in 2020



Portfolio Net Investment Commitment by Sector in 2020



Sektor-sektor yang dibiayai oleh IIF antara lain ketenagalistrikan, minyak & gas, jalan, telekomunikasi, bandara, pelabuhan laut, utilitas air & limbah, kawasan industri, dan lain-lain. Sektor terbesar yang menerima pembiayaan pada tahun 2020 adalah ketenagalistrikan, dengan porsi 25% dari jumlah portofolio (bersih). Sektor dengan pertumbuhan tahun-ke-tahun yang paling signifikan dalam nilai komitmen bersih adalah kawasan industri, yang jumlahnya meningkat menjadi Rp0,5 triliun di 2020.

Di antara komitmen baru, terdapat 4 proyek yang utama, yaitu:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 70 MW

Pada awal 2020, IIF memberikan Pinjaman Jangka Panjang Senior (*Senior Term Loan*) untuk membiayai proyek pembangkit listrik tenaga bayu 70 MW. Pemilik proyek ini mengembangkan ladang angin komersial pertama di Indonesia, yakni di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan. Tenaga listrik yang dihasilkan oleh proyek ini disalurkan melalui saluran transmisi 150 kV ke saluran di dekat gardu induk PLN Sidrap di Pangkajene, yang merupakan bagian dari Jaringan Utama Sulawesi Selatan. Proyek ini menerapkan Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) dan proyek ini menyumbangkan reduksi emisi gas rumah kaca (GRK) rata-rata tahunan sebesar 137.572 ton CO₂. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas terpasang hingga 14,8% dan jumlah pelanggan meningkat menjadi 4,42% di Sulawesi Selatan. Proyek ini merupakan salah satu Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Indonesia.

2. Proyek Air Minum Gresik

Pada Juli 2020, IIF menandatangani perjanjian pemberian *Senior Term Loan Facility* untuk pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) Gresik senilai hingga Rp420 miliar atau 70% dari total biaya proyek. Proyek tata air dengan kapasitas 1.000 liter per detik ini bertujuan utama untuk meningkatkan penyediaan air minum bagi masyarakat dan industri di Kabupaten Gresik. Pemerintah daerah menargetkan cakupan wilayah pelayanan air meningkat hingga 60% dengan adanya proyek ini. Proyek ini akan menyediakan air untuk PDAM Giri Tirta untuk didistribusikan ke kawasan industri dan sekitar 90.000 rumah yang terletak di 11 kecamatan dari total 18 kecamatan di Gresik.

3. Kawasan Industri & Pelabuhan Terpadu

IIF menandatangani *Corporate Facility Loan* untuk kawasan industri di Kabupaten Gresik Jawa Timur pada Desember 2020. Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Perpres No. 58 Tahun 2017, kawasan industri ini dibangun di lokasi yang sama dengan pelabuhan multiguna, area komersial

The sectors financed by IIF include electricity, oil & gas, road, telecommunications, airport, seaport, water & waste utilities, industrial estate, and others. The largest sector receiving financing in 2020 was electricity, at 25% of the total portfolio (net). The sector with the most significant year-on-year growth in terms of net commitment value was industrial estate, whose amount rose to Rp0.5 trillion in 2020.

Among the new commitment projects, 4 projects were notable, namely:

1. 70 MW Wind Farm

In earlier 2020, IIF provided Senior Term Loan financing for 70 MW wind farm power plant project. The project company is developing Indonesia's first commercial windfarm located in Sidenreng Rappang (Sidrap) Regency, South Sulawesi Province. The power generated in the Project transmits the electricity through 150 kV transmission line to the existing line near the PLN Sidrap substation at Pangkajene, which forms part of the main South Sulawesi Grid. The project is also applying for Clean Development Mechanism (CDM) and the project contributes an estimated amount of annual average GHG emission reduction at 137,572 tons of CO₂. It is expected that the project can contribute with an increase in installed capacity of up to 14.8% and the number of customers increased to 4.42% in South Sulawesi. The project is one of the National Vital Objects in the Field of Energy and Mineral Resources in Indonesia.

2. Gresik Drinking Water Project

In July 2020, IIF signed an agreement to provide a Senior Term Loan Facility for the development of Gresik Drinking Water System (SPAM) with amount up to Rp420 billion or up to 70% of the total project cost. The water system project, with a capacity of 1.000 litres per second, has the main objective of improving drinking water supply for communities and industries in Gresik Regency. It is targeted by the local government that the water services area coverage will increase up to 60% by this project. The Project will provide bulk water to PDAM Giri Tirta to be distributed to industrial estates and around 90,000 house connections located in 11 sub-districts out of 18 sub-districts in Gresik.

3. Integrated Industrial & Port Estate

IIF signs a Corporate Facility Loan to an industrial estate in Gresik District of East Java in December 2020. As one of the National Strategic Projects stipulated in the Presidential Regulation No. 58/2017, this industrial estate is built in the same location with a multipurpose port, commercial and residential area.

dan perumahan. Pembangunan kawasan industri ini akan berkontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi biaya logistik, berkat pelayanan yang lengkap dan komprehensifnya, termasuk sebagai tuan rumah salah satu smelter terbesar di Indonesia.

The development of this Industrial Estate is projected to positively contribute to logistic cost efficiency with its complete and comprehensive service, including to host one of the largest smelters in Indonesia.

4. Layanan *Internet Broadband* dan TV Berbayar Berbasis Kabel

Pada Desember 2020, IIF memberikan *Corporate Facility Loan* kepada penyedia layanan *internet broadband* dan TV berbayar. Per Juni 2020, layanan ini telah tersedia di 12 kota besar di Indonesia (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cibubur, Bandung, Surabaya, Semarang, Palembang, Medan, dan Malang). Melalui fasilitas tersebut, IIF bertujuan untuk mendukung perusahaan tersebut memiliki koneksi internet yang optimal, berkecepatan tinggi, dan andal, yang sekaligus mendukung aksesibilitas dan perkembangan sektor telekomunikasi di Indonesia.

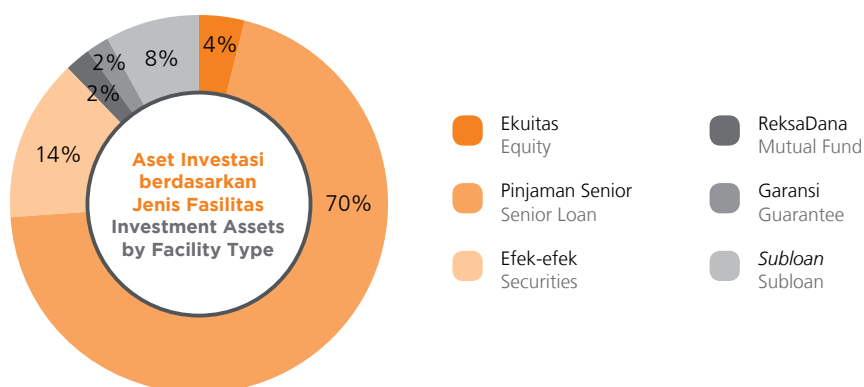
IIF membukukan total aset investasi Rp11,44 triliun pada tahun 2020, terdiri dari utang senior Rp8,47 triliun, surat berharga Rp1,14 triliun, reksa dana senilai Rp228 miliar, fasilitas penjaminan Rp277 miliar dan sisanya merupakan *subordinated loan* dan *equity*.

4. Cable-based Broadband Internet and Pay TV Services

In December 2020, IIF provided a Corporate Facility Loan to a broadband internet and pay TV services provider. As of June 2020, the services had been provided in 12 major cities in Indonesia (i.e. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cibubur, Bandung, Surabaya, Semarang, Palembang, Medan, and Malang). By providing the facility, IIF aims to support the company to have optimized, high speed, and reliable internet connections, which at the same time support the accessibility and development of telecommunication sector in Indonesia.

IIF booked total investment assets of Rp11.44 trillion in 2020, consisting of senior debts at Rp8.47 trillion, securities at Rp1.14 trillion, mutual fund at Rp228 billion, guarantee facility at Rp277 billion and the rest in subordinated loan and equity.

Jumlah Aset Investasi berdasarkan Jenis Fasilitas di 2020
Total Investment Assets by Facility Type in 2020



Pendapatan bunga investasi IIF tercatat sebesar Rp752,81 miliar pada tahun 2020, naik 16,90% dari Rp643,99 miliar pada tahun 2019. Laba bersih sebelum pajak tercatat sebesar Rp202,96 miliar pada tahun 2020, naik 42,12% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp142,81 miliar. Pendapatan provisi dan komisi pada tahun 2020 mencapai Rp33,70 miliar, turun 10,11% dari Rp37,49 miliar pada tahun 2019.

IIF recorded investment interest income amounting to Rp752.81 billion in 2020, up by 16.90% from Rp643.99 billion recorded in 2019. Net profit before tax stood at Rp202.96 billion in 2020, a 42.12% higher than 2019's figure of Rp142.81 billion. Meanwhile, provision and commission income in 2020 was Rp33.70 billion, down by 10.11% from Rp37.49 billion booked in 2019.

Pada tahun 2020, pendapatan dari produk investasi mencapai Rp791,19 miliar, naik 11,86% dari Rp707,29 miliar pada tahun 2019.

In 2020, investment products generated revenue of Rp791.19 billion up by 11.86% from Rp707.29 billion recorded in 2019.

Jasa Advisory

Jasa *advisory* IIF dilaksanakan oleh Advisory Group, yang memberikan bantuan dan jasa konsultasi kepada klien pemerintah dan swasta. Layanan IIF di sini berkisar dari konsultasi terkait aspek transaksional dan finansial, keuangan perusahaan, hingga penilaian ekonomis dan persiapan proyek.

Direktorat Advisory membukukan pendapatan Rp9,39 miliar pada tahun 2020, meningkat 16,49% dari Rp8,06 miliar pada tahun 2019, didorong oleh keberhasilan Advisory Group dalam mendapatkan lebih banyak penugasan.

Jasa *advisory* yang disediakan IIF pada tahun 2020 meliputi:

1. Konsultasi finansial untuk pembiayaan Proyek Trans Sumatera Toll Road;
2. Konsultasi mengenai prioritas, kapasitas pendanaan dan alternatif permodalan untuk Jalan Tol Trans Sumatera;
3. Konsultasi finansial untuk pihak penawar pada proyek KPBU Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur;
4. Konsultasi finansial dan transaksional untuk proyek KPBU Penyediaan Air Minum Daerah Jabodetabek;
5. Konsultasi sisi pembelian dalam akuisisi pembangkit listrik tenaga biogas di Kalimantan;
6. Konsultasi finansial untuk studi kelayakan LRT Jalur-5 Jabodebek;
7. Konsultasi finansial untuk sisi penawar dalam Proyek KPBU Bandara Batam;
8. Konsultasi finansial untuk proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas; dan
9. Konsultasi finansial untuk proyek Independent Power Producer (IPP) di Sumatera Utara.

Advisory Services

IIF's advisory services is run by the Advisory Group, which provides assistance and consulting services to government and private clientele. IIF's services here range from advisory on transactional and financial, corporate finance to economic assessments and project preparations.

The Advisory Directorate recorded Rp9.39 billion in revenue in 2020. This was a rise of 16.49% from Rp8.06 billion in 2019, driven by the Group's success in securing more assignments.

The advisory services IIF provided in 2020 included:

1. Financial advisory for Trans Sumatera Toll Road Project financing;
2. Advice on prioritization, funding capacity and alternative equity for Trans Sumatera Toll Road;
3. Financial advisory for bidder side on Jatiluhur Regional Drinking Water Supply PPP project;
4. Financial and transaction advisory on Greater Jakarta Regional Drinking Water Supply PPP project;
5. Buy-side advisory in an acquisition of a biogas power plant in Kalimantan;
6. Financial advisory for Jabodebek LRT Line-5 feasibility study;
7. Financial advisory for bidder side on Batam Airport PPP Project;
8. Financial advisory for biogas power generation development project; and
9. Financial advisory for Independent Power Producer (IPP) project in North Sumatera.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

Diskusi dan pembahasan berikut terkait kinerja keuangan harus dibaca bersama-sama dengan catatan atas laporan keuangan dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young), yang telah mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan 2020.

The following discussion and analysis on financial performance should be read in conjunction with the notes to the financial statements from the Public Accounting Firm Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young), which had audited the Company's financial statements for the financial years of 2019 and 2020.

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

dalam jutaan Rupiah/in Rp millions

Keterangan Description	2019	2020	Perubahan Change	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Kas dan setara kas – dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp43 tahun 2020 dan RpNihil tahun 2019 Cash and cash equivalents – net of allowance for impairment losses of Rp43 in 2020 and RpNil in 2019	2.429.067	2.057.059	-372.008	-15,31
Efek-efek – dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp2.202 tahun 2020 dan RpNihil tahun 2019 Securities – net of allowance for impairment losses of Rp2,202 in 2020 and RpNil in 2019	2.732.936	2.470.048	-262.888	-9,62
Investasi saham Equity investments	389.636	396.720	7.084	1,82
Pinjaman diberikan – dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp243.889 tahun 2020 dan Rp173.549 tahun 2019 Loans – net of allowance for impairment losses of Rp243,889 in 2020 and Rp173,549 in 2019	6.232.662	9.197.486	2.964.824	47,57
Tagihan derivatif Derivative receivables	44.290	69.265	24.975	56,39
Piutang bunga Accrued interest income	62.905	86.840	23.935	38,05
Beban dibayar di muka Prepaid expenses	8.593	6.980	-1.613	-18,77
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	449	344	-105	-23,39
Aset tetap – dikurangi penyusutan sebesar Rp57.981 tahun 2020 dan Rp37.414 tahun 2019 Property and equipment – net of accumulated depreciation of Rp57,981 in 2020 and Rp37,414 in 2019	293.507	276.883	-16.624	-5,66
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	86.735	83.270	-3.465	-3,99
Beban tangguhan Deferred charges	3.658	21.328	17.670	483,05
Aset lain-lain – dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar RpNihil tahun 2020 dan Rp13.056 tahun 2019 Other assets – net of allowance for impairment losses of RpNil in 2020 and Rp13,056 in 2019	26.622	18.149	-8.473	-31,83
Jumlah Aset Total Assets	12.311.060	14.684.372	2.373.312	19,28

Aset

Aset lancar turun 11,77% dari sebelumnya sebesar Rp3,50 triliun di 2019 menjadi sebesar Rp3,09 triliun di 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan deposito berjangka pendek dibandingkan dengan tahun lalu.

Aset tidak lancar naik 31,60% dari sebelumnya sebesar Rp8,81 triliun di 2019 menjadi Rp11,60 triliun di 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman diberikan yang memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Jumlah aset IIF meningkat 19,28% pada tahun 2020, dari Rp12,31 triliun pada akhir 2019 menjadi Rp14,68 triliun pada akhir tahun 2020.

Peningkatan aset terbesar pada tahun 2020 didorong oleh pinjaman yang diberikan, yang mencapai Rp9,20 triliun pada akhir tahun, meningkat 47,57% dari Rp6,23 triliun pada akhir tahun 2019. Angka-angka tersebut telah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan adalah komponen aset yang terbesar pada akhir tahun 2020, senilai Rp9,20 triliun atau 62,63% dari jumlah aset.

Assets

Current assets decreased by 11.77% from previously Rp3.50 trillion in 2019 to Rp3.09 trillion in 2020. This was mainly due to decrement of short-term time deposit compared to prior year.

Non-current assets increased by 31.60% from previously Rp8.81 trillion in 2019 to Rp11.60 trillion in 2020. This was mainly due to increment of loans with maturity period of above one-year period.

IIF's total assets increased by 19.28% in 2020, from Rp12.31 trillion as at the end of 2019 to Rp14.68 trillion as at the end of 2020.

The largest increase in assets in 2020 was driven by loans, which reached Rp9.20 trillion at the end of year, a 47.57% increase from Rp6.23 trillion recorded as at end of 2019. The figures were net of allowance for impairment losses.

Loans were also the largest component of assets as at end of 2020, accounting for Rp9.20 trillion or 62.63% of the total assets.

dalam jutaan Rupiah/in Rp millions

Keterangan Description	2019	2020	Perubahan Change	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Liabilitas derivatif Derivative liabilities	39.670	117.200	77.530	195,44
Utang lain-lain Other payables	8.728	5.897	-2.831	-32,44
Utang pajak Taxes payable	1.676	1.653	-23	-1,37
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain Accrued expenses and other liabilities	37.985	72.409	34.424	90,63
Pendapatan diterima di muka Unearned revenue	4.388	8.106	3.718	84,73
Liabilitas imbalan kerja Employee benefits obligation	26.327	27.499	1.172	4,45
Pinjaman diterima Fund borrowings	4.713.745	5.378.793	665.048	14,11
Surat utang yang diterbitkan Debt securities issued	2.183.064	2.735.233	552.169	25,29
Pinjaman subordinasi Subordinated loans	3.142.918	4.157.322	1.014.404	32,28
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	10.158.501	12.504.112	2.345.611	23,09

Liabilitas

Liabilitas lancar naik 3,31% dari sebelumnya sebesar Rp2,66 triliun di 2019 menjadi sebesar Rp2,75 triliun di 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penarikan pinjaman diterima yang jatuh tempo di 2021.

Liabilities

Current liabilities increased by 3.31% from previously Rp2.66 trillion in 2019 to Rp2.75 trillion in 2020. This was mainly due to increment of fund borrowing drawdown which due in 2021.

Liabilitas tidak lancar naik 30,13% dari sebelumnya sebesar Rp7,49 triliun di 2019 menjadi sebesar Rp9,75 triliun di 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman subordinasi yang memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Jumlah liabilitas pada akhir tahun 2020 mencapai Rp12,50 triliun, naik 23,09% dari posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp10,16 miliar.

Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman subordinasi sebesar Rp1,01 triliun, dari Rp3,14 triliun di 2019 menjadi sebesar Rp4,16 triliun di 2020; diikuti dengan kenaikan pinjaman diterima sebesar Rp665,05 miliar atau 14,11%, dari Rp4,71 triliun di 2019 menjadi Rp5,38 triliun di 2020; dan juga kenaikan surat utang yang diterbitkan sebesar Rp552,17 miliar, dari Rp2,18 triliun di 2019 menjadi Rp2,74 triliun di 2020.

Selama tahun 2020, Perseroan melakukan penarikan beberapa pinjaman diterima sebesar Rp3,28 triliun, yang naik Rp1,48 triliun atau 82,27% dari jumlah penarikan di 2019, untuk memenuhi kebutuhan penyaluran investasi. Sementara itu, peningkatan surat utang yang diterbitkan terutama karena penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2020 sejumlah Rp1,50 triliun.

Liabilitas pada akhir tahun 2020 sebagian besar terdiri dari pinjaman diterima, sebesar Rp5,38 triliun atau 43,02% dari jumlah liabilitas.

Non-current liabilities increased by 30.13% from previously Rp7.49 trillion in 2019 to Rp9.75 trillion in 2020. This was mainly due to increment of subordinated loan with maturity period of above one-year period.

Total liabilities as at end of 2020 amounted to Rp12.50 trillion, up by 23.09% from 31 December 2019's figure, which amounted to Rp10.16 billion.

The increase was mainly due to the increase in subordinated loans by Rp1.01 trillion, from Rp3.14 trillion in 2019 to Rp4.16 trillion in 2020; followed by the increase in fund borrowings by Rp665.05 billion or 14.11%, from Rp4.71 trillion in 2019 to Rp5.38 trillion in 2020; and the increase in debt securities issued by Rp552.17 billion, from Rp2.18 trillion in 2019 to Rp2.74 trillion in 2020.

During 2020, the Company drawn several fund borrowings amounted to Rp3.28 trillion, which increased by Rp1.48 trillion or 82.27% from total drawdown in 2019, to fulfil the investment disbursement as needed. Meanwhile, increase in debt securities issued was mainly due to the issuance of Shelf Registration Bonds II Year 2020, which amounted to Rp1.50 trillion.

Liabilities as at end of 2020 were largely composed of fund borrowings, which at Rp5.38 trillion made up 43.02% of total liabilities.

dalam jutaan Rupiah/in Rp millions

Keterangan Description	2019	2020	Perubahan Change	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Modal saham – nilai nominal Rp1 per saham Capital stock – par value of Rp1 per share				
Modal dasar 2.000.000 saham Authorised capital 2,000,000 shares				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.000.000 saham Subscribed and paid up capital 2,000,000 shares	2.000.000	2.000.000	-	-
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	29.800	29.800	-	-
Penghasilan komprehensif lain – neto setelah pajak Other comprehensive income – net of tax	5.336	45.389	40.053	750,62
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas – neto Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges – net	(29.752)	(93.760)	-64.008	215,14
Keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai nilai wajar – neto Cumulative gain on derivative instrument for fair value hedges – net	-	25.647	25.647	-
Saldo laba Retained earnings				
Ditentukan penggunaannya Appropriated	26.465	26.465	-	-
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	120.710	146.719	26.009	21,55
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.152.559	2.180.260	27.701	1,29

Ekuitas

Jumlah ekuitas pada akhir tahun 2020 mencapai Rp2,18 triliun, meningkat 1,29% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,15 triliun.

Peningkatan ekuitas didorong oleh pertumbuhan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya di tahun 2020 sebesar Rp26,01 miliar atau 21,55%, kenaikan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp40,05 miliar, dan pengakuan keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai nilai wajar sebesar Rp25,65 miliar pada 2020. Hal ini diimbangi dengan peningkatan kerugian kumulatif instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas sebesar Rp64,01 miliar, atau 215,14%.

Equity

Total equity as at end of 2020 stood at Rp2.18 trillion, a 1.29% increase from the figure one year earlier, of Rp2.15 trillion.

Equity increase was driven by the rise in unappropriated retained earning in 2020 by Rp26.01 billion or 21.55%, increase in other comprehensive income by Rp40.05 billion, and recognition of cumulative gain on derivative instrument for fair value hedges amounted to Rp25.65 billion in 2020. This was partially offset by the rise in cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges by Rp64.01 billion, or 215.14%.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

dalam jutaan Rupiah/in Rp millions

Keterangan Description	2019	2020	Perubahan Change	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Pendapatan bunga Interest income	786.371	859.928	73.557	9,35%
Pendapatan provisi dan komisi Provision and commission income	37.490	33.700	-3.790	-10,11%
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek Realised gain on sale of securities	4.067	7.562	3.495	85,94%
Pendapatan jasa <i>advisory</i> Advisory income	8.059	9.388	1.329	16,49%
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan investasi saham Realised gain from sale of equity investment	1.010	-	-1.010	-100,00
Keuntungan yang direalisasi dari transaksi derivatif Realised gain from derivative transactions	5.781	-	-5.781	-100,00
Kerugian selisih kurs Loss from foreign exchange	(16.589)	(3.739)	12.850	-77,46%
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi saham Unrealised gain from changes in fair value of equity investments	24.795	-	-24.795	-100,00
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar opsi saham Unrealised loss from changes in fair value of shares option	(22.655)	-	22.655	100,00
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar transaksi derivatif Unrealised gain from changes in fair value of derivative transactions	8.745	-	-8.745	-100,00
Pendapatan lainnya Other income	728	4.681	3.953	542,99%
Jumlah Pendapatan Total Revenues	837.802	911.520	73.718	8,80%

Pendapatan

IIF membukukan pendapatan sejumlah Rp911,52 miliar pada tahun 2020, meningkat 8,80% dari Rp837,80 miliar pada tahun 2019.

Pendorong utama kenaikan pendapatan pada tahun 2020 adalah pendapatan bunga yang naik 9,35% dari Rp786,37 miliar pada 2019 menjadi Rp859,93 miliar. Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah pinjaman yang disalurkan selama tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Selain itu, terdapat peningkatan keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek sebesar Rp3,50 miliar akibat penjualan sekuritas obligasi.

Pendapatan provisi dan komisi adalah sebesar Rp33,70 miliar pada tahun 2020, lebih rendah dari tahun 2019, karena penundaan dalam kegiatan *advisory* (konsultasi) akibat pembatasan sosial untuk memerangi Covid-19.

Pada tahun 2020, seperti tahun-tahun sebelumnya, IIF menjalankan fungsi *treasury* yang terutama diarahkan untuk menjaga dan mengelola likuiditas dengan memantau arus kas dan memastikan investasi yang tepat atas kas. Dari kegiatan *treasury*, IIF membukukan pendapatan Rp114,86 miliar pada tahun 2020, turun sebesar 28,76% dari pendapatan tahun 2019 sebesar Rp160,97 miliar disebabkan oleh turunnya pendapatan bunga dari deposito berjangka sebanyak 24,31%, dari Rp34,01 miliar di 2019 menjadi Rp25,74 miliar di 2020, sejalan dengan strategi untuk meminimalkan dana surplus. Selain itu, tingkat bunga mengalami penurunan sebagai dampak dari penurunan ekonomi dari pandemi Covid-19.

Revenues

IIF booked total revenues of Rp911.52 billion in 2020, a 8.80% increase from total revenues of Rp837.80 billion in 2019.

The main driver of revenue increase in 2020 was interest income, which rose 9.35% from Rp786.37 billion in 2019 to Rp859.93 billion. This was in line with the increase of loans disbursed during 2020 compared to 2019. In addition, there was an increase in realized gain on sale of securities by Rp3.50 billion caused by the sale of bonds securities.

IIF's provision and commission income was Rp33.70 billion in 2020, lower than the amount recorded in 2019, due to the delays in its advisory services deployment in light of the social distancing measures to combat Covid-19.

In 2020 as in previous years, IIF's treasury function consistently maintained and managed liquidity by monitoring cash flows and ensuring cautious investment of excess cash. From treasury activities, IIF booked a total income of Rp114.68 billion in 2020, falling by 28.76% from 2019's income of Rp160.97 billion due to 24.31% decrement of interest income from time deposit, from Rp34.01 billion in 2019 to Rp25.74 billion in 2020, as inline with the strategy of minimizing surplus fund. Furthermore, interest rate was dropped affected by economic downturn from Covid-19 pandemic.

dalam jutaan Rupiah/in Rp millions

Keterangan Description	2019	2020	Perubahan Change	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Beban bunga Interest expense	626.153	605.272	-20.881	-3,33%
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	174.200	184.401	10.201	5,86%
Beban cadangan kerugian penurunan nilai Provision for impairment losses	5.045	50.606	45.561	903,09%
Jumlah Beban Total Expenses	805.398	840.279	34.881	4,33%

Beban

Jumlah beban pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp840,28 miliar, meningkat 4,33% dari jumlah beban tahun 2019 sebesar Rp805,40 miliar.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban cadangan kerugian penurunan nilai serta beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp45,56 miliar dan Rp10,20 miliar, sementara itu beban bunga mengalami penurunan sebesar 3,33% atau Rp20,88 miliar.

Expenses

Total expenses in 2020 was recorded at Rp840.28 billion, a 4.33% increase from total expenses in 2019 of Rp805.40 billion.

The increase was mainly due to the increases in provision for impairment losses and general and administrative expenses amounting to Rp45.56 billion and Rp10.20 billion, respectively, while interest expense decreased by 3.33% or Rp20.88 billion.

Pada tahun 2020, komposisi total beban terdiri dari beban bunga (72.03% dari keseluruhan), beban umum dan administrasi (21,95%), sementara sisanya berupa penyisihan kerugian penurunan nilai.

Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Karena risiko operasional bisnis meningkat akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, sebagaimana dibahas di awal bab ini, IIF mencatatkan peningkatan dalam penyisihan kerugian penurunan nilai 9 kali lipat, dari Rp5,05 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp50,61 miliar pada tahun 2020.

Beban Bunga

Beban bunga sedikit turun dari tahun 2019 yang sebesar Rp626,15 miliar menjadi Rp605,27 miliar pada tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan bunga dari pinjaman diterima sebesar Rp98,33 miliar atau 30,51% seiring dengan diversifikasi penggunaan pendanaan diantaranya melalui penerbitan surat utang berupa Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 senilai Rp1,50 triliun pada Oktober 2020. Hal ini menyebabkan naiknya bunga dari surat utang yang diterbitkan sebesar Rp72,58 miliar atau 61,98%.

Beban Umum dan Administrasi

Jumlah beban umum dan administrasi yang berhasil dibukukan IIF pada tahun 2020 adalah sebesar Rp184,40 miliar, mengalami kenaikan sebesar 5,86% dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp174,20 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban jasa profesional sebesar Rp8,85 miliar atau 48,66%, untuk mendukung ekspansi usaha IIF.

Laba Sebelum Beban Pajak

Laba sebelum beban pajak pada tahun 2020 meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2019, menjadi Rp71,24 miliar.

Beban Pajak

IIF mencatatkan beban pajak sebesar Rp28,73 miliar, dibandingkan dengan Rp16,43 miliar pada tahun 2019. Kenaikan ini seiring dengan kenaikan Laba sebelum Beban Pajak.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba bersih tahun berjalan IIF mencapai Rp42,51 miliar pada tahun 2020, naik tajam sebesar 166,09% dari Rp15,98 miliar pada tahun 2019. Dengan demikian, margin laba bersih tercatat sebesar 4,66% pada tahun 2020, lebih tinggi dari 1,91% pada tahun 2019.

Peningkatan laba bersih di tahun 2020 sebagian besar berasal dari peningkatan total pendapatan sebesar 8,80% dari tahun 2019 sehingga menjadi Rp911,52 miliar, yang diiringi dengan efisiensi beban yang hanya sedikit meningkat, sebesar 4,33% dari tahun 2019 sehingga menjadi Rp840,28 miliar di tahun 2020.

In 2020, the composition of total expenses consisted of interest expense (72.03% of the total), general and administrative expenses (21.95%), and the remaining was from provision for impairment losses.

Provision for Impairment Losses

Due to the heightened risks to business operations related to the Covid-19 pandemic in 2020, which has been discussed in earlier sections in this chapter, IIF recorded a nine-fold increase in provision for impairment losses, from Rp5.05 billion in 2019 to Rp50.61 billion in 2020.

Interest Expense

Interest expense slightly declined from its 2019's figure of Rp626.15 billion, to reach Rp605.27 billion in 2020. This reduction was contributed from decrement of interest from fund borrowing amounted to Rp98.33 billion or 30.51%, in line with the diversification of funding sources, such as through debt securities issued in the form of Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2020 totaling to Rp1.50 trillion in October 2020. The issuance caused the increase of interest from debt securities issued by Rp72.58 billion or 61.98%.

General and Administrative Expenses

Total general and administrative expenses in 2020 was recorded at Rp184.40 billion, an increase of 5.86% compared to that of 2019 recorded at Rp174.20 billion. The growth was mainly caused by an increase in professional services by Rp8.85 billion or 48.66% to support IIF's business expansion.

Income before Tax Expense

Income before tax expense in 2020 more than doubled from 2019's figure, to reach Rp71.24 billion.

Tax Expense

IIF incurred tax expense amounting to Rp28.73 billion, compared with Rp16.43 billion recorded in 2019. This increase is inline with the increase in Income Before Tax Expenses.

Net Income for the Year

IIF recorded net income for the year of Rp42.51 billion in 2020, a significant increase of 166.09% from Rp15.98 billion booked in 2019. This translates to a net income margin of 4.66% in 2020, higher than 1.91% in 2019.

Net income growth in 2020 was largely derived from an increase in total revenue generated by the Company by 8.80% from 2019 to Rp911.52 billion; followed by the efficiency of expenses that only increased by 4.33% from 2019 to Rp840.28 billion in 2020.

Dengan demikian, laba per saham mencapai Rp21, dibandingkan Rp8 pada 2019.

Penghasilan Komprehensif Lain

IIF membukukan rugi komprehensif lain sebesar Rp16,89 miliar pada tahun 2020, berbanding terbalik dengan pencatatan pendapatan komprehensif lain sebesar Rp1,34 miliar di tahun 2019.

Komponen utama dari rugi komprehensif lain pada tahun 2020 adalah bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai arus kas, sebesar Rp77,53 miliar pada tahun 2020, dibandingkan dengan Rp39,67 miliar pada tahun 2019.

Jumlah Laba Komprehensif

Jumlah pendapatan komprehensif pada tahun 2020 mencapai Rp25,62 miliar, 47,91% lebih tinggi dari Rp17,32 miliar pada tahun 2019.

Laporan Arus Kas

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2020, arus kas dari aktivitas operasi mencapai negatif Rp2,83 triliun, mengalami kenaikan sebesar 522,29% dari negatif Rp454,08 miliar pada tahun 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan yang signifikan dari penyaluran pinjaman sebesar Rp2,26 triliun atau 158,82% dibandingkan dengan penerimaan pembayaran pinjaman di tahun 2019. Hal ini seiring dengan fungsi IIF sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dana masyarakat ke dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2020, arus kas dari aktivitas investasi mencapai Rp322,32 miliar, 26,15% lebih sedikit dibandingkan yang tercatat di 2019 sebesar Rp436,48 miliar. Penurunan ini terutama karena berkurangnya jumlah pembelian efek-efek sebesar Rp371,80 miliar atau 63,35% menjadi Rp215,12 miliar di 2020, serta berkurangnya jumlah penjualan efek-efek sebesar Rp486,06 miliar atau 47,45% menjadi Rp538,40 miliar di 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2020, arus kas dari aktivitas pendanaan mencapai Rp2,15 triliun, meningkat sebesar Rp301,02 miliar atau 16,26% dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp1,85 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan pinjaman diterima dan pinjaman subordinasi yang naik masing-masing sebesar Rp1,48 triliun (82,27%) dan Rp780,00 miliar (260,00%), yang dikompensasi dengan kenaikan pembayaran pinjaman diterima sebesar Rp2,01 triliun atau 321,60%.

This translates to an income per share of Rp21, compared with Rp8 in 2019.

Other Comprehensive Income

IIF booked other comprehensive loss amounting to Rp16.89 billion in 2020, as opposed to other comprehensive income amounting to Rp1.34 billion recorded in 2019.

The primary component making up other comprehensive loss in 2020 was the effective portion on fair value changes from derivative instrument qualified as cash flow hedge, which amounted to Rp77.53 billion in 2020, compared to Rp39.67 billion in 2019.

Total Comprehensive Income

In 2020, total comprehensive income stood at Rp25.62 billion, 47.91% higher than 2019's figure of Rp17.32 billion.

Statement of Cash Flows

Cash Flows from Operating Activities

In 2020 2019, cash flows from operating activities was negative Rp2.83 trillion, a 522.29% increase compared to negative Rp454.08 billion in 2019. It was caused by a significant increment of disbursed loans of Rp2.26 trillion or 158.82% compared to that of 2019. This was in line with IIF's function as a financing institution which distributes funds to the community in the framework of infrastructure development in Indonesia.

Cash Flows from Investing Activities

In 2020, cash flows from investing activities was Rp322.32 billion, a 26.15% decrease compared to Rp436.48 billion in 2019. Such increase was primarily due to the decrement of purchase of securities by Rp371.80 billion or 63.35% to Rp215.12 billion in 2020, and the decrement of sales of securities by Rp486.06 billion or 47.45% to Rp538.40 billion in 2020.

Cash Flows from Financing Activities

In 2020, cash flow from financing activities was Rp2.15 trillion, grew by Rp301.02 billion or 16.26% compared to 2019 of Rp1.85 trillion. Such increase was mainly due to the increment of proceeds from fund borrowings and subordinated loans amounting to Rp1.48 trillion (82.27%) and Rp780.00 billion (260.00%), respectively, which were compensated by the increment in fund borrowings repayment amounting to Rp2.01 trillion or 321.60%.

Kemampuan Membayar Utang

Solvabilitas IIF ditentukan oleh rasio likuiditas dan solvabilitasnya, yang menunjukkan kemampuannya untuk membayar utang.

Pada tahun 2020, IIF tetap mampu memenuhi kewajiban lancarnya menggunakan aset lancarnya, sebagaimana tercermin dari rasio lancar sebesar 1,42x, dibandingkan dengan 1,41x di 2019.

Debt to equity ratio, yang membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, tercatat sebesar 5,63x pada tahun 2020, meningkat dari 4,72x pada tahun 2019. Akan tetapi, rasio liabilitas terhadap aset, sebesar 0,85x di 2020, hanya meningkat sedikit dari 0,83x di 2019. Hal ini menandakan bahwa IIF sepenuhnya solven sepanjang 2020.

Kolektibilitas Piutang

Sejalan dengan peningkatan penyaluran pinjaman melalui aktivitas pembiayaannya sepanjang 2020, kolektibilitas piutang IIF membaik, sebagaimana diukur dengan rasio NPL (bersih) sebesar 0,38%, dibandingkan dengan 0,74% pada tahun 2019.

NPL masih dapat dikelola meskipun terdapat tantangan yang dihadapi oleh beberapa klien IIF yang menerima pembiayaan, karena efek pandemi Covid-19 yang berkepanjangan yang menyebabkan perlambatan ekonomi secara umum sepanjang 2020, dan menghambat kemampuan nasabah untuk melunasi pinjaman.

Wabah Covid-19 telah berdampak buruk terhadap perekonomian global dan regional. IIF memperkirakan adanya dampak negatif pada kegiatan investasinya, terutama di sektor jalan raya, bandara dan pelabuhan, karena terbatasnya mobilitas selama pandemi Covid-19. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK menerbitkan Peraturan OJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Wabah Virus Corona 2019 bagi Lembaga Keuangan Non-Perbankan ("Peraturan OJK No. 14/2020") yang memudahkan persyaratan bagi lembaga keuangan non-bank seperti IIF dalam menilai kualitas kredit debitur dan peringkat kredit yang direstrukturisasi sehingga memberikan kelonggaran persyaratan bagi debitur yang terdampak Covid-19 yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 14/2020. Per 31 Desember 2020, IIF telah menerima dan menyetujui permintaan relaksasi berupa penangguhan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman berdasarkan Peraturan OJK No. 14/2020 dari tujuh debitur, dengan total *outstanding* pembiayaan sebesar Rp2.051 miliar atau 17,9% dari total aset investasi IIF sebesar

Solvency

IIF's solvency is determined by its liquidity and solvency ratios that signify its ability to pay debts.

In 2020, IIF remained fully capable of serving its current liabilities using its current assets, as reflected by its current ratio of 1,42x, compared with 1.41x in 2019.

Meanwhile, IIF's debt to equity ratio, which compares total liabilities to total equity, stood at 5.63x in 2020, an increase from 4.72x in 2019. However, in terms of liabilities to assets ratio, the figure was 0.85x, only slightly rising from 0.83x in 2019. This signified that IIF remained fully solvent throughout 2020.

Receivables Collectability

As IIF ramped up its loans disbursement through its financing activities in 2020, its receivables collectability rate improved, as measured by an NPL (net) ratio of 0.38%, compared with 0.74% in 2019.

The NPL remains manageable despite the challenges faced by certain borrowers, due to the effects of the prolonged Covid-19 pandemic which had caused the general slowdown of the economy throughout 2020 and hampered these borrowers' capability to service their loans to IIF.

The Covid-19 outbreak has brought adverse impacts on the global and regional economy. IIF expects that there would be negative impacts on its investment activities, particularly those in roads, airport and ports sectors due to limitation of activities during the Covid-19 outbreak. In connection with the outbreak, OJK issued OJK Regulation No. 14/POJK.05/2020 on Countercyclical Policy for the Impact of the Coronavirus Disease 2019 Outbreak for Non-Banking Financial Institutions ("OJK Regulation No. 14/2020") that eases the requirements for non-banking financial institutions such as IIF when assessing debtors' credit quality and rating restructured loans and thereby providing for relaxation of terms for borrowers impacted by the Covid-19 outbreak who meet the relevant requirements as provided under OJK Regulation No. 14/2020. As at 31 December 2020, IIF had received and approved requests for relaxation in the form of deferrals of interest and/or principal payments under loans under OJK Regulation No. 14/2020 from seven borrowers, with the total amount of outstanding financing of Rp2,051 billion or 17.9% of IIF's total investment assets totaling

Rp11.445 miliar. Meskipun penangguhan pembayaran tersebut tidak membuat pinjaman terkait dikategorikan sebagai kredit bermasalah sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/2020, IIF telah meningkatkan jumlah pencadangan sehubungan dengan penangguhan tersebut, sebagai tindakan yang dilandasi oleh kehati-hatian. IIF memperkirakan bahwa dampak penangguhan tersebut terhadap kondisi keuangannya bersifat moderat.

Struktur Modal

Struktur permodalan IIF terdiri atas alokasi modal sendiri dalam bentuk ekuitas, dan liabilitas berupa utang-utang yang diperoleh Perseroan. Permodalan tersebut digunakan oleh IIF untuk mendanai kegiatan operasional dan pengembangan usahanya.

Per 31 Desember 2019 dan 2020, struktur permodalan IIF adalah sebagai berikut:

Komponen Modal Component of Capital		2019	2020
Liabilitas Liabilities		10.158.501	12.504.112
Ekuitas Equity		2.152.559	2.180.260
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Liabilities to Equity Ratio		4,72	5,63

dalam miliaran Rupiah/in Rp billion

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Pengelolaan risiko modal yang dilakukan IIF bertujuan untuk memastikan kemampuan Perseroan dalam melanjutkan kelangsungan usaha dan memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi struktur utang dan ekuitas. Manajemen IIF terus melakukan pengawasan dan peninjauan terhadap struktur permodalan Perseroan dengan mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Perseroan mengelola tingkat permodalan untuk memastikan kemampuannya untuk melanjutkan keberlangsungan operasi.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2020, IIF tidak melakukan ikatan material untuk investasi barang modal.

Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2020, IIF tidak melakukan investasi barang modal.

Rp11,445 billion. Whilst such deferrals of payments do not result in the relevant loans being categorized as non-performing loans in accordance with OJK Regulation No. 14/2020, IIF has increased the amount of provisioning with respect to these deferrals as a prudent measure. IIF expects the impact on its financial conditions from granting such deferrals to be moderate.

Capital Structure

IIF's capital structure consists of own capital as equity, and liabilities in the form of debts obtained by the Company. The capital is used by IIF to fund its operational activities and expand its business.

As of 31 December 2019 and 2020, IIF's capital structure is as follows:

Management Policy on Capital Structure

The capital risk management carried out by IIF aims to ensure the Company's ability to maintain business continuity and improve shareholders value through the optimization of debt and equity structure. IIF management closely monitors and reviews the Company's capital structure by considering costs of capital and associated risks. The Company manages capital level to ensure that it will be able to continue as going concern.

Material Commitments for Capital Goods Investment

Throughout 2020, the Company did not enter into any material commitments for capital goods investment.

Capital Goods Investment

Throughout 2020, the Company did not carry out capital goods investment.

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Keuangan

IIF telah menerbitkan dan menawarkan Surat Utang Senior Tanpa Jaminan dalam jumlah nominal sebesar USD 150.000.000 dan telah tercatat di Singapore Stock Exchange (SGX) pada tanggal 28 Januari 2021 sebagai bagian dari USD 500.000.000 *Euro Medium Term Note Programme* yang mendapatkan peringkat “BBB” oleh Fitch Ratings.

Penggunaan dana dari penerbitan surat utang tersebut akan digunakan untuk *green projects* yang memenuhi syarat dan/atau proyek sosial yang memenuhi syarat untuk surat utang berkelanjutan.

Material Information and Fact Subsequent to Financial Statements Date

IIF had issued and offered Senior Unsecured Notes with nominal amounting to USD 150,000,000 and was listed on the Singapore Stock Exchange (SGX) on 28 January 2021 under the USD 500,000,000 *Euro Medium Term Note Programme*, rated “BBB” by Fitch Ratings.

The use of the proceeds from the issuance of these notes will be used towards the eligible green projects and/or eligible social projects for sustainability bonds.

Prospek Usaha 2021 2021 Business Prospect

Perkembangan perekonomian di awal tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh kemajuan proses vaksinasi Covid-19 pada skala global. Memperhitungkan besarnya skala pandemi, vaksinasi menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, selain langkah-langkah stimulus yang diambil oleh pemerintah dan bank sentral.

Bank Dunia dalam *Global Economic Prospects* edisi Januari 2021 memperkirakan ekonomi global tumbuh sebesar 4% di tahun 2021. Bank Dunia meyakini bahwa pertumbuhan tersebut dapat diraih apabila vaksinasi Covid-19 berjalan secara luas dan pihak otoritas mendorong investasi di semua lini, sehingga pembangunan dapat terus berlangsung tanpa bergantung pada hutang pemerintah.

Para pembuat kebijakan di Indonesia, yang memiliki ekspektasi proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2021 dalam kisaran 4.4% hingga 5%, memiliki pandangan serupa terkait fungsi investasi dalam menopang pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 5% dalam APBN 2021, dengan asumsi pemulihan aktivitas ekonomi akan mendorong laju inflasi (3% di 2021 dibandingkan 1,7% di 2020) dan pulihnya harga minyak menjadi sekitar USD 45 per barel.

Setelah turun sebesar 28,7% pada tahun 2020, anggaran belanja sektor infrastruktur di 2021 mendapat dorongan besar karena pemerintah dalam APBN 2021 mengalokasikan Rp417,4 triliun, meningkat 48,4% dari nilainya di tahun 2020, yang sempat direvisi di pertengahan tahun 2020 seiring pemerintah menerapkan tindakan penanggulangan darurat krisis Covid-19. Sebesar

Recent developments in early 2021 related to the economy were modulated to a great extent by the progress of Covid-19 vaccinations taking place globally. Given the immense scale of the pandemic, the pace of vaccinations is key to improving economic growth in the short term, in addition to the stimulus measures taken by the government and the central bank.

The World Bank in its January 2021 *Global Economic Prospects* expects global economy to grow by 4% in 2021. It believes that such a growth is possible should the Covid-19 vaccinations become widely implemented and investment is facilitated and ramped up by the authorities, so that development can be sustainable without being heavily reliant on government debt.

Policymakers in Indonesia, expecting projected economic growth in 2021 within 4.4% to 5% range, shares the World Bank's view as regards shoring up investment to ensure sustainable development. The Indonesian government targets economic growth of 5% in its 2021 State Budget, with assumptions that revived economic activities will result in a higher inflation rate (3% in 2021 compared with 1.7% in 2020) and a recovery of oil price to around USD 45 per barrel.

After dipping by 28.7% in 2020, infrastructure spending in 2021 received a major boost as the government in its 2021 State Budget allocated Rp417.4 trillion, a marked increase of 48.4% from 2020's figure, which was revised in mid-2020 as the government mounted an emergency response to the Covid-19 crisis. As much as Rp45.8 trillion or around 11% of total infrastructure budget will come

Rp45,8 triliun atau sekitar 11% dari anggaran infrastruktur akan berasal dari skema pembiayaan. Nilainya naik 42% dari angka di dalam APBN 2020 sebelum revisi.

Kebijakan utama pemerintah untuk sektor infrastruktur pada tahun 2021 akan diarahkan pada penguatan infrastruktur digital dan peningkatan efisiensi logistik dan konektivitas melalui proyek padat karya serta pembangunan fasilitas kesehatan dan fasilitas dasar lainnya untuk memperkuat sistem kesehatan nasional.

Kebijakan tersebut akan diwujudkan antara lain lewat dibangunnya jalan sepanjang 965,4 km dan jembatan 26,9 km, bandara di 10 lokasi, 53 bendungan, dan kapasitas pembangkitan listrik sebesar 11,8 MWp dari sel surya sistem *rooftop* dan *cold storage*.

Proyeksi di atas mendorong IIF sebagai katalisator pembiayaan infrastruktur di Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya lebih lanjut, seiring upayanya untuk memperkuat hubungan dengan klien saat ini serta menjajaki peluang baru dengan adanya mandat baru dari pemangku kepentingannya.

Produk Investasi

IIF akan terus menyalurkan pembiayaan ke sektor infrastruktur yang sesuai mandatnya dan juga ke sektor infrastruktur baru, mulai tahun 2019, khususnya di bidang infrastruktur sosial seperti rumah sakit, pendidikan, dan distribusi pangan. Melalui sektor-sektor tersebut, IIF optimis dapat berperan sebagai katalisator dan *enabler* dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

Jasa Advisory

Tim Advisory terus mengintensifkan upayanya untuk meningkatkan kontribusi pendapatan dari layanan konsultasi bagi IIF dengan menawarkan layanan di sepanjang rantai proses pembangunan proyek infrastruktur, mulai dari persiapan proyek hingga transaksi daur ulang aset. IIF saat ini tengah memperluas layanannya untuk mencakup:

- *Project Development Facility* (PDF), untuk persiapan proyek KPBU;
- Proyek penugasan langsung Pemerintah kepada BUMN/BUMD;
- Entitas sektor swasta yang mengembangkan proyek infrastruktur baik dalam skema *solicited* maupun *unsolicited*; serta
- Proyek kerja sama dan bantuan teknis yang disponsori oleh badan multilateral dan bilateral internasional, termasuk implementasi *Green Climate Fund* (GCF).

Untuk memperluas kapasitas bisnisnya, Tim Advisory terus bertumbuh secara organik sambil mejajaki struktur *co-advisory* dengan perusahaan keuangan/teknis lainnya.

from the financing scheme. This signifies a 42% increase from the figure in the initial 2020 State Budget.

The government's main infrastructure policies in 2021 will be geared towards strengthening digital infrastructure and boosting logistical efficiency and connectivity through labour-intensive projects as well as construction of health and other basic facilities to reinforce the national health system.

These policies will be made manifest in the construction of, among others: 965.4 km of roads and 26.9 km of bridges, 10 airports, 53 dams, and 11.8 MWp of power generation from rooftop and cold storage solar photovoltaics.

Such projections will provide a strong impetus for IIF as a catalyst for infrastructure financing in Indonesia to expand its business further, as it seeks to strengthen its relationship with existing clients as well as exploring new opportunities under the new mandate it has received from the its stakeholders.

Investment Products

IIF will continuously target to provide financing in mandated infrastructure sectors and new infrastructure sectors, which already started since 2019, specifically in social infrastructure such as hospitals, education, and food distribution infrastructure. Through these sectors, IIF is optimistic that it can serve its role as a catalyst and enabler in accelerating national infrastructure development.

Advisory Services

Advisory Group is intensifying the effort to enlarge revenue contribution to IIF by offering advisory services along the infrastructure project development process chain, from project preparation up to asset recycling transaction. IIF is expanding advisory service to markets that include:

- *Project Development Facility* (PDF), for PPP project preparation;
- Government direct assignment project to SOE/Regional SOE;
- Private sector entity developing infrastructure project in both solicited and unsolicited PPP scheme; and
- Cooperation and technical assistance projects sponsored by international multilateral and bilateral agencies, including the implementation of *Green Climate Fund* (GCF).

To expand its business capacity, Advisory Group is growing organically while also entering co-advisory structure with other financial/technical firms.

Perbandingan Target dan Realisasi 2020

Comparison of Targets and Actual Achievements in 2020

Indikator Indicator	Target 2020 2020 Target	Pencapaian 2020 2020 Actual Figure	Pencapaian terhadap Target Achievement vs. Target
Total aset Total assets	Rp15,00 triliun/trillion	Rp14,69 triliun/trillion	97,93%
Total liabilitas Total liabilities	Rp12,84 triliun/trillion	Rp12,50 triliun/trillion	97,35%
Total ekuitas Total equity	Rp2,16 triliun/trillion	Rp2,18 triliun/trillion	100,93%
Pendapatan Revenues	Rp1,11 triliun/trillion	Rp911,52 miliar/billion	82,06%
Laba bersih Net income	Rp52,30 miliar/billion	Rp42,51 miliar/billion	81,27%
Rasio Utang terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	5,89x	5,63x	104,46%

Proyeksi 2021

2021 Projections

Indikator Indicator	Target 2021 2021 Target
Total aset Total assets	Rp16,13 triliun/trillion
Total liabilitas Total liabilities	Rp13,95 triliun/trillion
Total ekuitas Total equity	Rp2,17 triliun/trillion
Pendapatan Revenues	Rp1.189,8 miliar/billion
Laba bersih Net income	Rp81,4 miliar/billion
Rasio Utang terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	6,26x

Pemasaran Marketing

Strategi & Inisiatif Pemasaran

IIF memasarkan produk pembiayaan dan layanan *advisory* terutama dengan cara membina sinergi dengan berbagai lembaga keuangan, baik di dalam maupun luar negeri, yang memiliki fokus yang sama pada pembangunan infrastruktur Indonesia.

Strategi pemasaran utama IIF bersandar pada hubungan baik yang telah dibangun selama ini dengan bank lokal dan asing, otoritas, serta agen pembangunan, untuk membuat terobosan yang berarti dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan pegiat infrastruktur di Indonesia saat ini, dengan mengandalkan bauran produk pembiayaannya yang luas, yang mencakup kategori *fund-based* dan *non-fund based*.

Sebagai bagian dari inisiatif *brand awareness*-nya, IIF terus berpartisipasi dalam pameran dan konferensi infrastruktur internasional, dan menjadi bagian dari asosiasi industri yang diakui secara global dan nasional. Hal ini dilakukan dengan maksud menghubungkan korporasi dan lembaga keuangan asing dengan para pelaku domestik untuk menjajaki proyek-proyek yang berorientasi keberlanjutan yang layak dikembangkan di Indonesia.

Selain itu, IIF secara rutin menginisiasi dan berpartisipasi dalam dialog dengan pemerintah dan seluruh otoritas terkait, khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan OJK. Dengan demikian, IIF dapat terus mengikuti perkembangan peraturan terbaru dan siap menawarkan keahliannya kapanpun diperlukan, sejalan dengan kebijakan dan keputusan investasi strategis dari pemerintah.

Sepanjang tahun 2020, IIF tetap sangat selektif dalam menjangkau pasar yang baru. Pembiayaan diberikan kepada klien baru dan yang sudah ada berdasarkan pertimbangan per proyek, dengan fokus untuk membangun kemitraan untuk mendanai sektor-sektor tertentu yang dapat mengadopsi SEP IIF agar dapat menghadirkan pengaruh besar.

Sasaran Pemasaran

Dengan pendekatan di atas, sektor yang ditargetkan untuk pembiayaan oleh IIF mencakup transportasi, telekomunikasi, air, minyak dan gas, dan energi terbarukan. Pada tahun 2020, target pasar IIF diperluas ke luar kategori infrastruktur dasar, seiring IIF menerima mandat baru untuk masuk ke sektor infrastruktur sosial.

IIF juga ikut andil dalam mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pemerintah melalui partisipasinya saat ini dan yang potensial di masa mendatang.

Marketing Strategy & Initiatives

IIF is marketing its financing products and advisory services first and foremost by fostering synergy with other financial institutions, both in the country and overseas, with similar concern for Indonesia's infrastructure development.

IIF's main marketing strategy hinges on the sound relationships it has built over the years with local and foreign banks, the authorities, as well as development agents, in order to make meaningful inroads in recognizing and catering to the current needs of infrastructure players in Indonesia, by leveraging on its broad financing product mix from the fund-based and non-fund based categories.

As part of its brand awareness initiative, IIF continues to participate in international infrastructure exhibitions and conferences, and be part of the global- and nationally-recognised industry associations. This is done with the intention of connecting foreign corporations and financial institutions with domestic players to explore feasible, sustainability-oriented projects to be developed in Indonesia.

Furthermore, IIF regularly initiates and participates in dialogues with the government and all relevant authorities, in particular the Investment Coordinating Board (BKPM) and OJK. This ensures IIF stays abreast with the latest regulatory developments and is always at the ready to provide its expertise when called for, in line with government's strategic investment policies and decisions.

Throughout 2020, IIF remained highly selective in securing new markets. Financing was provided to new and existing clients alike on a per-project basis, with a focus on building partnership for financing specific sectors where IIF's SEP can be adopted to produce substantial effects.

Target Market

Given this approach, IIF is focusing on financing commercially viable projects and its targeted sectors for financing has included transportation, telecommunication, water, oil and gas, and renewable energy. In 2020, IIF's target market was broadened beyond the basic infrastructure types, as it received new mandates to engage the social infrastructure sectors.

IIF is also a key participant in supporting the success of the Government's National Medium Term Development Plan through current and potential participation going forward.

Kebijakan Dividen

Dividend Policy

Kebijakan Dividen Tahun 2020 untuk Tahun Buku 2019

Keputusan RUPST 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2020 menyatakan bahwa IIF tidak mengalokasikan dana cadangan, dividen, atau tujuan lainnya untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Dividend Policy in 2020 for FY2019

The 2020 AGMS held on 19 March 2020 resulted in a resolution stating that IIF did not allocate any reserve funds, dividends, or other purposes for the fiscal year ended on 31 December 2019.

Kebijakan Dividen Tahun 2019 untuk Tahun Buku 2018

Keputusan RUPST 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2019 menyatakan bahwa IIF tidak mengalokasikan dana cadangan, dividen, atau tujuan lainnya untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.

Dividend Policy in 2019 for FY2018

The 2019 AGMS held on 21 March 2019 resulted in a resolution stating that IIF did not allocate any reserve funds, dividends, or other purposes for the fiscal year ended on 31 December 2018.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Use of Public Offering Proceeds

Pada tahun 2019, IIF menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019, dengan jumlah dana yang diperoleh mencapai Rp1,5 triliun. Dana yang tersisa dari aksi korporasi ini per 31 Desember 2019 adalah Rp1,28 triliun.

In 2019, IIF issued the Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019, with total proceeds amounting to Rp1.5 trillion. The remaining amount of proceeds from this corporate action as at 31 December 2019 was Rp1.28 trillion.

Pada tahun 2020, IIF menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020, dengan jumlah dana yang diperoleh mencapai Rp1,5 triliun.

In 2020, IIF issued the Shelf Registration Bonds I of Indonesia Infrastructure Finance Phase II Year 2020, with total proceeds amounting to Rp1.5 trillion.

Penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut selama tahun 2020 dirinci pada tabel berikut.

The use of these proceeds in the fiscal year of 2020 is detailed in the table below.

dalam miliaran Rupiah/ in Rp billions

Penawaran Umum Public Offering	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Realisasi Total Proceeds			Realisasi Penggunaan Dana Use of Proceeds			Sisa Dana Remaining Proceeds		
		Jumlah Hasil Penawaran Umum Total Public Offering Proceeds	Biaya Penawaran Umum Public Offering Fees	Nilai Bersih Net Proceeds	Pembayaran Kembali atas Sebagian Utang Repayment of Certain Debts	Pembiayaan Proyek Infrastruktur Financing of Infrastructure Projects	Total	Pembayaran Kembali atas Sebagian Utang Repayment of Certain Debts	Pembiayaan Proyek Infrastruktur Financing of Infrastructure Projects	Total
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 Shelf Registration Bonds I Indonesia Infrastructure Finance Phase I Year 2019	19 Desember / December 2019	1.500,00	6,57	1.493,43	1.000	493,43	1.493,43	-	-	-

Penawaran Umum Public Offering	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Realisasi Total Proceeds			Realisasi Penggunaan Dana Use of Proceeds			Sisa Dana Remaining Proceeds		
		Jumlah Hasil Penawaran Umum Total Public Offering Proceeds	Biaya Penawaran Umum Public Offering Fees	Nilai Bersih Net Proceeds	Pembayaran Kembali atas Sebagian Utang Repayment of Certain Debts	Pembiayaan Proyek Infrastruktur Financing of Infrastructure Projects	Total	Pembayaran Kembali atas Sebagian Utang Repayment of Certain Debts	Pembiayaan Proyek Infrastruktur Financing of Infrastructure Projects	Total
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 Shelf Registration Bonds I Indonesia Infrastructure Finance Phase II Year 2020	22 Oktober / October 2020	1.500,00	3,32	1.496,67	800	696,67	1.496,67	-	-	-
Total		3.000,00	9,89	2.990,10	1.800	1.190,10	2.990,10	-	-	-

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi dan Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, and Capital/Debt Restructuring

Januari 2021, IIF mencatatkan *Senior Unsecured Notes* senilai USD 150 juta di Bursa Efek Singapura.

On January 2021, IIF listed its Senior Unsecured Notes of USD 150 million in the Singapore Stock Exchange (SGX).

IIF melakukan pelunasan atas fasilitas pinjaman bank pada akhir Februari 2021.

IIF prepaid its bank loan facilities in the end of February 2021.

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Material Transaction Containing Conflict of Interest

Pada tahun 2020, IIF tidak mendapati adanya transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangannya.

In 2020, IIF did not have any material transactions containing conflict of interest that have significant impact on its financial statements.

Transaksi dengan Pihak Berelasi/Afiliasi

Transaction with Affiliated Parties

Dalam menjalankan kegiatan usaha, IIF memiliki transaksi usaha yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi. Rincian lengkap mengenai sifat dan transaksi berelasi dapat dilihat pada Catatan 30 Laporan Keuangan (halaman 115-119) yang terlampir pada Laporan Tahunan ini.

In carrying out business activities, IIF enters into significant business transactions with affiliated parties. Full details on the nature and transactions with affiliated parties can be seen in Note 30 to the Financial Statements (pages 115-119) attached to this Annual Report.

Manajemen IIF berpendapat bahwa seluruh transaksi dengan pihak afiliasi dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

The management of IIF believes that all transactions with affiliated parties are carried out at the normal price and terms as those with third parties.

Perubahan Ketentuan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan

Changes in Laws and Regulations with Significant Impact

Pada tahun 2020, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang baru disahkan oleh regulator yang berpengaruh terhadap IIF, yaitu:

In 2020, the following regulations were issued by the regulators and had an impact on IIF:

No.	Peraturan Perundang-Undangan Regulation	Latar Belakang Peraturan Perundang-Undangan Background	Pengaruh terhadap IIF Impact on IIF
1.	POJK No.14/POJK.05/2020 Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank POJK No.14/POJK.05/2020 Countercyclical Policy for the Impact of Coronavirus Disease 2019 on Non-Bank Financial Institutions	Kebijakan countercyclical untuk menjaga kinerja LKJNB, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi A countercyclical policy to maintain non-bank financial services institutions, maintain financial stability, and support economic growth.	Membendung pemburukan kondisi keuangan di pasar melalui skema restrukturisasi utang. Debitur-debitur yang usahanya mengalami kesulitan atau kontraksi akibat Covid-19 mendapatkan kelonggaran dalam pelunasan utang sehingga likuiditas debitur dapat terjaga. Halt the deterioration of financial condition in the market through debt restructuring scheme. Debtors whose businesses suffered due to the Covid-19 pandemic received a relaxation in their debt repayment so that their liquidity could be maintained.
2.	POJK No.46/POJK.05/2020 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur POJK No.46/POJK.05/2020 Infrastructure financing companies	Penyempurnaan materi dalam peraturan yang berlaku sebelumnya Enhancement of the previous regulation	Mengatur peraturan terkait: kegiatan usaha, bentuk badan hukum, kepemilikan, modal disetor saat pendirian, kepemilikan asing, susunan organisasi, perizinan usaha, kantor cabang, unit usaha syariah, sumber pendanaan, penyertaan, penempatan dana, penilaian tingkat kesehatan, pelaporan, larangan, pengawasan berbasis risiko, penetapan status pengawasan, pencabutan izin usaha, dan penegakan kepatuhan. Regulates the business activities, form of legal entity, ownership, paid up capital at time of establishment, foreign ownership, organization structure, business licensing, branches, sharia business unit, funding sources, investments, fund placements, soundness level assessments, reporting, prohibitions, risk-based supervision, supervision status enactment, revocation of business permit, and compliance.

No.	Peraturan Perundang-Undangan Regulation	Latar Belakang Peraturan Perundang-Undangan Background	Pengaruh terhadap IIF Impact on IIF
3.	POJK No. 58/POJK.05/2020 Perubahan atas POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank POJK No. 58/POJK.05/2020 Amendments to POJK No. 14/POJK.05/2020 on Countercyclical Policy for the Impact of Coronavirus Disease 2019 on Non-Bank Financial Institutions	Perubahan dari peraturan yang berlaku sebelumnya Amendments to the previous regulation	Mengatur jangka waktu relaksasi terkait pelaporan serta jangka waktu berlaku POJK ini/relaksasi ini sampai dengan tanggal 17 April 2022, kecuali: 1) kebijakan yang terkait batas waktu penyampaian laporan berkala; 2) pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan; dan 3) mekanisme komunikasi perusahaan perasuransian, yang berlaku selama jangka waktu darurat Covid-19. Stipulates the timeline for relaxation of reporting and validity period of this POJK/relaxation up to 17 April 2022, except for: 1) policies related to the timeline for the submission of regular reporting; 2) implementation of fit and proper test; and 3) insurance companies' communications mechanism, to be valid for the entire Covid-19 emergency period.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Changes in Accounting Policies

Efektif 1 Januari 2020, Perseroan telah menerapkan perubahan kebijakan akuntansi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang baru diberlakukan, yakni PSAK 71 "Instrumen Keuangan" dan PSAK 73 "Sewa". Rincian lengkap mengenai perubahan kebijakan akuntansi ini dapat dilihat pada Catatan 2a dan 37 Laporan Keuangan (halaman 15 dan 150–154) yang terlampir pada Laporan Tahunan ini.

Effective on 1 January 2020, the Company has applied new and revised accounting policies as required by Statements of Financial Accounting Standards (SFAS), namely SFAS 71 "Financial Instruments" and SFAS 73 "Leases". Full details on the changes in this accounting policies can be seen in Notes 2a and 37 to the Financial Statements (pages 15 and 150–154) attached to this Annual Report.

Informasi Kelangsungan Usaha

Information on Business Continuity

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Risiko pembiayaan (termasuk risiko kredit dan risiko operasional) merupakan risiko utama yang dapat terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan oleh Perseroan selama pandemi Covid-19 di 2020.

Issues with Potential Significant Influence to the Company's Business Continuity in the Last Fiscal Year

Financing risk (including credit risk and operational risk) are the main risks that can occur in relation to the financing business activities carried out by the Company during the Covid-19 pandemic in 2020.

Assessment Manajemen atas Hal-hal Tersebut

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara Perseroan dengan debiturnya atau risiko yang dihadapi akibat ketidakmampuan Perseroan dalam mendapatkan pengembalian investasi yang layak dari pembiayaan yang dilakukan langsung (dalam hal penyertaan ekuitas) pada perusahaan nasabah dalam rangka perluasan usaha nasabah. Perseroan melakukan serangkaian langkah pengendalian risiko pembiayaan, meliputi:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dan investasi dan peran aktif Komite Investasi terkait sesuai konsep *four eyes principles* dalam melakukan evaluasi dan penilaian atas setiap pengajuan pembiayaan dan investasi, sehingga dapat diperoleh pandangan berimbang, komprehensif, independen, dan menyeluruh atas potensi risiko yang dihadapi.
2. Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko yang antara lain mengatur mengenai alur kerja proses pengelolaan kredit dan investasi sehingga tercipta proses kredit yang efektif dan efisien.
3. Penerapan sistem pemeringkatan risiko yang memungkinkan Perseroan mengukur tingkat risiko dan menganalisis kelayakan debitur dan/atau proyek infrastruktur dengan menggunakan perangkat pengukuran yang konsisten baik untuk modalitas pembiayaan korporasi (*corporate financing*) maupun modalitas pembiayaan proyek (*project financing*).
4. Di samping itu, Perseroan juga memantau secara periodik portofolio pembiayaannya untuk memastikan kualitas kredit yang baik, termasuk penerapan Sistem Peringatan Dini yang menyediakan kerangka kerja dan perangkat pemantauan untuk observasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Investment dan Credit Risk terhadap sejumlah *early warning indicator* untuk mendeteksi perubahan atas portofolio dan *counterparty*. Jika terjadi penurunan kualitas kredit, maka pemantauan lebih intensif dilakukan oleh unit khusus untuk melakukan tindakan *recovery* yang dianggap perlu. Untuk itu, Perseroan telah membentuk unit kerja yang menangani kredit yang menunjukkan tanda-tanda awal bermasalah atau yang akan atau sudah bermasalah walaupun belum terdapat gagal bayar (Unit SAM) di bawah Direktorat Kredit yang terpisah dan independen dari penanganan kredit lancar. Tugas utama unit kerja ini difokuskan untuk mengatur strategi dalam mencari solusi yang tepat agar kredit bermasalah ini dapat diselesaikan secara

Assessment of the Management on Such Matters

Financing risk is the risk arising from the failure of a counterparty to fulfill their obligations based on a financing agreement between the Company and the debtor, or the risk faced by the Company due to its inability to obtain reasonable investment returns from direct financing (in the case of equity investment) to the customer in order to expand the customer's business. The Company carries out a series of measures to control financing risk, including:

1. The implementation of prudent principle in providing financing and investment and the active role of the Investment Committee in accordance with the four eyes principle in evaluating every financing and investment proposal; hence, a balanced, comprehensive, and independent view of potential risks can be obtained.
2. Improvement of risk management procedures and systems in order to regulate the workflow of credit management and investment processes, so as to create an effective and efficient credit process.
3. Implementation of a risk rating system that allows the Company to measure risk level and analyze the feasibility of debtors and/or infrastructure projects through consistent measurement tools for both corporate financing and project financing modalities.
4. Regular monitoring of financing portfolio to ensure good credit quality, including the introduction of formal Early Warning System which provides framework and monitoring tools towards observation performed through collaboration between Investment and Credit Risk on a number of early warning indicators to detect changes in the portfolio and counterparties. If a decline in credit quality occurs, the Company will carry out a more intensive monitoring activity through a special unit in order to take recovery actions if deemed necessary. For this reason, the Company has established a work unit named Special Asset Management or SAM Unit under the Credit Directorate and is independent of the current credit management of the Company. This work unit shall handle loans which show initial signs of problems or loans which will be or have been problematic even though default has not taken place. The main focus of this work unit is to manage the strategies to provide proper solutions for the underperforming loans to be settled in a proper

tuntas dan tepat waktu sehingga dapat mengurangi risiko kerugian yang dapat terjadi dari kegagalan pembayaran. Unit kerja ini bertindak berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

and timely manner so that the risk of loss arising from default can be minimized. This work unit acts according to the established procedures.

5. Penerapan berbagai jaminan, ketentuan, syarat dan pra-syarat serta janji-janji (*covenants*) yang harus dipenuhi oleh peminjam yang dievaluasi secara berkala oleh Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk mengasuransikan aset-aset (*fixed assets*) yang dijaminan kepada Perseroan. Untuk membangun proses pemantauan yang memadai, penerapan basis data pemantauan klien terintegrasi ('K2') yang dapat diakses bersama oleh Investment, Credit Risk, dan Credit Operations telah dibentuk, untuk memastikan kepatuhan terkait pemenuhan janji-janji (yang harus dipenuhi secara tepat waktu) seraya memungkinkan unit yang relevan untuk mempersiapkan mitigasi dan solusi apabila pelanggaran terhadap kepatuhan terdeteksi.
6. Pengembangan *database* dalam rangka pengukuran risiko kredit dan investasi berdasarkan *best practice methodology*. Selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020, IIF tetap waspada dalam menilai situasi yang selalu berubah, sehingga tiga uji ketahanan dilakukan untuk mengukur dampak pandemi secara keseluruhan terhadap klien, sektor, dan ekonomi pada umumnya, dan akhirnya pada IIF. Kesimpulan dari uji ketahanan tersebut menunjukkan bahwa dampak buruk yang perlu dihadapi IIF tetap terkendali dan tidak membahayakan kelangsungan usahanya.
7. Terkait risiko operasional selama pandemi Covid-19, IIF telah melakukan beberapa langkah pencegahan sebagai berikut:
 - Pemeliharaan teknis pada server VPN secara teratur, untuk meningkatkan stabilitas koneksi dan keamanan akses jarak jauh;
 - Pembentukan Tim Gugus Tugas Covid-19 untuk memberikan respons segera dan merumuskan solusi/tata kelola untuk mendukung Rencana Keberlangsungan Bisnis;
 - Menyiapkan strategi untuk operasi skala terbatas, yang mencakup kebijakan 100% bekerja dari rumah (WFH) atau 50% bekerja dari kantor (WFO) tergantung keadaan, ditinjau setiap dua minggu;
 - Mewajibkan karyawan yang WFO sesuai jadwal untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap infeksi, seperti menjalani tes serologi dan melakukan penilaian mandiri Covid-19;
 - Memberikan perlindungan seperti *hand sanitizer* dan masker di beberapa lokasi kantor;
 - Mendisinfeksi kantor setiap minggu;
5. Implementation of a range of guarantees, requirements and pre-conditions, and covenants that must be fulfilled by borrowers. The guarantees, requirements and preconditions, and covenants are regularly evaluated by the Company, including but not limited to provisions on insuring of fixed assets served as a collateral to the Company. In order to establish a sufficient and adequate monitoring process, an integrated clients' monitoring database tool ('K2') shared among Investment, Credit Risk and Credit Operations was established to ensure compliance on the covenant fulfilment (which shall be timely met) while allowing the relevant units to prepare mitigations and solutions once non-compliance arises.
6. Development of database in order to measure credit and investment risk based on the best practice methodology. During the Covid-19 pandemic in 2020, IIF stayed vigilant in assessing the everchanging and fluid situation where as a result, three stress tests were conducted to measure the overall impact of the outbreak on the clients, sectors, and the economy as a whole, and finally on IIF. The conclusion of the stress tests showed that the adverse impact that would need to be faced by IIF remained manageable and would not jeopardize IIF's going concern.
7. Regarding operational risk during Covid-19 pandemic, IIF has implemented several prevention measures, as follows:
 - Performing frequent technical maintenance on Virtual Private Network server to increase connection stability and security for remote access;
 - Establishment of Covid-19 Task Force Team to provide immediate response and to formulate solution/governance to support IIF's Business Continuity Plan;
 - Setting up strategy on limited operations, which includes 100% work from home (WFH) or 50% work from office (WFO) policy depending on the circumstances, to be reviewed every 2 weeks;
 - Requiring employees who will take WFO as per schedule to conduct preventive measures against infection such as having (serology) test and completing Covid-19 self-assessment;
 - Providing protection such as hand sanitizers and masks at several office locations;
 - Disinfecting the office every week;

- Sedapat mungkin menghindari pertemuan langsung secara fisik, kecuali untuk hal-hal penting yang strategis dan/atau persiapan dan penandatanganan dokumen IIF, dan menyelenggarakan rapat di kantor secara virtual;
 - Tidak menerima tamu atau pihak eksternal untuk datang ke kantor IIF, kecuali vendor atau telah disetujui Komite Eksekutif (Excomm) terkait untuk hal-hal penting strategis dan/atau persiapan dan penandatanganan dokumen IIF;
 - Pemeriksaan suhu dan administrasi penilaian mandiri di pintu masuk untuk semua tamu yang telah menerima izin untuk datang ke kantor IIF;
 - Karyawan dapat menggunakan tunjangan rawat jalan untuk sementara waktu untuk membeli vitamin C dan E sesuai kebutuhan tanpa resep dokter;
 - Karyawan dapat mengganti biaya tes usap sesuai kebijakan Excomm terkait;
 - Tunjangan transportasi sesuai nilai bagi karyawan yang menggunakan transportasi umum dan belum memenuhi syarat untuk menerima program kepemilikan mobil;
 - Kunjungan lapangan hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir oleh sejumlah kecil karyawan; serta
 - Mewajibkan karyawan mengikuti protokol untuk kunjungan lapangan, termasuk persyaratan untuk melakukan tes usap setelah kembali ke Jakarta.
- Avoiding physical direct meeting as much as possible, unless for strategic important matters and/or preparation and signing of IIF's documents. Meeting in the office is to be conducted virtually;
 - Not accepting guests or external parties to come to IIF's office, except vendors or approved by related Executive Committee (Excomm) for strategic important matters and/or preparation and signing of IIF's documents;
 - Temperature checks and self-assessment administration at the entrance for all guests who have received clearance to come to IIF's office;
 - Employees may temporarily use outpatient limits to purchase vitamin C and E as needed without doctor's prescription;
 - Employees may reimburse swab test as per discretion of related Excomm;
 - Transportation allowance (at cost) for employees using public transportation and not eligible to receive car ownership program;
 - Site visits only carried out as a last resort option by a very limited number of employees; and
 - Requiring employees to follow protocols for site visits, which include requirement to take swab test after returning to Jakarta.

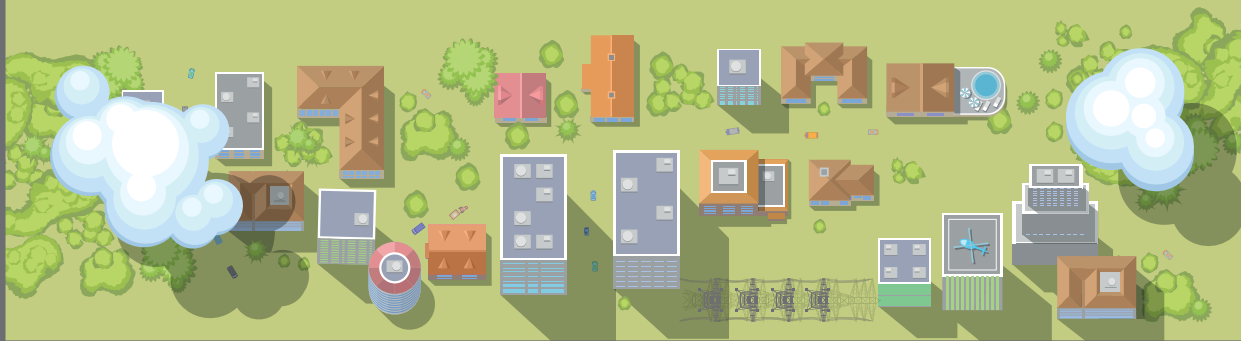
Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Assessment

1. Faktor-faktor makroekonomi utama diasumsikan sejalan dengan APBN 2021, termasuk pertumbuhan PDB sebesar 5,0%, tingkat inflasi sebesar 3,0%, dan rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap USD sebesar Rp14.600.
2. NPL bersih diasumsikan di bawah 2,0% sesuai dengan pedoman KPI internal IIF dan di bawah ketentuan yang mengatur pinjaman bank IIF yang ditetapkan sebesar 5,0%, tanpa ada penambahan NPL yang dilaporkan.
3. Penyisihan sebesar Rp47 miliar untuk dampak restrukturisasi terkait pelonggaran kredit dan penurunan peringkat akibat memburuknya kondisi keuangan akibat Covid-19.
4. Strategi kewaspadaan untuk mengatasi tantangan melalui penerapan perangkat pemantauan risiko yang meliputi pembentukan proses Sistem Peringatan Dini dan *Covenant Compliance Monitoring*.
5. Tidak ada dampak terhadap operasi IIF, karena berbagai langkah seperti peningkatan infrastruktur TI untuk mendukung strategi WFH telah diperhitungkan dengan baik.

The Management's Assumptions Used in the Assessment

1. Key macroeconomic factors are assumed to be in line with 2021 State Budget, including GDP growth of 5.0%, inflation rate of 3.0%, and average Rupiah to USD rate of Rp14,600.
2. Net NPL is assumed to be below 2.0% as per guided by IIF's internal KPI and below the governing covenants of IIF's bank loan set at 5.0%, with no additional NPL account reported.
3. Provisions of IDR47 billion to cover the impact of the restructuring related to credit relaxation and lower ratings due to deteriorating financials impacted by Covid-19.
4. Vigilant strategy to overcome the challenges through the implementation of risk monitoring tools that include the establishment of Early Warning System process and Covenant Compliance Monitoring.
5. No impact on IIF's operations, where certain measures such as improvements in IT infrastructure to support WFH strategy have been well taken into account.





Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Legal Basis of Corporate Governance Implementation

Praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di IIF diatur antara lain oleh:

Undang-Undang Republik Indonesia

- No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-439/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada PT Indonesia Infrastructure Finance;

Peraturan Lainnya

- Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- Peraturan Ketua Bapepam-LK No. PER-03/BL/2010 tentang Bentuk, Susunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-36/PM/2003, Peraturan No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala;
- Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-40/PM/2003 Peraturan Bapepam-LK No. VII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;
- Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-413/BL/2009, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2000 ttentang Perubahan Peraturan Bapepam No. VII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan;

Good corporate governance (GCG) practices at IIF are governed, among others, by:

Laws of the Republic of Indonesia

- No. 40/2007 on Limited Liability Companies;
- No. 14/2008 on Information Disclosure;

Ministerial Regulation

Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 100/PMK.010/2009 on Infrastructure Financing Companies;

Ministerial Decree

Decree of the Minister of Finance No. KEP-439/KM.10/2010 on the Provision of Business License for Infrastructure Financing Company to PT Indonesia Infrastructure Finance;

Other Regulations

- Presidential Regulation No. 9/2009 on Financing Institutions;
- Regulation of the Chairman of Bapepam-LK No. PER-03/BL/2010 on the Form, Structure, and Submission of Quarterly Financial Statements and Semiannual Business Activity Reports of Infrastructure Financing Companies;
- Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-36/PM/2003, Regulation No. X.K.2 on the Obligation to Submit Periodical Financial Statements;
- Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-40/PM/2003 Regulation of Bapepam-LK No. VII.G.11 on Responsibilities of the Board of Directors for Financial Statements;
- Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009, Regulation of Bapepam-LK No. IX.E.1 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest in Certain Transactions;
- Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-413/BL/2009, Regulation of Bapepam-LK No. IX.E.2 on Material Transactions and Changes in Main Business Activities;
- Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-554/BL/2010 on the Amendment to Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2000 on the Amendment to the Regulation of Bapepam-LK No. VII.G.7 on Guidelines on the Presentation of Financial Statements;

- Peraturan OJK (POJK) No. 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
- POJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;
- POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
- POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 6/SEOJK.04/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan secara Elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- SEOJK No. 11/SEOJK.04/2014 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pengumuman kepada Masyarakat oleh Pelaku Pasar Modal yang Batas Waktunya Jatuh pada Hari Libur;
- SEOJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
- SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik; serta
- POJK No. 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
- OJK Regulation (POJK) No. 3/POJK.05/2013 on Monthly Report of Non-Bank Financial Service Institutions;
- POJK No. 29/POJK.05/2014 on Organisation of Financing Businesses;
- POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers and Public Companies;
- POJK No. 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
- POJK No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers of Public Companies;
- POJK No. 8/POJK.04/2015 on Websites of Issuers or Public Companies;
- POJK No. 31/POJK.04/2015 on Transparency of Information on Material Facts by Issuers or Public Companies;
- POJK No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Performance of the Works of Audit Committees;
- POJK No. 56/POJK.04/2015 on the Formation and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Unit Charters;
- POJK No. 29/POJK.04/2016 on Annual Report of Issuers or Public Companies;
- OJK Circular (SEOJK) No. 6/SEOJK.04/2014 on Procedures for the Submission of Electronic Reports by Issuers or Public Companies;
- SEOJK No. 11/SEOJK.04/2014 on the Obligation to Submit Reports to OJK and Public Announcements for Capital Market Participants of which Deadlines Fall on Public Holidays;
- SEOJK No. 15/SEOJK.05/2016 on Good Corporate Governance Implementation Reporting for Financing Companies;
- SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Contents of the Annual Report of Issuers or Public Companies;
- POJK No. 51/POJK.03/2017 on Sustainable Finance Implementation for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies; and
- POJK No. 46/POJK.05/2020 on Infrastructure Financing Companies.

Prinsip Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Implementation Principles

Sebagai warga korporasi yang baik, IIF berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten sehingga berdampak positif bagi IIF dan pemangku kepentingannya. Dalam menciptakan budaya tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan sikap dan perilaku bisnis yang sejalan dengan budaya IIF, yaitu *Collaboration*, *Excellence*, dan *Commitment to Infrastructure Business*.

Implementasi dan praktik tata kelola di IIF mengacu pada 5 prinsip GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Transparansi

IIF menyampaikan informasi secara transparan kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan terkait kinerja dan kegiatan usahanya. IIF menerapkan keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.

2. Akuntabilitas

Terdapat kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban di IIF sehingga pengelolaan bisnis berlangsung efektif dan efisien. Manajemen senantiasa membuat *job descriptions* yang jelas untuk semua pegawai dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dengan demikian, pelaporan dan hasil kinerja yang diraih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Tanggung Jawab

Kesesuaian rencana, strategi dan hasil yang dicapai IIF berada dalam garis kebijakan manajemen dan dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaporan terkait kegiatan usaha IIF dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan berdampak positif bagi citra IIF.

4. Independensi

Pengelolaan IIF dilakukan secara mandiri, pengurus melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional IIF. Manajemen IIF harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun peraturan perusahaan.

As a good corporate citizen, IIF is committed to consistently implement GCG principles to have positive impact on itself as well as on its stakeholders. In creating a good corporate governance as a culture, IIF shall conduct business in line with its values, namely *Collaboration*, *Excellence*, and *Commitment to Infrastructure Business*.

Governance practice and implementation in IIF refers to the 5 GCG principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness, with details as follows:

1. Transparency

IIF transparently provides information related to its business performance and activities to the shareholders and all stakeholders. IIF exercises a transparent information system in its decision-making process and discloses information deemed significant and relevant to its activities.

2. Accountability

There is clarity of function, structure, system and responsibility in IIF in order to effectively and efficiently manage its business. The Management sets out clear job descriptions for all employees and affirms the basic functions of each division. Thus, the reporting process and performance result become accountable.

3. Responsibility

The conformity of plans, strategies and results attained by IIF is always set within the Management's policy and implement based on IIF's Articles of Association by taking into the prevailing laws and regulations to further ensure the accountability of its report. This principle provides added value to the shareholders and create a positive image for IIF.

4. Independence

IIF is managed independently in which the management has their own duties and responsibilities and carries them out without any pressure from outside parties that is not in accordance with IIF's operations systems. This principle implicitly states that IIF's management must always acknowledge the rights of stakeholders as declared in the laws and company regulations.

5. Kewajaran

Kesetaraan dan perlakuan adil dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap seluruh pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IIF senantiasa membuat sistem yang solid untuk melaksanakan dan menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas seperti yang diharapkan. IIF menjalankan kinerja secara *fair* serta menaati seluruh peraturan untuk melindungi pemangku kepentingan dalam memastikan keberlangsungan bisnisnya. IIF berkomitmen memperlakukan seluruh pegawai secara adil serta bebas dari prasangka karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak terkait kinerja.

5. Fairness

Equality and fair treatment to meet the rights and obligations to all stakeholders that arise from agreements and prevailing laws and regulations. IIF always ensures a solid system to conduct and create quality products and services to meet clients' expectations. IIF gives fair treatment and complies with all applicable regulations to protect stakeholders within its responsibility to sustain its business. IIF commits to give fair treatment to all employees without prejudice to their ethnicity, religion, origin, gender, or other matters that are not relevant to their performance.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure

Struktur tata kelola perusahaan IIF dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUPT dan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, serta organ-organ pendukung lainnya seperti Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengendalian Internal, dan Komite Audit.

Penyusunan struktur ini memperhatikan pemetaan fungsi atau kegiatan usaha berdasarkan standar etika bisnis serta memastikan mekanisme *checks and balances* dapat berjalan dengan efektif.

IIF's corporate governance structure is based on the provisions of Article 1 of the Company Law and consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners (BoC), the Board of Directors (BoD), and other supporting organs such as the Corporate Secretary, Internal Control Unit, and Audit Committee.

This arrangement also takes into account the mapping of functions or business activities based on business ethics standards and ensures effective checks and balances.

Direksi

Board of Directors

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi memegang tanggung jawab penuh dalam menjalankan pengurusan Perusahaan, termasuk urusan kepemilikan dan pelepasan properti Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Selain itu, Direksi menjadi organ yang mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.

Pursuant to the Articles of Association, the Board of Directors (BoD) is fully responsible for the management of the Company, including for matters concerning asset ownership and asset disposal, in accordance with the purpose and objectives of the Company. In addition, the BoD represents the Company in both internal and external affairs.

Komposisi Direksi

Per tanggal 31 Desember 2020, komposisi Direksi IIF adalah sebagai berikut:

BoD Composition

The BoD composition as of 31 December 2020 was as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Service
Reynaldi Hermansjah	Presiden Direktur President Director	Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Maret 2019 Notarial Deed No. 1 dated 1 March 2019	Penutupan RUPST tahun 2022 The closing of AGMS 2022
Devi Pradnya Paramita	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Managing Director and Chief Financial Officer (CFO)	Akta Notaris No. 1 tanggal 6 Desember 2019 Notarial Deed No. 1 dated 6 December 2019	Penutupan RUPST tahun 2022 The closing of AGMS 2022
I Made Wiracita Tantra	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Managing Director and Chief Risk Officer (CRO)	Akta Notaris No. 15 tanggal 24 Januari 2018 Notarial Deed No. 15 dated 24 January 2018	Penutupan RUPST tahun 2021 The closing of AGMS 2021
Mohammad Ramadhan Harahap	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)	Akta Notaris No. 13 tanggal 16 Juni 2020 Notarial Deed No. 13 dated 16 June 2020	Penutupan RUPST tahun 2023 The closing of AGMS 2023
Y. Bayu Wirawan	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)	Akta Notaris No. 13 tanggal 16 Juni 2020 Notarial Deed No. 13 dated 16 June 2020	Penutupan RUPST tahun 2023 The closing of AGMS 2023

Piagam Kerja Direksi

Direksi mengacu pada piagam (*charter*) Direksi dalam pelaksanaan fungsinya di IIF. Piagam tersebut memuat ruang lingkup tugas dan tanggung jawab serta aturan pola hubungan manajerial antara organ-organ terkait dalam membantu Direksi menjalankan kegiatan operasional Perusahaan.

BoD Charter

In performing its functions within IIF, the BoD is guided by the BoD Charter. The Charter defines the scope of the BoD's duties and responsibilities as well as the patterns governing managerial relations between the various organs assisting the BoD in carrying out the Company's operational activities.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Umum

Direksi IIF secara kolektif dan sendiri-sendiri bertanggung jawab melakukan koordinasi, memimpin, dan memelihara serta mengelola aset IIF sesuai kepentingan Perusahaan.

Duties and Responsibilities of the BoD

General

Collectively or individually, members of the BoD are responsible for coordinating, leading, maintaining, and managing the assets of IIF in the Company's best interest.

Spesifik

Terkait kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, Direksi bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi wajib setia dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Setiap anggota Direksi secara individual bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya; dan
3. Para anggota Direksi wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan proses kepatuhan dan memastikan bahwa semua kewajiban telah dipenuhi sesuai dengan Anggaran Dasar dan RUPS Tahunan, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Terkait hubungan dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, Direksi bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan atas keputusan yang dibuat dalam RUPS, Dewan Komisaris, dan Anggaran Dasar;
2. Memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham; mengatur komunikasi dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan lainnya pihak yang berkepentingan, termasuk tugas dan tanggung jawab Direksi dan setiap anggota Direksi;
3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dan memberikan tanggapan atas saran dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham;
4. Mempersiapkan laporan berkala dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta laporan lainnya sesuai dengan permintaan Pemegang Saham;
5. Mengadakan RUPST berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih Pemegang Saham yang memiliki hak suara yang sah dan yang mewakili setidaknya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham yang diterbitkan;
6. Mempersiapkan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham di tangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan keluarganya baik dalam IIF maupun di perusahaan lainnya;
7. Melakukan konsultasi dengan Dewan Komisaris atas pemberian kredit di atas jumlah yang telah ditentukan;
8. Menetapkan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya perusahaan IIF;
9. Menjaga kegiatan operasional IIF agar sejalan dengan bisnis dan tujuan Perusahaan;
10. Membuat rencana kerja, anggaran tahunan, dan rencana lainnya yang terkait dengan bisnis IIF;
11. Menentukan remunerasi untuk Manajemen senior dan karyawan kunci, dan menjaga konsistensi remunerasi ini agar sesuai dengan budaya, tujuan, strategi, serta tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar IIF, dan lingkungan usaha; dan
12. Menyeimbangkan kepentingan semua pemilik kepentingan dari IIF.

Specific

In terms of compliance with prevailing laws and regulations, the responsibilities of the BoD are as follows:

1. Members of the BoD must act faithfully and responsibly in performing their duties in accordance with prevailing regulations;
2. Each member of the BoD shall be held responsible for their individual faults and acts of negligence in the performance of their duties; and
3. Members of the BoD are responsible for enforcing compliance procedure and ensuring that all obligations have been fulfilled pursuant to the Articles of Association and the Company's Annual GMS, along with prevailing regulations.

In relation to the BoC and Shareholders, the BoD is responsible for:

1. Ensuring that the resolutions established in the GMS, by the BoC and the Articles of Association are carried out;
2. Presenting information to the BoC and Shareholders; managing communication with Shareholders, the BoC, and other stakeholders, including on the duties and responsibilities of each Director;
3. Being accountable for the implementation of its duties to the Shareholders and providing feedback on the advice from the BoC and Shareholders;
4. Preparing periodical reports in a timely manner and in accordance with applicable regulations, as well as other reports as required by the Shareholders;
5. Convening the AGMS based on a written request from one or more shareholders with valid voting rights and who collectively represent at least 1/10 (one tenths) of issued shares;
6. Preparing and maintaining a Shareholders Register and Special List containing share ownership by the members of the BoC and the BoD and their relatives, both in IIF and other companies;
7. Consulting with the BoC regarding approval for loans above the maximum limit;
8. Determining the vision, mission, values, and corporate culture of IIF;
9. Maintaining IIF's operational activities within the Company's line of business and objectives;
10. Preparing work plans, annual budget plans, and other plans pertaining to the business of IIF;
11. Determining the amount of remuneration paid out to senior management and executive officers, and keeping remuneration packages consistent with the Company's culture, objectives, strategies as well as duties and responsibilities stated in prevailing regulations, IIF's Articles of Association, and prevailing conditions in the business environment; and
12. Balancing the interests of IIF's various stakeholders.

Tanggung jawab terkait pelaporan keuangan:

1. Menjaga pembukuan dan administrasi IIF sesuai dengan praktik-praktik yang berlaku;
2. Mengembangkan sistem akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia dan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama dalam hal pencatatan, pengarsipan, *monitoring*, serta pengelolaan; dan
3. Mempersiapkan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan, dan akuntansi kemudian mempersiapkan laporan tersebut pada RUPST.

Tanggung jawab terkait Manajemen dan Pengendalian Risiko, Direksi bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan Perusahaan memiliki proses yang tepat dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, serta mengendalikan risiko;
2. Memastikan bahwa sistem dan proses yang tepat telah dieksekusi dalam pemantauan dan pelaporan risiko utama yang dihadapi oleh Perusahaan;
3. Memantau dan mengevaluasi keberadaan proses Manajemen dalam menilai kecukupan sistem Manajemen Risiko dan pengendalian internal, pelaporan Keuangan, serta kepatuhan;
4. Memastikan keberadaan atas sistem pengendalian yang efektif untuk memastikan:
 - Keandalan dan integritas dari informasi;
 - Kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku, rencana prosedur, dan peraturan;
 - Pemeliharaan aset Perusahaan;
 - Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien; dan
 - Pencapaian atas tujuan dan sasaran operasional yang telah ditentukan.
5. Melaksanakan evaluasi tahunan dalam rangka menyusun pernyataan kepada publik mengenai pengendalian internal Perusahaan untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari pengendalian internal yang dimiliki telah dipertimbangkan untuk dievaluasi sampai dengan tanggal persetujuan Laporan Tahunan;
6. Direksi bertanggung jawab menciptakan struktur organisasi, tugas, dan struktur tanggung jawab yang jelas, termasuk penunjukan Manajemen; dan
7. Direksi bertanggung jawab untuk memanfaatkan secara efektif hasil audit baik dari Auditor Internal maupun eksternal.

Fungsional

Terkait dengan fungsinya secara umum, Direksi bertanggung jawab untuk:

1. Merumuskan dan melaksanakan visi, strategi, rencana tahunan, tujuan, dan anggaran IIF dan memastikan keselarasan dan dukungan dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, memberikan arah kepada IIF, Direksi, dan Departemen untuk mencapai keberhasilan dalam tumbuh kembangnya perusahaan menjadi perusahaan yang menguntungkan dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang;

Responsibilities related to financial reporting:

1. Bookkeeping and keeping IIF administration in line with prevalent best practices;
2. Developing an accounting system that is in accordance with the Indonesian Accounting Standards and internal control principles, particularly regarding administration, archiving, monitoring and management activities; and
3. Preparing the Annual Report, including Financial Statements and accounting procedures for the reports, for the AGMS.

Responsibilities related to Risk Management and Control, the BoD is responsible for:

1. Ensuring that the Company has a proper and systematic process to identify, measure, and control risks;
2. Ensuring that the proper systems and processes have been implemented in measures to monitor and report on the main risks faced by the Company;
3. Monitoring and evaluating management processes and assessing the adequacy of Risk Management and internal control systems, financial reporting, and compliance procedures;
4. Ensuring the availability of an effective control system to establish:
 - Reliability and integrity of information;
 - Compliance with prevailing policies, procedures, plans, and regulations;
 - Maintenance of the Company's assets;
 - Economic and efficient use of resources; and
 - Achievement of pre-determined operational objectives.
5. Conducting annual evaluations of the Company's internal controls in order to ensure that all essential aspects of internal control have been considered and assessed. The results of these evaluations will be presented in a public statement and will cover a period of time until the approval of the Company's Annual Report;
6. Establishing clear organisational structure, duties, and responsibilities, including the appointment of the Management; and
7. Utilizing audit results from internal and external auditors in the best interest of the Company.

Functional

In regards to its general function, the BoD is responsible for:

1. Establishing and executing IIF's vision, strategies, annual plans, objectives, and budget, while ensuring alignment with and support from the BoC and Shareholders; as well as providing direction to the Company, the BoD and all departments in order to sustain short and long-term profitability;

2. Membangun, menetapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan secara efektif struktur dan kerangka kerja tata kelola perusahaan, yang mencakup kebijakan, prosedur, dan prinsip-prinsip pemisahan wewenang dan tanggung jawab ("*Chinese Wall*") untuk memastikan pelaksanaan strategi dan rencana tahunan perusahaan serta kepatuhan terhadap kebijakan dan pedoman peraturan yang berlaku, berjalan secara efektif dan efisien;
3. Mengembangkan dan mengelola bisnis dan hubungan dengan para pemilik kepentingan lainnya, bertindak sebagai perwakilan resmi dari IIF bagi para pemilik kepentingan lainnya dan media, dan membangun merek dagang IIF dalam rangka membentuk posisi yang menguntungkan baik secara politis dan peraturan, serta kondisi bisnis dan citra publik yang baik sebagai prasyarat untuk keberhasilan perusahaan pembiayaan infrastruktur;
4. Memastikan pengaruh kebijakan dan peraturan atas *landscape* infrastruktur, penasihat proyek strategis, dan pengatur pendanaan atas nama klien, atas dasar produk *fee based* dan *Advisory*, dalam rangka menciptakan dan menumbuhkembangkan portofolio proyek-proyek infrastruktur untuk IIF yang menguntungkan dan berkelanjutan;
5. Memastikan pengembangan penawaran produk baru yang lebih baik, yang cocok untuk kondisi di Indonesia, menjamin akses ke pendanaan (jangka panjang), dan menawarkan dana dan produk berbasis non-dana untuk proyek-proyek infrastruktur yang potensial, dengan mempertimbangkan perspektif investor, dalam rangka meningkatkan investasi PPP di infrastruktur Indonesia yang menguntungkan dan berkelanjutan;
6. Memastikan kerangka kerja Manajemen Risiko yang terintegrasi dan kebijakan untuk berbagai jenis risiko, serta budaya sadar risiko di seluruh perusahaan dan memperhitungkan parameter risiko dalam semua keputusan bisnis, untuk menjaga portofolio infrastruktur proyek dan investasi yang sehat dalam parameter risiko dan anggaran;
7. Memastikan perencanaan dan siklus pengendalian, integritas dalam administrasi dan pembukuan, operasi dan perencanaan pajak yang efektif dan efisien, serta laporan keuangan interim dan tahunan, dalam rangka memimpin perusahaan untuk mencapai tujuan finansialnya secara efektif dan efisien, dan memberikan wawasan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan pemilik kepentingan lainnya atas posisi keuangan dan kinerja IIF;
8. Memastikan integritas, efektivitas, dan efisiensi dari unit-unit yang berfungsi sebagai pendukung seperti bagian Hukum, Asuransi, IT, Audit, SDM, Komunikasi dan Pengadaan, sehingga tujuan bisnis IIF baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien;
2. Establishing, determining, implementing, and coordinating the Company's governance structure and framework, covering policies, procedures, and the principle of segregation between authority and responsibility ("*Chinese Wall*") to ensure effective and efficient implementation of the Company's strategies and annual plans, as well as compliance with policies and prevailing regulations;
3. Developing and managing the Company's business and relationship with other stakeholders and to act as the official representative of IIF to other stakeholders and the media while building IIF's brand and public image in order to establish a beneficial position either politically and regulation-wise, as well as good business and image as precondition to the success of an infrastructure financing company;
4. Monitoring the impact of policies and regulations on the infrastructure landscape, strategic project advisors, and fund arrangers for the client, based on fee-based products and *Advisory*, in the effort to establish and develop a profitable and sustainable portfolio of infrastructure projects for IIF;
5. Ensuring the development of better product offerings suited for Indonesia's financing market, to ensure access to long-term funds, and to provide fund and non-fund-based products for potential infrastructure projects by considering investors' perspectives in order to enhance participation in Indonesia's PPP market in a profitable and sustainable manner;
6. Ensuring an integrated Risk Management framework and policies for various risk types, as well as a risk awareness culture throughout the organisation by taking into account risk parameters in making business decisions, in order to maintain a healthy portfolio of infrastructure projects and investment within the aforementioned risk and budget parameters;
7. Ensuring adequate planning and a proper control cycle, maintaining the integrity of administration and accounts, preparing effective and efficient tax operations and planning, as well as preparing interim and statutory financial statements in order to lead the organisation in a financially effective and efficient manner that will provide the BoD, BoC and stakeholders with insight into IIF's financial position and performance;
8. Ensuring the integrity, effectiveness, and efficiency of supporting units such as Legal, Insurance, IT, Audit, HR, Communications, and Procurement Units, in order to achieve the Company's short and long-term business objectives in an effective and efficient manner;

9. Mengembangkan dan menerapkan kegiatan *monitoring* dan pelaporan infrastruktur IIF serta pengawasan, melaporkan dan menawarkan nasihat tentang kegiatan IIF dan portofolio, dalam rangka memperoleh informasi yang benar untuk melakukan tindakan yang tepat dan memberikan informasi kepada Dewan Komisaris, namun tetap mematuhi kewajiban pelaporan yang diatur dalam peraturan perusahaan; dan
10. Mengembangkan dan memimpin tim yang efektif, memastikan struktur organisasi, tata kelola dan proses IIF yang baik (termasuk di dalamnya adanya pemisahan wewenang yang tegas antara Penasihat dan Investasi), dan mengembangkan, menjaga budaya, serta nilai-nilai inti IIF sehingga rencana strategis dan tujuan IIF dapat tercapai.

9. Developing and implementing the Company's monitoring and reporting infrastructure, reporting and providing advice on IIF's activities and portfolio, collecting the necessary information for the BoC to be used as basis in decision making while complying with reporting requirements as established in the Company's regulations; and
10. Developing and leading an effective team, ensuring proper organisational structures, governance and processes within IIF (including strict separation of authority between Advisory and Investment), and developing and promoting the right corporate culture and core values to achieve the Company's strategic plans and objectives.

Rapat Direksi

Di tahun 2020, Direksi menyelenggarakan 25 kali rapat internal, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

BoD Meetings

The BoD held 25 internal meetings in 2020, with the attendance rates as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Reynaldi Hermansjah	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) President Director and Chief Executive Officer (CEO)	25	25	100%
Devi Pradnya Paramita	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Managing Director and Chief Financial Officer (CFO)	25	25	100%
I Made Wiracita Tantra	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Managing Director and Chief Risk Officer (CRO)	25	25	100%
Harold Tjiptadjaja*	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)	2	2	100%
Hilda Savitri**	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)	14	14	100%
Mohammad Ramadhan Harahap***	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)	21	21	100%
Y. Bayu Wirawan****	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)	21	21	100%

* Harold Tjiptadjaja efektif menjabat sebagai anggota Direksi hingga 31 Januari 2020/Harold Tjiptadjaja effectively served as a BoD member until 31 January 2020.

** Hilda Savitri efektif menjabat sebagai anggota Direksi hingga 15 Mei 2020/Hilda Savitri effectively served as a BoD member until 15 May 2020.

*** Mohammad Ramadhan Harahap efektif menjabat sebagai anggota Direksi sejak 30 Juni 2020/Mohammad Ramadhan Harahap effectively serve as a BoD Member from 30 June 2020.

**** Y. Bayu Wirawan efektif menjabat sebagai anggota Direksi sejak 30 Juni 2020/Y. Bayu Wirawan effectively serve as a BoD Member from 30 June 2020.

Agenda yang dibahas pada rapat internal Direksi adalah sebagai berikut:

The agendas discussed in the BoD meetings were as follows:

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
13 Januari/January 2020	
20 Januari/January 2020	
3 Februari/February 2020	
17 Februari/February 2020	
3 Maret/March 2020	
9 Maret/March 2020	
16 Maret/March 2020	
30 Maret/March 2020	
13 April/April 2020	
16 April/April 2020	
24 April/April 2020	
28 April/April 2020	
30 April/April 2020	
11 Mei/May 2020	
27 Mei/May 2020	
2 Juni/June 2020	
5 Juni/June 2020	
22 Juni/June 2020	
24 Juni/June 2020	
30 Juni/June 2020	
2 Juli/July 2020	<i>Bi-weekly ExComm Meeting 2020</i>
7 Juli/July 2020	
13 Juli/July 2020	
15 Juli/July 2020	
20 Juli/July 2020	
27 Juli/July 2020	
4 Agustus/August 2020	
19 Agustus/August 2020	
27 Agustus/August 2020	
31 Agustus/August 2020	
14 September/September 2020	
16 September/September 2020	
25 September/September 2020	
28 September/September 2020	
12 Oktober/October 2020	
22 Oktober/October 2020	
9 November/November 2020	
23 November/November 2020	
7 Desember/December 2020	
21 Desember/December 2020	

Pengembangan Kompetensi Direksi

Dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Direksi, IIF menyediakan fasilitas berupa program pelatihan dan pengembangan bagi anggota Direksi. Rincian program pelatihan dan pengembangan bagi anggota Direksi di tahun 2020 disajikan pada halaman 47-50.

Sesi Induksi bagi Direktur Baru

IIF menetapkan kebijakan pemberian sosialisasi bagi setiap anggota baru yang bergabung ke jajaran Direksi. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk pemaparan ruang lingkup Perusahaan secara menyeluruh dan informasi penting pendukung lainnya.

Pada tahun 2020, IIF memberikan sosialisasi kepada Mohammad Ramadhan Harahap sebagai anggota Direksi baru pada Juli 2020.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Menurut penilaian Direksi, seluruh komite di bawah Direksi, yakni Komite Investasi, Komite Aset dan Liabilitas, Komite Manajemen Risiko, Komite Advisory, Komite Sumber Daya Manusia, dan Komite Pengarah TI, telah berkinerja optimal di tahun 2020, dalam rangka mendukung fungsi pengelolaan usaha Direksi melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite.

Kebijakan Remunerasi Direksi

Ketentuan mengenai besaran dan struktur remunerasi Direksi ditetapkan dalam RUPST, berdasarkan hasil evaluasi dan usulan Komite Nominasi dan Remunerasi. Besaran remunerasi Direksi pada tahun buku 2020 disajikan pada Laporan Keuangan Audit Perusahaan tahun 2020.

Keberagaman Komposisi Direksi

Komposisi Direksi per 31 Desember 2020 menunjukkan keberagaman anggotanya dalam hal, antara lain, latar belakang, usia, dan bidang keahlian.

BoD Competence Development

To optimise the roles and functions of the board, IIF provides facilities in the form of training and development for BoD members. Their details of the competence development programmes participated by the BoD in 2020 are presented on pages 47-50.

Induction Session of New Director

The company has an established policy for the induction of new members of the BoD. Such induction includes a comprehensive presentation of the Company's scope and other important supporting information.

In 2020, an induction was held for Mohammad Ramadhan Harahap as the new member of the BoD in July 2020.

Performance Evaluation of Committees under the BoD

The BoD has assessed that all committees under the BoD, i.e., the Investment committee, the Assets and Liabilities Committee, the Risk Management Committee, the Advisory Committee, the Human Resources Committee, and the IT Steering Committee, performed optimally in supporting the BoD's management function in 2020 by implementing their respective duties and responsibilities.

Remuneration Policy for the BoD

Provisions regarding BoD remuneration amount and structure is stipulated in the AGMS, based on the evaluation by and proposal of the Nomination and Remuneration Committee. Remuneration amount for the BoD for 2020 is presented in the Company's Audited Financial Statements for 2020.

Diversity in BoD Composition

The BoD composition as at 31 December 2020 demonstrated diversity in, among other things, background, age, and field of expertise.

Indikator Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

BoC and BoD Diversity Indicators

Nama Name	Jenis Kelamin Gender		Usia Age		Pendidikan Terakhir Latest Education		Pengalaman Kerja Experience		Keahlian Expertise
	Laki-laki Male	Perempuan Female	> 50 Tahun > 50 Years Old	≤ 50 Tahun ≤ 50 Years Old	S2	S3	> 20 Tahun > 20 Years Old	≤ 20 Tahun ≤ 20 Years Old	
Dewan Komisaris / BoC									
Darmin Nasution	✓	-	✓	-		✓	✓	-	• Ekonomi/Economics • Pasar Modal/Capital Market • Perpajakan/Taxation
Sonny Loho	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	• Akuntansi/Accounting • Manajemen Keuangan/Financial Management
Rinaldi Firmansyah	✓	-	✓	-		✓	✓	-	Manajemen Keuangan/Financial Management
Yon Aarsal	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	• Administrasi Fiskal/Fiscal Administration • Perpajakan/Taxation
Bhimantara Widyajala	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	• Audit/Audit • Manajemen Risiko/Risk Management • Pemeriksaan Kecurangan/Fraud Audit • Tata Kelola Perusahaan yang Baik/Good Corporate Governance
Lodewijk Govaerts	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	• Perbankan/Banking • Investasi/Investment • Manajemen Keuangan/Financial Management • Pasar Modal/Capital Markets • Derivatif/Derivatives • Merger & Akuisisi/Mergers & Acquisitions
Dr. Andreas Zeisler	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	• Perbankan/Banking • Investasi/Investment • Manajemen Keuangan/Financial Management
Richard Lyon Ranken	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	• Perbankan/Banking • Investasi/Investment • Manajemen Keuangan/Financial Management
Ken Tomisaki	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	• Administrasi Bisnis/Business Administration • Perbankan/Banking
Direksi / BoD									
Reynaldi Hermansjah	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	• Industri infrastruktur (sektor jalan tol)/Infrastructure Industry (toll road sector) • Finansial, terutama Investasi dan Pasar Modal/Finance, mainly in Investment and Capital Market

Nama Name	Jenis Kelamin Gender		Usia Age		Pendidikan Terakhir Latest Education		Pengalaman Kerja Experience		Keahlian Expertise
	Laki-laki Male	Perempuan Female	> 50 Tahun > 50 Years Old	≤ 50 Tahun ≤ 50 Years Old	S2	S3	> 20 Tahun > 20 Years Old	≤ 20 Tahun ≤ 20 Years Old	
Devi Pradnya Paramita	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	- Keuangan Perusahaan/Corporate Finance - Manajemen Keuangan/Financial Management
I Made Wiracita Tantra	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	- Manajemen Kredit/Credit Management - Pengendalian Risiko/Risk Control - Hubungan dalam lingkungan Kelembagaan dan Korporasi/Relations in Institutional and Corporate Environments
Mohammad Ramadhan Harahap	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	- Keteknikan/Engineering - Perbankan/Banking
Y. Bayu Wirawan	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	- Perbankan/Banking - Manajemen Keuangan/Financial Management

Rapat Umum Pemegang Saham

Direksi bertugas melaksanakan berbagai keputusan yang diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

RUPS adalah organ tertinggi GCG dengan kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi dengan batasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Pelaksanaan RUPS dibagi menjadi dua, yaitu RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). RUPST wajib diselenggarakan paling lambat enam bulan sejak berakhirnya tahun buku. Sementara itu, RUPSLB dapat digelar sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan/atau kepentingan Perusahaan.

Kewenangan Pemegang Saham dalam RUPS

Kewenangan RUPS antara lain:

- Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- Menyetujui Laporan Keuangan Perusahaan; dan
- Menentukan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

General Meeting of Shareholders

The BoD is charged to implement the resolutions taken at the General Meeting of Shareholders (GMS).

The GMS is the highest GCG organ with authorities beyond that of the BoC or the BoD within the limits set by prevailing laws and the Company's Articles of Association.

There are two types of GMS, namely the Annual GMS (AGMS) and the Extraordinary GMS (EGMS). The AGMS must be convened within no later than six months as of the end of a fiscal year. Meanwhile, the EGMS can be convened at any time as needed in the interest of the Company.

Authorities of Shareholders in GMS

The authorities of the GMS include:

- To appoint and dismiss members of the BoC and the BoD;
- To evaluate the performance of the BoC and the BoD;
- To approve the Company's Financial Statements;
- To determine the remuneration amount for members of the BoC and the BoD.

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam RUPS

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) UUPT, Pemegang Saham memiliki hak untuk memperoleh keterangan tentang Perusahaan dari Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan melalui RUPS. Berdasarkan kewenangan RUPS yang memiliki peran dalam menyetujui laporan tanggung jawab pengelolaan maupun pengambilan keputusan terkait hasil rencana-rencana Perusahaan, maka Pemegang Saham memiliki kewajiban untuk menghadiri RUPS dan turut serta berpartisipasi menggunakan hak suaranya.

Rights and Responsibilities of Shareholders in GMS

As stated in Article 75 paragraph (2) of the UUPT, Shareholders have the right to obtain information about the Company from the BoC and the BoD at the GMS. Due to its authority to approve the accountability reports of the Company's management as well as to decide on matters related to the Company's plans, the Company's Shareholders are obliged to attend the GMS and participate in voting.

Penyelenggaraan RUPS di Tahun 2020

Di tahun 2020, IIF menyelenggarakan 1 kali RUPST di Kantor IIF pada tanggal 19 Maret 2020 dan dihadiri oleh 100% Pemegang Saham Perusahaan.

GMS Implementation in 2020

In 2020, IIF convened an AGMS at IIF Office, on 19 March 2020, which was attended by 100% of the Company's Shareholders.

Hasil Keputusan RUPS di Tahun 2020 GMS Resolutions in 2020

Agenda	Hasil RUPS GMS Resolution
RUPST / AGMS	
Agenda 1 1 st Agenda	a) Menyetujui laporan keuangan tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan b) Menyetujui Laporan Tahunan 2019 yang disiapkan oleh Direksi Perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perusahaan Indonesia dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perusahaan. a) Approved the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2019; and b) Approved the 2019 Annual Report prepared by the BoD according to the provisions of Article 66 of the UUPT and Article 17 of the Articles of Association.
Agenda 2 2 nd Agenda	Menyetujui untuk tidak mengalokasikan dana cadangan, dividen atau tujuan lain untuk tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Approved to not allocate any amount for reserved funds, dividend or other purposes for the fiscal year ended on 31 December 2019.
Agenda 3 3 rd Agenda	a) Menyetujui pembebasan dan pelepasan tanggung jawab pengawasan anggota Dewan Komisaris saat ini untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang semua tindakan Dewan Komisaris tercermin sepenuhnya dalam Laporan Tahunan; dan b) Menyetujui pembebasan dan pelepasan tanggung jawab manajerial anggota Direksi saat ini untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang semua tindakan Direksi tercermin sepenuhnya dalam Laporan Tahunan. a) Approved the release and discharge of the current members of the BoC from its supervisory responsibilities for the fiscal year ended on 31 December 2019, to the extent that such actions of the BoC are fully reflected in the Annual Report; and b) Approved the release and discharge of the current members of the BoD from its managerial responsibilities for the Fiscal Year ended on 31 December 2019, to the extent that such actions of the BoD are fully reflected in the Annual Report.
Agenda 4 4 th Agenda	Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, yaitu: Sonny Loho dan Rinaldi Firmansyah sebagai Komisaris Perusahaan. Approved the reappointment of a member of the Board of Commissioners, namely: Sonny Loho and Rinaldi Firmansyah as Commissioners of the Company.
Agenda 5 5 th Agenda	Menyetujui Agenda Kelima terkait pengunduran diri Muhamad Al-Arif sebagai anggota Dewan Komisaris. Approved the Fifth Agenda regarding the resignation of Muhamad Al-Arif as the member of the BoC.
Agenda 6 6 th Agenda	Menyetujui alokasi bonus tahun 2019 untuk Direksi dan Dewan Komisaris; serta remunerasi tahun 2019 untuk Direksi dan Komisaris per Januari 2020. Approved the year of 2019 bonus allocation for BoD and BoC; and 2019 remuneration for BoD and BoC as of January 2020.

Agenda	Hasil RUPS GMS Resolution
Agenda 7 7 th Agenda	Menyetujui proses pengadaan terkait penunjukan kembali KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sebagai auditor independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Approved the procurement process to re-appoint KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) as independent auditor for financial year ending on 31 December 2020.

Seluruh hasil keputusan RUPS tahun 2020 telah direalisasikan pada tahun 2020.

All GMS resolutions in 2020 were implemented in 2020.

Penyelenggaraan RUPS di Tahun 2019

GMS Implementation in 2019

Sepanjang 2019, IIF menyelenggarakan 1 kali RUPST dan 1 kali RUPSLB.

Throughout 2019, IIF convened an AGMS and EGMS.

RUPST diselenggarakan di Kantor IIF, pada tanggal 21 Maret 2019 dan dihadiri oleh 100% Pemegang Saham Perusahaan.

The AGMS was convened at IIF Office, on 21 March 2019 and was attended by 100% of the Company's Shareholders.

RUPSLB diselenggarakan di Kantor IIF pada tanggal 30 Juli 2019 dan dihadiri oleh 100% Pemegang Saham.

The EGMS was convened at IIF Office, on 30 July 2019 and was attended by 100% Shareholders.

Hasil Keputusan RUPS di Tahun 2019 GMS Resolutions in 2019

Agenda	Hasil RUPS GMS Resolution
RUPST / AGMS	
Agenda 1 1 st Agenda	a) Menyetujui laporan keuangan tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan b) Menyetujui Laporan Tahunan 2018 yang disiapkan oleh Direksi Perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perusahaan Indonesia dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perusahaan. a) Approved the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2018; and b) Approved the 2018 Annual Report prepared by the BoD according to the provisions of Article 66 of the UUPT and Article 17 of the Articles of Association.
Agenda 2 2 nd Agenda	Menyetujui untuk tidak mengalokasikan dana cadangan, dividen atau tujuan lain untuk tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Approved to not allocate any amount for reserved funds, dividend or other purposes for the fiscal year ended on 31 December 2018.
Agenda 3 3 rd Agenda	a) Menyetujui pembebasan dan pelepasan tanggung jawab pengawasan anggota Dewan Komisaris saat ini untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang semua tindakan Dewan Komisaris tercermin sepenuhnya dalam Laporan Tahunan; b) Menyetujui pembebasan dan pelepasan tanggung jawab manajerial anggota Direksi saat ini untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang semua tindakan Direksi tercermin sepenuhnya dalam Laporan Tahunan; dan c) Menyetujui pembebasan dan pelepasan tanggung jawab manajerial kepada apak Arisudono Soerono sebagai anggota Direksi Perusahaan dari 1 Januari 2018 hingga 30 Oktober 2018 sepanjang semua tindakan Direksi tercermin sepenuhnya dalam Laporan Tahunan. a) Approved the release and discharge of the current members of the Board of Commissioners from its supervisory responsibilities for the fiscal year ended on 31 December 2018, to the extent that such actions of the BoC are fully reflected in the Annual Report; b) Approved the release and discharge of the current members of the BoD from its managerial responsibilities for the Fiscal Year ended on 31 December 2018, to the extent that such actions of the BoD are fully reflected in the Annual Report; and c) Approved the release and discharge of the managerial responsibility from Arisudono Soerono as a member of the BoD of the Company from 1 January to 30 October 2018, to the extent that all actions of the BoD are fully reflected in the Annual Report.

Agenda	Hasil RUPS GMS Resolution
Agenda 4 4 th Agenda	a) Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, yaitu: Mohammad Chatib Basri, Muhammad Al-Arif, Bhimantara Widyajala, Richard Lyon Ranken, Robert Olivier Dolk, dan Rajeev Veeravalli Kannan sebagai Komisaris Perusahaan karena berakhirnya masa kerja, sesuai dengan Pasal 13 ayat (5b) Anggaran Dasar Perusahaan; b) Menyetujui pengangkatan Dr. Andreas Zeisler menggantikan Hans Juergen Hertel sebagai Komisaris Perusahaan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (5b) Anggaran Dasar Perusahaan; dan c) Menyetujui pengangkatan kembali Indrawati Darmawan dan Hilda Savitri sebagai anggota Direksi Perusahaan untuk masa jabatan sampai RUPSLB Perusahaan yang akan dilaksanakan pada atau sebelum 31 Juli 2019. a) Approved the reappointment of members of the BoC, namely: Mohammad Chatib Basri, Muhammad Al-Arif, Bhimantara Widyajala, Richard Lyon Ranken, Robert Olivier Dolk, and Rajeev Veeravalli Kannan, as Commissioners of the Company since their tenure ended in accordance with Article 13 paragraph (5b) of the Articles of Association; b) Approved the appointment of Dr. Andreas Zeisler to replace Hans Juergen Hertel as a Commissioner of the Company in accordance with Article 13 paragraph (5b) of the Articles of Association of the Company; and c) Approved the reappointment of Indrawati Darmawan and Hilda Savitri as members of the BoD of the Company for tenure until the EGMS that will be convened on or before 31 July 2019.
Agenda 5 5 th Agenda	Tidak menyetujui Agenda Kelima mengenai penyesuaian pendapatan tahunan untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Did not approve the Fifth Agenda on adjustment to annual income for members of the BoC and the BoD.
Agenda 6 6 th Agenda	Tidak menyetujui Agenda Keenam mengenai penunjukan kembali Auditor Independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Did not approve the Sixth Agenda on the reappointment of Independent Auditor for fiscal year ended on 31 December 2019.
RUPSLB / EGMS	
Agenda 1 1 st Agenda	Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019. Approved the 2019 Corporate Budget and Work Plan.
Agenda 2 2 nd Agenda	a) Menyetujui penunjukan kembali anggota Direksi Perusahaan; b) Menyetujui tidak melakukan penyesuaian remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada tahun 2019. a) Approved the reappointment of members of the BoD of the Company; b) The meeting approved to not adjust the remuneration for members of the BoC and the BoD in 2019.
Agenda 3 3 rd Agenda	Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (EY) sebagai auditor independen Perusahaan dalam melakukan audit umum untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Approved to appoint Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro, & Surja (EY) as independent auditor in conducting general audit for financial statements ending on 31 December 2019.
Agenda 4 4 th Agenda	Agenda keempat merupakan laporan kepada Pemegang Saham, sehingga keputusan Rapat tidak diperlukan. The fourth agenda was a report to the Shareholders; hence, no resolution was needed.

Seluruh hasil keputusan RUPS tahun 2019 telah direalisasikan pada tahun 2019.

All GMS resolutions in 2019 were implemented in 2019.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Sistem penilaian kerja bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, berikut kriteria penilaiannya, ditentukan dan dilaksanakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Performance Assessment of the BoC and the BoD Members

The performance assessment system for the BoC and the BoD members, along with its assessment criteria, is determined and executed by the Nomination and Remuneration Committee.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dalam struktur tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan dan pengelolaan yang dijalankan oleh Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik dan tujuan Perusahaan.

In its corporate governance structure, the Board of Commissioners (BoC) is responsible for performing supervisory roles on the implementation of policy and management by the Board of Directors (BoD). Furthermore, the BoC is obliged to provide input and recommendations to the BoD by considering the interests and objectives of the Company.

Komposisi Dewan Komisaris

Per tanggal 31 Desember 2020, komposisi Dewan Komisaris IIF adalah sebagai berikut:

BoC Composition

The BoC composition as of 31 December 2020 was as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Service
Darmin Nasution	Presiden Komisaris & Komisaris Independen President Commissioner & Independent Commissioner	Akta Notaris No. 14 tanggal 20 Juli 2020 Notarial Deed No. 14 dated 20 July 2020	Penutupan RUPST tahun 2023 The closing of AGMS 2023
Sonny Loho	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Notaris No. 21 tanggal 19 Maret 2020 Notarial Deed No. 21 dated 19 March 2020	Penutupan RUPST tahun 2023 The closing of AGMS 2023
Rinaldi Firmansyah	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Notaris No. 21 tanggal 19 Maret 2020 Notarial Deed No. 21 dated 19 March 2020	Penutupan RUPST tahun 2023 The closing of AGMS 2023
Yon Arsul	Komisaris Commissioner	Akta Notaris No. 10 tanggal 15 Juli 2020 Notarial Deed No. 10 dated 15 July 2020	Penutupan RUPST tahun 2023 The closing of AGMS 2023
Bhimantara Widyajala	Komisaris Commissioner	Akta Notaris No. 31 tanggal 21 Maret 2019 Notarial Deed No. 31 dated 21 March 2019	Penutupan RUPST tahun 2022 The closing of AGMS 2022
Lodewijk Govaerts	Komisaris Commissioner	Akta Notaris No. 10 tanggal 14 Agustus 2019 Notarial Deed No. 10 dated 14 August 2019	Penutupan RUPST tahun 2022 The closing of AGMS 2022
Andreas Zeisler	Komisaris Commissioner	Akta Notaris No. 31 tanggal 21 Maret 2019 Notarial Deed No. 31 dated 21 March 2019	Penutupan RUPST tahun 2022 The closing of AGMS 2022
Richard Lyon Ranken	Komisaris Commissioner	Akta Notaris No. 31 tanggal 21 Maret 2019 Notarial Deed No. 31 dated 21 March 2019	Penutupan RUPST tahun 2022 The closing of AGMS 2022
Ken Tomisaki	Komisaris Commissioner	Akta Notaris No. 12 tanggal 16 Juni 2020 Notarial Deed No. 12 dated 16 June 2020	Penutupan RUPST tahun 2022 The closing of AGMS 2023

Piagam Kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan peran dan tugasnya di Perusahaan, Dewan Komisaris berpedoman pada *Operations Manual* dan tertuang pada Anggaran Dasar Perusahaan yang mencakup di antaranya tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, ketentuan rapat, dan tata hubungan dengan organ-organ terkait di Perusahaan. Anggaran Dasar Perusahaan dibuat, disusun, dan disahkan oleh Pemegang Saham sejak pendirian IIF.

BoC Charter

The BoC carries out its role and duties in the Company by referring to the Operations Manual and the Company's Articles of Association which cover, among others, the duties and responsibilities of the BoC, meeting requirements, and relationships with governance organs within the Company. The Company's Articles of Association are drawn up, prepared, and approved by the Shareholders at the establishment of IIF.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas utama Dewan Komisaris IIF meliputi:

- Melaksanakan peran pengawasan dan pemberian nasihat dalam mengelola organisasi, bisnis, dan operasional untuk kepentingan Pemegang Saham, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Perusahaan;
- Mengawasi kebijakan Direksi, termasuk pencapaian atas tujuan Perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
- Mengevaluasi dan memberikan nasihat secara berkala atas pelaksanaan Manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, serta memberikan persetujuan atas perubahan yang diperlukan atau tindakan korektif mengenai sistem tersebut;
- Melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan bisnis yang terkait dengannya, dengan mempertimbangkan hak para pemangku kepentingan.

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara independen dan profesional guna menghindari benturan kepentingan atau intervensi dari pihak lain. Selain itu, masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan satu sama lain atau dengan anggota Direksi hingga derajat ketiga kekerabatan, baik secara vertikal maupun horizontal atau karena perkawinan.

Per 31 Desember 2020, tiga anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Jumlah ini mencakup sepertiga dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 menunjukkan keberagaman anggotanya dalam hal, antara lain, latar belakang, usia, bidang keahlian, dan kewarganegaraan.

Kegiatan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak Maret 2020, kegiatan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke proyek portofolio Perusahaan tidak dilakukan. Adapun beberapa kegiatan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020, antara lain:

- 1 kali rapat Dewan Komisaris di Kantor IIF; dan
- 10 kali sesi *video conferences*;

Duties and Responsibilities of the BoC

The main duties of the BoC are as follows:

- Carry out supervisory and advisory functions in managing the organisation, business, and operations for the interests of Shareholders, in line with the Company's vision, mission and objectives;
- Supervise the BoD's policies, including the achievement of the Company's targets and compliance with prevailing laws and regulations;
- Periodically evaluate and provide advice on risk management and internal control systems, and provide approval for required changes or corrective actions that must be taken regarding the aforementioned systems;
- Carry out its duties for the interest of the Company and related businesses, by taking into account the needs and interests of all stakeholders.

Independence of the BoC

All members of the BoC carry out their roles and responsibilities independently and professionally to avoid conflicts of interest or intervention from other parties. In addition, each member of the BoC has no relationship with each other or with members of the BoD up to the third degree of kinship, either vertically or horizontally or because of marriage.

As of 31 December 2020, three of the BoC members were Independent Commissioners, making up a third of the total BoC members.

Diversity in BoC Composition

The BoC composition per 31 December 2020 demonstrated diversity in, among other things, background, age, field of expertise, and nationality.

BoC Activities

In regards to the large-scale social restrictions set forth by the Government of the Republic of Indonesia since March 2020, the BoC's site visit to the Company's portfolio was not carried out. The BoC activities throughout 2020, among others:

- 1 BoC meeting in IIF Office; and
- 10 video conferences;

Rapat Dewan Komisaris

Pelaksanaan kegiatan rapat Dewan Komisaris IIF mengacu pada kebijakan berikut ini:

- Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Keempat terhadap Perjanjian Pemegang Saham Pasal III tentang Dewan Komisaris;
- Akta No. 34 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., selaku pengganti Sutjipto S.H., notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21503.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123 Pasal 15 tentang Rapat Dewan Komisaris;
- Pasal 31 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat internal sebanyak 11 kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

BoC Meetings

The BoC of IIF holds meetings in accordance with these policies:

- The Fourth Amendment and Restatement to the Shareholders Agreement Article III on the BoC;
- Deed No. 34 dated 15 January 2010, made before Aulia Taufani, S.H., as a substitute of Sutjipto S.H., Notary in Jakarta, ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of Decree No. AHU-21503.AH.01.01. of 2010 dated 28 April 2010 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated 11 March 2011, Supplement No. 5123 Article 15 on BoC Meetings;
- Article 31 of POJK No. 33/POJK.04/2014 on the BoD and the BoC of Issuers or Public Companies.

The BoC held 11 internal meetings throughout 2020, with the attendance rates as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Darmin Nasution	Presiden Komisaris & Komisaris Independen President Commissioner & Independent Commissioner	4	4	100%
Sonny Loho	Komisaris Independen Independent Commissioner	11	11	100%
Rinaldi Firmansyah	Komisaris Independen Independent Commissioner	11	11	100%
Yon Arsal	Komisaris Commissioner	4	4	100%
Bhimantara Widyajala	Komisaris Commissioner	11	11	100%
Lodewijk Govaerts	Komisaris Commissioner	11	11	100%
Andreas Zeisler	Komisaris Commissioner	11	11	100%
Richard Lyon Ranken	Komisaris Commissioner	11	11	100%
Ken Tomisaki	Komisaris Commissioner	5	5	100%

Agenda yang dibahas pada rapat internal Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The agendas discussed in the BoC internal meetings were as follows:

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
7 Januari/January 2020	1. Notifikasi Rekomendasi NRC tentang: a. Presiden Komisaris Interim b. CIO-A Interim 2. Diskusi dan persetujuan hal-hal lain yang diajukan dan disetujui untuk dibahas oleh anggota Dewan Komisaris dalam Rapat. 1. Notification of NRC Recommendation on: a. Interim President Commissioner b. Interim CIO-A 2. To discuss and resolve to approve any other matters as may be proposed and approved to be discussed by the BoC members in the Meeting.
5 Maret/March 2020	1. Persetujuan rekomendasi NRC tentang pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris yakni sebagai Komisaris Independen Perusahaan, yaitu: I. Bapak Sonny Loho; dan II. Bapak Rinaldi Firmansyah. 2. Persetujuan rekomendasi NRC tentang penetapan: I. Bonus untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk 2019; dan II. Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk 2020. 3. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2020: I. Untuk mendiskusikan dan memutuskan untuk menyetujui: (a) Laporan keuangan tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan (b) Laporan Tahunan 2019 yang disiapkan oleh Direksi Perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUPT dan Pasal 17 ayat (2) (a) Anggaran Dasar Perusahaan; II. Membahas dan memutuskan untuk merekomendasikan kepada Pemegang Saham remunerasi Direksi Perusahaan untuk tahun 2020; dan III. Membahas dan memutuskan untuk merekomendasikan kepada Pemegang Saham penunjukan Auditor Independen Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; 4. Presentasi draft final rencana bisnis 5 tahun Perusahaan; dan 5. Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas Dewan Komisaris dalam Rapat. 1. Approval on NRC recommendation regarding the reappointment of BoC members, as Independent Commissioners of the Company namely: I. Mr. Sonny Loho; and II. Mr. Rinaldi Firmansyah. 2. Approval on NRC recommendation regarding the determination of: I. Bonus for BoC and BoD for 2019; and II. Remuneration for BoC and BoD for 2020. 3. The 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) Agenda: I. To discuss and resolve to approve: (a) The annual financial statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2019; and (b) The 2019 Annual Report prepared by the BoD of the Company in accordance with the provisions of Article 66 of the Indonesian Company Law and Article 17 (2) (a) of the Articles of Association of the Company; II. To discuss and resolve to recommend to the Shareholders the remuneration for the BoD of the Company for 2020; and III. To discuss and resolve to recommend to the Shareholders the appointment to the Company's Independent Auditor for the financial year ending on 31 December 2020; 4. Presentation on the final draft of the Company's 5 years business plan; and 5. Other matters as may be proposed and approved to be discussed by the BoC in the Meeting.
18 Maret/March 2020	1. Laporan dan perkembangan terkini dari semua Komite Dewan Komisaris (Audit, ROC, NRC dan Investasi); 2. Perkembangan terkini Perusahaan: a. Kinerja Keuangan per 29 Februari 2020 b. Tinjauan Ekonomi Makro; dan 3. Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas Dewan Komisaris dalam Rapat. 1. Report and progress update of all BoC Committees (Audit, ROC, NRC and Investment); 2. Company Update: a. Financial Performance as of 29 February 2020 b. Macro-Economic Review; and 3. Other matters as may be proposed and approved to be discussed by the BoC in the Meeting.

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
2 April/April 2020	- Usulan Kenaikan Limit Obligasi Korporasi; - Proposal Ketiga Key Performance Indicator 2020; dan - Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas Dewan Komisaris dalam Rapat. - Proposed Increase of Treasury's Corporate Bond Limit; 3rd Proposal of 2020 Key Performance Indicator; and - Other matters as may be proposed and approved to be discussed by the BoC in the Meeting.
21 April/April 2020	- Laporan Perkembangan Nominasi Calon CIO; - Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas Dewan Komisaris dalam Rapat. - Progress Report on Nomination of Candidate CIO; - Other matters as may be proposed and approved to be discussed by the BoC in the Meeting.
11 Juni/June 2020	- Laporan dan perkembangan terkini dari semua Komite Dewan Komisaris (AC, ROC, NRC dan Investasi); - Perkembangan terkini Perusahaan: - Kinerja Keuangan per 30 April 2020; dan - Tinjauan Ekonomi Makro; - Pembaruan Perbendaharaan dan Rencana Pendanaan; - Laporan dan Pembahasan Dampak Covid-19; dan - Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas Dewan Komisaris dalam Rapat. - Report and progress update of all BoC Committees (AC, ROC, NRC and Investment); - Company Update: - Financial Performance as of 30 April 2020; and - Macro-Economic Review; - Treasury Update and Funding Plan; - Report and Discussion on the Covid-19 Impact; and - Other matters as may be proposed and approved to be discussed by the BoC in the Meeting.
20 Juli/July 2020	- Review Tengah Tahun Rencana Bisnis & Anggaran 2020; - Laporan dan Pembahasan Dampak Covid-19; - Update Stress Test Portofolio Kredit di tengah pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari perkiraan; - Pratinjau pada Q2 yang berakhir Juni 2020 Penilaian Risiko Kuartalan; dan - Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas Dewan Komisaris dalam Rapat. - Mid-year Review of 2020 Business Plan & Budget; - Report and Discussion on the Covid-19 Impact; - Update on Credit Portfolio Stress Test amidst lower than expected economic growth; - Preview on the Q2 ending June 2020 Quarterly Risk Assessment; and - Other matters as may be proposed and approved to be discussed by the BoC in the Meeting.
19 Agustus/August 2020	- Laporan dan perkembangan terkini dari semua Komite Dewan Komisaris (AC, ROC, NRC, dan Investasi); - Perkembangan terkini Perusahaan: - Kinerja Keuangan per 30 Juni 2020; - Perkembangan terkini Treasury dan Pendanaan; dan - Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas Dewan Komisaris dalam Rapat. - Report and progress update of all BoC Committees (AC, ROC, NRC, and Investment); - Company Update: - Financial Performance as of 30 June 2020; - Treasury and Funding Updates; and - Other matters as may be proposed and approved to be discussed by the BoC in the Meeting.
7 Oktober/October 2020	- Perkembangan terkini Perusahaan; - Perkembangan terkini Pendanaan; - Stress Test Portofolio Kredit dalam Skenario Ekstrem; - Peraturan OJK Baru tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan dampaknya bagi Perusahaan; dan - Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas Dewan Komisaris dalam Rapat. - Company Update; - Funding Updates; - Credit Portfolio Stress Test under Extreme Scenarios; - New OJK Regulation on Infrastructure Financing Company and its impact for the Company; and - Other matters as may be proposed and approved to be discussed by the BoC in the Meeting.

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
12 November/November 2020	1. Laporan & Diskusi Dampak Covid-19; 2. Perkembangan Prognosis 2020; 3. Rencana Bisnis dan Anggaran 2021; 4. Review Rencana Bisnis 5 Tahun; dan 5. Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas Dewan Komisaris dalam Rapat. 1. Report & Discussion on the Covid-19 Impact; 2. Update of 2020 Prognosis; 3. 2021 Business Plan and Budget; 4. Review of 5-Year Business Plan; and 5. Other matters as may be proposed and approved to be discussed by the BoC in the Meeting.
3 Desember/December 2020	1. Laporan & Diskusi Dampak Covid-19; 2. Perkembangan Prognosis 2020; 3. Rencana Bisnis dan Anggaran 2021; 4. Review Rencana Bisnis 5 Tahun; dan 5. Hal-hal lain yang dapat diusulkan dan disetujui untuk dibahas Dewan Komisaris dalam Rapat. 1. Report & Discussion on the Covid-19 Impact; 2. Update of 2020 Prognosis; 3. 2021 Business Plan and Budget; 4. Review of 5-Year Business Plan; and 5. Other matters as may be proposed and approved to be discussed by the BoC in the Meeting.

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Pada tahun 2020, anggota Dewan Komisaris mengikuti program pelatihan dan pengembangan yang dirinci pada halaman 60.

BoC Competence Development

The BoC members participated in training and/ or development programmes in 2020, with the programmes' details presented on page 60.

Sesi Induksi bagi Komisaris Baru

IIF menetapkan kebijakan pemberian sosialisasi bagi setiap anggota baru Dewan Komisaris. Sosialisasi ini berbentuk pemaparan ruang lingkup Perusahaan secara menyeluruh dan informasi penting pendukung lainnya.

Pada tahun 2020, IIF telah memberikan sosialisasi kepada Ken Tomisaki, Yon Aarsal, dan Darmin Nasution masing-masing pada tanggal 1 Juli 2020, 2 Juli 2020 dan 2 September 2020.

Induction Session of New Commissioners

IIF has an established policy for the induction of new members of the BoC. Such induction includes a comprehensive presentation of the Company's scope and other important supporting information.

An induction session was held for Ken Tomisaki, Yon Aarsal and Darmin Nasution, respectively on 1 July 2020, 2 July 2020 and 2 September 2020.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Pada tahun 2020, seluruh komite di bawah Dewan Komisaris, yakni Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Investasi telah berkinerja optimal dalam menunjang fungsi pengawasan Dewan Komisaris melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite.

Performance Evaluation of Committees under the BoC

In 2020, all committees under the BoC, i.e., the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Oversight Committee, and the Investment Committee, performed optimally in supporting the BoC's supervisory function by implementing their respective duties and responsibilities.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

Ketentuan mengenai besaran dan struktur remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS, berdasarkan hasil evaluasi dan usulan Komite Nominasi dan Remunerasi. Besaran *Annual Fixed Pay* (Honorarium Dasar dan Honorarium Komite Dewan Komisaris) adalah 13x per tahun, ditetapkan dengan acuan remunerasi Dewan Komisaris yang berlaku dipasar yang didapatkan dari *salary survey* yang diikuti Perusahaan. Jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris pada tahun 2020 adalah Rp8,032 miliar.

BoC Remuneration Policy

Provisions regarding the amount and structure of remuneration for the BoC are stipulated at the GMS, based on the evaluation and proposal from the Nomination and Remuneration Committee. The amount of Annual Fixed Pay (Base Honorarium and Honorarium for BoC Committee) is 13x per year, determined by referring to the BoC remuneration that prevails in the market, obtained from salary survey participated by the Company. The amount of remuneration for BoC members in 2020 was Rp8.032 billion.

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris BoD-BoC Joint Meetings

Di tahun 2020, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan 11 rapat gabungan, dengan kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

The BoC and BoD held 11 joint meetings in 2020, with the attendance rates as follows:

Nama Name	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Dewan Komisaris / BoC			
Darmin Nasution	4	4	100%
Sonny Loho	11	11	100%
Rinaldi Firmansyah	11	11	100%
Yon Aarsal	4	4	100%
Bhimantara Widyajala	11	11	100%
Lodewijk Govaerts	11	11	100%
Andreas Zeisler	11	11	100%
Richard Lyon Ranken	11	11	100%
Ken Tomisaki	5	5	100%
Direksi / BoC			
Reynaldi Hermansjah	11	11	100%
Devi Pradnya Paramita	11	11	100%
I Made Wiracita Tantra	11	11	100%
Mohammad Ramadhan Harahap	5	5	100%
Y. Bayu Wirawan	5	5	100%

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi

Affiliations of the BoC and BoD

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Familial Relations with						Hubungan Keuangan dengan Financial Relations with					
		Dewan Komisaris BoC		Direksi BoD		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris BoC		Direksi BoD		Pemegang Saham Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris / BoC													
Darmin Nasution	Presiden Komisaris & Komisaris Independen President Commissioner & Independent Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Sonny Loho	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Rinaldi Firmansyah	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Yon Arsal	Komisaris Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Bhimantara Widyajala	Komisaris Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Lodewijk Govaerts	Komisaris Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Andreas Zeisler	Komisaris Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Richard Lyon Ranken	Komisaris Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Ken Tomisaki	Komisaris Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Direksi / BoC													
Reynaldi Hermansjah	Presiden Direktur President Director	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Devi Pradnya Paramita	Direktur Pelaksana dan Chief Financial Officer (CFO) Managing Director and Chief Financial Officer (CFO)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
I Made Wiracita Tantra	Direktur Pelaksana dan Chief Risk Officer (CRO) Managing Director and Chief Risk Officer (CRO)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Mohammad Ramadhan Harahap	Direktur Pelaksana dan Chief Investment Officer (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Y. Bayu Wirawan	Direktur Pelaksana dan Chief Investment Officer (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees Under the Board of Commissioners

Komite Audit

Guna mendukung fungsi pengawasan di Perusahaan, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dengan mengacu pada POJK No. 55/POJK.04/2014. Komite Audit Perusahaan dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 001/II/BoC-RES/IV/2016 tanggal 21 April 2016.

Bidang yang menjadi ruang lingkup tugas Komite Audit adalah pengendalian internal, kebijakan akuntansi, pelaporan keuangan, dan auditor internal maupun eksternal.

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam RUPS.

Komposisi Komite Audit

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Audit Committee

To support its supervisory functions in the Company, the BoC has established the Audit Committee pursuant to POJK No. 55/POJK.04/2014. The Company's Audit Committee was established based on the Circular Resolution of the BoC No. 001/II/BoC-RES/IV/2016 dated 21 April 2016.

The scope of the Audit Committee's duties includes internal control, accounting policies, financial reporting, and internal and external auditors.

Audit Committee members are appointed and dismissed by the BoC, and the appointments and dismissals are reported at the GMS.

Audit Committee Composition

The Audit Committee composition as of 31 December 2020 was as follows:

Nama Name	Jabatan dalam Anggota Komite Position in the Committee	Periode Jabatan Term of Service	Posisi di Perusahaan Position in the Company
Sonny Loho	Ketua Chairman	7 Agustus 2018 – sekarang 7 August 2018 up to present	Komisaris Independen Independent Commissioner
Darmin Nasution	Anggota Member	19 Agustus 2020 – sekarang 19 August 2020 up to present	Presiden Komisaris & Komisaris Independen President Commissioner & Independent Commissioner
Rinaldi Firmansyah	Anggota Member	6 Agustus 2018 – sekarang 6 August 2018 up to present	Komisaris Independen Independent Commissioner
Asep Hikmat	Anggota Member	2 April 2018 – sekarang 2 April 2018 up to present	Anggota Audit Komite Independen Member of Independent Audit Committee

Profil Komite Audit

Sonny Loho

Ketua Komite Audit

Profil Sonny Loho dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris.

Darmin Nasution

Anggota Komite Audit

Profil Darmin Nasution dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris.

Audit Committee Profile

Sonny Loho

Chairman of Audit Committee

Profile of Sonny Loho is available in the sub-chapter of BoC Profile.

Darmin Nasution

Member of Audit Committee

Profile of Darmin Nasution is available in the sub-chapter of BoC Profile.

Rinaldi Firmansyah **Anggota Komite Audit**

Profil Rinaldi Firmansyah dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris.

Asep Hikmat **Anggota Komite Audit Independen**

Bapak Asep Hikmat ditunjuk sebagai anggota Komite Audit Perusahaan sejak tanggal 2 April 2018 berdasarkan keputusan sirkuler Dewan Komisaris tanggal 21 Maret 2018. Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, dan gelar Master Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau memulai karier sebagai Senior Supervisor di KPMG Los Angeles, AS, Manager di KPMG (KAP Hanadi Sudjendro & Rekan) Jakarta, Senior Manager di Ernst & Young (KAP Presetio, Sarwoko & Sandjaja) Jakarta, Principal Partner di KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan, anggota Komite Audit di PT Cahaya Kalbar Tbk, GM Accounting & Finance di PT Jaya Prima Mandiri, dan Partner di KAP Arief Jauhari.

Periode dan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit sama dengan untuk Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit hanya dapat diangkat kembali satu kali untuk periode yang berurutan.

Piagam Komite Audit

Komite Audit IIF memiliki Piagam (*charter*) Komite Audit yang ditetapkan pada 21 April 2016. Piagam ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan, struktur, dan kualifikasi tanggung jawab, pertemuan, pelaporan, serta masa jabatan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1. Menelaah laporan hasil identifikasi isu-isu pengendalian yang membutuhkan perhatian atau subjek koreksi serta merangkum tindakan-tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut;
2. Menelaah cara dan kerangka kerja Manajemen dalam memastikan dan memantau kecukupan sifat, tingkat, dan efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk pengendalian sistem akuntansi, dan mengelola efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk tinjauan tahunan dari kecukupan pengawasan pengendalian dan proses eskalasi atas suatu permasalahan;
3. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan Perusahaan untuk melakukan keterbukaan dalam Laporan Tahunan terhadap pengawasan internal, maka Komite harus menelaah pernyataan-pernyataan tersebut sebelum mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris;

Rinaldi Firmansyah **Member of Audit Committee**

Profile of Rinaldi Firmansyah is available in the sub-chapter of BoC Profile.

Asep Hikmat **Independent Member of Audit Committee**

Mr. Asep Hikmat was appointed as a member of the Company's Audit Committee on April 2 2018 based on the circular decision of the BoC on March 21 2018. He earned his Bachelor's degree in Accounting from Padjadjaran University, Bandung, and Master's Degree in Accounting from Diponegoro University, Semarang. He started his career as a Senior Supervisor at KPMG Los Angeles, US, Manager at KPMG (Hanadi Sudjendro & Partner PAF) Jakarta, Senior Manager at Ernst & Young (Presetio, Sarwoko & Sandjaja PAF) Jakarta, Principal Partner at Tasnim Ali Widjanarko & Partner PAF, a member of Audit Committee at PT Cahaya Kalbar Tbk, GM of Accounting & Finance at PT Jaya Prima Mandiri, and Partner at Arief Jauhari PAF.

Term of Service

The term of service for members of the Audit Committee is the same as for the BoC. The members may only be reappointed once for consecutive periods.

Audit Committee Charter

The Audit Committee has an Audit Committee Charter issued on 21 April 2016. The Charter serves as a guideline for the Audit Committee and regulates the authority, structure, and qualifications of responsibilities, meetings, reporting, and term of service.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

1. To review reports identifying issues on control that require attention or correction, and to summarise actions taken to solve said problems;
2. To review methods and frameworks of the Company's Management in ensuring and monitoring the adequacy and effectiveness of internal control systems, including accounting system controls, and managing an effective internal control system, including annual reviews of the adequacy of control supervision and problem escalation mechanism;
3. If the Company is required by law to disclose information in its Annual Report regarding internal supervision, the Committee must evaluate the statements before submitting it to the BoC for approval;

4. Meminta keterangan dari Presiden Direktur/Direktur Pelaksana dan Direktur Keuangan untuk keberadaan setiap kekurangan yang signifikan dalam sistem pengendalian internal dan setiap potensi penipuan yang teridentifikasi yang dapat memengaruhi Perusahaan;
5. Menelaah laporan dari Auditor Internal dan eksternal dan memantau status remediiasi yang diperlukan;
6. Menelaah masalah-masalah yang dibahas dan memutuskan apakah ada kebutuhan untuk mengeskalasi masalah kepada Dewan Komisaris atau memberitahukan kepada regulator;
7. Secara khusus, Komite bertanggung jawab atas perbaikan transparansi dan kualitas Laporan Keuangan, dengan cara:
 - a. Memastikan adanya kajian yang layak pada Laporan Keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan;
 - b. Mendiskusikan dengan auditor setiap aspek penilaian yang signifikan dan/atau kebijakan akuntansi dalam penyediaan informasi dalam akun-akun;
 - c. Memastikan bahwa Laporan Keuangan telah disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan peraturan terkait;
 - d. Memastikan semua laporan yang dikirimkan ke regulator dan lembaga terkait lainnya telah disampaikan secara akurat dan tepat waktu.
8. Dalam kaitannya dengan Auditor Internal, Komite bertugas:
 - a. Mengevaluasi Piagam Audit Internal sebelum diajukan ke Dewan Komisaris;
 - b. Mengevaluasi rencana audit tahunan Auditor Internal sebagai masukan bagi Dewan Komisaris;
 - c. Memastikan tidak ada pembatasan yang dibuat oleh Manajemen terhadap proses audit yang dilakukan oleh Auditor Internal;
 - d. Mengevaluasi efektivitas fungsi Audit Internal;
 - e. Memastikan bahwa setiap temuan yang signifikan dari proses Audit Internal telah dilaporkan segera dan didiskusikan bersama;
 - f. Memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Auditor Internal telah ditindaklanjuti oleh Manajemen;
 - g. Menugaskan Auditor Internal untuk melakukan audit khusus apabila terdapat adanya indikasi penipuan atau penyimpangan Manajemen; dan
 - h. Mengevaluasi penunjukan dan penggantian Ketua Auditor Internal dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Dewan Komisaris.
9. Dalam kaitannya dengan akuntan publik, Komite bertugas:
 - a. Merekomendasikan kandidat akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disetujui dalam RUPST;
4. To request feedback from the President Director/ Managing Director and Chief Financial Officer on any significant weaknesses in the internal control system and for any indications of potential fraud that may affect the Company;
5. To review reports from internal and external auditors and monitor the status of remedial actions, if any;
6. To review issues being discussed and determine if such issues will be escalated to the BoC or brought to the attention of regulators;
7. The Committee is responsible for improving the transparency and quality of financial statements through the following duties:
 - a. To ensure proper reviewing of the financial statements issued by the Company;
 - b. To discuss every significant assessment and/or accounting policy in the provision of information in financial accounts with the auditors;
 - c. To ensure that financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles and related regulations;
 - d. To ensure that all reports sent to the regulators and other related institutions have been submitted accurately and punctually.
8. With regards to the Internal Auditor, the Committee will conduct the following duties:
 - a. To evaluate the Internal Audit Charter before it is submitted for approval to the BoC;
 - b. To evaluate the annual audit plan prepared by the internal Auditor for consideration by the BoC;
 - c. To ensure that the Management do not restrict the audit process conducted by the Internal Auditor;
 - d. To evaluate the effectiveness of the Internal Audit function;
 - e. To ensure that every significant finding from the Internal Audit process is immediately reported and discussed;
 - f. To ensure that the recommendations given by the Internal Auditor are followed up by the Management;
 - g. To assign the Internal Auditor to conduct a special audit in the event of indication of fraud or deviation by the Management; and
 - h. To evaluate the appointment and replacement of the Head of Internal Auditor and submit the recommendation to the BoC.
9. With regards to public accountants, the Committee will perform the following duties:
 - a. To recommend public accountant candidates to the BoC to be approved at the AGMS;

- b. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
 - c. Menelaah cakupan audit untuk memastikan bahwa seluruh risiko signifikan telah dipertimbangkan;
 - d. Memastikan bahwa temuan akuntan public telah dilaporkan segera dan didiskusikan bersama;
 - e. Memastikan bahwa Manajemen telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh akuntan publik;
 - f. Mengamati konsistensi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap standar audit yang berlaku;
 - g. Menelaah kinerja akuntan publik sebagai bahan rekomendasi bagi Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan pengangkatan kembali atau penggantian akuntan publik.
10. Dalam kaitannya dengan kepatuhan, Komite bertugas:
- a. Menelaah efektivitas kepatuhan sistem pengawasan dalam penyusunan Laporan Keuangan;
 - b. Menelaah informasi dari Manajemen, auditor, dan konsultan eksternal lainnya yang berkaitan dengan masalah kepatuhan;
 - c. Menelaah temuan audit dari lembaga berwenang dan efektivitas atas tanggapan dan tindak lanjut Manajemen.
- b. To review the Independence and objectivity of the public accountant;
 - c. To review the scope of audit to ensure that all significant risks have been considered;
 - d. To ensure that the findings of the public accountant have been immediately reported and discussed;
 - e. To ensure that Management has followed up on the recommendations provided by the public accountant;
 - f. To observe the consistency of the audit conducted by the Public Accounting Firm based on applicable audit standards;
 - g. To review the performance of the public accountant as a basis for recommendation of reappointment or replacement of said public accountant to the BoC.
10. With regards to compliance, the Committee will perform the following duties:
- a. To review the effectiveness of supervisory systems in the preparation of Financial Statements;
 - b. To review information from the Management, auditors and other external consultants in relation to compliance issues;
 - c. To review audit findings from authorised institutions and effectiveness of the feedback and follow up from the Management.

Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun Pemegang Saham Perusahaan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, para anggota senantiasa mengedepankan independensi dan profesionalisme serta menghindari benturan kepentingan.

Rapat Komite Audit

Pelaksanaan kegiatan rapat Komite Audit IIF mengacu pada kebijakan berikut:

- i. Komite mengelola rapat regulernya setidaknya sekali dalam satu kuartal, dan rapat tersebut harus diadakan sesingkat waktu sebelum rapat Dewan Komisaris.
- ii. Rapat reguler harus dihadiri setidaknya 51% dari jumlah anggota komite termasuk satu Komisaris independen dan satu Pihak independen.
- iii. Keputusan dalam pertemuan harus dibuat berdasarkan prinsip persetujuan bulat. Dalam hal persetujuan dengan suara bulat tidak dapat dicapai komite keputusan rapat harus dibuat dengan cara suara mayoritas.
- iv. Selain pertemuan reguler, komite dapat mengatur pertemuan apa pun dan kapan pun diminta.

Independence of the Audit Committee

Members of the Audit Committee are independent parties with no affiliation with any member of the BoC, the BoD, or the Shareholders of the Company. In performing their duties, members of the committee consistently uphold independence and professionalism and will avoid any conflict of interest.

Audit Committee Meetings

The Audit Committee meetings in IIF refer to the following policies:

- i. The committee manages its regular meetings at least once a quarter, and these meetings must be held as short as possible prior to the BoC meeting.
- ii. Regular meetings must be attended by at least 51% of the committee members including one Independent Commissioner and one Independent Party.
- iii. Decisions at meetings must be made based on the principle of unanimous agreement. In the event that a unanimous agreement cannot be reached by the committee, the decision of the meeting must be made by a majority vote.
- iv. In addition to regular meetings, the committee can arrange any meetings at any time.

Di tahun 2020, Komite Audit mengadakan 5 kali rapat internal, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

In 2020, the Audit Committee held 5 internal meetings, with the attendance rates as follows:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Sonny Loho	5	5	100%
Darmin Nasution	2	1	50%
Rinaldi Firmansyah	5	5	100%
Asep Hikmat	5	5	100%

Kegiatan Komite Audit di Tahun 2020

Kegiatan Internal

1. Mengadakan pertemuan rutin dengan Auditor Internal untuk membahas sistem pengendalian internal, hasil temuan dari audit yang telah dilaksanakan dan kemajuan status tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh auditor;
2. Melakukan *review* dan memberikan saran pada Laporan Keuangan Triwulanan sebelum dipresentasikan ke para pemegang saham;
3. Melakukan *review* terhadap kinerja, independensi, dan objektivitas dari akuntan publik untuk direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali atau mengganti akuntan publik tersebut;
4. Meninjau dan memberikan saran atas kerangka manajemen kepatuhan; dan
5. Melakukan tinjauan dan memberikan komentar atas hasil dari keterlibatan Audit Internal.

Kegiatan Eksternal

1. Mengadakan pertemuan dengan Auditor Eksternal sebelum dan setelah audit Laporan Keuangan Perusahaan.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Di tahun 2020, seluruh anggota Komite Audit tidak mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

IIF melalui Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi atau Nomination and Remuneration Committee (NRC) berdasarkan ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014. NRC memiliki fungsi utama untuk memberikan usulan individu yang sesuai untuk diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, memberikan saran mengenai remunerasi anggota Direksi dan Komisaris Independen, serta menetapkan kebijakan remunerasi yang umum berlaku bagi seluruh karyawan Perusahaan.

Audit Committee Activities in 2020

Internal Activities

1. Conducted regular meetings with Internal Auditors to discuss internal control systems, audit findings that have been implemented and progress of follow-ups on recommendations provided by the auditor;
2. Reviewed and advised on the Quarterly Financial Statements before being presented to the Shareholders;
3. Reviewed the performance, Independence and objectivity of the public accountant to be recommended to the Board of Commissioners for reappointment or replacement;
4. Reviewed and advised on compliance management frameworks; and
5. Reviewed and commented on the results of Internal Audit's engagement.

External Activities

1. Conducted meetings with External Auditors before and after auditing the Company's Financial Statements.

Audit Committee Competence Development

In 2020, no members of the Audit Committee attended any education and/or training programme.

Nomination and Remuneration Committee

Through the BoC, IIF established the Nomination and Remuneration Committee (NRC) pursuant to the provision of POJK No. 34/POJK.04/2014. The NRC serves to provide recommendations of suitable individuals to be appointed as members of the BoD or the BoC, provide advice on the remuneration of members of the BoD and Independent Commissioners, and establish general remuneration policies that apply to all employees of the Company.

Komposisi NRC

Susunan Komite NRC per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

NRC Composition

The NRC Committee composition as of 31 December 2020 was as follows:

Nama Name	Jabatan dalam Anggota Komite Position in the Committee	Posisi di Perusahaan Position in the Company
Darmin Nasution	Ketua Chairman	Presiden Komisaris & Komisaris Independen President Commissioner & Independent Commissioner
Bhimantara Widyajala	Anggota Member	Komisaris Commissioner
Richard Ranken	Anggota Member	Komisaris Commissioner
Ken Tomisaki	Anggota Member	Komisaris Commissioner

Profil NRC

Profil dari masing-masing anggota NRC disajikan pada Profil Dewan Komisaris dalam Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

NRC Profile

Profiles of the members of the NRC are presented in the BoC Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Piagam NRC

Untuk memastikan fungsi dan tanggung jawab NRC, Dewan Komisaris telah menyusun dan mengesahkan Piagam NRC. Piagam ini mencakup tugas dan tanggung jawab, kewenangan, masa jabatan, pelaporan, pertemuan, dan lain-lain.

NRC Charter

To ensure clarity in the functions and position of the NRC within the Company, the BoC has drawn and ratified the NRC Charter. This charter stipulates, among others, the duties and responsibilities, authority, term of service, reporting scheme, and meetings of the NRC.

Tugas dan Tanggung Jawab NRC

Terkait fungsi nominasi, tugas NRC meliputi:

- Menganalisis, merumuskan, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur penentuan, termasuk pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris serta Direksi. Komite ini memiliki tugas untuk menyusun sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- Merekomendasikan calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai langkah-langkah yang mesti dilakukan dalam hal pemilihan, penunjukan, dan pemberhentian anggota Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan Pemegang Saham, terutama apabila diperlukan perubahan Dewan Komisaris sehubungan dengan perubahan kepemilikan saham IIF;
- Memantau pelaksanaan dan menganalisis kriteria serta prosedur pemilihan pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan menganalisis data pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang diserahkan oleh Direksi setiap tiga bulan sekali atau pada saat terjadi perubahan;
- Merekomendasikan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi; dan

Duties and Responsibilities of the NRC

Under the nomination function, the duties of the NRC consist of:

- To analyse, formulate, and provide recommendations to the BoC concerning the systems and procedures to determine—including selecting and/or replacing—members of the BoC and BoD. This Committee is also responsible for creating performance evaluation systems for the BoC and the BoD;
- To recommend Commissioner and/or Director candidates to the BoC and recommend actions on nomination, appointment, and dismissal of Commissioners and Directors to the BoC in accordance with the provisions of the Shareholders' Agreement, in particular when a change in the BoC is required due to a change in the shareholding of IIF;
- To monitor the implementation and analyse the criteria and procedures for the selection of officers one level below the BoD and analyse personal data of said personnel that has been submitted by the BoD every three months or whenever a change occurs;
- To recommend the number of members of the BoC and the BoD; and

- Merekomendasikan calon yang akan diangkat sebagai anggota independen dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Terkait fungsi remunerasi, NRC bertugas untuk mengevaluasi kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan IIF yang berlaku saat ini. Selain itu, NRC juga bertugas untuk mengevaluasi KPI untuk Direksi yang bersifat *ex-ante* (dalam rencana bisnis tahunan IIF) dan *ex-post* (setelah tutup tahun IIF).

Hal-hal yang direkomendasikan NRC kepada Dewan Komisaris meliputi:

- Kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi;
- Kebijakan remunerasi yang berlaku untuk pejabat eksekutif dan karyawan IIF;
- Mempersiapkan aturan mengenai remunerasi yang lebih spesifik jika terdapat hal-hal yang tidak tercantum dalam kebijakan remunerasi yang telah disepakati;
- Merekomendasikan program pensiun bagi seluruh karyawan IIF apabila ditetapkan dan merekomendasikan sistem kompensasi dan manfaat serta mekanisme penyesuaian gaji; dan
- Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam Manajemen SDM yang berpotensi berdampak signifikan terhadap keuangan/risiko hukum IIF.

Kewenangan NRC

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, NRC berwenang untuk:

1. Memiliki akses yang memungkinkannya untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam lingkup tanggung jawabnya dari Direksi, pejabat, karyawan, serta pihak eksternal/profesional untuk menghindari keraguan, ketika pihak eksternal/ profesional diperlukan, maka Komite NRC harus berkonsultasi dan meminta persetujuan Dewan Komisaris sebelum menunjuk pihak eksternal/profesional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya.
2. Dengan sepengetahuan Dewan Komisaris, Ketua NRC dapat mengundang anggota Direksi, pejabat eksekutif, karyawan, atau auditor independen IIF untuk menghadiri rapat Komite.
3. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, Komite ini berkoordinasi dengan Presiden Direktur.

Independensi NRC

Anggota NRC senantiasa bertindak independen dan dengan itikad baik dalam menjalankan fungsinya di Perusahaan dan menghindari benturan kepentingan.

- To recommend candidates for independent members of the Audit Committee or the Risk Oversight Committee to the BoC.

In relation to the remuneration function, the NRC has the task of evaluating the applicable remuneration policies for the BoC, the BoD, and employees of IIF. In addition, the NRC also evaluates the KPIs for the BoD, including those that are *ex-ante* (within IIF's annual business plans) and *expost* (after the closing of each financial year at IIF).

To recommend the following to the BoC:

- Remuneration policies for the BoC and the BoD;
- Overall remuneration policies applicable to the executive officers and employees of IIF;
- To prepare specific remuneration policies to accommodate matters that are not specified in the agreed remuneration policies;
- To recommend pension plans, if any, for IIF employees and the system for compensation and other benefits as well as the mechanism for salary adjustment; and
- To evaluate and provide recommendations to the BoC on employment policies and other HR management functions that may have a significant impact on IIF's financial/legal risks.

Authority of the NRC

In performing its responsibilities, the NRC has the following authority:

1. To access all required information related to its responsibilities from the BoD, executive officers, employees, and from external/professional parties. For the avoidance of doubt, when the service of external/ professional parties is necessary, the NRC must consult with and request approval from IIF's BoC prior to appointing the external/professional party to assist in implementing its duties.
2. With the BoC being informed, the Head of the NRC may invite the BoD, executive officers, employees, or the independent auditor of IIF to attend the Committee's meetings.
3. In exercising the foregoing authority, the Committee coordinates with the President Director.

Independence of the NRC

Each member of the NRC always acts independently and in good faith in carrying out their functions in the Company and avoid any form of conflict of interest.

Rapat NRC

Pelaksanaan kegiatan rapat NRC IIF mengacu pada kebijakan berikut:

- Anggota Komite tidak akan bertemu kurang dari dua kali dalam setahun untuk memenuhi tugas-tugasnya; dan
- Kuorum Komite sebanyak tiga anggota, dan salah satunya harus merupakan Ketua Komite.

Di tahun 2020, NRC mengadakan 9 kali rapat internal, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Darmin Nasution	2	2	100%
Bhimantara Widyajala	9	9	100%
Richard Ranken	9	8	89%
Ken Tomisaki	2	2	100%

Kegiatan NRC di Tahun 2020

Di tahun 2020, NRC telah membahas dan meninjau langkah-langkah pengambilan keputusan oleh Manajemen IIF terkait aspek remunerasi dan nominasi, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab NRC.

Pengembangan Kompetensi NRC

Di tahun 2020, Bhimantara Widyajala mengikuti program pengembangan kompetensi yang rinciannya disajikan pada halaman 60.

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan suksesi Direksi didiskusikan, ditentukan, dan direncanakan pada rapat internal NRC.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko atau *Risk Oversight Committee* (ROC) di bawah Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mendukung pengembangan dan pengawasan program Manajemen Risiko IIF, serta pemberian rekomendasi untuk pengendalian dan mitigasi risiko.

NRC Meetings

The NRC meetings in IIF refer to the following policies:

- Committee members will not meet less than twice a year to perform their duties; and
- The Committee quorum is three members, and one of which must be the Chairman of the Committee.

In 2020, the NRC held 9 internal meetings, with the attendance rates as follows:

NRC Activities in 2020

In 2020, NRC discussed and reviewed the decision-making steps taken by IIF's Management in relation to the remuneration and nomination aspects, in accordance with NRC's duties and responsibilities.

NRC Competence Development

In 2020, Bhimantara Widyajala participated in competence development programmes, for which the details are presented on page 60.

BoD Succession Policy

The BoD succession policy is discussed, determined and planned at NRC internal meetings.

Risk Oversight Committee

The Risk Oversight Committee (ROC) of the BoC is responsible for supporting the development and oversight of IIF's Risk Management programme, introducing adequate risk control measures to cover the Company's assets and liabilities, and providing recommendations for risk mitigation.

Komposisi ROC

Susunan ROC per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

ROC Composition

The ROC composition as of 31 December 2020 was as follows:

Nama Name	Jabatan dalam Anggota Komite Position in the Committee	Posisi di Perusahaan Position in the Company
Rinaldi Firmansyah	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner
Darmin Nasution	Anggota Member	Presiden Komisaris & Komisaris Independen President Commissioner & Independent Commissioner
Yon Aarsal	Anggota Member	Komisaris Commissioner
Lodewijk Govaerts	Anggota Member	Komisaris Commissioner
Andreas Ziesler	Anggota Member	Komisaris Commissioner

Profil ROC

Profil dari masing-masing anggota ROC disajikan pada Profil Dewan Komisaris dalam Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

ROC Profile

Profiles of the members of the ROC are presented in the BoC Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Piagam ROC

Untuk memastikan kejelasan fungsi dan keberadaan ROC di Perusahaan, Dewan Komisaris telah menyusun Piagam (*Charter*) ROC yang disahkan pada 8 April 2014. Piagam ini mencakup tugas dan tanggung jawab, kewenangan, masa jabatan, pelaporan, pertemuan, dan lain-lain.

ROC Charter

To ensure the clarity of the functions and purpose of the ROC in the Company, the BoC has established the ROC Charter, which was ratified on 8 April 2014. This Charter stipulates, among others, the duties and responsibilities, authority, term of service, reporting, and meetings of the ROC.

Tugas dan Tanggung Jawab ROC

Tugas dan tanggung jawab ROC terkait pengaturan Manajemen Risiko antara lain:

1. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko untuk risiko kredit, pasar, operasional, dan sosial & lingkungan yang akan disetujui oleh Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko secara berkala mengevaluasi dan menganalisis kecukupan kebijakan Manajemen Risiko serta memberikan pendapat dalam bentuk saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai peningkatan yang diperlukan untuk meningkatkan fungsi Manajemen Risiko;
2. Mengusulkan modifikasi yang diperlukan atas kebijakan Manajemen yang disebutkan sebelumnya agar sesuai dengan lingkungan bisnis yang berubah;
3. Menetapkan peran dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko;
4. Memberikan masukan dan saran tentang masalah yang diangkat oleh Komite Manajemen Risiko;
5. Meninjau laporan Manajemen Risiko triwulanan yang disiapkan oleh Tim Manajemen Risiko sebelum diserahkan kepada Pemegang Saham;
6. Memberikan saran dan/atau rekomendasi (jika ada) kepada Tim Manajemen Risiko untuk dicantumkan dalam laporan Manajemen Risiko triwulanan berikutnya;

Duties and Responsibilities of ROC

The duties and responsibilities of the ROC in relation to Risk Management include:

1. To evaluate Risk Management policies for credit, market, operational and social & environmental risks to be approved by the BoC. The ROC regularly evaluates and analyzes the adequacy of Risk Management policies and will also submit suggestions and/or recommendations to the BoC concerning necessary improvements to the Company's Risk Management function;
2. To propose necessary modifications to the aforementioned Risk Management policies to conform to recent changes in the business environment;
3. To define the roles and responsibilities of the Risk Management Committee;
4. To provide feedback and suggestions on the issues raised by the Risk Management Committee;
5. To review the quarterly Risk Management report prepared by IIF's Risk Management Team prior to submission to IIF's Shareholders;
6. To provide suggestions and/or recommendations (if any) to IIF's Risk Management Team to be incorporated in the subsequent quarterly Risk Management report;

7. Meninjau kerangka kerja parameter atau register Manajemen Risiko dan memberikan persetujuan untuk setiap perubahan yang diusulkan untuk parameter atau *register* tersebut; dan
8. Menyediakan informasi mengenai hal lain yang dianggap sesuai oleh Dewan Komisaris dalam kegiatan usaha seperti biasa.

Independensi ROC

Anggota ROC senantiasa bertindak independen dan dengan itikad baik dalam menjalankan fungsinya di Perusahaan dan menghindari benturan kepentingan.

Rapat ROC

Di tahun 2020, ROC mengadakan 5 kali rapat internal, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Rinaldi Firmansyah	5	5	100%
Muhamad Al-Arif*	1	1	100%
Andreas Ziesler	5	5	100%
Lodewijk Govaerts	5	5	100%
Sonny Loho	5	5	100%
Darmin Nasution**	2	2	100%
Yon Aarsal***	2	2	100%

* Muhamad Al-Arif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris hingga 19 Maret 2020. / Muhamad Al-Arif effectively served as a BoC member until 19 March 2020.

** Darmin Nasution menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sejak 14 Juli 2020. / Darmin Nasution effectively serves as a BoC member since 14 July 2020.

*** Yon Aarsal menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sejak 22 Juni 2020. / Yon Aarsal effectively serves as a BoC member since 22 June 2020.

Kegiatan ROC di Tahun 2020

Di tahun 2020, ROC telah membahas dan meninjau langkah-langkah pengambilan keputusan oleh Manajemen IIF terkait pengelolaan risiko, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab ROC.

Pengembangan Kompetensi ROC

Di tahun 2020, Yon Aarsal dan Lodewijk Govaerts mengikuti program pengembangan kompetensi yang rinciannya disajikan pada halaman 60.

Komite Investasi–Dewan Komisaris

Komite Investasi–Dewan Komisaris (BoC-IC) dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya dalam kaitannya dengan proposal investasi dan portofolio IIF. Pembentukan Komite BoC-IC disahkan dalam Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perusahaan ref. No. 001/IIF/BoC-RES/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.

7. To review the framework of Risk Management parameters or registers and provide approval for any proposed changes to such parameters or registers; and
8. To provide information on any other matters deemed necessary by the BoC in the ordinary course of business.

Independence of the ROC

Each member of the ROC always acts independently and in good faith in carrying out their functions in the Company and avoid any conflict of interest.

ROC Meetings

In 2020, the ROC held 5 internal meetings, with the attendance rates as follows:

ROC Activities in 2020

In 2020, ROC discussed and reviewed the decision-making steps taken by IIF's Management in relation to risk management, in accordance with ROC's duties and responsibilities.

ROC Competence Development

In 2020, Yon Aarsal and Lodewijk Govaerts participated in competence development programmes, for which the details are presented on page 60.

Board of Commissioners–Investment Committee

The BoC–Investment Committee (BoC-IC) was established to carry out supervisory functions, especially in relation to investment proposals and IIF's business portfolio. The establishment of the BoC-IC was ratified through the Circular Resolution of the BoC No. 001/IIF/BoC-RES/III/2013 dated 27 March 2013.

Komposisi BoC-IC

Susunan BoC-IC per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Composition of the BoC-IC

The BoC-IC composition as of 31 December 2020 was as follows:

Nama Name	Jabatan dalam Anggota Komite Position in the Committee	Posisi di Perusahaan Position in the Company
Darmin Nasution	Ketua Chairman	Presiden Komisaris & Komisaris Independen President Commissioner & Independent Commissioner
Sonny Loho	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner
Rinaldi Firmansyah	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner
Yon Aarsal	Anggota Member	Komisaris Commissioner
Bhimantara Widyajala	Anggota Member	Komisaris Commissioner
Lodewijk Govaerts	Anggota Member	Komisaris Commissioner
Andreas Ziesler	Anggota Member	Komisaris Commissioner
Richard Ranken	Anggota Member	Komisaris Commissioner
Ken Tomisaki	Anggota Member	Komisaris Commissioner

Profil BoC-IC

Profil dari masing-masing anggota BoC-IC disajikan pada Profil Dewan Komisaris dalam Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

BoC-IC Profile

Profiles of the members of the BoC-IC are presented in the BoC Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Piagam BoC-IC

Piagam BoC-IC dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Juni 2012. Piagam ini mengatur hal-hal terkait kewenangan, struktur, kualifikasi, tanggung jawab, rapat, pelaporan, kerahasiaan, dan lain-lain.

BoC-IC Charter

The BoC-IC Charter was established and ratified on 13 June 2012. This charter stipulates, among others, the authority, structure, qualification, responsibilities, meetings, reporting, and confidentiality aspect of the BoC-IC.

Tugas dan Tanggung Jawab BoC-IC

Tugas utama BoC-IC IIF antara lain adalah:

1. Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi mengenai pemberian kredit/investasi untuk persetujuan final dari Dewan Komisaris;
2. Mengevaluasi dan memberikan laporan kajian kinerja atas portofolio investasi Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada investasi berupa pinjaman, ekuitas, dan *treasury*;
3. Mengkaji kebijakan kredit dan investasi Perusahaan dan memberikan masukan terhadap perumusan/ revisinya;
4. Melakukan kewajiban-kewajiban lain yang berkaitan dengan kegiatan investasi Perusahaan atau kebijakan atau hal-hal lain, yang dari waktu ke waktu ditugaskan oleh BoC kepada Komite.

Duties and Responsibilities of the BoC-IC

The main duties of the BoC-IC are as follows:

1. To provide opinion and/or recommendations on credit/ investment provision to be approved by the BoC;
2. To evaluate and present evaluation reports pertaining to the performance of the Company's investment portfolio, including but not limited to loans, equity and treasury investments;
3. To review the Company's credit and investment policies and provide feedback for the formulation/revision of such policies;
4. To take on additional responsibilities relating to the Company's investment activities, policies or other matters mandated from time to time by the BoC.

Independensi BoC-IC

Anggota BoC-IC senantiasa bertindak independen dan dengan itikad baik dalam menjalankan fungsinya di Perusahaan dan menghindari benturan kepentingan.

Rapat BoC-IC

Di tahun 2020, BoC-IC mengadakan 13 kali rapat internal, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Independence of the BoC-IC

Each member of the BoC-IC always acts independently and in good faith in carrying out their functions in the Company and avoid any conflict of interest.

BoC-IC Meetings

In 2019, the BoC-IC held 13 internal meetings, with the attendance rates as follows:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Darmin Nasution*	7	7	100%
Sonny Loho	13	13	100%
Rinaldi Firmansyah	13	13	100%
Yon Aarsal**	8	8	100%
Muhamad Al-Arif***	2	2	100%
Bhimantara Widyajala	13	13	100%
Lodewijk Govaerts	13	13	100%
Andreas Ziesler	13	13	100%
Richard Ranken	13	13	100%
Rajeev Veeravalli Kannan****	5	5	100%
Ken Tomisaki *****	8	8	100%

* Darmin Nasution menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sejak 14 Juli 2020. / Darmin Nasution effectively serves as a BoC member since 14 July 2020.

** Yon Aarsal menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sejak 22 Juni 2020. / Yon Aarsal effectively serves as a BoC member since 22 June 2020.

*** Muhamad Al-Arif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris hingga 19 Maret 2020. / Muhamad Al-Arif effectively served as a BoC member until 19 March 2020.

**** Rajeev Veeravalli Kannan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris hingga 12 Juni 2020. / Rajeev Veeravalli Kannan effectively served as a BoC member until 12 June 2020.

***** Ken Tomisaki menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sejak 12 Juni 2020. / Ken Tomisaki effectively serves as a BoC member since 12 June 2020.

Kegiatan BoC-IC di Tahun 2020

Di tahun 2020, BoC-IC telah membahas dan meninjau langkah-langkah pengambilan keputusan oleh Manajemen IIF investasi, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab BoC-IC.

BoC-IC Activities in 2020

In 2020, BoC-IC discussed and reviewed the decision-making steps taken by IIF's Management in relation to investments, in accordance with BoC-IC's duties and responsibilities.

Pengembangan Kompetensi BoC-IC

Rincian program pengembangan kompetensi yang dihadiri oleh anggota BoC-IC di tahun 2020 disajikan pada halaman 60.

BoC-IC Competence Development

Details of the competence development programmes attended by the BoC-IC members in 2020 are presented on page 60.

Komite di Bawah Direksi

Committees Under the Board of Directors

Komite Investasi–Direksi

Komite Investasi–Direksi (BoD-IC) memiliki tanggung jawab untuk mengkaji, mempertimbangkan, dan membuat keputusan mengenai semua proposal investasi IIF untuk kemudian direkomendasikan ke Komite Investasi–Dewan Komisaris (BoC-IC).

Komposisi BoD-IC

Susunan BoD-IC per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Board of Directors–Investment Committee

The BoD–Investment Committee (BoD-IC) is tasked with reviewing, considering, and deciding on all investment proposals of IIF to be recommended to the BoC–Investment Committee (BoC-IC).

Composition of the BoD-IC

The BoD-IC composition as of 31 December 2020 was as follows:

Nama Name	Jabatan dalam Anggota Komite Position in the Committee	Posisi di Perusahaan Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua Chairman	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) President Director and Chief Executive Officer (CEO)
Devi Pradnya Paramita	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Managing Director and Chief Financial Officer (CFO)
I Made Wiracita Tantra	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Managing Director and Chief Risk Officer (CRO)
Mohammad Ramadhan Harahap	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)
Y. Bayu Wirawan	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)

Profil BoD-IC

Profil dari masing-masing anggota BoD-IC disajikan pada Profil Direksi dalam Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

BoD-IC Profile

Profiles of the members of the BoD-IC are presented in the BoD Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Piagam BoD-IC

BoD-IC memiliki piagam (*charter*) yang mengatur peran dan tanggung jawab, kewenangan, struktur serta kualifikasi, rapat, pelaporan, kerahasiaan, dan lainnya.

BoD-IC Charter

The BoD-IC has a charter that stipulates, among others, the roles and responsibilities, authority, structure, qualification, meeting requirements, reporting system, and confidentiality aspect of the BoD-IC.

Tugas dan Tanggung Jawab BoD-IC

Tugas utama BoD-IC IIF meliputi:

1. Mengkaji, menyetujui, dan merekomendasikan proposal investasi untuk ditinjau lebih lanjut dan disetujui oleh BoD-IC;
2. Menyediakan informasi, bantuan dan/atau klarifikasi kepada BoC-IC untuk tujuan pengkajian proyek oleh BoD-IC;
3. Berkoordinasi dengan Komite Aset dan Kewajiban (ALCO) Direksi untuk memastikan kecukupan pendanaan untuk kredit/investasi yang diusulkan dan bahwa dana tersebut sesuai dengan kredit tertentu yang ditetapkan oleh ALCO;

Duties and Responsibilities of the BoD-IC

The main duties of the BoD–IC of IIF include:

1. Reviewing, approving and recommending investment proposals to be submitted to the BoD-IC for further review and approval;
2. Providing information, assistance, and/or clarification to the BoC-IC for project review by the BoD-IC;
3. Coordinating with the Assets & Liabilities Committee of the BoD (ALCO) to ensure adequate funding for proposed credits/investments based on ALCO's credit limits;

4. Meninjau dan menyesuaikan kebijakan kredit dan investasi Perusahaan dari waktu ke waktu jika dianggap perlu;
5. Meninjau dan memantau implementasi atas semua investasi, ekuitas, dan semua pinjaman, setidaknya setahun sekali, serta meningkatkan frekuensi peninjauan jika dianggap perlu dan menyediakan laporan mengenai tinjauan dan pemantauan kepada BoD-IC.

Independensi BoD-IC

Anggota BoD-IC senantiasa bertindak independen dan dengan itikad baik dalam menjalankan fungsinya di Perusahaan dan menghindari benturan kepentingan.

Rapat BoD-IC

Di tahun 2020, BoD-IC mengadakan 58 kali rapat internal, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Reynaldi Hermansjah	58	58	100%
Devi Pradnya Paramita	58	58	100%
I Made Wiracita Tantra	58	58	100%
Harold Tjiptadaja *	3	3	100%
Hilda Savitri**	8	8	100%
Mohammad Ramadhan Harahap***	29	29	100%
Y. Bayu Wirawan****	29	29	100%

* Harold Tjiptadaja efektif menjabat sebagai anggota Direksi hingga 31 Januari 2020/Harold Tjiptadaja effectively served as a BoD member until 31 January 2020.

** Hilda Savitri efektif menjabat sebagai anggota Direksi hingga 15 Mei 2020/Hilda Savitri effectively served as a BoD member until 15 May 2020.

*** Mohammad Ramadhan Harahap efektif menjabat sebagai anggota Direksi sejak 30 Juni 2020/Mohammad Ramadhan Harahap effectively serves as a BoD member since 30 June 2020.

**** Y. Bayu Wirawan efektif menjabat sebagai anggota Direksi sejak 30 Juni 2020/Y. Bayu Wirawan effectively serves as a BoD member since 30 June 2020.

Pengembangan Kompetensi BoD-IC

Rincian program pengembangan kompetensi yang dihadiri oleh anggota BoD-IC di tahun 2020 disajikan pada halaman 47-50.

Komite Aset dan Liabilitas

Pembentukan Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) bertujuan untuk membantu Direksi memantau pengelolaan sumber dana, termasuk pengelolaan risiko-risiko terkait, seperti risiko likuiditas, risiko solvabilitas, dan risiko pasar.

4. Reviewing and adjusting credit and investment policies from time to time when necessary;
5. Reviewing and monitoring the implementation of all investments, equity, and loans at least once per year, and increasing the frequency of such reviews when required, as well as reporting the results of the aforementioned reviewing and monitoring activities to the BoC-IC.

Independence of the BoD-IC

Each member of BoD-IC always acts independently and in good faith in carrying out their functions in the Company and avoid any conflict of interest.

BoD-IC Meetings

In 2020, the BoD-IC held 58 internal meetings, with the attendance rates as follows:

BoD-IC Competence Development

Details of the competence development programmes attended by the BoD-IC members in 2020 are presented on pages 47-50.

Assets and Liabilities Committee

The Assets and Liabilities Committee (ALCO) is established to assist the BoD in monitoring the Company's fund management, including the management of related risks such as liquidity risk, solvency risk, and market risk.

Komposisi ALCO

Susunan ALCO per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

ALCO Composition

The ALCO composition as of 31 December 2020 was as follows:

Nama Name	Jabatan dalam Anggota Komite Position in the Committee	Posisi di Perusahaan Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua Chairman	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) President Director and Chief Executive Officer (CEO)
Devi Pradnya Paramita	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Managing Director and Chief Financial Officer (CFO)
I Made Wiracita Tantra	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Managing Director and Chief Risk Officer (CRO)
Mohammad Ramadhan Harahap	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)
Y. Bayu Wirawan	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)

Profil ALCO

Profil dari masing-masing anggota ALCO disajikan pada Profil Direksi dalam Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

ALCO Profile

The profiles of the ALCO members are presented in the BoD Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Piagam ALCO

ALCO menjalankan fungsinya di Perusahaan dengan mengacu pada piagam (*charter*) ALCO yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2013. Piagam ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan komposisi Komite, serta prosedur terkait, seperti rapat, pelaporan, dan kerahasiaan.

ALCO Charter

In performing its duties, the ALCO refers to ALCO Charter established on 19 December 2013. The Charter stipulates, among others, the responsibilities and the composition of the Committee, as well as related procedures, such as meeting, reporting, and confidentiality aspect of the ALCO.

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Tanggung jawab ALCO dalam kerangka Manajemen Risiko adalah:

1. Merumuskan strategi dan rencana tindakan yang terkait risiko pasar dan likuiditas;
2. Menyediakan rekomendasi perubahan kebijakan, jika diperlukan, dan menyarankan hal ini kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
3. Memastikan bahwa pengelolaan aset dan liabilitas dijalankan sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
4. Mengelola likuiditas, menetapkan suku bunga, menetapkan, menentukan, dan memantau pelaksanaan kebijakan untuk *mismatch* dan posisi devisa neto, serta mengelola dan menentukan struktur neraca keuangan dan modal IIF;
5. Mengelola investasi untuk dana surplus;
6. Mengelola risiko pasar yang dilakukan dalam *trading book*;
7. Mendesain dan merevisi struktur limit sesuai *risk appetite* IIF melalui koordinasi dengan Komite Manajemen Risiko (atau jika limit tersebut harus disetujui oleh Dewan Komisaris, kemudian memberikan rekomendasi dan justifikasi untuk persetujuan lebih lanjut dari Dewan Komisaris), dan memantau kepatuhan terhadap struktur limit;

Duties and Responsibilities of the ALCO

Within the Company's Risk Management framework, the responsibilities of the ALCO are as follow:

1. Formulating strategies and action plans related to market and liquidity risks;
2. Providing recommendations on changes of policy, if required, to the BoC;
3. Ensuring that the management of assets and liabilities is executed in accordance with the Company's policies;
4. Managing IIF's liquidity, setting interest rates, and deciding, determining, and monitoring the application of the policies for mismatch and net open position, as well as managing and determining IIF's financial and capital balance structures;
5. Managing the investment of surplus funds;
6. Managing the market risk carried in the trading book;
7. Designing and revising limit structures in line with IIF's risk appetite in coordination with the Risk Management Committee (or providing further recommendations and justifications if said limit requires approval from the the BoC), and monitoring compliance with the limit structure;

8. Menyetujui penggunaan metodologi untuk pengelolaan risiko pasar, risiko likuiditas, dan menetapkan kerangka kerja untuk validasi berkala atas model risiko pasar dan likuiditas;
9. Menentukan (atau memperkirakan) risiko pasar dan likuiditas yang melekat dalam semua aktivitas Perusahaan dan menyediakan input strategis kepada Dewan Komisaris melalui koordinasi dengan Komite Manajemen Risiko; dan
10. Mengkaji proyeksi kas dan menentukan kelebihan yang dapat diinvestasikan, jika ada.

Independensi ALCO

Anggota ALCO senantiasa bertindak independen dan dengan itikad baik dalam menjalankan fungsinya di Perusahaan dan menghindari benturan kepentingan.

Rapat ALCO

Di tahun 2020, ALCO mengadakan 12 kali rapat internal, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Reynaldi Hermansjah	12	12	100%
Devi Pradnya Paramita	12	12	100%
I Made Wiracita Tantra	12	12	100%
Hilda Savitri*	4	4	100%
Mohammad Ramadhan Harahap**	6	6	100%
Y. Bayu Wirawan***	6	6	100%

* Hilda Savitri efektif menjabat sebagai anggota Direksi hingga 15 Mei 2020/Hilda Savitri effectively served a BoD member until 15 May 2020.

** Mohammad Ramadhan Harahap efektif menjabat sebagai anggota Direksi sejak 30 Juni 2020/Mohammad Ramadhan Harahap effectively serves as a BoD member since 30 June 2020.

*** Y. Bayu Wirawan efektif menjabat sebagai anggota Direksi sejak 30 Juni 2020/Y. Bayu Wirawan effectively serves as a BoD member since 30 June 2020.

Pengembangan Kompetensi ALCO

Rincian program pengembangan kompetensi yang dihadiri oleh anggota ALCO di tahun 2020 disajikan pada halaman 47-50.

Komite Manajemen Risiko [RISK]

Komite Manajemen Risiko (RMC) Direksi bertanggung jawab secara aktif memantau Manajemen Risiko kegiatan bisnis IIF serta memberikan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko IIF.

Komposisi RMC

Susunan RMC per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

8. Approving methodologies for the management of market and liquidity risks, and establishing the framework for periodical validations of market and liquidity risk models;
9. Defining (or estimating) market and liquidity risks inherent in all activities of the Company and to provide strategic input for the BoC in coordination with the Risk Management Committee of the BoD; and
10. Reviewing cash projection and determining investible surplus, if any.

Independence of ALCO

All members of the ALCO always acts independently and in good faith in carrying out their functions in the Company and avoid any conflict of interest.

ALCO Meetings

In 2020, the ALCO held 12 internal meetings, with the attendance rates as follows:

ALCO Competence Development

Details of the competence development programmes attended by the ALCO members in 2020 are presented on pages 47-50.

Risk Management Committee

The Risk Management Committee (RMC) of the BoD is responsible for actively monitoring the Risk Management of IIF's business activities as well as providing recommendations in formulating IIF's Risk Management policies and strategies.

RMC Composition

The RMC composition as at 31 December 2020 was as follows:

Nama Name	Jabatan dalam Anggota Komite Position in the Committee	Posisi di Perusahaan Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua Chairman	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) President Director and Chief Executive Officer (CEO)
Devi Pradnya Paramita	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Managing Director and Chief Financial Officer (CFO)
I Made Wiracita Tantra	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Managing Director and Chief Risk Officer (CRO)
Mohammad Ramadhan Harahap	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)
Y. Bayu Wirawan	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)

Profil RMC

Profil dari masing-masing anggota RMC disajikan pada Profil Direksi dalam Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Piagam RMC

Piagam RMC dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 April 2014.

Pada 13 April 2020, Piagam RMC direvisi dengan perubahan utama berupa pemisahan komite baru yakni Komite Pencegahan Pelanggaran dan Kecurangan dari RMC, untuk lebih berfokus pada intensifikasi pemantauan dan pengelolaan hal-hal terkait kecurangan dan korupsi, sejalan dengan berkembangnya ukuran dan kompleksitas operasional Perseroan.

Piagam RMC mengatur hal-hal terkait kewenangan, struktur, kualifikasi, tanggung jawab, rapat, pelaporan, kerahasiaan, dan lain-lain.

Tugas dan Tanggung Jawab RMC

Berkenaan dengan pengaturan Manajemen Risiko di IIF, RMC bertugas:

1. Memberikan perumusan strategis kebijakan dan kerangka kerja Manajemen Risiko, termasuk penetapan batas kerangka kerja dan perumusan rencana darurat untuk kondisi yang merugikan;
2. Mengawasi evaluasi dan pengelolaan komposisi risiko secara keseluruhan dalam portofolio IIF, meminimalisir risiko potensial di proyek maupun di tingkat portofolio, mengembangkan budaya Manajemen Risiko di semua tingkatan, dan memastikan bahwa Departemen Manajemen Risiko mampu melakukannya secara mandiri;
3. Menyelidiki, menganalisis, dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan masalah yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur pada umumnya;
4. Mengevaluasi proposal terkait aktivitas dan produk baru, mengukur keinginan dan kapasitas IIF dalam

RMC Profile

Profiles of the members of the RMC are presented in the BoD Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

RMC Charter

The RMC Charter was established and ratified on 16 April 2014.

In 13 April 2020, the RMC Charter was revised with major changes in the spin-off of Fraud and Corruption Prevention Committee from the RMC, to put more focus on and intensify the monitoring and managing fraud and corruption related issues into a separate committee, in line with the vast growth of the Company in terms of size and operational complexity.

The RMC Charter stipulates, among others, the authority, structure, qualifications, responsibilities, meetings, reporting, and confidentiality aspect of the RMC.

Duties and Responsibilities of RMC

In relation to Risk Management measures in IIF, the duties of the RMC are as follows:

1. To provide strategic formulation of the Company's Risk Management policies and framework, which include the establishment of limits for said framework and the formulation of contingency plans for adverse conditions;
2. To oversee the evaluation and management of the overall risk composition in IIF's portfolio, minimise potential risks at the project or the portfolio level, foster a Risk Management culture at all levels, and ensure that the Risk Management Department is able to perform independently;
3. To investigate, analyse, and take any necessary action with regards to business decisions that deviate from general procedures;
4. To evaluate proposals related to new activities and products, measure the desirability and capacity of IIF to

melakukan aktivitas dan produk baru melalui perspektif risiko, serta mengevaluasi proposal untuk perubahan terkait kebijakan dan prosedur;

5. Memantau kecukupan modal IIF terhadap risiko yang diidentifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan toleransi risiko Perusahaan;
6. Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, merumuskan perubahan yang diperlukan untuk kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang ada, mengevaluasi kecukupan pengendalian internal, dan meninjau laporan *Management Information System* (MIS) secara reguler;
7. Melakukan tinjauan rutin untuk mengevaluasi kesesuaian metodologi penilaian risiko;
8. Mengkaji dan menyetujui Laporan Manajemen Risiko Triwulanan yang dihasilkan oleh Departemen Manajemen Risiko; dan
9. Meninjau dan mengusulkan perubahan apa pun, jika diperlukan, pada parameter atau indikator risiko apa pun kepada Komite Pemantau Risiko untuk persetujuan lebih lanjut oleh Dewan Komisaris.
10. Terkait dengan Pencegahan Kecurangan dan Korupsi, RMC bertanggung jawab untuk:
 - Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan etika karyawan atas penipuan (kecurangan) dan korupsi;
 - Meninjau penilaian risiko kecurangan dan korupsi untuk seluruh lingkup Perseroan sebagaimana disusun oleh Direktorat Manajemen Risiko setidaknya tiga tahun sekali, atau setelah terjadinya perubahan struktural atau fungsional yang signifikan di IIF;
 - Menentukan strategi pengendalian penipuan dan korupsi untuk mengatasi risiko yang diidentifikasi oleh kesadaran atas penipuan dan korupsi;
 - Memastikan setiap karyawan dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing menerima pelatihan peningkatan kesadaran atas penipuan dan korupsi dan memahami Kode Etik IIF;
 - Merekomendasikan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk deteksi dan pencegahan penipuan dan korupsi; dan
 - Meninjau dan memperbarui kebijakan dan prosedur apabila diperlukan namun setidaknya setiap dua tahun sekali untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip, standar, dan praktik terbaik dalam pencegahan penipuan dan korupsi.

Independensi RMC

Anggota RMC senantiasa bertindak independen dan dengan itikad baik dalam menjalankan fungsinya di Perusahaan dan menghindari benturan kepentingan.

Rapat RMC

Di tahun 2020, RMC mengadakan 4 kali rapat internal, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

undertake those new activities and products through a risk perspective, and evaluate proposals for associated changes in policies and procedures;

5. To monitor the adequacy of IIF's capital against identified risks in accordance with prevailing regulations and the Company's risk tolerance;
6. To evaluate the effectiveness of Risk Management policies and procedures, formulate the necessary amendments to existing Risk Management policies and procedures, evaluate the adequacy of internal controls, and regularly review Management Information System (MIS) reports;
7. To conduct regular reviews to evaluate the appropriateness of risk assessment methodologies;
8. To review and approve the Quarterly Risk Management report produced by the Risk Management Department; and
9. To review and propose any changes, if required, to any risk parameters or indicators to the Risk Oversight Committee of the BoC for further approval by the BoC.
10. In relation to Fraud and Corruption Prevention, RMC is responsible on the following:
 - Developing strategies to promote fraud and corruption awareness and ethics for employees;
 - Reviewing the Enterprise-wide on fraud and corruption risk assessment prepared by Risk Management Directorate at least every three years, or following any major structural or functional changes of IIF;
 - Determining fraud and corrupting control strategies to address risks identified by the fraud and corruption awareness;
 - Ensuring employees within their area of responsibility receive appropriate fraud and corruption awareness training and understand IIF's Code of Conduct;
 - Recommending appropriate policies and procedures for the detection and prevention of fraud and corruption; and
 - Reviewing and updating policies and procedures whenever necessary but at least once every two years to ensure it reflects best practice principles and standards in fraud and corruption prevention.

Independence of the RMC

Each member of the RMC always acts independently and in good faith in carrying out their functions in the Company and avoid any conflict of interest.

RMC Meetings

In 2020, the RMC held 4 internal meetings, with the attendance rates as follows:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Reynaldi Hermansjah	4	4	100%
Devi Pradnya Paramita	4	4	100%
I Made Wiracita Tantra	4	4	100%
Hilda Savitri*	2	2	100%
Mohammad Ramadhan Harahap**	2	2	100%
Y. Bayu Wirawan***	2	2	100%

* Hilda Savitri efektif menjabat sebagai anggota Direksi hingga 15 Mei 2020./Hilda Savitri effectively served as a BoD member until 15 May 2020.

** Mohammad Ramadhan Harahap efektif menjabat sebagai anggota Direksi sejak 30 Juni 2020/Mohammad Ramadhan Harahap effectively serves as a BoD member since 30 June 2020.

*** Y. Bayu Wirawan efektif menjabat sebagai anggota Direksi sejak 30 Juni 2020/Y. Bayu Wirawan effectively serves as a BoD member since 30 June 2020.

Pengembangan Kompetensi RMC

Rincian program pengembangan kompetensi yang dihadiri oleh anggota RMC di tahun 2020 disajikan pada halaman 47-50.

RMC Competence Development

Details of the competence development programmes attended by the RMC members in 2020 are presented on pages 47-50.

Komite Advisory

Sebagai unit pendukung fungsi manajerial Direksi, Komite Advisory bertugas khusus meninjau, menimbang, dan mengambil keputusan terkait dengan seluruh proyek Advisory Perusahaan, diantaranya memutuskan apakah akan menerima suatu mandat.

Advisory Committee

As a supporting unit for the BoD's managerial functions, the Advisory Committee is tasked specifically with reviewing, considering, and making decisions on IIF's Advisory projects, among them the decision of whether to accept a mandate.

Komposisi Komite Advisory

Susunan Komite Advisory per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Advisory Committee Composition

The Advisory Committee composition as of 31 December 2020 was as follows:

Nama Name	Jabatan dalam Anggota Komite Position in the Committee	Posisi di Perusahaan Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua Chairman	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) President Director and Chief Executive Officer (CEO)
I Made Wiracita Tantra	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Managing Director and Chief Financial Officer (CFO)
Devi Pradnya Paramita	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Managing Director and Chief Risk Officer (CRO)
Irman Boyle	Anggota Member	EVP Head of Advisory

Profil Komite Advisory

Profil dari masing-masing anggota Komite Advisory disajikan pada Profil Direksi & Manajemen Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Advisory Committee Profile

Profiles of the members of the Advisory Committee are presented in the BoD Profile & Executive Management Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Piagam Komite Advisory

Keberadaan Komite Advisory IIF telah dilengkapi dengan Piagam Komite Advisory yang disahkan pada tanggal 5 Desember 2014.

Advisory Committee Charter

IIF's Advisory Committee was established based on Advisory Committee Charter ratified on 5 December 2014.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Advisory

Tugas dan tanggung jawab Komite *Advisory* antara lain adalah:

1. Meninjau, merekomendasikan, dan/atau menyetujui Dokumen Proyek *Advisory* atau dokumen serupa, yang menyediakan cakupan dan struktur awal terkait dengan proyek *Advisory* Perusahaan. Dokumen Proyek *Advisory* harus dibuat secara detail atau relevan dengan mempertimbangkan informasi yang ada pada saat tersebut dan harus mempertimbangkan, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: manfaat pelaksanaan proyek, implikasi terhadap sumber daya Perusahaan (waktu pengerjaan, biaya/*budget*, potensi pendapatan, dan lainnya), potensi benturan kepentingan, dan permasalahan KYC;
2. Menerima update secara periodik terkait dengan proyek-proyek *Advisory* (baik proyek yang sedang berjalan maupun proyek *pipeline*) dari *Executive Vice President Advisory Group*;
3. Menyediakan informasi, bantuan dan/atau klarifikasi kepada Dewan Komisaris, apabila diperlukan, untuk meninjau fungsi *Advisory* Perusahaan;
4. Meninjau dan menyesuaikan kebijakan dan/atau prosedur *Advisory* Perusahaan dari waktu ke waktu sebagaimana dianggap perlu oleh Komite *Advisory*; dan
5. Meninjau dan memantau implementasi proyek-proyek *Advisory* Perusahaan paling sedikit setiap tahun dan meningkatkan frekuensi *review* apabila dianggap perlu, serta menyediakan laporan hasil *review* dan pemantauan kepada Dewan Komisaris, apabila diperlukan.

Independensi Komite Advisory

Anggota Komite *Advisory* senantiasa bertindak independen dan dengan itikad baik dalam menjalankan fungsinya di Perusahaan dan menghindari benturan kepentingan.

Rapat Komite Advisory

Di tahun 2020, Komite *Advisory* mengadakan 14 kali rapat internal, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Reynaldi Hermansjah	14	14	100%
I Made Wiracita Tantra	14	14	100%
Devi Pradnya Paramita	14	14	100%
Irman Boyle	14	14	100%

Pengembangan Kompetensi Komite Advisory

Rincian program pengembangan kompetensi yang dihadiri oleh anggota Komite *Advisory* di tahun 2020 disajikan pada halaman 47-50.

Duties and Responsibilities of the Advisory Committee

The duties and responsibilities of Advisory Committee are as follows:

1. To review, recommend, and/or approve Advisory Project Documents or similar documents that provide the scope and initial structure related to an Advisory project. The Advisory Project Document must be prepared in detail or made relevant with due consideration to the most recent information available at that time including but not limited to information on the following matters: benefit of the project's implementation, implication to the Company's resources (time of execution, budget, potential revenue, and others), potential conflict of interests, and KYC issues;
2. To receive periodical updates related to Advisory projects (either ongoing projects or those in the pipeline) from the Executive Vice President of the Advisory Group;
3. To provide information, assistance, and/or clarification for the BoC, whenever necessary, to conduct reviews on the Company's Advisory function;
4. To review and adjust Advisory policies and/or procedures of the Company from time to time as deemed necessary by the Advisory Committee; and
5. To review and monitor the implementation of the Company's Advisory projects on a yearly basis and, if necessary, increase the frequency of reviews, and to present related reports to the BoC.

Independence of the Advisory Committee

Each member of the Advisory Committee always acts independently and in good faith in carrying out their functions in the Company and avoid any conflict of interest.

Advisory Committee Meetings

In 2020, the Advisory Committee held 14 internal meetings, with the attendance rates as follows:

Advisory Committee Competence Development

Details of the competence development programmes attended by the Advisory Committee members in 2020 are presented on pages 47-50.

Komite Sumber Daya Manusia

Sebagai unit pendukung fungsi manajerial Direksi, Komite Sumber Daya Manusia (HRC) bertugas khusus meninjau, menimbang, dan mengambil keputusan terkait dengan seluruh hal kepegawaian Perusahaan.

Komposisi HRC

Susunan HRC per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan dalam Anggota Komite Position in the Committee	Posisi di Perusahaan Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua Chairman	Presiden Direktur dan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) President Director and Chief Executive Officer (CEO)
Devi Pradnya Paramita	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) Managing Director and Chief Financial Officer (CFO)
I Made Wiracita Tantra	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Risk Officer</i> (CRO) Managing Director and Chief Risk Officer (CRO)
M. Ramadhan Harahap	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)
Y. Bayu Wirawan	Anggota Member	Direktur Pelaksana dan <i>Chief Investment Officer</i> (CIO) Managing Director and Chief Investment Officer (CIO)
Irman Boyle	Anggota Member	EVP Head of Advisory

Profil HRC

Profil dari masing-masing anggota HRC disajikan pada Profil Direksi & Manajemen Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Piagam HRC

HRC dibentuk berdasarkan Piagam HRC tanggal 14 Desember 2015.

Tugas dan Tanggung Jawab HRC

ILF membentuk HRC yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Dalam hal Kepegawaian dan Pengembangan
Memutuskan dan menyetujui seleksi, penempatan, dan pemberhentian pegawai senior Perusahaan (tingkat *Assistant Vice President* ke atas) sesuai dengan kriteria subjektif dan objektif yang dapat diterima. Kewenangan ini dimaksudkan untuk memastikan adanya perencanaan sumber daya manusia yang baik untuk menunjang pertumbuhan Perusahaan, menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin terjadi, serta memastikan bahwa kinerja Perusahaan tidak terganggu oleh sumber daya manusia yang memiliki kinerja buruk;
2. Dalam hal Manajemen Kinerja
Membuat tujuan-tujuan Perusahaan dan karyawan, terutama untuk karyawan dengan tingkat *Executive Vice President* dan staf, serta menyesuaikan hasilnya di dalam Perusahaan.

Human Resources Committee

To support managerial function of the BoD, the Human Resources Committee (HRC) is tasked with reviewing, considering, and making decisions on all matters related to the Company's personnel.

HRC Composition

The HRC composition as of 31 December 2020 was as follows:

HRC Profile

Profiles of the members of the HRC are presented in the BoD Profile & Executive Management Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

HRC Charter

The HRC was established based on the HRC Charter dated 14 December 2015.

Duties and Responsibilities of the HRC

ILF established HRC to carry out the following duties and responsibilities:

1. In relation to Employment and Development
To decide and approve the selection, placement, and termination of the Company's senior employees (Assistant Vice President and above) according to subjective and objective criteria deemed to be acceptable. This authority aims to ensure effective human resources planning to support the Company's growth in the face of potential challenges and ensure that the Company's performance is not significantly affected by poor performance of its human resources;
2. In relation to Performance Management
To determine objectives of the Company and employees, particularly for the Executive Vice President and staff, and review the objectives of the office;

3. Dalam hal Kompensasi dan Manfaat
Menetapkan kebijakan remunerasi untuk karyawan dengan tingkat Executive Vice President dan staf, menyelaraskan remunerasi dengan kinerja yang diukur dengan tolok ukur industri sejenis, pencapaian indikator kinerja yang penting, nilai tambah ekonomis, dan faktor-faktor lainnya.
4. Menetapkan kebijakan, strategi, dan keputusan terkait dengan sumber daya manusia yang bersifat umum yang berpotensi memengaruhi Perusahaan secara keseluruhan.

Kewenangan HRC

Dalam rangka untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, HRC dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memiliki akses untuk memperoleh informasi yang diperlukan sesuai dengan tanggung jawabnya dari Direksi, eksekutif, karyawan, dan pihak-pihak eksternal kapan pun diperlukan;
- b. Memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi, mengundang, dan mengikutsertakan karyawan atau konsultan internal atau independen Perusahaan untuk menghadiri rapat Komite.

Independensi HRC

Anggota HRC senantiasa bertindak independen dan dengan itikad baik dalam menjalankan fungsinya di Perusahaan dan menghindari benturan kepentingan.

Rapat HRC

Di tahun 2020, HRC mengadakan 4 kali rapat internal, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Reynaldi Hermansjah	4	4	100%
Devi Pradnya Paramita	4	4	100%
I Made Wiracita Tantra	4	4	100%
Hilda Savitri*	2	2	100%
M. Ramadhan Harahap**	2	2	100%
Y. Bayu Wirawan***	2	2	100%
Irman Boyle	4	4	100%

* Hilda Savitri efektif menjabat sebagai anggota Direksi hingga 15 Mei 2020/Hilda Savitri effectively served a BoD member until 15 May 2020.

** Mohammad Ramadhan Harahap efektif menjabat sebagai anggota Direksi sejak 30 Juni 2020/Mohammad Ramadhan Harahap effectively serves as a BoD member since 30 June 2020.

*** Y. Bayu Wirawan efektif menjabat sebagai anggota Direksi sejak 30 Juni 2020/Y. Bayu Wirawan effectively serves as a BoD member since 30 June 2020.

Pengembangan Kompetensi HRC

Rincian program pengembangan kompetensi yang dihadiri oleh anggota HRC di tahun 2020 disajikan pada halaman 47-50.

3. In relation to Compensation and Benefit
To determine remuneration policies for the employees at the Executive Vice President and staff, adjust the remuneration package to performance measured using industry benchmarks, accomplishment of key performance indicators, economic added value and other factors;
4. To determine the general policies, strategies, and decisions related to general human resources that are pivotal to the Company's overall performance.

Authority of the HRC

In order to accomplish the abovementioned duties and responsibilities, the HRC is authorised to:

- a. Obtain access to information required to carry out said responsibilities from the Company's BoD, executive, staff, employees, and external parties at any time;
- b. Select, invite, and include employees, internal consultants, or independent consultants of the Company to attend meetings by the Committee.

Independence of the HRC

Each member of the HRC always acts independently and in good faith in carrying out their functions in the Company and avoid any conflict of interest.

HRC Meetings

In 2020, the HRC held 4 internal meetings, with the attendance rates as follows:

HRC Competence Development

Details of the competence development programmes attended by the HRC members in 2020 are presented on pages 47-50.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI) yang unggul merupakan kebutuhan pokok dalam setiap kegiatan usaha. Untuk itu, IIF membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi (ITSC) yang bertugas mengembangkan kapasitas dan kapabilitas sistem teknologi informasi Perusahaan.

Komposisi ITSC

Susunan ITSC per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan dalam Anggota Komite Position in the Committee	Posisi di Perusahaan Position in the Company
Reynaldi Hermansjah	Ketua Chairman	Presiden Direktur & Chief Executive Officer President Director & Chief Executive Officer
I Made Wiracita Tantra	Anggota Member	Direktur Pelaksana & Chief Risk Officer Managing Director & Chief Risk Officer
Devi Pradnya Paramita	Anggota Member	Direktur Pelaksana & Chief Financial Officer Managing Director & Chief Financial Officer

Profil ITSC

Profil dari masing-masing anggota ITSC disajikan pada Profil Direksi & Manajemen Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Piagam ITSC

Pembentukan ITSC mengacu pada Piagam (*Charter*) ITSC.

Tugas dan Tanggung Jawab ITSC

Rincian tugas ITSC mencakup:

1. Memprioritaskan inisiatif dan menyelaraskan TI dengan strategi bisnis serta mengawasi strategi, proyek, dan keputusan arsitektur teknologi yang terkait dengan teknologi informasi;
2. Memprioritaskan inisiatif investasi di bidang TI dan memberikan persetujuan akhir dan rekomendasi tentang keberlanjutan usulan proyek TI;
3. Menyelaraskan bisnis strategis dengan investasi TI melalui perencanaan TI strategis;
4. Meninjau dan memantau proyek-proyek utama di bidang TI dari perspektif lintas fungsional;
5. Mencapai keseimbangan antara kendala yang dihadapi di bidang TI dengan prioritas bisnis;
6. Mempromosikan Lintas Sinergi Fungsional
7. Memberikan informasi terkait TI kepada Direksi dan Manajemen;
8. Memastikan terjadinya komunikasi yang terbuka antara Departemen TI dan unit fungsional lainnya di Perusahaan sebagai upaya mempromosikan perencanaan secara bersama;
9. Menyelesaikan konflik terkait sumber daya dengan melakukan pengawasan terhadap manfaat yang terealisasi;

Information Technology Steering Committee

Excellent Information Technology (IT) has become a basic requirement of doing business. Therefore, IIF established the Information Technology Steering Committee (ITSC) to develop the capacity and capabilities of the Company's information technology system.

ITSC Composition

The ITSC composition as of 31 December 2020 was as follows:

ITSC Profile

Profiles of the members of the ITSC are presented in the BoD Profile & Executive Management Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

ITSC Charter

The ITSC was established based on the ITSC Charter.

Duties and Responsibilities of ITSC

Duties of the ITSC are as follows:

1. To prioritise initiatives and align the Company's IT systems with its business strategy, and oversee IT-related strategies, projects and decisions on technological architecture;
2. To prioritise IT investment initiatives and deliver final approval and recommendations on the follow-up of proposed IT projects;
3. To align strategic businesses and IT investments through strategic IT planning;
4. To review and monitor major IT projects from a cross-functional perspective;
5. Counteract IT-related constraints according to business priorities;
6. To promote Cross Functional Synergy;
7. To inform the BoD and Management on IT related matters;
8. To ensure open communication between the IT Department and other functional units of the Company in order to promote collaborative planning;
9. To resolve conflicts related to resources by overseeing the benefits that have been realised;

10. Memantau apakah inisiatif TI secara efektif mendukung tujuan bisnis dan strategi Perusahaan; 11. Melakukan pengawasan terhadap Manajemen Risiko TI; 12. Memberikan kepemimpinan Manajemen Risiko TI dengan: • Memahami dan mengidentifikasi risiko TI dan mengupayakan pengelolaan yang efektif atas risiko tersebut; • Mengelola eksposur dan ambang batas risiko TI. 13. Menyelesaikan permasalahan alokasi sumber daya berdasarkan prioritas risiko; dan 14. Memastikan terjadinya komunikasi yang terbuka antara Departemen TI dengan unit-unit fungsional lain sebagai upaya mempromosikan Manajemen risiko secara bersama.	10. To monitor the effectiveness of IT initiatives insupporting the Company's business objectives and strategies; 11. To oversee IT risk Management; 12. To provide IT risk management leadership IT by: • Understanding and identifying IT risks and endeavor to manage the risks effectively; • Managing IT risk exposure and thresholds. 13. To resolve resource allocation issues based on risk prioritisation; and 14. To ensure open communication between the IT department and other functional units to promote collaborative risk management.

Independensi ITSC

Anggota ITSC senantiasa bertindak independen dan dengan itikad baik dalam menjalankan fungsinya di Perusahaan dan menghindari benturan kepentingan.

Independence of the IT Committee

Each member of the ITSC always acts independently and in good faith in carrying out their functions in the Company and avoid any conflict of interest.

Rapat ITSC

Di tahun 2020, ITSC mengadakan 4 kali rapat internal bersama Unit Operation & IT dan Operation Risk, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

ITSC Meetings

In 2020, the ITSC held 4 internal meetings with the Operation & IT and Operation Risk Units, with the attendance rates as follows:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Reynaldi Hermansjah	4	4	100%
I Made Wiracita Tantra	4	4	100%
Devi Pradnya Paramita	4	4	100%

Pengembangan Kompetensi ITSC

Rincian program pengembangan kompetensi yang dihadiri oleh anggota ITSC di tahun 2020 disajikan pada halaman 47-50.

ITSC Competence Development

Details of the competence development programmes attended by the ITSC members in 2020 are presented on pages 47-50.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan mengelola komunikasi Perusahaan dengan pihak-pihak eksternal, sekaligus memastikan pelaksanaan GCG di Perusahaan, terutama yang berkenaan dengan penerapan prinsip transparansi dan tanggung jawab.

Sekretaris Perusahaan wajib memastikan ketersediaan informasi yang akurat, jelas, dan terbaru, serta mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan agar Perusahaan dapat senantiasa mematuhi.

The Corporate Secretary manages the Company's communications with external parties as well as ensuring the successful implementation of GCG within the Company, especially as regards transparency and responsibility.

The Corporate Secretary has the obligation to ensure the availability of accurate, clear and up-to-date information, and to stay abreast of the relevant laws and regulations so that the Company maintains its regulatory compliance.

Profil Sekretaris Perusahaan



Nastantio W. Hadi

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, usia 51 tahun, berdomisili di Jakarta. Ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan oleh Direksi pada 29 Desember 2011, yang diperkuat dengan Surat No. S.2016.153/IV/IIF tanggal 7 April 2016. Lulus dengan gelar Sarjana Hukum di bidang Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta (1993) dan gelar *Lex Legibus Master* (LL.M.) di bidang *International Business Law* dari Washington College of Law – the American University, Washington DC, AS (1996). Sebelum bergabung dengan IIF, pernah bekerja di firma hukum Hadi Suwito & Soerjono Soekanto (1993–1994), Soewito Suhardiman Eddymurthy & Kardono (1996–2000) dan Pradjoto & Associates (2000–2005). Selanjutnya, mengepalai divisi hukum dari suatu perusahaan penyedia jasa logistik. Hingga saat ini, tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan manapun.

Profile of the Corporate Secretary

An Indonesian citizen, 51 years old, domiciled in Jakarta. Appointed as the Corporate Secretary by the BoD on 29 December 2011, as affirmed by the Letter No. S.2016.153/IV/IIF dated 7 April 2016. Graduated with a bachelor's degree in Civil Law from the Faculty of Law, Trisakti University, Jakarta (1993) and a *Lex Legibus Master* (LL.M.) degree in *International Business Law* from Washington College of Law – the American University, Washington DC, USA (1996). Prior to joining IIF, he worked at the legal firms Hadi Suwito & Soerjono Soekanto (1993–1994), Soewito Suhardiman Eddymurthy & Kardono (1996–2000) and Pradjoto & Associates (2000–2005). Afterwards, he headed the legal division of a logistics company. Currently he does not hold concurrent positions in other companies.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan IIF meliputi:

1. Memastikan kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik;
2. Mengelola hubungan dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan;
3. Melakukan fungsi legal dan konsultan legal terutama menyangkut hal-hal yang terkait dengan permasalahan Perusahaan;

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary of IIF include:

1. To ensure compliance with GCG principles;
2. To professionally manage the Company's relationship with Shareholders and Stakeholders;
3. To perform legal functions and act as a legal consultant, particularly on matters related to issues faced by the Company;

- Memastikan ketersediaan laporan-laporan, antara lain Laporan Manajemen Risiko, Laporan Kinerja Sosial dan Lingkungan dan Laporan Uji Tuntas, sesuai dengan Pedoman Operasional Perusahaan, Kesepakatan Pemegang Saham, dan/atau hukum dan regulasi yang berlaku.

Kegiatan Sekretaris Perusahaan

Di tahun 2020, Sekretaris Perusahaan memenuhi tugas dan kewajibannya secara umum, termasuk menjadi notulen rapat Dewan Komisaris dan Direksi, merilis informasi terkini mengenai kondisi Perusahaan, merumuskan pesan yang akan disampaikan oleh Direksi kepada pihak internal maupun eksternal, serta memastikan kelancaran komunikasi dengan otoritas, pemegang saham, mitra kerja, dan masyarakat.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

- To ensure the availability of reports pertaining to Risk Management, Social & Environmental Performance and Due Diligence reports, pursuant to the Company's Operating Manual, Shareholders' Agreement, and/or prevailing laws and regulations.

Corporate Secretary Activities

In 2020, the Corporate Secretary fulfilled his duties and responsibilities in general, including acting as notary at the meetings conducted by the BoD and the BoC, releasing new information on the state of the Company, formulating messages to be delivered by the BoD to internal and external parties, and ensuring smooth communication with authorities, shareholders, partners, and the community.

Competence Development of the Corporate Secretary

Topik Pelatihan Training Topic	Tanggal Pelatihan Training Date	Penyelenggara Organiser
Sustainability Report Workshop	09 Januari/January 2020	Kriya Komunika
User Training 365 Office	27 Januari/January 2020	IT Team
Enabling Executive & Board Meetings with Microsoft Teams	08 Juni/June 2020	Microsoft
Sustainable Finance Risiko dan Regulasi	29 Juni/June 2020	Garda Learning
Talking to your Boss When They're Wrong	01 Juli/July 2020	Dunamis
Effective Virtual Presentation: Better Inform, Influence and Persuade Others	08 Juli/July 2020	Dunamis
The Long Road to Recovery	16 Juli/July 2020	The World Bank
Implementasi Keuangan Berkelanjutan Pasca Pandemi Covid-19	22 Juli/July 2020	LPPI
SDG Indonesia One Sharing Session	03 Agustus/August 2020	SMI and IIF
Sharing Session on Macro-Economic Session with Bapak M. Chatib Basri	19 Agustus/August 2020	IIF
Sharing Session: Limited Concession Scheme: A closer Look in Infrastructure Financing	28 Agustus/August 2020	Ginting and Reksodiputro
Marketing Communication	28 Agustus/August 2020	Unilever
IIF Graphic Standard Manual & Application Socialization	14 September/September 2020	IIF Corsec Team
Webinar: Lead Motivate Virtual Teams	29 September/September 2020	SMBC
The Mindfulness Program	06 Oktober/October 2020	SMBC
Officiency Virtual Training	21 Oktober/October 2020	SMBC
Excellent Communication and Public Speaking	04 November/November 2020	Talkinc
Omnibus Law Sharing Session	18 November/November 2020	AHP
Finalist Photo Competition Presentation	04 Desember/December 2020	IIF
Operational Risk and PIP Socialization	10 Desember/December 2020	IIF

Audit Internal

Internal Audit

Satuan Audit Internal adalah unit independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, melalui Komite Audit. Melayani kebutuhan Manajemen, Audit Internal merupakan penilai independen atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dan kualitas kinerja. Fungsi penjamin pengendalian secara sistematis mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas manajemen risiko, proses pengendalian dan tata kelola, sehingga Manajemen dapat mencapai target usaha dan memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Saham dengan lebih efektif.

Pembentukan Audit Internal di IIF mengacu pada ketentuan POJK No. 56/POJK.04/2015.

Kriteria Auditor Internal

Auditor internal IIF harus memiliki kualifikasi di bawah ini:

- Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam melaksanakan tugasnya;
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif;
- Memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Ikatan Auditor Internal;
- Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
- Bersikap objektif dalam melaksanakan tugas dan menghasilkan penilaian yang objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Struktur Kedudukan Audit Internal

Satuan Audit Internal dipimpin oleh Kepala Audit Internal, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kepala Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan wajib menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Ketua Komite Audit.

Kepala Audit Internal juga bertanggung jawab atas pengembangan, pengkajian, dan modifikasi kebijakan audit, prosedur, dan pelaksanaan audit. Setiap pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Kepala Unit Audit Internal dilaporkan ke OJK.

The Internal Audit Unit is an independent unit reporting directly to the President Director and the BoC through the Audit Committee. Serving the Management, the Internal Audit Unit acts as an independent evaluator of the adequacy and effectiveness of the Company's internal control systems and performance quality. This assurance function systematically evaluates and improves the effectiveness of risk management, control, and governance processes, thereby allowing management to better attain corporate objectives and fulfill their obligations to the Company's Shareholders.

The establishment of IIF's Internal Audit Unit complied with POJK No. 56/POJK.04/2015.

Criteria for Internal Auditors

IIF's internal auditors must possess the following qualifications:

- Integrity along with professionalism, independence, honesty, and objectivity in carrying out their duties;
- Knowledgeable and experienced in the technical aspects of auditing and other relevant disciplines;
- Excellent communication skills, both verbal and written;
- Compliance with professional standards issued by the Association of Internal Auditors;
- Ability to maintain confidentiality of information and/or corporate data related to the implementation of the duties and responsibilities of an Internal Auditor, except when disclosure is legally required or requested through court order;
- A solid understanding of good corporate governance principles and risk management; and
- Objectivity in implementing their duties and the ability to provide objective evaluations based on actual conditions.

Structural Position of the Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit is chaired by a Head of Internal Audit, who is appointed and dismissed by the President Director with approval of the BoC. The Head of Internal Audit reports directly to the President Director and is obliged to submit internal audit reports to the President Director and the BoC through the Head of the Audit Committee.

The Head of Internal Audit is also responsible for developing, reviewing, and modifying audit policies, procedures, and performance. Any appointment, replacement, and termination of the Head of Internal Audit Unit is immediately reported to OJK.

Kualifikasi dan Sertifikasi Auditor Internal

Auditor internal IIF memiliki latar belakang serta kualifikasi profesi yang relevan terkait dengan tugas-tugasnya. IIF senantiasa memfasilitasi mereka untuk meningkatkan kemampuan dengan mengikutsertakan mereka pada beragam sertifikasi profesi di bidang Audit Internal.

Per 31 Desember 2020, Unit Audit Internal beranggotakan 3 orang, yang terdiri dari Kepala Audit Internal dan 2 Anggota Audit Internal. Berikut daftar auditor internal IIF beserta kualifikasi dan sertifikasi mereka:

Qualifications and Certifications of Internal Auditors

All of IIF's internal auditors possess the relevant professional backgrounds and qualifications as required by their duties in the Company. IIF continuously improves the capabilities of its internal auditors by facilitating their participation in various certification programmes.

As of 31 December 2020, the Internal Audit Unit consisted of 3 people, including the Head of Internal Audit and 2 Members of Internal Audit. Below is the list of IIF's internal auditors and their qualifications and certifications:

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi dan Pelatihan yang Diikuti Certifications and Trainings	Penyelenggara Organiser	Keterangan Description
Yudi Adrial	Kepala Audit Internal Head of Internal Audit	Certified Assessor	Institute of Internal Auditor (IIA)	Sertifikasi Certification
		Certified Internal Auditor	IIA	
		User Training 365 Office	IT Team	Pelatihan Training
		SDG Indonesia One Sharing Session	PT SMI & IIF	
		Sharing Session on Macro Economic with Bapak M Chatib Basri	IIF	
		IIF Graphic Standard Manual & Application Socialization	IIF Corporate Secretary Team	
		Lead Motivate Virtual Teams	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	
		Scenario Analysis for Top Management	Pusat Pengembangan Akuntansi FEB UI	
		CRMA Review	IIAI	
		New Sector Socialization	Product Specialist IIF	
		Internal Audit Master Program	IFC	
		National Conference Auditor 2020	IIAI	
Rama Aditia	Staf Audit Internal Staff of Internal Audit	Sustainability Report Workshop	Kriya Komunika	Pelatihan Training
		CIA Coaching Clinic Part 2	IIAI	
		SDG Indonesia One Sharing Session	PT SMI & IIF	
		Sharing Session Macro Economic with Bapak M Chatib Basri	IIF	
		English Business Course	English First	
		IIF Graphic Standard Manual & Application Socialization	IIF Corporate Secretary	
		The Mindfulness Program	SMBC	
		Efficiency Virtual Training	SMBC	

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi dan Pelatihan yang Diikuti Certifications and Trainings	Penyelenggara Organiser	Keterangan Description
Rima Haryati	Staf Audit Internal Staff of Internal Audit	New Sector Socialization	Product Specialist IIF	Pelatihan Training
		AML & Anti Fraud	GRAJOSA	
		Operational Risk and PIP Socialization	IIF	
		User Training 365 Office	IIF IT Team	
		CIA Coaching Clinic Part 2	IIAI	
		Suitanable Finance – Risk and Regulation	GARDA Learning	
		Professional PSAK	IAI	
		English Business Course	English First	
		Auditing Financial Soundness for Risk Mitigation	IIA	
		iif Graphic Standard Manual & Application Socialization	IIF Corporate Secretary Team	
		The Mindfulness Program	SMBC	
		AML and Anti Fraud	GRAJOSA	

Profil Kepala Audit Internal

Profile of the Head of Internal Audit



Yudi Adrial

Kepala Audit Internal
Head of Internal Audit

Warga Negara Indonesia, usia 42 tahun. Ditunjuk sebagai Kepala Audit Internal oleh Direksi berdasarkan Surat Penunjukan No. Ref. 017/IIF-HRD/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris No. 001/IIF/BoC-RES/IV/2016 tanggal 21 April 2016. Memegang gelar sarjana dari Universitas Indonesia, beliau telah berpengalaman selama 19 tahun di bidang konsultan manajemen dan lembaga keuangan. Pengalaman auditnya meliputi 6 tahun sebagai konsultan di Ernst & Young dan sebagai Kepala Unit Kepatuhan di PT NISP Sekuritas selama 2 tahun. Memegang sertifikat *Certified Internal Auditor* (CIA) dari Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia.

Indonesian citizen, 42 years old. Appointed as the Head of Internal Audit by the BoD based on the Letter of Appointment No. Ref. 017/IIF-HRD/III/2012 dated 30 March 2012 and approved by the BoC through the Circular Resolution of the BoC No. 001/IIF/BoC-RES/IV/2016 dated 21 April 2016. Received his bachelor's degree from the University of Indonesia and has 19 years of experience in management and financial consulting. His audit experience includes 6 years as a consultant at Ernst & Young and 2 years as the Head of Compliance Unit at PT NISP Sekuritas. He is a Certified Internal Auditor (CIA) accredited by the Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia.

Piagam Kerja Audit Internal

Piagam Kerja Audit Internal menjabarkan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab Audit Internal. Piagam ini menetapkan posisi Audit Internal di dalam organisasi, memberi wewenang untuk mendapatkan berbagai catatan, memasuki berbagai bangunan fisik yang relevan dengan kinerja, dan menguraikan lingkup kerja. Piagam ini telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Presiden Komisaris dan Presiden Direktur pada 28 November 2012.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Tanggung jawab Audit Internal sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Internal, yaitu:

- Mengembangkan rencana audit tahunan yang fleksibel menggunakan metodologi berbasis risiko yang tepat, termasuk risiko atau masalah kontrol yang diidentifikasi oleh Manajemen dan menyampaikan rencana itu kepada Komite Audit untuk ditelaah dan disetujui serta diperbarui secara periodik;
- Melaksanakan rencana kerja audit tahunan yang disetujui, termasuk di dalamnya tugas-tugas khusus atau proyek yang diminta langsung oleh Manajemen dan Komite Audit;
- Menilai efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- Melakukan audit kepatuhan terhadap peraturan dan hukum terkait;
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan status penyelesaian atas tindak lanjut yang direkomendasikan;
- Mengaudit dan menginformasikan secara berkesinambungan kepada Komite Audit mengenai tren dan praktik terbaik di bidang Audit Internal;
- Membantu penyelidikan kasus signifikan yang diduga penipuan di dalam Perusahaan dan memberitahukan hasil dari penyelidikan tersebut kepada Komite Audit dan Manajemen; dan
- Mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan auditor eksternal dan regulator untuk menyediakan cakupan audit yang optimal kepada Perusahaan dengan biaya wajar.

Kegiatan Audit Internal

Di tahun 2020, Unit Audit Internal melakukan tugas pemeriksaan dan kegiatan konsultasi berikut:

1. Melakukan audit atas area-area *Human Resources & General Affairs Management* dan *Credit Risk Management*.
2. Secara berkala dan dalam batas tertentu melakukan tinjauan atas laporan keuangan dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Internal Audit Charter

The Internal Audit Unit Charter defines the purpose, authority, and responsibility of the Internal Audit Unit. The Charter affirms the position of the Internal Audit Unit within the organisation, authorises it to obtain various records, to enter premises relevant to its duties, and defines the unit's scope of work. The Internal Audit Charter was signed by the President Commissioner and President Director on 28 November 2012.

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit

As stipulated in its Charter, the responsibilities of the Internal Audit Unit are:

- To develop adaptable annual audit plans using appropriate risk-based methodologies, which cover any risk or control issues identified by the management, and to submit the plan to the Audit Committee for further review and approval as well as periodical renewal;
- To carry out approved annual audit plans, including specialised tasks or projects requested by the Management and Audit Committee;
- To evaluate the efficiency and effectiveness of activities in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and others;
- To perform audits on the Company's compliance with prevailing rules and regulations;
- To monitor, analyse, and report follow-up actions based on recommendations made;
- Perform audits on trends and best practices for Internal Audit work and keep the Audit Committee abreast of such information;
- To provide assistance in investigations when fraudulent activities are suspected to have occurred within the Company and submit the results of these investigations to the management and the Audit Committee; and
- To consider and determine the scope of audit work to be performed by external auditors and regulators in order to provide optimal auditing coverage at a reasonable cost.

Internal Audit Activities

In 2020, the Internal Audit Unit performed audit duties and consultation activities as follows:

1. Performing audit in the areas of Human Resources & General Affairs Management and Credit Risk Management.
2. Periodically and within certain limits performing review on financial statements to ensure compliance with the prevailing regulations.

3. Melakukan *review* atas pembaharuan *Standard Operating Procedures* (SOP) Perusahaan untuk memastikan kesesuaian alur proses dan aktivitas kerja dimasing-masing unit kerja, serta menilai kecukupan atas desain pengendalian internal perusahaan.
 4. Melakukan performance review atas follow up rekomendasi audit atas area – area sebagai berikut:
 - i. *Procurement Management*;
 - ii. *Treasury & Treasury Operation Management*; dan
 - iii. *Advisory Management*.
 5. Melakukan pendampingan untuk pihak-pihak eksternal, yakni:
 - i. Pendampingan untuk Penugasan Audit Laporan Keuangan yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja;
 - ii. Pendampingan untuk penugasan audit yang dilakukan oleh tim World Bank; dan
 - iii. Pendampingan untuk penugasan audit yang dilakukan oleh ADB.
3. Performing review on update of the Company's Standard Operating Procedures (SOP) to ensure compliance of workflow and activities in each work unit and to assess the adequacy of the Company's internal control design.
 4. Performance review of the follow-up audit recommendations for the following areas ;
 - i. Procurement Management;
 - ii. Treasury & Treasury Operation Management; and
 - iii. Advisory Management
 5. Supervising external parties as follows:
 - i. Supervising Financial Statements Audit Assignment performed by KAP Purwantono, Sungkoro & Surja;
 - ii. Supervising audit assignment performed by World Bank team; and
 - iii. Supervising audit assignment performed by ADB.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Penerapan Sistem Pengendalian Internal secara efektif membantu Perusahaan dalam menjaga aset, menjamin tersedianya informasi dan laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

IIF telah membangun proses, struktur, dan sistem pengendalian internal yang dapat memberikan kepastian yang memadai bahwa:

- i. Operasional Perusahaan telah dilakukan dengan efektif dan efisien;
- ii. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi; dan
- iii. Sistem pelaporan keuangan dapat diandalkan.

Keselarasan dengan Kerangka Internasional

Sistem pengendalian internal di IIF dibangun dari penerapan kerangka pengendalian internal yang selaras dengan praktik terbaik dalam lingkup internasional. Elemen utamanya mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan.

The implementation of an Internal Control System has effectively helped the Company maintain its assets, ensure the availability of accurate information and reports, improve the Company's compliance with applicable laws and regulations, and mitigate loss risk, deviation, and violation of prudence principles.

IIF has established processes, structures, and internal control systems to properly assure that:

- i. The Company's Operations have been conducted effectively and efficiently;
- ii. The laws and regulations in force have been obeyed; and
- iii. The Financial reporting system is reliable.

Conformity with International Framework

IIF's internal control system is built by applying the internal control framework that conforms with internationally-recognised best practices. The system's key elements are controlling environment, risk assessment, controlling activities, information and communications, and monitoring activities.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab menyusun dan memutakhirkan kebijakan pengendalian internal di lingkungan IIF, dan bersama dengan unit Audit Internal memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Dari hasil pemantauan dan pengawasan tersebut, secara keseluruhan untuk tahun 2020 Sistem Pengendalian Internal IIF dinilai telah berjalan efektif dan memadai.

Effectiveness of Internal Control System Overview

The BoD is responsible for developing and updating the internal control policy in IIF's environment and together with the Internal Audit unit, the BoD monitors and oversees the implementation of said policies. Based on the results of these activities, the overall internal control system in IIF is deemed as having performed effectively and adequately in 2020.

Audit Eksternal

External Audit

Auditor Eksternal ditunjuk melalui rekomendasi Komite Audit yang disampaikan ke Dewan Komisaris untuk kemudian disetujui dalam forum RUPS.

Berdasarkan hasil keputusan RUPST 2020, IIF menunjuk KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) untuk mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Selain mengaudit Laporan Keuangan tahun 2020, auditor eksternal juga memberikan jasa *review* atas Laporan Kinerja IIF dan jasa *review* terbatas untuk periode September 2020 terkait atas penerbitan *Global Bonds* Perseroan.

Biaya jasa auditor eksternal untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp1,6 miliar (pembulatan).

Riwayat penunjukan auditor eksternal IIF dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

External Auditors are appointed based on recommendations from the Audit Committee and submitted directly to the BoC to be approved in the GMS.

Based on 2020 AGMS resolution, IIF appointed the public accounting firm of Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) to audit the Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2020.

Aside from auditing the 2020 Financial Statements, the external auditor conducted a review of IIF's performance report and limited review for the September 2020 period regarding the issuance of the Company's Global Bonds.

The external auditor's service fees in 2020 amounted to Rp1.6 billion (rounded).

The external auditors employed by IIF in the last 5 years were as follows:

Tahun Year	Auditor Eksternal External Auditor
2016	Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)
2017	Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)
2018	Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)
2019	Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)
2020	Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)

Manajemen Risiko

Risk Management

Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko diterapkan untuk memastikan bahwa bisnis IIF dapat berlangsung secara berkelanjutan. Risiko dikelola sedemikian hingga keseimbangan antara aspek imbal hasil, risiko, dan modal yang dimiliki IIF dapat tercapai dan terjaga.

IIF menerapkan kerangka manajemen risiko secara terpadu di seluruh aspek operasionalnya, dan terus meningkatkan proses manajemen risiko sebagai bagian dari rencana strategisnya dalam mengakomodasi strategi pertumbuhan bisnisnya.

Kerangka manajemen risiko IIF terdiri dari:

1. Kebijakan manajemen risiko yang komprehensif untuk sejumlah risiko utama yang dihadapi IIF;
2. Struktur organisasi yang tepat dengan definisi peran dan tanggung jawab yang jelas di berbagai tingkatan;
3. Proses manajemen risiko yang memadai (termasuk identifikasi risiko, metodologi penilaian dan pengukurannya, serta pendekatan mitigasi risiko), proses pemantauan risiko dan pengendalian; dan
4. Infrastruktur pendukung, yakni sistem TI dan SDM.

Pengelolaan risiko di IIF bersifat menyeluruh atas setiap aktivitas usahanya. Kegiatan ini dilakukan di bawah koordinasi Direktorat Manajemen Risiko yang dipimpin oleh *Chief Risk Officer* (CRO) dengan fungsi-fungsi di bawahnya.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, IIF menerapkan prinsip tiga lini pertahanan (*three lines of defense*) yang terdiri dari unit bisnis sebagai pengambil keputusan, unit manajemen risiko sebagai pelapis kedua, dan unit audit internal sebagai lapisan terakhir. Sejumlah komite telah dibentuk pada tingkat Direksi dan Dewan Komisaris, untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pengelolaan risiko dan inisiatif bisnis, pengambilan keputusan, hingga pengawasan. Strategi ini secara keseluruhan adalah bagian dari konsep *four eyes principle* dan pembagian tugas yang secara konsisten diterapkan dalam komitmen IIF untuk tumbuh secara optimal.

Penerapan Manajemen Risiko di 2020

Risiko utama yang IIF hadapi di 2020 berkaitan dengan dampak-dampak dari pandemi Covid-19 yang berlangsung sepanjang tahun, beserta dampak-dampak sejumlah inisiatif dan upaya yang ditempuh oleh pemerintah dan masyarakat di Indonesia untuk membatasi penyebaran

Risk Management System

The risk management system is implemented to maintain IIF's business sustainability. Risks are managed in ways that allow the attainment of a balance between IIF's returns, risks, and capital.

IIF implements an integrated risk management framework and continues to improve the risk management process as part of its strategic plan to accommodate its business growth strategies.

IIF's risk management framework consists of:

1. Comprehensive risk management policies for major risks encountered by IIF;
2. Appropriate organisational structure with clear definition of roles and responsibilities at various levels;
3. Adequate risk management process (including risk identification, assessment and measurement methods and risk mitigation approaches), risk monitoring and control processes; and
4. Supporting infrastructure, i.e., IT system and human resources.

IIF comprehensively manages risk in each business activities under the coordination of the Directorate of Risk Management led by the Chief Risk Officer (CRO), with the assistance of subordinates performing various functions.

To build an effective and efficient risk management capabilities within the Company, IIF adopts the three lines of defense approach, consisting of business unit as the decision maker, risk management unit as the second layer, and internal audit unit as the final line of defense. Several committees have been established at the BoD and BoC levels to be involved in various aspects of business, including risk management, business initiatives and decision making to supervision. This strategy is part of the four eyes principle concept and the division of duties applied consistently as a form of commitment to achieving an optimal business development.

Risk Management Implementation in 2020

The main risks faced by IIF in 2020 were related to the consequences of the Covid-19 pandemic which prolonged throughout the year as movements and activities, including business operations, are partially restricted in order to prevent massive and widespread transmission.

Covid-19. Dampak-dampak yang paling signifikan berupa terhambatnya aktivitas ekonomi dan investasi dalam proyek-proyek infrastruktur, termasuk keterlambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, serta kesulitan yang dialami oleh banyak pelaku usaha di hampir seluruh sektor, khususnya transportasi, pariwisata, manufaktur, dan UKM, dalam memenuhi kewajiban finansial mereka kepada kreditur ataupun pemegang saham.

Covid-19 merupakan suatu fenomena langka yang membutuhkan penanganan secara terpadu, cepat, dan tepat dari pemerintah dan semua pihak yang berwenang untuk mencari solusinya. Berbagai langkah termasuk pengendalian nilai tukar dan penurunan suku bunga oleh BI dan paket stimulus, jaring pengaman sosial dan hibah, insentif dan dana pendukung untuk aspek-aspek terkait kesehatan, telah dijalankan sejak awal pandemi untuk mencegah penurunan tingkat kepercayaan lebih lanjut dan kemunduran ekonomi yang lebih parah. Di antara langkah-langkah yang telah dilakukan, salah satu yang dilaksanakan oleh dan secara langsung membantu IIF adalah program restrukturisasi kredit yang dimulai melalui Peraturan OJK No. 14 Tahun 2020. OJK sebagai otoritas di bidang keuangan telah melakukan upaya maksimal untuk membendung pemburukan kondisi keuangan di pasar dengan meluncurkan skema restrukturisasi utang yang melibatkan lembaga keuangan, yang mencakup bank dan perusahaan pembiayaan, termasuk IIF. Melalui program ini, debitur-debitur yang usahanya mengalami kesulitan atau kontraksi akibat Covid-19 mendapatkan kelonggaran dalam pelunasan utang mereka sehingga likuiditas mereka dapat terjaga. Ini dilakukan tanpa mengganggu keberlangsungan bisnis dan kualitas/klasifikasi aset mereka. Per akhir 2020, IIF menyetujui tujuh klien yang memenuhi syarat untuk menerima restrukturisasi utangnya dalam skema ini.

Secara bersamaan, IIF mengikuti langkah restrukturisasi sebagaimana diatur oleh OJK, sekaligus secara internal melakukan pengelolaan risiko yang dititikberatkan pada pencegahan peningkatan risiko utama. Secara konkret, ini diwujudkan melalui uji ketahanan (*stress test*) terhadap portofolio IIF (dilakukan tiga kali di 2020 di tengah ketidakpastian dan perkembangan dampak pandemi yang begitu cepat). Melalui pengujian tersebut, IIF menggunakan berbagai asumsi terkait laju pertumbuhan ekonomi, suku bunga, nilai tukar, laju inflasi, dll. untuk membuat simulasi pertumbuhan bisnis setiap kliennya, untuk mengantisipasi pemburukan kualitas profil utang masing-masing. Dengan demikian, IIF dapat mempersiapkan kondisi keuangannya sebaik mungkin dan mengambil langkah antisipatif yang diperlukan sedini mungkin. Di tahun 2020, asumsi yang digunakan dalam tiga kali uji ketahanan tersebut menghasilkan skenario yang hingga akhir tahun 2020 telah dapat diantisipasi oleh IIF secara optimal.

The most significant impact was the adverse economic downturn which hampered investment activities in infrastructure projects, including delays in project planning and implementation, as well as the difficulties experienced by most businesses, especially in transportation, tourism, manufacturing and SME sectors, in fulfilling their financial obligations to creditors or shareholders.

Covid-19 is a rare phenomenon that demands the government and all relevant authorities to mount concerted, swift, and effective response to find mitigations and solutions. Various measures including exchange rate control and reduced interest rate policy by BI and stimulus package, social safety net and grants, incentives and support funds for health-related aspects have all been introduced since the emergence of the outbreak to pre-empt further decline in confidence and deeper economic downturn. Among the measures introduced, one that was implemented by and directly helped IIF is the credit restructuring program commenced through the OJK Regulation No. 14/2020. OJK as the authority in the financial sector has deployed an optimum effort to allay the deterioration of the financial markets by launching this program through the provision of debt restructuring scheme involving financial institutions, which include banks and finance companies such as IIF. The program allows debtors whose businesses were proven to have experienced difficulties or contraction specifically due to Covid-19 to apply for a temporary relief regarding their obligation to repay their debts to ensure that their liquidity can be maintained. This shall be done without jeopardizing going concerns aspect and their asset quality/classifications. At the end of 2020, IIF approved seven accounts that fit to have their debt restructured under this scheme.

Simultaneously, IIF undertook a more vigilant risk management approach that was focused on preventing any noticeable increases in major risks. In concrete steps, this was done via several initiatives such as stress tests on IIF's portfolio (three stress tests were performed in 2020 given the uncertainty and fluid development of the impact of the pandemic). Through these tests, IIF used various assumptions related to economic growth rates, interest rates, exchange rates, inflation rates, etc. to simulate the business growth of each client, to eventually anticipate any deterioration of the quality of each client's debt profile. Thus, IIF could prepare its financial condition as best as possible and take the necessary anticipatory steps as early as possible. In 2020, IIF conducted three such stress tests, and the assumptions used in these tests had resulted in a scenario that up to the end of 2020 had been well and optimally anticipated by IIF.

Upaya ini turut didukung dengan pengembangan sistem peringatan dini (*early alert*), yang membantu IIF mengidentifikasi klien-klien yang berpotensi mengalami pemburukan profil kredit dengan cepat, dan dengan demikian perlu segera dimitigasi. Untuk memperlancar proses ini, IIF perlu memahami secara mendalam dinamika yang terjadi di masing-masing sektor industri di mana klien-klien IIF beroperasi, sekaligus mengidentifikasi sensitivitas setiap klien terhadap perubahan yang telah dan mungkin terjadi. Sistem peringatan dini ini dikembangkan berdasarkan praktik terbaik yang berlaku internasional.

Jenis Risiko dan Cara Pengelolannya

IIF menghadapi beberapa jenis risiko utama, yakni:

1. Risiko Kredit dan Pembiayaan

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati, termasuk risiko pembiayaan akibat ketidakmampuan IIF dalam mendapatkan pengembalian investasi yang layak dari pembiayaan langsung (penyertaan ekuitas) pada perusahaan nasabah.

Langkah pengelolaan risiko ini antara lain:

- Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dan investasi, peran aktif Komite Investasi terkait dalam melakukan penilaian atas setiap pengajuan pembiayaan dan investasi, sehingga dapat diperoleh pandangan berimbang, komprehensif, independen, dan menyeluruh atas potensi risiko yang dihadapi.
- Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko, antara lain pengaturan alur kerja proses pengelolaan kredit dan investasi sehingga tercipta proses kredit yang efektif dan efisien.
- Penerapan sistem pemeringkatan risiko yang memungkinkan IIF mengukur tingkat risiko dan menganalisis kelayakan debitur dan/atau proyek infrastruktur dengan menggunakan perangkat pengukuran yang konsisten, baik untuk modalitas pembiayaan korporasi maupun pembiayaan proyek.
- Pemantauan secara periodik terhadap portofolio pembiayaan untuk memastikan kualitas kredit yang baik, termasuk *early warning indicator* untuk mendeteksi perubahan kualitas kredit sejak dini sehingga upaya mitigasi dapat dilakukan sedini mungkin. Jika terjadi penurunan kualitas kredit secara signifikan, maka pemantauan lebih intensif dilakukan oleh Direktorat Investasi bekerja sama dengan Direktorat Risiko Kredit, yang dapat melakukan tindakan pemulihan sebagaimana dianggap perlu.

Such initiative was further supported by the development of an early alert system, which helped IIF to quickly identify clients who might show a deterioration in their credit profile, and thus might need to be immediately mitigated before it gets problematic. To streamline this process, IIF had to understand in depth the dynamics that occurred in each industrial sector where IIF clients operate, as well as identify the sensitivity of each client to changes that have occurred and may occur. This early warning system was developed based on international best practices.

Risk Profile and Mitigation Measures

In its business, IIF faces a number of key risks, i.e.:

1. Credit and Financing Risk

Credit risk is the risk that occurs due to the failure of the counterparty to fulfill its obligations based on financing agreement, including financing risk due to IIF's inability to acquire proper investment return from direct financing (equity participation) in the customer's business.

This risk is mitigated by measures that include:

- The implementation of the principle of prudence in the provision of financing and investing and an active role of the Investment Committee in evaluating each application for these activities. This is done to ensure that IIF acquires a balanced, comprehensive, independent, and thorough overview of encountered potential risks.
- Improvement of risk management procedures and systems, including workflow arrangements between credit risk management, financing, and investing activities, to create an effective and efficient credit initiation process.
- Implementation of risk rating system that allows IIF to measure the level of risk and analyse the feasibility of debtors and/or infrastructure projects using consistent measurement tools, both for corporate financing and project financing.
- Periodic monitoring on the financing portfolio to ensure good credit quality, including an improvement and formalization of early alert system to provide warning indicator in detecting changes in credit quality thus mitigations can be introduced at an early stage. If a major deterioration in credit quality occurs, more intensive monitoring will be carried out by Investment Directorate in cooperation with Credit Risk which may lead to performing recovery actions if deemed necessary.

- e. Penerapan berbagai langkah uji kelayakan proyek (terkait aspek teknis, legal, finansial, dan S&E), ketentuan, syarat dan pra-syarat serta janji-janji (*covenants*) yang harus dipenuhi oleh peminjam yang dievaluasi secara berkala oleh IIF, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan terkait garansi dari sponsor, agunan (diutamakan aset tetap), dan asuransi atas aset-aset tetap yang dijaminan kepada IIF.
- f. Pengembangan basis data secara terintegrasi untuk mendukung pemantauan pasca-persetujuan secara tepat waktu (antara lain perjanjian finansial dan non-finansial yang harus dipenuhi dalam waktu tertentu) yang dibagi di antara risiko kredit, investasi, dan operasi kredit.
- g. Pemantauan portofolio pembiayaan dengan *portfolio monitoring* dan uji ketahanan secara berkala, serta valuasi internal untuk investasi perusahaan yang dilakukan dari waktu ke waktu apabila nilai pasar tidak tersedia.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari perubahan faktor-faktor pasar yang dapat merugikan IIF, dalam hal ini nilai tukar mata uang atau suku bunga.

Langkah pengelolaan risiko ini antara lain:

- a. Penetapan strategi investasi yang terukur dan terencana dalam parameter yang dapat diterima dengan mengoptimalkan tingkat pengembalian terhadap risiko pasar. Pemantauan dan evaluasi berkala dilakukan atas strategi pembiayaan dan investasi untuk memastikan sesuai dengan kebijakan, batasan dan target yang telah ditetapkan.
- b. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) melakukan pemantauan secara berkala atas pergerakan indikator-indikator pasar, baik domestik maupun global. Kajian dilakukan atas dampak yang dapat ditimbulkan dari pergerakan indikator-indikator pasar tersebut terhadap kinerja IIF, termasuk kajian akan risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar mata uang.
- c. Terkait risiko nilai tukar, IIF sedapat mungkin menyesuaikan antara pembiayaan dan pendanaan dalam valuta yang sama, sehingga tercipta *natural hedge*. Selain itu, IIF menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko valuta asing, di antaranya dengan menjaga keseimbangan antara jumlah aset dan liabilitas dalam valuta asing pada tingkat posisi devisa neto yang terjaga rendah, yang rasionya harus dijaga di bawah 5% dari total modal. Jika terdapat peningkatan risiko nilai tukar, transaksi lindung nilai (*hedging*) atas eksposur terhadap nilai tukar tertentu akan dilakukan.

- e. Implementation of various due diligence in verifying project's viability (in technical, legal, financial, and S&E aspects), provisions, conditions and prerequisites, covenants and undertakings that must be fulfilled and followed by creditors that are regularly evaluated by IIF, including but not limited to provisions for sponsor's guarantee, collaterals (preferably fixed assets) and insuring the respective fixed assets pledged.
- f. Integrated database development to support post-approval monitoring on timely basis (e.g. financial and non-financial covenants that need to be fulfilled in due course) that is shared between credit risk, investment and credit operations.
- g. Monitoring the financing portfolio with portfolio monitoring and stress testing on a regular basis, including internal valuations carried out from time to time for equity investments if market values are not available.

2. Market Risk

Market risk is the risk arising from changes in market factors that may harm IIF, in this case exchange rates or interest rates.

This risk is mitigated by measures that include:

- a. Determination of measured and planned investment strategies within acceptable parameters by optimising the rate of return on market risk. Periodic monitoring and evaluation is executed on financing and investment strategies to ensure compliance with policies, limits, and targets that have been set.
- b. The Asset and Liability Committee (ALCO), conducts regular monitoring on market indicators movement, both domestic and global. The study is conducted on the impact resulting from the movement of these market indicators towards IIF's performance, including the study of interest rate risk and exchange rate risk.
- c. Regarding exchange rate risk, IIF adjusts as much as possible between financing and funding in the same currency, to create a natural hedge. In addition, IIF applies the principle of prudence in managing foreign exchange risk, including maintaining the balance between the amount of assets and liabilities in foreign currencies at a low level of net open foreign exchange position, which ratio must be maintained at below 5% of total capital. If there is an increased foreign exchange risk, hedging transactions will be conducted on exposures against certain exchange rates.

- d. Terhadap aset yang sensitif dengan pergerakan suku bunga seperti pinjaman, IIF secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga yang diberikan, memantau biaya dana dengan memperhatikan tingkat risiko dan imbal hasil yang optimal. IIF juga melakukan analisis sensitivitas terhadap proyek-proyek yang dibiayai terhadap kenaikan tingkat suku bunga sebagai bagian dari proses evaluasi kredit. Hasil dari pemantauan dan evaluasi pasar digunakan untuk mendukung kebijakan *Base Lending Rates* yang disusun oleh ALCO setiap triwulannya. Kebijakan ini akan dipertahankan sebagai dasar dalam *loan pricing*.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul dari ketidakmampuan IIF untuk mendapatkan dana dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangannya.

Langkah pengelolaan risiko ini antara lain:

- a. Menjaga tingkat minimum likuiditas dan melakukan pengalokasian dana dalam instrumen keuangan yang likuid.
- b. Pemantauan atas pengelolaan likuiditas secara berkala oleh ALCO minimal satu kali dalam satu bulan, termasuk perencanaan kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan investasi.
- c. Penyusunan dan penetapan kebijakan dan prosedur pengelolaan dana yang mengatur tahapan proses perencanaan, eksekusi sampai dengan pemantauan dan pelaporan kepada Komite Aset dan Liabilitas di bawah Direksi.
- d. Ekspansi fasilitas likuiditas jangka pendek untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas yang muncul tiba-tiba dalam bisnis atau operasional perusahaan.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

Langkah pengelolaan risiko ini antara lain:

- a. Penetapan tata cara kerja operasional IIF yang memadai, seperti kebijakan, prosedur, pedoman, ataupun kesepakatan-kesepakatan kerja tertulis.
- b. Peningkatan *risk awareness* seluruh karyawan melalui sosialisasi berkala, penyempurnaan kebijakan dan prosedur secara berkala atau jika diperlukan, serta pengkajian *Business Process Analysis* secara berkesinambungan, termasuk proses *Know Your Customer* (KYC) dalam pemberian kredit.

- d. With respect to assets that are sensitive to interest rate movements such as loans, IIF regularly monitors market developments and adjusts the provided interest rates, monitoring the cost of fund with the optimal level of risk and return. IIF also conducts a sensitivity analysis of projects financed for rising interest rates as part of the credit evaluation process. The result of market monitoring and evaluation is considered as supporting for Base Lending Rates policy which is released by ALCO in quarterly basis. This policy will be preserved as a basis in loan pricing.

3. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk of IIF being unable to obtain funds to meet obligations due from cash flow funding sources and/or from high quality liquid assets without disrupting its activities and financial condition.

This risk is mitigated by measures that include:

- a. Maintaining a minimum level of liquidity and allocating funds in liquid financial instruments.
- b. Regular monitoring of liquidity management by the ALCO at least once a month, including planning for funding needs that are tailored to the needs of financing and investment.
- c. Formulation and determination of funds management policies and procedures governing the stages from the planning, execution to monitoring and reporting to the BoD's ALCO.
- d. Expansion of short-term liquidity facility for anticipating the sudden liquidity needs for company business or operation.

4. Operational Risk

Operational risk is the risk caused by inadequate and/or malfunctioning of internal processes, human errors, system failures, or external problems that affect IIF's business activities.

This risk is mitigated by measures that include:

- a. Determination of adequate operational procedures for IIF such as policies, procedures, guidelines, or written work agreements, and efforts for continuous improvement of policies and procedures on a regular basis or whenever needed.
- b. Increased risk awareness of all employees through periodic dissemination, as well as a continuous review on Business Process Analysis, including on Know Your Customer (KYC) on credit process.

- c. Penyusunan dan penerapan rencana usaha yang berkesinambungan (*Business Continuity Plan*) untuk memastikan bahwa kegiatan operasional IIF tetap berkelanjutan meskipun terjadinya peristiwa gempa bumi, kebakaran, dan lain sebagainya yang mengakibatkan kegiatan operasional tidak dapat dilakukan seperti dalam keadaan normal. IIF juga memiliki sistem komunikasi darurat (*Call Tree System*) dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan terhentinya kegiatan operasional. Sistem ini diterapkan secara berkala untuk memantau efektivitasnya.
- d. Untuk memitigasi risiko kehilangan data dan sistem aplikasi IT yang kritis jika pusat data internal/utama (*primary data centre*) mengalami kerusakan, IIF telah memberlakukan sistem pemulihan bencana (*Disaster Recovery System*) dengan menyewa pusat data eksternal sebagai pencadangan dari pusat data utama untuk menjaga kelangsungan beroperasinya sistem aplikasi IT yang kritis, dan menyusun prosedur pemulihan bencana.
- e. Melakukan mitigasi dengan cara pengalihan risiko kepada pihak asuransi untuk jenis risiko operasional tertentu seperti risiko *fraud* (termasuk penggelapan dan pencurian data), risiko tuntutan dari pihak ketiga kepada Direksi ataupun karyawan, serta kebakaran maupun kejadian alam lainnya.
- f. Pembentukan Komite Pencegahan Pelanggaran dan Kecurangan (FCPC). FCPC membahas dan memutuskan kasus-kasus dugaan penipuan dan korupsi serta tindakan yang akan diambil (seperti investigasi dan eskalasi ke pihak penegak hukum).
- g. Pembentukan kerangka kerja dan *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) untuk unit bisnis dan fungsional yang utama. RCSA akan ditinjau dan dimutakhirkan setiap tahunnya untuk memastikan relevansinya terhadap lingkungan operasi internal dan eksternal yang berlaku.
- h. Terkait risiko TI, IIF kerap melakukan pemeliharaan teknis pada server VPN untuk meningkatkan stabilitas koneksi dan keamanan akses jarak jauh. IIF juga telah mengembangkan *Data Warehouse* awal untuk mengonsolidasikan dan mengintegrasikan berbagai data dari beberapa sistem inti untuk menjaga integritas dan keamanan data serta untuk meningkatkan aksesibilitas, pemanfaatan, dan analisis data.
- i. Terkait pandemi Covid-19, IIF telah melakukan langkah pencegahan berikut:
 - Pembentukan Tim Gugus Tugas Covid-19 untuk memberikan respons segera dan merumuskan solusi/tata kelola untuk mendukung Rencana Keberlangsungan Bisnis IIF;
 - Menyiapkan strategi untuk operasi skala terbatas, yang mencakup kebijakan 100%
- c. Preparation and implementation of Business Continuity Plan to ensure that IIF's operational activities prevail despite the occurrence of earthquakes, fires, and so on, which result in operational activities being unable to be carried out as in normal circumstances. IIF has an emergency communication system (Call Tree System) in the event of cessation of its operational activities. This system is implemented regularly to assess its effectiveness.
- d. To mitigate the risk of data loss and critical IT application systems should the internal/primary data centre become damaged, IIF implements a Disaster Recovery System by renting an external data centre as a back-up from the main data centre to maintain the continuity of the operation of the critical IT application system, and develop disaster recovery procedures.
- e. Mitigation implementation by transferring risk to the insurance party for certain types of operational risk such as property and casualty risks to cover for IIF's assets, financial risk to mitigate financial crime (including fraud, embezzlement, and data theft), risk of claims from third parties to the BoD or employees, as well as insurance against terrorism, fire, and natural events.
- f. Establishment of Fraud and Corruption Prevention Committee (FCPC). FCPC will discuss and decide on suspected fraud and corruption cases and actions to be taken (such as investigation and escalation to law enforcement).
- g. Establishment of the framework and Risk Control Self-Assessment (RCSA) for key business and functional units. RCSA will be reviewed and updated annually to check the relevancy to the current internal and external operating environment.
- h. Regarding IT risk, IIF has performed frequent technical maintenance on Virtual Private Network server to increase connection stability and security for remote access. IIF has also developed an initial Data Warehouse to consolidate and integrate various data from several core systems to maintain data integrity and security and to enhance data accessibility, utilization, and analysis.
- i. Regarding the Covid-19 pandemic, IIF has implemented several prevention measures, as follows:
 - Establishment of Covid-19 Task Force Team ("*Tim Gugus Tugas Covid-19*") to provide immediate response and to formulate solution/governance to support IIF's Business Continuity Plan;
 - Setting up strategy on limited operations, which includes 100% work from home

bekerja dari rumah (WFH) atau 50% bekerja dari kantor (WFO) tergantung keadaan, ditinjau setiap dua minggu;

- Mewajibkan karyawan yang WFO sesuai jadwal untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap infeksi, seperti menjalani tes serologi dan melakukan penilaian mandiri Covid-19;
- Memberikan perlindungan seperti *hand sanitizer* dan masker di beberapa lokasi kantor;
- Mendisinfeksi kantor setiap minggu;
- Sedapat mungkin menghindari pertemuan langsung secara fisik, kecuali untuk hal-hal penting yang strategis dan/atau persiapan dan penandatanganan dokumen IIF, dan menyelenggarakan rapat di kantor secara virtual;
- Tidak menerima tamu atau pihak eksternal untuk datang ke kantor IIF, kecuali vendor atau telah disetujui Komite Eksekutif (Excomm) terkait untuk hal-hal penting strategis dan/atau persiapan dan penandatanganan dokumen IIF;
- Pemeriksaan suhu dan administrasi penilaian mandiri di pintu masuk untuk semua tamu yang telah menerima izin untuk datang ke kantor IIF;
- Karyawan dapat menggunakan tunjangan rawat jalan untuk sementara waktu untuk membeli vitamin C dan E sesuai kebutuhan tanpa resep dokter;
- Karyawan dapat mengganti biaya tes usap sesuai kebijakan Excomm terkait;
- Tunjangan transportasi sesuai nilai bagi karyawan yang menggunakan transportasi umum dan belum memenuhi syarat untuk menerima program kepemilikan mobil;
- Kunjungan lapangan hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir oleh sejumlah kecil karyawan;
- Mewajibkan karyawan mengikuti protokol untuk kunjungan lapangan, termasuk persyaratan untuk melakukan tes usap setelah kembali ke Jakarta.

("WFH") or 50% work from office ("WFO") policy depending on the circumstances, to be reviewed every two weeks;

- Requiring employees who will take WFO as per schedule to conduct preventive measures against infection such as having (serology) test and completing Covid-19 self-assessment;
- Providing protection such as hand sanitizers and masks at several office locations;
- Disinfecting the office every week;
- Avoiding physical direct meeting as much as possible, unless for strategic important matters and/or preparation and signing of IIF's documents, and conduct meetings in the office virtually;
- Not accepting guests or external parties to come to IIF's office, except vendors or approved by related Executive Committee (Excomm) for strategic important matters and/or preparation and signing of IIF's documents;
- Temperature checks and self-assessment administration at the entrance for all guests who have received clearance to come to IIF's office;
- Employees may temporarily use outpatient limits to purchase vitamin C and E as needed without doctor's prescription;
- Employees may reimburse swab test as per discretion of related Excomm;
- Transportation allowance (at cost) for employees using public transportation and not eligible to receive car ownership program;
- Site visits only carried out as a last resort option by a very limited number of employees;
- Requiring employees to follow protocols for site visits, which include requirement to take swab test after returning to Jakarta.

5. Risiko Sosial dan Lingkungan

Risiko ini dapat muncul apabila proyek tidak mematuhi dan/atau tidak menerapkan aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, dan/atau mengabaikan penerapan *Good International Industry Practice* (GIIP) terkait aspek S&E. Peraturan dan praktik terbaik ini menjadi landasan pembangunan berkelanjutan yang menciptakan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Risiko ini dapat dikelola dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan memastikan semua proyek yang dibiayai IIF memenuhi persyaratan dan ketentuan lingkungan, keselamatan, kesehatan, serta persyaratan sosial yang berlaku.

5. Social and Environmental Risk

Such risk may arise if projects do not comply and/or do not implement the applicable rules and regulations in Indonesia, and/or ignore the implementation of *Good International Industry Practice* (GIIP) concerning S&E aspects. These regulations and best practices are the foundation of sustainable development which promotes the harmony between economic, social, and environmental aspects.

These risks can be mitigated by applying the principle of prudence by ensuring that all projects financed by IIF meets the applicable environmental, safety, health, and social requirements and provisions.

Dalam upaya membantu klien mengelola dan mengurangi dampak dan risiko proyek infrastruktur terhadap aspek sosial dan lingkungan, IIF melakukan penilaian kepada proyek untuk memastikan bahwa kegiatannya sesuai dengan Prinsip-prinsip S&E. Dengan menerapkan standar dari Prinsip S&E dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan tercapainya proyek infrastruktur berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik namun juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang baik dan kelestarian lingkungan di sekitar lokasi proyek.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif terkait kegiatan usaha IIF atau persepsi negatif terhadap IIF sehingga berpotensi memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan usaha IIF.

Langkah pengelolaan risiko ini antara lain:

- Melakukan pemantauan terhadap adanya persepsi negatif atau publikasi negatif terkait dengan IIF ataupun proyek-proyek yang dibiayai IIF, termasuk namun tidak terbatas pada masalah mengenai sosial dan lingkungan proyek-proyek tersebut.
- Melakukan pengawasan dan tindak lanjut terhadap persepsi atau publikasi bernada negatif yang berpotensi merugikan IIF.
- Melaksanakan kegiatan komunikasi baik secara internal dan eksternal dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan citra IIF yang baik termasuk dengan media. Untuk arus komunikasi diupayakan sedapat mungkin melalui satu pintu (Sekretaris Perusahaan) untuk menghindari kesalahpahaman atau informasi yang menyesatkan.
- Melakukan pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang dapat membantu proses komunikasi dan keterbukaan informasi, seperti pengelolaan situs web IIF.

7. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain muncul dari penetapan dan pelaksanaan strategi yang tidak tepat dan/atau kurang responsifnya IIF terhadap perubahan eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Langkah pengelolaan risiko ini antara lain:

- Membangun tim dan portofolio pembiayaan yang memadai sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan regulasi.
- Berupaya melakukan diversifikasi usaha baik dalam produk yang ditawarkan maupun diversifikasi sektor-sektor infrastruktur yang ditunjang oleh sumber pendanaan yang tepat dari sisi jangka waktu, jenis mata uang dan tingkat suku bunga.

In an effort to help clients manage and minimize the impacts and risks of infrastructure projects on social and environmental aspects, IIF conducts project assessments to ensure that clients' activities are in accordance with the S&E Principles. By applying the standards of the S&E Principles and implementing good corporate governance, it is expected that the infrastructure projects can be sustainable, not only focusing on physical development but also have an impact on improving the quality of life of the community and environmental sustainability surrounding the project site.

6. Reputation Risk

Reputational risk is a risk caused by, among others, negative publications related to IIF's business activities or negative perceptions of IIF that have the potential to adversely affect its business continuity.

This risk is mitigated by measures that include:

- Monitoring any negative perceptions or negative publications related to IIF or to projects financed by IIF, including but not limited to social and environmental issues of the projects.
- Supervising and following up on negative perceptions or negative publications that have the potential to harm IIF.
- Carrying out communication activities both internally and externally with stakeholders through activities that can foster a good corporate image, including with media. For communication flow, it is strategized to be directed, whenever most possible, via single access (e.g. Corporate Secretary) as to avoid any misunderstanding or misleading information.
- Developing information technology infrastructure that may help the process of communication and information disclosure, such as managing IIF's corporate website.

7. Strategic Risk

Strategic risk is a risk caused by the determination and implementation of improper corporate strategy and/or IIF's lack of responsiveness to external changes that could potentially result in losses.

This risk is mitigated by measures that include:

- Establishment of an adequate funding team and portfolio in accordance with the mandate it receives based on regulations.
- Utmost efforts to diversify its business, both in the products offered and in diversification of the infrastructure sectors supported by appropriate funding sources in terms of timeframe, currency, and interest rates.

- c. Secara berkala melakukan kajian secara internal di antara dewan Direksi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris maupun para pemegang saham dalam menentukan rencana strategis IIF.
- d. Penyusunan rencana strategis IIF sebagai tahapan mewujudkan fungsi IIF yang tertuang dalam RKAP, di mana indikator-indikator pentingnya telah dirangkum dalam Penilaian Kinerja IIF sebagai suatu Kontrak Manajemen.
- e. Terhadap risiko persaingan oleh adanya lembaga keuangan lain yang menawarkan produk serupa maupun bersifat substitusi kepada tipe konsumen yang berada dalam target pasar IIF, IIF menerapkan strategi yang ditujukan untuk bersinergi dengan perbankan, lembaga keuangan ataupun investor lainnya, termasuk menyediakan produk dan jasa yang tidak dapat diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko terdapatnya ketidakpatuhan IIF untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Untuk menangani risiko ini, IIF telah menetapkan Prosedur Penerapan Kebijakan untuk Kerangka Kerja Kepatuhan, dalam rangka mendefinisikan tata kelola dan metodologi untuk proses-proses kepatuhan.

IIF melakukan kajian dan pemantauan secara berkala (*compliance checklist*) atas kepatuhan IIF terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta memastikan penerapannya di lingkungan IIF. Hasil pemantauan dilaporkan ke Komite Manajemen Risiko di bawah Direksi serta Komite Pemantau Risiko di bawah Dewan Komisaris secara triwulanan. IIF juga telah memastikan bahwa *compliance checklist* senantiasa mutakhir dan komprehensif. Pemutakhiran dilakukan dengan menyertakan persyaratan peraturan dan perjanjian yang baru dalam perjanjian pinjaman baru.

9. Risiko Kebijakan Pemerintah

Ketidakmampuan IIF dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada IIF (oleh Pemerintah atau Regulator) akan menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja IIF.

Langkah pengelolaan risiko ini antara lain mengupayakan kerja sama dan membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam menjalankan mandatnya.

- c. Periodic internal review by the BoD in which IIF can obtain approval from the BoC and the shareholders in determining IIF's strategic plan.
- d. The preparation of IIF's strategic plan as a process of implementing its functions as stipulated in the Corporate Work Plan and Budget (RKAP), whose the important indicators have been summarised in the Corporate Performance Assessment as a Management Contract.
- e. Mitigation against the risk of competition from other financial institutions offering similar or substitute products to the types of consumers who are part of IIF's target market is done through adoption of strategies aimed at creating synergies with banks, financial institutions or other investors, including providing products and services that cannot be provided by other financial institutions.

8. Compliance Risk

Compliance risk is the risk for IIF of being non-compliant with the laws and regulations and other applicable provisions.

For this risk, IIF has established the Policy Implementation Procedure for Compliance Framework to define its governance and methodology for compliance processes.

IIF conducts periodic review and compliance checklist of IIF's compliance with the applicable laws and regulations externally and internally to ensure that it is implemented adequately. The monitoring results are reported to the Risk Management Committee under the BoD and the Risk Oversight Committee under the BoC on a quarterly basis. IIF has also reviewed the compliance checklist to ensure it is up-to-date and comprehensive. The update was to include new regulatory requirements and covenants under new loan agreements.

9. Government Policy Risk

IIF's inability to anticipate, fulfill and/or adjust to the provisions that apply to IIF (by the Government or Regulator) will cause losses that have a negative impact on its performance.

This risk is mitigated by measures that include collaboration and building communication with stakeholders in carrying out the mandate that IIF bears.

10. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh kelalaian atau cidera janji berdasarkan perjanjian yang mengikat IIF dan/atau pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan oleh IIF yang dapat menimbulkan tuntutan hukum oleh pihak ketiga terhadap IIF.

Langkah pengelolaan risiko ini antara lain:

- Memastikan bahwa semua kegiatan dan hubungan antara IIF dengan pihak ketiga telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan kajian dan pemantauan secara berkala sehubungan dengan kepatuhan IIF terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta memastikan telah dilakukan penerapannya di lingkungan IIF.

11. Risiko Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian nasional maupun global turut mempengaruhi kegiatan usaha IIF. Menyingkapi kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan, IIF menerapkan manajemen aset dan liabilitas ketat guna mengoptimalkan pendanaan, dengan pengawasan oleh ALCO. Terhadap kemungkinan meningkatnya risiko kredit atas pembiayaan yang diberikan akibat perubahan kondisi perekonomian, IIF melakukan simulasi pasar melalui *stress test* yang dapat memberikan gambaran terkait risiko kredit yang mungkin timbul akibat dinamika kondisi perekonomian, sehingga dapat dilakukan langkah dini untuk menekan dampak yang merugikan.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Untuk memantau perkembangan profil risiko IIF dari waktu ke waktu, di tahun 2020 BoD-IC mengadakan rapat setiap bulan untuk mendiskusikan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Manajemen dengan segera. Dengan demikian, setiap risiko utama di tahun 2020 termitigasi dengan baik.

Sementara itu, IIF juga memperkuat sistem manajemen risikonya secara berkelanjutan dengan menekankan dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Sosial & Lingkungan (*Social & Environmental—S&E*) yang telah menjadi bagian esensial dari bisnis IIF. Terkait hal tersebut, IIF secara rutin mengidentifikasi profil risiko terkait aspek S&E di masing-masing proyek yang dibiayai, memantaunya, serta memastikan kepatuhan dari klien terhadap prinsip-prinsip S&E ini.

10. Legal Risk

Legal risk is risk caused by negligence or default based on agreements that bind IIF and/or violations of the laws and regulations perpetrated by IIF that can lead to lawsuits by third parties against IIF.

This risk is mitigated by measures that include:

- Ensuring that all activities and relationships between IIF and third parties are in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
- Conducting review and monitoring on a regular basis in connection with IIF's compliance with applicable laws and regulations as well as ensuring its implementation has been carried out in IIF.

11. Economic Conditions Risk

National and global economic conditions affect IIF's business activities. In response to unfavourable economic developments, IIF implements a strict asset and liability management to optimise funding, overseen by the ALCO. To deal with the possibility of increasing credit risk on financing provided due to changes in economic conditions, IIF conducts market simulations through stress tests that can provide an overview on credit risk that may arise due to the dynamics in economic conditions, so that early supervision can be carried out to reduce adverse impacts.

Overview of the Effectiveness of the Risk Management System

To monitor the development of IIF's risk profile from time to time, in 2020 the BoD-IC held monthly meetings to discuss issues that required the Management's immediate attention. Hence, every major risk that IIF faced in 2020 were properly mitigated.

Meanwhile, IIF also strengthens its risk management system in a continuous manner by emphasising and enhancing the application of Social & Environmental (S&E) principles which have become an essential part of IIF's business. In this regard, IIF regularly identifies the risk profile related to the S&E aspects of each project being financed, monitors them, and ensures the client's compliance with these S&E principles.

Sepanjang 2020, IIF juga menyempurnakan kerangka parameter risikonya agar selaras dengan penyesuaian dalam kebijakan batas kendali dan selera risiko, namun pada dasarnya pendekatannya tidak berubah. Menggunakan kerangka ini, IIF menilai sendiri profil risikonya setiap triwulan berdasarkan perkembangan dan prospek terkini, dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris. Pada Oktober 2020, OJK mengeluarkan peraturan baru No. 46/2020 yang secara khusus disusun untuk mengatur perusahaan pembiayaan infrastruktur seperti IIF. Ini dinilai positif karena dipandang lebih tepat dan memberikan kejelasan bagi IIF terkait penegakan regulasi. Regulasi tersebut antara lain mencakup limit eksposur yang harus ditaati oleh IIF. Sejauh ini, batasan yang ditetapkan masih sejalan dengan kebijakan batasan pengendalian internal di IIF.

Dengan mempertimbangkan seluruh upaya yang telah dilakukan, dan memandang bahwa tingkat risiko di IIF secara komposit per akhir 2020—yakni “Moderat”—tidak mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2019, maka IIF menilai bahwa proses pengelolaan risiko di sepanjang tahun 2020 telah berjalan dengan efektif dan optimal.

During the year, IIF also refined the risk parameter framework to align with adjustment in control limit policy and risk appetite, but essentially, the approach remains unchanged. By using this framework, IIF self-assesses its risk profile each quarter based on the recent development and outlook and reported to the BoC. In October 2020, OJK issued Regulation No. 46/2020, specifically prepared to govern the infrastructure financing companies such as IIF, which was perceived positively as it is more suitable and provides more clarity for IIF on regulatory enforcement. The regulation covers, among others, limit exposures to be adhered to by IIF. Thus far, the limit stipulated is still in line with IIF’s internal control limit policy.

Taking into account all the efforts that have been made, and considering that IIF’s composite risk level at the end of 2020—“Medium-to-High with stable outlook”—had not increased significantly compared to 2019’s, IIF assessed that the risk management process throughout 2020 has been implemented effectively and optimally.

Perkara Penting

Material Litigations

Di tahun 2020, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh IIF ataupun anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

In 2020, neither IIF nor any member of its BoC and BoD was involved in any material litigations.

Sanksi Administratif

Administrative Sanctions

Di tahun 2020, tidak ada sanksi administratif yang diberikan oleh pihak otoritas kepada IIF ataupun anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

There were no administrative sanctions imposed by the authorities on IIF or members of its BoC and BoD in 2020.

Kode Etik dan Budaya Perusahaan

Code of Ethics and Corporate Culture

IIF memiliki Kode Etik Perusahaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip tentang nilai-nilai kemanusiaan, seperti sikap saling menghargai, kejujuran, dan integritas. Kode Etik ini mendorong pelaksanaan aktivitas usaha secara legal dan beretika, perlindungan dan pengawalan terhadap aset dan reputasi IIF, serta sikap hormat terhadap sesama dan masyarakat luas pada umumnya. Kode Etik ini merupakan rangkuman dari nilai-nilai, visi, norma, bahasa, dan sistem kerja IIF untuk diterapkan oleh segenap karyawan dan para pemangku kepentingan dalam berinteraksi satu sama lain.

Budaya kepatuhan dan integritas mengalir dari atas, yang secara implisit mengatakan bahwa Manajemen harus menekankan pentingnya perilaku beretika dan kepatuhan serta mendukung semua itu melalui kepemimpinan dan pelatihan. IIF wajib melakukan usahanya secara legal dan beretika di semua aspek operasinya.

Isi Kode Etik

Ruang lingkup kode etik yang dimiliki IIF mengatur berbagai hal terkait tata cara kerja, pola hubungan di internal maupun eksternal, serta komitmen perusahaan terkait masalah lingkungan dan kesehatan.

- **Melakukan Usaha dengan Taat Hukum dan Beretika**

Kebijakan yang tercantum dalam Etika Bisnis IIF merupakan panduan bagi Perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Dalam kebijakan ini dinyatakan bahwa semua kegiatan usaha harus dipandu oleh nilai-nilai mendasar IIF, yakni integritas dan kejujuran yang tak tergoyahkan, mencakup integritas, kewajaran, hormat, kepedulian, dan pertanggungjawaban pribadi. Selain menjadi panduan dalam pengambilan keputusan beretika sehari-hari, nilai-nilai ini juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap etika personal, seperti penerimaan hadiah, pengungkapan kekayaan pribadi, sikap politik dan donasi, serta kepatuhan terhadap panduan Anti-Korupsi dan Pencegahan Penipuan.

- **Kebijakan Informasi, Pengendalian Internal, dan Pelaporan Keuangan**

Untuk melindungi sekaligus mengawal aset dan reputasi IIF, Perusahaan berlandaskan pada kebijakan konflik kepentingan, kebijakan sumber daya elektronik, perlindungan data dan kebijakan keamanan, perdagangan efek, informasi *inside trader*, pengendalian internal, pelaporan keuangan, serta retensi dokumen dan *auditing*.

IIF maintains a Code of Ethics to comply with prevailing laws and regulations and in adherence to humanitarian principles and values that comprise mutual respect, honesty, and integrity. This Code of Ethics encourages ethical and legal business conduct, protection of the assets and reputation of IIF, as well as respect for others, co-workers, clients, and society at large. The code of ethics summarises the values, vision, norms, language and work systems forming IIF's corporate culture, and is to be upheld by all employees and stakeholders whenever they interact with one another.

Compliance and integrity are pursued from top to bottom, implicitly reinforcing the management's emphasis on the importance of ethical conduct and compliance. The Company also supports this implementation through leadership by example and training. IIF is obliged to conduct its business activities legally and ethically in all aspects.

Content of the Code of Ethics

The Company's Code of Ethics governs several matters related to work procedures, internal and external relationships patterns, and commitment of the Company pertaining to environmental and health issues.

- **Conduct Business Legally and Ethically**

The policies stipulated in IIF Business Ethics are guidelines for the Company in carrying out daily business operations. Within this policy, it is stated that all business activities must be guided by IIF's fundamental values, namely uncompromising integrity and honesty, including integrity, fairness, respect, concern, and personal accountability. In addition to being a guide to everyday ethical decision making, these values are also related to compliance with personal ethics, such as gratification, disclosure of personal wealth, political affiliation and donations, and compliance with Anti-Corruption and Fraud Prevention guidelines.

- **Policies on Information, Internal Control, and Financial Reporting**

To protect and safeguard IIF's assets and reputation, the Company establishes policies regarding conflict of interest, electronic resources, data protection and security, securities trading, insider trader information, internal control, financial reporting, as well as document retention and auditing.

- **Benturan Kepentingan**

Dalam melakukan kegiatan usaha dan melaksanakan tugas, baik segenap karyawan maupun perwakilan IIF, harus bebas dari benturan kepentingan mengingat hal ini dapat berpengaruh buruk pada keputusan, objektivitas, atau kesetiaan mereka pada Perusahaan.

- **Kebijakan Sumber Daya Elektronik**

Kebijakan ini mengatur bahwa penggunaan semua sumber daya elektronik tidak melanggar hukum dalam Kebijakan Perilaku Usaha IIF. Semua karyawan IIF harus melindungi sumber daya elektronik IIF dari penggunaan tanpa izin dan dari ancaman keamanan.

- **Keamanan Informasi dan Kebijakan Kerahasiaan**

Segenap karyawan dan perwakilan IIF bertanggung jawab untuk melindungi informasi rahasia dari IIF terhadap pengungkapan tanpa izin, entah pengungkapan tersebut bersifat internal atau eksternal, sengaja atau kebetulan. IIF juga menghormati kerahasiaan dan sensitivitas informasi yang bukan milik IIF. Merupakan kebijakan IIF untuk hanya menggunakan sarana yang legal dan beretika untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi bisnis dan pasar dengan tujuan memahami secara lebih baik tentang pasar, pelanggan, dan pesaing. IIF tidak mengumpulkan atau menggunakan informasi rahasia milik pihak lain tanpa pemberian izin secara eksplisit oleh pihak tersebut.

- **Pengendalian Internal, Pelaporan Keuangan, Retensi Dokumen dan Kebijakan Audit**

Manajemen IIF bertanggung jawab untuk mempersiapkan Laporan Keuangan tahunan dan triwulan yang lengkap dan akurat sesuai dengan prinsip-prinsip akunting Indonesia yang diterima luas dan IFRS. Hal ini demi mempertahankan prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan akuntansi dan pelaporan Keuangan yang sesuai dan pengendalian internal yang dirancang untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar, hukum, dan regulasi terkait akuntansi.

IIF mematuhi kebijakan dari semua pihak yang bertanggung jawab untuk ketepatan, kelengkapan, dan ketepatan waktu terkait informasi keuangan yang aktual dan bersifat prediksi dan atas kepatuhan terhadap pengendalian internal atas pelaporan Keuangan, pengendalian, dan prosedur pengungkapan, retensi dokumen, dan kebijakan akuntansi. IIF memastikan adanya kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan ini melalui kegiatan Auditor Internal dan auditor independen, dan melalui mekanisme pemantauan internal.

Keamanan informasi juga harus mencakup perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia dari berbagai divisi. Kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara divisi yang berbeda yang mungkin sedang memberikan layanan Advisory dan yang melakukan transaksi pendanaan.

- **Conflict of Interest**

In conducting its business and performing its duties, all of the Company's employees as well as parties acting on behalf of IIF must be free from conflicts of interest that may influence unfavorable judgment, objectivity, or loyalty to the Company.

- **Electronic Resources Policy**

This policy stipulates that the use of all electronic resources does not violate the law in the Business Conduct Policy of IIF. All the Company's employees must protect IIF electronic resources from unauthorised use and security threats.

- **Information Security and Confidentiality**

All IIF employees and other parties acting on behalf of IIF are responsible for protecting IIF's confidential information against unauthorised disclosure, whether internal or external, deliberate, or accidental. IIF also respects the confidentiality and sensitivity of information to which IIF has no rights. IIF has a policy to collect and use business and market information legally and ethically in order to better understand markets, customers, and competitors. Moreover, IIF shall refrain from collecting or using another party's confidential information without permission.

- **Internal Control, Financial Reporting, Document Retention, and Auditing Policy**

IIF's management is responsible for the preparation of complete and accurate annual and quarterly financial statements in accordance with the generally accepted accounting principles in Indonesia and the IFRS, and for maintaining appropriate accounting and financial reporting principles and policies as well as internal controls designed to ensure compliance with the relevant accounting standards, laws, and regulations.

IIF adheres to the policies of all parties responsible for the accuracy, thoroughness, and timeliness of the Company's actual and forecasted financial information, and for compliance with internal controls over financial reporting, disclosure controls and procedures, document retention and auditing policies. IIF ensures compliance with these policies through the role of the independent internal and external auditors and through internal monitoring mechanisms.

Information security shall also include protection of proprietary information received from various divisions. Possible conflict of interest exists between divisions providing Advisory services and those performing financing transactions.

- **Hormati Individu dan Masyarakat**

Sikap hormat kita kepada individu dan masyarakat merupakan bagian dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Delapan Prinsip, yang membedakan IIF dari lembaga keuangan lainnya di Indonesia. IIF juga berupaya untuk memperoleh dan mempertahankan talenta terbaik dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan memberikan *reward* yang layak kepada para karyawan dan perwakilannya. Semua upaya ini dituangkan ke dalam kebijakan-kebijakan berikut:

- a. **Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan**

IIF berkomitmen memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan, dan semua karyawan bertanggung jawab mendapatkan pengetahuan mengenai hukum dan regulasi yang berlaku terkait Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan dan menaatinya. Manajemen IIF bertanggung jawab memberikan pelatihan bagi semua karyawan mengenai hukum dan kebijakan yang relevan.

- b. **Kebijakan Mengenai Pelecehan**

IIF berkomitmen memberikan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk perilaku yang tidak pantas dan pelecehan berdasarkan usia, cacat tubuh, status pernikahan, ras atau warna kulit, asal usul negara, agama, seks, orientasi seksual atau identitas gender. Setiap karyawan harus memahami bahwa tindakan pelecehan dan perilaku tak pantas tidak akan ditoleransi di IIF.

- **Kebijakan Privasi**

IIF memberikan nilai signifikan pada upaya memperoleh dan mempertahankan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, klien, mitra usaha, dan orang lain yang membagikan informasi pribadi mereka dengan IIF. Oleh karena itu, IIF sepenuhnya mematuhi kebijakan tentang kepatuhan terhadap semua hukum terkait privasi dan perlindungan data.

- **Perilaku dengan Mitra Usaha dan Pihak Ketiga**

IIF mematuhi semua hukum terkait anti-suap yang berlaku dan secara akurat membukukan semua transaksi dalam pembukuannya. Penyuapan menunjuk pada tindakan menawarkan, memberi izin atau memberikan sesuatu yang bernilai kepada Pejabat Pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung dengan maksud mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mendapatkan keuntungan yang tidak pantas, yakni persetujuan kenaikan harga, pemberian kontrak, pemberian izin operasi, persetujuan atas penggunaan/registrasi produk, vonis pengadilan yang menguntungkan, atau penyelesaian sengketa perpajakan. IIF mematuhi kebijakan untuk menjalankan kontraknya dengan pemerintah dan melakukan sub-kontrak bisnis dengan kepatuhan yang ketat pada hukum dan regulasi nasional, negara, provinsi, dan lokal yang berlaku dan pada semua persyaratan kontrak.

- **Respect for Individuals and Communities**

Respect for others and the environment is a part of the Eight Principles adopted by the Company, which set IIF apart from other financial institutions in Indonesia. IIF also aims to attract and retain superior talent through a strong commitment to creating a safe and healthy working environment and to generously bestow rewards for its employees and representatives. This is manifested in the following policies:

- a. **Environment, Health and Safety**

IIF is committed to creating a healthy and safe work environment for all employees; as such, employees are responsible for being knowledgeable of applicable laws and regulations related to Environmental, Health and Safety issues and adhere to those laws. The management addresses this issue by sending employees to the relevant trainings.

- b. **Policy on Harassment**

IIF is committed to creating a work environment that is free from any form of inappropriate behavior and harassment based on age, disabilities, marital status, race, color, national/regional origins, religion, sex, sexual orientation, or gender identity. Any form of harassment and inappropriate behavior will not be tolerated.

- **Privacy Policy**

IIF adheres to the policy of full compliance with all applicable privacy and data protection laws. IIF assigns significant importance to earning and retaining the trust of stakeholders, employees, clients, business partners and other parties who share personal information with IIF.

- **Conduct with Business Partners and Third Parties**

IIF complies with all applicable anti-gratification laws and accurately and diligently records all transactions. Bribery/gratification refers to the action of offering, authorizing, or giving valuable items/goods to Government Officers, directly or indirectly, with the intention of obtaining and retaining business or gaining improper advantages, i.e. price increase approval, awarding of contracts, granting of operating permits, approval for product use/registration, favorable court decisions, and tax dispute settlements. IIF abides by all government contracts it has entered into and keeps its subcontracts with business partners compliant with all applicable national, state, provincial, and district laws and regulations and all contract requirements.

Keberlakuan dan Penyebarluasan Kode Etik

Kode Etik IIF berlaku penuh bagi seluruh Insan IIF, baik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, hingga karyawan dan pejabat. Setiap karyawan baru diberikan sosialisasi terkait Kode Etik dan diwajibkan menandatangani surat pernyataan telah membaca dan memahami isi Kode Etik IIF. IIF juga mengimbau semua pihak yang berkepentingan di IIF untuk selalu mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan di negara lain tempat mereka beroperasi.

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

IIF telah menetapkan sanksi tegas untuk para pelaku pelanggaran Kode Etik IIF. Bagi karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik maupun tindakan kriminal, IIF akan memberikan tindakan disiplin internal, yang dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, sampai pemutusan hubungan kerja.

Pelanggaran Kode Etik

Di tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Insan IIF.

Applicability and Dissemination of the Code of Ethics

IIF's Code of Ethics applies to all employees, officers, members of the BoD and BoC. Each new employee will receive information regarding the Code of Ethics and is required to sign a statement declaring that they have read and understood the contents of the Code of Ethics of IIF. IIF also requests all concerned parties at IIF to always comply with the prevailing laws and regulations in Indonesia and in other countries where they operate.

Enforcement and Sanctions for the Violation of the Code of Ethics

IIF has set strict sanctions for violation of the Code of Ethics. Employees who are found guilty of violating the Code of Ethics or criminal acts will receive internal disciplinary action, which can range from verbal warning to written warnings and termination of employment.

Breach of the Code of Ethics

In 2020, there was no breach of the Code of Ethics committed by IIF personnel.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen Employee/Management Share Ownership Programme

Hingga akhir tahun 2020, IIF belum pernah menyelenggarakan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen.

Up to the end of 2020, IIF had never conducted any employee/management share ownership programme.

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

IIF memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) sebagai wadah bagi karyawan untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan internal. Sistem ini diharapkan menjadi alat pendeteksi dini pelanggaran untuk mencegah dampak terburuk yang mungkin timbul. WBS mendorong karyawan untuk mengedepankan prinsip keterbukaan, sehingga lingkungan kerja yang jujur, aman, dan bertanggung jawab dapat dipelihara.

IIF has a whistleblowing system (WBS) that facilitates employees in reporting suspected violations within IIF. This system is expected to act as an early detection tool for violations to prevent the worst-case scenarios. The WBS also encourages employees to prioritise openness, so that an honest, safe and responsible work environment can be maintained at all times.

Peraturan WBS Perseroan dituangkan dalam *Operation Manual* yang telah disetujui oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Pengaduan

Jika terdapat salah satu atau lebih dugaan aktivitas pelanggaran Kode Etik, maka Laporan Pengungkapan harus didokumentasikan. Laporan Pengungkapan dilaporkan secara tertulis untuk memastikan deskripsi dan pemahaman yang jelas mengenai duduk perkaranya, dan laporan tersebut harus diketik atau ditulis tangan dan terbaca, dalam bahasa Inggris ataupun Indonesia.

Laporan Pengungkapan harus dikirimkan bersama dengan surat pengantar yang menyebutkan identitas dari pelapor. Pengungkapan harus bersifat faktual dan tidak spekulatif serta tanpa tendensi tertentu dan berisi informasi yang lengkap untuk memungkinkan dilakukannya penilaian yang tepat serta tingkat atensi dan urgensi prosedur investigasi. Pelapor harus mencantumkan identitasnya dalam surat pengantar. Pengajuan laporan tanpa mencantumkan identitas diperkenankan apabila disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memadai, atau apabila terdapat indikasi kuat bahwa penipuan/korupsi telah terjadi, sehingga dapat diselidiki lebih lanjut.

Untuk membuat Laporan Pengungkapan, karyawan atau pihak eksternal dapat menggunakan Formulir Laporan Pengungkapan yang tersedia di situs web IIF.

Perlindungan bagi Pelapor

IIF menerapkan kebijakan yang memastikan tidak akan ada tindakan pembalasan terhadap pelapor yang melaporkan kecurangan dan korupsi. IIF berkomitmen mendukung dan melindungi pelapor tindakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran Kode Etik dari tindak kekerasan dan diskriminasi. IIF juga berkomitmen melindungi karier karyawan yang melaporkan dugaan kecurangan, asalkan mereka tidak terlibat dalam tindakan curang dan/ atau kegiatan korupsi.

Sesuai dengan kebijakan, IIF melindungi pelapor. IIF juga memberikan perlindungan dengan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan tindakan balas dendam terhadap pelapor. Sanksi yang diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan tindakan balas dendam terhadap pelapor dapat berupa denda dan hukuman penjara.

Pihak Pengelola Pengaduan Pelanggaran

Perusahaan mengerahkan Direksi, Komite-Komite terkait, maupun Departemen SDM untuk mengelola pengaduan pelanggaran. Tim tersebut bersifat gugus tugas dan berlaku sementara sampai penanganan diselesaikan.

Laporan Pengaduan dan Tindak Lanjutnya

Di tahun 2020, tidak terdapat pengaduan atas dugaan pelanggaran yang diterima oleh Perusahaan.

The Company's WBS regulation is formalized in the Company's *Operation Manual*, which has been approved by Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders.

Report Submission and Handling

If one or more of the suspected activities that violate the Code of Ethics occur, a Disclosure Report shall be filed. The Disclosure should preferably be reported in writing to ensure a clear understanding of the issues raised and should either be typed or written in a legible handwriting in English or Indonesian.

The Disclosure should be forwarded under a covering letter which shall bear the identity of the whistleblower. Disclosures should be factual and not speculative or in the nature of a conclusion and should contain as much specific information as possible to allow for proper assessment of the nature and extent of the concern and the urgency of a preliminary investigative procedure. The Whistleblower must disclose his or her identity in the covering letter forwarding such Disclosure. Anonymous whistleblower or the disclosures are permitted if it is completed with adequate supporting evidence, information, and strong indication that fraud/corruption has occurred, which could lead to further investigation.

To make a Disclosure, employees and external agencies can use Disclosure Reporting Form available on IIF's website.

Protection for Whistleblowers

IIF follows a policy of non-retaliation towards whistleblower reporting fraud and corruption. IIF is committed to supporting and protecting the whistleblowers who report breaches or alleged breaches of the Code of Ethics from victimisation and discrimination. IIF is also committed to protecting the career of employees who report suspected fraud, provided they are not involved in the fraudulent or corrupt activity.

IIF provides protection to the whistleblowers who make disclosures in accordance with the policy. IIF also provides protection by imposing penalties on person(s) taking retaliation against the whistleblower. Penalties against persons proven to have taken retaliatory action against a whistleblower include fines and imprisonment.

Parties Managing Whistleblowing Reports

The Company calls on the Internal Audit Division to manage complaints of violations. Internal Audit Division will act as a reporting point for suspected fraud and corruption, make appropriate arrangements for the fact-finding, and justify investigations.

Whistleblowing Reports and Follow-Ups

In 2020, the Company received no whistleblowing reports about alleged violations.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

IIF menyediakan akses untuk memperoleh informasi Perusahaan bagi publik melalui beragam media informasi, meliputi:

1. Profil Perusahaan dan Laporan Tahunan
IIF menyajikan informasi yang singkat dan padat mengenai kinerja keuangan, sekilas perusahaan, informasi produk dan jasa, acara perusahaan, komposisi pemegang saham, dan manajemen perusahaan dalam bentuk Profil Perusahaan. Sementara itu, informasi yang lebih mendalam terkait kinerja operasional dan finansial, implementasi GCG, dan laporan tanggung jawab sosial Perusahaan tersaji dalam Laporan Tahunan.
2. Situs Web Resmi
Situs web resmi IIF dapat diakses di www.iif.co.id, yang memuat informasi Perusahaan secara *online* dan *mobile*.

IIF provides the public with access to information on the Company through various channels, including:

1. Company Profile and Annual Report
IIF presents brief and solid information on its financial performance, the company at a glance, information on products and services, company events, shareholders composition, and company management in the form of a Company Profile. A more in-depth record regarding operational and financial performance, GCG implementation, and corporate social responsibility reports can be viewed in the Annual Report.
2. Official Website
The official website of IIF is available at www.iif.co.id, where online information about IIF can be obtained, also via mobile devices.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pernyataan Kepatuhan/ Penjelasan Statement of Compliance/ Explanation	Penjelasan (Apabila Belum Dipatuhi) Explanation (For Non- Compliance)
I.	Aspek I: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham Aspect I: Relationship of Public Company with Shareholders in Ensuring Shareholders' Rights			
	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Principle 1: Improving the Value of Implementation of General Meeting of Shareholders (GMS)	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham The public company has a means or technical procedure for voting both open and closed voting mechanisms that uphold the independence and interest of shareholders	Telah dipatuhi Complied with	
		2. Seluruh Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the public company attend the Annual GMS	Telah dipatuhi Complied with	
		3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun Summary of GMS minutes of meeting is provided in the public company website for at least one year	Telah dipatuhi Complied with	

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pernyataan Kepatuhan/ Penjelasan Statement of Compliance/ Explanation	Penjelasan (Apabila Belum Dipatuhi) Explanation (For Non- Compliance)
	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor Principle 2: Increasing the Quality of Communications between Public Company and Shareholders/ Investors	4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor The public company has communications policy with the shareholders or investors 5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web The public company discloses its communications policy to the shareholders or investors on the website	Telah dipatuhi Complied with Telah dipatuhi Complied with	
II Aspek II: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect II: Functions and Roles of the Board of Commissioners				
	Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Principle 3: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners	6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka Determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into consideration the conditions of the public company 7. Penentuan komposisi Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into consideration the conditions of the public company.	Telah dipatuhi Complied with Telah dipatuhi Complied with	
	Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Principle 4: Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners	8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris The Board of Commissioners has its self-assessment policy to evaluate its performance 9. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka Self-assessment policy to evaluate the Board of Commissioners performance is disclosed in the annual report of the public company 10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of Board of Commissioners members should they be involved in a financial crime 11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi Board of Commissioners or the committee carrying out the Nomination & Remuneration function prepares the succession policy in the Board of Directors Nomination process	Penjelasan diberikan Explanation provided Penjelasan diberikan Explanation provided Telah dipatuhi Complied with Telah dipatuhi Complied with	Dalam Piagam NRC, dinyatakan bahwa NRC bertugas menyusun sistem penilaian kinerja untuk Dewan Komisaris dan Direksi. NRC Charter stipulates that NRC is tasked to formulate a performance assessment system for the BoC and the BoD. Sistem penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh NRC. The performance assessment system of the BoC is determined by NRC.

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pernyataan Kepatuhan/ Penjelasan Statement of Compliance/ Explanation	Penjelasan (Apabila Belum Dipatuhi) Explanation (For Non- Compliance)
III	Aspek III: Fungsi dan Peran Direksi Aspect III: Functions and Roles of the Board of Directors			
	Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Principle 5: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors	12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan Determination of Board of Directors composition takes into consideration the public company's conditions and efficacy in decisionmaking	Telah dipatuhi Complied with	
		13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan Determination of Board of Directors composition takes into consideration its diversity in terms of skills, knowledge and experience required	Telah dipatuhi Complied with	
		14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Member of the Board of Directors in charge of accounting or finance has an expertise and/or knowledge in accounting	Telah dipatuhi Complied with	
	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Principle 6: Improving the Quality of Implementation of Board of Directors Duties and Responsibilities	15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi Board of Directors has a self-assessment policy to evaluate its performance	Penjelasan diberikan Explanation provided	Dalam Piagam NRC, dinyatakan bahwa NRC bertugas menyusun sistem penilaian kinerja untuk Dewan Komisaris dan Direksi. NRC Charter stipulates that NRC is tasked to formulate a performance assessment system for the BoC and the BoD.
		16. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka Self-assessment policy to evaluate the Board of Directors performance is disclosed in the annual report of the public company	Penjelasan diberikan Explanation provided	Sistem penilaian kinerja anggota Direksi ditentukan oleh NRC. The performance assessment system of BoD is determined by NRC.
		17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan Board of Directors has a policy regarding the resignation of Board of Directors members should they be involved in a financial crime	Telah dipatuhi Complied with	

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pernyataan Kepatuhan/ Penjelasan Statement of Compliance/ Explanation	Penjelasan (Apabila Belum Dipatuhi) Explanation (For Non- Compliance)
IV	Aspek IV: Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect IV: Stakeholders' Participation			
	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Principle 7: Improving Corporate Governance Aspect via Stakeholders' Participation	18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> The public company has a policy to prevent insider trading	Telah dipatuhi Complied with	
		19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan antikorupsi dan anti- <i>fraud</i> . The public company has a policy on anticorruption and antifraud.	Telah dipatuhi Complied with	
		20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> The public company has a policy on vendor/supplier selection and enhancement of skills	Telah dipatuhi Complied with	
		21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur The public company has a policy on fulfilling creditors' rights	Telah dipatuhi Complied with	
		22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> The public company has a whistleblowing system policy	Telah dipatuhi Complied with	
		23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The public company has a policy on long term incentive provision to the Board of Directors and employees.	Telah dipatuhi Complied with	Insentif jangka panjang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi namun pada tahun 2020 tidak dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan. Long-term incentive is provided to the BoC and the BoD, however in 2020 it was not provided in light of the Company's conditions.
V	Aspek V: Keterbukaan Informasi Aspect V: Information Disclosure			
	Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Principle 8: Enhancing Information Disclosure Implementation	24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi The public company utilises information technology more broadly than the website as a means to disclose information	Telah dipatuhi Complied with	
		25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali The public company's annual report discloses the ultimate beneficiary of the ownership of its shares for at least 5% ownership as well as the disclosure on the ultimate beneficiary of the ownership of shares of the public company via the major and controlling shareholders	Telah dipatuhi Complied with	IIF tidak memiliki pemegang saham pengendali. IIF does not have a controlling shareholder.





Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Corporate Social and Environmental Responsibility

IIF melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya dalam kerangka kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip sosial dan lingkungan yang terangkum dalam IIF SEP, serta dengan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Bagian-bagian dalam bab ini memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan tindakan dalam kerangka kerja CSR yang telah IIF lakukan sepanjang 2020 dalam aspek lingkungan, ketenagakerjaan, kemasyarakatan, serta layanan kepada konsumen, seiring IIF berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingannya.

IIF realizes its corporate social and environmental responsibility under its Corporate Social Responsibility (CSR) framework built upon the social and environmental principles summarized in IIF's SEP, and by adhering to the Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies and Government Regulation No. 47/2012 on Corporate Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.

Sections in this chapter discusses the policies and actions taken by IIF under its CSR framework in 2020 in the aspects of environment, employment, society, and service to customers, during the course of IIF's interactions with its various groups of stakeholders.

Praktik Standar Keberlanjutan bagi Proyek Infrastruktur

Sustainability Standards for Infrastructure Projects

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata bagi rakyatnya merupakan salah satu cerminan tingkat kemajuan suatu negara. Infrastruktur menghadirkan banyak dampak positif bagi kemakmuran bangsa, namun pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan sejumlah dampak yang tidak diinginkan, antara lain pemindahan kawasan pemukiman, perusakan alam, dan eksploitasi sumber daya alam. Untuk memitigasi hal tersebut, dibutuhkan komitmen kuat dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur untuk senantiasa memenuhi standar keberlanjutan dalam menjalankan proses pembangunannya.

IIF sebagai salah satu pihak utama yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur berkomitmen untuk menerapkan konsep *triple bottom line* yang terdiri dari aspek *people*, *planet*, dan *profit*, ke dalam setiap proyek pembangunan yang dibiayainya. Hal ini diwujudkan melalui mekanisme pembiayaan yang terintegrasi dengan standar S&E IIF (8 Prinsip Sosial & Lingkungan IIF).

IIF memandang S&E sebagai acuan untuk mengedepankan aspek sosial dan lingkungan dalam setiap realisasi investasi infrastruktur sekaligus dalam pemberian pendampingan kepada berbagai proyek yang dibiayainya, dengan harapan setiap proyek infrastruktur tersebut dapat memenuhi standar S&E yang telah ditetapkan. IIF juga melibatkan pihak konsultan dalam mendukung pemenuhan aspek S&E dalam berbagai proyek yang memiliki spesifikasi S&E khusus.

The availability of adequate and equitable infrastructure for the population reflects a country's level of progress. Infrastructure presents many positive benefits for the prosperity of the nation, but infrastructure development can have a number of unwanted impacts, including displacement of residential areas, destruction of nature, and exploitation of natural resources. Mitigating all these impacts requires strong commitment from all parties involved in infrastructure development to always strive to adhere to the sustainability standards in undertaking the development process.

IIF, as one of the key parties involved in infrastructure development, is committed to applying the triple bottom line concept consisting of people, planet, and profit aspects, into every development project it finances. This is accomplished through a financing mechanism that is integrated with IIF's S&E (8 Social & Environmental Principles).

IIF views S&E as a reference in upholding social and environmental aspects in every realization of infrastructure investment as well as in providing assistance to the projects it finances, with the expectation that each of these infrastructure projects can meet the S&E standards that have been set. IIF also involves consultants in supporting the fulfillment of S&E aspects in various projects with specific S&E specifications.

Lingkungan

Environment

Komitmen dan Kebijakan Pelestarian Lingkungan

Komitmen IIF dalam melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelestarian lingkungan tercermin dari tiga prinsip yang dianut dalam IIF SEP, yakni:

- Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan;
- Pencegahan dan Pengurangan Polusi, dan Perubahan Iklim; serta
- Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

IIF juga memiliki kebijakan khusus dalam dokumen Panduan Operasi Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan (SEMS) - IIF SEMS 2019 yang mengatur Kerangka Kerja Perlindungan Lingkungan dan Sosial IIF, yang mendasari seluruh kegiatan terkait lingkungan di IIF.

Dampak dan Risiko Lingkungan yang Penting

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur, IIF tidak memiliki dampak langsung terhadap lingkungan ataupun risiko lingkungan yang penting dari seluruh operasi bisnisnya. Akan tetapi, sebagaimana telah dijelaskan di atas, aktivitas pembangunan infrastruktur yang dilakukan di proyek-proyek, termasuk yang dibiayai oleh IIF, dapat menghasilkan dampak-dampak negatif terhadap lingkungan, seperti perubahan kondisi alam dan pencemaran.

Penggunaan Material dan Energi yang Ramah Lingkungan dan Dapat Didaur Ulang

Melalui beberapa proyek yang dibiayainya, antara lain proyek pembangkitan listrik dari sumber energi terbarukan, IIF turut membantu menurunkan konsumsi sumber energi yang tidak terbarukan sekaligus mendorong pembangkitan energi secara ramah lingkungan.

Di wilayah operasional IIF sendiri, upaya untuk mengurangi produk sekali pakai dan untuk menghemat energi di berbagai proses dan aktivitas terus diterapkan.

Rincian kinerja IIF dalam aspek ini disajikan dalam Laporan Keberlanjutan 2020.

Commitment to and Policy on Environmental Preservation

IIF's commitment to environmental preservation in its various activities is reflected in three principles of its SEP, namely:

- Social and Environmental Management System (SEMS);
- Pollution Prevention, Abatement, and Climate Change; and
- Biodiversity Conservation and Natural Resources Management.

Furthermore, IIF also possesses a specific policy in its Social and Environmental Management System (SEMS) Operational Guidelines - IIF SEMS 2019 documentation that stipulates IIF's Environmental and Social Safeguards Framework, which underpins all environment-related activities in IIF.

Key Environmental Impacts and Risks

As a company engaged in the infrastructure financing sector, IIF has no significant direct impact on the environment nor significant environmental risk across all of its business. However, as explained in the preceding section, infrastructure development activities performed by projects, including those receiving financing from IIF, may result in some negative impacts on the environment e.g. changes in natural conditions and pollution.

Use of Environmentally Friendly and Recyclable Materials and Energy

Through certain projects which it is financing, among others projects of power generation from renewable sources, IIF continues to participate in the reduction of non-renewable energy sources and in boosting environmentally-friendly generation of energy.

In IIF's operations, efforts to reduce the consumption of single-use products and to conserve energy in various processes and activities are currently underway.

Details of IIF's performance in this aspect are provided in the 2020 Sustainability Report.

Sistem Pengolahan Limbah

IIF berkomitmen untuk mencegah timbulnya limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah tidak berbahaya dari setiap proyek yang dibiayainya. Sistem pengolahan limbah yang diterapkan di setiap proyek yang dibiayai IIF dipantau dan dilaporkan kinerjanya kepada IIF secara berkala.

Di wilayah operasional IIF sendiri, limbah yang dihasilkan secara umum merupakan limbah kantor, yang mencakup sampah kertas, sampah organik, dan sampah lainnya, yang seluruhnya dikelola oleh manajemen gedung tempat kantor IIF berada.

Rincian kinerja IIF dalam aspek ini disajikan dalam Laporan Keberlanjutan 2020.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

IIF memiliki mekanisme penanganan pengaduan masalah lingkungan (dan juga untuk masalah sosial) untuk setiap fase pembiayaan proyek, mulai dari sejak proyek belum dimulai hingga proyek berakhir. Mekanisme diawali dengan sosialisasi rencana proyek kepada masyarakat terdampak. Kemudian, selama proyek berjalan, IIF memberikan laporan secara berkala terkait dengan kemajuan pelaksanaan rencana proyek, termasuk di dalamnya mencakup laporan risiko yang mungkin muncul dan berdampak terhadap masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan/keluhan melalui email yang tersedia pada situs IIF. Rincian kinerja IIF dalam aspek ini disajikan dalam Laporan Keberlanjutan 2020.

Pertimbangan Aspek Lingkungan dalam Pemberian Pembiayaan kepada Konsumen

Sebagaimana telah dibahas di bagian sebelumnya, dan dijelaskan lebih lanjut dalam Laporan Keberlanjutan 2020, keputusan pembiayaan proyek oleh IIF ditentukan berdasarkan sejumlah pertimbangan, seperti aspek lingkungan dan sosial yang berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam IIF SEP. Oleh karena itu, IIF berkomitmen untuk tidak memberikan pembiayaan kepada proyek-proyek yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Waste Management System

IIF is committed to preventing the production of hazardous and toxic waste as well as non-hazardous waste from every project that it finances. The waste treatment system in use in these IIF-financed projects is monitored, and its performance is reported to IIF periodically.

In IIF's operations, the waste generated is office waste, which generally consists of paper waste, organic waste, and other waste, all of which are managed by the management of the building where IIF office is located.

Details of IIF's performance in this aspect are provided in the 2020 Sustainability Report.

Environmental Grievance Mechanism

IIF has a mechanism for managing environmental (as well as social) grievances for every phase of project financing, starting from the beginning of the project up to its conclusion. The first step of this mechanism is dissemination of project plan to the affected communities. During the period of project implementation, IIF provides periodic reports illustrating the progress of the project, including reports on risks that may arise and potentially affect the community. Any grievances from the community can be directed to IIF via email to the address provided on IIF's website. Details of IIF's performance in this aspect are presented in the 2020 Sustainability Report.

Consideration of Environmental Aspects in Providing Financing to Customers

As discussed in the previous section, and further detailed in the 2020 Sustainability Report, IIF's decision to finance a project is based on a number of considerations, e.g. the sustainability of the project's environmental and social aspects, as reflected in IIF's SEP. IIF therefore is committed to not providing financing to projects that fail to meet these requirements.

Praktik Ketenagakerjaan

Employment Practices

IIF menjalankan praktik-praktik ketenagakerjaan yang berlandaskan praktik terbaik di industri, serta selaras dengan praktik yang diterapkan di organisasi pemegang sahamnya, seperti IFC.

Semua praktik ketenagakerjaan di IIF tunduk pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia. Kebijakan ketenagakerjaan di IIF secara menyeluruh, yang telah disusun berdasarkan nilai-nilai inti IIF (Kolaborasi, Keunggulan, dan Komitmen terhadap Bisnis Infrastruktur) telah dijelaskan pada bagian Sumber Daya Manusia dalam bab Tinjauan Pendukung Bisnis dalam Laporan Tahunan ini. Bagian ini menjelaskan beberapa aspek penting terkait praktik ketenagakerjaan di IIF.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Dalam melakukan proses perekrutan karyawan, IIF berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua kandidat, terlepas dari jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial, hubungan politik, dan aspek lainnya yang rentan mengalami diskriminasi. Proses pengambilan keputusan IIF dilakukan atas dasar kompetensi, keahlian, serta latar belakang profesional.

IIF juga menjunjung tinggi kesetaraan gender dalam pengisian semua posisi yang tersedia di struktur organisasinya. Pada tahun 2020, 48% dari total keseluruhan karyawan IIF merupakan karyawan perempuan. Beberapa di antaranya menempati posisi strategis seperti manajer, manajer senior, dan direktur.

Sarana dan Keselamatan Kerja

Perseroan memandang bahwa kesehatan dan keselamatan kerja sebagai faktor terpenting yang mampu menunjang tingkat kesuksesan operasional dan aktivitas usaha Perseroan, baik di lokasi proyek maupun di kantor pusat. Hal tersebut menjadi fokus Perseroan karena keselamatan dan kesehatan kerja berperan besar dalam mempertahankan eksistensi dan kinerja bisnis Perseroan.

Untuk prosedur keselamatan kerja di kantor pusat di mana mayoritas tenaga kerja Perseroan bekerja, Perseroan menyediakan sarana dan keselamatan kerja sesuai dengan prosedur yang dimiliki pihak pengelola Gedung lokasi kantor pusat IIF. Sementara untuk saat-saat di mana karyawan melakukan kunjungan lapangan, sarana dan keselamatan kerja mengikuti prosedur operator proyek.

IIF implements employment practices that are grounded upon industry best practices, as well as aligned with the practices implemented in its shareholders' organizations, such as IFC.

All employment practices in IIF are compliant with the prevailing labour regulations in the jurisdiction of the Republic of Indonesia. The overarching employment policy of IIF, which had been formulated based on the core values of IIF (Collaboration, Excellence, and Commitment to Infrastructure Business) has been detailed in the Human Resources section in the Overview of Business Support chapter in this Annual Report. This section discusses several key aspects of IIF's employment practices.

Gender Equality and Equal Opportunity

IIF is committed to providing equal opportunity for employment to all, irrespective of their gender, ethnicity, race, religion, social status, political affinity, and other forms that are often subject to discrimination. IIF makes recruitment decisions based on the competence, expertise, and professional background of the candidates.

Furthermore, IIF also upholds gender equality in the fulfillment of every position in its organizational structure. In 2020, 48% of total IIF employees were female employees. Several among them held strategic positions such as manager, senior manager, and director.

Work Facilities and Occupational Safety

The Company believes that occupational health and safety are a vital factor in supporting the level of operational success and business activities of the Company, both at the project site and at the head office. This has become the Company's focus as occupational health and safety play a major role in maintaining the existence and performance of the Company's business.

In terms of work safety procedures at the head office where the majority of the Company's workforce carries out their activities, the Company provides work facilities and safety in accordance with procedures established by the building management where IIF's head office is located. Meanwhile, during site visits, employees shall follow the work safety procedures prescribed by the project operator.

IIF membentuk Satgas Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan akan pemenuhan Rencana Kontinuitas Bisnis IIF di tengah situasi pandemi Covid-19 di tahun 2020. Satgas diwakili oleh karyawan dari berbagai divisi yang berbeda. Selanjutnya, IIF juga mengeluarkan kebijakan baru mengenai rencana perjalanan yang aman bagi karyawan, kebijakan bekerja dari rumah, serta penandatanganan dokumen legal.

Selain dari fasilitas kesehatan yang telah diberikan, mulai tahun 2020 IIF memberikan kebijakan khusus terkait penggantian biaya uji usap PCR, *rapid test*, dan pembelian vitamin.

Tingkat Perpindahan Karyawan

Melalui program retensi yang aktif dijalankan, IIF menekan angka perputaran karyawan dengan menjalankan sejumlah inisiatif yang sesuai dengan kebutuhan karyawannya. Efektivitas inisiatif-inisiatif tersebut dievaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutannya.

Jumlah karyawan yang tidak lagi bekerja di IIF tahun 2020 adalah 13 orang. Rata-rata jumlah karyawan secara bulanan di tahun 2020 adalah 100 orang. Dengan demikian, tingkat perputaran karyawan adalah 12% di tahun 2020.

Tingkat Kecelakaan Kerja

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan, seluruh aktivitas operasional di IIF tidak melibatkan kerja fisik yang keras ataupun kerja di lapangan dengan tingkat risiko kecelakaan yang tinggi.

Bagaimanapun juga, karyawan IIF dapat melakukan kunjungan kerja ke proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh IIF, sehingga dapat terpapar pada risiko kecelakaan yang lebih tinggi di kawasan proyek.

Sepanjang tahun 2020, tidak ada karyawan IIF yang mengalami kecelakaan atau cedera apapun saat bekerja.

Pendidikan dan Pelatihan

Kesempatan untuk mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi diberikan setiap waktu kepada seluruh karyawan IIF. Penjelasan lebih lanjut mengenai program-program pengembangan kompetensi tersebut dijelaskan pada bagian Sumber Daya Manusia dalam bab Tinjauan Pendukung Bisnis dalam Laporan Tahunan ini.

The Covid-19 pandemic in 2020 resulted in IIF's decision to establish the Covid-19 Task Force as a response to the need for further elaboration of IIF's Business Continuity Plan. Employees from different divisions were represented in the Task Force. Furthermore, new policies regarding employee safe travel plan, work from home and signing of legal documents were also issued.

On top of the existing medical facility provided, starting in 2020 the Company also gives special policy on reimbursement for expenses related to PCR swab tests, rapid tests, and purchase of vitamins.

Employee Turnover Rate

Through its active employee retention programme, IIF is striving to reduce its employee turnover rate. This is carried out by deploying various initiatives that cater to the needs to its employees. The efficacy of these initiatives is evaluated on a regular basis to determine their continuation.

Employee turnover for IIF in 2020 was a total of 13 personnel. The monthly average employee headcount in the entire year of 2020 was 100 personnel. Therefore, employee turnover rate in IIF in 2020 was 12%.

Accident Frequency Rate

As a company that is engaged in the financial services sector, none of IIF's operational activities involve strenuous physical labour nor take place in places where there is a significant risk of accident.

However, IIF employees may conduct site visits to the infrastructure projects that are financed by IIF, and therefore they may be exposed to a higher degree of risk of accident in these projects' areas.

In 2020, none of IIF employees were involved in accidents or were injured while performing work.

Education and Training

The opportunity to participate in various education and training programmes to enhance and develop their competence is provided at all times to IIF employees. Further details on these competence enhancement programmes are provided in the Human Resources section in the Overview of Business Support chapter in this Annual Report.

Remunerasi Karyawan

Remunerasi yang diberikan kepada karyawan tetap IIF terdiri dari: gaji dan bonus kinerja, serta fasilitas dan tunjangan. Struktur remunerasi yang terinci dijelaskan pada bagian Sumber Daya Manusia dalam bab Tinjauan Pendukung Bisnis dalam Laporan Tahunan ini.

Dalam menentukan kebijakan remunerasi, IIF mematuhi peraturan setempat terkait ketentuan upah minimum regional (UMR), yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

UMP DKI Jakarta pada tahun 2020 adalah sebesar Rp4.267.349,-. Di tahun 2020, upah terendah yang diterima oleh pegawai laki-laki di tingkatan paling bawah di IIF adalah sebesar Rp6.800.000,- (159,3% dari UMP) sementara upah terendah yang diterima pegawai perempuan adalah sebesar Rp6.300.000,- (147,6% dari UMP).

Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang mungkin dijumpai di kalangan karyawan, Perusahaan menyediakan sarana pengaduan melalui mekanisme yang meliputi sistem penilaian *Performance Appraisal*. Sistem ini mencakup *direct coaching* dan sistem *whistleblower* yang diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Setiap empat bulan sekali, manajemen mengadakan pertemuan dengan karyawan untuk membahas strategi atau solusi dari masalah-masalah yang ada secara *top-down*.

Employee Remuneration

The remuneration provided to IIF permanent employees consists of: salary and performance bonus, as well as facilities and allowances. The detailed remuneration structure is presented in the Human Resources section in the Overview of Business Support chapter in this Annual Report.

In formulating its remuneration policy, IIF complies with the local regulations regarding the regional minimum wage (UMR), which in IIF's case is the Provincial Minimum Wage (UMP) in DKI Jakarta.

The UMP in DKI Jakarta in 2020 was Rp4,267,349. In 2020, the lowest wage received by male employees on the lowest level at IIF was Rp6,800,000 (159.3% of UMP), while the lowest wage received by female employees was Rp6,300,000 (147.6% of UMP).

Employment-Related Grievance Mechanism

To identify and resolve the employment-related issues that the employees might have, the Company provides a grievance channel via a mechanism that covers a Performance Appraisal assessment system. This includes direct coaching and a whistleblower mechanism under the Company Regulations.

In addition, the Company management also holds regular meetings every four months with employees to discuss strategies or solutions to existing problems in a top-down manner.

Pemberdayaan Masyarakat

Community Empowerment

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Dampak sosial yang paling signifikan dari IIF adalah melalui proyek-proyek infrastruktur yang dibiayainya. Untuk itu, IIF memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai menjunjung tinggi SEP, sehingga dapat menghasilkan dampak sosial yang positif kepada masyarakat di sekitar mereka.

Use of Local Labour

IIF's most significant social impact is made through the infrastructure projects it finances. For this reason, IIF ensures every project it finances upholds the SEP, so that they can generate positive social impacts on the surrounding communities where they are located.

Proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai IIF didorong untuk memanfaatkan tenaga kerja dari wilayah setempat untuk mengisi posisi-posisi yang memungkinkan. Selain itu, mereka juga dituntut untuk melakukan program-program pemberdayaan masyarakat sekitar, baik melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, maupun melalui perbaikan sarana dan prasarana sosial dan donasi dalam bentuk lainnya.

Pembahasan lengkap mengenai kinerja sosial IIF terdapat dalam Laporan Keberlanjutan 2020.

Inisiatif Pemberdayaan Masyarakat IIF Tahun 2020

Di tahun 2020, IIF secara langsung melakukan dan terlibat dalam sejumlah inisiatif pemberdayaan masyarakat.

Sejumlah donasi yang diberikan oleh IIF kepada sejumlah penerima manfaat, antara lain:

- Karyawan yang terdampak oleh banjir di Jakarta di bulan Januari;
- Human Initiative untuk mengatasi penyebaran Covid-19, bekerja sama dengan SMV lainnya, di bulan April;
- Yayasan Sayap Ibu Bintaro (panti asuhan untuk masyarakat kurang mampu) dan Yayasan Menemani (pemberdayaan kaum muda melalui bantuan pendidikan dan kesehatan), melalui program IIF Cares and Shares 2020, di bulan Mei;
- Palang Merah Indonesia untuk korban banjir di Luwu Utara, di bulan Juli;
- Masyarakat sekitar dalam bentuk hewan kurban, bekerja sama dengan SMV lainnya di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, di bulan Juli; serta
- Acara UMKM Naik Kelas Golf Tournament 2020, di bulan Desember.

IIF-financed infrastructure projects are encouraged to draw on the local workforce to fill possible vacancies. In addition, they are also required to carry out empowerment programs for the surrounding community, both through training and competency development programmes, as well as by improving the social facilities and other forms of donation.

A complete discussion of IIF's social performance can be found in the 2020 Sustainability Report.

IIF's Community Empowerment Initiatives in 2020

In 2020, IIF directly undertook and was involved in a number of community empowerment initiatives.

IIF provided some donations to various beneficiaries, including:

- Employees affected by the flood in Jakarta in January;
- Human Initiative to fight the spread of Covid-19, in collaboration with other SMVs, in April;
- Sayap Ibu Bintaro Foundation (an orphanage for underprivileged children) and Menemani Foundation (which is empowering youth through education and health assistance), through the IIF Cares and Shares 2020 programme, in May;
- Indonesian Red Cross for flood victims in North Luwu, in July;
- Surrounding communities in the form of kurban, in collaboration with other SMVs under the coordination of the Ministry of Finance, in July; and
- UMKM Naik Kelas Golf Tournament 2020 event in December.



Dengan mempertimbangkan kondisi pembatasan mobilitas di era pandemi, IIF di bulan Juni (bersama SMV lainnya di bawah koordinasi SMI) mengundang Tompi untuk tampil dalam Konser Virtual sekaligus penggalangan dana, berjudul "Optimis Lewat Nada".

Taking into account the mobility restrictions during the pandemic era, IIF in June (together with other SMVs under the coordination of SMI) invited Tompi to appear in a virtual concert-cum-fundraiser titled "Optimis Lewat Nada".

Kebijakan dan Prosedur Anti-Korupsi

IIF tidak menoleransi praktik korupsi dalam semua aktivitas dan interaksinya dengan semua pemangku kepentingannya. Untuk memastikan hal tersebut, IIF mengadakan sosialisasi dan pelatihan rutin terkait kebijakan dan prosedur anti-korupsi kepada semua karyawannya, dari manajemen puncak hingga karyawan di tingkatan terendah.

Anti-Corruption Policy and Procedures

IIF does not tolerate the practice of corruption in all of its activities and interactions with all its stakeholders. To ensure this, IIF conducts regular dissemination and training on anti-corruption policies and procedures to all of its employees, from top management to employees at the lowest level.

Sosialisasi juga diberikan kepada semua pemangku kepentingan eksternal, khususnya kepada klien yang menerima pembiayaan dari IIF, serta organisasi yang bermitra dengan IIF.

Dissemination is also provided to all external stakeholders, especially to clients who receive financing from IIF, and to IIF's partnering organizations.

Pada tahun 2020, IIF tidak mendeteksi terjadinya praktik korupsi dalam semua aktivitas bisnisnya.

In 2020, IIF did not detect any instance of corruption across all of its business activities.

Layanan kepada Konsumen

Services to Customers

IIF memegang teguh prinsip keterbukaan informasi dalam menjalankan bisnis. Ini juga berlaku untuk produk dan layanan yang diberikan kepada klien atau nasabah proyek infrastruktur.

IIF upholds the principle of information disclosure in running its business. This also applies to products and services provided to its infrastructure project clients or customers.

Keterbukaan informasi diwujudkan melalui penyediaan akses terhadap informasi melalui situs IIF: www.iif.co.id. Informasi dalam situs tersebut diperbarui secara berkala dan diuji ketersediaannya.

Information disclosure is ensured through the provision of access to information on IIF website: www.iif.co.id. The information on this site is regularly updated and tested for availability.

IIF juga mengkaji dan menetapkan *Service Level Agreement* (SLA) dalam interaksinya dengan para kliennya.

IIF also reviews and establishes the Service Level Agreement (SLA) in its interactions with its clients.

Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020 PT Indonesia Infrastructure Finance

Statement of the Board of Commissioners on the Responsibility for the 2020 Annual Report of PT Indonesia Infrastructure Finance

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Indonesia Infrastructure Finance tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, declare that all information disclosed in the 2020 Annual Report of PT Indonesia Infrastructure Finance is presented in its entirety and we are fully responsible for the contents of this Annual Report. This statement is hereby in all truthfulness.

Jakarta, Maret / March 2021

Dewan Komisaris Board of Commissioners



Darmin Nasution

Presiden Komisaris & Komisaris Independen
President Commissioner & Independent Commissioner



Sonny Loho

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Rinaldi Firmansyah

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Yon Arsal

Komisaris
Commissioner



Bhimantara Widyajala

Komisaris
Commissioner



Lodewijk Govaerts

Komisaris
Commissioner



Andreas Zeisler

Komisaris
Commissioner



Richard Lyon Ranken

Komisaris
Commissioner



Ken Tomisaki

Komisaris
Commissioner

Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020 PT Indonesia Infrastructure Finance

Statement of the Board of Directors on the Responsibility
for the 2020 Annual Report of PT Indonesia Infrastructure Finance

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Indonesia Infrastructure Finance tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, declare that all information disclosed in the 2020 Annual Report of PT Indonesia Infrastructure Finance is presented in its entirety and we are fully responsible for the contents of this Annual Report. This statement is hereby in all truthfulness.

Jakarta, Maret / March 2021

Direksi
Board of Directors



Reynaldi Hermansjah

Presiden Direktur & *Chief Executive Officer*
President Director & Chief Executive Officer



Devi Pradnya Paramita

Direktur Pelaksana & *Chief Financial Officer*
Managing Director & Chief Financial Officer



I Made Wiracita Tantra

Direktur Pelaksana & *Chief Risk Officer*
Managing Director & Chief Risk Officer



Y. Bayu Wirawan

Direktur Pelaksana & *Chief Investment Officer*
Managing Director & Chief Investment Officer



Mohammad Ramadhan Harahap

Direktur Pelaksana & *Chief Investment Officer*
Managing Director & Chief Investment Officer



Daftar singkatan List of Abbreviations

Singkatan Abbreviation	Kepanjangan	Full Name
ADB	Asian Development Bank	Asian Development Bank
ALCO	Komite Aset dan Liabilitas	Asset and Liability Committee
BBM	Bahan Bakar Minyak	Petroleum
BEI	Bursa Efek Indonesia	Indonesia Stock Exchange
BOC-IC	Komite Investasi Dewan Komisaris	Board of Commissioners Investment Committee
BOD-IC	Komite Investasi Direksi	Board of Directors Investment Committee
BUMN	Badan Usaha Milik Negara	State Owned Enterprise
DEG	Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH	Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
HRC	Komite Sumber Daya Manusia	Human Resources Committee
IDX	Bursa Efek Indonesia	Indonesia Stock Exchange
IFC	International Finance Corporation	International Finance Corporation
ITSC	Komite Pengarah Teknologi Informasi	Information Technology Steering Committee
JPY	Yen Jepang	Japanese Yen
KPBU	Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha	Public Private Partnership
LNG	Gas Alam Cair	Liquefied Natural Gas
MMSCFD	Juta kaki kubik standar per hari	Million standard cubic feet per day
MW	Megawatt	Megawatt
NRC	Komite Nominasi dan Remunerasi	Nomination and Remuneration Committee
OJK	Otoritas Jasa Keuangan	Financial Services Authority
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum	Regional Drinking Water Company
PLTA	Pembangkit Listrik Tenaga Air	Hydroelectric Power Plant
PLTP	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	Geothermal Power Plant
PMK	Peraturan Menteri Keuangan	Regulation of the Finance Minister
POJK	Peraturan OJK	OJK Regulation
PPP	Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha	Public Private Partnership
PTLS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Solar Power Plant
RDPT	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	Limited Participation Mutual Fund
RMC	Komite Manajemen Risiko	Risk Management Committee
ROC	Komite Pemantau Risiko	Risk Oversight Committee
SEMS	Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan	Social and Environmental Management System
SEOJK	Surat Edaran OJK	OJK Circular
SMBC	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
SMI	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
SMV	Special Mission Vehicle	Special Mission Vehicle
SOE	Badan Usaha Milik Negara	State Owned Enterprise
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum	Drinking Water Supply System
USD	Dolar Amerika Serikat	United States Dollar

PT Indonesia Infrastructure Finance

Laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

Financial statements

***As of December 31, 2020 and for the year then ended
with independent auditors' report***

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Pages	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Statement of Directors</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2-3	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas.....	4	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	5-6	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	7-156	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT/
BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Kami yang bertandatangan di bawah ini/*We, the undersigned:*

1. Nama/ <i>Name</i>	: Reynaldi Hermansjah
Alamat kantor/ <i>Office address</i>	: Prosperity Building Lantai 53-55 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
Alamat rumah/ <i>Domicile address</i>	: Jl. Mertilang I Blok JE.6/27, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan
Nomor telepon/ <i>Phone numbers</i>	: +62 21 5082 6600
Jabatan/ <i>Title</i>	: Presiden Direktur/ <i>President Director</i>
2. Nama/ <i>Name</i>	: Devi Pradnya Paramita
Alamat kantor/ <i>Office address</i>	: Prosperity Building Lantai 53-55 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
Alamat rumah/ <i>Domicile address</i>	: Apt. Taman Rasuna U.06-08-H
Nomor telepon/ <i>Phone numbers</i>	: +62 21 5082 6600
Jabatan/ <i>Title</i>	: Direktur Keuangan/ <i>Chief Financial Officer</i>

menyatakan bahwa/*declare that:*

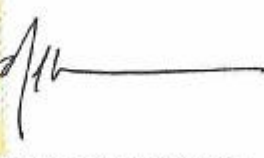
1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;	1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements;</i>
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. <i>The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i>
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah diungkapkan secara lengkap dan benar;	3. a. <i>All information in the financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;</i>
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	b. <i>The financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact;</i>
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.	4. <i>We are responsible for the internal control systems of the Company.</i>

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*

Jakarta, 15 Februari 2021/*February 15, 2021*

 Reynaldi Hermansjah Presiden Direktur/ <i>President Director</i>	 Devi Pradnya Paramita Direktur Keuangan/ <i>Chief Financial Officer</i>

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Prosperity Tower, 53rd - 55th Floor
District 8, Sudirman Central Business District, Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

P. +62 21 5082 6600
F. +62 21 5082 6601
E. info@iif.co.id
www.iif.co.id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00063/2.1032/AU.1/09/1681-1/1/II/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Indonesia Infrastructure Finance

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Indonesia Infrastructure Finance terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00063/2.1032/AU.1/09/1681-1/1/II/2021

*The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Indonesia Infrastructure Finance*

We have audited the accompanying financial statements of PT Indonesia Infrastructure Finance, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00063/2.1032/AU.1/09/1681-1/1/II/2021 (lanjutan)

Tanggung Jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indonesia Infrastructure Finance tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00063/2.1032/AU.1/09/1681-1/1/II/2021 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Indonesia Infrastructure Finance as of December 31, 2020 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Christophorus Alvin Kossim

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681/Public Accountant Registration No. AP.1681

15 Februari 2021/February 15, 2021

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2020	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2019	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	2.057.059	3e,3i,5,30	2.429.067	Cash and cash equivalents - net of allowance for impairment losses
Efek-efek - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	2.470.048	3e,6,30	2.732.936	Securities - net of allowance for impairment losses
Investasi saham	396.720	3e,8	389.636	Equity investments
Pinjaman diberikan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	9.197.486	3e,9,30	6.232.662	Loans - net of allowance for impairment losses
Tagihan derivatif	69.265	3e,3s,7	44.290	Derivative receivables
Piutang bunga	86.840	10,30	62.905	Accrued interest income
Beban dibayar dimuka	6.980	3j,11	8.593	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	344	3q,27	449	Prepaid taxes
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	276.883	3k,3n,3o,12	293.507	Property and equipment - net of accumulated depreciation
Aset pajak tangguhan	83.270	3q,27	86.735	Deferred tax assets
Beban tangguhan	21.328	3l,13,30	3.658	Deferred charges
Aset lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	18.149	3m,14,30	26.622	Other assets - net of allowance for impairment losses
TOTAL ASET	14.684.372		12.311.060	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas derivatif	117.200	3e,3s,7	39.670	Derivative liabilities
Utang lain-lain	5.897	3f,15,30	8.728	Other payables
Utang pajak	1.653	3q,27	1.676	Taxes payable
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	72.409	3f,16,30	37.985	Accrued expenses and other liabilities
Pendapatan diterima dimuka	8.106	18	4.388	Unearned revenue
Liabilitas imbalan kerja	27.499	3r,28	26.327	Employee benefits obligation
Pinjaman diterima	5.378.793	3f,19,30	4.713.745	Fund borrowings
Surat utang yang diterbitkan	2.735.233	3f,17,30	2.183.064	Debt securities issued
Pinjaman subordinasi	4.157.322	3f,20,30	3.142.918	Subordinated loans
TOTAL LIABILITAS	12.504.112		10.158.501	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham				Capital stock - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal dasar 2.000.000 saham				Authorized 2,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.000.000 saham	2.000.000	21	2.000.000	Subscribed and paid up 2,000,000 shares
Tambahan modal disetor	29.800	22	29.800	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain - neto	45.389	3e,6	5.336	Other comprehensive income - net
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	(93.760)	3f,3s,7	(29.752)	Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges - net
Keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai nilai wajar - neto	25.647	3f,3s,7	-	Cumulative gain on derivative instrument for fair value hedges - net
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	26.465	22	26.465	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	146.719		120.710	Unappropriated
TOTAL EKUITAS	2.180.260		2.152.559	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14.684.372		12.311.060	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2020	Catatan/ Notes	2019	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan bunga	859.928	3e,3p,23,30	786.371	Interest income
Pendapatan provisi dan komisi	33.700	3p,24,30	37.490	Provision and commission income
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek	7.562	3e,3p,6,30	4.067	Realized gain on sale of securities
Pendapatan jasa <i>advisory</i>	9.388	3p,30	8.059	Advisory income
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan investasi saham	-	8	1.010	Realized gain from sale of equity investments
Keuntungan yang direalisasi dari transaksi derivatif	-	3e,3s,7 3c	5.781	Realized gain from derivative transactions
Kerugian selisih kurs	(3.739)		(16.589)	Loss from foreign exchange
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi saham	-	3e,3h,8	24.795	Unrealized gain from changes in fair value of equity investments
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar opsi saham	-	3e,3s,8	(22.655)	Unrealized loss from changes in the fair value of shares option
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar transaksi derivatif	-	3e,3s,7 3p	8.745	Unrealized gain from changes in fair value of derivative transactions
Pendapatan lainnya	4.681		728	Other income
Total Pendapatan	911.520		837.802	Total Revenues
BEBAN				EXPENSES
Beban bunga	(605.272)	3p,26,30	(626.153)	Interest expense
Beban umum dan administrasi	(184.401)	3o,3p,25	(174.200)	General and administrative expenses
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(50.606)	3e,5,6,9,14	(5.045)	Provision for impairment losses
Total Beban	(840.279)		(805.398)	Total Expenses
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	71.241		32.404	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK	(28.731)	3q,27	(16.428)	TAX EXPENSE
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	42.510		15.976	NET INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified to profit or loss:
Kenaikan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	20.710	3e,3h,6	-	Increase in fair value of securities classified as fair value through other comprehensive income
Kenaikan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai arus kas	-	3e,3h,6	33.767	Increase in fair value of available-for-sale securities Effective portion on fair value changes from derivative instrument qualified as cash flow hedge
Perubahan neto atas cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(77.530)	3s,7	(39.670)	Net changes in allowance for impairment losses of securities classified as fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(218)	3e,3h,6	-	Income tax related to items that will be reclassified to profit or loss
	14.235	3q,27	9.347	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,				
	2020	Catatan/ Notes	2019	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN: (lanjutan)				OTHER COMPREHENSIVE INCOME: (continued)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	346	3r,28	(2.801)	Actuarial gain/(loss)
Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi				Fair value changes from derivative instrument
lindung nilai nilai wajar	24.975	3s,8	-	qualified as fair value hedge
Perubahan nilai wajar investasi saham yang diklasifikasikan				Fair value changes from equity investment classified
pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	7.084	3s,8	-	as fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(6.495)	3q,27	700	Income tax related to items that will not be reclassified to profit or loss
Total (rugi)/penghasilan komprehensif lain	(16.893)	3q	1.343	Total other comprehensive (loss)/income
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	25.617		17.319	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
LABA PER SAHAM				INCOME PER SHARE
Dasar (dalam ribuan Rupiah)	21	3u,36	8	Basic (in thousands of Rupiah)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Capital stock	Tambahkan modal disetor/ Additional paid-in capital	Saldo laba/Retained earnings*)		Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas-neto/Cumulative loss on derivative for cash flow hedges-net	Keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai nilai wajar-neto/ Cumulative loss on derivative for fair value hedges-net	Total ekuitas/ Total equity	
				Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated					
Saldo 1 Januari 2019		2.000.000	29.800	26.465	106.835	(27.860)	-	-	2.135.240	Balance as of January 1, 2019
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	15.976	-	-	-	15.976	Net income for the year
Kerugian aktuarial	3r,28	-	-	-	(2.101)	-	-	-	(2.101)	Actuarial loss
Kenaikan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual	3e,6	-	-	-	-	33.196	-	-	33.196	Increase in fair value of available-for-sale securities
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai arus kas	3e,3h,7	-	-	-	-	-	(29.752)	-	(29.752)	Effective portion on fair value changes from derivative instrument qualified as cash flow hedges
Saldo 31 Desember 2019		2.000.000	29.800	26.465	120.710	5.336	(29.752)	-	2.152.559	Balance as of December 31, 2019
Saldo 1 Januari 2020		2.000.000	29.800	26.465	120.710	5.336	(29.752)	-	2.152.559	Balance as of January 1, 2020
Dampak penerapan PSAK No. 71	37	-	-	-	(16.764)	18.848	-	-	2.084	Impact of SFAS No. 71 implementation
Saldo 1 Januari 2020 setelah dampak penerapan PSAK No. 71	3e,3h,6	2.000.000	29.800	26.465	103.946	24.184	(29.752)	-	2.154.643	Balance as of January 1, 2020 after impact of SFAS No. 71 implementation
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	42.510	-	-	-	42.510	Net income for the year
Keuntungan aktuarial	3r,28	-	-	-	263	-	-	-	263	Actuarial gain
Kenaikan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3e,3h,6	-	-	-	-	21.423	-	-	21.423	Increase in fair value of securities classified as fair value through other comprehensive income
Perubahan neto atas cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3e,3h,6	-	-	-	-	(218)	-	-	(218)	Net changes in allowance for impairment losses of securities classified as fair value through other comprehensive income
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai arus kas	3e,3h,7	-	-	-	-	-	(64.008)	-	(64.008)	Effective portion on fair value changes from derivative instrument qualified as cash flow hedges
Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai nilai wajar	3e,3h,7	-	-	-	-	-	-	19.980	19.980	Fair value changes from derivative instrument qualified as fair value hedges
Perubahan nilai wajar investasi saham yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3e,3h,8	-	-	-	-	-	-	5.667	5.667	Fair value changes from equity investment classified as fair value through other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2020		2.000.000	29.800	26.465	146.719	45.389	(93.760)	25.647	2.180.260	Balance as of December 31, 2020

*) Saldo laba termasuk keuntungan/(kerugian) aktuarial - neto setelah pajak

*) Retained earnings include actuarial gain/(loss) - net of tax

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2020	Catatan/ Notes	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan pendapatan bunga	734.620		857.275	Receipt of interest income
Penerimaan pendapatan provisi dan komisi	42.203		40.696	Receipt of provision and commission income
Pembayaran kepada pemasok	(60.305)		(54.404)	Payment to suppliers
Pembayaran kepada karyawan	(73.726)		(91.502)	Payment to employees
Penerimaan pendapatan advisory	7.713		7.901	Receipt of advisory income
Pembayaran biaya pinjaman diterima dan surat utang diterbitkan	(3.930)		(6.453)	Payment of cost for fund borrowings and debt securities issued
Pembayaran pajak final dan pajak penghasilan badan	(12.782)		(13.957)	Payment of final tax and corporate income tax
Penerimaan pengembalian pajak	296		9.345	Tax refund received
Penerimaan dividen	3.542		-	Dividend received
Pembayaran beban bunga	(584.642)		(612.442)	Payment of interest expense
Kas diperoleh dari aktivitas operasi	52.989		136.459	Cash received from operating activities
Pinjaman diberikan kepada nasabah	(3.682.213)		(1.422.689)	Loans granted to customers
Penerimaan pembayaran pinjaman diberikan	803.541		832.155	Receipt of repayment of loans
Arus kas netto yang digunakan untuk aktivitas operasi	(2.825.683)		(454.075)	Net cash used in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian efek-efek	(215.124)		(586.920)	Purchase of securities
Penjualan efek-efek	538.400		1.024.457	Sale of securities
Perolehan aset tetap	(13)		(173)	Acquisition of property and equipment
Perolehan perangkat lunak	(943)		(889)	Acquisition of computer software
Arus kas netto yang diperoleh dari aktivitas investasi	322.320		436.475	Net cash provided by investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman diterima	3.285.000		1.802.250	Proceeds from fund borrowings
Penerimaan pinjaman subordinasi	1.080.000		300.000	Proceeds from subordinated loans
Penerimaan surat utang yang diterbitkan	1.500.000	17	1.500.000	Proceeds from debt securities issued
Pembayaran pinjaman diterima	(2.635.000)		(625.000)	Payment of fund borrowings
Pembayaran surat utang yang diterbitkan	(965.000)		(1.025.000)	Payment of debt securities issued
Pembayaran pinjaman subordinasi	(112.229)		(100.497)	Payment of subordinated loans
Arus kas netto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	2.152.771		1.851.753	Net cash provided by financing activities
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(350.592)		1.834.153	NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2020	Catatan/ Notes	2019	
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	(21.373)	3c	12.553	Impact of changes in foreign currencies exchange rate on cash and cash equivalents
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	2.429.067	3i	582.361	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	2.057.102	3i,5	2.429.067	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

PT Indonesia Infrastructure Finance ("Perusahaan") didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian No. 34 tanggal 15 Januari 2010, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU 21503.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 43 tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai perubahan atas pasal 4 ayat (3), pasal 4 ayat (4), pasal 10, pasal 11 ayat (3), pasal 13, pasal 19, pasal 22 dan pasal 23. Laporan atas perubahan Anggaran Dasar telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0227487 tanggal 31 Juli 2018.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha berikut ini:

- a. memberikan pinjaman dalam bentuk, antara lain, pinjaman senior, pinjaman subordinasi/*mezzanine financing*, *bridge financing*, *take-out financing* dan/atau pembiayaan kembali;
- b. memberikan jaminan dalam bentuk, antara lain, pemenuhan liabilitas keuangan, *credit enhancement* dan/atau *performance bonds*;
- c. penyertaan modal;
- d. memberikan jasa dalam mencari pasar *swap* yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan infrastruktur;
- e. memberikan jasa konsultasi yang berkaitan dengan, antara lain, penilaian risiko, analisa kelayakan, struktur proyek, model pembiayaan, dan/atau pembangunan proyek; dan
- f. melakukan kegiatan pembiayaan lain yang terkait dengan proyek-proyek infrastruktur sebagaimana diizinkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

1. GENERAL

PT Indonesia Infrastructure Finance (the "Company") was established under the laws of the Republic of Indonesia through Deed of Establishment No. 34 dated January 15, 2010, drawn up before Aulia Taufani, S.H., as substitute of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-21503.AH.01.01.Year 2010 dated April 28, 2010 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated March 11, 2011, Supplementary No. 5123. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently with Deed No. 43 dated July 24, 2018, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, regarding the change in article 4 par. (3), article 4 par. (4), article 10, article 11 par. (3), article 13, article 19, article 22 and article 23. Report of such changes had been accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in the letter No. AHU-AH.01.03-0227487 dated July 31, 2018.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the objective of its activities is to engage in financing infrastructure projects in Indonesia.

The Company may perform the following activities to achieve its objectives:

- a. *provide loans in the form of, among others, senior debts, subordinated debts/mezzanine financing, bridge financing, take-out financing and/or refinancing;*
- b. *provide guarantees in the form of, among others, fulfilment of financial liabilities, credit enhancement, and/or performance bonds;*
- c. *equity investment;*
- d. *provide services involving search for swap market related to infrastructure financing companies;*
- e. *provide consultation services related to, among others, risk assessment, feasibility analysis, project structuring, financing scheme, and/or project development; and*
- f. *other financing activities related to infrastructure projects as permitted by the Minister of Finance Regulation No.100/PMK.010/2009 regarding Infrastructure Finance Company.*

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Perusahaan telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatannya melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus 2010.

Melalui surat dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. S-2/D.05/2018 tertanggal 2 Januari 2018, Perusahaan juga telah mendapatkan persetujuan perluasan sektor infrastruktur termasuk diantaranya infrastruktur sosial.

Sejak tanggal 5 Juli 2018, kantor Perusahaan berlokasi di Prosperity Tower lantai 53-55, Sudirman Central Business District Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta, Indonesia.

Personil manajemen kunci mencakup Dewan Komisaris dan Direksi.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020
Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	Darmin Nasution ^{a)}
Plt. Presiden Komisaris	-
Komisaris Independen	Rinaldi Firmansyah
	Sonny Loho
Komisaris	Richard Lyon Ranken
	Lodewijk Govaerts
	Andreas Manfred Zeisler
	Bhimantara Widyajala
	Ken Tomisaki ^{e)}
	Yon Aرسال ^{d)}
Direksi	
Presiden Direktur	Reynaldi Hermansjah
Direktur	Mohammad Ramadhan Harahap ^{b)}
	Yanindya Bayu Wirawan ^{c)}
	Devi Pradnya Paramita
	I Made Wiracita Tantra

- a) Efektif sejak 14 Juli 2020, Bapak Darmin Nasution menjabat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan.
- b) Efektif sejak 30 Juni 2020, Bapak Mohammad Ramadhan Harahap menjabat sebagai Direktur Perusahaan.
- c) Efektif sejak 30 Juni 2020, Bapak Yanindya Bayu Wirawan menjabat sebagai Direktur Perusahaan.
- d) Efektif sejak 22 Juni 2020, Bapak Yon Aرسال menjabat sebagai Komisaris Perusahaan menggantikan Bapak Muhamad Al Arif.
- e) Efektif sejak 12 Juni 2020, Bapak Ken Tomisaki menjabat sebagai Komisaris Perusahaan menggantikan Bapak Rajeev Kannan.

1. GENERAL (continued)

The Company has obtained its business license from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 dated August 6, 2010.

Through Financial Service Authority Letter ("OJK") No. S-2/D.05/2018 dated January 2, 2018, the Company also obtained an approval of the expansion of infrastructure sectors including among others social infrastructure.

Since July 5, 2018, the Company's office is located at the Prosperity Tower 53th-55th floor, Sudirman Central Business District Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta, Indonesia.

Key management personnel consists of the Boards of Commissioners and Directors.

The members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	
		Board of Commissioners
	M. Chatib Basri ⁱ⁾	President Commissioner
	Sonny Loho ^{j)}	Interim President Commissioner
	Rinaldi Firmansyah	Independent Commissioners
	Sonny Loho	
	Richard Lyon Ranken	Commissioners
	Lodewijk Govaerts	
	Andreas Manfred Zeisler	
	Bhimantara Widyajala	
	Rajeev Kannan	
	Muhamad Al Arif ^{g)}	
		Board of Directors
	Reynaldi Hermansjah	President Director
	Harold J.D. Tjiptadaja ^{h)}	Directors
	Hilda Savitri ⁱ⁾	
	Devi Pradnya Paramita	
	I Made Wiracita Tantra	

- a) Effective July 14, 2020, Mr. Darmin Nasution has served as President Commissioner of the Company.
- b) Effective June 30, 2020, Mr. Mohammad Ramadhan Harahap has served as Director of the Company.
- c) Effective June 30, 2020, Mr. Yanindya Bayu Wirawan has served as Director of the Company.
- d) Effective June 22, 2020, Mr. Yon Aرسال has served as Commissioner of the Company replacing Mr. Muhamad Al Arif.
- e) Effective June 12, 2020, Mr. Ken Tomisaki has served as Commissioner of the Company replacing Mr. Rajeev Kannan.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

- f) Efektif sejak 15 Mei 2020, Ibu Hilda Savitri mengakhiri masa jabatan sebagai Direktur Perusahaan.
- g) Efektif sejak 19 Maret 2020, Bapak Muhamad Al Arif mengakhiri masa jabatan sebagai Komisaris Perusahaan.
- h) Efektif sejak 31 Januari 2020, Bapak Harold J.D. Tjiptadjaja mengakhiri masa jabatan sebagai Direktur Perusahaan.
- i) Pada tanggal 9 Desember 2019, Bapak M. Chatib Basri mengajukan pengunduran diri sebagai Presiden Komisaris Perusahaan.
- j) Efektif sejak 9 Desember 2019, Bapak Sonny Loho menjabat sebagai Pelaksana Tugas Presiden Komisaris Perusahaan menggantikan Bapak M. Chatib Basri.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan No. 31 tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta, Bapak Andreas Manfred Zeisler diangkat sebagai Komisaris Perusahaan menggantikan Bapak Hans Juergen Hertel efektif sejak tanggal 21 Maret 2019. Pemberitahuan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0185742 tanggal 4 April 2019.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 1 Maret 2019, yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, Bapak Reynaldi Hermansjah diangkat sebagai Presiden Direktur Perusahaan menggantikan Bapak I Made Wiracita Tantra yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Presiden Direktur Perusahaan efektif sejak tanggal 20 April 2019. Pemberitahuan perubahan susunan Direksi Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Melalui surat No. AHU-AH 01.03-0132065 tanggal 5 Maret 2019.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 14 Agustus 2019, yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, Bapak Lodewijk Govaerts diangkat sebagai Komisaris Perusahaan menggantikan Bapak Robert Olivier Dolk efektif sejak tanggal 26 Juli 2019. Pemberitahuan perubahan susunan Komisaris Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0313710 tanggal 14 Agustus 2019.

1. GENERAL (continued)

- f) Effective May 15, 2020, Mrs. Hilda Savitri ended her term of service as Director of the Company
- g) Effective March 19, 2020, Mr. Muhamad Al Arif ended his term of service as Commissioner of the Company.
- h) Effective January 31, 2020, Mr. Harold J.D. Tjiptadjaja ended his term of service as Director of the Company..
- i) On December 9, 2019, Mr. M. Chatib Basri submitted resignation letter as President Commissioner of the Company.
- j) Effective December 9, 2019, Mr. Sonny Loho has served as Interim President Commissioner of the Company replacing Mr. M. Chatib Basri.

Based on Decree No. 31 of Annual General Meeting of Shareholders dated March 21, 2019, of Aulia Taufani, S.H., notary in Jakarta, Mr. Andreas Manfred Zeisler was appointed as Commissioner of the Company replacing Mr. Hans Juergen Hertel effective since March 21, 2019. This change of the Company's Board of Commissioners was acknowledged by the Minister of Law and Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH-01.03-0185742 dated April 4, 2019.

Based on Decree No. 01 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated March 1, 2019, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, Mr. Reynaldi Hermansjah was appointed as the President Director of the Company replacing Mr. I Made Wiracita Tantra as the interim President Director of the Company effective since April 20, 2019. This change of the Company's Board of Directors was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH 01.03-0132065 dated March 5, 2019.

Based on Decree No. 10 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 14, 2019, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, Mr. Lodewijk Govaerts was appointed as Commissioner of the Company replacing Mr. Robert Olivier Dolk effective since July 26, 2019. This change of the Company's Board of Commissioners was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH-01.03-0313710 dated August 14, 2019.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 14 Agustus 2019, yang dibuat oleh Utiék R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, menyetujui pengangkatan kembali Ibu Hilda Savitri sebagai Direktur Perusahaan dan menyetujui pengunduran diri Ibu Indrawati Darmawan sebagai Direktur Perusahaan. Pemberitahuan perubahan susunan Direktur Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0313722 tanggal 14 Agustus 2019.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 6 Desember 2019, yang dibuat oleh Utiék R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, menyetujui pengangkatan Ibu Devi Pradnya Paramita sebagai Direktur Perusahaan menggantikan Bapak Reynaldi Hermansjah sebagai Pelaksana Tugas Direktur Keuangan Perusahaan sejak 1 Desember 2019. Pemberitahuan perubahan susunan Direktur Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0369616 tanggal 6 Desember 2019.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 10 Februari 2020, yang dibuat oleh Utiék R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, menyetujui pengangkatan Bapak Sonny Loho sebagai Pelaksana Tugas Presiden Komisaris Perusahaan dan menyetujui pengunduran diri Bapak Harold J.D. Tjiptadaja sebagai Direktur Perusahaan dan Bapak M. Chatib Basri sebagai Presiden Komisaris Perusahaan sejak 9 Desember 2019. Pemberitahuan perubahan susunan Direktur Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0081900 tanggal 12 Februari 2020.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan No. 21 tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat oleh Utiék R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, menyetujui pengunduran diri Bapak Muhamad Al Arif sebagai Komisaris Perusahaan efektif sejak tanggal 19 Maret 2020. Pemberitahuan perubahan susunan Komisaris Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0181283 tanggal 9 April 2020.

1. GENERAL (continued)

Based on Decree No. 11 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 14, 2019, of Utiék R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, approved the reappointment of Ms. Hilda Savitri as Director of the Company and approved the resignation of Ms. Indrawati Darmawan as Director of the Company. This change of the Company's Board of Directors was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH.01.03-0313722 dated August 14, 2019.

Based on Decree No. 1 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated December 6, 2019, of Utiék R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, approved the appointment of Ms. Devi Pradnya Paramita as Director replacing Mr. Reynaldi Hermansjah as the Interim Financial Director of the Company effective since December 1, 2019. This change of the Company's Board of Directors was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH 01.03-0369616 dated December 6, 2019.

Based on Decree No. 23 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated February 10, 2020, of Utiék R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, approved the appointment of Mr. Sonny Loho as Interim President Commissioner of the Company, approved the resignation of Mr. Harold J.D. Tjiptadaja as Director of Company and Mr. M. Chatib Basri as the President Commissioner of the Company effective since December 9, 2019. This change of the Company's Board of Directors was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH.01.03-0081900 dated February 12, 2020.

Based on Decree No. 21 of Annual General Meeting of Shareholders dated March 19, 2020, of Utiék R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, approved the resignation of Mr. Muhamad Al Arif as Commissioner of the Company effective since March 19, 2020. The changes of the Company's Board of Commissioners was acknowledged by the Minister of Law and Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH.01.03-0181283 dated April 9, 2020.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan No. 21 tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, menyetujui pengunduran diri Ibu Hilda Savitri sebagai Direksi Perusahaan efektif sejak tanggal 15 Mei 2020. Pemberitahuan perubahan susunan Direktur Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0181283 tanggal 9 April 2020.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, menyetujui pengangkatan Bapak Ken Tomisaki sebagai Komisaris Perusahaan efektif sejak tanggal 12 Juni 2020. Pemberitahuan perubahan susunan Komisaris Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0255607 tanggal 23 Juni 2020.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, menyetujui pengangkatan Bapak Yon Aرسال sebagai Komisaris Perusahaan efektif sejak tanggal 22 Juni 2020. Pemberitahuan perubahan susunan Komisaris Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0293385 tanggal 15 Juli 2020.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, menyetujui pengangkatan Bapak Mohammad Ramadhan Harahap dan Bapak Yanindya Bayu Wirawan sebagai Direktur Perusahaan efektif sejak tanggal 30 Juni 2020. Pemberitahuan perubahan susunan Direktur Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0267137 tanggal 30 Juni 2020.

1. GENERAL (continued)

Based on Decree No. 21 of Annual General Meeting of Shareholders dated March 19, 2020, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta approved the resignation of Ms. Hilda Savitri as Director of the Company effective since May 15, 2020. The changes of the Company's Board of Directors was acknowledged by the Minister of Law and Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH.01.03-0181283 dated April 9, 2020.

Based on Decree No. 12 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 16, 2020, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, approved the appointment of Mr. Ken Tomisaki as Commissioner of the Company effective since June 12, 2020. The changes of the Company's Board of Commissioners was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH.01.03-0255607 dated June 23, 2020.

Based on Decree No. 10 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated July 15, 2020, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, approved the appointment of Mr. Yon Aرسال as Commissioner of the Company effective since June 22, 2020. The changes of the Company's Board of Commissioners was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH.01.03-0293385 dated July 15, 2020.

Based on Decree No. 13 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 16, 2020, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, approved the appointment of Mr. Mohammad Ramadhan Harahap and Mr. Yanindya Bayu Wirawan as Director of the Company effective since June 30, 2020. The changes of the Company's Board of Directors was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH.01.03-0267137 dated June 30, 2020.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 20 Juli 2020, yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, menyetujui pengangkatan Bapak Darmin Nasution sebagai Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perusahaan efektif sejak tanggal 14 Juli 2020. Pemberitahuan perubahan susunan Komisaris Perusahaan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat AHU-AH.01.03-0306759 tanggal 24 Juli 2020.

Susunan anggota Komite Investasi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berasal dari seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada tanggal 21 Maret 2018, Bapak Asep Hikmat diangkat sebagai anggota independen Komite Audit menggantikan Bapak Agus Kretarto.

Komite Audit Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020
Ketua	Sonny Loho
Anggota	Darmin Nasution ^{a)} Rinaldi Firmansyah Asep Hikmat
Anggota Independen	
a)	Efektif tanggal 19 Agustus 2020, Bapak Darmin Nasution menjabat sebagai anggota Komite Audit Perusahaan.
b)	Pada tanggal 9 Desember 2019, Bapak M. Chatib Basri mengundurkan diri sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan.

Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020
Komite Pemantau Risiko	
Ketua	Rinaldi Firmansyah
Anggota	Lodewijk Govaerts Andreas Manfred Zeisler Yon Aرسال ^{a)} Darmin Nasution ^{b)}

1. GENERAL (continued)

Based on Decree No. 14 of Circulation Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated July 20, 2020, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, approved the appointment of Mr. Darmin Nasution as President Commissioner/Independent Commissioners of the Company effective since July 14, 2020. The changes of the Company's Board of Commissioner was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-AH.01.03-0306759 dated July 24, 2020.

The members of the Company's Investment Committee as of December 31, 2020 and 2019 comprised of all members of the Boards of Commissioners and Directors.

On March 21, 2018, Mr. Asep Hikmat was appointed as independent member of Audit Committee replacing Mr. Agus Kretarto.

The members of the Company's Audit Committee as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	
	Sonny Loho	Chairman
	M. Chatib Basri ^{b)}	Members
	Rinaldi Firmansyah	
	Asep Hikmat	Independent Member
a)	Effective August 19, 2020, Mr. Darmin Nasution has served as member of the Company's Audit Committee.	
b)	On December 9, 2019, Mr. M. Chatib Basri resigned as Member of the Company's Audit Committee.	

The Company's Risk Oversight Committee and Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rinaldi Firmansyah	Risk Oversight Committee
	Muhamad Al Arif ^{a)}	Chairman
	Lodewijk Govaerts	Members
	Andreas Manfred Zeisler	
	M. Chatib Basri ^{b)}	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember/ December 31, 2020
Komite Nominasi dan Remunerasi	
Ketua	Darmin Nasution ^{a)}
Anggota	Richard Lyon Ranken Bhimantara Widyajala Ken Tomisaki ^{d)}
a)	Efektif sejak 19 Agustus 2020, Bapak Yon Aarsal menggantikan Bapak Muhamad Al Arif sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.
b)	Efektif sejak 19 Agustus 2020, Bapak Darmin Nasution menggantikan Bapak M. Chatib Basri sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.
c)	Efektif sejak 19 Agustus 2020, Bapak Darmin Nasution menggantikan Bapak M. Chatib Basri sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
d)	Efektif sejak 19 Agustus 2020, Bapak Ken Tomisaki menggantikan Bapak Rajeev Kannan sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
e)	Efektif sejak 19 Maret 2020, Bapak Muhamad Al Arif mengakhiri masa jabatan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.
f)	Efektif sejak 9 Desember 2019, Bapak M. Chatib Basri mengundurkan diri sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sekretaris perusahaan Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Bapak Nastantio W. Hadi.

Berdasarkan surat Perusahaan No. Ref. 017/IIF-HRD/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, kepala divisi audit internal Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Bapak Yudi Adrial.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah 106 orang dan 98 orang (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

The Company's Risk Oversight Committee and Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2020 and 2019 are as follows (continued):

	31 Desember/ December 31, 2019	Nomination and Remuneration Committee Chairman Members
	M. Chatib Basri ^{d)} Richard Lyon Ranken Bhimantara Widyajala Rajeev Kannan	
a)	Effective August 19, 2020, Mr. Yon Aarsal has replaced Mr. Muhamad Al Arif as a member of Risk Oversight Committee.	
b)	Effective August 19, 2020, Mr. Darmin Nasution has replaced Mr. M. Chatib Basri as a member of Risk Oversight Committee.	
c)	Effective August 19, 2020, Mr. Darmin Nasution has replaced Mr. M. Chatib Basri as a Chairman of Nomination and Remuneration Committee.	
d)	Effective August 19, 2020, Mr. Ken Tomisaki has replaced Mr. Rajeev Kannan as a member of Nomination and Remuneration Committee.	
e)	Effective March 19, 2020, Mr. Muhamad Al Arif ended his term of service as a member of Risk Oversight Committee.	
f)	Effective December 9, 2019, Mr. M. Chatib Basri resigned from his position as member of Risk Oversight Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee	

The corporate secretary of the Company as of December 31, 2020 and 2019 is Mr. Nastantio W. Hadi.

Based on the Company's letter No. Ref. 017/IIF-HRD/III/2012 dated March 30, 2012, the head of internal audit division of the Company as of December 31, 2020 and 2019 is Mr. Yudi Adrial.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company had 106 and 98 employees, respectively (unaudited).

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Penawaran umum obligasi

Obligasi I Tahun 2016

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-336/D.04/2016 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.

Pada tanggal 19 Juli 2016, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 13 Desember 2019, Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-198/D.04/2019 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.

Pada tanggal 19 Desember 2019, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020

Pada bulan Oktober 2020, Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.

Pada tanggal 22 Oktober 2020, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Penawaran medium term notes

Pada tanggal 24 Oktober 2018, Perusahaan melakukan penawaran terbatas *Medium Term Notes* I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp200.000.

1. GENERAL (continued)

Bonds public offering

Bond I Year 2016

On June 29, 2016, the Company obtained the effectivity statement from the Financial Services Authority through its letter No. S-336/D.04/2016 to conduct a Public Offering on Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016 to public with a nominal amount of Rp1,500,000.

On July 19, 2016, the bonds were listed in Indonesia Stock Exchange.

Shelf Registration Bond I Phase I Year 2019

On December 13, 2019, the Company obtained the effectivity statement from the Financial Services Authority through its letter No. S-198/D.04/2019 to conduct a Shelf Registration Public Offering on Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase I Year 2019 to public with a nominal amount of Rp1,500,000.

On December 19, 2019, the bonds were listed in Indonesia Stock Exchange.

Shelf Registration Bond I Phase II Year 2020

In October 2020, the Company conducted a Shelf Registration Public Offering on Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase II Year 2020 to public with a nominal amount of Rp1,500,000.

On October 22, 2020, the bonds were listed in Indonesia Stock Exchange.

Medium term notes offering

On October 24, 2018, the Company conducted a limited offering on Indonesia Infrastructure Finance Medium Term Notes I Year 2018 with a nominal amount of Rp200,000.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN BARU DAN REVISI

a. Perubahan kebijakan akuntansi dan
pengungkapan

Efektif 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru dan revisi yang relevan untuk Perusahaan, sebagai berikut:

Perusahaan telah menerapkan persyaratan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan" mulai 1 Januari 2020. Klasifikasi dan pengukuran dan persyaratan penurunan nilai aset keuangan diterapkan secara retrospektif dengan menyesuaikan saldo laba pada tanggal penerapan awal. Sebagaimana diizinkan oleh PSAK No. 71, Perusahaan tidak menyajikan kembali periode komparatif.

Perusahaan juga telah mengadopsi PSAK No. 73, "Sewa" mulai 1 Januari 2020. Identifikasi dan pengukuran atas aset hak guna dan liabilitas sewa diterapkan secara *modified retrospective* tanpa penyajian kembali periode komparatif.

Dampak atas penerapan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 73, "Sewa" pada tanggal 1 Januari 2020 diungkapkan pada Catatan 37.

Penerapan dari standar revisi berikut tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau periode sebelumnya:

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- Penyesuaian 2019 PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15".

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS

a. Changes in accounting policies and
disclosure

Effective on January 1, 2020, the Company has applied new and revised Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") which are relevant to the Company, as follows:

The Company has applied the requirements of SFAS No. 71, "Financial Instruments" starting January 1, 2020. Classification and measurement and impairment requirements for financial assets are applied retrospectively by adjusting retained earnings at the initial implementation date. As permitted by SFAS No. 71, the Company does not restate the comparative period.

The Company has also applied SFAS No. 73, "Leases" starting January 1, 2020. Identification and measurement of the right-of-use assets and lease liabilities are applied on a modified retrospective basis without a restatement for comparative period.

Impact of the implementation of SFAS No. 71, "Financial Instruments" and SFAS No. 73, "Leases" on January 1, 2020 is disclosed in Note 37.

The implementations of these revised standards did not result in substansial changes to Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior periods:

- Amendments of SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements"
- Amendment of SFAS No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors"
- Adjustment of 2019 SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements"
- SFAS No. 72, "Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15".

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN BARU DAN REVISI (lanjutan)

b. Standar akuntansi yang telah disahkan
namun belum berlaku efektif

Standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2021:

PSAK No. 22 (Amandemen 2019), "Kombinasi Bisnis", yang diadopsi dari IFRS 3.

Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau bukan. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan *output*, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amandemen.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (continued)

b. Accounting standards issued but not yet
effective

The standard that is issued by the Board of Financial Accounting Standards, but not yet effective for current year financial statements are disclosed below. The Company intends to adopt this standard, if applicable, when it becomes effective.

Effective on or after January 1, 2021:

SFAS No. 22 (Amendment 2019), "Business Combinations", adopted from IFRS 3.

These amendments were issued to help entities determine whether an acquired set of activities and assets is a business or not. They clarify the minimum requirements for a business, remove the assessment of whether market participants are capable of replacing any missing elements, add guidance to help entities assess whether an acquired process is substantive, narrow the definitions of a business and of outputs, and introduce an optional fair value concentration test. New illustrative examples were provided along with the amendments.

The Company is presently evaluating and has not yet determined the effects of this accounting standard on its financial statements.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK", yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013) No. VIII.G.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES

a. Statement of Compliance

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK", which function has been transferred to Financial Services Authority ("OJK") starting January 1, 2013) rule No. VIII.G.7, Appendix of the Decree of the Chairman of the BAPEPAM-LK No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of the Issuer or Public Company".

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

b. Penyajian Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia ("BI") yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Pos non-moneter diukur dalam biaya historis dalam mata uang asing yang dijabarkan kembali dengan nilai tukar pada saat tanggal awal transaksi.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kurs konversi 1 Dolar Amerika Serikat yang digunakan Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp14.105 dan Rp13.901 (nilai penuh).

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

b. Financial Statements Presentation

The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The statement of cash flows is prepared using the direct method which classifies cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Foreign Currency Transactions and Translation

The books of accounts of the Company are maintained in Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the Company operates (its functional currency). Transactions during the period involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made.

At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the middle exchange rates quoted by Bank Indonesia ("BI") at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to the current year profit or loss statement. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rates at the dates of the initial transaction.

The conversion rate per 1 United States Dollar used by the Company as of December 31, 2020 and 2019 were Rp14,105 and Rp13,901, respectively (full amount).

d. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor) (lanjutan):

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut (lanjutan):
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - v. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vi. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Transactions with Related Parties
(continued)

A related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity (continued):

- a. *A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person (continued):*
 - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b. *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions apply:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a company of which the other entity is a member).*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party.*
 - iv. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.*
 - v. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).*
 - vi. *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).*

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Seluruh transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, diungkapkan pada laporan keuangan.

e. Aset Keuangan

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)

Kebijakan berlaku mulai tanggal
1 Januari 2020

Terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan: biaya perolehan diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki, dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Aset keuangan hanya dapat dikategorikan sebagai biaya perolehan diamortisasi jika instrumen dimiliki dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual ("hold to collect"), dan dimana arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI). Pokok merupakan nilai wajar dari instrumen pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam peminjaman standar dan marjin laba. Kategori aset ini membutuhkan penilaian persyaratan kontraktual pada saat pengakuan awal untuk menentukan apakah kontrak mengandung persyaratan yang dapat mengubah waktu atau jumlah dari arus kas yang tidak konsisten dengan persyaratan SPPI.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Transactions with Related Parties
(continued)

All significant transactions with related parties, are disclosed in the financial statements.

e. Financial Assets

Financial assets (other than investment in sukuk)

Policy applicable from January 1, 2020

There are three measurement classifications for financial assets: amortized cost, fair value through profit or loss (FVTPL), and fair value through other comprehensive income (FVOCI).

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held, and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

Financial assets can only be held at amortized cost if the instruments are held in order to collect the contractual cash flows ("hold to collect"), and where those contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI). Principal represents the fair value of the instrument at the time of initial recognition. Interest in this context represents compensation for the time value of money and associated credit risks together with compensation for other risks and costs consistent with a basic lending arrangement and a profit margin. This requires an assessment at initial recognition of the contractual terms to determine whether it contains a term that could change the timing or amount of cash flows in a way that is inconsistent with the SPPI criteria.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari
2020 (lanjutan)

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual memiliki karakteristik SPPI, Perusahaan mempertimbangkan tujuan model bisnis adalah untuk memiliki aset untuk memperoleh arus kas kontraktual atau untuk memperoleh arus kas kontraktual dan dijual dan juga persyaratan kontraktual atas instrumen tersebut. Hal ini termasuk dalam hal menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak dapat memenuhi kondisi SPPI. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

- Hak yang dimiliki Perusahaan saat terdapat kepailitan dan keaslian kontrak;
- Penentuan mata uang pada aset;
- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- *Non-recourse arrangement*; dan
- Persyaratan pelunasan dipercepat atau perpanjangan fasilitas dan juga perubahan *time value of money* dari jumlah bunga.

Aset dapat dijual dari portofolio *hold to collect* ketika terdapat peningkatan risiko konsentrasi kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Aset keuangan berupa instrumen utang dimana tujuan model bisnis dicapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset ("*hold to collect and sell*") dan memiliki arus kas SPPI, diklasifikasikan sebagai FVOCI, dengan laba rugi yang belum direalisasi ditangguhkan di penghasilan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan.

Seluruh aset keuangan lainnya akan dipersyaratkan diklasifikasikan sebagai FVTPL. Aset keuangan dapat ditetapkan sebagai FVTPL hanya jika ini dapat mengeliminasi atau mengurangi *accounting mismatch*.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (lanjutan)

Policy applicable from January 1, 2020
(continued)

In assessing whether the contractual cash flows have SPPI characteristics, the Company considers the objective of its business model is to hold assets only to collect cash flows, or to collect cash flows and to sell and the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Company considers:

- *Rights in bankruptcy and genuinity of contracts;*
- *Currency denomination arrangement;*
- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Non-recourse arrangement; and*
- *Prepayment and extension terms, as well as modification on time value of money of interest.*

Assets may be sold out of hold to collect portfolios where there is an increase in credit concentration risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

*Financial asset of debt instruments where the business model objectives are achieved by collecting the contractual cash flows and by selling the assets ("*hold to collect and sell*") and that have SPPI cash flows are held at FVOCI, with unrealized gains or losses deferred in other comprehensive income until the asset is derecognized.*

All other financial assets will mandatorily be classified at FVTPL. Financial assets may be designated at FVTPL only if doing so eliminates or reduces an accounting mismatch.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020
(lanjutan)

Efek-efek

Setelah pengakuan awal, efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Sementara efek-efek yang diukur pada FVOCI, setelah pengakuan awal akan diukur pada nilai wajar dimana keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan pada komponen terpisah pada ekuitas. Pada saat penghentian pengakuan, akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar, neto setelah akumulasi cadangan kerugian kredit ekspektasian, ditransfer ke laba rugi. Untuk efek-efek yang dipersyaratkan diukur atas nilai wajar melalui laba rugi, setelah pengakuan awal akan diukur pada nilai wajar dimana keuntungan dan kerugian yang timbul akibat perubahan nilai wajar dicatat dalam laba rugi.

Pinjaman diberikan

Setelah pengakuan awal, pinjaman diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi diukur menggunakan metode suku bunga efektif.

Investasi saham

Investasi saham diukur pada FVOCI, dimana keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan pada komponen terpisah pada ekuitas.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (lanjutan)

Policy applicable from January 1, 2020
(continued)

Securities

After initial recognition, securities held at amortized cost is amortized using the effective interest rate. While securities held at FVOCI are subsequently carried at fair value with all unrealized gains and losses arising from changes in fair value recognized in other comprehensive income and accumulated in separate component of equity. On derecognition, the cumulative fair value gains or losses, net of the cumulative expected credit loss reserve, are transferred to the profit or loss. For securities mandatorily held at fair value through profit or loss are subsequently carried at fair value with gains or losses arising from the changes in fair value recorded in profit or loss.

Loans

Subsequent to initial recognition, loans are measured at amortized cost. Amortized cost is recognized using the effective interest method.

Equity investments

Equity investments are measured at FVOCI, where all unrealized gains and losses arising from changes in fair value recognized in other comprehensive income and accumulated in separate component of equity.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh konvensi pasar yang berlaku. Aset keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
- Pinjaman yang diberikan dan piutang
- Dimiliki hingga jatuh tempo
- Tersedia untuk dijual

Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang bukan merupakan kontrak jaminan keuangan atau ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Policy applicable before January 1, 2020

All financial assets are recognized and derecognized on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market convention. All financial assets are initially measured at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets classified as at fair value through profit or loss.

The Company's financial assets are classified into the following:

- Fair value through profit or loss (FVTPL)
- Loans and receivables
- Held-to-maturity
- Available-for-sale

The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. The management determines the classification of the financial assets at the time of the initial recognition.

Fair value through profit or loss (FVTPL)

Financial assets are classified as at FVTPL when the financial asset is either held-for-trading or it is designated as at FVTPL.

A financial asset is classified as held-for-trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of selling it in the near term; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not a financial guarantee contract or a designated and effective hedging instrument.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum tanggal 1 Januari
2020 (lanjutan)

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) (lanjutan)

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- Perusahaan merupakan organisasi yang bidang usahanya bergerak dalam investasi aset keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan menyeluruh dalam bentuk bunga atau dividen atau perubahan dalam nilai wajarnya. Dengan kondisi ini, perusahaan dapat menetapkan investasi tersebut dalam kategori FVTPL, dengan syarat tidak memiliki hak pengendali di investasi tersebut; atau
- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"), misalnya direksi; atau
- jika merupakan kontrak *hybrid* yang terdapat satu atau lebih derivatif melekat.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Policy applicable before January 1, 2020
(continued)

Fair value through profit or loss (FVTPL)
(continued)

A financial asset, other than a financial asset held-for-trading, may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- The company is an entity whose business is investing in financial assets with a view to profiting from the total return in the form of interest or dividends and changes in fair value. In this condition, such company may designate such investment at FVTPL, provided it does not hold a controlling interest; or
- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or
- a group of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the entity's key management personnel (as defined in SFAS No. 7, "Related Party Disclosures"), for example the entity's board of directors; or
- if it is a hybrid contract containing one or more embedded derivative.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum tanggal 1
Januari 2020 (lanjutan)

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) (lanjutan)

Aset keuangan yang termasuk dalam kategori ini pada saat awal pengakuan dan selanjutnya dicatat pada nilai wajar; biaya transaksi diakui langsung pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar dan penjualan dari aset keuangan ini diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan masing-masing dilaporkan sebagai "keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar", "keuntungan/(kerugian) dari penjualan efek-efek", "keuntungan direalisasi dari penjualan investasi saham", dan "keuntungan/(kerugian) yang direalisasi dari transaksi derivatif". Pendapatan bunga yang berasal dari instrumen keuangan yang diklasifikasi dalam FVTPL diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Pendapatan bunga".

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang dari nasabah dan piutang dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasikan sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang".

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan dikurangi dengan *upfront fee* dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bunga dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "pendapatan bunga".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Policy applicable before January 1, 2020
(continued)

Fair value through profit or loss (FVTPL)
(continued)

Financial assets included in this category are recognized initially and subsequently at fair value; transaction costs are taken directly to profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of these financial assets are included directly in the statement of profit or loss and other comprehensive income and reported as "unrealized gains/(losses) from changes in fair value", "gain/(loss) from sale of securities", "realized gain from sale of equity investment", and "realized gain/(loss) from derivative transaction", respectively. Interest income on financial instruments classified at FVTPL is recognized as "Interest income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Loans and receivables

Loans and receivables from customers and receivables that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as "loans and receivables".

Loans and receivables are initially recognized at fair value plus transaction costs (if any) minus upfront fee and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method less impairment. Interest is recognized by applying the effective interest rate method. Interest income on financial assets classified as loans and receivables is recognized as "Interest income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum tanggal 1
Januari 2020 (lanjutan)

Dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- aset keuangan yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- aset keuangan yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Pendapatan bunga dari aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "pendapatan bunga".

Tersedia untuk dijual

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan yang tidak ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman diberikan dan piutang, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Policy applicable before January 1, 2020
(continued)

Held-to-maturity

Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Company has the positive intention and ability to hold to maturity, other than:

- *those that the group of financial assets upon initial recognition are designated as at fair value through profit or loss;*
- *those that the group of financial assets are designated as available-for-sale; and*
- *those that meet the definition of loans and receivables.*

Held-to-maturity financial assets are initially recognized at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortized cost, using the effective interest method less impairment. Interest income on held-to-maturity financial assets is recognized as "interest income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Available-for-sale

Available-for-sale are financial assets that are intended to be held for indefinite period of time, which may be sold in response to the needs for liquidity or changes in interest rates or, exchange rates or those that are not classified as loans and receivables, held-to-maturity financial assets or financial assets at fair value through profit or loss.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum tanggal 1
Januari 2020 (lanjutan)

Tersedia untuk dijual (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajar dimana nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain kecuali untuk penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs untuk instrumen utang yang diakui pada laba rugi. Untuk instrumen ekuitas, laba rugi selisih kurs diakui sebagai bagian dari ekuitas, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar, yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain, diakui pada laba rugi.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "pendapatan bunga". Keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laba rugi.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Policy applicable before January 1, 2020
(continued)

Available-for-sale (lanjutan)

Available-for-sale financial assets are initially recognized at fair value, plus transaction costs, and measured subsequently at fair value with changes in fair value recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains or losses for debt instrument which are recognized in profit or loss. For equity instrument, foreign exchange gain or loss is recognized as part of equity, until the financial asset is derecognized. If an available-for-sale financial asset is determined to be impaired, the cumulative unrealized gain or loss arising from the changes in fair value previously recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss.

Interest income is calculated using the effective interest method and recognized as "interest income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Foreign currency gains or losses on monetary assets classified as available-for-sale are recognized in profit or loss.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and commissions paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Revenue is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments at FVTPL.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020

Perusahaan menggunakan model perhitungan kerugian kredit ekspektasian (ECL) yang menggunakan matriks *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD), dan *exposure at default* (EAD), yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif. Pendekatan PD dan LGD yang digunakan dibedakan untuk masing-masing segmentasi portofolio yaitu pembiayaan proyek dan pembiayaan korporasi, sesuai dengan karakteristik risiko masing-masing segmen tersebut.

a. Probability of Default (PD)

Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, diestimasi sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (*stage 1*) atau sepanjang umur (*stage 2*) dengan memperhitungkan dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. Perusahaan menggunakan basis data PD berdasarkan studi yang dilakukan oleh Moody's dan Standard & Poor's (S&P).

b. Loss Given Default (LGD)

Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar, digambarkan sebagai persentase dari total paparan pada saat gagal bayar. Perusahaan menggunakan nilai LGD berdasarkan data tingkat pemulihan kredit Basel III dan Standard & Poor's (S&P).

c. Exposure at Default (EAD)

Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak penarikan fasilitas yang dilakukan, pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dimuka, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Impairment of financial assets

Policy applicable from January 1, 2020

The Company uses expected credit loss (ECL) models that utilize the probability of default (PD), loss given default (LGD), and exposure at default (EAD) metrics, discounted using the effective interest rate. The approach used for PD and LGD is differentiated for each portfolio segmentation, namely project finance and corporate finance, according to risk characteristic of each segment.

a. Probability of Default (PD)

The probability at a point in time that a counterparty will default, estimated over up to 12 months from the reporting date (*stage 1*) or over the lifetime of the product (*stage 2*) taking into account impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. The Company uses a PD database based on studies conducted by Moody's and Standard & Poor's (S&P).

b. Loss Given Default (LGD)

The loss that is expected to arise on default, depicted as a percentage of total exposure at the time of default. The Company uses LGD values based on Basel III and Standard & Poor's (S&P) credit recovery rate data.

c. Exposure at Default (EAD)

The expected balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of drawdowns of committed facilities, repayments of principal and interest, amortization and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020
(lanjutan)

d. Exposure at Default (EAD) (lanjutan)

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian, komponen-komponen ini akan diperhitungkan secara bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal laporan keuangan menggunakan diskonto berdasarkan suku bunga efektif.

Kerugian kredit ekspektasian atau *Expected Credit Losses (ECL)* diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect/hold to collect and sell* dan memiliki arus kas SPPI. Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI.

Pencadangan berbasis ECL diakui pada saat pengakuan awal untuk seluruh instrumen keuangan yang masuk dalam cakupan ECL sehubungan dengan adanya peristiwa gagal bayar yang dapat timbul dalam periode waktu 12 bulan ke depan (disebut sebagai *stage 1* dengan cadangan kerugian senilai kerugian kredit ekspektasian 12 bulan). ECL akan terus dihitung berdasarkan basis ini sampai terdapat bukti peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR) sesuai kriteria yang ditetapkan Perusahaan atau aset mengalami penurunan nilai.

Jika aset keuangan (atau portofolio aset keuangan) mengalami SICR sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian diakui untuk peristiwa *default* yang dapat terjadi sepanjang umur dari aset tersebut (disebut sebagai 'aset *stage 2*' dengan cadangan kerugian sebesar kerugian kredit ekspektasian selama umur aset tersebut). Penilaian SICR dilakukan dalam konteks peningkatan risiko gagal bayar yang dapat terjadi sepanjang sisa umur dari instrumen keuangan ketika dibandingkan dengan ekspektasi pada saat pengakuan awal untuk periode waktu yang sama. SICR tidak dinilai dalam konteks peningkatan kerugian kredit ekspektasian.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Policy applicable from January 1, 2020
(continued)

d. Exposure at Default (EAD) (continued)

To determine the expected credit loss, these components are multiplied together and discounted to the balance sheet date using the effective interest rate as the discount rate.

Expected Credit Losses (ECL) are recognized for all financial debt instruments, loan commitments and financial guarantees that are classified as *hold to collect/hold to collect and sell* and have cash flows that are solely payments of principal and interest. *Expected credit losses* are not recognized for equity instruments designated at FVOCI.

An ECL based allowance is recognized at the time of initial recognition for all financial instruments that are in the scope of ECL in respect of default events that may occur over the next 12 months (so-called '*stage 1 assets*' with allowances equivalent to 12-months expected credit losses). ECL continues to be determined on this basis until there is either a significant increase in credit risk (SICR) on criteria set by the Company or the asset becomes credit impaired.

If a financial asset (or portfolio of financial assets) experiences a SICR since initial recognition, an expected credit loss is recognized for default events that may occur over the lifetime of the asset (so-called '*stage 2 assets*' with loss allowances equivalent to lifetime expected credit losses). SICR is assessed in the context of an increase in the risk of a default occurring over the remaining life of the financial instrument when compared to that expected at the time of initial recognition for the same period. It is not assessed in the context of an increase in the expected credit loss.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020
(lanjutan)

Akun kredit macet dikelola oleh unit SAM. Ketika suatu akun memerlukan penyelesaian kredit atau ada jumlah yang dianggap tidak dapat dipulihkan, dapat tetap di *stage 2* (tanpa atau dengan tunggakan pembayaran sampai dengan 90 hari) atau *stage 3* (adanya tunggakan pembayaran lebih dari 90 hari), namun cadangan kerugian penurunan nilai kredit secara individual akan dibuat. Cadangan kerugian adalah perbedaan antara jumlah pinjaman yang tercatat dan probabilitas tertimbang nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang mencerminkan berbagai skenario (dari hasil pemulihan terbaik, terburuk, dan paling mungkin). Jika arus kas mencakup jaminan yang dapat direalisasi, nilai-nilai yang digunakan akan memasukkan dampak informasi ekonomi *forward looking*. Keadaan individual dari masing-masing debitur dipertimbangkan ketika SAM memperkirakan arus kas masa depan dan waktu pemulihan masa depan yang melibatkan pertimbangan yang signifikan.

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode yang lebih pendek antara umur ekspektasian dan periode kontrak aset keuangan. Umur ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran dimuka dan periode kontrak maksimum melalui opsi perpanjangan kontrak.

Untuk aset keuangan *stage 2* dan *3*, yang dinilai secara individual, penentuan kerugian kredit ekspektasian selama umur aset akan serupa dengan pendekatan PSAK No. 55. Namun, estimasi arus kas akan berdasarkan rentang kemungkinan skenario-skenario. Ketika arus kas termasuk jaminan yang dapat direalisasi, nilai yang diperhitungkan akan termasuk informasi ke depan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Policy applicable from January 1, 2020
(continued)

Credit impaired accounts are managed by SAM unit. Where an account needs loan work-out or any amount is considered irrecoverable, it can stay at a *stage 2* (with no payment overdue or overdue up to 90 days) or *stage 3* (when there is more than 90 days payment overdue) but individual credit impairment provision is raised. The provision is the difference between the loan-carrying amount and the probability weighted present value of estimated future cash flows, reflecting a range of scenarios (typically the best, worst, and most likely recovery outcomes). Where the cash flows include realizable collateral, the values used will incorporate the impact of forward looking economic information. The individual circumstances of each debtor are considered when SAM estimates future cash flows and timing of future recoveries which involve significant judgement.

The period considered when measuring expected credit loss is the shorter of the expected life and the contractual term of the financial asset. The expected life may be impacted by prepayments and the maximum contractual term by extension options.

For *stage 2* and *3* financial assets that are individually assessed, the determination of lifetime expected credit losses will be similar to the SFAS No. 55 approach. The estimated cash flows will, however, be based on a probability range of scenarios. Where the cash flows include realizable collateral, the values used will incorporate forward looking information.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020
(lanjutan)

Untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen utang dalam kategori FVOCI, saldo di neraca mencerminkan nilai wajar dari instrumen, dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian dibukukan terpisah sebagai cadangan pada penghasilan komprehensif lain. Perubahan atas kerugian kredit ekspektasian diakui pada laba rugi dan terakumulasi di saldo laba.

Kerugian kredit ekspektasian atas komitmen kredit yang diberikan dan jaminan keuangan diakui pada liabilitas lain-lain. Jika instrumen keuangan mencakup komponen aset keuangan dan komitmen yang belum ditarik, dan tidak dapat dipisahkan atas kerugian kredit ekspektasian pada komponen ini, jumlah kerugian kredit atas komitmen tersebut diakui bersamaan dengan kerugian kredit atas aset keuangan. Dalam kondisi jumlah kerugian kredit ekspektasian gabungan melebihi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan, maka kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai liabilitas lain-lain.

Instrumen keuangan yang belum mengalami penurunan nilai pada saat pengakuan awal adalah aset *stage 1* dan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan diakui. Instrumen ini akan tetap pada *stage* tersebut sampai dilunasi, kecuali terdapat peningkatan risiko kredit signifikan (SICR) (*stage 2*) atau mengalami penurunan nilai kredit (*stage 3*). Instrumen akan ditransfer ke *stage 2* dan cadangan kerugian kredit ekspektasian dihitung sepanjang umurnya diakui saat terdapat peningkatan signifikan atas risiko kredit dibandingkan yang diharapkan saat pengakuan awal.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Policy applicable from January 1, 2020
(continued)

For assets measured at amortized cost, the balance sheet amount reflects the gross asset less the expected credit losses. For debt instruments held at FVOCI, the balance sheet amount reflects the instrument's fair value, with the expected credit loss allowance held as a separate reserve within other comprehensive income. Changes in expected credit losses are recognized in the profit or loss and are accumulated in retained earnings.

Expected credit loss on loan commitments and financial guarantees is recognized as other liabilities. Where a financial instrument includes both financial asset and an undrawn commitment, and it is not possible to separately identify the expected credit loss on these components, expected credit loss amounts on the loan commitment are recognized together with expected credit loss amounts on the financial asset. To the extent the combined expected credit loss exceeds the gross carrying amount of the financial asset, the expected credit loss is recognized as other liability.

Financial instruments that are not credit-impaired are originated into *stage 1* and a 12-month expected credit loss provision is recognized. Instruments will remain in that stage until they are repaid, unless they experience significant increase in credit risk (SICR) (*stage 2*) or they become credit impaired (*stage 3*). Instruments under *stage 1* will transfer to *stage 2* and a lifetime expected credit loss provision recognized when there has been a significant increase in the credit risk compared to what was expected at origination.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020
(lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (stage 1)

Kerugian kredit ekspektasian diakui pada saat pengakuan awal instrumen keuangan dan merepresentasikan kekurangan kas sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit.

Peningkatan risiko kredit yang signifikan (stage 2)

Jika aset keuangan mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR) sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian diakui atas kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang umur aset. Peningkatan signifikan dalam risiko kredit dinilai dengan membandingkan risiko gagal bayar atas eksposur pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar saat pengakuan awal (setelah memperhitungkan perjalanan waktu dari akun tersebut). Signifikan tidak berarti signifikan secara statistik, juga tidak dinilai dalam konteks perubahan dalam cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Perubahan atas risiko gagal bayar dinilai signifikan atau tidak, dengan menggunakan sejumlah faktor kuantitatif dan kualitatif, yang bobotnya bergantung pada tipe produk dan pihak lawan. Aset keuangan tanpa adanya tunggakan pembayaran namun membutuhkan penyesuaian kredit untuk menyesuaikan dengan kemampuan mengembalikan hutang atau dengan tunggakan lebih dari 30 hari dan tidak mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit. Penentuan pengukuran kerugian kredit ekspektasian secara individual dilakukan oleh komite investasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Policy applicable from January 1, 2020
(continued)

12-month expected credit losses (stage 1)

Expected credit losses are recognized at the time of initial recognition of a financial instrument and represent the lifetime cash shortfalls arising from possible default events up to 12 months into the future from the reporting date. Expected credit losses continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit-impaired.

Significant increase in credit risk (stage 2)

If a financial asset experiences a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition, an expected credit loss provision is recognized for default events that may occur over the lifetime of the asset. Significant increase in credit risk is assessed by comparing the risk of default of an exposure at the reporting date to the risk of default at origination (after taking into account the passage of time). Significant does not mean statistically significant nor is it assessed in the context of changes in expected credit loss.

Whether a change in the risk of default is significant or not is assessed using a number of quantitative and qualitative factors, the weight of which depends on the type of product and counterparty. Financial assets that are not overdue but need to have a loan work out to adjust its debt servicing capacity or that are 30 or more days past due and not credit-impaired will always be considered to have experienced an increase in credit risk. Decision to assess ECL on individual basis is conducted by the investment committee.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020
(lanjutan)

Efek-efek

Perusahaan menggunakan pendekatan PD dan LGD yang berlaku untuk segmen pembiayaan korporasi dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Ketika menentukan apakah risiko kredit suatu instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung, serta relevan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan.

Perusahaan menggunakan kriteria berikut dalam menentukan apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atau eksposur telah terjadi:

- Perubahan tingkat pemeringkatan risiko menjadi IIF6 atau lebih buruk;
- Tertunggak lebih dari 30 hari.

Dalam peningkatan risiko di atas, hal tersebut mencakup informasi dan analisa kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pada pengalaman historis, penilaian saat ini dan perkiraan masa depan. Pemeringkatan risiko bervariasi dengan rentang IIF1 sampai dengan IIF10, dimana IIF 1 mencerminkan tingkat risiko kredit yang paling rendah, sedangkan IIF10 mencerminkan tingkat risiko kredit yang paling tinggi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Policy applicable from January 1, 2020
(continued)

Securities

The Company uses PD and LGD approaches which apply for corporate finance segment in measuring the expected credit losses.

Significant increase in credit risk

When determining whether the credit risk of financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Company considers reasonable, supported and relevant information without undue cost or effort.

The Company uses the following criteria in determining whether a significant increase in credit risk or exposure has occurred:

- Change in the risk rating level to IIF6 or worse;
- More than 30 days arrears.

In term of increase in risk above, it includes quantitative and qualitative information and analysis, based on historical experience, current and future assessments. The risk rating varies from IIF1 to IIF10, where IIF1 represents the lowest level of credit risk, while IIF10 represent the highest level of credit risk.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020
(lanjutan)

Definisi gagal bayar (default)

Dalam menilai apakah debitur dalam keadaan gagal bayar, Perusahaan mempertimbangkan 3 poin yaitu:

- Prospek usaha;
- Kinerja keuangan;
- Kemampuan membayar kembali.

Kondisi gagal bayar terjadi ketika debitur telah melewati jatuh tempo lebih dari 90 hari atas kewajiban kreditnya kepada Perusahaan.

Pengelompokan instrumen dalam rangka
perhitungan kredit ekspektasian secara kolektif

Perusahaan mengelompokkan aset keuangan yang mencerminkan tingkat risiko kredit sebagai berikut:

i) Stage 1

Evaluasi penurunan nilai dan risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan terjadinya:

- Peringkat risiko antara IIF1-IIF5
- Tidak terjadi tunggakan lebih dari 30 hari.

Perusahaan akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian ekspektasian 12 bulan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Policy applicable from January 1, 2020
(continued)

Definition of failed payment (default)

In assessing whether the debtors is in default condition, the Company considers 3 points:

- Business prospect;
- Financial performance;
- Repayment ability.

The default condition occurs when the debtors past due for more than 90 days on credit obligation to the Company.

Classification of instrument for calculating
collective expected credit losses

The Company classifies financial assets that reflect the level of credit risk as follows:

i) Stage 1

Evaluation of impairment and credit risk on financial instruments does not increase significantly since initial recognition which can be proven by the occurrence of:

- Risk rating between IIF1-IIF5
- There are no arrears for more than 30 days.

The Company will measure the allowance for losses for these financial instruments at the amount of the expected credit losses of 12 months.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk) (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pengelompokan instrumen dalam rangka perhitungan kredit ekspektasian secara kolektif (lanjutan)

Perusahaan mengelompokkan aset keuangan yang mencerminkan tingkat risiko kredit sebagai berikut (lanjutan):

ii) Stage 2

Evaluasi penurunan nilai dan risiko kredit atas instrumen keuangan meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan terjadinya:

- Peringkat risiko antara IIF6-IIF7; dan/atau
- Terdapat tunggakan antara 31 hari sampai dengan 90 hari.

Perusahaan akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian ekspektasian sepanjang umur dari instrumen keuangan tersebut.

iii) Stage 3

Evaluasi penurunan nilai dan risiko kredit atas instrumen keuangan meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan terjadinya:

- Peringkat risiko antara IIF8-IIF10; dan/atau
- Terdapat tunggakan lebih dari 90 hari.

Perusahaan akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian ekspektasian sepanjang umur dari instrumen keuangan tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in sukuk) (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Policy applicable from January 1, 2020 (continued)

Classification of instrument for calculating collective expected credit losses (continued)

The Company classifies financial assets that reflect the level of credit risk as follows (continued):

ii) Stage 2

Evaluation of impairment and credit risk on financial instruments increase significantly since initial recognition which can be proven by the occurrence of:

- Risk rating between IIF6-IIF7; and/or
- There are arrears between 31 days to 90 days.

The Company will measure the allowance for losses for these financial instruments at the amount of the expected credit losses over the maturity of financial instruments.

iii) Stage 3

Evaluation of impairment and credit risk on financial instruments increase significantly since initial recognition which can be proven by the occurrence of:

- Risk rating between IIF8-IIF10; and/or
- There are arrears more than 90 days.

The Company will measure the allowance for losses for these financial instruments at the amount of the expected credit losses over the maturity of financial instruments.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk aset keuangan, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat penundaan dalam pelaksanaan konstruksi proyek yang dapat membuat penundaan dalam pembayaran pokok dan/atau bunga pada saat debitur beroperasi secara komersial; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan restrukturisasi keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Policy applicable before January 1, 2020

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired at each reporting date. Financial assets are impaired and impairment losses are incurred only where if there is objective evidence, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the investment that can be reliably estimated.

For financial assets, the objective evidence of impairment may include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- default or delinquency in principal or interest payments; or
- delays in the project construction which could further delay the principal and/or interest payments when the debtor has commercially operated the project; or
- it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial restructuring.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum tanggal 1 Januari
2020 (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara individu

Cadangan kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai di masa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laba rugi. Jika pinjaman diberikan atau aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik yang jumlahnya signifikan maupun tidak signifikan, maka aset keuangan tersebut akan dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan penurunan nilai kelompok aset keuangan tersebut dilakukan secara kolektif.

Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Policy applicable before January 1, 2020
(continued)

Individual impairment calculation

The amount of the loss is measured as the difference between the financial asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future impairment losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the allowance for impairment losses account and the amount of the loss is recognized in profit or loss. If a loan or held-to-maturity financial asset has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralized financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

If the Company assesses that there is no objective evidence of impairment for financial asset assessed individually, both for significant and insignificant amount, the financial asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and is collectively assessed for impairment.

Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum tanggal 1 Januari
2020 (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara individu
(lanjutan)

Untuk investasi ekuitas tersedia untuk dijual (AFS) yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas dibawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Untuk kelompok aset keuangan tertentu yang memiliki karakteristik yang sama, akan dilakukan penurunan nilai secara kolektif. Aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau pihak ketiga untuk membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Policy applicable before January 1, 2020
(continued)

Individual impairment calculation (continued)

For listed and unlisted equity investments classified as available-for-sale (AFS), a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available-for-sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the profit or loss, the impairment loss is reversed through the profit or loss.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains or losses previously recognized in equity are reclassified to profit or loss.

In respect of AFS equity investments, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Collective impairment calculation

For certain categories of financial assets which have similar characteristics, the assets are assessed for impairment on a collective basis. The financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering credit segmentation and past-due status. Those characteristics are relevant to the estimated future cash flows for such group of assets which indicate the debtor or counterparty ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif
(lanjutan)

Perusahaan mengelompokkan produk pembiayaan berdasarkan karakteristik risiko kredit yaitu (i) *Corporate Finance* dan (ii) *Project Finance*. *Corporate Finance* adalah pembiayaan yang diberikan kepada debitur dimana pembayaran atas pembiayaan tersebut bersumber dari operasi perusahaan secara keseluruhan maupun dari sumber lain. Sedangkan *Project Finance* adalah pembiayaan yang diberikan dengan tujuan spesifik kepada proyek tertentu dimana pembayaran hanya tergantung pada pendapatan yang berasal dari proyek tersebut jika sudah beroperasi.

Pada tanggal 31 Desember 2019, dalam menghitung penurunan nilai untuk pinjaman diberikan, Perusahaan menggunakan data *Probability of Default* (PD) berdasarkan studi yang dilakukan oleh *Moody's* dan *Standard & Poor's* (S&P) dan data *Loss Given Default* (LGD) berdasarkan *Basel III* dan *Standard & Poor's* (S&P).

Sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya, untuk pinjaman diberikan yang diklasifikasi sebagai *Project Finance*, Perusahaan menetapkan tingkat penyisihan penurunan nilai sebesar (a) 2% dari nilai kredit jika debitur masih dalam penyelesaian konstruksi proyek dan belum beroperasi secara komersial dan menghasilkan arus kas yang berasal dari pendapatan operasi dan (b) 1% dari nilai kredit jika konstruksi proyek telah selesai dan proyek sudah beroperasi serta menghasilkan arus kas yang berasal dari pendapatan operasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Policy applicable before January 1, 2020
(continued)

Collective impairment calculation (continued)

The Company classifies its financing product based on the credit risk characteristic i.e. (i) *Corporate Finance* and (ii) *Project Finance*. *Corporate Finance* is a financing provided to a debtor whose source of payment will be from the operation of the company or other sources. *Project Finance* is a financing provided to a debtor for a specific project wherein the source of payment will solely depend on the revenue generated from the project when it commences its commercial operation.

As of December 31, 2019, in calculating impairment of loans, the Company uses the *Probability of Default* (PD) as provided from a study by *Moody's* and *Standard & Poor's* (S&P) and *Loss Given Default* (LGD) based on *Basel III* and *Standard & Poor's* (S&P).

While for prior years, for *Project Finance* loans, the Company uses an impairment rate of (a) 2% from total outstanding loan if the project construction is still in progress and the debtor has not yet commercially operated and generated cash flows from operation and (b) 1% from total outstanding loan if the construction has been completed, the project has entered into operational phase and has generated cash flows from operation.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Restrukturisasi pinjaman diberikan

Restrukturisasi pinjaman diberikan dapat meliputi penurunan suku bunga, penyesuaian waktu pembayaran, atau perpanjangan tenor.

Evaluasi penurunan nilai individual atau kolektif akan terus dilakukan untuk pinjaman diberikan direstrukturisasi, mengikuti evaluasi penurunan nilai atas pinjaman diberikan. Kerugian dari restrukturisasi pinjaman diberikan dengan cara konversi sebagian pinjaman diberikan menjadi instrumen lain, diakui hanya apabila nilai wajar instrumen keuangan yang diterima adalah kurang dari nilai tercatat kredit yang diberikan.

Reklasifikasi aset keuangan

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020

Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Loan restructuring

Loan restructuring may involve decrease in interest rate, modification of term of payment, or tenor extension.

The restructured loans continue to be subject to an individual or collective impairment assessment, following the impairment assessment of loans. Loss on loan restructuring, which involves a conversion of loan in partial into other financial instrument, is recognized only if the fair value of the financial instrument received is less than the carrying amount of the loan.

Reclassification of financial instruments

Policy applicable from January 1, 2020

The Company reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020
(lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020

Perusahaan tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke klasifikasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika dilakukan dalam situasi yang langka dan jika memenuhi ketentuan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang dan terdapat intensi dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan untuk masa yang akan datang yang dapat diperkirakan atau sampai jatuh tempo.

Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo yang tidak memenuhi kriteria tertentu, maka seluruh aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo harus direklasifikasi menjadi aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, Perusahaan tidak diperkenankan mengklasifikasi aset keuangan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo selama dua tahun berikutnya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Reclassification of financial instruments
(continued)

Policy applicable from January 1, 2020
(continued)

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income (FVOCI) to the amortized cost is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value through profit or loss (FVTPL) to fair value through other comprehensive income (FVOCI) are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss (FVTPL) to amortized cost is recorded at fair value.

Policy applicable before January 1, 2020

The Company shall not reclassify any financial instrument out of or into the fair value through profit or loss (FVTPL) classification while it is held or issued. Financial assets at fair value through profit or loss could be reclassified as loans and receivables if it occurs in a rare circumstance and if they could fulfill the requirements as loans and receivables and there is intention and ability to hold until the foreseeable future or maturity date.

If there is a sale or reclassification of held-to-maturity financial asset for more than an insignificant amount before maturity that does not fulfill certain criteria, the entire held-to-maturity financial assets will have to be reclassified as available-for-sale financial assets. Subsequently, the Company shall not classify financial asset as held-to-maturity during the following two years.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (selain investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam ekuitas (penghasilan komprehensif lain) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas dihentikan pengakuannya dan diakui pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan jatuh tempo aset tersebut.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang beragunan sebesar pinjaman yang diterima.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (other than investment in
sukuk) (continued)

Reclassification of financial instruments
(continued)

Policy applicable before January 1, 2020
(lanjutan)

Reclassification of held-to-maturity financial asset to available-for-sale is recorded at fair value. The unrealized gain or loss is recognized in equity (other comprehensive income) until the financial assets are derecognized, at which time the cumulative gain or loss previously recognized in equity are derecognized and reclassified to profit or loss.

Reclassification of available-for-sale financial asset to held-to-maturity is recorded at carrying amount. Unrealized gain or loss should be amortized using the effective interest rate method up to maturity date of such asset.

Derecognition of financial assets

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (investasi pada sukuk)

Perusahaan menerapkan PSAK No. 110 (Revisi 2015), "Akuntansi Sukuk". PSAK No. 110 ini mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.

Pengakuan dan pengukuran

Sebelum pengakuan awal, Perusahaan menentukan klasifikasi investasi pada sukuk berdasarkan tujuan investasi Perusahaan. Klasifikasi dalam investasi pada sukuk terdiri dari:

- Diukur pada biaya perolehan

Apabila investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengukuran awal, investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan biaya perolehan ini termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk ini diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu instrumen sukuk.

- Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk dalam klasifikasi ini dicatat sebesar harga perolehan, namun harga perolehan tersebut tidak termasuk biaya transaksi.

Setelah pengakuan awal, investasi diakui pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (investment in sukuk)

The Company has applied SFAS No. 110 (Revised 2015), "Accounting for Sukuk". SFAS No. 110 establishes the recognition, measurement, presentation, and disclosures of sukuk ijarah and sukuk mudharabah transactions.

Recognition and measurement

Before the initial recognition, the Company determines the classification of investment in sukuk based on the purpose of the Company's investment. The classification of investment in sukuk comprises of:

- Acquisition cost

If the investment is held within a business entity that aims to acquire assets in order to collect contractual cash flows and there is a contractual requirement to determine the specific date of principal payments and/or the result.

At the initial measurement, the investment is recorded at acquisition cost which includes the transaction cost. After the initial recognition, the investment in sukuk is measured at amortized cost. The difference between acquisition cost and nominal value is amortized using straight-line method during the period of the sukuk instrument.

- Fair value through profit or loss (FVTPL)

At the initial recognition, the investment in sukuk is presented at acquisition cost which does not include transaction cost.

After initial recognition, the investment is recognized at-fair-value. The difference between fair value and recorded amount is recognized in profit or loss.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Sebelum pengakuan awal, Perusahaan menentukan klasifikasi investasi pada sukuk berdasarkan tujuan investasi Perusahaan. Klasifikasi dalam investasi pada sukuk terdiri dari (lanjutan):

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk dalam klasifikasi ini dicatat sebesar harga perolehan dan biaya perolehan ini termasuk biaya transaksi.

Setelah pengakuan awal, investasi diakui pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu instrumen sukuk dan diakui dalam laba rugi.

Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada hirarki sebagai berikut:

- i. harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- ii. input selain harga kuotasi yang termasuk dalam huruf (i)

Untuk investasi pada sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Perusahaan mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Perusahaan mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (investment in sukuk)
(continued)

Recognition and measurement (continued)

Before the initial recognition, the Company determines the classification of investment in sukuk based on the purpose of the Company's investment. The classification of investment in sukuk comprises of (continued):

- Fair value through other comprehensive income (FVOCI)

At the initial recognition, the investment in sukuk is presented at acquisition cost which includes transaction cost.

After initial recognition, the investment is recognized at-fair-value. The difference between fair value and recorded amount is recognized in other comprehensive income. The difference between acquisition cost and nominal value is amortized using straight-line method during the period of the sukuk instrument and recognized in profit or loss.

Fair value on investment is determined according to following hierarchy:

- i. quoted price (excluding any adjustment) in active market, or
- ii. other input other than quoted price included in (i)

For investment in sukuk classified as at acquisition cost and at fair value through other comprehensive income, if there is an indication of impairment, the Company measures the recoverable amount. If the recoverable amount is less than recorded amount, the Company recognizes the impairment losses. Recoverable amount represents the amount which will be recoverable from the principal repayment regardless of its present value.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (investasi pada sukuk)
(lanjutan)

Reklasifikasi

Perusahaan tidak dapat mengubah klasifikasi investasi, kecuali terdapat perubahan tujuan model usaha. Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh Perusahaan. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk *mudharabah* atau arus kas imbalan (*ujrah*) dari sukuk *ijarah*. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka Perusahaan menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

Penyajian

Pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan neto setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial Assets (continued)

Financial assets (investment in sukuk)
(continued)

Reclassification

The Company cannot change investment classification unless there is a change in the business model purpose. Business model that is intended to collect contractual cash flow is based on the investment purpose set by the Company. The underlying contractual cash flow is the cash flow from revenue sharing and principal of sukuk *mudharabah* or benefit cash flow (*ujrah*) from sukuk *ijarah*. After initial recognition, if the actual differs from the investment purpose initially set by the Company, then the Company reconsiders the consistency of the investment purpose.

Presentation

Investment income and amortization expense are presented in net amount in the profit or loss.

f. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities.

Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issuance costs.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas
(lanjutan)

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam FVTPL, jika liabilitas keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini pada saat awal pengakuan dan selanjutnya dicatat pada nilai wajar; biaya transaksi diakui langsung pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar dari liabilitas keuangan ini diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai "keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar".

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Financial Liabilities and Equity Instruments
(continued)

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liabilities are either held-for-trading or it is designated upon initial recognition as at FVTPL.

Financial liabilities included in this category are recognized initially and subsequently at fair value; transaction costs are taken directly to profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value of these financial liabilities are included in the statement of profit or loss and other comprehensive income and reported as "unrealized gains/(losses) from changes in fair value".

Financial liabilities at amortized cost are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognized over the term of the borrowings.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities if, and only if, the Company's obligations are discharged or cancelled or expired.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

g. Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan neto dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan dalam situasi bisnis yang normal dan peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari Perusahaan atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

h. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif, seperti efek-efek, ditentukan berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal laporan posisi keuangan dari sumber-sumber yang terpercaya seperti kuotasi harga pasar dari Bloomberg, Reuters atau dari broker. Investasi pada unit reksadana dicatat pada nilai pasar, sesuai dengan nilai bersih dari aset reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan.

Instrumen keuangan dianggap menggunakan nilai kuotasi pasar aktif jika harga kuotasi tersedia dan secara reguler tersedia di bursa, dealer, broker dan harga tersebut mencerminkan harga aktual dan terbentuk melalui transaksi pasar secara reguler berdasarkan "arm's length basis". Jika kriteria di atas tidak tercapai, pasar dianggap tidak aktif. Indikasi dari pasar tidak aktif adalah ketika terdapat selisih penawaran dan permintaan yang besar atau terjadi kenaikan signifikan dari selisih penawaran dan permintaan atau hanya terdapat sejumlah kecil transaksi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

The legally enforceable right of offset must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

h. Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments traded in active markets, such as securities, is determined based on quoted market prices at the statement of financial position date from credible sources such as quoted market prices from Bloomberg, Reuters or broker's quoted price. Investments in mutual fund units are stated at market value, in accordance with the net value of assets of the mutual funds at the statement of financial position date.

A financial instrument is regarded as quoted in an active market, if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

h. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki kuotasi harga pasar, estimasi yang rasional dari nilai wajar ditentukan dengan menggunakan referensi harga pasar sekarang dari instrumen lain yang memiliki karakteristik yang sama secara substansial atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas dari aset bersih yang mendasari instrumen keuangan tersebut. Perusahaan menggunakan jasa penilai independen dalam mengestimasi nilai wajar dari investasi efek-efek saham dimana harga pasar tidak tersedia. Penilaian berkala oleh jasa penilai independen dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Perusahaan menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif.

i. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

j. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Aset Tetap - Pemilikan Langsung

Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

h. Determination of Fair Value (continued)

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially has the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the financial instruments. The Company uses an independent valuer in the estimation of fair value of its investment in equity securities when the market price is not available. A regular valuation by the independent valuer is done at least once a year.

For more complex instruments, the Company uses internally developed model, which is generally based on valuation method and technique generally recognized as industry standard. Valuation model is used primarily to value derivative contracts.

i. Cash and Cash Equivalents

For cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all investments with maturities of three months or less from the date of placement which are not pledged as collateral and unrestricted.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

k. Property and Equipment - Direct Acquisition

Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

k. Aset Tetap - Pemilikan Langsung (lanjutan)

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/Years
Bangunan	30
Kendaraan	4
Komputer	4
Peralatan kantor	4
Perabotan dan peralatan kantor	4

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

Akumulasi biaya konstruksi serta pemasangan peralatan kantor dan komputer, dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya.

Apabila aset tetap dihentikan pengakuannya (tidak dipergunakan lagi atau dijual), biaya perolehan beserta akumulasi penyusutan yang terkait dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui sebagai laba atau rugi tahun berjalan.

Pada tanggal pelaporan, metode amortisasi, taksiran masa manfaat dan nilai residual ditelaah ulang dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

k. Property and Equipment - Direct Acquisition
(continued)

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or are recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized.

Depreciation of property and equipment is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives as follows:

	Tarif penyusutan per tahun/ Annual depreciation rate	
	3%	Building
	25%	Vehicles
	25%	Computer
	25%	Office equipment
	25%	Office furniture and fixtures

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use.

The accumulated costs of the construction of and the installation of office equipment and computers are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to property and equipment accounts when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from such date. Maintenance and repair cost are charged as an expense when incurred.

When assets are derecognized (retired or otherwise disposed of), their costs and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gains or losses are recognized as profit or loss for the year.

At the reporting period, amortization methods, estimated useful lives and residual values are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

l. Beban Tangguhan

Beban tangguhan merupakan biaya transaksi yang terjadi berkaitan dengan proses pemberian persetujuan kredit kepada debitur atau perolehan pinjaman yang diterima Perusahaan. Biaya transaksi akan disajikan secara neto dalam akun "Pinjaman diberikan" jika telah dicairkan kepada debitur atau akun "Pinjaman diterima" jika telah dicairkan oleh Perusahaan.

m. Aset Lain-lain

Aset lain-lain termasuk aset tidak berwujud yang dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tidak berwujud.

Amortisasi aset tidak berwujud dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset tersebut yaitu antara 4 - 5 tahun.

Pada tanggal pelaporan, metode amortisasi, taksiran masa manfaat dan nilai residual ditelaah ulang dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

n. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

l. Deferred Charges

Deferred charges represent transaction costs incurred in relation to the process of loan approval to the debtors or borrowing obtained by the Company. The transaction costs will be presented net in "Loans" account when the loan is disbursed to the debtors or in "Fund borrowings" account when the borrowing is drawn by the Company.

m. Other Assets

Other assets include intangible assets that are stated at cost less amortization and impairment. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

Amortization of intangible assets is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets which range between 4 - 5 years.

At the reporting period, amortization methods, estimated useful lives and residual values are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate.

n. Impairment of Non-Financial Assets

At reporting date, the Company reviews the carrying amounts of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of net selling price or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in the profit or loss.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

o. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian adalah, atau mengandung, sewa didasarkan pada substansi pengaturan pada saat dimulainya sewa. Pengaturan tersebut adalah, atau mengandung, sewa jika pemenuhan pengaturan tergantung pada penggunaan aset atau aset-aset tertentu dan pengaturan tersebut menyatakan hak untuk menggunakan aset atau aset-aset, meskipun aset tersebut (aset-aset tersebut) tidak secara eksplisit ditentukan dalam suatu pengaturan.

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020

Perusahaan menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa aset berjangka pendek dan sewa aset bernilai rendah.

Aset hak-guna

Perusahaan mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa.

Biaya aset hak-guna meliputi nilai liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa dan estimasi biaya restorasi.

Aset hak-guna disusutkan berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa sewa sebagai berikut:

Laptop

Tahun/Years

3

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

o. Leases

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at the inception of the lease. The arrangement is, or contains, a lease if fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that asset is (or those assets are) not explicitly specified in an arrangement.

Policy applicable starting January 1, 2020

The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets.

Right-of-use assets

The Company recognized right-of-use assets at the commencement date of the lease. Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, if any and adjusted for any remeasurement of lease liabilities.

The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct cost incurred, lease payments made at or before the commencement date and estimated reinstatement cost.

Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term as follows:

Laptop

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Sewa (lanjutan)

**Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari
2020 (lanjutan)**

Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk merefleksikan pertambahan bunga dan dikurangi untuk merefleksikan pembayaran sewa yang dilakukan.

**Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020**

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung ke laba rugi.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Leases (continued)

**Policy applicable starting January 1, 2020
(continued)**

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognized lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

In calculating the present value of lease payments, the Company uses its incremental borrowing rate. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made.

Policy applicable before January 1, 2020

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

As lessee

Assets held under finance leases are initially recognized as assets of the Company at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the statement of financial position as a finance lease obligation.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly to profit or loss.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic method is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)

Sebagai lessee (lanjutan)

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan metode garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan beban bunga diakui berdasarkan basis akrual dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Perhitungan dengan metode suku bunga efektif memperhitungkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual dari instrumen keuangan dan biaya transaksi yang timbul secara langsung untuk instrumen tersebut dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan pemberian pinjaman diakui ketika jasa-jasa telah diberikan sesuai dengan kontrak perjanjian seperti pendapatan jasa *mandatory lead arranger*, sindikasi, perencanaan model pembiayaan, pendapatan komitmen atas fasilitas yang belum dicairkan, dan premi atas garansi kredit yang diberikan.

Pendapatan jasa *advisory* diakui ketika jasa-jasa telah diberikan sesuai dengan kontrak perjanjian.

Keuntungan/(kerugian) dari portofolio efek-efek dan investasi saham meliputi keuntungan/(kerugian) yang timbul dari penjualan efek-efek dan keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan investasi saham.

Keuntungan/(kerugian) dari transaksi derivatif meliputi keuntungan/(kerugian) yang timbul dari penyelesaian transaksi derivatif dan keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar.

Beban diakui pada saat terjadinya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

o. Leases (continued)

Policy applicable before January 1, 2020
(continued)

As lessee (continued)

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line method, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

p. Recognition of Revenues and Expenses

Interest income and interest expense are recognized on accrual basis using the effective interest rate method. The calculation using the effective interest rate method takes into account all contractual terms of the financial instruments and includes any transaction costs that are directly attributable to the instruments and are an integral part of the effective interest rate.

Provision and commission income related to the loan disbursement is recognized when the services are rendered in accordance with the respective engagement contracts such as income from mandatory lead arranger services, syndication, structuring of financing scheme fees, commitment fee income from undrawn facilities, and credit guarantee premium.

Advisory service income is recognized when the services are rendered in accordance with the respective engagement contracts.

Gains/(losses) on securities and equity investment consist of gains/(losses) on securities sold and unrealized gains/(losses) from changes in the fair value of securities and equity investment.

Gains/(losses) on derivative transactions consist of gains/(losses) on settlement of derivative transactions and unrealized gains/(losses) from changes in the fair value of derivative transactions.

Expenses are recognized when incurred.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

q. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, dalam hal ini pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, diakui pada saat hasil dari keberatan dan/atau banding diterima.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan bersih di laporan posisi keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

q. Income Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year, computed using the prevailing tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statements carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Deferred tax is charged or credited immediately in profit or loss, except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also charged or credited directly to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same tax authority on either the same taxable entity or different taxable entities.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment is received or, if objected or appealed against, when the result of the objection or appeal is determined.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the statement of financial position.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

r. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja karyawan jangka pendek

Imbalan kerja karyawan jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Liabilitas pensiun

Perusahaan menyediakan imbalan pasca-kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("Undang-Undang Ketenagakerjaan") yang pada dasarnya merupakan program imbalan pasti. Untuk usia pensiun normal, Perusahaan menghitung imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Beban atas pemberian imbalan dalam program imbalan manfaat pasti ditentukan dengan metode *projected unit credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

- i. Keuntungan atau kerugian aktuarial;
- ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset);
- iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu diakui pada laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- Tanggal amandemen atau kurtailmen program; dan
- Tanggal pada saat Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

r. Employment Benefits Obligation

Short-term employment benefits

Short-term employee benefits are recognized when they become due to the employees on accrual basis.

Pension obligation

The Company provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law") which in substance represent a defined benefit plan. For normal pension scheme, the Company calculates the employee benefits under the Labor Law.

The cost of providing benefits under the defined benefits plan is determined using the projected unit credit method.

Remeasurement on net defined benefit liabilities (asset), which is recognized as other comprehensive income, consists of:

- i. Actuarial gain and losses;
- ii. Return on program asset, not consist of amount included in liabilities (asset) net interest;
- iii. Every change in asset ceiling, not consist of amount included in liabilities (asset) net interest.

Remeasurement on net defined benefit liabilities (asset), which is recognized as other comprehensive income will not be reclassified to profit or loss in the next periods.

Past service costs are recognized in profit or loss on the earlier of:

- The date of the plan amendment or curtailment; and
- The date that the Company recognizes related restructuring costs.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

r. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya

Beban imbalan jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode *projected unit credit* dengan metode yang disederhanakan dimana metode ini tidak mengakui pengukuran kembali dalam penghasilan komprehensif lain. Total nilai neto dari biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui pada laba rugi tahun berjalan.

s. Instrumen Keuangan Derivatif

Instrumen derivatif diakui pertama-tama pada nilai wajar pada saat kontrak tersebut dilakukan, dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya. Metode pengakuan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar tergantung pada apakah derivatif tersebut adalah instrumen lindung nilai, dan sifat dari unsur yang dilindungi nilainya.

Lindung nilai arus kas

Perusahaan menggunakan instrumen keuangan derivatif, pertukaran (*swap*) tingkat suku bunga, sebagai bagian dari aktivitas manajemen untuk melindungi dampak risiko tingkat suku bunga atas pinjaman Perusahaan. Perusahaan menerapkan akuntansi lindung nilai arus kas pada saat transaksi tersebut memenuhi kriteria perlakuan akuntansi lindung nilai.

Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Jika instrumen derivatif dirancang dan memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, perubahan nilai wajar yang berkaitan dengan lindung nilai diakui sebagai penyesuaian terhadap *item* yang dilindungi nilainya dalam penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan atau disajikan dalam ekuitas, tergantung pada jenis transaksi dan efektivitas dari lindung nilai tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

r. Employment Benefits Obligation
(continued)

Other long-term employee benefits

The cost of providing other long-term employee benefits is determined using the projected unit credit method using simplified method of not recognizing remeasurements in other comprehensive income. The net total of service cost, net interest on the net defined benefit liability (asset) and remeasurements of the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss for the year.

s. Derivative Financial Instruments

Derivative instruments are initially recognized at fair value on the date the contracts are entered into and are subsequently remeasured at their fair values. The method of recognizing the fair value gain or loss depends on whether the derivative is designated as a hedging instrument and, if so, the nature of the item being hedged.

Cash flow hedge

The Company uses derivative instruments, interest rate swap as part of its management activities to manage exposures to interest rate on the Company's borrowing. The Company applies cash flow hedge accounting when transactions meet the specified criteria for hedge accounting treatment.

Changes in fair value of derivative instruments that do not qualify for hedge accounting are recognized in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income. If derivative instruments are designated and qualify for hedge accounting, changes in fair value of derivative instruments are recorded as adjustments to the items being hedged in the current year other comprehensive income or in the equity, depending on the type of hedge transaction represented and the effectiveness of the hedge.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

s. Instrumen Keuangan Derivatif (lanjutan)

Lindung nilai arus kas (lanjutan)

Perusahaan menetapkan derivatif sebagai instrumen lindung nilai atas arus kas apabila instrumen tersebut melindungi nilai variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang telah diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi. Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai atas arus kas dalam hubungan lindung nilai yang memenuhi kualifikasi ditangguhkan pada keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas, yang merupakan bagian dari ekuitas. Bagian yang tidak efektif diakui secara langsung pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jumlah yang ditangguhkan dalam ekuitas direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam tahun yang sama dimana arus kas yang dilindung nilai mempengaruhi laba atau rugi, dan pada item yang sama dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Ketika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, dihentikan, dilaksanakan, atau tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ditangguhkan di ekuitas tetap diakui pada keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas dan direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika item yang dilindung nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Ketika suatu prakiraan transaksi akan dilindung nilai tidak lagi diharapkan akan terjadi, jumlah yang ditangguhkan dalam ekuitas diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Seluruh instrumen derivatif (termasuk transaksi valuta asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) dicatat dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs *Reuters* pada tanggal pelaporan laporan posisi keuangan, diskonto arus kas, model penentu harga opsi atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

s. Derivative Financial Instruments (continued)

Cash flow hedge (continued)

The Company designates derivatives as the hedging instruments of cash flows hedges where the instrument hedges the variability in cash flows attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability, or a highly probable forecast transaction that could affect profit or loss. The effective portion of changes in the fair value of derivatives designated as hedging instruments of cash flows hedges in qualifying hedging relationships is deferred to the cumulative gains/(losses) on derivative instruments for cash flows hedges, which forms part of equity. Any ineffective portion is recognized immediately in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Amounts deferred in equity are reclassified to the statement of profit or loss and other comprehensive income as a reclassification adjustment in the same year as the hedged cash flows affect profit or loss, and in the same line item in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

When the hedging instrument expires or sold, terminated, exercised, or no longer qualifies for hedge accounting, the cumulative amount deferred in equity remains in the cumulative gains/(losses) on derivative instruments for cash flows hedges, and is subsequently transferred to the statement of profit or loss and other comprehensive income when the hedged item is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

When a forecast hedged transaction is no longer expected to occur, the amount deferred in equity is recognized immediately in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

All derivatives instruments (including foreign exchange transactions for financing and trading) are recognized in the statement of financial position at fair value. The fair value is based on the market rate, Reuters exchange rate at statement of financial position date, discounted cash flows, option pricing models or broker quoted price on other instruments with similar characteristics.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

s. Instrumen Keuangan Derivatif (lanjutan)

Lindung nilai nilai wajar

Perusahaan menggunakan instrumen keuangan derivatif, opsi, sebagai bagian dari aktivitas manajemen untuk melindungi dampak risiko perubahan nilai wajar atas investasi saham Perusahaan. Perusahaan menerapkan akuntansi lindung nilai nilai wajar pada saat transaksi tersebut memenuhi kriteria perlakuan akuntansi lindung nilai.

Perusahaan menetapkan derivatif sebagai instrumen lindung nilai atas nilai wajar apabila instrumen tersebut melindungi nilai variabilitas nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang telah diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi. Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai atas nilai wajar dalam hubungan lindung nilai yang memenuhi kualifikasi ditangguhkan pada keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai nilai wajar, yang merupakan bagian dari ekuitas.

Ketika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, dihentikan, dilaksanakan, atau tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ditangguhkan di ekuitas tetap diakui pada keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai nilai wajar dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Seluruh instrumen derivatif (termasuk transaksi valuta asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) dicatat dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs Reuters pada tanggal pelaporan laporan posisi keuangan, diskonto arus kas, model penentu harga opsi atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

s. Derivative Financial Instruments (continued)

Fair value hedge

The Company uses derivative instrument, option, as part of its management activities to manage exposures to fair value changes on the Company's equity investment. The Company applies fair value hedge accounting when transactions meet the specified criteria for hedge accounting treatment.

The Company designates derivatives as the hedging instruments of fair value hedges where the instrument hedges the variability in fair value attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability, or a highly probable forecast transaction that could affect. The effective portion of changes in the fair value of derivatives designated as hedging instruments of fair value hedges in qualifying hedging relationships is deferred to the cumulative gains/(losses) on derivative instruments for fair value hedges, which forms part of equity.

When the hedging instrument expires or sold, terminated, exercised, or no longer qualifies for hedge accounting, the cumulative amount deferred in equity remains in the cumulative gains/(losses) on derivative instruments for fair value hedges, and will not be subsequently transferred to profit or loss.

All derivatives instruments (including foreign exchange transactions for financing and trading) are recognized in the statement of financial position at fair value. The fair value is based on the market rate, Reuters exchange rate at statement of financial position date, discounted cash flows, option pricing models or broker quoted price on other instruments with similar characteristics.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

t. Segmen Operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama, yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional termasuk *item* yang dapat diatribusikan secara langsung kepada segmen dan juga yang dapat dialokasikan dengan basis yang wajar.

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk.

Perusahaan menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

u. Laba per Saham

Labar per saham dasar dihitung dengan membagi labar tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun berjalan.

Labar per saham dilusi dihitung dengan membagi labar tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan mengasumsikan konversi instrumen berpotensi saham yang bersifat dilutif.

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI DAN ESTIMASI
AKUNTANSI YANG UTAMA

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

t. Operating Segment

An operating segment is a component of the entity that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the entity's components, whose operating results are reviewed regularly by the chief operating decision maker to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available. Segment results that are reported to the chief operating decision maker include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis.

The Company manages its business activities and identifies its segments reported based on product categories.

The Company determines and presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker.

u. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to ordinary equity holders of the entity by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to ordinary equity holders of the entity by the weighted average number of shares outstanding during the year adjusted for the assumed conversion of all dilutive potential ordinary shares.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
ESTIMATES

In the application of the Company's accounting policies, which is described in Note 3, management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI DAN ESTIMASI
AKUNTANSI YANG UTAMA (lanjutan)

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Utama dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan utama, selain dari estimasi, dimana direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 (sejak 1 Januari 2020) dan PSAK No. 55 (sebelum 1 Januari 2020) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 3.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari entitas adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban.

Manajemen telah mereviu dan mengkonfirmasi bahwa mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES (continued)

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period where the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations that the directors have made in the process of applying the Company's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements.

Going concern

The Company's management has made an assessment of the Company's ability to continue as a going concern and believes that the Company has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management was not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt to the Company's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on a going concern basis.

Classification of the financial assets and liabilities

The Company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 71 (starting January 1, 2020) and SFAS No. 55 (before January 1, 2020). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the accounting policies as disclosed in Note 3.

Determination of functional currency

The functional currency of the entity is the currency of the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that influence the revenues and cost.

Management has reviewed and confirmed that the Company's functional currency is Rupiah.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI DAN ESTIMASI
AKUNTANSI YANG UTAMA (lanjutan)**

Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan dijelaskan di bawah ini:

Pajak tangguhan

Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi fiskal dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Manajemen memperkirakan bahwa rugi fiskal tersebut akan dapat dikompensasi terhadap laba fiskal untuk lima tahun mendatang sejak terjadinya. Dalam menyusun perkiraan tersebut, manajemen membuat pertimbangan sebagai asumsi yang diperlukan untuk mengestimasi laba kena pajak masa depan yang diharapkan akan dihasilkan dari operasi Perusahaan. Perubahan signifikan terhadap asumsi dapat secara material mempengaruhi nilai aset pajak tangguhan.

Perhitungan akumulasi rugi fiskal dan aset pajak tangguhan disajikan pada Catatan 27.

Rugi penurunan nilai aset keuangan

Pengukuran kerugian penurunan nilai berdasarkan PSAK No. 71 atas aset keuangan yang relevan memerlukan pertimbangan, khususnya, estimasi atas jumlah dan waktu dari arus kas di masa depan dan penilaian atas peningkatan signifikan pada risiko kredit. Estimasi ini ditentukan oleh sejumlah faktor, dimana perubahan faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan tingkat pencadangan yang berbeda. Beberapa pertimbangan dan estimasi akuntansi terkait dengan perhitungan kerugian kredit ekspektasian adalah model *credit grading*, kriteria untuk menentukan apakah terdapat kenaikan signifikan pada risiko kredit, pengembangan dan model kerugian kredit ekspektasian, termasuk pilihan atas input yang digunakan.

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period are discussed below:

Deferred taxes

The Company recognizes deferred tax assets on its accumulated fiscal losses and deductible temporary differences. Management estimates the fiscal loss which can be compensated against the taxable income for the next five years. In preparing the forecast management makes judgement as to the assumptions needed to estimate the future taxable income expected to be generated from the Company's operations. Any significant changes in the assumptions may materially affect the amount of deferred tax assets.

Calculation of accumulated fiscal losses and deferred tax assets is disclosed in Note 27.

Impairment loss on financial assets

The measurement of impairment losses under SFAS No. 71 on financial assets in scope requires judgement, in particular, the estimation of the amount and timing of future cash flows and the assessment of a significant increase in credit risk. These estimates are driven by a number of factors, changes in which can result in different level of allowances. Some accounting judgement and estimates related to expected credit loss calculated are credit grading model, criteria for assessing if there has been a significant increase in credit risk, and development of expected credit losses models, including the choice of inputs.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI DAN ESTIMASI
AKUNTANSI YANG UTAMA (lanjutan)

Instrumen keuangan derivatif

Instrumen derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama non-derivatif dan diperlakukan sebagai instrumen derivatif jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:

- Karakteristik ekonomi dan risiko dari derivatif melekat tidak secara erat berhubungan dengan karakteristik ekonomi dan risiko kontrak utama,
- Instrumen terpisah dengan kondisi yang sama dengan instrumen derivatif melekat memenuhi definisi dari derivatif, dan
- Instrumen hibrid (kombinasi) tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (dalam hal ini derivatif melekat di dalam aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak dipisahkan).

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat ekonomis setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan periode dimana aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Taksiran masa manfaat setiap aset direvisi secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah dan periode pencatatan biaya yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat ekonomis setiap aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 12.

Pensiun

Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuarial menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain (Catatan 28).

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
ESTIMATES (continued)

Derivative financial instruments

Embedded derivatives are separated from their host non-derivative contract and accounted for as a derivative instrument if all of the following criteria are met:

- The economic characteristics and risks of the embedded derivative are not closely related to those of the host contract,*
- A separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative, and*
- The hybrid (combined) instrument is not measured at fair value through profit or loss (i.e. a derivative that is embedded in a financial asset or financial liability at fair value through profit or loss is not separated).*

Estimated useful lives of property and equipment

The useful life of each item of the Company's property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property and equipment would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of these assets.

The carrying amounts of property and equipment are disclosed in Note 12.

Pension

Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate, future salary increase rate, mortality rate, resignation rates and others (Note 28).

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Kas	5	5
Bank		
Rupiah		
Pihak berelasi		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	515.440	400.112
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	263.631	23.918
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	54.205	32
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	50.053	3.177
PT Bank Mandiri Taspen	503	494
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	230	230
Pihak ketiga		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	72.780	14.382
PT Bank DBS Indonesia	1.004	977
PT Bank QNB Indonesia Tbk	419	419
PT Bank OCBC NISP Tbk	340	339
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	192	192
PT Bank ANZ Indonesia	187	188
PT Bank UOB Indonesia	129	129
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Indonesia	110	189
PT Bank Permata Tbk	77	33
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	46	-
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	42	42
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	6	1.027
Dolar Amerika Serikat		
Pihak berelasi		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	24.367	41.374
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.861	432
PT Bank BTPN Tbk	1.059	1.014
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	935	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	62	2.746
Pihak ketiga		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	61.637	25.806
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	12.606	12.403
PT Bank ICBC Indonesia	3.846	3.790
PT Bank QNB Indonesia Tbk	2.426	2.388
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	1.557	1.141

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash on hand
Cash in banks
Rupiah
Related parties
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank UOB Indonesia
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Indonesia Branch
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch
United States Dollar
Related parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Bank (lanjutan)			Cash in banks (continued)
Dolar Amerika Serikat (lanjutan)			United States Dollar (continued)
Pihak ketiga (lanjutan)			Third parties (continued)
PT Bank DBS Indonesia	664	656	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	439	433	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	371	365	PT Bank Permata Tbk
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	281	256	Standard Chartered Bank, Jakarta Branch
PT Bank UOB Indonesia	242	238	PT Bank UOB Indonesia
	1.071.747	538.922	
Deposito berjangka			Time deposits
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	703.250	509.060	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	300.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	160.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	282.100	490.149	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	208.515	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	-	222.416	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
	985.350	1.890.140	
	2.057.102	2.429.067	
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(43)	-	Allowance for impairment losses
	2.057.059	2.429.067	
Tingkat bunga giro per tahun:			Interest rate per annum of current accounts:
Rupiah	4,00 - 5,80%	4,00 - 7,50%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0,04 - 1,00%	0,60 - 1,00%	United States Dollar
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun:			Interest rate per annum of time deposits:
Rupiah	5,00%	5,50 - 7,75%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	1,00%	2,85 - 2,90%	United States Dollar

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019,
tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dibatasi
penggunaannya atau dijaminkan.

As of December 31, 2020 and 2019, there are no cash
and cash equivalents that are restricted for use or
pledged as collateral.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Mutasi nilai tercatat kas dan setara kas:

	31 Desember/December 31, 2020				
	Stage 1 - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total	
Saldo awal nilai tercatat	2.429.067	-	-	2.429.067	Carrying amount - beginning balance
Pengukuran kembali bersih	481.202	-	-	481.202	Remeasurement
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	9.649.740	-	-	9.649.740	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(10.481.110)	-	-	(10.481.110)	Financial assets that have been derecognized
Selisih kurs dan perubahan lain	(21.797)	-	-	(21.797)	Foreign exchange and other movements
Saldo Akhir Nilai Tercatat	2.057.102	-	-	2.057.102	Carrying Amount - Ending Balance

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai kas dan
setara kas:

	31 Desember/December 31, 2020				
	Stage 1 - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3 - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total	
Saldo awal	-	-	-	-	Beginning balance
Dampak penerapan PSAK No. 71	199	-	-	199	Impact of SFAS No. 71 implementation
Saldo awal kerugian kredit ekspektasian	199	-	-	199	Expected credit loss beginning balance
Pengukuran kembali bersih kerugian kredit ekspektasian	20	-	-	20	Remeasurement of expected credit loss
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	138	-	-	138	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(295)	-	-	(295)	Financial assets that have been derecognized
Selisih kurs dan perubahan lain	(19)	-	-	(19)	Foreign exchange and other movements
Saldo Akhir Kerugian Kredit Ekspektasian	43	-	-	43	Expected Credit Loss - Ending Balance

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. EFEK-EFEK

	31 Desember/ December 31, 2020
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI)*): Rupiah	
Obligasi - Pihak berelasi	242.160
Obligasi - Pihak ketiga	217.596
Dolar Amerika Serikat	
Obligasi - Pihak berelasi	645.126
Biaya perolehan diamortisasi: Rupiah	
Obligasi - Pihak berelasi	250.000
Obligasi - Pihak ketiga	250.000
Reksadana - Pihak ketiga**)	227.706
Dolar Amerika Serikat	
Obligasi - Pihak ketiga	639.662
Tersedia untuk dijual*): Rupiah	
Obligasi - Pihak ketiga	-
Dolar Amerika Serikat	
Obligasi - Pihak berelasi	-
Dimiliki hingga jatuh tempo*): Rupiah	
Obligasi - Pihak berelasi	-
Obligasi - Pihak ketiga	-
Dolar Amerika Serikat	
Obligasi - Pihak berelasi	-
Obligasi - Pihak ketiga	-
Pinjaman yang diberikan dan piutang: Rupiah	
Reksadana - Pihak ketiga**)	-
	2.472.250
Dikurangi:	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.202)
	2.470.048

6. SECURITIES

31 Desember/ December 31, 2019	
	<i>Fair value through other comprehensive income (FVTOCI)*): Rupiah</i>
-	<i>Bonds - Related parties</i>
-	<i>Bonds - Third party</i>
-	<i>United States Dollar</i>
-	<i>Bonds - Related parties</i>
	<i>Amortized cost: Rupiah</i>
-	<i>Bonds - Related parties</i>
-	<i>Bonds - Third party</i>
-	<i>Mutual funds - Third parties**)</i>
-	<i>United States Dollar</i>
-	<i>Bonds - Third parties</i>
	<i>Available-for-sale*): Rupiah</i>
220.220	<i>Bonds - Third party</i>
	<i>United States Dollar</i>
57.690	<i>Bonds - Related parties</i>
	<i>Held-to-maturity*): Rupiah</i>
605.596	<i>Bonds - Related parties</i>
250.000	<i>Bonds - Third party</i>
	<i>United States Dollar</i>
700.278	<i>Bonds - Related parties</i>
639.446	<i>Bonds - Third parties</i>
	<i>Loans and receivables: Rupiah</i>
259.706	<i>Mutual funds - Third parties**)</i>
2.732.936	
	<i>Less:</i>
-	<i>Allowance for impairment losses</i>
2.732.936	

*) Termasuk obligasi sukuk yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan diukur pada biaya perolehan berdasarkan PSAK No. 110 (Revisi 2015).

**) Reksadana Penyertaan Terbatas dan Dana Investasi Infrastruktur yang memiliki jadwal pelunasan secara sekaligus atau bertahap pada tanggal pelunasan atau tanggal-tanggal pelunasan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Kontrak Investasi Kolektif pada nilai yang telah ditentukan dalam surat komitmen pembelian unit penyertaan kepada pemegang unit penyertaan.

*) Including sukuk bonds classified as fair value through other comprehensive income and at acquisition cost based on SFAS No. 110 (Revised 2015).

**) Limited Participation Mutual Fund and Infrastructure Investment Fund with repayment schedules in lump sum or on stages on repayment date or repayment dates in accordance with the agreed terms in Collective Investment Contract at the specified value in the purchase of participation unit commitment letter to the unit holders.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. EFEK-EFEK (lanjutan)

Rincian efek-efek pada tanggal-tanggal
31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai
berikut:

6. SECURITIES (continued)

The details of securities as of December 31, 2020
and 2019 are as follows:

31 Desember/December 31, 2020						
	Peringkat/ Rating	Tanggal pembelian/ Purchase date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan penerbit/ Issuer company	Nilai pokok/ Principal amount	Nilai tercatat/ Carrying amount
Rupiah						
Sukuk						
Pihak ketiga/Third party						
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I						
XL Axiata Tahap I	idAAA**)	28 Des./ Dec. 28, 2017	28 Des./ Dec. 28, 2022	PT XL Axiata Tbk	226.362	217.596
Tahun 2015 Seri D						
Rupiah						
Obligasi/Bonds						
Pihak berelasi/Related parties						
PT Marga Lingkar Jakarta	idAAA***)	8 Nov./ Nov. 8, 2017	8 Nov./ Nov. 8, 2029	PT Marga Lingkar Jakarta	250.000	250.000
Senior Unsecured notes						
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Baa2*)	2 Okt., 20 Feb.- 6 Nov. 2020/ Oct 2., Feb. 20- Nov. 6, 2020	31 Jan./ Jan. 31, 2021	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	242.280	242.160
Pihak ketiga/Third parties						
PT Medco Power Indonesia	idA***)	4 Jul./ Jul. 4, 2018	4 Jul./ Jul. 4, 2025	PT Medco Power Indonesia	250.000	250.000
MPI I Bonds						
Reksadana/Mutual fund						
Pihak ketiga/Third parties						
RDPT Mandiri Infrastruktur		5 Okt./ Oct. 5, 2018	5 Jul./ Jul. 5, 2023	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	191.500	191.706
Ekuitas Transjawa		27 Jun./ Jun. 27, 2019	27 Jun./ Jun. 27, 2024	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	36.000	36.000
KIK Dintra Toll Road						
Mandiri-001						
Dolar Amerika Serikat/United States Dollar						
Obligasi/Bonds						
Pihak berelasi/Related parties						
Indonesian Government				Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia		
Senior Unsecured USD	Baa2*)	29 Jun./ Jun. 29, 2016	5 Mei/ May 5, 2021		56.420	57.295
denominated Bond RI0321						
Indonesian Government				Perusahaan Penerbit SBSN		
Senior Unsecured USD	Baa2*)	29 Mar./ Mar. 29, 2017	29 Mar./ Mar. 29, 2022		21.158	21.877
denominated Sukuk SNI22						
Indonesian Government				Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia		
Senior Unsecured USD	Baa2*)	20 Jul./ Jul. 20, 2016	25 Apr./ Apr. 25, 2022		260.943	271.492
denominated Bond RI022						
Indonesian Government				Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia		
Senior Unsecured USD	Baa2*)	8 Des./ Dec. 8, 2016	8 Jan./ Jan. 8, 2022		35.263	36.331
denominated Bond RI022						
Indonesian Government				Perusahaan Penerbit SBSN		
Senior Unsecured USD	Baa2*)	26 Jul./ Jul. 26, 2017	21 Nov./ Nov. 21, 2022		21.158	22.198
denominated Sukuk SNI22						
Indonesian Government				Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia		
Senior Unsecured USD	Baa2*)	26 Jul./ Jul. 26, 2017	15 Apr./ Apr. 15, 2023		14.105	14.955
denominated Bond RI023						
Indonesian Government				Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia		
Senior Unsecured USD	Baa2*)	11 Des./ Dec. 11, 2017	11 Jan./ Jan. 11, 2028		197.470	220.978
denominated Bond RI028						
Pihak ketiga/Third parties						
Star Energy Bond	Ba3*)	24 Apr./ Apr. 24, 2018	24 Apr./ Apr. 24, 2033	PT Star Energy	639.662	639.662
Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses					2.442.321	2.472.250
					-	(2.202)
					2.442.321	2.470.048

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. EFEK-EFEK (lanjutan)

Rincian efek-efek pada tanggal-tanggal
31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

6. SECURITIES (continued)

The details of securities as of December 31, 2020
and 2019 are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2019						
	Peringkat/ Rating	Tanggal pembelian/ Purchase date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan penerbit/ Issuer company	Nilai pokok/ Principal amount	Nilai tercatat/ Carrying amount
Rupiah Sukuk						
Pihak ketiga/Third party						
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Seri D	idAAA**)	28 Des./ Dec. 28, 2017	28 Des./ Dec. 28, 2022	PT XL Axiata Tbk	226.362	220.220
Rupiah Obligasi/Bonds						
Pihak berelasi/Related parties						
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Senior Unsecured notes	Baa2*)	11 Des./ Dec. 11, 2017	11 Des./ Dec. 11, 2020	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	250.000	250.661
PT Marga Lingkar Jakarta Senior Unsecured notes	idAAA***)	8 Nov./ Nov. 8, 2017	8 Nov./ Nov. 8, 2029	PT Marga Lingkar Jakarta	250.000	251.970
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idAAA***)	21 Sep./ Sep. 21, 2018	21 Sep./ Sep. 21, 2023	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35.000	35.000
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Ba2*)	2 Okt./ Oct. 2, 2019	31 Jan./ Jan. 31, 2021	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	70.000	67.965
Pihak ketiga/Third parties						
PT Medco Power Indonesia MPI I Bonds	idA***)	4 Jul./ Jul. 4, 2018	4 Jul./ Jul. 4, 2025	PT Medco Power Indonesia	250.000	250.000
Reksadana/Mutual fund						
Pihak ketiga/Third parties						
RDPT Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa		5 Okt./ Oct. 5, 2018	5 Jul./ Jul. 5, 2023	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	219.500	219.706
KIK Dintra Toll Road Mandiri-001		27 Jun./ Jun. 27, 2019	27 Jun./ Jun. 27, 2024	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	40.000	40.000
Dolar Amerika Serikat/United States Dollar						
Obligasi/Bonds						
Pihak berelasi/Related parties						
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI0321	Baa2*)	29 Jun./ Jun. 29, 2016	5 Mei/ May 5, 2021	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	55.604	57.690
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Sukuk SNI22	Baa2*)	29 Mar./ Mar. 29, 2017	29 Mar./ Mar. 29, 2022	Perusahaan Penerbit SBSN	20.852	20.929
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI022	Baa2*)	20 Jul./ Jul. 20, 2016	25 Apr./ Apr. 25, 2022	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	257.169	260.434
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI022	Baa2*)	8 Des./ Dec. 8, 2016	8 Jan./ Jan. 8, 2022	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	34.753	35.166
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Sukuk SNI22	Baa2*)	26 Jul./ Jul. 26, 2017	21 Nov./ Nov. 21, 2022	Perusahaan Penerbit SBSN	20.852	20.884
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI023	Baa2*)	26 Jul./ Jul. 26, 2017	15 Apr./ Apr. 15, 2023	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	13.901	13.925
Indonesian Government Senior Unsecured USD denominated Bond RI028	Baa2*)	11 Des./ Dec. 11, 2017	11 Jan./ Jan. 11, 2028	Pemerintah Republik Indonesia/Government of the Republic of Indonesia	194.614	192.219
Pertamina Bond022	Baa2*)	15 Jul./Jul. 15, 2016	3 Mei/May 3, 2022	PT Pertamina (Persero)	27.802	28.723
Pertamina Bond023	Baa2*)	30 Jul./ Jul. 30, 2016	20 Mei/ May 20, 2023	PT Pertamina (Persero)	125.109	127.998
Pihak ketiga/Third parties						
Star Energy Bond	Ba3*)	24 Apr./ Apr. 24, 2018	24 Apr./ Apr. 24, 2033	PT Star Energy	693.446	639.446
					2.784.964	2.732.936

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. EFEK-EFEK (lanjutan)

Rincian efek-efek pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut (lanjutan):

- *) Peringkat untuk efek-efek adalah berdasarkan peringkat internasional yang dikeluarkan Moody's untuk Pemerintah Indonesia, obligasi global Wijaya Karya, Jasa Marga, Pertamina dan Star Energy.
- **) Sukuk XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Seri D merupakan *underlying* dari reksadana dimana Perusahaan sebagai satu-satunya pihak yang memiliki unit reksadana tersebut.
- ***) Peringkat untuk efek-efek adalah berdasarkan peringkat yang dikeluarkan Pefindo.

	31 Desember/ December 31, 2020
Tingkat bunga per tahun	
Rupiah	7,50 - 10,75%
Dolar Amerika Serikat	3,30 - 6,75%

Selama tahun 2020 dan 2019, Perusahaan melakukan penjualan sejumlah efek-efek dan membukukan keuntungan neto masing-masing sebesar Rp7.562 dan Rp4.067 yang dicatat pada laporan laba rugi.

Lain-lain

Mutasi keuntungan/(kerugian) belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai dari efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Saldo awal	5.336	(27.860)
Dampak penerapan PSAK No. 71	18.848	-
Saldo awal setelah dampak penerapan PSAK No.71	24.184	(27.860)
Kenaikan nilai wajar	20.710	33.767
Penurunan cadangan kerugian penurunan nilai	(218)	-
Efek pajak	713	(571)
Saldo akhir	45.389	5.336

6. SECURITIES (continued)

The details of securities as of December 31, 2020 and 2019 are as follows: (continued):

- *) Ratings for securities are based on international rating issued by Moody's for the Government of the Republic of Indonesia, global bonds of Wijaya Karya, Jasa Marga, Pertamina, and Star Energy.
- **) Sukuk XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Seri D is the underlying security of mutual fund, whereas the Company is the only party who holds the mutual fund unit.
- ***) Ratings for securities are based on rating issued by Pefindo.

	31 Desember/ December 31, 2019	
Tingkat bunga per tahun		Interest rate per annum
Rupiah	7,50 - 10,75%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	3,30 - 6,75%	United States Dollar

In 2020 and 2019, the Company sold some of its securities and booked net gain of Rp7,562 and Rp4,067 respectively, which was recorded in the statement of profit or loss.

Others

Movements of unrealized gain/(loss) and allowance for impairment losses on securities classified as fair value through other comprehensive income are as follows:

Beginning balance
Impact of SFAS No. 71 implementation
Beginning balance after impact of SFAS No. 71 implementation
Increase in fair value
Decrease in allowance for impairment losses
Tax effect
Ending balance

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. EFEK-EFEK (lanjutan)

Pada bulan April 2020, Oktober 2019, April 2019, dan Oktober 2018, terdapat pembelian kembali Star Energy Bond masing-masing sebesar USD650.000, USD1.900.000, USD1.250.000, dan USD850.000 oleh penerbit sesuai dengan ketentuan penerbitan obligasi.

Pada tahun 2018, Perusahaan melakukan reklasifikasi beberapa efek-efek tersedia untuk dijual menjadi dimiliki hingga jatuh tempo dengan jumlah nominal sebesar USD50.000.000 dan Rp500.000.

Nilai tercatat dan nilai wajar untuk efek-efek yang telah direklasifikasi masing-masing sebesar Rp1.237.909 dan Rp1.190.461 pada tanggal 31 Desember 2019 dan kerugian nilai wajar yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebesar Rp1.118 pada tanggal 31 Desember 2019.

Tidak terdapat efek-efek yang mengalami penurunan nilai pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Mutasi nilai tercatat efek-efek:

6. SECURITIES (continued)

In April 2020, October 2019, April 2019, and October 2018, the issuer repurchased Star Energy Bond of USD650,000, USD1,900,000, USD1,250,000, and USD850,000, respectively, in accordance with the bonds issuance terms.

In 2018, the Company reclassified some of available-for-sale securities into held-to-maturity securities with total nominal amounting to USD50,000,000 and Rp500,000.

The carrying value and fair value of reclassified securities amounting to Rp1,237,909 and Rp1,190,461 as of December 31, 2019 and losses from fair value recognized in other comprehensive income amounted to Rp1,118 as of December 31, 2019.

There were no impaired securities as of December 31, 2020 and 2019.

Movement of carrying amount of securities:

	31 Desember/December 31, 2020				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total	
Saldo awal	2.732.936	-	-	2.732.936	Beginning balance
Dampak penerapan PSAK No. 71	19.569	-	-	19.569	Impact of SFAS No.71 implementation
Saldo awal nilai tercatat	2.752.505	-	-	2.752.505	Carrying amount - beginning balance
Pengukuran kembali bersih	25.254	-	-	25.254	Remeasurement
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	165.124	-	-	165.124	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(488.400)	-	-	(488.400)	Financial assets that have been derecognized
Selisih kurs dan perubahan lain	17.767	-	-	17.767	Foreign exchange and other movements
Saldo Akhir Nilai Tercatat	2.472.250	-	-	2.472.250	Carrying Amount - Ending Balance

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. EFEK-EFEK (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang di klasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi:

6. SECURITIES (continued)

Movement of allowance of impairment losses for securities classified as amortized cost:

	31 Desember/December 31, 2020				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total	
Saldo awal	-	-	-	-	Beginning balance
Dampak penerapan PSAK No. 71	2.886	-	-	2.886	Impact of SFAS No.71 implementation
Saldo awal kerugian kredit ekspektasian	2.886	-	-	2.886	Expected credit loss beginning balance
Pengukuran kembali bersih kerugian kredit ekspektasian	(637)	-	-	(637)	Remeasurement of expected credit loss
Selisih kurs dan perubahan lain	(47)	-	-	(47)	Foreign exchange and other movements
Saldo Akhir Kerugian Kredit Ekspektasian	2.202	-	-	2.202	Expected Credit Loss - Ending Balance

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:

Movement of allowance of impairment losses for securities classified as fair value through other comprehensive income:

	31 Desember/December 31, 2020				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total	
Saldo awal	-	-	-	-	Beginning balance
Dampak penerapan PSAK No. 71	333	-	-	333	Impact of SFAS No.71 implementation
Saldo awal kerugian kredit ekspektasian	333	-	-	333	Expected credit loss beginning balance
Pengukuran kembali bersih kerugian kredit ekspektasian	(170)	-	-	(170)	Remeasurement of expected credit loss
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	82	-	-	82	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(130)	-	-	(130)	Financial assets that have been derecognized
Saldo Akhir Kerugian Kredit Ekspektasian	115	-	-	115	Expected Credit Loss - Ending Balance

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Rincian transaksi derivatif yang masih berjalan adalah sebagai berikut:

7. DERIVATIVE RECEIVABLES AND LIABILITIES

The details of outstanding derivative transactions are as follows:

31 Desember/December 31, 2020						
	Tanggal transaksi/ Transaction date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan/ Counterparty	Nilai nosional/ Notional amount	Tagihan derivatif/ Derivative receivables	Liabilitas derivatif/ Derivative liabilities
Swap						
Pihak ketiga/Third party						
USD (IRS)	31 Mei/May 31, 2019	8 Mei/May 8, 2024	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	USD50.000.000	-	48.373
USD (IRS)	31 Mei/May 31, 2019	8 Mei/May 8, 2026	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	USD50.000.000	-	68.827
Ops/Option (Catatan 8/Note 8)						
Pihak ketiga/Third party						
IDR	8 Okt./Oct.8, 2018	8 Okt./Oct. 8, 2023	Matahari Kapital Indonesia		69.265	-
					69.265	117.200
31 Desember/December 31, 2019						
	Tanggal transaksi/ Transaction date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Perusahaan/ Counterparty	Nilai nosional/ Notional amount	Tagihan derivatif/ Derivative receivables	Liabilitas derivatif/ Derivative liabilities
Swap						
Pihak ketiga/Third party						
USD (IRS)	31 Mei/May 31, 2019	8 Mei/May 8, 2024	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	USD50.000.000	-	17.585
USD (IRS)	31 Mei/May 31, 2019	8 Mei/May 8, 2026	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	USD50.000.000	-	22.085
Ops/Option (Catatan 8/Note 8)						
Pihak ketiga/Third party						
IDR	8 Okt./Oct.8, 2018	8 Okt./Oct. 8, 2023	Matahari Kapital Indonesia		44.290	-
					44.290	39.670

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, transaksi derivatif dimaksudkan untuk keperluan lindung nilai secara akuntansi, sebagai berikut:

As of December 31, 2020 and 2019, derivative transactions are determined as hedging for accounting purposes, as follows:

- a. Transaksi derivatif swap suku bunga dengan Standard Chartered Bank sebesar USD100.000.000 yang memenuhi kriteria lindung nilai secara akuntansi dengan tujuan lindung nilai atas risiko fluktuasi arus kas yang ditimbulkan oleh tingkat suku bunga atas pinjaman yang diterima dari International Finance Corporation dengan rincian sebagai berikut:

- a. Interest rate swap derivative transactions with Standard Chartered Bank amounting to USD100,000,000 that meets the criteria for hedge accounting to hedge the risk of fluctuations in cash flows arising from interest rates on its fund borrowing from International Finance Corporation as follows:

Nilai kontrak/ Contract value	Tanggal mulai/ Start date	Tanggal berakhir/ Maturity date
USD50.000.000	8 Mei/May 8, 2019	8 Mei/May 8, 2024
USD50.000.000	21 Juni/June 21, 2019	8 Mei/May 8, 2026

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, transaksi derivative dimaksudkan untuk keperluan lindung nilai secara akuntansi, sebagai berikut (lanjutan):

Perusahaan menyetujui untuk membayar pokok pinjaman diterima masing-masing sebesar USD50.000.000 dan bunga pinjaman diterima setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat suku bunga mengambang masing-masing LIBOR + 1,75% dan LIBOR + 1,20%. Dari transaksi derivatif, Perusahaan akan menerima pokok sebesar USD100.000.000 dan bunga setiap 3 (tiga) bulanan dengan tingkat suku bunga mengambang sebesar LIBOR.

Kerugian kumulatif yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif - setelah pajak pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp93.760 dan Rp29.752, yang disajikan sebagai "Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto" sebagai bagian "Ekuitas" pada laporan posisi keuangan dan akan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat realisasinya.

- b. Transaksi derivatif opsi dengan PT Matahari Kapital Indonesia yang memenuhi kriteria lindung nilai secara akuntansi dengan tujuan lindung nilai atas risiko perubahan nilai wajar atas investasi saham Perusahaan PT Nusantara Infrastructure Tbk (Catatan 8).

Kerugian kumulatif yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif - setelah pajak dan dari perubahan nilai wajar investasi saham - setelah pajak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.647 yang disajikan sebagai "Keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai nilai wajar - neto" sebagai bagian "Ekuitas" pada laporan posisi keuangan dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada saat realisasinya.

Transaksi derivatif opsi dimaksudkan untuk keperluan lindung nilai secara akumulasi sejak tanggal 1 Januari 2020.

7. DERIVATIVE RECEIVABLE AND LIABILITIES (continued)

As of December 31, 2020, derivative transactions are determined as hedging for accounting purposes, as follows (continued):

The Company agrees to pay principal of fund borrowing each amounting to USD50,000,000, and quarterly interest of fund borrowing with a floating rate at LIBOR + 1.75% and LIBOR + 1.20%, respectively. From derivative transaction, the Company will receive principal amounting to USD100,000,000 and quarterly interest with a floating rate at LIBOR.

The cumulative losses arising from the changes in fair values of the derivative instruments - net of tax as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp93,760 and Rp29,752, were presented as "Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges - net" under the "Equity" section in the statement of financial position and will be recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income upon its realization.

- b. Option derivative transactions with PT Matahari Kapital Indonesia that meets the criteria for hedge accounting to hedge the risk to fair value changes on the Company's equity investment of PT Nusantara Infrastructure Tbk (Note 8).

The cumulative loss arising from the changes in fair values of the derivative instruments - net of tax and changes in fair values of the equity investment - net of tax as of December 31, 2020 amounting to Rp25,647 was presented as "Cumulative gain on derivative instrument for fair value hedges - net" under the "Equity" section in the statement of financial position and will not be subsequently transferred to the profit or loss upon its realization.

Option derivative transactions is determined as hedging for accounting purpose starting January 1, 2020

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. INVESTASI SAHAM

	31 Desember/ December 31, 2020
PT Nusantara Infrastructure Tbk	396.720
	396.720

PT Nusantara Infrastructure Tbk

Pada tanggal 8 Oktober 2018, Perusahaan melakukan perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan PT Metro Pacific Tollways Indonesia untuk pembelian sebanyak 1.523.567.500 lembar saham atau setara 10% kepemilikan saham di PT Nusantara Infrastructure Tbk ("PTNI") dengan harga sebesar Rp250 (nilai penuh) per lembar. Perusahaan membeli dengan total harga sebesar Rp380.892.

Sebelumnya pada tanggal 5 Oktober 2018, Perusahaan menandatangani Perjanjian Opsi dengan PT Matahari Kapital Indonesia ("MKI"). Dalam perjanjian opsi tersebut, Perusahaan akan memberikan opsi beli kepada MKI sedangkan MKI akan memberikan opsi jual kepada Perusahaan terkait dengan saham yang dimiliki Perusahaan di PTNI sebanyak 1.523.567.500 lembar saham.

Opsi jual

Perusahaan berhak (tetapi tidak berkewajiban) untuk mensyaratkan MKI untuk, selama periode Opsi (antara 8 April 2023 - 8 Oktober 2023), membeli saham PTNI yang dimiliki Perusahaan baik secara bertahap maupun sekaligus pada harga pembelian sebesar Rp250 (nilai penuh) per lembar saham.

Opsi beli

Perusahaan memberi opsi kepada MKI untuk mensyaratkan Perusahaan untuk, selama periode Opsi (antara 8 April 2023 - 8 Oktober 2023), menjual saham PTNI yang dimiliki oleh Perusahaan baik secara bertahap maupun sekaligus pada harga pembelian per lembar saham sebesar Rp250 (nilai penuh) ditambah premi yang memberikan tingkat pengembalian kepada Perusahaan sebesar 15% per tahun yang dihitung sejak tanggal pembelian saham hingga tanggal penutupan opsi beli.

Pada tanggal 17 sampai 21 Desember 2018, PTNI melakukan penawaran umum terbatas saham sebesar Rp495.007. Untuk mempertahankan kepemilikannya di PTNI, Perusahaan kembali melakukan pembelian 10% saham dari penawaran umum saham dengan harga Rp200 (nilai penuh) per lembar. Total pembelian saham tersebut sebesar Rp49.500.

8. EQUITY INVESTMENTS

	31 Desember/ December 31, 2019
	389.636
	389.636

PT Nusantara Infrastructure Tbk

PT Nusantara Infrastructure Tbk

On October 8, 2018, the Company entered into a Conditional Sale and Purchase Agreement with PT Metro Pacific Tollways Indonesia for the purchase of 1,523,567,500 shares or equivalent to 10% ownership of PT Nusantara Infrastructure Tbk ("PTNI") at Rp250 (full amount) per share. Total purchase price amounting to Rp380,892.

On October 5, 2018, the Company signed an option agreement with PT Matahari Kapital Indonesia ("MKI"). In the option agreement, the Company will give MKI a buy option while MKI will give the Company a sell option related to the PTNI's shares owned by the Company totaling 1,523,567,500 shares.

Sell option

The Company has a right (but not obligation) to require MKI, during the option period (between April 8, 2023 - October 8, 2023), to purchase PTNI's shares owned by the Company on stages or lumpsum at a purchase price of Rp250 (full amount) per share.

Buy option

The Company gives MKI an option to require the Company, during the option period (between April 8, 2023 to October 8, 2023), to sell PTNI's shares owned by the Company on stages or lumpsum at a purchase price of Rp250 (full amount) per share plus premium which reflects an internal rate of return of 15% per annum to the Company which is calculated since the purchase date of the shares until the option closing date.

On December 17 until 21, 2018, PTNI conducted limited public right issuance with total amount of Rp495,007. To maintain its ownership in PTNI, the Company purchased additional 10% shares of the right issuance at Rp200 (full amount) per share. The Company's total purchase amount was Rp49,500.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. INVESTASI SAHAM (lanjutan)

PT Nusantara Infrastructure Tbk (lanjutan)

Opsi beli (lanjutan)

Pada tanggal 7 Agustus 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Opsi dengan PT Matahari Kapital Indonesia ("MKI"). Dalam perjanjian opsi tersebut, Perusahaan akan memberikan opsi beli kepada MKI sedangkan MKI akan memberikan opsi jual kepada Perusahaan terkait dengan tambahan saham yang dimiliki Perusahaan di PTNI sebanyak 247.503.631 lembar saham. Dengan demikian, opsi beli MKI dan opsi jual Perusahaan atas kepemilikan saham Perusahaan di PTNI menjadi sebesar 1.771.071.131 lembar saham.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan menetapkan investasi saham ini sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Efektif sejak 1 Januari 2020, Perusahaan mereklasifikasi investasi saham ini menjadi diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI).

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan menghitung nilai wajar dari investasi saham di PTNI berdasarkan harga saham terakhir yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebesar Rp220 (nilai penuh) (2018: Rp206 (nilai penuh)), dan menetapkan nilai wajar dari investasi saham tersebut sebesar Rp389.636 (2018: Rp364.841) sehingga Perusahaan membukukan keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi saham sebesar Rp24.795 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 di laba rugi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan menghitung nilai wajar dari investasi saham di PTNI berdasarkan harga saham terakhir yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebesar Rp224 (nilai penuh) dan menetapkan nilai wajar dari investasi saham tersebut sebesar Rp396.720 sehingga Perusahaan membukukan keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar sebesar Rp7.084 di penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

8. EQUITY INVESTMENTS (continued)

PT Nusantara Infrastructure Tbk (continued)

Buy option (continued)

On August 7, 2019, the Company signed an option agreement with PT Matahari Kapital Indonesia ("MKI"). In the option agreement, the Company will give MKI a buy option while MKI will give the Company a sell option related to the PTNI's additional shares owned by the Company in PTNI amounting to 247,503,631 shares. Therefore, MKI's buy option and the Company's sell option to the Company's share ownership in PTNI totaling to 1,771,071,131 shares.

As of December 31, 2019, the Company designated this equity investment as financial assets that measured at fair value through profit or loss (FVTPL). Effective January 1, 2020, the Company reclassified the equity instrument to be measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI).

As of December 31, 2019, the Company calculated the fair value of the equity investment in PTNI based on the latest stock price recorded in Indonesia Stock Exchange amounting to Rp220 (full amount) (2018: Rp206 (full amount)), and designated the fair value of those equity investment of Rp389,636 (2018: Rp364,841) which resulted the Company booked an unrealized gain from changes in fair value of equity investments of Rp24,795 for the years ended December 31, 2019 in current year's profit or loss.

As of December 31, 2020, the Company calculated the fair value of the equity investment in PTNI based on the latest stock price recorded in Indonesia Stock Exchange amounting to Rp224 (full amount) and designated the fair value of those equity investment of Rp396,720 which resulted the Company booked an unrealized gain from changes in fair value of Rp7,084 in the current year's other comprehensive income.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. INVESTASI SAHAM (lanjutan)

PT Nusantara Infrastructure Tbk (lanjutan)

Perusahaan juga menghitung nilai wajar dari opsi sebesar Rp44.290 yang dicatat sebagai tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2019 (2018: Rp66.945) (Catatan 7) sehingga membukukan kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar opsi saham sebesar Rp22.655 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 di laporan laba rugi. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan menghitung nilai wajar dari opsi sebesar Rp69.265 yang dicatat sebagai tagihan derivatif (Catatan 7) sehingga membukukan keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai nilai wajar sebesar Rp24.975 di penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Maxpower Group Pte Ltd

Pada tanggal 30 Mei 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pemesanan Saham dengan PT Maxpower Indonesia ("PTMI"). Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan membeli 1.525 lembar saham kelas B dengan nilai nominal USD52 per lembar atau sebesar 5,747% dari jumlah saham PTMI yang ditempatkan dan disetor. Pada tanggal 4 Juli 2014, Perusahaan membayar sebesar USD12.500.000 atas pembelian saham tersebut.

Perusahaan menetapkan investasi saham ini sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Pada tanggal 4 Juli 2014, Perusahaan juga menandatangani Akta Pertukaran Saham (*Share Exchange Deed*) ("Akta") dengan Maxpower Group Pte Ltd ("MGPL") dan PTMI dimana Perusahaan mendapatkan hak tukar atas kepemilikan saham di PTMI menjadi saham MGPL. MGPL merupakan induk perusahaan dari PTMI. Hak tukar tersebut dapat dieksekusi kapan saja setelah penandatanganan Akta ini.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perusahaan mengeksekusi hak tukar atas kepemilikan saham Perusahaan di PTMI, menjadi saham MGPL. Berdasarkan hak tukar tersebut, Perusahaan mendapatkan kepemilikan saham pada MGPL sebesar 5,7844%, dengan melepaskan kepemilikan pada saham PTMI sebesar 5,747%.

8. EQUITY INVESTMENTS (continued)

PT Nusantara Infrastructure Tbk (continued)

The Company also calculates the fair value of the option of Rp44,290 which are recorded as derivative receivables as of December 31, 2019 (2018: Rp66,945) (Note 7) which resulted the Company booked an unrealized loss from the fair value of shares option of Rp22,655 for the year ended December 31, 2019 in the statement of profit or loss. As of December 31, 2020, the Company calculates the fair value of the option of Rp69,265 which are recorded as derivative receivables (Note 7) which resulted the Company booked an unrealized gain from fair value changes from derivative instrument qualified as fair value hedge of Rp24,975 in the current year's other comprehensive income.

Maxpower Group Pte Ltd

On May 30, 2014, the Company signed a Shares Subscription Agreement with PT Maxpower Indonesia ("PTMI"). Based on the agreement, the Company subscribed 1,525 Series B shares with nominal value of USD52 per share or equivalent to 5.747% of PTMI's total subscribed and paid-up capital. On July 4, 2014, the Company paid USD12,500,000 for the shares subscription.

The Company designated this equity investment as financial assets that measured at fair value through profit or loss (FVTPL).

On July 4, 2014, the Company also signed a Share Exchange Deed ("Deed") with Maxpower Group Pte Ltd ("MGPL") and PTMI where the Company receives an option to exchange its share ownership from PTMI to become MGPL shares. MGPL is a parent of PTMI. The option can be executed at any time after the signing of the Deed.

On June 30, 2016, the Company executed the option to exchange its shares in PTMI to become shares in MGPL. Based on the shares exchange, the Company obtains the share ownership of 5.7844% in MGPL and releases shares ownership of 5.747% in PTMI.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. INVESTASI SAHAM (lanjutan)

Maxpower Group Pte Ltd (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menetapkan nilai wajar investasi saham MGPL sebesar RpNihil dengan mempertimbangkan kinerja keuangan MGPL terkini.

Pada tanggal 6 Desember 2018, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan PT Infra Daya Energi dimana Perusahaan menjual seluruh kepemilikan saham Perusahaan di MGPL sebesar 5,7844% kepada PT Infra Daya Energi dengan harga USD72.000 yang dananya telah diterima oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018. Proses pemindahan kepemilikan saham kepada PT Infra Daya Energi berlaku efektif pada tanggal 8 Januari 2019. Sejak tanggal efektif tersebut, Perusahaan mengakui keuntungan dari penjualan saham sebesar Rp1.010 di laporan laba rugi tahun berjalan dan bukan lagi menjadi pemegang saham di MGPL.

Komitmen investasi saham

Rincian komitmen investasi saham adalah sebagai berikut:

8. EQUITY INVESTMENTS (continued)

Maxpower Group Pte Ltd (continued)

As of December 31, 2018, the Company determined the fair value of equity investment in MGPL at RpNil, considering the latest financial condition of MGPL.

On December 6, 2018, the Company signed a Conditional Sale and Purchase Agreement with PT Infra Daya Energi whereby the Company sold all its share ownership of 5.7844% in MGPL to PT Infra Daya Energi with a selling price of USD72,000 which funds was received by the Company on December 31, 2018. The transfer of share ownership to PT Infra Daya Energi effective on January 8, 2019. Since the effective date, the Company recognized gain on sale of shares amounting to Rp1,010 in the current year statement of profit or loss and no longer became the shareholder of MGPL.

Equity investment commitment

Details of equity investment commitment are as follows:

		31 Desember/December 31, 2020				
		Komitmen yang sudah dicairkan/ Commitment - drawdown	Komitmen yang belum dicairkan/ Commitment - undrawdown	Total		
Rupiah - Pihak ketiga					Rupiah - Third party	
Lainnya		430.393	-	430.393	Others	
		430.393	-	430.393		
		31 Desember/December 31, 2019				
		Komitmen yang sudah dicairkan/ Commitment - drawdown	Komitmen yang belum dicairkan/ Commitment - undrawdown	Total		
Rupiah - Pihak ketiga					Rupiah - Third party	
Lainnya		430.393	-	430.393	Others	
		430.393	-	430.393		

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN

Pinjaman diberikan berdasarkan mata uang dan jenis kredit:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Rupiah - Pihak berelasi Investasi	2.608.694	1.889.417
Rupiah - Pihak ketiga Investasi	4.379.149	2.939.960
	6.987.843	4.829.377
Dolar Amerika Serikat - Pihak berelasi Investasi	362.234	478.174
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga Investasi	2.019.935	1.120.358
	2.382.169	1.598.532
	9.370.012	6.427.909
Ditambah/(dikurangi):		
Piutang bunga	118.145	15.306
Biaya transaksi belum diamortisasi	(46.782)	(37.004)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(243.889)	(173.549)
	9.197.486	6.232.662

*Rupiah - Related parties
Investment*

*Rupiah - Third parties
Investment*

*United States Dollar - Related parties
Investment*

*United States Dollar - Third parties
Investment*

*Add/(less):
Accrued interest income
Unamortized transaction costs
Allowance for impairment losses*

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan pinjaman diberikan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai:

*The table below summarizes the loans that are not
impaired and impaired:*

31 Desember/December 31, 2020			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Unimpaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total
Rupiah - Pihak berelasi			
Jalan	1.214.901	-	1.214.901
Pelabuhan udara	858.275	-	858.275
Telekomunikasi	397.256	-	397.256
Listrik	138.262	-	138.262
	2.608.694		2.608.694
Rupiah - Pihak ketiga			
Telekomunikasi	1.270.000	-	1.270.000
Utilitas air dan limbah	1.058.920	-	1.058.920
Jalan	652.445	-	652.445
Listrik	444.520	425.885	870.405
Infrastruktur sosial	250.000	-	250.000
Minyak dan gas	141.065	-	141.065
Penunjang pelabuhan laut	120.319	-	120.319
Lainnya	-	15.995	15.995
	3.937.269	441.880	4.379.149
Dolar Amerika Serikat - Pihak berelasi			
Pemeliharaan pesawat	349.687	-	349.687
Listrik	12.547	-	12.547
	362.234	-	362.234

*Rupiah - Related parties
Road
Airport
Telecommunication
Electricity*

*Rupiah - Third parties
Telecommunication
Water and waste utility
Road
Electricity
Social infrastructure
Oil and gas
Seaport support
Others*

*United States Dollar -
Related parties
Aircraft maintenance
Electricity*

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan pinjaman diberikan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai (lanjutan):

9. LOANS (continued)

The table below summarizes the loans that are not impaired and impaired (continued):

31 Desember/December 31, 2020			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Unimpaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total
Dolar Amerika Serikat -			United States Dollar -
Pihak ketiga			Third parties
Listrik	1.150.666	-	1.150.666
Penunjang pelabuhan laut	442.115	-	442.115
Minyak dan gas	348.570	78.584	427.154
	1.941.351	78.584	2.019.935
	8.849.548	520.464	9.370.012
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Piutang bunga	117.782	363	118.145
Biaya transaksi belum diamortisasi	(46.219)	(563)	(46.782)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(65.394)	(178.495)	(243.889)
	8.855.717	341.769	9.197.486
			Unamortized transaction costs
			Allowance for impairment losses
31 Desember/December 31, 2019			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Unimpaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total
Rupiah - Pihak berelasi			Rupiah - Related parties
Pelabuhan udara	874.916	-	874.916
Telekomunikasi	448.083	-	448.083
Jalan	413.293	-	413.293
Listrik	153.125	-	153.125
	1.889.417	-	1.889.417
Rupiah - Pihak ketiga			Rupiah - Third parties
Utilitas air dan limbah	1.267.062	-	1.267.062
Jalan	612.734	-	612.734
Telekomunikasi	200.000	-	200.000
Penunjang pelabuhan laut	148.781	-	148.781
Listrik	140.537	432.709	573.246
Minyak dan gas	138.137	-	138.137
	2.507.251	432.709	2.939.960
Dolar Amerika Serikat -			United States Dollar -
Pihak berelasi			Related parties
Pemeliharaan pesawat	461.710	-	461.710
Listrik	16.464	-	16.464
	478.174	-	478.174
Dolar Amerika Serikat -			United States Dollar -
Pihak ketiga			Third parties
Listrik	343.717	-	343.717
Minyak dan gas	267.995	79.835	347.830
Telekomunikasi	233.537	-	233.537
Penunjang pelabuhan laut	195.274	-	195.274
	1.040.523	79.835	1.120.358
	5.915.365	512.544	6.427.909
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Piutang bunga	14.895	411	15.306
Biaya transaksi belum diamortisasi	(37.004)	-	(37.004)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.284)	(156.265)	(173.549)
	5.875.972	356.690	6.232.662
			Unamortized transaction costs
			Allowance for impairment losses

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, umur pinjaman diberikan yang mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
0 - 3 bulan	520.464	512.544
	520.464	512.544

9. LOANS (continued)

As of December 31, 2020 and 2019, the aging of impaired loans are as follows:

Pinjaman diberikan berdasarkan jangka waktu pinjaman:

Loans based on credit term:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Rupiah - Pihak berelasi			<i>Rupiah - Related parties</i>
Kurang dari 1 tahun	75.520	98.429	<i>Less than 1 year</i>
5 - 10 tahun	2.029.220	1.448.513	<i>5 - 10 years</i>
Lebih dari 10 tahun	503.954	342.475	<i>More than 10 years</i>
Rupiah - Pihak ketiga			<i>Rupiah - Third parties</i>
1 - 2 tahun	216.247	245.844	<i>1 - 2 years</i>
2 - 5 tahun	1.888.333	1.081.603	<i>2 - 5 years</i>
5 - 10 tahun	1.475.476	711.914	<i>5 - 10 years</i>
Lebih dari 10 tahun	799.093	900.599	<i>More than 10 years</i>
	6.987.843	4.829.377	
Dolar Amerika Serikat - Pihak berelasi			<i>United States Dollar - Related parties</i>
5 - 10 tahun	362.234	478.174	<i>5 - 10 years</i>
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga			<i>United States Dollar - Third parties</i>
1 - 2 tahun	105.562	84.757	<i>1 - 2 years</i>
2 - 5 tahun	655.615	458.272	<i>2 - 5 years</i>
5 - 10 tahun	981.082	500.190	<i>5 - 10 years</i>
Lebih dari 10 tahun	277.676	77.139	<i>More than 10 years</i>
	2.382.169	1.598.532	
	9.370.012	6.427.909	
Ditambah/(dikurangi):			<i>Add/(less):</i>
Piutang bunga	118.145	15.306	<i>Accrued interest income</i>
Biaya transaksi			
belum diamortisasi	(46.782)	(37.004)	<i>Unamortized transaction costs</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(243.889)	(173.549)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	9.197.486	6.232.662	

Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat kenaikan atas pinjaman diberikan yang berasal dari bunga dalam masa konstruksi ("IDC") sebesar Rp179.931 (2019: Rp203.901).

As of December 31, 2020, there is an increase in loans from interest during construction ("IDC") amounting to Rp179,931 (2019: Rp203,901).

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Mutasi total pinjaman diberikan:

9. LOANS (continued)

Movement of total loan outstanding:

	31 Desember/December 31, 2020				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total	
Saldo awal nilai tercatat	5.893.256	192.274	320.681	6.406.211	Carrying amount - beginning balance
Pengukuran kembali bersih	(10.699)	(564)	-	(11.263)	Remeasurement
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	3.896.258	24.583	1.690	3.922.531	New financial asset originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(921.588)	(13.012)	(6.664)	(941.264)	Financial assets that have been derecognized
Selisih kurs dan perubahan lain	63.884	-	1.276	65.160	Foreign exchange and other movements
Saldo Akhir Nilai Tercatat	8.921.111	203.281	316.983	9.441.375	Carrying Amount - Ending Balance

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

Movement for allowance for impairment losses:

	31 Desember/December 31, 2020				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ 12-month expected credit losses	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak memburuk/ Lifetime expected credit losses - not deteriorated	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - memburuk/ Lifetime expected credit losses - deteriorated	Total	
Saldo awal	17.285	60.134	96.130	173.549	Beginning balance
Dampak penerapan PSAK No. 71	15.118	1.750	2.277	19.145	Impact of SFAS No. 71 implementation
Saldo awal kerugian kredit ekspektasian	32.403	61.884	98.407	192.694	Expected credit loss beginning balance
Pengukuran kembali bersih	26.881	3.466	13.652	43.999	Remeasurement
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	7.936	198	-	8.134	New financial asset originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(403)	-	-	(403)	Financial assets that have been derecognized
Selisih kurs dan perubahan lain	(501)	-	(34)	(535)	Foreign exchange and other movements
Saldo Akhir Kerugian Kredit Ekspektasian	66.316	65.548	112.025	243.889	Expected Credit Loss - Ending Balance

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Mutasi total pinjaman diberikan dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan):

	31 Desember/ December 31, 2019
Saldo awal	5.899.500
Pencairan pinjaman selama tahun berjalan	1.422.689
Penerimaan pembayaran pinjaman selama tahun berjalan	(832.155)
Efek selisih kurs	(62.125)
Saldo akhir	6.427.909
	31 Desember/ December 31, 2019
Saldo awal	167.560
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan	8.903
Efek selisih kurs	(2.914)
Saldo akhir	173.549

9. LOANS (continued)

Movement of total loan outstanding and movement for allowance for impairment losses (continued):

	<i>Beginning balance</i>
	<i>Loan disbursement during the year</i>
	<i>Loan repayment during the year</i>
	<i>Foreign exchange effect</i>
Ending balance	
	<i>Beginning balance</i>
	<i>Additional provision for the year</i>
	<i>Foreign exchange effect</i>
Ending balance	

Perusahaan menghitung cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan penilaian secara individual dan kolektif.

The Company provides allowance for impairment losses based on individual and collective assessments.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat pinjaman diberikan yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

As of December 31, 2020 dan 2019, there are no past due but not impaired loans.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman diberikan telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on loans is adequate.

Saldo pinjaman diberikan yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

Restructured loans balance are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Investasi	504.469	512.544	<i>Investment</i>
Ditambah/(dikurangi):			<i>Add/(less):</i>
Piutang bunga	363	411	<i>Accrued interest income</i>
Biaya transaksi belum diamortisasi	-	-	<i>Unamortized transaction costs</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(171.808)	(156.265)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Saldo akhir	333.024	356.690	Ending balance

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Termasuk di dalam pinjaman diberikan merupakan pinjaman dengan perjanjian pembiayaan bersama dengan entitas lain. Keikutsertaan Perusahaan sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan berkisar antara 6% sampai dengan 50% (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dari total pinjaman sindikasi. Risiko atas pinjaman sindikasi ditanggung secara proporsional oleh peserta kreditur.

Komitmen pinjaman diberikan

Rincian komitmen pinjaman diberikan adalah sebagai berikut:

9. LOANS (continued)

Included in the loans are loans with syndication agreements with other entities. The Company's participation as a member of syndicated loans were ranging from 6% to 50% (unaudited) as of December 31, 2020 and 2019, respectively, of the total syndicated loans. Risks from syndicated loans are shared proportionately by the participating creditors.

Loan commitment

Details of loan commitment are as follows:

31 Desember/December 31, 2020				
	Komitmen yang sudah dcairkan/ Commitment - drawdown	Komitmen yang belum dcairkan/ Commitment - undrawdown	Total	
Rupiah - Pihak berelasi				Rupiah - Related parties
Jalan	1.214.901	231.019	1.445.920	Road
Pelabuhan udara	858.275	-	858.275	Airport
Telekomunikasi	397.256	-	397.256	Telecommunication
Listrik	138.262	-	138.262	Electricity
Utilitas air dan limbah	-	420.000	420.000	Water and waste utility
	2.608.694	651.019	3.259.713	
Rupiah - Pihak ketiga				Rupiah - Third parties
Telekomunikasi	1.270.000	-	1.270.000	Telecommunication
Utilitas air dan limbah	1.058.920	95.000	1.153.920	Water and waste utility
Listrik	870.405	279.054	1.149.459	Electricity
Jalan	652.445	658.777	1.311.222	Road
Infrastruktur sosial	250.000	250.000	500.000	Social infrastructure
Minyak dan gas	141.065	-	141.065	Oil and gas
Penunjang pelabuhan laut	120.319	-	120.319	Seaport support
Lainnya	15.995	285.000	300.995	Others
	4.379.149	1.567.831	5.946.980	
Dolar Amerika Serikat -				United States Dollar -
Pihak berelasi				Related parties
Pemeliharaan pesawat	349.687	-	349.687	Aircraft maintenance
Listrik	12.547	-	12.547	Electricity
	362.234	-	362.234	
Dolar Amerika Serikat -				United States Dollar -
Pihak ketiga				Third parties
Listrik	1.150.666	232.732	1.383.398	Electricity
Penunjang pelabuhan laut	442.115	104.735	546.850	Seaport support
Minyak dan gas	427.154	4.056	431.210	Oil and gas
Lainnya	-	70.525	70.525	Others
	2.019.935	412.048	2.431.983	
	9.370.012	2.630.898	12.000.910	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Komitmen pinjaman diberikan

9. LOANS (continued)

Loan commitment

31 Desember/December 31, 2019				
	Komitmen yang sudah dicairkan/ Commitment - drawdown	Komitmen yang belum dicairkan/ Commitment - undrawdown	Total	
Rupiah - Pihak berelasi				Rupiah - Related parties
Pelabuhan udara	874.916	-	874.916	Airport
Telekomunikasi	448.083	-	448.083	Telecommunication
Jalan	413.293	936.207	1.349.500	Road
Listrik	153.125	-	153.125	Electricity
	1.889.417	936.207	2.825.624	
Rupiah - Pihak ketiga				Rupiah - Third parties
Utilitas air dan limbah	1.267.062	5.086	1.272.148	Water and waste utility
Jalan	612.734	839.017	1.451.751	Road
Telekomunikasi	200.000	-	200.000	Telecommunication
Penunjang pelabuhan laut	148.781	-	148.781	Seaport support
Listrik	573.246	576.463	1.149.709	Electricity
Minyak dan gas	138.137	32.763	170.900	Oil and gas
Infrastruktur sosial	-	250.000	250.000	Social Infrastructure
	2.939.960	1.703.329	4.643.289	
Dolar Amerika Serikat - Pihak berelasi				United States Dollar - Related parties
Pemeliharaan pesawat	461.710	-	461.710	Aircraft maintenance
Listrik	16.464	-	16.464	Electricity
	478.174	-	478.174	
Dolar Amerika Serikat - Pihak ketiga				United States Dollar - Third parties
Listrik	343.717	112.070	455.787	Electricity
Minyak dan gas	347.830	79.530	427.360	Oil and gas
Telekomunikasi	233.537	-	233.537	Telecommunication
Penunjang pelabuhan laut	195.274	362.045	557.319	Seaport support
	1.120.358	553.645	1.674.003	
	6.427.909	3.193.181	9.621.090	

Termasuk dalam total komitmen di atas adalah bunga dalam masa konstruksi ("IDC") sebesar Rp264.953 di tahun 2020 dan Rp376.605 di tahun 2019.

The total commitment above includes interest during construction ("IDC") amounting to Rp264,953 in 2020 and Rp376,605 in 2019.

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Saldo awal	9.621.090	8.374.040	Beginning balance
Penambahan selama tahun berjalan	3.810.338	2.860.484	Addition during the year
Penerimaan pembayaran pinjaman selama tahun berjalan	(803.540)	(832.155)	Loan repayment during the year
Pembatalan fasilitas selama tahun berjalan	(429.516)	(841.859)	Facility cancellation during the year
Efek selisih kurs	73.547	60.580	Foreign exchange effect
Saldo akhir	12.271.919	9.621.090	Ending balance

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PINJAMAN DIBERIKAN (lanjutan)

Komitmen pinjaman diberikan (lanjutan)

Pinjaman diberikan oleh Perusahaan memiliki tingkat bunga rata-rata di tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 9,12% dan 10,07% per tahun untuk pinjaman dalam Rupiah dan masing-masing 4,62% dan 5,71% per tahun untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat.

Pinjaman diberikan dapat dijamin dengan agunan berupa salah satu atau kombinasi dari aset tetap, saham, mesin atau peralatan, piutang, rekening bank, jaminan perusahaan atau personal dan jaminan lain yang relevan, serta pengikatan secara hak tanggungan, gadai atau fidusia. Pada beberapa debitur, pemberian pinjaman diberikan secara sindikasi atau *club deal* dengan melibatkan minimal dua kreditur. Dalam hal ini, agunan yang diterima dilakukan pengikatan secara *pari passu* sesuai proporsi nilai fasilitas yang diberikan.

9. LOANS (continued)

Loan commitment (continued)

The Company disbursed the loans at average interest rates in 2020 and 2019 of 9.12% and 10.07% per annum, respectively for Rupiah loans and of 4.62% and 5.71% per annum, respectively for United States Dollar loans.

Loans may be secured by collateral in the form of one or a combination of fixed assets, shares, machinery or equipment, accounts receivable, bank accounts, personal and corporate guarantees, or other relevant guarantees as well as a binding mortgage, lien or fiduciary. For some debtors, the loans are syndicated loans or club deal involving at least two creditors. In this case, the collateral received is binded in accordance with the portion of facility amount on *pari passu* basis.

10. PIUTANG BUNGA

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Efek-efek	85.622	59.362
Deposito berjangka	1.022	2.322
Transaksi derivatif	196	1.221
	86.840	62.905

Securities
Time deposits
Derivative transactions

10. ACCRUED INTEREST INCOME

11. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Lisensi	3.533	2.743
Program kepemilikan mobil	1.646	2.231
Asuransi	638	707
Bonus	517	757
Biaya rekrutmen	10	1.285
Lain-lain	636	870
	6.980	8.593

License
Car ownership program
Insurance
Sign on bonus
Recruitment fee
Others

11. PREPAID EXPENSES

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. ASET TETAP

	1 Januari/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 31, 2020
Harga perolehan				
Bangunan	281.843	-	-	281.843
Kendaraan	2.704	-	-	2.704
Komputer	4.196	-	-	4.196
Peralatan kantor	3.151	255	-	3.406
Perabotan dan peralatan kantor	39.027	13	-	39.040
Aset hak guna	1.295	-	-	1.295
Aset tetap dalam penyelesaian	-	2.380	-	2.380
	<u>332.216</u>	<u>2.648</u>	<u>-</u>	<u>334.864</u>
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	14.092	9.395	-	23.487
Kendaraan	2.669	35	-	2.704
Komputer	3.619	337	-	3.956
Peralatan kantor	2.263	574	-	2.837
Perabotan dan peralatan kantor	14.771	9.690	-	24.461
Aset hak guna	-	536	-	536
	<u>37.414</u>	<u>20.567</u>	<u>-</u>	<u>57.981</u>
Nilai tercatat neto	<u>294.802</u>			<u>276.883</u>

Cost
Building
Vehicles
Computer
Office equipment
Office furniture and fixtures
Right-of-use assets
Property and equipment
in progress

Accumulated depreciation
Building
Vehicles
Computer
Office equipment
Office furniture and fixtures
Right-of-use assets

Net carrying value

	1 Januari/ January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 31, 2019
Harga perolehan				
Bangunan	281.835	8	-	281.843
Kendaraan	2.704	-	-	2.704
Komputer	4.279	5	(88)	4.196
Peralatan kantor	3.151	31	(31)	3.151
Perabotan dan peralatan kantor	39.000	33	(6)	39.027
Aset tetap dalam penyelesaian	21	-	(21)	-
	<u>330.990</u>	<u>77</u>	<u>(146)</u>	<u>330.921</u>
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	4.697	9.395	-	14.092
Kendaraan	2.533	136	-	2.669
Komputer	3.056	563	-	3.619
Peralatan kantor	1.501	762	-	2.263
Perabotan dan peralatan kantor	5.090	9.681	-	14.771
	<u>16.877</u>	<u>20.537</u>	<u>-</u>	<u>37.414</u>
Nilai tercatat neto	<u>314.113</u>			<u>293.507</u>

Cost
Building
Vehicles
Computer
Office equipment
Office furniture and fixtures
Property and equipment
in progress

Accumulated depreciation
Building
Vehicles
Computer
Office equipment
Office furniture and fixtures

Net carrying value

Penyusutan aset tetap dicatat sebagai bagian dari beban umum dan administrasi (Catatan 25).

Depreciation of property and equipment is charged to general and administrative expense (Note 25).

Tidak terdapat penjualan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

There is no sale of property and equipment for the years ended December 31, 2020 and 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp8.223 (2019: Rp5.822).

As of December 31, 2020, the gross amount of property and equipment which have been fully depreciated and still being used amounting to Rp8,223 (2019: Rp5,822).

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset tetap telah diasuransikan kepada PT Asuransi Central Asia dan PT Asuransi Sinar Mas, yang merupakan pihak ketiga, terhadap risiko kerugian dan kehilangan dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp332.973 (2019: Rp333.527). Manajemen berpendapat bahwa perlindungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelaahan penurunan nilai atas aset tetap, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat terpulihkan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Di bawah ini adalah jumlah tercatat liabilitas sewa (termasuk dalam "Utang lain-lain" pada Catatan 15) dan mutasi selama tahun berjalan:

Liabilitas sewa

	31 Desember/ December 31, 2020
Saldo 1 Januari 2020	1.295
Mutasi selama tahun berjalan	(536)
Beban bunga	76
Saldo 31 Desember 2020	<u>835</u>

12. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

As of December 31, 2020, property and equipment were insured with PT Asuransi Central Asia and PT Asuransi Sinar Mas, which are third parties, against damage and loss risks with sum insured of Rp332,973 (2019: Rp333,527). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the insured assets.

Based on the assessment for impairment of the property and equipment, the Company's management believes that there are no events or changes in circumstances, which may indicate that the carrying amounts of these assets are not recoverable as of December 31, 2020 and 2019.

Set out below is the carrying amounts of lease liabilities (included under "Other payables" in Note 15) and the movement during the current year:

Lease liabilities

Balance as of January 1, 2020
Movement during the year
Interest expense
Balance as of December 31, 2020

13. BEBAN TANGGUHAN

Beban tangguhan merupakan biaya transaksi yang dibayarkan kepada pihak ketiga berkaitan dengan proses pemberian kredit kepada nasabah dan proses pinjaman diterima oleh Perusahaan. Biaya transaksi akan disajikan sebagai bagian dari pinjaman diberikan atau pinjaman diterima dan kemudian diamortisasi ketika pinjaman diberikan tersebut telah disalurkan kepada debitur atau pinjaman diterima telah ditarik oleh Perusahaan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berpendapat bahwa beban tangguhan dapat direalisasi pada kegiatan bisnis normal.

13. DEFERRED CHARGES

Deferred charges represent transaction costs paid to third parties in relation to the processing of the loan to the customers and the processing of the fund borrowings. The transaction cost will be presented as part of the loan or fund borrowings and amortized when the loan is disbursed to the debtors or the fund borrowings have been drawn by the Company.

As of December 31, 2020 and 2019, management believes that the deferred charges are realizable in the ordinary course of business.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET LAIN-LAIN

14. OTHER ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Piutang lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar RpNil tahun 2020 dan Rp13.056 tahun 2019	9.228	12.470	Other receivables - net of allowance for impairment losses of RpNil in 2020 and Rp13,056 in 2019
Perangkat lunak komputer	8.674	13.885	Computer softwares
Uang muka	247	267	Advances
	18.149	26.622	

Termasuk di dalam piutang lain-lain adalah piutang
atas pendapatan komitmen terkait pinjaman yang
diberikan yang belum ditarik dan piutang
pendapatan advisory.

Included in other receivables are commitment income
receivables related to undrawn loan facilities and
advisory income receivables.

Perangkat lunak komputer

Computer softwares

31 Desember/December 31, 2020			
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan	42.474	1.675	44.149
Akumulasi amortisasi	28.589	6.886	35.475
Nilai buku neto	13.885		8.674
			Cost Accumulated amortization Net book value
31 Desember/December 31, 2019			
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan	41.857	617	42.474
Akumulasi amortisasi	21.853	6.736	28.589
Nilai buku neto	20.004		13.885
			Cost Accumulated amortization Net book value

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian
penurunan nilai atas aset lain-lain telah memadai.

Management believes that the allowance for
impairment losses on other assets is adequate.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. UTANG LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Pihak berelasi		
Remunerasi	-	81
Pihak ketiga		
Utang bunga atas transaksi derivatif	1.505	1.396
Jasa profesional	1.504	4.141
Utang sewa	835	-
Lain-lain	2.053	3.110
	5.897	8.728

*Related parties
Remuneration*

*Third parties
Interest payable from derivative
transaction
Professional services
Lease liabilities
Others*

**16. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR DAN
LIABILITAS LAIN-LAIN**

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Pihak berelasi		
Bonus	27.250	13.477
Beban komitmen	1.930	1.741
Cadangan tunjangan	1.511	1.803
	30.691	17.021
Pihak ketiga		
Beban jasa profesional	27.967	12.361
Pengembangan sistem	5.048	832
Lain-lain	8.703	7.771
	41.718	20.964
	72.409	37.985

*Related parties
Bonus
Commitment fees
Benefits provision*

*Third parties
Professional fee expense
System development
Others*

Beban komitmen kepada pihak berelasi merupakan beban komitmen atas pinjaman yang belum dicairkan oleh Perusahaan, yang diberikan oleh Asian Development Bank dan World Bank menggunakan mekanisme Pinjaman Subordinasi melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (Catatan 20 dan 30).

Commitment expenses to related parties represent commitment fees in relation to the undrawn borrowings by the Company, which provided by the Asian Development Bank and World Bank in form of Subordinated Loan through PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (Notes 20 and 30).

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SURAT UTANG YANG DITERBITKAN

17. DEBT SECURITIES ISSUED

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016:			Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016:
Seri B			B Series
Pihak ketiga	172.000	172.000	Third parties
Pihak berelasi	78.000	78.000	Related party
Seri C			C Series
Pihak ketiga	275.000	275.000	Third parties
Pihak berelasi	150.000	150.000	Related parties
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019:			Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase I Year 2019:
Seri A			A Series
Pihak ketiga	-	911.000	Third parties
Pihak berelasi	-	54.000	Related parties
Seri B			B Series
Pihak ketiga	342.000	342.000	Third parties
Pihak berelasi	30.000	30.000	Related party
Seri C			C Series
Pihak ketiga	163.000	163.000	Third parties
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020:			Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase II Year 2020:
Seri A			A Series
Pihak ketiga	570.000	-	Third parties
Seri B			B Series
Pihak ketiga	790.000	-	Third parties
Pihak berelasi	20.000	-	Related party
Seri C			C Series
Pihak ketiga	120.000	-	Third parties
	2.710.000	2.175.000	
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Beban bunga masih harus dibayar	31.132	15.858	Accrued interest expenses
Biaya penerbitan belum diamortisasi	(5.899)	(7.794)	Unamortized issuance costs
	2.735.233	2.183.064	

Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016

Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-336/D.04/2016 untuk melakukan penawaran umum Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016.

On June 29, 2016, the Company obtained effectivity statement from Financial Services Authority through its letter No. S-336/D.04/2016 to conduct public offering on Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016.

Pada tanggal 19 Juli 2016, Perusahaan telah menerima dana hasil penerbitan obligasi tersebut sebesar Rp1.500.000 yang terdiri dari:

On July 19, 2016, the Company received the funds from the bond's issuance totaling Rp1,500,000 which consists of:

- Seri A sebesar Rp825.000 dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun untuk tenor 3 tahun;

- Series A amounting to Rp825,000 with a fixed interest rate of 8.25% per annum and tenor of 3 years;

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SURAT UTANG YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 (lanjutan)

- Seri B sebesar Rp250.000 dengan tingkat bunga tetap 8,70% per tahun untuk tenor 5 tahun; dan
- Seri C sebesar Rp425.000 dengan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun untuk tenor 7 tahun.

Perusahaan telah melakukan pelunasan atas Pinjaman Seri A sesuai jatuh temponya pada tanggal 19 Juli 2019.

Obligasi Seri B dan Seri C akan dibayarkan penuh masing-masing pada tanggal 19 Juli 2021 dan 19 Juli 2023. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan.

Wali amanat dari penerbitan Obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 peringkat Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 menurut Pefindo dan Fitch Rating Indonesia adalah idAAA.

Perjanjian obligasi mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai larangan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penggabungan dan atau peleburan usaha, utang baru yang memiliki hak tagih lebih tinggi dari obligasi yang diterbitkan, dan pinjaman selain pinjaman kepada pegawai dan pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari Perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 13 Desember 2019, Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-198/D.04/2019 untuk melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019.

17. DEBT SECURITIES ISSUED (continued)

Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016 (continued)

- Series B amounting to Rp250,000 with a fixed interest rate of 8.70% per annum and tenor of 5 years; and
- Series C amounting to Rp425,000 with a fixed interest rate of 9.00% per annum and tenor of 7 years.

The Company has fully repaid Series A Bond on its maturity date on July 19, 2019.

The Series B and Series C Bond shall be fully repaid on July 19, 2021 and July 19, 2023, respectively. Interest is paid quarterly.

The trustee for the bond issuance is PT Bank Mega Tbk.

As of December 31, 2020 and 2019, the Indonesia Infrastructure Finance Bond I Year 2016 is rated idAAA by Pefindo and Fitch Rating Indonesia.

The bond agreement includes several covenants, among others, the prohibition of reduction of authorized capital, issued and paid-up capital, merger, related party transactions, new loans with higher right to claim more than bonds issued, and borrowing other than borrowing to employees and borrowing granted in order to carry out the daily business activities of the Company.

For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Trustee Agreements.

Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase I Year 2019

On December 13, 2019, the Company obtained effectivity statement from the Financial Services Authority through its letter No. S-198/D.04/2019 to conduct public offering on Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase I Year 2019.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SURAT UTANG YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 (lanjutan)

Pada tanggal 18 Desember 2019, Perusahaan telah menerima dana hasil penerbitan obligasi tersebut sebesar Rp1.500.000 yang terdiri dari:

- Seri A sebesar Rp965.000 dengan tingkat bunga tetap 6,75% per tahun untuk tenor 370 hari;
- Seri B sebesar Rp372.000 dengan tingkat bunga tetap 7,75% per tahun untuk tenor 3 tahun; dan
- Seri C sebesar Rp163.000 dengan tingkat bunga tetap 7,90% per tahun untuk tenor 5 tahun.

Obligasi Seri B dan Seri C akan dibayarkan penuh masing-masing pada tanggal 18 Desember 2022 dan 18 Desember 2024. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan.

Perusahaan telah melakukan pelunasan atas Obligasi Seri A sesuai jatuh temponya pada tanggal 28 Desember 2020.

Wali amanat dari penerbitan Obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 menurut Pefindo adalah idAAA.

Perjanjian obligasi mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai larangan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penggabungan dan atau peleburan usaha, utang baru yang memiliki hak tagih lebih tinggi dari obligasi yang diterbitkan, dan pinjaman selain pinjaman kepada pegawai dan pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari Perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

17. DEBT SECURITIES ISSUED (continued)

Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase I Year 2019 (continued)

On December 18, 2019, the Company received the funds from the bond's issuance totaling Rp1,500,000 which consists of:

- Series A amounting to Rp965,000 with a fixed interest rate of 6.75% per annum and tenor of 370 days;
- Series B amounting to Rp372,000 with a fixed interest rate of 7.75% per annum and tenor of 3 years; and
- Series C amounting to Rp163,000 with a fixed interest rate of 7.90% per annum and tenor of 5 years.

The Series B and Series C Bonds shall be fully repaid on December 18, 2022 and December 18, 2024, respectively. Interest is paid quarterly.

The Company has fully repaid Series A Bond on its maturity date on December 28, 2020.

The trustee for the bond issuance is PT Bank Mega Tbk.

As of December 31, 2020 and 2019, the Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase I Year 2019 is rated idAAA by Pefindo.

The bond agreement includes several covenants, among others, the prohibition of reduction of authorized capital, issued and paid-up capital, merger, related party transactions, new loans with higher right to claim more than bonds issued, and borrowing other than borrowing to employees and borrowing granted in order to carry out the daily business activities of the Company.

For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Trustee Agreements.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SURAT UTANG YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020

Pada bulan Oktober 2020, Perusahaan telah melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, Perusahaan telah menerima dana hasil penerbitan obligasi tersebut sebesar Rp1.500.000 yang terdiri dari:

- Seri A sebesar Rp570.000 dengan tingkat bunga tetap 5,00% per tahun untuk tenor 367 hari;
- Seri B sebesar Rp810.000 dengan tingkat bunga tetap 6,65% per tahun untuk tenor 3 tahun; dan
- Seri C sebesar Rp120.000 dengan tingkat bunga tetap 6,90% per tahun untuk tenor 5 tahun.

Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C akan dibayarkan penuh masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2021, 21 Oktober 2023 dan 21 Oktober 2025. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan.

Wali amanat dari penerbitan Obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2020, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 menurut Pefindo adalah idAAA.

Perjanjian obligasi mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai larangan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penggabungan dan atau peleburan usaha, utang baru yang memiliki hak tagih lebih tinggi dari obligasi yang diterbitkan, dan pinjaman selain pinjaman kepada pegawai dan pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari Perusahaan.

Surat Utang Jangka Menengah

Pada tanggal 24 Oktober 2018, Perusahaan menerbitkan *Medium Term Notes* ("MTN") Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2018 sebesar Rp200.000 dengan tenor 370 hari. MTN ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 8,35% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2018, peringkat MTN Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2018 menurut Fitch Rating Indonesia adalah idAAA.

17. DEBT SECURITIES ISSUED (continued)

Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase II Year 2020

In October 2020, the Company conducted public offering on Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase II Year 2020.

On October 21, 2020, the Company received the funds from the bond's issuance totaling Rp1,500,000 which consists of:

- Series A amounting to Rp570,000 with a fixed interest rate of 5.00% per annum and tenor of 367 days;
- Series B amounting to Rp810,000 with a fixed interest rate of 6.65% per annum and tenor of 3 years; and
- Series C amounting to Rp120,000 with a fixed interest rate of 6.90% per annum and tenor of 5 years.

The Series A, Series B and Series C Bonds shall be fully repaid on October 28, 2021, October 21, 2023 and October 21, 2025, respectively. Interest is paid quarterly.

The trustee for the bond issuance is PT Bank Mega Tbk.

As of December 31, 2020, the Indonesia Infrastructure Finance Shelf Registration Bond I Phase II Year 2020 is rated idAAA by Pefindo.

The bond agreement includes several covenants, among others, the prohibition of reduction of authorized capital, issued and paid-up capital, merger, related party transactions, new loans with higher right to claim more than bonds issued, and borrowing other than borrowing to employees and borrowing granted in order to carry out the daily business activities of the Company.

Medium Term Notes

On October 24, 2018, the Company issued an Indonesia Infrastructure Finance Medium Term Notes ("MTN") Year 2018 amounting to Rp200,000 with tenor of 370 days. The MTN has a fixed interest rate of 8.35% per annum.

As of December 31, 2018, the Indonesia Infrastructure Finance MTN Year 2018 is rated idAAA by Fitch Rating Indonesia.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SURAT UTANG YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Surat Utang Jangka Menengah (lanjutan)

Dalam perjanjian MTN, Perusahaan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan keuangan. Persyaratan keuangan yang harus dipatuhi Perusahaan diantaranya adalah pemenuhan rasio Utang terhadap Modal sebesar maksimum 10 kali, dan rasio Aset lancar terhadap Kewajiban lancar tidak kurang dari 100%.

Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam perjanjian.

Perusahaan telah melakukan pelunasan MTN sesuai jatuh temponya pada tanggal 10 November 2019.

17. DEBT SECURITIES ISSUED (continued)

Medium Term Notes (continued)

Under the MTN agreement, the Company is obliged to fulfill certain financial covenants. The financial covenants that must be fulfilled by the Company, among others is to fulfill the maximum debt to equity ratio of 10 times and the minimum current ratio of 100%.

The Company has fulfilled all covenants and obligations according to the agreement.

The Company has fully repaid MTN on its maturity date on November 10, 2019.

18. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan diterima dimuka merupakan provisi yang diterima terkait pinjaman diberikan yang dananya belum ditarik oleh debitur. Pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan diterima dimuka adalah sebesar Rp8.106 (2019: Rp4.388).

18. UNEARNED REVENUE

Deferred income represents provision received related to loan receivables which have not been drawdown yet by the debtors. As of December 31, 2020, total unearned revenue amounting to Rp8,106 (2019: Rp4,388).

19. PINJAMAN DITERIMA

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.500.000	3.350.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.500.000	-
PT Bank Permata Tbk	1.000.000	-
Dolar Amerika Serikat		
International Finance Corporation (USD100.000.000 pada tahun 2020 dan 2019)	1.410.501	1.390.101
	5.410.501	4.740.101
Ditambah/(dikurangi):		
Beban bunga masih harus dibayar	5.768	7.874
Biaya transaksi belum diamortisasi	(37.476)	(34.230)
	5.378.793	4.713.745

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk II

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah sebesar Rp1.500.000 (Catatan 30 dan 32).

19. FUND BORROWINGS

Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk
United States Dollar
International Finance Corporation
(USD100,000,000 in 2020 and 2019)
Add/(less):
Accrued interest expenses
Unamortized transaction costs

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk II

The Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp1,500,000 (Notes 30 and 32).

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PINJAMAN DITERIMA (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk II (lanjutan)

Pinjaman ini memiliki suku bunga sebesar JIBOR 1 bulan + 1,44% per tahun dengan tenor 3 tahun dan akan dibayarkan penuh pada tanggal 30 Mei 2020. Bunga dibayarkan setiap bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp1.500.000.

Pada tanggal 23 Februari 2020, Perusahaan melakukan percepatan pelunasan atas pokok pinjaman sebesar Rp1.000.000.

Pada tanggal 23 Mei 2020, Perusahaan melakukan pelunasan atas sisa pokok pinjaman sebesar Rp500.000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah sebesar Rp3.000.000 dan USD100.000.000 yang terdiri dari pinjaman transaksi khusus sebesar Rp2.500.000, kredit jangka pendek Rp500.000 dan *treasury line* sebesar USD100.000.000 (Catatan 30 dan 32).

Pinjaman transaksi khusus memiliki suku bunga sebesar JIBOR 1 bulan + 1,59% per tahun dengan tenor 3 tahun dan akan dibayarkan penuh pada tanggal 26 Oktober 2021. Bunga dibayarkan setiap bulan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah mencairkan fasilitas pinjaman transaksi khusus masing-masing sebesar Rp2.500.000 dan Rp1.850.000.

Pada tanggal 30 November 2020, Perusahaan melakukan percepatan pelunasan atas pokok pinjaman sebesar Rp1.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah mencairkan fasilitas kredit jangka pendek sebesar Rp500.000, yang kemudian telah dilunasi pada tanggal 11 April 2019.

Tidak ada jaminan untuk fasilitas-fasilitas pinjaman diberikan ini.

Dalam perjanjian pinjaman Bank Mandiri II dan III tersebut, Perusahaan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan keuangan dan persyaratan negatif (*negative covenants*).

19. FUND BORROWINGS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk II (continued)

This loan has an interest rate of 1-month JIBOR + 1.44% per annum with tenor of 3 years and a bullet repayment on May 30, 2020. Interest is payable monthly.

As of December 31, 2019, the Company had drawdown the loan facility amounting to Rp1,500,000.

On February 23, 2020, the Company early repaid the principal of the loan amounting to Rp1,000,000.

On May 23, 2020, the Company repaid the remaining principal of the loan amounting to Rp500,000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III

The Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp3,000,000 and USD100,000,000 which consists of special transaction loans amounting to Rp2,500,000, short term credit amounting to Rp500,000 and treasury lines amounting to USD100,000,000 (Notes 30 and 32).

Special transaction loan has an interest rate of 1-month JIBOR + 1.59% per annum with tenor of 3 years and a bullet repayment on October 26, 2021. Interest is payable monthly.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company had drawdown the special transaction loan facility amounting to Rp2,500,000 and Rp1,850,000, respectively.

On November 30, 2020, the Company early repaid the whole principal of the loan amounting to Rp1,000,000.

As of December 31, 2018, the Company had drawdown the short term credit facility amounting to Rp500,000, and the Company had fully repaid the short term credit facility on April 11, 2019.

The fund borrowings are unsecured.

Under Bank Mandiri II and III loan agreements, the Company is obliged to fulfill certain financial covenants and negative covenants.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. PINJAMAN DITERIMA (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III (lanjutan)

Persyaratan keuangan yang harus dipatuhi Perusahaan diantaranya adalah pemenuhan rasio *leverage* sebesar maksimum 5 kali.

Persyaratan negatif mencakup keharusan untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melakukan transaksi tertentu diluar kegiatan usaha normal Perusahaan dan pembatasan tertentu untuk melakukan transaksi tertentu jika Perusahaan melanggar persyaratan keuangan.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman.

PT Bank Permata Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari PT Bank Permata Tbk dengan jumlah sebesar Rp1.500.000 dan USD1.000.000 yang terdiri dari Perjanjian *Term Loan* sebesar Rp1.000.000, Perjanjian *Money Market* sebesar Rp500.000 dan Perjanjian Transaksi Valuta Asing sebesar USD1.000.000 (Catatan 32). Tidak ada jaminan untuk fasilitas-fasilitas pinjaman diberikan ini.

Dalam perjanjian pinjaman PT Bank Permata Tbk, Perusahaan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan negatif (*negative covenants*) mencakup keharusan untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank Permata Tbk untuk:

- membayar sebagian atau seluruh utang kepada pemegang saham; dan
- mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari.

Pada tanggal 30 September 2020, Perusahaan telah mencairkan fasilitas *Money Market* tersebut sebesar Rp75.000 dan telah dilunasi seluruhnya pada 3 November 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas *Term Loan* tersebut sebesar Rp1.000.000.

19. FUND BORROWINGS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III (continued)

The financial covenants that must be fulfilled by the Company, among others is to fulfill the maximum leverage ratio of 5 times.

The negative covenants include requirement to obtain consent from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to conduct certain transaction outside of the ordinary business activity of the Company and certain restriction to conduct certain transaction when the Company is in breach of financial covenant.

During the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Loan Agreements.

PT Bank Permata Tbk

The Company obtained loan facility from PT Bank Permata Tbk amounting to Rp1,500,000 and USD1,000,000 which consists of Term Loan Agreement amounting to Rp1,000,000, Money Market Agreement amounting to Rp500,000 and Foreign Exchange Transaction Agreement amounting to USD1,000,000 (Note 32). The fund borrowings are unsecured.

Under PT Bank Permata Tbk loan agreements, the Company is obliged to fulfill certain negative covenants include requirement to obtain consent from PT Bank Permata Tbk to:

- pay in part or full payable to shareholders; and
- changing the nature and current business activities or conduct certain transaction outside of the ordinary business activity.

As of September 30, 2020, the Company had drawdown the Money Market Facility amounting to Rp75,000 and fully repaid on November 3, 2020.

As of December 31, 2020, the Company had drawdown the Term Loan Facility amounting to Rp1,000,000.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. PINJAMAN DITERIMA (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk (lanjutan)

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan jumlah sebesar Rp1.750.000 dan USD1.000.000 yang terdiri dari Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka sebesar Rp500.000, Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka II sebesar Rp1.000.000, Fasilitas Kredit Berjangka sebesar Rp250.000 dan Fasilitas *Pre-Settlement Exposure* (Catatan 32).

Tidak ada jaminan untuk fasilitas-fasilitas pinjaman diberikan ini.

Pada tanggal 24 September 2020, Perusahaan telah mencairkan fasilitas kredit berjangka tersebut sebesar Rp60.000 dan telah dilunasi seluruhnya pada 24 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas Kredit Angsuran Berjangka dan Kredit Angsuran Berjangka II tersebut sebesar Rp1.500.000.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman.

International Finance Corporation

International Finance Corporation III

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman diterima dari International Finance Corporation dengan jumlah sebesar USD150.000.000 yang terdiri dari Pinjaman A sebesar USD50.000.000, Pinjaman B1 sebesar USD50.000.000 dan Pinjaman B2 sebesar USD50.000.000 (Catatan 30 dan 32).

Pinjaman A memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,75% per tahun dengan tenor 7 tahun dan dibayarkan penuh 7 tahun setelah tanggal penarikan pertama. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember.

19. FUND BORROWINGS (continued)

PT Bank Permata Tbk (continued)

During the year ended December 31, 2020, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Loan Agreements.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

The Company obtained loan facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk amounting to Rp1,750,000 and USD1,000,000 which consists of Term Installment Credit amounting to Rp500,000, Term Installment Credit II amounting to Rp1,000,000, Term Credit Facility amounting to Rp250,000 and Pre-Settlement Exposure Facility amounting to USD1,000,000 (Note 32).

The fund borrowings are unsecured.

As of September 24, 2020, the Company had drawdown the Term Credit Facility amounting to Rp60,000 and fully repaid on December 24, 2020.

As of December 31, 2020, the Company had drawdown the Term Installment Credit and Term Installment Credit II Facility amounting to Rp1,500,000.

During the year ended December 31, 2020, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Loan Agreements.

International Finance Corporation

International Finance Corporation III

The Company obtained loan facilities from International Finance Corporation amounting to USD150,000,000 which consists of A Loans amounting to USD50,000,000, B1 Loans amounting to USD50,000,000 and B2 Loans amounting to USD50,000,000 (Notes 30 and 32).

A loan has an interest rate of 3-month LIBOR + 1.75% per annum with tenor of 7 years and a bullet repayment 7 years after the date of the first drawdown. Interest is payable quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PINJAMAN DITERIMA (lanjutan)

International Finance Corporation (lanjutan)

International Finance Corporation III (lanjutan)

Pinjaman B1 memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,00% per tahun dengan tenor 3 tahun dan dibayarkan penuh 3 tahun setelah tanggal penarikan pertama. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember.

Pinjaman B2 memiliki suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,20% per tahun dengan tenor 5 tahun dan dibayarkan penuh 5 tahun setelah tanggal penarikan pertama. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September dan 15 Desember.

Pada tanggal 14 Maret 2019, Perusahaan telah melakukan pembatalan pinjaman B1 dari International Finance Corporation III sebesar USD50.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah menarik seluruh pokok pinjaman dari Fasilitas A dan B2 masing-masing sebesar USD50.000.000.

Tidak ada jaminan untuk fasilitas-fasilitas pinjaman diberikan ini.

Dalam perjanjian pinjaman IFC III tersebut, Perusahaan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan afirmatif, persyaratan keuangan serta persyaratan negatif (*negative covenants*).

Persyaratan keuangan yang harus dipatuhi Perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi/Description	Limit
a.	Rasio kecukupan modal tertimbang/Risk weighted capital adequacy ratio	12%
b.	Rasio hutang terhadap total kapitalisasi/Debt to total capitalization ratio	<=3:1
c.	Rasio lancar/Current ratio	>1.2:1

- a) Rasio Kecukupan Modal Tertimbang adalah hasil yang diperoleh dengan membagi; (i) Jumlah Modal; oleh (ii) Aset Tertimbang Menurut Risiko.
- b) Rasio Hutang terhadap Total Kapitalisasi adalah hasil yang diperoleh dengan membagi; (i) Total Hutang ditambah jumlah total pinjaman subordinasi yang dijadwalkan untuk dilunasi atau jatuh tempo atau dapat diminta sebelum Tanggal Pembayaran Kembali terakhir; dengan (ii) Ekuitas Pemegang Saham ditambah setiap Pinjaman Subordinasi yang dijadwalkan untuk dilunasi atau jatuh tempo atau dapat diminta setelah Tanggal Pembayaran Kembali terakhir.
- c) Rasio Lancar adalah hasil yang diperoleh dengan membagi; (i) Aset Lancar (dikurangi biaya dibayar dimuka); oleh (ii) Kewajiban Lancar.

19. FUND BORROWINGS (continued)

International Finance Corporation (continued)

International Finance Corporation III (continued)

B1 loan has an interest rate of 3-month LIBOR + 1.00% per annum with tenor of 3 years and a bullet repayment 3 years after the date of the first drawdown. Interest is payable quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15.

B2 loan has an interest rate of 3-month LIBOR + 1.20% per annum with tenor of 5 years and a bullet repayment 5 years after the date of the first drawdown. Interest is payable quarterly on March 15, June 15, September 15 and December 15.

On March 14, 2019, the Company canceled the B1 loan from International Finance Corporation III amounting to USD50,000,000.

On December 31, 2019, the Company has fully drawdown all principal from the loan facilities A and B2 amounting to USD50,000,000, respectively.

The fund borrowings are unsecured.

Under IFC III loan agreements, the Company is obliged to fulfill certain affirmative, financial and negative covenants.

The financial covenants that must be fulfilled by the Company, among others, are as follows:

- a) Risk Weighted Capital Adequacy Ratio means the result obtained by dividing; (i) Total Capital; by (ii) Risk Weighted Assets.
- b) Debt to Total Capitalization Ratio means the result obtained by dividing; (i) Total Debt raised plus the total amount of any subordinated loans scheduled to be repaid or maturing or capable of being put on demand prior to the last Repayment Date; by (ii) Shareholders' Equity plus any Subordinated Loans scheduled to be repaid or maturing or capable of being put on demand after the last Repayment Date.
- c) Current Ratio means the result obtained by dividing; (i) Current Assets (less prepaid expenses); by (ii) Current Liabilities.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PINJAMAN DITERIMA (lanjutan)

International Finance Corporation (lanjutan)

International Finance Corporation III (lanjutan)

Persyaratan negatif mencakup keharusan untuk memperoleh persetujuan dari International Finance Corporation untuk melakukan transaksi tertentu seperti pembagian dividen, menyediakan program insentif jangka panjang untuk karyawan, memperoleh utang keuangan berdasarkan kondisi tertentu, dan lain-lain.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman.

19. FUND BORROWING (continued)

International Finance Corporation (continued)

International Finance Corporation III (continued)

The negative covenants include requirement to obtain consent from International Finance Corporation for certain transactions such as distribution of dividend, providing long term incentive plan to employees, incur financial debts under certain conditions, etc.

During the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Loan Agreements.

20. PINJAMAN SUBORDINASI

20. SUBORDINATED LOANS

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Asian Development Bank (USD84.929.485 pada 2020 dan USD87.818.113 pada 2019)	1.197.931	1.220.760	Asian Development Bank (USD84,929,485 in 2020 and USD87,818,113 in 2019)
World Bank (USD88.483.692 dan Rp1.680.000 pada 2020 dan USD93.218.004 dan Rp600.000 pada 2019)	2.928.063	1.895.824	World Bank (USD88,483,692 and Rp1,680,000 in 2020 and USD93,218,004 and Rp600,000 in 2019)
	4.125.994	3.116.584	
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Beban bunga masih harus dibayar	44.756	40.523	Accrued interest expenses
Biaya transaksi belum diamortisasi	(13.428)	(14.189)	Unamortized transaction costs
	4.157.322	3.142.918	

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman subordinasi dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") yang merupakan fasilitas pinjaman penerusan dengan jumlah masing-masing sebesar USD100.000.000 dari Asian Development Bank ("ADB") dan USD300.000.000 dari World Bank ("WB") (Catatan 30 dan 32).

Perusahaan menggunakan fasilitas ini untuk memperkuat struktur modal Perusahaan, serta untuk memberikan pendanaan jangka panjang bagi Perusahaan agar dapat memberikan pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang tanpa mengakibatkan ketidaksesuaian tenor antara aset dan liabilitas.

The Company obtained subordinated loan facilities from PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") which represents channeling facilities amounting to USD100,000,000 from Asian Development Bank ("ADB") and USD300,000,000 from World Bank ("WB") (Notes 30 and 32).

The Company used this facility to strengthen its capital structure and to provide long-term funding to enable long-term financing without creating mismatch between asset and liability tenors.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

Rincian penarikan atas fasilitas pinjaman subordinasi dari ADB adalah sebagai berikut:

	Tanggal/Date	Total/Amount	
		USD	
Penarikan 1	13 Desember/December 13, 2012	71.134.021	1 st drawdown
Penarikan 2	13 November/November 13, 2013	16.732.954	2 nd drawdown
Penarikan 3	19 November/November 19, 2013	337.886	3 rd drawdown
Penarikan 4	6 Desember/December 6, 2013	6.400.000	4 th drawdown
Penarikan 5	25 November/November 25, 2014	4.877.000	5 th drawdown
		99.481.861	

Rincian penarikan atas fasilitas pinjaman subordinasi dari WB adalah sebagai berikut:

	Tanggal/Date	Total/Amount	
		USD	
Penarikan 1 - WB I	21 Desember/December 21, 2012	10.000.000	WB I - 1 st drawdown
Penarikan 2 - WB I	12 Juli/July 12, 2013	40.000.000	WB I - 2 nd drawdown
Penarikan 3 - WB I	3 Desember/December 3, 2013	22.000.000	WB I - 3 rd drawdown
Penarikan 4 - WB I	23 April/April 23, 2014	20.000.000	WB I - 4 th drawdown
Penarikan 5 - WB I	25 September/September 25, 2014	5.180.000	WB I - 5 th drawdown
Penarikan 6 - WB I	23 Juli/July 23, 2015	2.700.000	WB I - 6 th drawdown
		99.880.000	
	Tanggal/Date	Total/Amount	
		IDR	
Penarikan 1 - WB II	26 Desember/December 26, 2018	300.000	WB II - 1 st drawdown
Penarikan 2 - WB II	17 Mei/May 17, 2019	300.000	WB II - 2 nd drawdown
Penarikan 3 - WB II	5 Mei/May 5, 2020	500.000	WB II - 3 rd drawdown
Penarikan 4 - WB II	8 Desember/December 8, 2020	580.000	WB II - 4 th drawdown
		1.680.000	

Periode penarikan fasilitas pinjaman subordinasi dari WB I dan ADB telah diperpanjang dari sebelumnya tanggal 31 Desember 2013 menjadi masing-masing 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2014. Oleh karena fasilitas pinjaman subordinasi dari WB I dan ADB telah berakhir, Perusahaan tidak akan melakukan penarikan sisa fasilitas pinjaman yang belum ditarik masing-masing sebesar USD120.000 dan USD518.139.

SMI - Asian Development Bank

Fasilitas pinjaman subordinasi dari SMI yang merupakan pinjaman penerusan dari ADB memiliki tingkat bunga LIBOR 6 bulan + 1,45% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dilakukan pada tanggal 1 September 2014 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2034.

20. SUBORDINATED LOANS (continued)

Details of drawdown of subordinated loan facilities from ADB are as follows:

Details of drawdown of subordinated loan facilities from WB are as follows:

The availability period of the subordinated loans from WB I and ADB has been extended to March 31, 2017 and December 31, 2014, respectively, from the original expiry date of December 31, 2013. As the availability period of the subordinated loan from WB I and ADB expired, the Company did not utilize the undrawn facilities amounting to USD120,000 and USD518,139, respectively.

SMI - Asian Development Bank

The subordinated loan facility from SMI, which represents the channeling from ADB, bears an interest rate of LIBOR 6-month + 1.45% per annum payable semiannually on March 1 and September 1. The first repayment installment of the loan's principal commenced on September 1, 2014 and will mature on March 1, 2034.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

SMI - World Bank I

Fasilitas pinjaman subordinasi dari SMI sebesar USD100.000.000 merupakan pinjaman penerusan dari WB yang memiliki tingkat bunga LIBOR 6 bulan + 1,52% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Mei dan 1 November. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dilakukan pada tanggal 1 November 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 November 2033.

SMI - World Bank II

Pada tanggal 26 September 2017, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi yang merupakan pinjaman penerusan II dari WB dengan nilai sebesar USD200.000.000. Pinjaman ini dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dengan total fasilitas ekuivalen sampai dengan USD200.000.000. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2036 dan memiliki batas waktu penarikan (*closing date*) sampai tanggal 28 Februari 2022.

Pinjaman subordinasi ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari SMI, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut, diantaranya:

- i. Menjamin atau bertanggung jawab atas kewajiban utang, baik kontingen atau dengan cara lain kecuali merupakan bagian dari kegiatan usaha normal Perusahaan dan tetap memenuhi persyaratan rasio *leverage* yang ditetapkan.
- ii. Mengubah tahun fiskal.
- iii. Melakukan penggabungan, pemisahan (*spin off*), konsolidasi atau reorganisasi.
- iv. Membayar kembali atau membayar dimuka, membeli, menebus, mengganti atau melepaskan diri dari kewajiban utang apapun selain sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit.
- v. Melakukan tindakan yang akan menyebabkan *money laundering* (pencucian uang) dan *financing of terrorism* (pembiayaan terorisme), penipuan, atau tindakan korupsi dan praktek ilegal lainnya.
- vi. Menimbulkan utang subordinasi apapun, jika setelah timbulnya utang subordinasi tersebut rasio utang subordinasi terhadap ekuitas akan lebih besar dari 5 berbanding 1.

Tidak ada jaminan untuk fasilitas-fasilitas pinjaman subordinasi ini.

20. SUBORDINATED LOANS (continued)

SMI - World Bank I

The subordinated loan facility from SMI of USD100,000,000 represents the channeling loan from WB which bears an interest rate of LIBOR 6-month + 1.52% per annum payable semiannually on May 1 and November 1. The first repayment installment of the loan's principal commenced on November 1, 2018 and will mature on November 1, 2033.

SMI - World Bank II

On September 26, 2017, the Company and SMI had signed a Subordinated Loan Agreement which represents the channeling loan II from WB of USD200,000,000. The loan will be drawn in Rupiah currency with a total facility amount in the equivalent of up to USD200,000,000. The loan will mature on October 1, 2036 and has a closing date until February 28, 2022.

The purpose of the subordinated loan is to finance infrastructure projects in Indonesia.

Unless prior written consent of SMI is obtained, the Company is not allowed to carry-out the following, among others:

- i. Guarantee or become liable with respect to any indebtedness, whether contingent or otherwise, unless it is in the ordinary course of the Company's business and in compliance with the leverage ratio requirements.
- ii. Change its financial year.
- iii. Undertake any merger, spin off, consolidation or reorganization.
- iv. Repay or prepay, purchase, redeem, reimburse or discharge any of its indebtedness other than in accordance with the provisions of the Loan Agreement.
- v. Commit to any act that will cause money laundering, financing of terrorism, fraud, or other corrupt or illegal practices.
- vi. Incur any subordinated debt, if after the incurrence of such subordinated debt the ratio of subordinated debt to equity shall be greater than 5 to 1.

The subordinated loans are unsecured.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman.

20. SUBORDINATED LOANS (continued)

During the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company has fulfilled all covenants and obligations according to the Loan Agreements.

21. MODAL SAHAM

21. CAPITAL STOCK

31 Desember 2020 dan 2019/
December 31, 2020 and 2019

Nama pemegang saham	Total saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total/Amount	Name of shareholders
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	600.000	30.00%	600.000	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Asian Development Bank	399.800	19.99%	399.800	Asian Development Bank
International Finance Corporation	399.800	19.99%	399.800	International Finance Corporation
DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH	302.400	15.12%	302.400	DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	298.000	14.90%	298.000	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
	2.000.000	100.00%	2.000.000	

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR DAN CADANGAN UMUM

Tambahan modal disetor pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp29.800 merupakan agio saham yang dibayarkan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perusahaan tertanggal 19 Maret 2020 dan 21 Maret 2019, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk tidak mengalokasikan cadangan umum, dividen dan tujuan lainnya untuk laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah membentuk cadangan umum sebesar Rp26.465.

22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL AND GENERAL RESERVES

Additional paid-in capital as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp29,800 represents premium of shares paid by Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Based on Annual General Meeting of Shareholders of the Company dated March 19, 2020 and March 21, 2019, the Company's shareholder approved to not allocate any amount for reserve funds, dividend and other purposes for the financial year as at and for the years ended December 31, 2019 and 2018.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has provided a general reserve of Rp26,465.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. PENDAPATAN BUNGA

23. INTEREST INCOME

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Pendapatan bunga pinjaman diberikan	611.701	527.378	Interest income from loans
Pendapatan bunga efek-efek	203.694	196.485	Interest income from securities
Pendapatan bunga deposito berjangka	25.739	34.007	Interest income from time deposits
			Interest income from derivative transaction
Pendapatan bunga transaksi derivatif	10.576	23.982	Interest income from current accounts
Pendapatan bunga giro	7.727	3.724	Interest income from securities purchase under resale agreement
Pendapatan bunga atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	491	795	
	859.928	786.371	

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat pendapatan bunga dari konsumen eksternal yang mencapai 10% atau lebih dari total pendapatan bunga Perusahaan.

For the years ended December 31, 2020 and 2019, there are no interest income from external customers amounting to 10% or more of the Company's total interest income.

24. PENDAPATAN PROVISI DAN KOMISI

24. PROVISION AND COMMISSION INCOME

Pendapatan provisi dan komisi merupakan pendapatan yang berkaitan dengan pinjaman diberikan, diakui ketika jasa-jasa telah diberikan sesuai dengan kontrak perjanjian seperti jasa *mandatory lead arranger*, sindikasi, jasa perancangan model pembiayaan, pendapatan komitmen atas fasilitas yang belum dicairkan, dan premi atas garansi kredit yang diberikan.

Provision and commission income represents income related to the loans, recognized when the services are rendered in accordance with the respective engagement contracts such as *mandatory lead arranger services*, syndication, structuring of financing scheme services, commitment fee income from undrawn facilities, and credit guarantee premium.

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Gaji dan tunjangan	109.793	96.958	Salaries and benefits
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 12 dan 14)	27.453	27.273	Depreciation and amortization (Notes 12 and 14)
Jasa profesional	27.030	18.182	Professional fee
Sewa	3.137	4.681	Rent
Biaya bank dan kustodian	3.027	4.667	Bank and custodian charges
Asuransi	2.770	2.461	Insurance
Imbalan kerja (Catatan 28)	2.516	6.012	Employee benefit (Note 28)
Listrik, telepon, air dan internet	2.425	1.825	Electricity, telephone, water and internet
Akomodasi dan transportasi	1.503	3.839	Accommodation and transportation
Promosi dan komunikasi	1.347	1.849	Promotion and communication
Pelatihan dan seminar	616	1.159	Training and seminars
Perlengkapan kantor	407	646	Office supplies
Representasi	274	319	Representation
Beban pajak lain	241	296	Other tax expense
Lain-lain	1.862	4.033	Others
	184.401	174.200	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. BEBAN BUNGA

26. INTEREST EXPENSE

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Pinjaman diterima dan pinjaman subordinasi			Fund borrowings and subordinated loans
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	173.685	282.274	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
SMI-World Bank	121.686	107.424	SMI-World Bank
International Finance Corporation	36.595	42.724	International Finance Corporation
SMI-Asian Development Bank	36.308	50.186	SMI-Asian Development Bank
Pihak ketiga			Third party
PT Bank Permata Tbk	7.567	1.006	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6.129	-	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Derivatif			Derivative
Pihak ketiga			Third parties
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	33.541	24.679	Standard Chartered Bank, Jakarta Branch
PT Bank ANZ Indonesia	-	758	PT Bank ANZ Indonesia
Surat utang yang diterbitkan			Debt securities issued
Pihak berelasi			Related parties
PT Taspen (Persero)	6.697	4.420	PT Taspen (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.375	5.005	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	893	589	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Asuransi Jasa Indonesia	446	295	PT Asuransi Jasa Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	4.160	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank DBS Indonesia	5.804	-	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk	5.089	11.209	PT Bank OCBC NISP Tbk
DJS Ketenagakerjaan program IP	4.464	2.946	DJS Ketenagakerjaan IP program
Reksadana Terproteksi Mandiri Seri 50	-	4.392	Protected Mutual Fund Mandiri Series 50
Lain-lain	161.917	84.086	Others
Beban bunga dari utang sewa aset hak guna	76	-	Interest expense from lease liabilities of right-of-use asset
	605.272	626.153	

27. PERPAJAKAN

27. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Lebih bayar pajak penghasilan badan			Overpayments of corporate income tax
Tahun 2018	-	296	for 2018
Tahun 2019	104	-	for 2019
Pajak Penghasilan Pasal 23	240	153	Income Tax Article 23
	344	449	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

27. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	1.209	1.118	Article 21
Pasal 23	106	76	Article 23
Pasal 26	98	209	Article 26
Pasal 4(2)	-	3	Article 4(2)
	1.413	1.406	
Pajak lainnya	240	270	Other taxes
	1.653	1.676	

c. Pajak penghasilan

c. Income tax

Pajak kini

Current tax

Estimasi pajak penghasilan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari beban pajak kini, manfaat pajak tangguhan dan beban pajak final sebagai berikut:

The Company's estimated income tax for the years ended December 31, 2020 and 2019 represents current income tax expense, deferred tax benefit and final tax expense as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	71.241	32.404	Income before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
Penghasilan tidak kena pajak - reksadana	(4.052)	(4.019)	Non-taxable income - mutual fund
	67.189	28.385	
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Perbedaan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diberikan menurut fiskal dan komersial	(11.591)	4.426	Difference of provision for impairment losses on loans between fiscal and commercial
Akrual bonus dan tunjangan	13.661	13.984	Accrued bonus and allowances
Penyisihan imbalan kerja karyawan	1.517	4.792	Provision for employee benefits
Perbedaan cadangan kerugian penurunan nilai kas dan setara kas dan efek-efek	(1.059)	-	Difference of provision for impairment losses on cash and cash equivalents and securities
Kerugian yang belum direalisasi dari nilai wajar transaksi derivatif	-	(8.745)	Unrealized loss from fair value of derivative transactions
Perbedaan cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain menurut fiskal dan komersial	-	(4.036)	Difference of provision for impairment losses on other receivable between fiscal and commercial
Kerugian yang direalisasi dari penjualan investasi saham	-	(134.639)	Realized loss from sales of equity investments
Perbedaan penyusutan aset tetap dan amortisasi aset lain-lain menurut fiskal dan komersial	(1.643)	(6.200)	Difference of depreciation of property and equipment and amortization of other assets between fiscal and commercial
Perubahan nilai wajar investasi saham dan opsi saham	-	(2.140)	Changes in fair value of equity investments and shares option
	885	(132.558)	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

27. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax (continued)

Pajak kini (lanjutan)

Current tax (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Perbedaan permanen:			Permanent differences:
Pendapatan bunga dikenakan pajak final	(139.708)	(151.121)	Interest income subject to final tax
Bagian dari beban yang terkait dengan pendapatan yang dikenakan pajak final	98.575	120.945	Expense related to income subject to final tax
Keuntungan dari penjualan efek-efek	(1.669)	(3.342)	Gain on sale of securities
Pendapatan dividen yang bukan merupakan objek pajak penghasilan	(3.542)	-	Non-taxable dividend income
Lain-lain	5.231	1.341	Others
	(41.113)	(32.177)	
Estimasi laba/(rugi) fiskal tahun berjalan	26.961	(136.350)	Current years' estimated fiscal gain/(loss)
Penyesuaian atas rugi fiskal	87	620	Adjustment for fiscal loss
Rugi fiskal tahun sebelumnya	(321.530)	(185.800)	Prior year accumulated fiscal loss
Akumulasi rugi fiskal	(294.482)	(321.530)	Accumulated fiscal loss
	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Beban pajak final	(12.781)	(13.957)	Final tax expense
Pajak penghasilan:			Income tax:
Beban pajak tangguhan	(15.950)	(2.471)	Deferred tax expense
	(28.731)	(16.428)	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Estimasi rugi fiskal Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 akan/telah menjadi dasar dalam pengisian SPT tahunan 2020 dan 2019.

Pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2020	2019
Manfaat/(beban) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:		
Kenaikan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	713	-
Kenaikan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual	-	(571)
(Kerugian)/keuntungan aktuarial	(83)	700
Perubahan nilai wajar investasi saham dan opsi saham	(6.412)	-
Bagian efektif atas perubahan instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai arus kas	13.522	9.918
Total pajak yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	7.740	10.047

27. TAXATION (continued)

c. Income tax (continued)

Current tax (continued)

The Company's estimated fiscal losses for the years ended December 31, 2020 and 2019 will be/were the basis for preparing annual tax returns for 2020 and 2019.

Income tax recognized in other comprehensive income:

Benefit/(expenses) recognized in other comprehensive income:

Increase in fair value of securities classified as fair value through other comprehensive income

Increase in fair value of available-for-sale securities
Actuarial (loss)/gain

Changes in fair value of equity investments and shares option
Effective portion on fair value changes from derivative instruments qualified as cash flow hedge

Total tax recognized in other comprehensive income

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan (lanjutan)

Aset/(liabilitas) pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan pada tanggal-tanggal
31 Desember 2020 dan 2019:

31 Desember/December 31, 2020							
	31 Desember/ December 31, 2019	Dampak penerapan awal PSAK No.71/ Effect of initial implementation of SFAS No. 71	Dampak perubahan tarif pajak yang ditangguhkan/ Effect of changes in tax rate - deferred	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	31 Desember/ December 31, 2020	
Akrua bonus dan tunjangan	4.731	-	(568)	3.005	-	7.168	Accrued bonus and allowance
Kenaikan/(penurunan) nilai wajar							Increase/(decrease) in fair value
efek-efek yang diklasifikasikan							of securities classified
pada nilai wajar melalui							as fair value through other
penghasilan komprehensif lain	(105)	(896)	201	-	512	(288)	comprehensive income
Kerugian kumulatif atas							Cumulative loss on
instrumen derivatif untuk							derivative instruments for
lindung nilai arus kas	9.918	-	(1.984)	-	15.506	23.440	cash flow hedges
Selisih penyusutan aset tetap							Difference of property and
dan amortisasi aset lain-lain							equipment depreciation and
antara fiskal dan							other assets amortization
komersial	(2.227)	-	(329)	(361)	-	(2.917)	between fiscal
Selisih cadangan kerugian							and commercial
penurunan nilai pinjaman							Difference of allowance for
diberikan antara							impairment losses for loans
fiskal dan komersial	(11.662)	4.786	1.606	(2.550)	-	(7.820)	between fiscal and commercial
Selisih cadangan kerugian							Difference of allowance
penurunan nilai non							for impairment losses
pinjaman antara							for non-loan between
fiskal dan komersial	-	855	(103)	(233)	-	519	fiscal and commercial
Perubahan nilai wajar investasi							Changes in fair value of equity
saham dan opsi saham	(883)	-	177	-	(6.412)	(7.118)	investments and shares option
Liabilitas imbalan kerja	6.581	-	(1.346)	334	(69)	5.500	Employee benefits obligation
Rugi fiskal	80.382	-	(9.646)	(5.950)	-	64.786	Fiscal losses
Aset pajak tangguhan - neto	86.735	4.745	(11.992)	(5.755)	9.537	83.270	Deferred tax assets - net

31 Desember/December 31, 2019					
	31 Desember/ December 31, 2018	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	31 Desember/ December 31, 2019	
Akrua bonus dan tunjangan	1.235	3.496	-	4.731	Accrued bonus and allowance
Kenaikan nilai wajar efek-efek					Increase in fair value of available-
tersedia untuk dijual	466	-	(571)	(105)	for-sale securities
Kerugian kumulatif atas					Cumulative loss on
instrumen derivatif untuk					derivative instruments for
lindung nilai arus kas	-	-	9.918	9.918	cash flow hedges
Selisih penyusutan aset tetap					Difference of property and
dan amortisasi aset lain-lain					equipment depreciation and
antara fiskal dan					other assets amortization
komersial	(677)	(1.550)	-	(2.227)	between fiscal
Selisih cadangan kerugian					and commercial
penurunan nilai pinjaman					Difference of allowance for
diberikan antara					impairment losses for loans
fiskal dan komersial	(12.769)	1.107	-	(11.662)	between fiscal and commercial
Selisih cadangan kerugian					Difference of allowance
penurunan nilai piutang					for impairment losses
lain-lain antara					for other receivable between
fiskal dan komersial	4.273	(4.273)	-	-	fiscal and commercial
Kenaikan nilai wajar					Increase in fair value of
tagihan derivatif	2.186	(2.186)	-	-	derivative receivables
Perubahan nilai wajar investasi					Changes in fair value of equity
saham dan opsi saham	(348)	(535)	-	(883)	investments and shares option
Penurunan nilai wajar					Decrease in fair value of
investasi saham	33.660	(33.660)	-	-	equity investments
Liabilitas imbalan kerja	4.683	1.198	700	6.581	Employee benefits obligation
Rugi fiskal	46.450	33.932	-	80.382	Fiscal losses
Aset pajak tangguhan - neto	79.159	(2.471)	10.047	86.735	Deferred tax assets - net

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2020	2019
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan komprehensif lain	71.241	32.404
Penghasilan tidak kena pajak - reksadana	(4.052)	(4.019)
	67.189	28.385
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif	(14.782)	(7.096)
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap:		
Pendapatan bunga dikenakan pajak final	30.736	37.780
Bagian dari beban yang terkait dengan pendapatan yang dikenakan pajak final	(21.687)	(30.236)
Lain-lain	(4)	(2.764)
	9.045	4.780
Koreksi rugi fiskal menurut pemeriksaan pajak 2017	-	(155)
Koreksi rugi fiskal menurut pemeriksaan pajak 2018	(22)	-
Dampak penerapan PSAK No. 71	(4.745)	-
Dampak perubahan tarif pajak penghasilan	(5.446)	-
Jumlah beban pajak penghasilan	(15.950)	(2.471)

d. Surat Ketetapan Pajak

Tahun pajak 2018

Pada tanggal 20 Maret 2020, Perusahaan telah menerima hasil pemeriksaan pajak dari Kantor Pajak sehubungan dengan Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan ("PPH") lainnya, dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") untuk tahun pajak 2018. Hasil pemeriksaan pajak tersebut, Kantor Pajak telah menerbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB"), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB"), Surat Ketetapan Pajak Nihil ("SKPN") dan Surat Tagihan Pajak ("STP") dengan total lebih bayar Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp296 dan kurang bayar Pajak Penghasilan 23 sebesar Rp1. Selain itu, berdasarkan SKPLB terdapat juga koreksi rugi fiskal badan sebesar Rp87 dari sebelumnya Rp185.181 menjadi sebesar Rp185.094.

27. TAXATION (continued)

c. Income tax (continued)

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax are as follows:

Income before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income	
Non-taxable income - mutual fund	
Income tax at effective tax rate	
Tax effect of permanent differences:	
Interest income subject to final tax	
Expense related to income subject to final tax	
Others	
Correction of fiscal loss due to tax assessment 2017	
Correction of fiscal loss due to tax assessment 2018	
Impact of SFAS No. 71 implementation	
Effect on changes in corporate income tax rates	
Total income tax expense	

d. Tax Assessment Letter

Fiscal year 2018

On March 20, 2020, the Company received tax assessment results from the Tax Office regarding the Corporate Income Taxes, Other Income Taxes and Value Added Tax ("VAT") for fiscal year 2018. Based on those tax assessment results, the Tax Office issued several Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB"), Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB"), Nil Tax Assessment Letter ("SKPN") and Tax Collection Letters ("STP") with total Corporate Income Taxes overpayment of Rp296 and total Income Tax Article 23 underpayment of Rp1. In addition, based on the SKPLB there was also a correction of corporate fiscal loss amounting to Rp87 from Rp185,181 to Rp185,094.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Tahun pajak 2018 (lanjutan)

Perusahaan menerima seluruh hasil pemeriksaan pajak, melakukan penyesuaian atas kompensasi kerugian yang diakui di tahun 2018 dan menerima lebih bayar jumlah tersebut pada tanggal 26 Mei 2020.

Tahun pajak 2017

Pada tanggal 16 April 2019, Perusahaan telah menerima hasil pemeriksaan pajak dari Kantor Pajak sehubungan dengan Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan ("PPH") lainnya, dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") untuk tahun pajak 2017. Hasil pemeriksaan pajak tersebut, Kantor Pajak telah menerbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil ("SKPN") dan Surat Tagihan Pajak ("STP") dengan total lebih bayar Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp9.351 dan kurang bayar Pajak Penghasilan 23 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp7. Selain itu, berdasarkan SKPLB terdapat juga koreksi rugi fiskal badan sebesar Rp620 dari sebelumnya Rp130.440 menjadi sebesar Rp129.820. Perusahaan menerima seluruh hasil pemeriksaan pajak, melakukan penyesuaian atas kompensasi kerugian yang diakui di tahun 2017 dan menerima lebih bayar jumlah tersebut pada tanggal 17 Mei 2019.

e. Surat Pemeriksaan Pajak

Pada tanggal 6 Agustus 2020, Direktorat Jenderal Pajak mengirim surat No. PEMB-00213/WPJ.30/KP.0105/RIK.SIS/2020 kepada Perusahaan, menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan memeriksa pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Pemeriksaan ini masih dilakukan dan belum selesai sampai dengan tanggal laporan keuangan per 31 Desember 2020.

27. TAXATION (continued)

d. Tax Assessment Letter (continued)

Fiscal year 2018 (continued)

The Company agreed all the tax assessment results, made an adjustment for its recognized tax losses in 2018 and receipt the tax overpayment amount on May 26, 2020.

Fiscal year 2017

On April 16, 2019, the Company received tax assessment results from the Tax Office regarding the Corporate Income Taxes, Other Income Taxes and Value Added Tax ("VAT") for fiscal year 2017. Based on those tax assessment results, the Tax Office issued several Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB"), Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB"), Nil Tax Assessment Letter ("SKPN") and Tax Collection Letters ("STP") with total Corporate Income Taxes overpayment of Rp9,351 and total Income Tax Article 23 and Value Added Tax underpayment of Rp7. In addition, based on the SKPLB there was also a correction of corporate fiscal loss amounting to Rp620 from Rp130,440 to Rp129,820. The Company agreed all the tax assessment results, made an adjustment for its recognized tax losses in 2017 and receipt the tax overpayment amount on May 17, 2019.

e. Tax Examination Letter

On August 6, 2020, Directorate General of Tax sent letter No. PEMB- 00213/WPJ.30/KP.0105/ RIK.SIS/2020 to the Company, stated that the Directorate General of Tax will examine the Company's tax for the year ended December 31, 2019. The examination is still being conducted and has not been completed until the date of the financial statements as of December 31, 2020.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Administrasi

1. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang "Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" yang berlaku mulai tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Pajak dibayar dimuka dapat diterima kembali setelah hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pajak.

2. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Tarif pajak yang baru tersebut digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu 31 Maret 2020.

27. TAXATION (continued)

f. Administrative

1. Based on Law of the Republic of Indonesia No. 28 Year 2007 regarding "Third Amendment of Law No. 6 Year 1983 regarding General Rules and Procedures of Taxation" which is applicable starting 2008, the Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within five years from the date the tax becomes due.

The prepaid taxes are refundable subject to tax audit result by the Tax Office.

2. On March 31, 2020, the Government issued a Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2020 which stipulates, among others, reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishments entities from previously 25% to become 22% for fiscal years 2020 and 2021 and 20% starting fiscal year 2022 and onwards, and further reduction of 3% for corporate income tax payers that fulfill certain criteria.

The new tax rates are used as reference to measure the current and deferred tax assets and liabilities starting from the enactment date of the new regulation on March 31, 2020.

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA

	31 Desember/ December 31, 2020
Imbalan pasca-kerja	25.945
Imbalan jangka panjang lainnya	1.554
	27.499

Perusahaan memiliki dua imbalan kerja karyawan yaitu imbalan pasca-kerja dan imbalan jangka panjang lainnya.

28. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

	31 Desember/ December 31, 2019	
	24.767	Post-employment benefits
	1.560	Other long-term benefits
	26.327	

The Company has two employee benefit plans which include post-employment benefits and other long-term benefits.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Pengungkapan di bawah ini merupakan komponen dari liabilitas bersih yang diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan imbalan jangka panjang lainnya yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan dalam hubungannya dengan perhitungan liabilitas yang diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 oleh aktuaria independen (PT Padma Radya Aktuaria) dalam laporannya masing-masing tertanggal 25 Januari 2021 dan 27 Januari 2020.

Imbalan pasca-kerja

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan pasca-kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Beban liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui di laba rugi adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2020	2019
Beban jasa kini	5.722	4.439
Beban jasa lalu	(5.524)	(872)
Beban bunga	1.796	1.535
	1.994	5.102

Jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	25.945	24.767

**28. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

The disclosure below summarizes the components of the estimated net liabilities for employee benefits and other long-term benefit recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the amounts recognized in the statement of financial position in relation to the calculation of the estimated liability for employee benefits as of December 31, 2020 and 2019 by independent actuary (PT Padma Radya Aktuaria) in its reports dated January 25, 2021 and January 27, 2020, respectively.

Post-employment benefits

The Company recognizes post-employment benefits obligation based on Labor Law No. 13/2003.

Amounts recognized in the profit or loss in respect of the post-employment benefits are as follows:

Current service cost
Past service cost
Interest cost

The amounts included in the statement of financial position arising from post-employment benefits obligation are as follows:

Present value of unfunded obligation

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Saldo awal	24.767	17.849	<i>Beginning balance</i>
Beban jasa kini	5.722	4.439	<i>Current service cost</i>
Beban jasa lalu	(5.524)	(872)	<i>Past service cost</i>
Beban bunga	1.796	1.535	<i>Interest cost</i>
Pembayaran manfaat (Keuntungan)/kerugian aktuarial	(470) (346)	(985) 2.801	<i>Benefits payment Actuarial (gain)/loss</i>
Saldo akhir	25.945	24.767	<i>Ending balance</i>

Mutasi akumulasi keuntungan/(kerugian) aktuarial yang diakui di saldo laba adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Saldo awal	(1.079)	1.722	<i>Beginning balance</i>
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	346	(2.801)	<i>Actuarial gain/(loss)</i>
Saldo akhir	(733)	(1.079)	<i>Ending balance</i>

Imbalan jangka panjang lainnya

Perusahaan memberikan cuti besar sebanyak 30 hari kerja kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan setiap kelipatan 5 (lima) tahun. Cuti besar ini dapat diambil pada tahun ke-enam.

Perusahaan juga memberikan imbalan jangka panjang berupa emas 5 gram kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan setiap kelipatan 5 (lima) tahun. Imbalan ini dapat diambil pada tahun ke-enam.

Jumlah liabilitas imbalan jangka panjang lainnya yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2020	2019	
Beban jasa kini	714	597	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	98	79	<i>Interest cost</i>
Beban jasa lalu	(262)	-	<i>Past service cost</i>
(Keuntungan)/kerugian aktuarial	(28)	234	<i>Actuarial (gain)/loss</i>
	522	910	

28. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

Movements in the present value of post-employment benefits obligation are as follows:

Movements of accumulated actuarial gain/(loss) recognized in the retained earnings are as follows:

Other long-term benefits

The Company provides long service leave for 30 working days to employees who have reached 5 (five) consecutive years of service and further for every 5 (five) years of service period. This long service leave can be taken on the sixth year.

The Company also provides long-term benefit in the form of 5 gram of gold for employees who have reached 5 (five) consecutive years of service and further for every 5 (five) years of service period. This benefit can be taken on the sixth year.

Amounts recognized in profit or loss in respect of the other long-term benefits are as follows:

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Saldo awal	1.560	885
Beban jasa kini	714	597
Beban bunga	98	79
Beban jasa lalu	(262)	-
(Keuntungan)/kerugian aktuarial	(28)	234
Pembayaran manfaat	(528)	(235)
Saldo akhir	1.554	1.560

Jumlah liabilitas imbalan jangka panjang lainnya yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	1.554	1.560

Beban liabilitas imbalan pasca-kerja dan imbalan jangka panjang lainnya di atas dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

	2020	2019	
Tingkat diskonto per 31 Desember	7,00%	7,25%	Discount rate as of December 31,
Tingkat kenaikan gaji	8,00%	8,00%	Salary increase rate
Tingkat kematian	100% TMI4	100% TMI3	Mortality rate
Tingkat cacat	5% TMI4	5% TMI3	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	5% per tahun hingga usia 35 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia 56/ 5% per annum until 35 years old and decreased linearly to 0% at a 56 years old	5% per tahun hingga usia 35 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia 56/ 5% per annum until 35 years old and decreased linearly to 0% at 56 years old	Resignation rate
Tingkat pensiun normal	100% pada usia pensiun normal/ 100% at normal retirement age	100% pada usia pensiun normal/ 100% at normal retirement age	Normal retirement rate
Umur pensiun normal	56 tahun/years old	56 tahun/years old	Normal retirement age

28. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

Other long-term benefits (continued)

Movements in the present value of other long-term benefits obligation are as follows:

The amounts included in the statement of financial position in respect of other long-term benefits obligation are as follows:

The cost of providing post-employment benefit and other long-term benefits obligation is calculated using the following key assumptions:

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat gaji sebesar 1% dengan variabel lain dianggap tetap terhadap nilai kini liabilitas dan imbalan jangka panjang lainnya (tidak diaudit):

	Kenaikan tingkat diskonto/ Increase in discount rate	Penurunan tingkat diskonto/ Decrease in discount rate	Kenaikan tingkat kenaikan gaji/ Increase in salary increase rate	Penurunan tingkat kenaikan gaji/ Decrease in salary increase rate	
2020	(1.529)	1.581	1.582	(1.527)	2020
2019	(1.536)	1.590	1.596	(1.529)	2019

Berikut adalah ekspektasi pembayaran manfaat liabilitas imbalan kerja di tahun-tahun mendatang (tidak diaudit):

	31 Desember/ December 31, 2020
Kurang dari satu tahun	814
2 - 5 tahun	15.227
6 - 10 tahun	36.368
> 10 tahun	214.783

Rata-rata tertimbang durasi dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 14,61 tahun (2019: 9,81).

28. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

Other long-term benefits (continued)

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change at 1% in discount rate and salary rate with all other variables held constant of the present value of benefits obligation and other long-term benefits (unaudited):

The following are expected payment periods of the benefits obligation in the future years (unaudited):

	31 Desember/ December 31, 2019	
	1.316	Less than one year
	13.573	2 - 5 years
	42.205	6 - 10 years
	176.988	> 10 years

The weighted average duration of the employment benefits obligation as of December 31, 2020 is 14.61 years (2019: 9.81).

29. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Akun-akun di bawah ini merupakan akun yang dicatat di laporan posisi keuangan ekstrakomtabel (off-balance sheet):

a. KOMITMEN

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Piutang komitmen		
Fasilitas pinjaman yang diterima belum digunakan (Catatan 19)	4.893.273	4.353.933
Liabilitas komitmen		
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan (Catatan 9)	(2.630.898)	(3.193.181)
Komitmen - neto	2.262.375	1.160.752

b. KONTINJENSI

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Liabilitas kontinjensi		
Garansi kredit diberikan (Catatan 32)	(277.000)	(269.236)

29. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The following accounts represent accounts which are recorded as off-balance sheet:

a. COMMITMENTS

Commitment receivable
Unused borrowing facilities granted (Note 19)
Commitments payable
Unused loan facilities granted (Note 9)
Commitment - net

b. CONTINGENCIES

Contingent payables
Credit guarantees issued (Note 32)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut:

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")	Pemegang saham Perusahaan/The shareholder of the Company
Asian Development Bank ("ADB")	Pemegang saham Perusahaan/The shareholder of the Company
International Finance Corporation ("IFC")	Pemegang saham Perusahaan/The shareholder of the Company
DEG - Deutsche Investition - Und Entwicklungsgesellschaft mbH ("DEG").	Pemegang saham Perusahaan/The shareholder of the Company
Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC")	Pemegang saham Perusahaan/The shareholder of the Company
Pemerintah Republik Indonesia	Pemegang saham akhir/Ultimate shareholder
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia
PT Bank BTPN Tbk	Dikendalikan Sumitomo Mitsui Banking Corporation/Controlled by Sumitomo Mitsui Banking Corporation

30. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company is engaged in transactions with related parties. The related parties and nature of relationship are as follows:

Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
Penempatan modal/Equity, Beban Tangguhan/Deferred Charges, Pinjaman subordinasi/Subordinated loans, Pendapatan jasa advisory/Advisory income, Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain/Accrued expenses and other liabilities, Beban bunga/Interest expense.
Penempatan modal/Equity, Pinjaman subordinasi/Subordinated loans, Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain/Accrued expenses and other liabilities, Beban bunga/Interest expense.
Penempatan modal/Equity, Pinjaman diterima/Fund borrowing, Beban bunga/Interest expense.
Penempatan modal/Equity, Utang lain-lain/Other payables.
Penempatan modal/Equity.
Efek-efek/Securities, Piutang bunga/Accrued interest income, Pendapatan bunga/Interest income, Keuntungan/(kerugian) yang direalisasi dari penjualan efek-efek/Realized gain/(loss) from sale of securities.
Pinjaman diterima/Fund borrowing, Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents, Efek-efek/Securities, Piutang bunga/Accrued interest income, Pendapatan bunga/Interest income, Beban bunga/Interest expense, Keuntungan/(kerugian) yang direalisasi dari penjualan efek-efek/Realized gain/(loss) from sale of securities.
Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents, Surat utang yang diterbitkan/Debt securities issued, Piutang bunga/Accrued interest income, Pendapatan bunga/Interest income, Beban bunga/Interest expense.
Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents, Pendapatan bunga/Interest income.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Dimiliki dan dikendalikan pemegang saham Perusahaan/ <i>Owned and controlled by the shareholder of the Company</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Shareholder of the Company</i>
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>
PT Brantas Adya Surya Energi	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>

30. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

In the normal course of business, the Company is engaged in transactions with related parties. The related parties and nature of relationship are as follows (continued):

Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> .
Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> .
Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> .
Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> .
Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i> .
Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> .
Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i> .
Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> .
Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> .
Aset lain-lain/ <i>Other assets</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i> .

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut (lanjutan):

30. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

In the normal course of business, the Company is engaged in transactions with related parties. The related parties and nature of relationship are as follows (continued):

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Marga Lingkar Jakarta	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> .
PT PP Krakatau Tirta	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Beban tangguhan / <i>Deferred charges</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i> .
PT Utama Karya (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Aset lain-lain/ <i>Other assets</i> , Pendapatan jasa advisory/ <i>Advisory income</i>
PT Taspen (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat utang yang diterbitkan/ <i>Debt securities issued</i> , Beban bunga/ <i>Interest expense</i>
PT Pertamina (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i> , Piutang bunga/ <i>Accrued interest income</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Keuntungan/(Kerugian) yang direalisasi dari penjualan efek-efek/ <i>Realized gain/(loss) from sale of securities</i> .
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat utang yang diterbitkan/ <i>Debt securities issued</i> , Beban bunga/ <i>Interest expense</i> .
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Aset lain-lain/ <i>Other assets</i> .
PT Waskita Sangir Energi	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i> .
PT LEN Telekomunikasi Indonesia	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i> .
PT Pemalang Batang Toll Road	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/ <i>Loans</i> , Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i> , Pendapatan provisi dan komisi/ <i>Provision and commission income</i> , Beban tangguhan/ <i>Defferes charges</i> .

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Beban tangguhan/Deferred charges, Pinjaman diberikan/Loans, Pendapatan bunga/Interest income, Pendapatan provisi dan komisi/Provision and commission income.
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat utang yang diterbitkan/Debt securities issued, Beban bunga/Interest expense
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/Securities, Piutang bunga/Accrued interest income, Pendapatan bunga/interest income
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/Securities, Piutang bunga/Accrued interest income, Pendapatan bunga/Interest income
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Entitas anak dari entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Subsidiary of entity owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman diberikan/Loans, Pendapatan bunga/Interest income, Pendapatan provisi dan komisi/Provision and commission income
Dewan Komisaris dan Direksi/Boards of Commissioners and Directors	Personil manajemen/ <i>management personnel</i>	kunci/Key Gaji dan tunjangan/Salaries and benefits

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

Transactions with Related Parties

The Company entered into certain transactions with related parties as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
ASET			ASSETS
Kas dan setara kas			Cash and cash equivalents
Kas di bank (Catatan 5)	912.346	473.529	Cash in banks (Note 5)
Deposito berjangka (Catatan 5)	985.350	1.667.724	Time deposits (Note 5)
Efek-efek - neto (Catatan 6)	1.136.790	1.363.564	Securities - net (Note 6)
Pinjaman diberikan - neto (Catatan 9)	3.009.631	2.368.847	Loans - net (Note 9)
Piutang bunga (Catatan 10)	18.386	15.871	Accrued interest income (Note 10)
Beban tangguhan (Catatan 13)	435	999	Deferred charges (Note 13)
Aset lain-lain - neto (Catatan 14)	1.436	2.847	Other assets - net (Note 14)
Persentase terhadap total aset			Percentage to total assets
Kas dan setara kas	12,92%	17,39%	Cash and cash equivalents
Efek-efek - neto	7,74%	11,08%	Securities
Pinjaman diberikan - neto	20,50%	19,24%	Loans - net
Piutang bunga	0,13%	0,13%	Accrued interest income
Beban tangguhan	0,00%	0,01%	Deferred charges
Aset lain-lain - neto	0,01%	0,02%	Other assets - net

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

30. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (continued)

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Transactions with Related Parties (continued)

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut (lanjutan):

The Company entered into certain transactions with related parties as follows (continued):

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
LIABILITAS		
Utang lain-lain (Catatan 15)	-	81
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain (Catatan 16)	30.691	17.021
Surat utang yang diterbitkan (Catatan 17)	280.789	313.488
Pinjaman diterima (Catatan 19)	2.889.612	4.713.745
Pinjaman subordinasi (Catatan 20)	4.157.322	3.142.918
Persentase terhadap total liabilitas		
Utang lain-lain	-	0,00%
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	0,25%	0,17%
Surat utang yang diterbitkan	2,25%	3,09%
Pinjaman diterima	23,11%	46,40%
Pinjaman subordinasi	33,25%	30,94%

LIABILITIES	
Other payables (Note 15)	
Accrued expenses and other liabilities (Note 16)	
Debt securities issued (Note 17)	
Fund borrowings (Note 19)	
Subordinated loans (Note 20)	
Percentage to total liabilities	
Other payables	
Accrued expenses and other liabilities	
Debt securities issued	
Fund borrowings	
Subordinated loans	

Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember/
Year Ended December 31,

	2020	2019
PENDAPATAN		
Pendapatan bunga (Catatan 23)	305.323	318.483
Pendapatan provisi dan komisi (Catatan 24)	5.887	10.209
Pendapatan jasa <i>advisory</i>	6.834	7.659
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek (Catatan 6)	7.562	4.068
Persentase terhadap total pendapatan		
Pendapatan bunga	33,50%	38,01%
Pendapatan provisi dan komisi	0,65%	1,22%
Pendapatan jasa <i>advisory</i>	0,75%	0,91%
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek	0,83%	0,49%
BEBAN		
Beban bunga (Catatan 26)	380.685	497.077
Persentase terhadap total beban		
Beban bunga	45,30%	61,72%

REVENUES	
Interest income (Note 23)	
Provision and commission income (Note 24)	
Advisory income	
Realized gain from sale of securities (Note 6)	
Percentage to total revenues	
Interest income	
Provision and commission income	
Advisory income	
Realized gain from sale of securities	
EXPENSES	
Interest expenses (Note 26)	
Percentage to total expenses	
Interest expenses	

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
Year Ended December 31,

	2020	2019
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
Direksi/ Board of Directors		Direksi/ Board of Directors
Gaji dan tunjangan (imbalan jangka pendek)	8.032	18.433
		9.700
		16.565

Salaries and benefits
(short-term benefits)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2020	
	Mata uang asal (jumlah penuh)/ Original currency (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent
Aset moneter		
Dolar Amerika Serikat		
Kas dan setara kas	27.965.529	394.453
Efek-efek	91.087.362	1.284.788
Pinjaman diberikan	169.245.557	2.387.209
Piutang bunga	1.039.508	14.662
Aset lain-lain	49.567	699
Total aset moneter	289.387.523	4.081.811
Liabilitas moneter		
Dolar Amerika Serikat		
Utang lain-lain	209.531	2.955
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain	484.202	6.830
Liabilitas derivatif	8.309.087	117.200
Pinjaman diterima	98.685.278	1.391.956
Pinjaman subordinasi	173.796.719	2.451.403
Total liabilitas moneter	281.484.817	3.970.344
Aset moneter neto		111.467

Monetary assets
United States Dollar
Cash and cash equivalents
Securities
Loans
Accrued interest income
Other assets
Total monetary assets
Monetary liabilities
United States Dollar
Other payables
Accrued expenses and other liabilities
Derivative liabilities
Fund borrowings
Subordinated loans
Total monetary liabilities
Net monetary assets

	31 Desember/December 31, 2019	
	Mata uang asal (jumlah penuh)/ Original currency (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent
Aset moneter		
Dolar Amerika Serikat		
Kas dan setara kas	72.953.137	1.014.122
Efek-efek	100.526.131	1.397.414
Pinjaman diberikan	116.410.853	1.618.228
Piutang bunga	1.259.184	17.504
Aset lain-lain	333.343	4.634
Total aset moneter	291.482.648	4.051.902
Liabilitas moneter		
Dolar Amerika Serikat		
Utang lain-lain	443.488	6.166
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain	21.718	302
Liabilitas derivatif	2.853.748	39.670
Pinjaman diterima	98.472.542	1.368.867
Pinjaman subordinasi	182.193.701	2.532.676
Total liabilitas moneter	283.985.197	3.947.681
Aset moneter neto		104.221

Monetary assets
United States Dollar
Cash and cash equivalents
Securities
Loans
Accrued interest income
Other assets
Total monetary assets
Monetary liabilities
United States Dollar
Other payables
Accrued expenses and other liabilities
Derivative liabilities
Fund borrowings
Subordinated loans
Total monetary liabilities
Net monetary assets

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Perjanjian Pinjaman Komersial - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk I

Pada tanggal 17 Desember 2015, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000.

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS

Commercial Loan Agreement - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk I

On December 17, 2015, the Company had signed a Loan Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"). Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities amounting to Rp1,000,000.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**Perjanjian Pinjaman Komersial - PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk (lanjutan)**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk I (lanjutan)

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk II

Pada tanggal 30 Mei 2017, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Bank Mandiri. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp1.500.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III

Pada tanggal 26 Oktober 2018, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Bank Mandiri. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp3.000.000 dan USD100.000.000 yang terdiri atas:

- Pinjaman transaksi khusus sebesar Rp2.500.000
- Kredit jangka pendek sebesar Rp500.000.
- *Treasury line* sebesar USD100.000.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Pada tanggal 23 Oktober 2019, Perusahaan telah menandatangani *addendum* I Perjanjian Pinjaman dengan Bank Mandiri terkait dengan perpanjangan *availability period* sampai 25 April 2020 atas pinjaman transaksi khusus sebesar Rp2.500.000.

**Perjanjian Pinjaman Komersial - International
Finance Corporation**

International Finance Corporation I

Pada tanggal 19 Juni 2014, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan International Finance Corporation ("IFC"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD250.000.000 yang terdiri atas:

- Pinjaman A sebesar USD30.000.000.
- Pinjaman MCPP (*Managed Co-Lending Portfolio Program*) sebesar USD22.500.000.
- Pinjaman B sebesar USD197.500.000.

**32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**Commercial Loan Agreement - PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk I (continued)

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk II

On May 30, 2017, the Company had signed a Loan Agreement with Bank Mandiri. Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities amounting to Rp1,500,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk III

On October 26, 2018, the Company had signed a Loan Agreement with Bank Mandiri. Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities amounting to Rp3,000,000 and USD100,000,000 which consist of:

- Special transaction loan amounting to Rp2,500,000.
- Short term credit amounting to Rp500,000.
- Treasury line amounting to USD100,000,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

On October 23, 2019, the Company had signed *addendum* Loan Agreement with Bank Mandiri. Based on the Loan Agreement related to extension of *availability period* until April 25, 2020 for special transaction loan amounting to Rp2,500,000.

**Commercial Loan Agreement - The International
Finance Corporation**

International Finance Corporation I

On June 19, 2014, the Company had signed a Loan Agreement with International Finance Corporation ("IFC"). Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities amounting to USD250,000,000 which consist of:

- A loan amounting to USD30,000,000.
- MCPP (*Managed Co-Lending Portfolio Program*) amounting to USD22,500,000.
- B loan amounting to USD197,500,000.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman Komersial - International Finance Corporation (lanjutan)

International Finance Corporation I (lanjutan)

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

International Finance Corporation II

Pada tanggal 22 Februari 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan IFC. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD150.000.000 yang terdiri atas:

- Pinjaman A sebesar USD15.000.000.
- Pinjaman B sebesar USD135.000.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

International Finance Corporation III

Pada tanggal 22 Juni 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan IFC. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD150.000.000 yang terdiri atas:

- Pinjaman A sebesar USD50.000.000.
- Pinjaman B1 sebesar USD50.000.000.
- Pinjaman B2 sebesar USD50.000.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Pada tanggal 14 Maret 2019, Perusahaan telah melakukan pembatalan pinjaman B1 dari Internasional Finance Corporation III sebesar USD50.000.000.

Perjanjian Pinjaman Subordinasi - Japan International Cooperation Agency

Pada tanggal 11 Desember 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Japan International Cooperation Agency ("JICA"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar JPY8.000.000.000. Pinjaman ini dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dengan total fasilitas ekuivalen sampai dengan JPY8.000.000.000.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Commercial Loan Agreement - The International Finance Corporation (continued)

International Finance Corporation I (continued)

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

International Finance Corporation II

On February 22, 2016, the Company had signed a Loan Agreement with IFC. Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities amounting to USD150,000,000 which consists of:

- A Loans amounting to USD15,000,000.
- B Loans amounting to USD135,000,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

International Finance Corporation III

On June 22, 2017, the Company had signed a Loan Agreement with IFC. Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities amounting to USD150,000,000 which consists of:

- A Loans amounting to USD50,000,000.
- B1 Loans amounting to USD50,000,000.
- B2 Loans amounting to USD50,000,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

On March 14, 2019, the Company canceled the B1 loan from Internasional Finance Corporation III amounting to USD50,000,000.

Subordinated Loan Agreement - Japan International Cooperation Agency

On December 11, 2017, the Company had signed a Loan Agreement with Japan International Cooperation Agency ("JICA"). Based on the Loan Agreement, the Company obtained borrowing facilities amounting to JPY8,000,000,000. The loan can be drawn in Rupiah currency with a total facility amount in the equivalent amounting up to JPY8,000,000,000.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman Komersial - PT Bank Permata Tbk

Perjanjian Transaksi Valuta Asing

Pada tanggal 10 Oktober 2019, Perusahaan dan PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") telah menandatangani Perjanjian Transaksi Valuta Asing sebesar USD1.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Perjanjian Money Market

Pada tanggal 10 Oktober 2019, Perusahaan dan Bank Permata telah menandatangani Perjanjian Money Market sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu 1 tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Perjanjian Term Loan

Pada tanggal 27 November 2020, Perusahaan dan Bank Permata telah menandatangani Perjanjian Term Loan sebesar Rp1.000.000 dengan jangka waktu 4 tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Perjanjian Pinjaman Komersial - PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka

Pada tanggal 8 September 2020, Perusahaan dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon") telah menandatangani Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu 3 tahun sejak perjanjian ditandatangani, yang kemudian di perbaharui lewat perjanjian tanggal 14 Desember 2020.

Fasilitas Kredit Berjangka

Pada tanggal 8 September 2020, Perusahaan dan Bank Danamon telah menandatangani Perjanjian Kredit Berjangka sebesar Rp250.000 dengan jangka waktu 1 tahun sejak perjanjian ditandatangani, yang kemudian di perbaharui lewat perjanjian tanggal 14 Desember 2020.

Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka II

Pada tanggal 14 Desember 2020, Perusahaan dan Bank Danamon telah menandatangani Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka sebesar Rp1.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun sejak perjanjian ditandatangani.

**32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

Commercial Loan Agreement - PT Bank Permata Tbk

Foreign Exchange Transaction Agreement

On October 10, 2019, the Company and PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") had signed Foreign Exchange Transaction Agreement amounting to USD1,000,000 with availability period 1 year since agreement signed.

Money Market Agreement

On October 10, 2019, the Company and Bank Permata had signed Money Market Agreement amounting to Rp500,000 with availability period 1 year since agreement signed.

Term Loan Agreement

On November 27, 2020, the Company and Bank Permata had signed Term Loan Agreement amounting to Rp1,000,000 with availability period 4 year since agreement signed.

Commercial Loan Agreement - PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Term Installment Credit Facility

On September 8, 2020, the Company and PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon") had signed Term Installment Credit Agreement amounting to Rp500,000 with availability period 3 year since agreement signed, as amended by the agreement dated December 14, 2020.

Term Credit Facility

On September 8, 2020, the Company and Bank Danamon had signed Term Credit Agreement amounting to Rp250,000 with availability period 1 year since agreement signed, as amended by the agreement dated December 14, 2020.

Term Installment Credit Facility II

On December 14, 2020, the Company and Bank Danamon had signed Term Installment Credit Agreement amounting to Rp1,000,000 with availability period 3 year since agreement signed.

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**Perjanjian Pinjaman Komersial - PT Bank
Danamon Indonesia Tbk (lanjutan)**

Fasilitas Pre-Settlement Exposure

Pada tanggal 14 Desember 2020, Perusahaan dan Bank Danamon telah menandatangani Perjanjian Pre-Settlement Exposure sebesar USD1.000.000.

**Perjanjian Pinjaman Komersial - Asian
Development Bank**

Pada tanggal 15 Mei 2020, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman - ADB dan kemudian pada tanggal 3 Juni 2020, ADB telah mengeluarkan surat yang menyatakan pemenuhan persyaratan berlakunya perjanjian pinjaman tanggal 1 Juni 2020 antara Pemerintah Republik Indonesia dan ADB sebesar USD100.000.000. Selain itu, ADB menyatakan bahwa semua kondisi untuk efektivitas pinjaman telah dipenuhi dan menyatakan pinjaman efektif pada tanggal 1 Juni 2020.

Berkaitan dengan perjanjian ini, Perusahaan mengikatkan diri dalam Perjanjian Proyek dengan ADB dan SMI.

Dalam Perjanjian Proyek, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan berikut, di antaranya:

- i. Untuk menjalankan aktivitas pembiayaannya dengan *due diligence* dan efisien serta melakukan praktek administrasi, keuangan, teknik dan lingkungan yang baik.
- ii. Praktek pengadaan yang sesuai dengan Pedoman Pengadaan ADB.
- iii. Rencana, spesifikasi, jadwal, dan metode konstruksi yang sesuai dengan praktek terbaik internasional.
- iv. Meyakinkan bahwa tujuan dari pinjaman akan tercapai.

Perjanjian Pinjaman Subordinasi - World Bank

World Bank I

Pada tanggal 20 April 2011, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi World Bank dan selanjutnya, pada 25 April 2011 World Bank telah mengeluarkan surat No. CD-185/IIIF/IV/2011 yang menyatakan pemenuhan kondisi preseden berlakunya Perjanjian Pinjaman tanggal 15 Januari 2010 antara Pemerintah Republik Indonesia dan World Bank ("WB") sebesar USD100.000.000. Selain itu, World Bank menyatakan perjanjian pinjaman menjadi efektif sejak 25 April 2011.

**32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**Commercial Loan Agreement - PT Bank
Danamon Indonesia Tbk (continued)**

Pre-Settlement Exposure Facility

On December 14, 2020, the Company and Bank Danamon had signed Pre-Settlement Exposure Agreement amounting to Rp1,000,000.

**Commercial Loan Agreement - Asian
Development Bank**

On May 15, 2020, the Company and SMI had signed ADB - Loan Agreement and subsequently on June 3, 2020, ADB had issued a letter confirming the fulfillment of the conditions precedent to effectiveness of the Loan Agreement dated June 1, 2020 between the Government of the Republic of Indonesia and ADB in the amount of USD100,000,000. Furthermore, ADB declared that all conditions to the effectiveness of the loan had been met and declare that the loan was effective on June 1, 2020.

In relation to this agreement, the Company had entered into Project Agreement with ADB and SMI.

In the Project Agreement, the Company must fulfill the following requirements, amongst others:

- i. Carry out its financing activities with due diligence and efficiency, in accordance with sound administrative, financial, engineering and environmental practices.
- ii. The procurement is in accordance with ADB's Procurement Guidelines.
- iii. Plans, specifications, work schedules and construction methods that meet international best practice.
- iv. Ensure that the purposes of the loan will be accomplished.

Subordinated Loan Agreement - The World Bank

The World Bank I

On April 20, 2011, the Company and SMI had signed The World Bank - Subordinated Loan Agreement and subsequently, on April 25, 2011 World Bank has issued letter No. CD-185/IIIF/IV/2011 confirming the fulfillment of the conditions precedent to the effectiveness of the Loan Agreement dated January 15, 2010 between the Government of Republic of Indonesia and the World Bank ("WB") in the amount of USD100,000,000. Furthermore, World Bank declared the Loan Agreement to become effective as of April 25, 2011.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman Subordinasi - World Bank (lanjutan)

World Bank I (lanjutan)

Pada tanggal 29 Maret 2012, Perusahaan menyampaikan surat kepada SMI perihal penyesuaian mata uang dan struktur bunga dalam penerusan pinjaman dari WB.

Pada tanggal 3 Oktober 2012, Menteri Keuangan melalui surat No. S-729/MK.05/2012 yang ditujukan kepada SMI telah menyampaikan persetujuan perihal perubahan mata uang dan struktur suku bunga.

Pada tanggal 14 Desember 2012, Perusahaan dan SMI menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman Subordinasi tertanggal 20 April 2011, yang mengubah beberapa pasal dalam perjanjian sebelumnya diantaranya perubahan suku bunga pinjaman, perubahan tanggal pembayaran pokok dan bunga dan ketentuan *current ratio* sebesar 1,2 dan persyaratan kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) sebesar 12% sebagai kondisi subordinasi.

Berkaitan dengan perjanjian ini, Perusahaan mengikatkan diri dalam Perjanjian Proyek dengan International Bank For Reconstruction And Development (Grup WB) dan SMI. Menurut perjanjian proyek, Perusahaan diwajibkan untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaannya serta perusahaan yang dibiayai mematuhi Manual Operasi.

Berdasarkan surat No. S-760/PU/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Perusahaan memperoleh persetujuan dari WB berkaitan dengan perpanjangan batas waktu penarikan (*closing date*) pinjaman WB dari semula tanggal 31 Desember 2013 menjadi tanggal 30 November 2015.

Berdasarkan surat No. S-848/PR.2/2015 tertanggal 27 November 2015 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, batas waktu penarikan (*closing date*) pinjaman WB diperpanjang kembali dari semula tanggal 30 November 2015 menjadi 30 November 2016.

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Subordinated Loan Agreement - The World Bank (continued)

The World Bank I (continued)

On March 29, 2012, the Company has submitted a letter to SMI regarding adjustment on currency and interest structure for on-lending from WB.

On October 3, 2012, the Minister of Finance through letter No. S-729/MK.05/2012 to SMI has approved the adjustment on currency and interest structure.

On December 14, 2012, the Company and SMI had signed the Amendment Agreement to Subordinated Loan Agreement dated April 20, 2011, which revised several articles in the previous agreement, amongst others, the change in the interest rate of the loan, changes in the date of principal and interest payments, and requirements of current ratio of 1.2 and capital adequacy ratio of 12% as subordination condition.

In relation to this agreement, the Company had entered into a Project Agreement with the International Bank For Reconstruction And Development (WB Group) and SMI. According to the project agreement, the Company is obliged to ensure that its own financing activities as well as the operations of the companies to which it provides funding are in compliance with the Operation Manual.

Based on letter No. S-760/PU/2013 dated October 30, 2013 from Directorate General Loan Management of Ministry of Finance, the Company has obtained approval from WB regarding the extension of closing date of WB subordinated loan from December 31, 2013 to November 30, 2015.

Based on letter No. S-848/PR.2/2015 dated November 27, 2015 from Directorate General Financing Management and Risk of Ministry of Finance, the closing date of WB subordinated loan was extended again from November 30, 2015 to November 30, 2016.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman Subordinasi - World Bank (lanjutan)

World Bank II

Pada tanggal 26 September 2017, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi kedua dengan nilai sebesar USD200.000.000. Pinjaman ini dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dengan total fasilitas ekuivalen sampai dengan USD200.000.000. Risiko nilai tukar pinjaman ini ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada 1 Oktober 2036 dan memiliki batas waktu penarikan (*closing date*) sampai tanggal 28 Februari 2022.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Perjanjian Pinjaman Subordinasi - ADB

Pada tanggal 20 April 2011, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi - ADB dan kemudian pada tanggal 25 April 2011, ADB telah mengeluarkan surat yang menyatakan pemenuhan persyaratan berlakunya perjanjian pinjaman tanggal 20 Januari 2010 antara Pemerintah Republik Indonesia dan ADB sebesar USD100.000.000. Selain itu, ADB menyatakan bahwa semua kondisi untuk efektivitas pinjaman telah dipenuhi dan menyatakan pinjaman efektif pada tanggal 25 April 2011.

Pada tanggal 29 Maret 2012, Perusahaan menyampaikan surat kepada SMI perihal penyesuaian mata uang dan struktur bunga dalam penerusan pinjaman dari ADB.

Pada tanggal 3 Oktober 2012, Menteri Keuangan melalui surat No. S-729/MK.05/2012 yang ditujukan kepada SMI telah menyampaikan persetujuan perihal perubahan mata uang dan struktur suku bunga.

Pada tanggal 28 November 2012, Perusahaan dan SMI menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman Subordinasi tertanggal 20 April 2011, yang mengubah beberapa pasal dalam perjanjian sebelumnya diantaranya perubahan suku bunga pinjaman dan ketentuan *current ratio* sebesar 1,2 dan persyaratan kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) sebesar 12% sebagai kondisi subordinasi.

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Subordinated Loan Agreement - The World Bank (continued)

The World Bank II

On September 26, 2017, the Company and SMI had signed a second Subordinated Loan Agreement for the amount of USD200,000,000. The loan can be drawn in Rupiah currency with a total facility amount in the equivalent amounting up to USD200,000,000. The exchange rate risk for this loan is borne by the Government of the Republic of Indonesia. The loan will mature on October 1, 2036 and has a closing date until February 28, 2022.

The purpose of the loan was to finance infrastructure projects in Indonesia.

Subordinated Loan Agreement - ADB

On April 20, 2011, the Company and SMI had signed ADB - Subordinated Loan Agreement and subsequently on April 25, 2011, ADB had issued a letter confirming the fulfillment of the conditions precedent to effectiveness of the Loan Agreement dated January 20, 2010 between the Government of the Republic of Indonesia and ADB in the amount of USD100,000,000. Furthermore, ADB declared that all conditions to the effectiveness of the loan had been met and declare that the loan was effective on April 25, 2011.

On March 29, 2012, the Company has submitted a letter to SMI regarding adjustment on currency and interest structure for on-lending from ADB.

On October 3, 2012, the Minister of Finance through letter No. S-729/MK.05/2012 to SMI has approved the adjustment on currency and interest structure.

On November 28, 2012, the Company and SMI had signed the Amendment Agreement to Subordinated Loan Agreement dated April 20, 2011, which revised several articles in the previous agreement, amongst others, the change in the interest rate of the loan and requirements of current ratio of 1.2 and capital adequacy ratio of 12% as subordination condition.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman Subordinasi - ADB
(lanjutan)

Berkaitan dengan perjanjian ini, Perusahaan mengikatkan diri dalam Perjanjian Proyek dengan ADB dan SMI.

Dalam Perjanjian Proyek, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan berikut, di antaranya:

- i. Untuk menjalankan aktivitas pembiayaannya dengan *due diligence* dan efisien serta melakukan praktek administrasi, keuangan, teknik dan lingkungan yang baik.
- ii. Praktek pengadaan yang sesuai dengan Penuntun Pengadaan ADB.
- iii. Rencana, spesifikasi, jadwal, dan metode konstruksi yang sesuai dengan praktek terbaik internasional.
- iv. Meyakinkan bahwa tujuan dari pinjaman akan tercapai.

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham secara bulat menyetujui Perusahaan untuk menandatangani bersama SMI, Perjanjian Perubahan terhadap masing-masing Perjanjian Pinjaman Subordinasi dengan ADB dan WB yang berlaku efektif tanggal 30 November 2012.

Berdasarkan surat No. S-13/PU/2014 tertanggal 7 Januari 2014 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Perusahaan memperoleh persetujuan dari ADB berkaitan dengan perpanjangan batas waktu penarikan (*closing date*) pinjaman ADB dari semula tanggal 31 Desember 2013 menjadi tanggal 31 Desember 2014.

Perjanjian Para Pendiri

Pada tanggal 30 Juni 2009, seluruh pemegang saham pendiri Perusahaan melakukan perjanjian mengenai pendirian Perusahaan.

- a. Para pemegang saham pendiri bermaksud untuk menjadikan Perusahaan sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur berbadan hukum perseroan terbatas yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia.
- b. Para pemegang saham pendiri bermaksud supaya Perusahaan mempunyai modal dasar sebesar Rp400.000 dengan modal awal yang ditempatkan sebesar Rp100.000 dengan para pemegang saham yang disebut penyertaan awal.

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)

Subordinated Loan Agreement - ADB
(continued)

In relation to this agreement, the Company has entered into Project Agreement with ADB and SMI.

In the Project Agreement, the Company must fulfill the following requirements, amongst others:

- i. Carry out its financing activities with due diligence and efficiency, in accordance with sound administrative, financial, engineering and environmental practices.*
- ii. The procurement is in accordance with ADB's Procurement Guidelines.*
- iii. Plans, specifications, work schedules and construction methods that meet international best practice.*
- iv. Ensure that the purposes of the loan will be accomplished.*

Based on Deed No. 7 dated December 13, 2012, of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., notary in Jakarta, the shareholders unanimously approved the Company together with SMI to execute the Amendment of each ADB and WB Subordinated Loan Agreements, respectively, effective on November 30, 2012.

Based on letter No. S-13/PU/2014 dated January 7, 2014 from Directorate General Loan Management of Ministry of Finance, the Company had obtained approval from ADB regarding the extension of closing date of ADB subordinated loan from December 31, 2013 to December 31, 2014.

The Founders Agreement

On June 30, 2009, all of the Company's founding shareholders entered into an agreement related to the Company's establishment.

- a. The founding shareholders wished to establish the Company as an infrastructure finance company in the form of a limited liability company under the laws of the Republic of Indonesia.*
- b. It is the founding shareholders' intention that the Company shall have an authorized share capital amounting to Rp400,000, and an initial issued share capital amounting to Rp100,000 with the shareholders, known as initial subscription.*

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Para Pemegang Saham Awal

Perusahaan bersama-sama dengan para pemegang saham pendiri melakukan perjanjian ini pada 15 Januari 2010.

Para Pemegang Saham Pendiri bermaksud bahwa:

- a. SMI melakukan investasi dalam Perusahaan untuk sejumlah Rp600.000 (jumlah mana termasuk penyeteroran bagian awal SMI). Sebagai bagian dari komitmen SMI di atas, pada tanggal pengambilan bagian, SMI akan memberikan suatu pinjaman subordinasi yang dapat dikonversi ("CSL") kepada Perusahaan dalam jumlah Rp559.700.
- b. Setelah pengambilan bagian awal, (i) ADB dan IFC berkomitmen untuk melakukan pengambilan bagian tambahan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam *Founders Agreement* dan perjanjian ini, yang jumlahnya bersama dengan pengambilan bagian awal mereka masing-masing akan berjumlah, dalam hal IFC sampai dengan USD40.000.000 dan dalam hal ADB, sampai dengan USD40.000.000 dan (ii) DEG bermaksud untuk melakukan pengambilan bagian tambahan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari *Founders Agreement* dan perjanjian ini, yang jumlahnya bersama dengan pengambilan bagian awalnya, akan berjumlah sampai dengan USD20.000.000.

Para pemegang saham pendiri bermaksud agar para investor swasta dapat mengambil bagian dan/atau membeli saham antara tanggal perjanjian ini dan ulang tahun kelima perjanjian ini sampai dengan batas empat puluh lima persen (45%) dari jumlah seluruh modal saham yang dikeluarkan Perusahaan, dengan ketentuan bahwa batas tersebut tidak berlaku setelah Penawaran Saham Perdana. Para Pemegang Saham mengetahui bahwa pasal 11 dari Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 Tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ("Peraturan Menkeu") mensyaratkan Perusahaan yang akan didirikan berdasarkan Peraturan Menkeu tersebut ("Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur"), (i) modal disetor untuk pendirian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sedikitnya Rp100.000 dan (ii) perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib meningkatkan modal disetornya sedikitnya Rp2.000.000 dalam waktu 5 tahun sejak dikeluarkannya surat ijin usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tersebut.

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Original Shareholders Agreement

The Company, together with the founding shareholders, entered into this agreement on January 15, 2010.

The Founding Shareholders' intention is that:

- a. SMI made an investment in the Company of Rp600,000 (such amount includes SMI's initial subscription). As part of the above SMI commitment, SMI will, on the Subscription Date, extend a convertible subordinate loan to the Company in an amount of Rp559,700 pursuant to the SMI Convertible Subordinated Loan ("CSL") Agreement.
- b. Subsequent to the initial subscription, (i) ADB and IFC committed to make additional subscription in accordance with the terms and conditions of the Founders' Agreement and this agreement, which together with their respective initial subscriptions would amount, in the case of IFC, to up to USD40,000,000 and in the case of ADB, to up to USD40,000,000 and (ii) DEG intends to make additional subscriptions in accordance with the term and conditions of the Founders Agreement and this agreement, which together with this initial subscription, would amount to up to USD20,000,000.

It is the founding shareholders' intention that private sector investors may subscribe for and/or acquire shares between the date of this agreement and the fifth anniversary of this agreement up to a limit of forty-five percent (45%) of the total issued share capital of the Company, provided that such limits shall not apply following an Initial Public Offering. The Shareholders acknowledge that article 11 of Minister of Finance Regulation No. 100/PMK.010/2009 Regarding Infrastructure Finance Company (the "MOF regulation") requires, with respect to a company to be established thereunder (an "Infrastructure Finance Company"), (i) the paid-up capital for the establishment of such Infrastructure Finance Company to be at least Rp100,000 and (ii) the Infrastructure Finance Company to increase its paid-up capital to become at least Rp2,000,000 within 5 years as of the issuance of its business license.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Para Pemegang Saham Awal
(lanjutan)

Untuk memperjelas pada Perjanjian Para Pendiri atau Perjanjian ini:

- i. DEG tidak memiliki janji atau komitmen untuk mengambil bagian atau membayar lebih dari harga pengambilan bagian awalnya (sebagaimana didefinisikan dalam *Founders Agreement*) (mengacu pada Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua); dan
- ii. Setiap investor supranasional memiliki hak dengan pertimbangannya sendiri untuk memberikan suara setuju atau tidak setuju atas setiap pengeluaran efek baru pada setiap rapat umum sehubungan dengan pengeluaran efek baru tersebut.

Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham

Pada tanggal 20 April 2011, Pemegang Saham Perusahaan menandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang Saham ("CROS") tentang Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham tanggal 15 Januari 2010. Selanjutnya pada tanggal yang sama, Perusahaan telah menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham.

Perubahan dan pernyataan kembali mengakibatkan dihilangkannya sebuah artikel tentang CSL. Perusahaan telah mengembalikan seluruh dana yang terkait dengan CSL yang sejumlah Rp559.700 dalam periode 25 April 2011 sampai 26 April 2011.

Perubahan dan pernyataan kembali juga mengakibatkan pengesampingan permanen terhadap *Put Option*. Perubahan dan pernyataan kembali menyatakan bahwa dengan efek dari awal dalam waktu satu (1) tahun setelah tanggal efektif amandemen pertama dan tanggal dimana Investor Supranasional menjadi pemegang saham Perusahaan, Investor Supranasional akan melepaskan hak-hak mereka secara permanen untuk selama Perjanjian ini berlaku untuk melaksanakan *Put Option* berdasarkan Perjanjian ini. Sehingga tidak akan ada hak lebih untuk *Put* dipertahankan oleh Investor Supranasional satu tahun setelah tanggal 20 April 2011.

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)

The Original Shareholders Agreement
(continued)

For the avoidance of doubt, notwithstanding any other provisions of the Founders' Agreement or this agreement:

- i. *DEG does not have any undertaking or commitment to subscribe and pay more than its initial subscription price (as defined in the Founders Agreement) (refer to Second Amendment of The Shareholders Agreement); and*
- ii. *Each supranational investor has the right in its sole discretion to vote in favour of, or against, any issuance of new securities at any general meeting in connection with such issuance of new securities.*

Amendment and Restatement of The Shareholders Agreement

On April 20, 2011, the Shareholders of the Company signed the Circular Resolutions of Shareholders ("CROS") regarding the Amendment and Restatement of the Shareholders Agreement dated January 15, 2010. Subsequently, on the same date, the Company has signed the Amended and Restated Shareholders Agreement.

The amendment and restatement resulted in the omission of an article regarding CSL. The Company has returned to SMI the entire amount related to CSL totaling Rp559,700 during the period of April 25, 2011 to April 26, 2011.

The amendment and restatement also resulted in Permanent Waiver of the Put Option. The amendment and restatement stated that with effect from the earlier of the date falling one (1) year after the first amendment effective date and the date on which a Private Sector Investor becomes a shareholder of the Company, the Supranational Investors shall waive their rights, on a permanent basis for so long as this Agreement is in effect, to exercise the Put Option under this Agreement. So that there will be no more right for Put retained by the Supranational Investor one year after April 20, 2011.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua

Pada tanggal 16 November 2011, para Pemegang Saham Perusahaan menandatangani Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua. Selanjutnya pada tanggal yang sama, Perusahaan telah menandatangani Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua. Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua mengakibatkan DEG untuk berkomitmen untuk melakukan pengambilan bagian dalam saham Perusahaan yang bersama-sama dengan modal awal yang disetor menjadi sebesar Rp200.000.

Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham Ketiga

Pada tanggal 19 Maret 2012, Pemegang Saham Pendiri Perusahaan menandatangani Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Ketiga ("Perjanjian Perubahan Ketiga") terhadap Perjanjian Pemegang Saham Awal tanggal 15 Januari 2010, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 25 April 2011 dan sebagaimana diubah pada tanggal 16 November 2011. Perjanjian Perubahan Ketiga ini memutuskan hal-hal berikut:

- mengubah dan menyatakan kembali Perjanjian Pemegang Saham Awal.
- menyatakan bahwa Perjanjian Para Pendiri diakhiri.

Perjanjian Pemesanan Saham

Pada tanggal 19 Maret 2012, Perusahaan dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") menandatangani Perjanjian Pemesanan Saham dimana SMBC sebagai pemesan saham telah setuju untuk mengambil bagian sebanyak 175.000 lembar atau mewakili 14,89% dari saham Perusahaan, mewakili dengan harga sebesar Rp192.500 termasuk agio saham sebesar Rp17.500. SMBC telah menyetorkan pemesanan saham tersebut pada tanggal 26 Maret 2012.

Akta Penundukkan

Pada tanggal 26 Maret 2012, Perusahaan dan SMBC menandatangani Akta Penundukkan dimana SMBC sebagai pemegang saham yang baru berjanji kepada Perusahaan sebagai *trustee* untuk pihak-pihak lain yang pada saat ini atau yang setelah ini menjadi terikat pada Perjanjian Pemegang Saham dan kepada Perusahaan sendiri untuk menundukkan diri dan terikat terhadap semua tugas, beban dan kewajiban para Pemegang Saham berdasarkan ketentuan Perjanjian Pemegang Saham.

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Second Amendment of The Shareholders Agreement

On November 16, 2011, the Shareholders of the Company signed the Second Amendment of The Shareholders Agreement. Subsequently, on the same date, the Company has signed the Second Amended Shareholders Agreement. The Second Amendment of The Shareholders Agreement resulted to the commitment of DEG to make additional subscription of the Company's share, which together with its initial subscription, would amount to Rp200,000.

Third Amendment and Restatement of The Shareholders Agreement

On March 19, 2012, the Founding Shareholders of the Company signed the Third Amendment and Restatement of the Shareholders Agreement (the "Third Amendment Agreement") to the Original Shareholders Agreement dated January 15, 2010, as amended and restated on April 25, 2011 and November 16, 2011. The Third Amendment Agreement resulted the following decisions:

- amended and restated the Original Shareholders Agreement.
- stated that the Founders Agreement shall be terminated.

Share Subscription Agreement

On March 19, 2012, the Company and Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") signed a Share Subscription Agreement wherein SMBC as the share subscriber has agreed to subscribe 175,000 shares, representing 14.89% of the total issued shares of the Company at the price of Rp192,500 which included an additional paid-up capital premium of Rp17,500. SMBC has fully paid the shares subscription on March 26, 2012.

Deed of Adherence

On March 26, 2012, the Company and SMBC signed Deed of Adherence where SMBC as the new shareholder covenants to the Company as trustee for all other persons who are at present or who may hereafter become bound by the Shareholders Agreement, and to the Company itself to adhere to and be bound by all the duties, burdens and obligations of a Shareholder imposed pursuant to the provisions of the Shareholders Agreement.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Polis Asuransi

Perusahaan telah memperoleh polis asuransi jenis *Bankers Blanket Bond, Comprehensive General Liability, Property All Risk* termasuk *Gempa Bumi* dan *Directors and Officers Liability* yang mencakup periode sampai 31 Mei 2021 dan dapat diperpanjang kembali.

Perjanjian Garansi Kredit - UPC Sidrap

Pada tanggal 15 Maret 2018, Perusahaan bersama dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan PT UPC Sidrap Bayu Energi ("Sidrap") menandatangani perjanjian garansi kredit dimana Perusahaan akan menjamin kredit yang diberikan oleh Overseas Private Investment Corporation ("OPIC") kepada Sidrap dengan nilai sampai dengan USD20.000.000. Perjanjian ini memiliki periode garansi hingga 15 Juli 2033. Per 31 Desember 2019 Perusahaan telah memberikan garansi kredit sebesar USD19.368.063. Pada 15 Januari 2020, perjanjian garansi kredit Sidrap berubah menjadi pinjaman diberikan.

Perjanjian Garansi Obligasi yang Diterbitkan - Bali Towerindo Sentra

Pada tanggal 25 Oktober 2019, Perusahaan bersama PT Bali Towerindo Sentra Tbk ("BTS") menandatangani perjanjian garansi obligasi yang diterbitkan dimana Perusahaan akan menjamin 50% dari jumlah pokok obligasi yang diterbitkan atau maksimum Rp800.000 dari pokok obligasi yang diterbitkan senilai Rp1.600.000. Pada saat penerbitan garansi, Perusahaan setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada BTS untuk pembayaran kewajiban obligasi sampai dengan jumlah maksimum garansi. Perjanjian ini memiliki periode garansi hingga 25 Januari 2025. Pada tanggal 25 Juni 2020, obligasi telah efektif terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah memberikan garansi kredit sebesar Rp277.000.

32. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Insurance Policy

The Company has acquired insurance policy for *Bankers Blanket Bond, Comprehensive General Liability, Property All Risk* including *Earthquake and Directors and Officers Liability* covering the period until May 31, 2021 which can be extended.

Credit Guarantee Agreement - UPC Sidrap

On March 15, 2018, the Company together with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia and PT UPC Sidrap Bayu Energi ("Sidrap") signed credit guarantee agreement where the Company will guarantee the credit provided by Overseas Private Investment Corporation ("OPIC") to Sidrap with total amount of up to USD20,000,000. This agreement has guarantee period until July 15, 2033. As of December 31, 2019 the Company provides credit guarantee amounting to USD19,368,063. On January 15, 2020, the Sidrap credit guarantee agreement was changed to loan agreement.

Bonds Issuance Guarantee Agreement - Bali Towerindo Sentra

On October 25, 2019, the Company together with PT Bali Towerindo Sentra Tbk ("BTS") signed bond issuance guarantee of 50% from total outstanding of bonds issued or maximum Rp800,000 from outstanding bonds issued amounting to Rp1,600,000. On the issuance of guarantee, the Company agrees to provide loan facility to BTS for payment of bond obligations up to the maximum amount of the guarantee. This agreement has guarantee period until January 25, 2025. As of June 25, 2020, the bonds have effectively been registered in Indonesia Stock Exchange. As of December 31, 2020, the Company provides credit guarantee amounting to Rp277,000.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

33. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori dan kelas instrumen keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

33. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below show the categories and classes of financial instruments as of December 31, 2020 and 2019:

31 Desember/December 31, 2020

	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi/Asset at fair value through profit or loss	Aset pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/Asset at fair value through other comprehensive income	Aset pada biaya perolehan diamortisasi/Assets at amortized costs	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/Liabilities at amortized costs	Liabilitas pada nilai wajar/Liabilities at fair value	Total	
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas - neto	-	-	2.057.059	-	-	2.057.059	Cash and cash equivalents - net
Efek-efek - neto	-	1.104.882	1.365.166	-	-	2.470.048	Securities - net
Investasi saham	-	396.720	-	-	-	396.720	Equity investments
Pinjaman diberikan - neto	-	-	9.197.486	-	-	9.197.486	Loans - net
Piutang bunga	-	-	86.840	-	-	86.840	Accrued interest income
Tagihan derivatif	-	69.265	-	-	-	69.265	Derivative receivables
Aset lain-lain - neto*)	-	-	9.475	-	-	9.475	Other assets - net *)
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang lain-lain	-	-	-	(5.897)	-	(5.897)	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	-	(72.409)	-	(72.409)	Accrued expenses and other liabilities
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	(117.200)	(117.200)	Derivative liabilities
Surat utang yang diterbitkan	-	-	-	(2.735.233)	-	(2.735.233)	Debt securities issued
Pinjaman diterima	-	-	-	(5.378.793)	-	(5.378.793)	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	-	-	-	(4.157.322)	-	(4.157.322)	Subordinated loans
	-	1.570.867	12.716.026	(12.349.654)	(117.200)	1.820.039	

31 Desember/December 31, 2019

	Pinjaman yang diberikan dan piutang/Loan and receivables	Aset dimiliki hingga jatuh tempo/Assets held-to-maturity	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi/Assets at fair value through profit or loss	Aset tersedia untuk dijual/Assets available-for-sale	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/Liabilities at amortized costs	Liabilitas pada nilai wajar/Liabilities at fair value	Total	
Aset keuangan								Financial assets
Kas dan setara kas	2.429.067	-	-	-	-	-	2.429.067	Cash and cash equivalents
Efek-efek	259.706	2.195.320	-	277.910	-	-	2.732.936	Securities
Investasi saham	-	-	389.636	-	-	-	389.636	Equity investment
Pinjaman diberikan - neto	6.232.662	-	-	-	-	-	6.232.662	Loans - net
Piutang bunga	62.905	-	-	-	-	-	62.905	Accrued interest income
Tagihan derivatif	-	-	44.290	-	-	-	44.290	Derivative receivable
Aset lain-lain - neto*)	12.737	-	-	-	-	-	12.737	Other assets - net*)
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Utang lain-lain	-	-	-	-	(8.728)	-	(8.728)	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	-	-	(37.985)	-	(37.985)	Accrued expenses and other liabilities
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	(39.670)	(39.670)	Derivative liabilities
Surat utang yang diterbitkan	-	-	-	-	(2.183.064)	-	(2.183.064)	Debt securities issued
Pinjaman diterima	-	-	-	-	(4.713.745)	-	(4.713.745)	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	-	-	-	-	(3.142.918)	-	(3.142.918)	Subordinated loans
	8.997.077	2.195.320	433.926	277.910	(10.086.440)	(39.670)	1.778.123	

*) Aset lain-lain selain perangkat lunak komputer/Other assets exclude of computer softwares

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL**

Perusahaan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelola berbagai risiko yang timbul dari aktivitas usahanya. Perusahaan juga mengadopsi suatu konsep manajemen risiko perusahaan secara menyeluruh dengan parameter risiko yang terintegrasi yang meliputi antara lain manajemen risiko keuangan dan modal.

Pengawasan aktif atas aktivitas manajemen risiko Perusahaan dilaksanakan melalui beberapa Komite, dimana Komite Eksekutif di bawah pengawasan Direksi terdiri atas Komite Manajemen Risiko ("RMC"), Komite Aset dan Liabilitas ("ALCO") dan Dewan Direksi - Komite Investasi ("BoD-IC").

RMC adalah komite yang secara langsung berkaitan dengan manajemen atas risiko-risiko, yang membahas dan merekomendasikan kebijakan dan prosedur termasuk pemantauan profil risiko dan mengawasi risiko Perusahaan secara keseluruhan. ALCO merupakan komite yang terkait dengan manajemen risiko dalam penentuan keputusan strategi manajemen atas aset dan liabilitas, penentuan suku bunga dan likuiditas, serta aspek lainnya dalam rangka manajemen atas aset dan liabilitas Perusahaan. BoD-IC merupakan komite yang memantau, menganalisis dan menghitung risiko kredit terkait dengan kegiatan investasi Perusahaan.

a. Manajemen risiko modal

Perusahaan mengelola tingkat permodalan untuk memastikan kemampuannya untuk melanjutkan keberlangsungan operasi. Struktur modal Perusahaan yang dicatat dalam ekuitas pemegang saham terdiri dari modal ditempatkan dan disetor (Catatan 21), tambahan modal disetor (Catatan 22), penghasilan komprehensif lain dan saldo laba. Sebagian besar modal Perusahaan saat ini ditempatkan dalam bentuk kas dan setara kas (Catatan 5), efek-efek (Catatan 6), investasi saham (Catatan 8) dan pinjaman diberikan (Catatan 9).

Modal disetor dalam rangka pendirian perusahaan pembiayaan infrastruktur ditetapkan paling sedikit sebesar Rp100.000. Perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp2.000.000 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin usaha. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi persyaratan modal minimum.

**34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT**

The Company takes proactive measures to manage various risks that arise from its business activities. The Company also adopts an enterprise risk management concept with integrated risk parameters involving among others financial risk and capital risk management.

Active supervision on the Company's risk management activities are implemented through Committees of which the Executive Committee under the supervision of the Board of Directors consists of Risk Management Committee ("RMC"), Asset & Liabilities Committee ("ALCO") and Board of Directors - Investment Committee ("BoD-IC").

RMC is the committee directly related to the management of risks, which discusses and recommends policies and procedures as well as monitoring risk profile and managing the entire risks of the Company. ALCO is the risk management committee that is related with the decision making of asset and liabilities management strategy, designation of interest rate and liquidity, along with other aspects related to the management of the Company's assets and liabilities. BoD-IC is the committee that oversees, analyze and quantify credit risk exposure arising from the Company's investment activities.

a. Capital risk management

The Company manages capital level to ensure that it will be able to continue as going concern. The Company's capital structure recorded as shareholders' equity consists of capital stock (Note 21), additional paid-in capital (Note 22), other comprehensive income and retained earnings. The capital of the Company is mainly placed in form of cash and cash equivalents (Note 5), securities (Note 6), equity investments (Note 8) and loans (Note 9).

Paid-up capital for the establishment of infrastructure financing company is set at least in the amount of Rp100,000. Infrastructure financing company shall increase its paid-up capital to at least Rp2,000,000 within 5 (five) years since the issuance of the business license. As of December 31, 2020 and 2019, the Company has fulfilled the minimum capital requirement.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)**

**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan**

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat suku bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman tertentu yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Komite Pengawasan Risiko ("ROC") untuk pedoman yang khusus terkait dengan risiko.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan terekspos terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama dikarenakan sumber dana Perusahaan yang berdenominasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berupa pinjaman subordinasi dan pinjaman komersil, dan juga dalam lingkup lebih kecil terkait dengan beberapa transaksi atas pendapatan dan beban usahanya yang didenominasi dalam mata uang asing.

Perusahaan mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan menjaga, sebisa mungkin, keseimbangan komposisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing. Posisi mata uang asing bersih dikelola pada tingkat yang rendah bila dibandingkan dengan struktur permodalan Perusahaan. Jumlah eksposur mata uang asing bersih Perusahaan pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 31.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Perusahaan terutama terekspos terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat.

Perusahaan melakukan analisis sensitivitas Perusahaan terhadap peningkatan dan penurunan 10% dalam Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan, dimana 10% adalah tingkat sensitivitas yang digunakan dalam pelaporan internal mengenai risiko mata uang asing dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar mata uang asing.

**34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)**

**b. Financial risk management objectives and
policies**

The Company's overall financial risk management and policies seek to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of its business, as well as for managing its exposure to foreign exchange risk, interest rate risk, credit and liquidity risks. The Company operates within defined guidelines that are approved by the Board of Commissioners and Risk Oversight Committee ("ROC") for risk specific guidance.

i. Foreign currency risk management

The Company is exposed to foreign currency exchange rate fluctuation mainly due to the Company's funds which are denominated in United States Dollar from subordinated loan and commercial loan, and to a smaller extent from some of its foreign currency denominated transactions on its revenues and operating expenses.

The Company manages the foreign currency exposure by maintaining, as far as possible, balanced composition between financial assets and liabilities in foreign currency. The net open foreign currency position is managed at a low level compared to the Company's capital. The Company's net open foreign currency exposure as of reporting date is disclosed in Note 31.

Foreign currency sensitivity analysis

The Company is mainly exposed to the United States Dollar currency.

The Company conducted an analysis of the Company's sensitivity to a 10% increase and decrease in the Rupiah against the relevant foreign currencies, of which the 10% is the sensitivity rate used for internal reporting on foreign currency risk and represents management's assessment of the plausible change in foreign exchange rates.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Manajemen risiko mata uang asing
(lanjutan)

Analisis sensitivitas mata uang asing
(lanjutan)

Analisis sensitivitas hanya mencakup item mata uang asing moneter yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode untuk perubahan 10% dalam nilai tukar mata uang asing. Analisis sensitivitas terutama meliputi pinjaman diberikan yang diberikan Perusahaan kepada nasabah dan pinjaman eksternal yang didapatkan oleh Perusahaan dimana denominasi investasi adalah dalam mata uang selain mata uang fungsional dari pemberi pinjaman atau peminjam.

Jumlah positif di bawah ini menunjukkan peningkatan laba atau ekuitas dimana Rupiah menguat 10% terhadap mata uang yang relevan. Untuk pelemahan 10% dari Rupiah terhadap mata uang yang relevan, akan ada dampak berbanding terbalik pada laba atau ekuitas, sehingga saldo di bawah ini akan menjadi negatif (tidak diaudit).

	31 Desember/ December 31, 2020
Laba rugi	+/(11.146)
Ekuitas	+/(11.146)

Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur terhadap saldo aset dan liabilitas Perusahaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada akhir periode pelaporan.

Menurut pendapat manajemen, analisis sensitivitas bukan sepenuhnya representasi dari risiko valuta asing yang melekat, karena eksposur pada akhir periode pelaporan tidak mencerminkan eksposur selama tahun berjalan.

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

i. Foreign currency risk management
(continued)

Foreign currency sensitivity analysis
(continued)

The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a 10% change in foreign currency rates. The sensitivity analysis mainly includes loans disbursed by the Company to customers and external borrowings obtained by the Company where the denomination of the Company's investment is in a currency other than the functional currency of the lender or the borrower.

A positive number below indicates an increase in profit or equity where the Rupiah strengthens 10% against the relevant currency. For a 10% weakening of the Rupiah against the relevant currency, there would be an inverse impact on the profit or equity, thus the balances below would be negative (unaudited).

31 Desember/ December 31, 2019

+/(10.422)	<i>Profit or loss</i>
+/(10.422)	<i>Equity</i>

This is mainly attributable to the exposure outstanding on United States Dollar denominated assets and liabilities in the Company at the end of the reporting period.

In management's opinion, the sensitivity analysis is not a full representation of the inherent foreign exchange risk, because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the year.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

- b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

ii. Risiko harga lain

Perusahaan terekspos terhadap risiko fluktuasi harga pasar efek-efek dan investasi saham yang diklasifikasi pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL") dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

Analisis sensitivitas harga efek-efek dan investasi saham

Analisis sensitivitas berikut ditentukan berdasarkan eksposur terhadap risiko nilai wajar efek-efek dan investasi saham pada akhir periode pelaporan.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan jika nilai wajar efek-efek dan investasi saham naik/turun 2%, maka (tidak diaudit):

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Investasi saham	+/-7.934	+/-7.793
Keuntungan/kerugian dari perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	+/-22.098	+/-5.558

iii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Perusahaan terekspos terhadap dampak perubahan tingkat bunga terutama karena adanya dampak perubahan terhadap pinjaman yang mempunyai tingkat bunga mengambang, serta pinjaman yang diberikan maupun aktivitas investasi atas kelebihan dana yang tersedia (*idle funds*) akibat perubahan bunga di pasar.

Sedapat mungkin Perusahaan menyesuaikan bunga yang diberikan untuk pinjaman (baik tetap ataupun mengambang) dengan bunga sumber pembiayaannya. Sedangkan untuk investasi atas kelebihan dana yang tersedia (*idle funds*), risiko tingkat bunga dikelola melalui pemantauan terhadap limit durasi secara portofolio yang dilakukan berkala.

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

- b. Financial risk management objectives and policies (continued)

ii. Other price risks

The Company is exposed to risk of fluctuation in quoted price of securities and equity investment classified at fair value through profit or loss ("FVTPL") and fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

Sensitivity analysis of securities and equity investments prices

The sensitivity analysis below have been determined based on the exposure to securities and equity investments fair value risks at the end of the reporting period.

The table below summarizes if securities and equity investments fair value had been 2% higher/lower, hence (unaudited):

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Investasi saham	+/-7.934	+/-7.793
Keuntungan/kerugian dari perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	+/-22.098	+/-5.558

iii. Interest rate risk management

The Company is exposed to changes in interest rates mainly due to the impact such changes may have on borrowings that carry floating interest rate, and loans as well as investment activity of idle funds, as a result of changes in market interest rate.

As much as practicable, the Company matches the interest rate for loans it extended (whether floating or fixed) with that of the funding source. Whereas for investment in idle funds, the interest rate risk is managed through periodical monitoring against the duration limit on portfolio basis.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Manajemen risiko tingkat suku bunga
(lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan
eksposur Perusahaan terhadap risiko
tingkat bunga:

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

iii. Interest rate risk management
(continued)

The table below summarizes the
Company's exposures to interest rate risk:

31 Desember/December 31, 2020

	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate			Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total	
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ More than 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year				
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas - neto	2.057.054	-	-	-	5	2.057.059	Cash and cash equivalents - net
Efek-efek - neto	-	-	-	2.470.048	-	2.470.048	Securities - net
Investasi saham	-	-	-	-	396.720	396.720	Equity investments
Pinjaman diberikan - neto	196.937	288.821	6.141.191	2.570.537	-	9.197.486	Loans - net
Piutang bunga	-	-	-	-	86.840	86.840	Accrued interest income
Tagihan derivatif	-	-	-	-	69.265	69.265	Derivative receivables
Aset lain-lain - neto	-	-	-	-	9.475	9.475	Other assets - net
Total aset keuangan	2.253.991	288.821	6.141.191	5.040.585	562.305	14.286.893	Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang lain-lain	-	-	-	-	5.897	5.897	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	-	-	72.409	72.409	Accrued expenses and other liabilities
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	117.200	117.200	Derivative liabilities
Surat utang yang diterbitkan	-	-	-	2.735.233	-	2.735.233	Debt securities issued
Pinjaman diterima	5.768	1.661.263	3.711.762	-	-	5.378.793	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	62.953	96.628	3.997.741	-	-	4.157.322	Subordinated loans
Total liabilitas keuangan	68.721	1.757.891	7.709.503	2.735.233	195.506	12.466.854	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga	2.185.270	(1.469.070)	(1.568.312)	2.305.352	366.799	1.820.039	Net interest repricing gap

31 Desember/December 31, 2019

	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate			Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total	
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ More than 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year				
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas	2.429.062	-	-	-	5	2.429.067	Cash and cash equivalents
Efek-efek	-	-	-	2.732.936	-	2.732.936	Securities
Investasi saham	-	-	-	-	389.636	389.636	Equity investments
Pinjaman diberikan - neto	114.645	536.444	3.731.479	1.850.094	-	6.232.662	Loans - net
Piutang bunga	-	-	-	-	62.905	62.905	Accrued interest income
Tagihan derivatif	-	-	-	-	44.290	44.290	Derivative receivables
Aset lain-lain - neto	-	-	-	-	12.737	12.737	Other assets - net
Total aset keuangan	2.543.707	536.444	3.731.479	4.583.030	509.573	11.904.233	Total financial assets

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Manajemen risiko tingkat suku bunga
(lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan
eksposur Perusahaan terhadap risiko
tingkat bunga (lanjutan):

31 Desember/December 31, 2019						
Suku bunga mengambang/ Floating interest rate			Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total	
Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ More than 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year				
Utang lain-lain	-	-	-	8.728	8.728	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	-	37.985	37.985	Accrued expenses and other liabilities
Liabilitas derivatif	-	-	-	39.670	39.670	Derivative liabilities
Surat utang yang diterbitkan	-	-	2.183.064	-	2.183.064	Debt securities issued
Pinjaman diterima	7.874	1.489.168	3.216.703	-	4.713.745	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	52.469	93.538	2.996.911	-	3.142.918	Subordinated loans
Total liabilitas keuangan	60.343	1.582.706	6.213.614	2.183.064	10.126.110	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga	2.483.364	(1.046.262)	(2.482.135)	2.399.966	423.190	Net interest repricing gap

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah
ditentukan berdasarkan eksposur suku
bunga untuk instrumen non-derivatif pada
akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas
tingkat bunga mengambang, analisis
tersebut disusun dengan asumsi jumlah
liabilitas terutang pada akhir periode
pelaporan itu terutang sepanjang tahun.
Kenaikan atau penurunan 50 basis poin
digunakan ketika melaporkan risiko suku
bunga secara internal kepada manajemen
dan merupakan penilaian manajemen
terhadap perubahan yang mungkin terjadi
pada suku bunga.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan jika
suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis
poin dan semua variabel lainnya tetap
konstan, maka (tidak diaudit):

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

b. Financial risk management objectives and
policies (continued)

iii. Interest rate risk management
(continued)

The table below summarizes the
Company's exposures to interest rate risk
(continued):

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analysis below have been
determined based on the exposure to
interest rates for non-derivative
instruments at the end of the reporting
period. For floating rate liabilities, the
analysis is prepared using assumption that
the balance of the liability at the end of the
reporting period as the amount that was
outstanding for the whole year. A 50 basis
point increase or decrease is used when
reporting interest rate risk internally to
management and represents
management's assessment of the
plausible change in interest rates.

The table below summarizes if interest
rates had been 50 basis points
higher/lower and all other variables were
held constant, hence (unaudited):

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Manajemen risiko tingkat suku bunga
(lanjutan)

Analisis sensitivitas suku bunga (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2020
Pendapatan dan beban bunga	+/-7.266
Keuntungan/kerugian dari perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	+/-244.463

iv. Manajemen risiko kredit

Eksposur risiko kredit utama Perusahaan melekat pada dana tunai di rekening bank, penempatan pada efek-efek, serta pinjaman yang diberikan kepada debitur.

Risiko kredit mengacu pada risiko kegagalan pihak rekanan dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan. Dalam mengelola dan mengurangi risiko kredit atas pinjaman yang diberikan, keputusan untuk memberikan kredit kepada debitur/perusahaan proyek dilakukan melalui proses kredit yang ekstensif yang membutuhkan penilaian, evaluasi dan persetujuan dari Komite Investasi dari Direksi maupun Dewan Komisaris.

Untuk aktivitas investasi atas kelebihan dana yang tersedia (*idle funds*), Perusahaan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan konservatif dimana Perusahaan hanya melakukan penempatan pada efek-efek dengan *underlying investment* yang mendapatkan peringkat kredit eksternal yang layak.

Berkaitan dengan penempatan dana tunai di rekening bank, Perusahaan hanya menempatkan dananya pada institusi keuangan yang memiliki peringkat kredit eksternal yang layak. Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

iii. Interest rate risk management
(continued)

Interest rate sensitivity analysis
(continued)

	31 Desember/ December 31, 2019	
	+/-6.775	Interest income and expense
	+/-4.399	Gains/losses from changes in fair value securities classified as fair value through other comprehensive income

iv. Credit risk management

The Company's main credit risk exposure is attributed to its cash in banks, placement in securities, and loans to debtors.

Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Company. In order to manage and minimize credit risk of loans, a decision to provide loans to debtors/project companies is made after going through extensive credit process requiring rigorous assessment, evaluation and approval process from Investment Committees of Boards of Directors and Commissioners.

For its investment activity on excess idle funds, the Company always implements prudent and conservative principles where the Company only invests its funds on securities with underlying investment that has acceptable external credit rating.

In relation to funds placement at bank accounts, the Company only places its funds with credit worthy financial institutions that have acceptable external credit rating. The carrying amount of financial assets recorded in the financial statements, net of any allowance for impairment losses best represents the Company's exposure to credit risk.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iv. Manajemen risiko kredit (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2020
Kas dan setara kas	2.057.059
Efek-efek	2.470.048
Investasi saham	396.720
Pinjaman diberikan - neto	9.197.486
Piutang bunga	86.840
Tagihan derivatif	69.265
Aset lain-lain - neto	9.475
	14.286.893

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, eksposur maksimal risiko kredit sebelum agunan yang diterima atau perangkat kredit lain adalah ekuivalen dengan jumlah tercatat aset keuangan Perusahaan. Agunan yang diterima dan peningkatan kredit lain dijelaskan di Catatan 9.

Tidak terdapat aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dapat saling hapus pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Manajemen risiko kredit dalam kondisi pandemi Covid-19

Pemerintah sudah melakukan upaya dalam rangka mempertahankan stabilitas ekonomi ditengah pandemi Covid-19, dengan memperkenalkan kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 yang dirumuskan dalam POJK 14/2020 yang diberlakukan sejak tanggal 20 April 2020 untuk jangka waktu paling lama 12 bulan. Merujuk kepada regulasi tersebut dan mengikuti tata kelola Perusahaan yang baik (GCG), Perusahaan telah menyiapkan parameter dan kriteria dalam suatu kebijakan yang diterapkan kepada debitur yang terdampak Covid-19 dan memerlukan relaksasi kredit melalui restrukturisasi hutang. Pemberian restrukturisasi kredit dilakukan dengan prinsip *four eyes* yang melibatkan unit *investment* dan unit risiko kredit untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan disetujui oleh komite kredit Perusahaan.

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

iv. Credit risk management (continued)

	31 Desember/ December 31, 2019	
	2.429.067	Cash and cash equivalents
	2.732.936	Securities
	389.636	Equity investments
	6.232.662	Loans - net
	62.905	Accrued interest income
	44.290	Derivative receivables
	12.737	Other assets - net
	11.904.233	

As of December 31, 2020 and 2019, the maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements is equivalent to the carrying amounts of the Company's financial assets. The collateral and other credit enhancements are described in Note 9.

There are no financial asset and financial liability subject to offsetting as of December 31, 2020 and 2019.

Credit risk management in the Covid-19 pandemic

The Government has made efforts to maintain economic stability amid the Covid-19 pandemic, by introducing a countercyclical policy on the impact of the spread of Covid-19 as formulated in POJK 14/2020 which was enacted from April 20, 2020 for a maximum period of 12 months. Referring to these regulations and following Good Corporate Governance (GCG), the Company has prepared parameters and criteria in a policy that is applied to debtors who are affected by Covid-19 and require credit relaxation through debt restructuring. The loan restructuring is carried out on the basis of the four eyes principle involving investment units and credit risk units to maintain prudential principles and approved by the Company's Credit Committee.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

- b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iv. Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Manajemen risiko kredit dalam kondisi pandemi Covid-19 (lanjutan)

Perusahaan terus melakukan penilaian kredit yang ketat bagi debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi untuk menghindari risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran atau struktur yang tidak sesuai dengan kinerja debitur. Perusahaan telah menyusun berbagai skema restrukturisasi dengan mekanisme sebagai berikut:

- Pemberian masa tenggang atau penundaan (sebagian) pembayaran bunga dan/atau pokok yang akan dibayarkan saat likuiditas debitur diperkirakan sudah membaik;
- Pemberian perubahan angsuran pembayaran pokok.

Sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19, Perusahaan melakukan sejumlah penyesuaian dan penyempurnaan proses dan mekanisme pemantauan kredit baik terhadap debitur maupun portofolio, penyesuaian ini dilakukan agar hasil pemantauan dapat memberikan peringatan dini dan penetapan mitigasi risiko yang tepat waktu dan menjaga kualitas kredit.

Penyesuaian dan penyempurnaan pemantauan kredit dilakukan dengan cara:

- Menerapkan mekanisme peringatan dini (termasuk daftar pemantauan) atas kenaikan risiko kredit debitur, khususnya yang terdampak oleh Covid-19 dan menyiapkan rencana aksi serta melakukan diskusi dengan manajemen Perusahaan;
- Pemberian kredit terhadap debitur yang terdampak Covid-19 dan melakukan restrukturisasi kredit dengan mengikuti kondisi tertentu;
- Melakukan *stress testing* atas kinerja debitur secara berkala dengan melibatkan aspek pandemi Covid-19;
- Melakukan pembaharuan secara berkala atas informasi dari kewajiban debitur dengan menerapkan mekanisme *four-eye principle*.

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

- b. Financial risk management objectives and policies (continued)

iv. Credit risk management (continued)

Credit risk management in the Covid-19 pandemic (continued)

The Company continues to carry out a rigorous credit assessment for debtors who apply for restructuring to avoid the risk of giving restructuring that is not on target or the structure is not in accordance with the debtor's performance. The Company has prepared various restructuring schemes with the following mechanisms:

- Granting a grace period or postponement of (partial) interest and/or principal payments to be paid when debtor liquidity is estimated to have improved;
- Issuance of changes in principal payment installments.

In connection with the conditions of the Covid-19 pandemic, the Company made a number of adjustments and improvements to the credit monitoring process and mechanism for both debtors and portfolios. These adjustments were made with the hope that monitoring results can provide early warning and determine risk mitigation in a timely manner and maintain credit quality.

Credit adjustment and refinement is carried out by:

- Implementing early warning (including watchlist) on the increase in credit risk of debtors, especially those affected by Covid-19, preparing action plans and holding discussions with company management;
- Providing credit to debtors affected by Covid-19 and restructuring credit by following certain conditions;
- Conduct regular stress test on debtor's performance with involving aspect of Covid-19 pandemic;
- Regular updates on information of debtor's covenant with four-eye principle.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

- b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

v. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas terutama berasal dari potensi ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset keuangan Perusahaan dengan liabilitas keuangannya. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan dana simpanan, memperoleh tambahan fasilitas pinjaman dan dengan terus menerus memonitor arus kas perkiraan dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Perusahaan juga melakukan monitor secara berkala posisi likuiditas terhadap limit.

Untuk mengelola risiko likuiditas jangka pendek, Perusahaan memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkelanjutan.

Profil jatuh tempo dari aset keuangan (tanpa memperhitungkan cadangan kerugian penurunan nilai) dan liabilitas keuangan per tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

- b. Financial risk management objectives and policies (continued)

v. Liquidity risk management

Liquidity risk mainly arises from the potential maturity mismatch between the Company's financial assets and liabilities. The Company manages liquidity risk by maintaining adequate reserve funds, obtaining additional borrowing facilities and by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities. The Company also monitors the liquidity position against limit.

In managing short-term liquidity risk, the Company maintains sufficient funds to finance its ongoing working capital requirements.

The maturities profile of financial assets (without considering the allowance for impairment losses) and financial liabilities as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

31 Desember/December 31, 2020

	0-3 bulan/ 0-3 months	>3-6 bulan/ >3-6 months	>6-12 bulan/ >6-12 months	>1-3 tahun/ >1-3 years	>3-5 tahun/ >3-5 years	>5-10 tahun/ >5-10 years	>10 tahun/ >10 years	Total
Aset keuangan/ Financial assets								
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents	2.057.102	-	-	-	-	-	-	2.057.102
Efek-efek/Securities	242.160	57.295	-	776.155	286.000	470.978	639.662	2.472.250
Investasi saham/Equity investments	-	-	-	396.720	-	-	-	396.720
Pinjaman diberikan/Loans	232.123	96.345	305.140	1.763.414	1.854.033	3.617.490	1.572.830	9.441.375
Piutang bunga/Accrued interest income	86.840	-	-	-	-	-	-	86.840
Tagihan derivatif/ Derivative receivables	-	-	-	69.265	-	-	-	69.265
Aset lain-lain/ Other assets	9.475	-	-	-	-	-	-	9.475
	2.627.700	153.640	305.140	3.005.554	2.140.033	4.088.468	2.212.492	14.533.027

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

v. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

Profil jatuh tempo dari aset keuangan (tanpa memperhitungkan cadangan kerugian penurunan nilai) dan liabilitas keuangan per tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut (lanjutan):

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

v. Liquidity risk management (continued)

The maturities profile of financial assets (without considering the allowance for impairment losses) and financial liabilities as of December 31, 2020 and 2019 are as follows (continued):

31 Desember/December 31, 2020

	0-3 bulan/ 0-3 months	>3-6 bulan/ >3-6 months	>6-12 bulan/ >6-12 months	>1-3 tahun/ >1-3 years	>3-5 tahun/ >3-5 years	>5-10 tahun/ >5-10 years	>10 tahun/ >10 years	Total
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities								
Utang lain-lain/Other payables	5.897	-	-	-	-	-	-	5.897
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain/ Accrued expenses and other liabilities	72.409	-	-	-	-	-	-	72.409
Liabilitas derivatif/ Derivative liabilities	-	-	-	-	48.373	68.827	-	117.200
Surat utang yang diterbitkan/ Debt securities issued	31.132	-	818.729	1.603.245	282.127	-	-	2.735.233
Pinjaman diterima/ Fund borrowings	5.768	-	1.661.263	2.320.932	695.415	695.415	-	5.378.793
Pinjaman subordinasi/ Subordinated loans	62.953	38.247	58.381	254.446	292.580	1.377.750	2.072.965	4.157.322
	178.159	38.247	2.538.373	4.178.623	1.318.495	2.141.992	2.072.965	12.466.854
Selisih jatuh tempo/ Maturity gap	2.449.541	115.393	(2.233.233)	(1.173.069)	821.538	1.946.476	139.527	2.066.173

31 Desember/December 31, 2019

	0-3 bulan/ 0-3 months	>3-6 bulan/ >3-6 months	>6-12 bulan/ >6-12 months	>1-3 tahun/ >1-3 years	>3-5 tahun/ >3-5 years	>5-10 tahun/ >5-10 years	>10 tahun/ >10 years	Total
Aset keuangan/ Financial assets								
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents	2.429.067	-	-	-	-	-	-	2.429.067
Efek-efek/Securities	-	-	250.661	712.013	436.628	694.188	639.446	2.732.936
Investasi saham/Equity investments	-	-	-	-	389.636	-	-	389.636
Pinjaman diberikan/Loans	145.632	150.635	433.496	1.409.767	1.060.484	1.893.585	1.312.612	6.406.211
Piutang bunga/Accrued interest income	62.905	-	-	-	-	-	-	62.905
Tagihan derivatif/ Derivative receivable	-	-	-	-	44.290	-	-	44.290
Aset lain-lain/ Other assets	25.793	-	-	-	-	-	-	25.793
	2.663.397	150.635	684.157	2.121.780	1.931.038	2.587.773	1.952.058	12.090.838

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

v. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

Profil jatuh tempo dari aset keuangan (tanpa memperhitungkan cadangan kerugian penurunan nilai) dan liabilitas keuangan per tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut (lanjutan):

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

v. Liquidity risk management (continued)

The maturities profile of financial assets (without considering the allowance for impairment losses) and financial liabilities as of December 31, 2020 and 2019 are as follows (continued):

31 Desember/December 31, 2019

	0-3 bulan/ 0-3 months	>3-6 bulan/ >3-6 months	>6-12 bulan/ >6-12 months	>1-3 tahun/ >1-3 years	>3-5 tahun/ >3-5 years	>5-10 tahun/ >5-10 years	>10 tahun/ >10 years	Total
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities								
Utang lain-lain/Other payables	8.728	-	-	-	-	-	-	8.728
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain/ Accrued expenses and other liabilities	37.985	-	-	-	-	-	-	37.985
Liabilitas derivatif/ Derivative liabilities	-	-	-	-	17.585	22.085	-	39.670
Surat utang yang diterbitkan/ Debt securities issued	15.858	-	960.914	620.050	586.242	-	-	2.183.064
Pinjaman diterima/ Fund borrowings	7.874	-	1.489.168	1.836.640	690.031	690.032	-	4.713.745
Pinjaman subordinasi/ Subordinated loans	52.469	39.894	53.644	233.631	268.249	1.018.061	1.476.970	3.142.918
	122.914	39.894	2.503.726	2.690.321	1.562.107	1.730.178	1.476.970	10.126.110
Selisih jatuh tempo/ Maturity gap	2.540.483	110.741	(1.819.569)	(568.541)	368.931	857.595	475.088	1.964.728

Sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada *undiscounted cash flow* per tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The remaining contractual maturities of the liabilities based on *undiscounted cashflows* as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

31 Desember/December 31, 2020

	0 - 3 bulan/ months	>3 - 6 bulan/ months	>6 - 12 bulan/ months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	Total	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang lain-lain	5.897	-	-	-	5.897	Other payables
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	72.409	-	-	-	72.409	Accrued expense and other liabilities
Liabilitas derivatif	-	-	-	117.200	117.200	Derivative liabilities
Surat utang yang diterbitkan	79.220	48.088	895.413	2.144.512	3.167.233	Debt securities issued
Pinjaman diterima	87.066	92.493	1.821.473	4.380.702	6.381.734	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	97.068	46.072	130.995	5.869.063	6.143.198	Subordinated loans
Total liabilitas keuangan	341.660	186.653	2.847.881	12.511.477	15.887.671	Total financial liabilities

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

v. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

Sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada *undiscounted cash flow* per tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut (lanjutan):

31 Desember/December 31, 2019

	0 - 3 bulan/ months	>3 - 6 bulan/ months	>6 - 12 bulan/ months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	Total
Liabilitas keuangan					
Utang lain-lain	8.373	-	-	-	8.373
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	30.352	-	-	-	30.352
Liabilitas derivatif	18.150	-	-	-	18.150
Surat utang yang diterbitkan	41.711	41.711	1.048.422	1.440.669	2.572.513
Pinjaman diterima	32.539	45.903	39.012	4.544.961	4.662.415
Pinjaman subordinasi	59.292	43.585	104.735	4.003.565	4.211.177
Total liabilitas keuangan	190.417	131.199	1.192.169	9.989.195	11.502.980

Financial liabilities
Other payables
Accrued expense
and other liabilities
Derivative liabilities
Debt securities
issued
Fund borrowings
Subordinated loans

Total financial liabilities

c. Nilai wajar instrumen keuangan

Manajemen berpendapat bahwa nilai aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan, mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang dicatat berdasarkan tingkat bunga pasar.

Asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan ditetapkan di bawah ini.

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan

Tabel berikut ini memberikan analisis dari instrumen keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang dikelompokkan ke Tingkat 1 sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar diamati.

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasi (tak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

v. Liquidity risk management (continued)

The remaining contractual maturities of the liabilities based on undiscounted cashflows as of December 31, 2020 and 2019 are as follows (continued):

c. Fair value of financial instruments

Management believes that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the financial statements is a close estimation of their fair values, both for those that have short term maturities as well as those that carry at market rates of interest.

The significant assumptions used in determining the fair value of financial assets and liabilities are set out below.

Fair value measurements recognized in the statement of financial position

The following table provides an analysis of financial instruments as of December 31, 2020 and 2019 that grouped into Level 1 to 3 based on the degree to which the fair value is observable.

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

c. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

c. Fair value of financial instruments (continued)

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan
posisi keuangan (lanjutan)

Fair value measurements recognized in the
statement of financial position (continued)

- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya berasal dari harga).
- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (e.g. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

31 Desember/December 31, 2020						
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/Fair value				
		Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Total/ Total	
Aset yang diukur pada nilai wajar						Assets measured at fair value
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain						Fair value through other comprehensive income
Efek-efek	1.104.882	1.104.882	-	-	1.104.882	Securities
Investasi saham	396.720	396.720	-	-	396.720	Equity investments
Tagihan derivatif	69.265	-	69.265	-	69.265	Derivative receivables
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan						Assets for which fair values are disclosed
Biaya perolehan diamortisasi						Amortized cost
Efek-efek	1.367.368	1.473.194	-	-	1.473.194	Securities
	2.938.235	2.974.796	69.265	-	3.044.061	
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar						Liabilities measured at fair value
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain						Fair value through other comprehensive income
Liabilitas derivatif	117.200	-	117.200	-	117.200	Derivative liabilities
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan						Liability for which fair values are disclosed
Biaya perolehan diamortisasi						Amortized cost
Surat utang yang diterbitkan	2.735.233	2.788.414	-	-	2.788.414	Debt securities issued
	2.852.433	2.788.414	117.200	-	2.905.614	

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

c. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

c. Fair value of financial instruments (continued)

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan
posisi keuangan (lanjutan)

Fair value measurements recognized in the
statement of financial position (continued)

31 Desember/December 31, 2019

	Nilai wajar/Fair value					
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Total/ Total	
Aset yang diukur pada nilai wajar						Assets measured at fair value
Aset keuangan tersedia untuk dijual						Financial asset at available-for-sale
Efek-efek	277.910	277.910	-	-	277.910	Securities
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						Financial asset at FVTPL
Investasi saham	389.636	389.636	-	-	389.636	Equity investments
Tagihan derivatif	44.290	-	44.290	-	44.290	Derivative receivable
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan						Assets for which fair values are disclosed
Dimiliki hingga jatuh tempo						Held-to-maturity
Efek-efek	2.195.320	2.224.005	-	-	2.224.005	Securities
	2.907.156	2.891.551	44.290	-	2.935.841	
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar						Liabilities measured at fair value
Liabilitas derivatif	39.670	-	39.670	-	39.670	Derivative liabilities
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan						Liability for which fair values are disclosed
Surat utang yang diterbitkan	2.183.064	2.216.880	-	-	2.216.880	Debt securities issued
	2.222.734	2.216.880	39.670	-	2.256.550	

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tertentu selain efek-efek yang diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi (termasuk sukuk yang diukur biaya perolehan) dan surat utang yang diterbitkan mendekati nilai tercatat, karena instrumen keuangan tersebut memiliki jangka waktu jatuh tempo yang singkat dan memiliki tingkat bunga sesuai pasar. Aset dan liabilitas keuangan tertentu yang tidak diukur pada nilai wajar dimana nilai wajarnya mendekati nilai tercatat, tidak diungkapkan pada tabel di atas.

Fair values of certain financial assets and liabilities other than securities classified as amortized cost (including sukuk at acquisition cost) and debt securities issued approximate their carrying amounts due to short-term maturities of these financial instruments and due to the interest rate is at market rate. Certain financial assets and liabilities not measured at fair value which fair values approximate their carrying amounts, are not disclosed in the aforementioned table.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
(lanjutan)

c. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Nilai wajar dari efek-efek yang diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi (termasuk sukuk yang diukur biaya perolehan) dan surat utang yang diterbitkan ditentukan berdasarkan harga kuotasi pasar yang berlaku pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat aset keuangan atau liabilitas keuangan yang ditransfer dari/ke tingkat 2 dan/atau tingkat 3.

34. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
(continued)

c. Fair value of financial instruments (continued)

The fair value of securities classified as amortized cost (including sukuk at acquisition cost) and debt securities issued is determined on the basis of quoted market price as of December 31, 2020 and 2019.

As of December 31, 2020 and 2019, there is no financial assets and financial liabilities transfer out of or into level 2 and/or level 3.

35. SEGMENT OPERASI

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk. Laba rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama disajikan sebagai berikut:

35. OPERATING SEGMENT

The Company manages its business activities and identifies its reported segments based on product categories. Profit or loss from each segment is used to measure performance of each segment information concerning the main segments as set out as follows:

	31 Desember/December 31, 2020				
	Produk investasi/ Investment products	Produk treasuri/ Treasury products	Jasa advisory/ Advisory services	Total	
Pendapatan bunga	752.808	107.120	-	859.928	Interest income
Pendapatan provisi dan komisi	33.700	-	-	33.700	Provision and commission income
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek	-	7.562	-	7.562	Realized gain on sale of securities
Pendapatan jasa advisory	-	-	9.388	9.388	Advisory income
Pendapatan lainnya	4.681	-	-	4.681	Other income
Beban bunga	(506.770)	(98.575)	-	(605.345)	Interest expense
Beban umum dan administrasi	(29.725)	(39.583)	(10.258)	(79.566)	General and administrative expenses
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(51.730)	992	132	(50.606)	Provision for impairment losses
Beban yang tidak dapat dialokasi - neto	-	-	-	(108.501)	Unallocated expenses - net
Laba/(rugi) sebelum beban pajak	202.964	(22.484)	(738)	71.241	Profit/(loss) before tax expense

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk. Laba rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama disajikan sebagai berikut (lanjutan):

35. OPERATING SEGMENT (continued)

The Company manages its business activities and identifies its reported segments based on product categories. Profit or loss from each segment is used to measure performance of each segments information concerning the main segments as set out as follows (continued):

	31 Desember/December 31, 2019				
	Produk Investasi/ Investment products	Produk Tresuri/ Treasury products	Jasa Advisory/ Advisory services	Total	
Pendapatan bunga	643.994	142.377	-	786.371	Interest income
Pendapatan provisi dan komisi	37.490	-	-	37.490	Provision and commission income
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek-efek	-	4.067	-	4.067	Realized gain on sale of securities
Keuntungan yang direalisasi dari penjualan investasi saham	1.010	-	-	1.010	Realized gain from sale of equity investment
Keuntungan yang direalisasi dari transaksi derivatif	-	5.781	-	5.781	Realized gain from derivative transaction
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar transaksi derivatif	-	8.745	-	8.745	Unrealized gain from changes in fair value of derivative transaction
Keuntungan yang belum direalisasi dari nilai wajar investasi saham	24.795	-	-	24.795	Unrealized gain from the fair value of equity investment
Kerugian belum direalisasi dari nilai wajar opsi saham	(22.655)	-	-	(22.655)	Unrealized loss from the fair value of shares option
Pendapatan jasa advisory	-	-	8.059	8.059	Advisory income
Pendapatan lainnya	728	-	-	728	Other income
Beban bunga	(505.208)	(120.945)	-	(626.153)	Interest expense
Beban umum dan administrasi	(31.945)	(35.647)	(9.176)	(76.768)	General and administrative expenses
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(5.403)	-	358	(5.045)	Provision for impairment losses
Beban yang tidak dapat dialokasi - neto	-	-	-	(114.021)	Unallocated expenses - net
Labal(rugi) sebelum beban pajak	142.806	4.378	(759)	32.404	Profit/(loss) before tax expense

36. LABA PER SAHAM

Berikut adalah perhitungan laba bersih per saham dasar:

36. INCOME PER SHARE

The following presents the computations of basic income per share:

	31 Desember/December 31,			
	Lab bersih tahun berjalan/ Net income for the year	Rata-rata Tertimbang jumlah saham dasar/ Weighted average number of ordinary shares outstanding	Lab per saham/ Income per share (Dalam ribuan Rupiah/In thousands of Rupiah)	Years
Tahun				
2020	42.510	2.000.000	21	2020
2019	15.976	2.000.000	8	2019

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. DAMPAK PENERAPAN AWAL PSAK NO. 71 DAN NO. 73

PSAK No. 71

Klasifikasi dan pengukuran Aset Keuangan

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2.a, Perusahaan menerapkan PSAK No. 71 sejak tanggal 1 Januari 2020. Pengaruh atas perubahan pada kebijakan akuntansi pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Efek-efek dengan nilai tercatat sebesar Rp825.574 tidak memenuhi kriteria model bisnis *hold-to-collect* sehingga direklasifikasi dari aset keuangan yang diukur pada nilai perolehan diamortisasi menjadi *hold-to-collect and sell*.

Perbedaan yang dihasilkan sebesar Rp18.515 (neto setelah pajak) dikreditkan ke saldo awal penghasilan komprehensif lain pada tanggal 1 Januari 2020.

- b. Manajemen memutuskan bahwa investasi saham dengan nilai tercatat sebesar Rp389.636 yang semula diukur pada nilai wajar melalui laba rugi direklasifikasi menjadi diukur nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain

Efek atas perubahan pada klasifikasi dan pengukuran pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

37. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS NO. 71 AND NO. 73

SFAS No. 71

Classification and measurement of Financial Assets

As described in Note 2.a, the Company adopted SFAS No. 71 as of January 1, 2020. The effect of this change in accounting policy on the financial statements are as follows:

- a. Securities with carrying amount of Rp825,574 has failed the criteria of hold-to-collect business model and, therefore, has been reclassified from financial asset measured at amortized cost to hold-to-collect and sell.

The resulting difference of Rp18,515 (net of tax) was credited to the opening balance of other comprehensive income as of January 1, 2020.

- b. Management decided that equity investments amounted to Rp389,636 which was initially measured at fair value through profit or loss would be reclassified as measured at fair value through other comprehensive income.

The effect of changes in classification and measurement as of January 1, 2020 are as follows:

	PSAK/SFAS No. 55		PSAK/SFAS No. 71		
	Klasifikasi/ <i>Classification</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	Klasifikasi/ <i>Classification</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	
Aset keuangan					Financial assets
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>		Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>		
Kas dan setara kas - neto		2.429.067		2.428.868	Cash and cash equivalents - net
	Dimiliki hingga jatuh tempo/ <i>Held-to-maturity</i>		Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>		
Efek-efek - neto		1.392.077		1.386.429	Securities - net
			Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Financial assets at fair value through other comprehensive income</i>		
	Dimiliki hingga jatuh tempo/ <i>Held-to-maturity</i>				
Efek-efek - neto		803.243		825.574	Securities - net

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**37. DAMPAK PENERAPAN AWAL PSAK NO. 71 DAN
NO. 73 (lanjutan)**

PSAK No. 71 (lanjutan)

**Klasifikasi dan pengukuran Aset Keuangan
(lanjutan)**

**37. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS
NO. 71 AND NO. 73 (continued)**

SFAS No. 71 (continued)

**Classification and measurement of Financial
Assets (continued)**

	PSAK/SFAS No. 55		PSAK/SFAS No. 71		
	Klasifikasi/ Classification	Jumlah/ Amount	Klasifikasi/ Classification	Jumlah/ Amount	
Aset keuangan (lanjutan)					Financial assets (continued)
Efek-efek - neto	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	259.706	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	259.706	Securities - net
Efek-efek - neto	Aset tersedia untuk dijual/ Assets available- for-sale	277.910	Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Financial assets at fair value through other comprehensive income	277.910	Securities - net
Investasi saham	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi/ Assets at fair value through profit or loss	389.636	Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Financial assets at fair value through other comprehensive income	389.636	Equity Investment
Pinjaman diberikan - neto	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	6.232.662	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	6.213.517	Loans - net
Piutang bunga	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	62.905	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	62.905	Accrued interest income

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**37. DAMPAK PENERAPAN AWAL PSAK NO. 71 DAN
NO. 73 (lanjutan)**

PSAK No. 71 (lanjutan)

**Klasifikasi dan pengukuran Aset Keuangan
(lanjutan)**

	PSAK/SFAS No. 55	
	Klasifikasi/ Classification	Jumlah/ Amount
Aset keuangan (lanjutan)		
	Aset pada nilai wajar melalui laba rugi/ Assets at fair value through profit or loss	44.290
Tagihan derivatif		
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	12.737
Aset lain-lain - neto		
		11.904.233

**37. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS
NO. 71 AND NO. 73 (continued)**

SFAS No. 71 (continued)

**Classification and measurement of Financial
Assets (continued)**

	PSAK/SFAS No. 71		
	Klasifikasi/ Classification	Jumlah/ Amount	
	Aset keuangan ukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Financial assets at fair value through other comprehensive income		Financial assets (continued)
		44.290	Derivative receivables
	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	12.737	Other assets - net
		11.901.572	

Penurunan Nilai Instrumen Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dihitung kembali sesuai dengan ketentuan transisi PSAK No. 71 pada tanggal 1 Januari 2020 dan perbedaan yang dihasilkan sejumlah Rp22.563 didebitkan ke saldo awal laba pada tanggal 1 Januari 2020.

Impairment of Financial Instruments

The allowance for impairment losses for financial instruments was recalculated in accordance with transitional provisions of SFAS No. 71 as of January 1, 2020 and the resulting difference of Rp22,563 was debited to the retained earnings balance as of January 1, 2020.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. DAMPAK PENERAPAN PSAK NO. 71 DAN NO. 73
(lanjutan)

PSAK No. 71 (lanjutan)

Penurunan Nilai Instrumen Keuangan (lanjutan)

Berikut ini menggambarkan dampak atas transisi PSAK No. 71 pada laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020:

37. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS NO. 71 AND NO. 73 (continued)

SFAS No. 71 (continued)

Impairment of Financial Instruments (continued)

The following reflects the effect that the transition to SFAS No. 71 has had on the statement of financial position as of January 1, 2020:

	Saldo sebelum penerapan PSAK No.71/ Balance before adoption of SFAS No.71	Klasifikasi dan pengukuran/ Classification and measurement	Kerugian kredit ekspek- tasi/ Expected credit losses	Saldo setelah penerapan PSAK No.71/ Balance after adoption of SFAS No.71	
ASET					ASSETS
Kas dan setara kas	2.429.067	-	(199)	2.428.868	Cash and cash equivalents
Efek-efek - neto	2.732.936	19.569	(2.886)	2.749.619	Securities - net
Investasi saham	389.636	-	-	389.636	Equity investments
Pinjaman diberikan - neto	6.232.662	-	(19.145)	6.213.517	Loans - net
Tagihan derivatif	44.290	-	-	44.290	Derivative receivables
Piutang bunga	62.905	-	-	62.905	Accrued interest income
Beban dibayar dimuka	8.593	-	-	8.593	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	449	-	-	449	Prepaid taxes
Aset tetap - neto	293.507	-	-	293.507	Property and equipment - net
Aset pajak tangguhan	86.735	(896)	5.641	91.480	Deferred tax assets
Beban tangguhan	3.658	-	-	3.658	Deferred charges
Aset lain-lain - neto	26.622	-	-	26.622	Other assets - net
TOTAL ASET	12.311.060	18.673	(16.589)	12.313.144	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas derivatif	39.670	-	-	39.670	Derivative liabilities
Utang lain-lain	8.728	-	-	8.728	Other payables
Utang pajak	1.676	-	-	1.676	Taxes payable
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	37.985	-	-	37.985	Accrued expenses and other liabilities
Pendapatan diterima dimuka	4.388	-	-	4.388	Unearned revenue
Liabilitas imbalan kerja	26.327	-	-	26.327	Employee benefits obligation
Pinjaman diterima	4.713.745	-	-	4.713.745	Fund borrowings
Surat utang yang diterbitkan	2.183.064	-	-	2.183.064	Debt securities issued
Pinjaman subordinasi	3.142.918	-	-	3.142.918	Subordinated loans
TOTAL LIABILITAS	10.158.501	-	-	10.158.501	TOTAL LIABILITIES

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. DAMPAK PENERAPAN PSAK NO. 71 DAN NO. 73
(lanjutan)

PSAK No. 71 (lanjutan)

Penurunan Nilai Instrumen Keuangan (lanjutan)

Berikut ini menggambarkan dampak atas transisi PSAK No. 71 pada laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan):

	Saldo sebelum penerapan PSAK No.71/ Balance before adoption of SFAS No.71	Klasifikasi dan pengukuran/ Classification and measurement	Kerugian kredit ekspek- tasian/ Expected credit losses	Saldo setelah penerapan PSAK No.71/ Balance after adoption of SFAS No.71
EKUITAS				
Modal saham	2.000.000	-	-	2.000.000
Tambahan modal disetor	29.800	-	-	29.800
Penghasilan komprehensif lain - neto	5.336	18.515	333	24.184
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	(29.752)	-	-	(29.752)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	26.465	-	-	26.465
Belum ditentukan penggunaannya	120.710	158	(16.922)	103.946
TOTAL EKUITAS	2.152.559	18.673	(16.589)	2.154.643
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12.311.060	18.673	(16.589)	12.313.144

PSAK No. 73

Berikut adalah dampak transisi PSAK No. 73 pada laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020:

	Saldo sebelum penerapan PSAK No. 73/ Balance before adoption of SFAS No. 73	Dampak PSAK No. 73/ Impact of SFAS No. 73	Saldo setelah penerapan PSAK No. 73/ Balance after adoption of SFAS No. 73
Aset hak-guna	-	1.295	1.295
Utang lain-lain	-	1.295	1.295
Liabilitas sewa	-	1.295	1.295

37. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS
NO. 71 AND NO. 73 (continued)

SFAS No. 71 (continued)

Impairment of Financial Instruments (continued)

The following reflects the effect that the transition to SFAS No. 71 has had on the statement of financial position as of January 1, 2020 (continued):

EQUITY
Capital stock
Additional paid-in-capital
Other comprehensive income - net
Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges - net
Retained earnings
Appropriated
Unappropriated
TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

SFAS No. 73

The following reflects the transition impact of SFAS No. 73 on the statement of financial position as of January 1, 2020:

Right-of-use assets
Other payables
Lease liabilities

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

38. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Aktivitas investasi dan pendanaan non-kas adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2020	2019
Kenaikan efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dari perubahan nilai wajar	21.423	33.196
Kenaikan aset lain-lain dari beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	1.349	617
Kenaikan aset tetap dari beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	2.635	-

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

	1 Januari/ January 1, 2020	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange	Lainnya/ Others	31 Desember/ December 31, 2020	
Surat utang yang diterbitkan	2.183.064	535.000	-	17.169	2.735.233	Debt securities issued
Pinjaman diterima	4.713.745	650.000	20.400	(5.352)	5.378.793	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	3.142.918	967.771	41.639	4.994	4.157.322	Subordinated loans
	10.039.727	2.152.771	62.039	16.811	12.271.348	

	1 Januari/ January 1, 2019	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange	Lainnya/ Others	31 Desember/ December 31, 2019	
Surat utang yang diterbitkan	1.725.765	475.000	-	(17.701)	2.183.064	Debt securities issued
Pinjaman diterima	3.591.557	1.177.250	(37.150)	(17.912)	4.713.745	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	3.037.409	199.502	(107.530)	13.537	3.142.918	Subordinated loans
	8.354.731	1.851.752	(144.680)	(22.076)	10.039.727	

38. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Non-cash investing and financing activities are as follows:

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Tahun 2021

Perusahaan telah menerbitkan dan menawarkan Surat Utang Senior Tanpa Jaminan dalam jumlah nominal sebesar USD150.000.000 dan telah tercatat di Singapore Stock Exchange (SGX) pada tanggal 28 Januari 2021 sebagai bagian dari USD500.000.000 Euro Medium Term Note Programme yang mendapatkan peringkat "BBB" oleh Fitch Rating.

39. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Year 2021

The Company had issued and offered Senior Unsecured Notes with nominal amounting to US\$150,000,000 and was listed on the Singapore Stock Exchange (SGX) on January 28, 2021 under the US\$500,000,000 Euro Medium Term Note Programme which were rated "BBB" by Fitch Rating.

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

Euro Medium Term Note (EMTN) Programme
Tahun 2021 (lanjutan)

Penggunaan dana dari penerbitan Surat Utang tersebut akan digunakan untuk *green projects* yang memenuhi syarat dan/atau proyek sosial yang memenuhi syarat untuk surat utang berkelanjutan.

39. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Year
2021 (continued)

The use of the proceeds from the issuance of the Notes will be used towards the eligible green projects and/or eligible social projects for sustainability bonds

40. PENYELESAIAN DAN PERSETUJUAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 15 Februari 2021.

40. COMPLETION AND APPROVAL OF THE
FINANCIAL STATEMENTS

The Company's management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were completed and authorized for issuance by the Board of Directors of the Company on February 15, 2021.

2020
Laporan Tahunan
Annual Report



PT Indonesia Infrastructure Finance

Prosperity Tower Floor 53rd-55th
District 8, Sudirman Central
Business District (SCBD), Lot 28
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190

T. +62 21 5082 6600
F. +62 21 5082 6601
E. info@iif.co.id

 www.iif.co.id

 **Indonesia Infrastructure Finance**
 **@pt_IIF**